

Mendorong Pertumbuhan Melalui *Transformasi Berkelanjutan*

Empowering Growth Through Sustainable Transformation

PRESISI

2024

Laporan Tahunan
Annual Report

PT PP Presisi Tbk

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan Serta Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Information Presented in the Annual Report and Disclaimer

Penyusunan Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk, disebut juga "PP Presisi" atau "Perusahaan" tahun 2024 menggunakan referensi dan standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana PP Presisi berdomisili dan mengembangkan kegiatan operasi dan bisnisnya. Parameter dan kriteria standar mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyampaian laporan tahunan PP Presisi juga mengelaborasi beberapa dokumen Perusahaan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Laporan Keuangan teraudit, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang di dalamnya mencakup Tingkat Kesehatan Perusahaan. Penggunaan dokumen ini diharapkan memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi PP Presisi dalam menghadirkan informasi dan data yang valid.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PP Presisi tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PP Presisi", "Perusahaan", atau "Perseroan" yang mengacu pada PT PP Presisi Tbk. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan PT PP Presisi Tbk.

Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perusahaan yaitu www.pp-presisi.co.id. Selain itu, laporan ini juga memberikan penanda kinerja untuk mempermudah pembaca dan pengguna laporan, di mana terdapat indikator berwarna "hijau" untuk memberikan penanda kenaikan, dan indikator berwarna "biru" untuk memberikan penanda penurunan.

The preparation of the 2024 Annual Report of PT PP Presisi Tbk, hereinafter referred to as "PP Presisi" or "the Company," is based on the applicable references and standards in Indonesia, where PP Presisi is domiciled and conducts its operational and business activities. The standards and parameters used refer to the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies, and OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

PP Presisi's annual report also elaborates several corporate documents, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the audited Financial Statements, and the Performance Evaluation Report, which includes the Company's Health Level. The use of these documents is intended to provide a strong argumentative foundation for PP Presisi in presenting valid information and data.

This Annual Report contains various statements regarding the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in accordance with prevailing laws and regulations. These statements are subject to risks, uncertainties, and potential deviations from actual developments. The forward-looking statements presented in this Annual Report are prepared based on assumptions concerning current conditions and projections of future developments in the Company's business environment. PP Presisi cannot guarantee that the verified documents will lead to definite outcomes.

The terms "PP Presisi," or "the Company" in this Annual Report refer to PT PP Presisi Tbk. In addition, the term "We" is also used at times with the same function, for the sake of simplicity in referring to PT PP Presisi Tbk.

To reach a broader audience and in accordance with applicable regulations, this report is presented in 2 (two) languages: Indonesian and English. The Annual Report is available for viewing and download on the Company's official website at www.pp-presisi.co.id. Furthermore, this report includes performance indicators to assist readers and report users, with a green indicator signifying an increase and a blue indicator signifying a decrease.

Tema Sampul dan Kesinambungan Tema

Cover Theme and Theme Continuity

Pengembangan lini bisnis jasa pertambangan membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Keputusan perluasan sasaran pasar pertambangan khususnya atas kebutuhan konstruksi menciptakan nilai tambah dalam optimalisasi aset alat berat yang dimiliki PP Presisi. Di samping itu, Perusahaan juga terus memperkuat operasi dan bisnis yang telah dijalani selama ini, khususnya di sektor konstruksi sipil yang telah mewarnai perjalanan sejak pendirian.

Untuk itu, transformasi terus dilakukan, baik dalam rangka memperkuat bisnis konstruksi sipil yang telah berjalan, maupun lini bisnis jasa pertambangan. Sejumlah program telah dikembangkan, seperti pengembangan kompetensi pekerja terkait bisnis pertambangan, optimalisasi aset alat berat yang sesuai dengan kebutuhan pertambangan, standardisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memenuhi acuan sektor pertambangan, hingga perumusan proses bisnis yang efektif dan efisien.

The development of the mining construction services business line has yielded encouraging results. The decision to expand the target market in the mining sector, particularly in response to construction needs, has created added value by optimizing the utilization of PP Presisi's heavy equipment assets. At the same time, the Company continues to strengthen its existing operations and business activities, especially in the civil construction sector, which has been an integral part of its journey since establishment.

To support this, transformation efforts are consistently carried out, both to reinforce the ongoing civil construction business and to enhance the mining construction services line. Several programs have been developed, including competency development for workers in mining-related business, optimization of heavy equipment assets suited to mining needs, standardization of Occupational Health and Safety (OHS) in accordance with mining sector benchmarks, and the formulation of effective and efficient business processes.

Mendorong Pertumbuhan melalui *Transformasi Berkelanjutan*

Empowering Growth Through Sustainable Transformation



2023

Creating Future Path Through *Business Turnaround*



Mengembangkan bisnis tentu tak lepas dari kemampuan untuk mengambil kesempatan yang ada. Memanfaatkan setiap peluang dan potensi menjadi salah satu hal mendasar untuk dapat mewujudkan keberlanjutan, khususnya pada aspek pengembangan bisnis sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas Perusahaan.

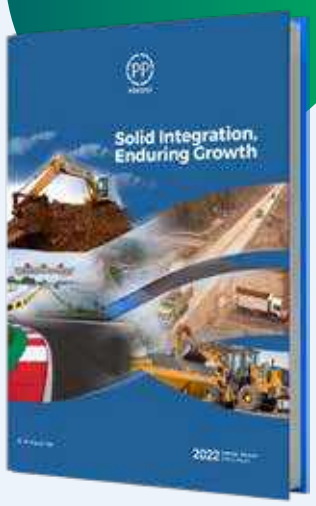
Berlandaskan filosofi tersebut, PP Presisi mengambil kesempatan untuk mengembangkan bisnis pada lini Jasa Pertambangan. Inisiatif ini telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, dan akan menjadi bagian penting dari proses PP Presisi untuk dapat tumbuh berkembang. Terutama dengan modal yang telah dimiliki, penguatan bisnis pada lini Jasa Pertambangan yang memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis yang selama ini dijalani Di sisi lain, divestasi pada beberapa aset dengan pemeliharaan yang tinggi menjadi nilai tambah bagi perampingan bisnis yang akan berfokus pada margin yang baik.

Developing a business is inseparable from the ability to take advantage of existing opportunities Utilizing every opportunity and potential is one of the fundamental things in realizing sustainability, particularly in the aspect of business development following the Company's business capacity and capabilities.

Based on this philosophy, PP Presisi took the opportunity to develop business in the Mining Services line. The initiative has been carried out in the last few years and will be essential to PP Presisi's growth process. Especially with the owned capital, strengthening the business in the Mining Services line, which has characteristics that are not very different from the business that has been running so far. On the other hand, divesting several high-maintenance assets is an added value for streamlining a business that will focus on good margins.

2022

Solid Integration, Enduring Growth



Integrasi yang solid, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi kunci dan faktor penting untuk mendorong penjualan dan memperluas pangsa pasar. Berbekal aspek fundamental yang telah dibangun dengan kokoh serta fokus Perseroan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, PPRE optimis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan secara strategis dapat menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan secara berkelanjutan.

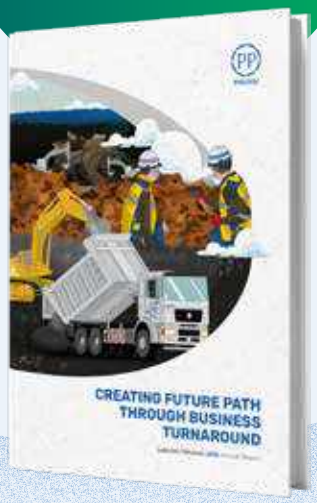
PPRE terus berupaya untuk memperkuat performa terbaiknya dengan tetap memastikan mutu dan kualitas produk dan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan budaya kerja, serta peningkatan efektivitas proses kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan strategis jangka panjang Perseroan. Seluruh upaya ini tentu tak lepas dari komitmen PPRE untuk senantiasa menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa-masa mendatang.

Solid integration to achieve enduring growth is a key and important factor in driving sales and expanding market share. Equipped with fundamental aspects that have been solidly built and its focus on sustainable growth, PPRE is optimistic that policies that have been strategically formulated can create added value for Shareholders and Stakeholders sustainably.

PPRE strives to strengthen its best performance while ensuring the quality of products and services, improving the quality of human capital, developing work culture, and increasing the effectiveness of work processes through optimizing the use of information systems and technology to achieve the Company's long-term strategic goals. These efforts cannot be separated from PPRE's commitment to creating added value for Shareholders and other stakeholders and contributing to Indonesia's economic growth in the future.

2021

Creating Future Path Through *Business Turnaround*



Tantangan tahun 2021 tidak menyurutkan langkah PT PP Presisi Tbk untuk terus bertumbuh dan berkembang. Perseroan terus berupaya memanfaatkan setiap potensi yang ada di tengah berbagai tantangan, kemudian bertindak dengan cepat untuk mengelolanya menjadi sumber pertumbuhan yang baru dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalisasi keunggulan, yakni kepemilikan alat berat dalam jumlah besar serta sumber daya manusia yang kompeten, Perseroan memasuki lini bisnis baru jasa kontraktor pertambangan nikel. Lini bisnis ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan Perseroan di tahun 2021, bahkan melebihi target.

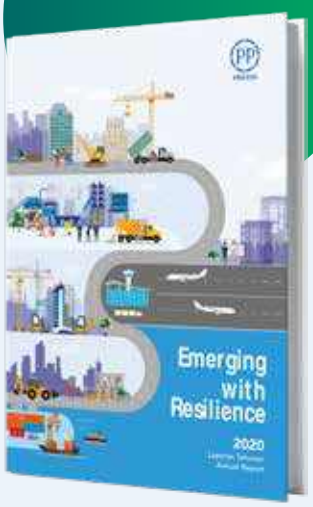
Kinerja yang sangat baik ini diyakini masih terus dicapai pada tahun-tahun ke depannya, sejalan dengan program pemerintah untuk melakukan hilirisasi dan pembangunan smelter tambang mineral. Selain itu, kinerja Perseroan untuk pekerjaan konstruksi sipil pun terus bertumbuh sebagai hasil dari pengendalian mutu yang terus terjaga serta peningkatan sinergi dengan entitas
usaha di dalam Grup PP maupun non-grup. Perseroan berhasil meningkatkan posisi dari subkontraktor menjadi kontraktor utama pada beberapa pekerjaan konstruksi milik perusahaan swasta. Seluruh pencapaian ini mendorong Perseroan untuk terus mengoptimalkan lini bisnis civil work, production plant, dan mining services untuk menyerap potensi pertumbuhan pasar ke depannya.

The challenges in 2021 did not weaken PT PP Presisi Tbk's steps to continue growing and developing. The Company continues to strive to take advantage of every existing potential amidst various challenges then act quickly to mold it into a new and sustainable source of growth. By optimizing our advantages, i.e., the ownership of heavy equipment in large quantities and competent Human Capital, the Company has entered a new business line, i.e., nickel mining contractor services. The business line spectacularly contributed significantly to the Company's operational and financial performance growth in 2021, even exceeding the target.

It is believed that the excellent performance will continue to prosper in the years to come, in line with the government's program to perform downstreaming and building mineral mining smelters. In addition, the Company's performance in civil construction works continues to grow due to maintained quality control and increased synergy with business entities within PP Group and non-groups. The Company has improved its position from sub-contractor to main contractor in several construction works owned by private companies. These achievements have encouraged the Company to continue optimizing the civil work, production plant, and mining services business lines to absorb the market growth potential in the future.

2020

Emerging With *Resilience*



Sebagai akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dan ketidakpastian bagi seluruh sektor usaha, termasuk sektor konstruksi. Namun, di tengah iklim usaha yang sangat tidak kondusif tersebut, PP Presisi tetap memperkuat layanan usaha dengan melakukan klasterisasi lini bisnis lama menjadi 5 lini bisnis baru, meliputi civil work, mining services, structure work, production plant, dan heavy equipment rental, sebagai upaya untuk terus tumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berkat klasterisasi lini bisnis tersebut, Perseroan berhasil meraih kepercayaan pelanggan di pasar eksternal dan sukses mendapatkan berbagai proyek penting nasional.

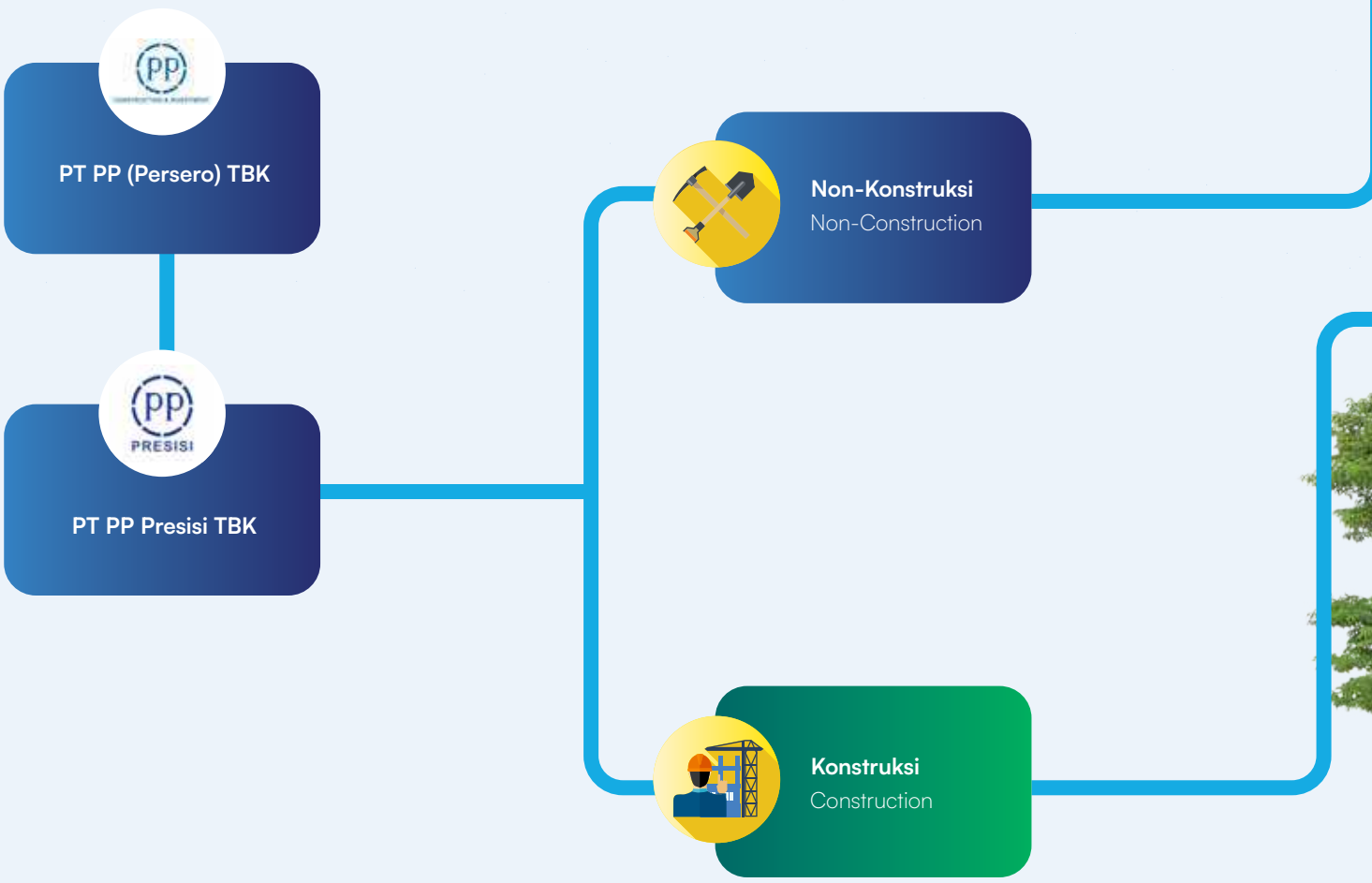
As a result of the COVID-19 pandemic that has hit the world, 2020 was a year full of challenges and uncertainties in all business sectors, including the construction sector. However, during a very unconducive business climate, PP Presisi continues to strengthen its business services by clustering old business lines into five new business lines, consisting of civil work, mining service, structure work, production plant, and heavy equipment rental, to continue growing and reach a broader market. Thanks to the clustering of its business line, the Company has successfully gained customer trust in the external market and acquired several important national projects.

Mengembangkan Lini Bisnis PP Presisi dalam Sinergi Kelompok Usaha PTPP

Expanding PP Presisi's Business Lines through Synergy within the PTPP Group

"Berdiri sejak tahun 2004, PP Presisi kini telah menjadi bagian penting dari perkembangan bisnis kelompok usaha PTPP dan telah mengembangkan lini bisnisnya baik di sektor konstruksi maupun non konstruksi."

"Established in 2004, PP Presisi has grown to become an integral part of the PTPP Group's business development, expanding its business lines across both construction and non-construction sectors."



Heavy Equipment Rental

Penyewaan alat berat merupakan lini bisnis PP Presisi sebelum melakukan transformasi bisnis. Sampai saat ini, PP Presisi tetap mempertahankan bisnis tersebut. Perseroan memberikan jasa yang lengkap dengan memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan dan prima, perawatan berjangka, serta *Quick Response Unit* yang selalu siap dihubungi selama 24 jam untuk keamanan dan keselamatan proyek konstruksi.

Heavy equipment rental was a core business line of PP Presisi before the Company underwent its business transformation. To this day, PP Presisi continues to maintain this business. The Company provides comprehensive services by ensuring the availability of reliable and well-maintained equipment, scheduled maintenance, as well as a Quick Response Unit that is always available 24/7 for the safety and security of construction projects.

Mining Construction Services

Diversifikasi pada bidang jasa pertambangan secara komprehensif, mulai dari *overburden, ore hauling,* hingga *barging*. Didukung oleh pengalaman pada bidang pertambangan, baik tambang batubara maupun mineral seperti nikel, PP Presisi secara berkesinambungan mengoptimalkan aset dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan.

Comprehensive diversification in the mining services sector, ranging from overburden, ore hauling, to barging. Supported by experience in both coal and mineral mining, such as nickel, PP Presisi consistently optimizes its assets and equipment to deliver the best services to every customer.

Civil Work

Pekerjaan proyek infrastruktur, di antaranya pekerjaan proyek jalan, bendungan, dan dermaga. Pada masing-masing proyek, Perseroan melakukan pekerjaan pembukaan lahan, *cut and fill*, pengerasan lapisan jalan, beton, serta *rigid/flexible pavement*.

Infrastructure project works, including road, dam, and pier projects. In each of these projects, the Company undertakes land clearing, cut and fill, road layer compaction, concrete works, as well as rigid/flexible pavement construction.

Keunggulan Armada Alat Berat

Heavy Equipment Fleet Advantage

"Kekuatan dan keunggulan armada alat berat menjadi bagian penting dari perkembangan rantai nilai PP Presisi. Melalui keunggulan ini, PP Presisi dengan percaya diri memasuki lapangan bisnis baru seperti Jasa Kontraktor Pertambangan."

"The strength and excellence of the heavy equipment fleet are crucial components in the development of PP Presisi's value chain. With this advantage, PP Presisi confidently ventures into new business line, such as Mining Contractor Services."

1.573 Klaster Truck Truck Clusters	**650** Klaster Earthwork Earthwork Clusters	**137** Klaster Support Unit Support Unit Clusters	**167** Klaster Concrete Set Concrete Set Clusters	**89** Klaster Tc & Ph Tc & Ph Clusters
167 Klaster Fix Plant Fix Plant Clusters	**41** Klaster Asphalt Set Asphalt Set Clusters	**22** Klaster Crane Crane Clusters	**13** Klaster Special Unit Special Unit Clusters	**11** Klaster Foundation Foundation Clusters



Pencapaian 2024

2024 Achievements

“Transformasi menciptakan dampak positif yang akan membawa PP Presisi tumbuh berkelanjutan di masa mendatang.”

“The transformation has created a positive impact that will drive PP Presisi’s sustainable growth in the future.”

Rp6,82 Triliun

Rp6,82 Trillion

Perolehan Nilai Kontrak Baru

New Contract Value Acquisition

Meningkat 0,99% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,75 triliun. Kenaikan terutama terjadi pada perolehan kontrak baru atas lini jasa pertambangan yang tumbuh hingga 139,13%, dari Rp2,00 triliun menjadi Rp4,80 triliun.

Increased by 0.99% compared to the previous year, which was IDR 6.75 trillion. The increase was primarily driven by the acquisition of new contracts in the mining services line, which grew by 139.13%, from IDR 2.00 trillion to IDR 4.80 trillion.

Rp3,79 Triliun

Rp 3.79 Trillion

Jumlah Pendapatan

Total Revenue

Mengalami kenaikan 11,47% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,40 triliun. kenaikan terutama terjadi pada perolehan kontrak baru atas lini jasa pertambangan yang tumbuh hingga 7,68% dari Rp4,45 triliun menjadi Rp4,80 triliun. Di tahun 2024 PP Presisi juga secara perdana mencatatkan segmen mining sebagai segmen operasi baru dengan pendapatan sebesar Rp75,93 miliar.

ncreased by 11.47% from the previous year of Rp3.40 trillion. The increase was mainly driven by the acquisition of new contracts in the mining services line, which grew by 7.68% from Rp4.45 trillion to Rp4.80 trillion. In 2024, PP Presisi also recorded the mining segment as a new operating segment for the first time, with revenue of Rp75.93 billion.

Rp194,09 Miliar
Rp194,09 Billion

Laba Bersih
Net Profit

Tumbuh 12,33% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp172,78 miliar. Kenaikan ini diimbangi dengan meningkatnya laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai laba acuan bagi pembagian dividen kepada pemegang saham, yang tumbuh 12,62%, dari Rp80,22 miliar menjadi Rp90,34 miliar; serta laba per saham dasar yang meningkat 12,61%, dari Rp7,85 per saham menjadi Rp8,84 per saham.

This represents a 12.33% growth compared to the previous year, which was Rp 172.78 billion. This increase is also reflected in the net profit attributable to the owners of the parent entity, which serves as the basis for dividend distribution to shareholders, growing by 12.62%, from Rp 80.22 billion to Rp 90.34 billion; as well as basic earnings per share, which increased by 12.61%, from Rp 7.85 per share to Rp 8.84 per share.

Rp7,65 Triliun
Rp7,65 Trillion

Jumlah Aset
Total Assets

Meningkat 6,75% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,16 triliun.
Increased by 6.75% compared to the previous year, which stood at Rp 7.16 trillion.

Rp4,15 Triliun
Rp4,15 Trillion

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Meningkat 7,91% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,85 triliun.
Increased by 7.91% compared to the previous year, which stood at Rp 3.85 trillion.

Rp3,49 Triliun
Rp3,49 Trillion

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Meningkat 5,41% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,31 triliun.
Increased by 5.41% compared to the previous year, which stood at Rp 3.31 trillion.

Rp268,06 Miliar
Rp268,06 Billion

Saldo Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at End of Year

Tumbuh 69,64% dari tahun 2023 sebesar Rp158,01 Miliar. Kenaikan ini diimbangi dengan meningkatnya laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai laba acuan bagi pembagian dividen kepada pemegang saham, yang tumbuh 12,62%, dari Rp80,22 miliar menjadi Rp90,34 miliar; serta laba per saham dasar yang meningkat 12,61%, dari Rp7,85 per saham menjadi Rp8,84 per saham.

Grew by 69.64% from 2023, which stood at Rp158.01 billion. This increase was supported by the rise in profit for the year attributable to owners of the parent entity—as the basis for dividend distribution to shareholders—which grew by 12.62%, from Rp80.22 billion to Rp90.34 billion; as well as an increase in basic earnings per share by 12.61%, from Rp7.85 per share to Rp8.84 per share.

5,12%
Marjin Laba Bersih
Net Profit Margin

33,09%
Marjin EBITDA
EBITDA Margin

2,54%
Imbal Hasil Aset
Return on Assets

5,56%
Imbal Hasil Ekuitas
Return on Equity

1,71
Kali | Times
Rasio Lancar
Current Ratio

0,12
Kali | Times
Rasio Kas
Cash Ratio

0,51
Kali | Times
Kewajiban Berbunga terhadap Aset
Interest-Bearing Liabilities to Assets

0,54
Kali | Times
Liabilitas terhadap Aset
Liabilities to Assets



Daftar Isi
Table of content

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan Serta Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Information Presented in the Annual Report and Disclaimer 2

Tema Sampul dan Kesinambungan Tema
Cover Theme and Theme Continuity 3

Mengembangkan Lini Bisnis PP Presisi dalam Sinergi Kelompok Usaha PTPP
Expanding PP Presisi's Business Lines through Synergy within the PTPP Group 6

Keunggulan Armada Alat Berat
Heavy Equipment Fleet Advantage 8

Pencapaian 2024
2024 Achievements 9

Performa 2024
Performance 2024

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Highlights of Key Financial Data 22

Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Organisasi
Highlights of Business and Organizational Performance 30

Ikhtisar Saham
Share Highlights 32

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi
Highlights of Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds 35

Informasi tentang Sumber Pendanaan Lainnya
Information Regarding Other Funding Sources 35

Kilas Peristiwa 2024
2024 Events Highlights 36

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification 38

Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report 42

Laporan Direksi
Board of Directors Report 57

Pernyataan Laporan Tahunan Telah Ditinjau dan Disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi
The Annual Report Statement has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors. 70

Pernyataan Laporan Tahunan Telah Ditinjau dan Disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi
The Annual Report Statement has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors. 71

Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas dan Informasi Umum Perusahaan
Company Identity and General Information 74

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History 75

Sejarah Singkat Perkembangan Perusahaan
Brief History of Company Development 75

Informasi tentang Perubahan Nama dan Status Perusahaan
Information on Changes to the Company Name and Status 77

Jejak Langkah
Milestones 80

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture 84

Reviu Visi dan Misi oleh Manajemen
Vision and Mission Review by Management 85

Budaya dan Nilai-nilai Utama Perusahaan
Corporate Culture and Values 86

Makna Logo Perusahaan
Meaning of Company Logo 87

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan Jasa
Business Activities, Products and Services 88

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan
Business Activities, Products and Services 88

Surat Izin Usaha
Business Licence 95

Produk dan Jasa
Products and Services 98

Segmen atau Lini Bisnis
Segment or Line of Business 99

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Business Network and Operational Area 104

Keanggotaan dalam Asosiasi
Membership in Associations 106

Struktur Organisasi
Organizational Structure 106

Susunan dan Profil Dewan Komisaris
Composition and Profile of the Board of Commissioners 108

Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners 108

Susunan dan Profil Dewan Direksi
Structure and Profile of the Board of Directors 116

Kronologis Perubahan Susunan Direksi
Chronology of Changes in the Board of Directors 116

Pejabat Eksekutif
Executive Officers 124

Demografi Sumber Daya Manusia
Human Capital Demographics 133

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and Listing 140

Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information 141

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition 141

Komposisi Pemegang Saham
Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Information of Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors 142

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir
Information on Major/Controlling Shareholders up to Ultimate Shareholder Entities 146

Struktur Grup dan Kelompok Usaha
Group and Business Group Structure 150

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Ventura Bersama
List of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures 151

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Issuance and Listing 153

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions 154

Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company's Website 159

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Analysis and Management Discussion on Company Performance

Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Overview 162

Perekonomian Indonesia
Indonesian Economy 164

Inisiatif dan Kebijakan Strategis Tahun 2024
Initiatives and Strategic Policies for 2024 166

Strategi dan Kebijakan Pengembangan di Tahun 2024
Development Strategy and Policy in 2024 166

Rincian Masalah yang Muncul di Sepanjang Tahun 2024 dan Langkah Penyelesaian yang Dilakukan
Issues Arising in 2024 and Resolution Measures Taken 168

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment 169

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen Konstruksi
Construction Segment Operations and Business Model 173

Strategi Bisnis Segmen Konstruksi
Business Strategy of the Construction Segment 173

Konstruksi
Construction 173

Kinerja dan Produktivitas Segmen Konstruksi
Performance and Productivity of the Construction Segment 174

Profitabilitas Segmen Konstruksi
Profitability of the Construction Segment 175

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen ***Ready Mix***
Ready Mix Segment Operations and Business Model 176

Strategi Bisnis Segmen ***Ready Mix***
Business Strategy of the Ready Mix Segment 176

Kinerja dan Produktivitas Segmen ***Ready Mix***
Performance and Productivity of the Ready-Mix Segment 176

Ready Mix
Profitabilitas Segmen *Ready Mix*
Profitability of the Ready-Mix Segment 177

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen Penyewaan Alat Berat
Heavy Equipment Rental Segment Operations and Business Model 178

Strategi Bisnis Segmen *Ready Mix*
Business Strategy of the Heavy Equipment Rental Segment 178

Kinerja dan Produktivitas Segmen Penyewaan Alat Berat
Performance and Productivity of the Heavy Equipment Rental Segment 178

Penyewaan Alat Berat
Heavy Equipment Rental 178

Profitabilitas Segmen Penyewaan Alat Berat
Profitability of the Heavy Equipment Rental Segment 179

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen *Mining*
Mining Segment Operations and Business Model 180

Strategi Bisnis Segmen *Mining*
Business Strategy of the Mining Segment 180

Mining
Kinerja dan Produktivitas Segmen *Mining*
Performance and Productivity of the Mining Segment 181

Profitabilitas Segmen *Mining*
Profitability of the Mining Segment 182

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects 183

Strategi Pemasaran
Marketing Strategy 183

Informasi tentang Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain
Information regarding National Strategic Projects or Other Assignments 184

Penelitian dan Pengembangan
Research and Development 185

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis 187

Aset
Assets 187

Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Information Presentation Standards and Compliance with Financial Accounting Standards (SAK) 187

Aset Aset Lancar
Current Assets 189

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets 193

Liabilitas
Liabilities 197

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities 199

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities 202

Ekuitas
Equity 204

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Statement of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income 208

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Statement of Consolidated Cash Flow 222

Kemampuan Membayar Utang
Debt Repayment Ability 226

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectability Ratio 228

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure 230

Kebijakan dan Dasar Pemilihan Struktur Modal
Policy and Basis for Capital Structure Selection 230

Struktur Modal
Capital Structure 230

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment 232

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure 233

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Subsequent to the Date of the Accountant's Report 233

Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing
Information on the Impact of Foreign Exchange Rates 233

Pencapaian Target Tahun 2024
Achievement of 2024 Targets 234

Asumsi-asumsi dalam Menentukan Target Tahun 2024
Assumptions in Setting the 2024 Targets 234

Pencapaian Target Tahun 2024
Target Achievement in 2024 235

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Financial Health Level 238

Prospek Usaha Tahun 2025
Business Prospects for 2025 239

Rencana Kerja dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2025
Company Work Plan and Performance Projection for 2025 240

Proyeksi Kinerja Tahun 2025
Performance Projections for 2025 240

Proyeksi Kinerja Tahun 2025
Performance Projections for 2025 241

Strategi dan Rencana Kerja Tahun 2025
Strategy and Work Plan for the Year 2025 244

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution 249

Kebijakan Dividen
Dividend Policy 249

Pembagian Dividen
Dividend Distribution 249

Perpajakan dan PNBP: Kontribusi Terhadap Negara
Taxation and Non-Tax State Revenue (PNBP): Contribution to the State 251

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Fund Utilization from Public Offering 252

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha,Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring 254

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties 255

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events 265

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan
Changes in Legislation and Their Impact on Company Performance 266

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company 267

Peta Usaha dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Business Map and Long-Term Company Plan 268

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Commitment and Progress in Implementing Good Corporate Governance 272

Landasan Penerapan dan Implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
Foundation for the Application and Implementation of Corporate Governance Principles 272

Struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure and Process/Mechanism 284

Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Evaluation, Monitoring, and Quality Improvement 288

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of Code of Governance for Public Companies 292

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders and General Meeting of Shareholders 300

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 317

Komisaris Independen
Independent Commissioners 336

Direksi
Board of Directors 340

Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi
Information Transparency on the Board of Commissioners and Board of Directors 356

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Board of Commissioners and Board of Directors' Composition Diversity 356

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi,
Pemegang Saham Utama/Pengendali, dan Entitas Pemilik Akhir
Affiliation between Board of Commissioners, Board of Directors, ... 359

Major/Controlling Shareholders, and Ultimate Owner Entity 359

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Meetings 362

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi
Competency Development Programs for the Board of Commissioners and Board of Directors 403

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Nomination 406

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors' Performance 411

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration 418

Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja serta
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Long-Term Performance-Based Compensation Policy and Employee and/or Management Stock Option Plan 425

Pengungkapan Transaksi dan Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Disclosure of the Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership 425

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners 426

Komite Audit
Audit Committee 426

Komite Kepatuhan
Compliance Committee 459

Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Function 489

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners 489

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of the Board of Directors 498

Corporate Secretary
Corporate Secretary 498

Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Internal Audit
Internal Audit Unit 514

Fungsi ***Quality Control***
Quality Control Function 533

Fungsi ***Health, Safety & Environment***
Health, Safety & Environment Function 540

Fungsi Manajemen Risiko
Risk Management Function 547

Organ Eksternal: Akuntan Publik
External Body: Public Accountant 553

Pengendalian Internal
Internal Control 558

Sistem Pengendalian Internal Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Financial and Operational Internal Control Systems, and Compliance with Laws and Regulations 558

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kriteria ***Committee Of Sponsoring Organization*** (COSO)
Alignment of the Internal Control System with the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Criteria 559

Implementasi Sistem Pengendalian Internal
Implementation of the Internal Control System 560

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal
Effectiveness of Internal Control System Implementation 564

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
Statement of the Board of Commissioners and Directors on the Adequacy of the Internal Control System 565

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System 566

Prinsip Manajemen Risiko
Risk Management Principles 569

Proses Manajemen Risiko
Risk Management Process 571

Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee 574

Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi Risiko
Types of Risks and Risk Mitigation Efforts 575

Evaluasi Efektivitas Implementasi Sistem Manajemen Risiko
Evaluation of Risk Management System Implementation Effectiveness 577

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko
Statement of the Board of Commissioners and Directors on the Adequacy of the Risk Management System 578

Rencana Sistem Manajemen Risiko ke Depan
Future Risk Management System Plan 579

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance 580

Struktur Organisasi Teknologi Informasi PP Presisi
Organizational Structure of Information Technology PP Presisi 581

Sistem Informasi dan Aplikasi IT
Information System and IT Application 582

Perkara Penting
Important Points 590

Permasalahan Hukum
Legal Issues 590

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions 591

Pengungkapan Permasalahan Terkait Perpajakan
Disclosure of Taxation-Related Problems 591

Pengungkapan Permasalahan Terkait Lingkungan Hidup
Disclosure of Environment-Related Problems 591

Pengungkapan Permasalahan Terkait Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan
Disclosure of Problems Related to Industrial/Employment Relations 591

Kode Etik
Code of Ethics 592

Pokok-Pokok Kode Etik
Code of Ethics Principles 592

Komitmen Kode Etik
Code of Ethics Commitment 593

Bentuk Sosialisasi dan Upaya Penyebarluasan Kode Etik
Forms of Socialization and Efforts to Disseminate the Code of Ethics 594

Kepatuhan Terhadap Kode Etik
Compliance with the Code of Ethics 595

Upaya Penegakan Kode Etik
Code of Ethics Enforcement Efforts 596

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
Mechanism for Reporting Code of Ethics Violations 596

Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik
Types of Sanctions for Code of Ethics Violations 597

Kebijakan Benturan Kepentingan
Conflict of Interest Policy 598

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan
Number of Code of Ethics Violations and Sanctions Given 598

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*
Insider Trading Prevention Policy 599

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy 599

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Policy 601

Unit Pengelola Pelaporan Gratifikasi
Gratification Reporting Management Unit 603

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
Gratuity Reporting Mechanism 603

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Socialization of Gratification Control Policy 604

Laporan Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Report 604

Kebijakan tentang Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Suap/Donasi dan Lainnya
Policy on Giving and Receiving Gifts/Bribes/Donations and More 605

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Administrator's Wealth Report (LHKPN) 608

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Basic Principles of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) 608

Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Mandatory Report on the Wealth of State Officials 608

Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Administrator's Wealth Report Manager 609

Transparansi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat Perusahaan Tahun 2024
Transparency of the Assets of State Administrators of Company Officials in 2024 609

Kebijakan Pemberian Dana untuk Aktivitas Politik
Policy on Providing Funds for Political Activities 610

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Breach Reporting System 610

Pihak Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System Management 611

Ruang Lingkup Laporan Pelanggaran
Scope of Violation Report 611

Mekanisme Penyampaian dan Prosedur Pengelolaan Laporan Pelanggaran
Mechanism for Submission and Procedure for Managing Violation Reports 612

Pengelolaan Laporan Pengaduan dan Mekanisme Tindak Lanjut
Complaint Report Management and Follow-up Mechanism 613

Perlindungan Terhadap Pelapor
Protection Against Whistleblowers 615

Sanksi dan Apresiasi
Sanctions and Appreciation 615

Kebijakan Terhadap Kreditur
Policies Towards Creditors 616

Kebijakan Terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Policies Towards Creditors 616

Laporan Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting Report 616

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
Guidelines for the Procurement of Goods and Services 616

Ketentuan Umum
General Terms 617

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)
Compliance of Corporate Governance Implementation with the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 620

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
Implementation of the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) 651

Rujukan Keberlanjutan
Sustainability Reference

Rujukan Keberlanjutan
Sustainability Reference 708

Laporan Keuangan Teraudit
Audited Financial Statements

Performa 2024

Performance 2024



Ikhtisar Data Keuangan Penting

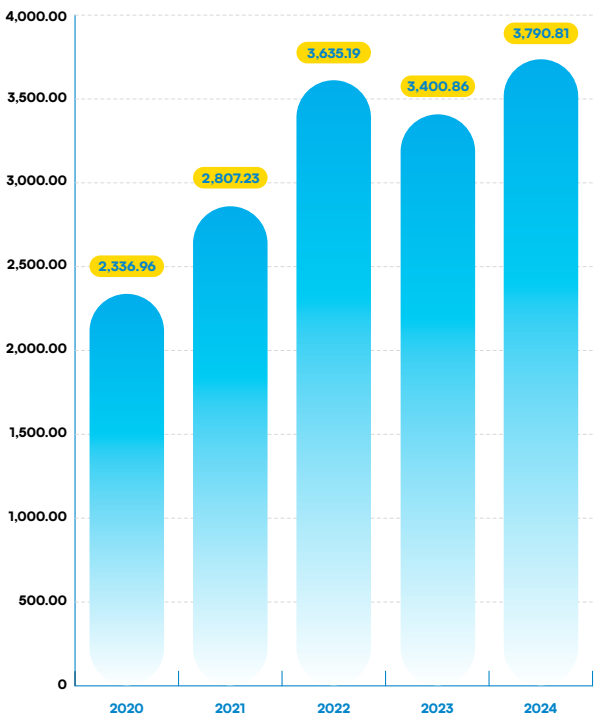
Highlights of Key Financial Data

Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

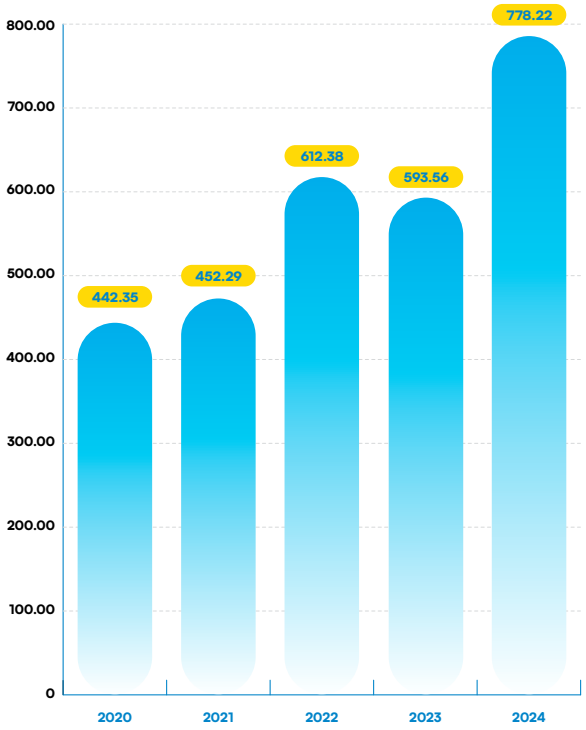
Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billions of Rupiah, unless otherwise stated	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Pendapatan Revenue	3.790,81	3.400,86	3.635,19	2.807,23	2.336,96	11,47	↑	12,85	↑
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(3.012,59)	(2.807,30)	(3.022,81)	(2.354,94)	(1.894,60)	7,31	↑	12,29	↑
Laba Kotor Gross Profit	778,22	593,56	612,38	452,29	442,35	31,11	↑	15,17	↑
Bagian Laba Ventura Bersama Share in profit of joint venture	-	14,71	34,06	79,71	51,44	-	↓	-	-
Beban Usaha Operating Expenses	(103,02)	(90,22)	(89,26)	(66,79)	(49,11)	14,19	↑	20,35	↑
Pendapatan/(Beban) Keuangan Finance Income/(Expenses)	(330,90)	(229,11)	(228,37)	(199,24)	(191,47)	44,43	↑	14,66	↑
Pendapatan/(Beban) Lainnya Other Income/(Expenses)	11,20	7,92	(33,64)	(37,21)	(67,15)	41,41	↑	n/a	-
Kerugian Penurunan Nilai Impairment losses	(56,90)	(18,68)	(1,15)	(2,32)	(4,58)	204,60	↑	87,74	↑
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(94,96)	(96,38)	(102,22)	(71,96)	(58,72)	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	203,63	181,79	192,94	156,80	127,34	12,01	↑	12,45	↑
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(9,53)	(9,01)	(11,28)	(9,99)	(11,46)	5,77	↑	(4,51)	↓
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	194,09	172,78	181,66	146,81	115,88	12,33	↑	13,76	↑
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	3,89	8,17	7,56	10,78	5,31	(52,39)	↓	(7,48)	↓

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	197,99	180,95	189,22	157,59	121,19	9,42	↑	13,06	↑
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Profit for the Year Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	90,34	80,22	100,75	76,93	58,57	12,62	↑		↑
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interest	103,76	92,57	80,91	69,88	57,31	12,09	↑		↑
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	95,46	85,75	106,05	83,93	62,34	11,32	↑	11,24	↑
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	102,52	95,20	83,16	73,66	58,85	7,69	↑	14,89	↑
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh) Basic Earnings Per Share (in full Rupiah)	8,84	7,85	9,85	7,52	5,73	12,61	↑	11,45	↑
EBITDA	1.254,58	1.020,25	1.067,53	938,89	907,53	22,97	↓	8,43	↓

Pendapatan | Rp-Miliar
Revenue | Rp-Billion

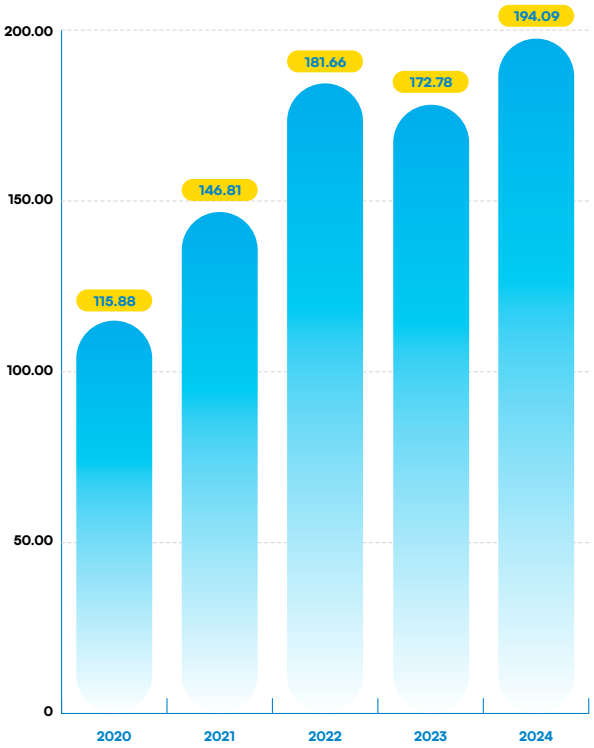


Laba Kotor | Rp-Miliar
Gross Profit | Rp-Billion



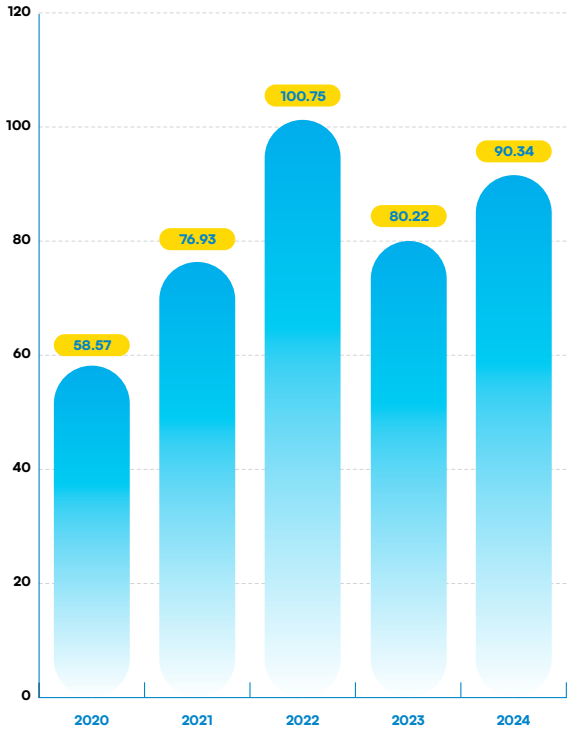
Laba Tahun Berjalan | Rp-Miliar

Current Year Profit | Rp-Billion



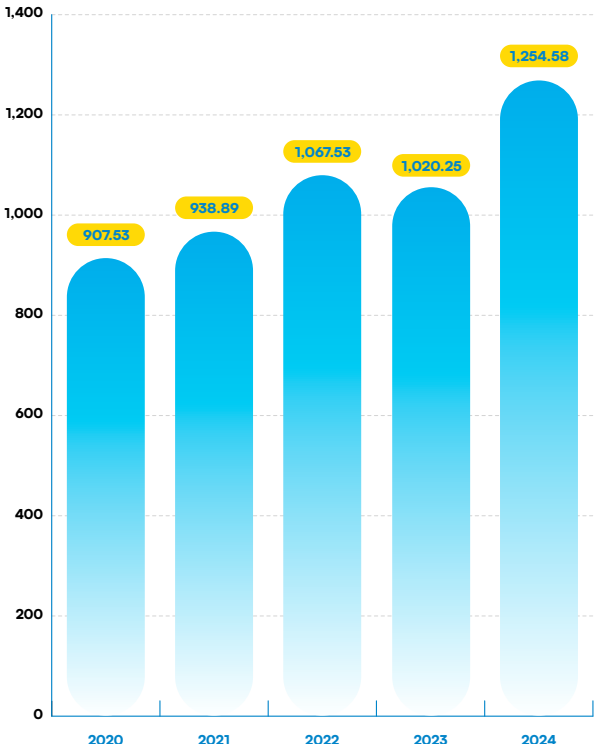
Laba Bersih (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk) Rp-Miliar

Net Profit (Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity) | Rp-Billion



EBITDA | Rp-Miliar

EBITDA | Rp-Billion

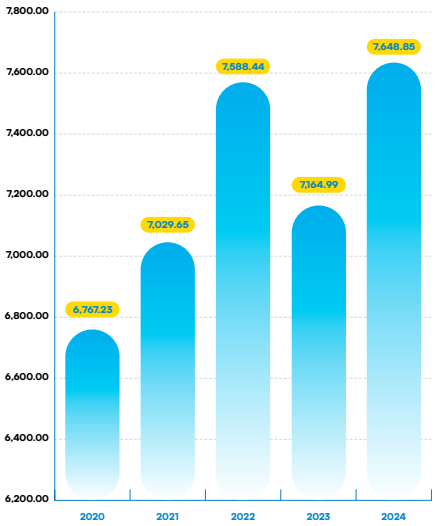


Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

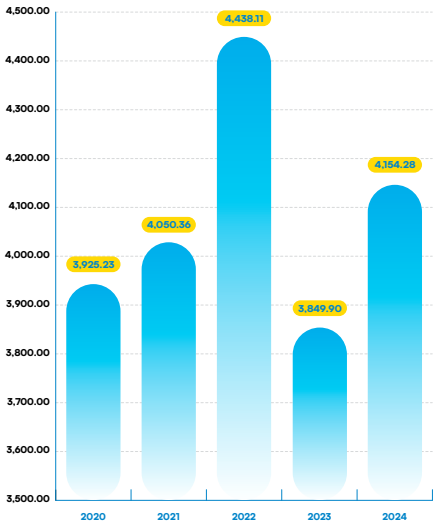
Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billions of Rupiah, unless otherwise stated	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Aset Assets									
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	5.372,28	4.965,57	4.904,80	4.217,36	3.866,12	8,19	↑	8,57	↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets									
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	7,81	11,67	162,64	131,15	51,44	(33,08)	↓	(37,58)	↓
Aset Tetap - bersih Fixed Assets - Net	1.230,44	1.500,70	1.712,08	2.076,32	2.341,28	(18,01)	↓	(14,86)	↓
Aset Tidak lancar Lainnya Other Non-Current Assets	1.038,32	687,05	808,92	604,82	508,39	51,13	↓	19,55	↑
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	2.276,57	2.199,41	2.683,64	2.812,29	2.901,11	3,51	↑	(5,88)	↓
Jumlah Aset Total Assets	7.648,85	7.164,99	7.588,44	7.029,65	6.767,23	6,75	↑	3,11	↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity									
Liabilitas Liabilities									
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	3.134,26	3.223,01	3.795,39	3.555,62	2.950,67	(2,75)	↑	1,52	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	1.020,02	626,89	642,72	494,74	974,56	62,71	↑	1,15	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.154,28	3.849,90	4.438,11	4.050,36	3.925,23	7,91	↑	1,43	↑

Ekuitas Equity									
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	2.524,76	2.429,29	2.343,54	2.245,18	2.172,96	3,93	⬆	3,82	⬆
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	969,81	885,8	806,78	734,1	669,03	9,48	⬆	9,73	⬆
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.494,57	3.315,09	3.150,33	2.979,28	2.842,00	5,41	⬆	5,30	⬆
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	7.648,85	7.164,99	7.588,44	7.029,65	6.767,23	6,75	⬆	3,11	⬆

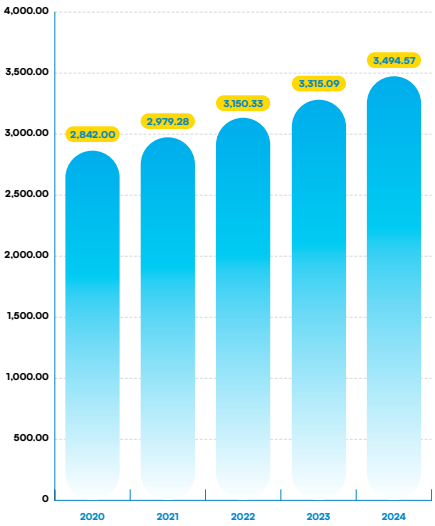
Total Aset | Rp-Miliar
Total Assets | Rp-Billion



Total Liabilitas | Rp-Miliar
Total Liabilities | Rp-Billion



Total Ekuitas | Rp-Miliar
Total Equity | Rp-Billion

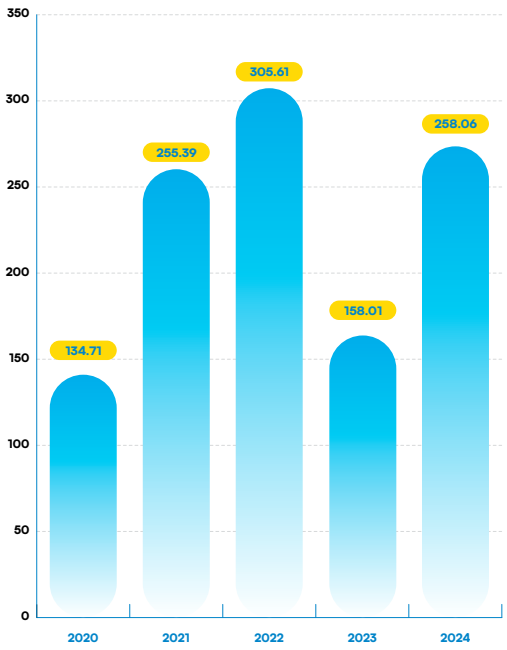


Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Cash Flows

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billions of Rupiah, unless otherwise stated	2024	2023*	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (for) Operating Activities	766,42	63,63	311,09	235,48	240,50	1.104,49	↑	33,61	↑
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (for) Investing Activities	(222,70)	209,32	(76,35)	(41,08)	(193,94)	(206,39)	↓	3,52	↑
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Financing Activities	(433,67)	(420,55)	(184,51)	(73,73)	(461,96)	3,12	↑	(1,57)	↓
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	110,05	(147,60)	50,23	120,67	(414,39)	(174,56)	↓	n/a	-
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalent Beginning	158,01	305,61	255,39	134,71	549,10	(48,30)	↓	(26,76)	↓
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent Ending	268,06	158,01	305,61	255,39	134,71	69,65	↑	18,77	↑

***= Terdapat reklarifikasi pencatatan nilai dalam LK 2024 (Audited) |** *= There is a reclassification of recorded values in the 2024 Financial Statements (Audited)

Kas dan Setara Kas | Rp-Miliar
Cash and Cash Equivalents | Rp-Billion



Rasio-rasio Keuangan
Financial Ratios

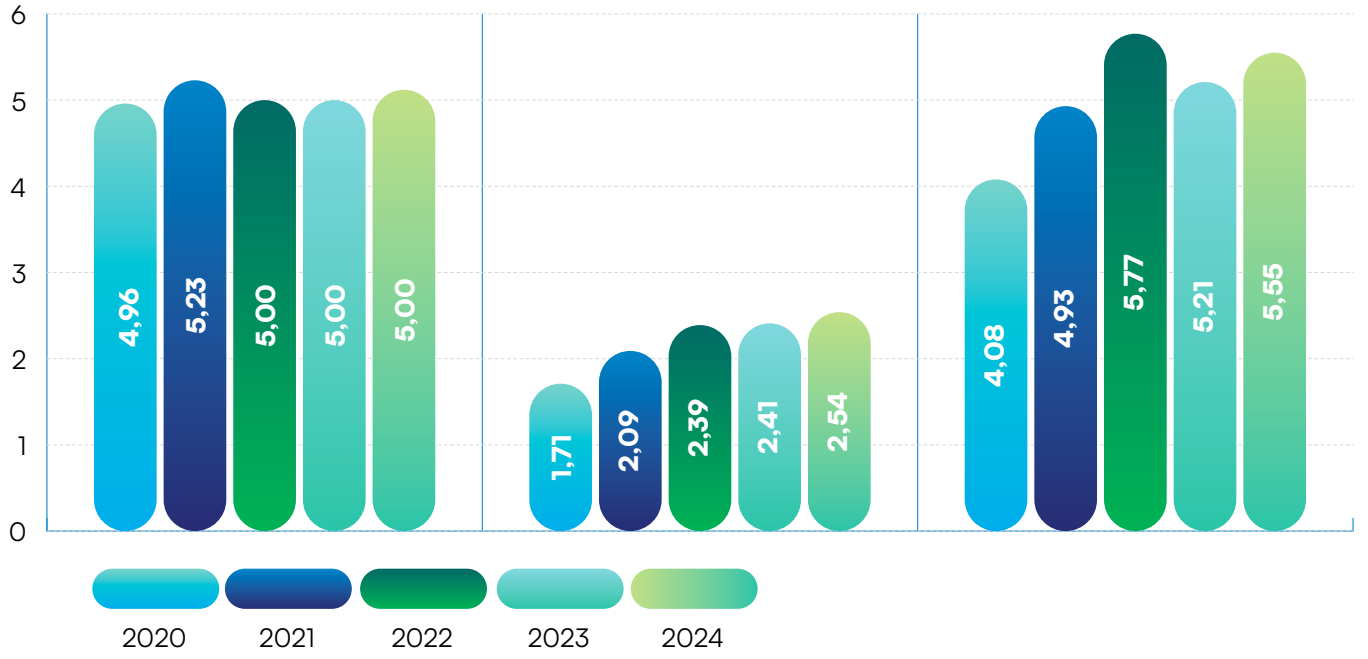
Perihal Subject	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 (%)** Increase (Decrease) 2023-2024 (%)	
Profitabilitas Profitability							
Pertumbuhan Pendapatan (%) Revenue Growth (%)	11,47	(6,44)	29,49	20,12	(39,35)	17,91	↑
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	20,53	17,45	16,85	16,11	18,93	3,08	↑
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	17,81	15,23	15,33	16,57	19,03	2,58	↑
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	5,12	5,08	5,00	5,23	4,96	0,02	↑
Margin EBITDA (%) EBITDA Margin (%)	33,09	30,00	29,37	33,38	38,83	3,09	↑
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) Net Profit to Total Assets Ratio (%)	2,54	2,41	2,39	2,09	1,71	0,06	↑
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (%) Net Profit to Total Equity Ratio (%)	5,55	5,21	5,77	4,93	4,08	0,17	↑
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga (kali) EBITDA to Interest Expense Ratio (times)	3,78	4,43	4,63	4,72	4,74	(0,65)	↓
Rasio Utang terhadap EBITDA (kali) Debt to EBITDA Ratio (times)	1,41	1,94	2,23	2,38	2,13	(0,53)	↓
Likuiditas Liquidity							
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times)	1,71	1,54	1,29	1,19	1,31	3,25	↑
Rasio Kas (kali) Cash Ratio (times)	0,12	0,08	0,09	0,07	0,05	0,07	↑

Solvabilitas Solvency							
Rasio Kewajiban Berbunga terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Interest-Bearing Liabilities to Total Equity Ratio (times)	0,51	0,57	0,72	0,72	0,69	0,45	↑
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (kali) Total Liabilities to Total Assets Ratio (times)	0,54	0,54	0,58	0,58	0,58	0,00	↑
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Total Liabilities to Total Equity Ratio (times)	1,19	1,16	1,41	1,36	1,38	0,03	↑

Margin Laba Bersih | %
Net Profit Margin | %

Laba Bersih terhadap Jumlah Aset | %
Net Income to Total Assets | %

Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas | %
Net Income to Total Equity | %



Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Organisasi

Highlights of Business and Organizational Performance

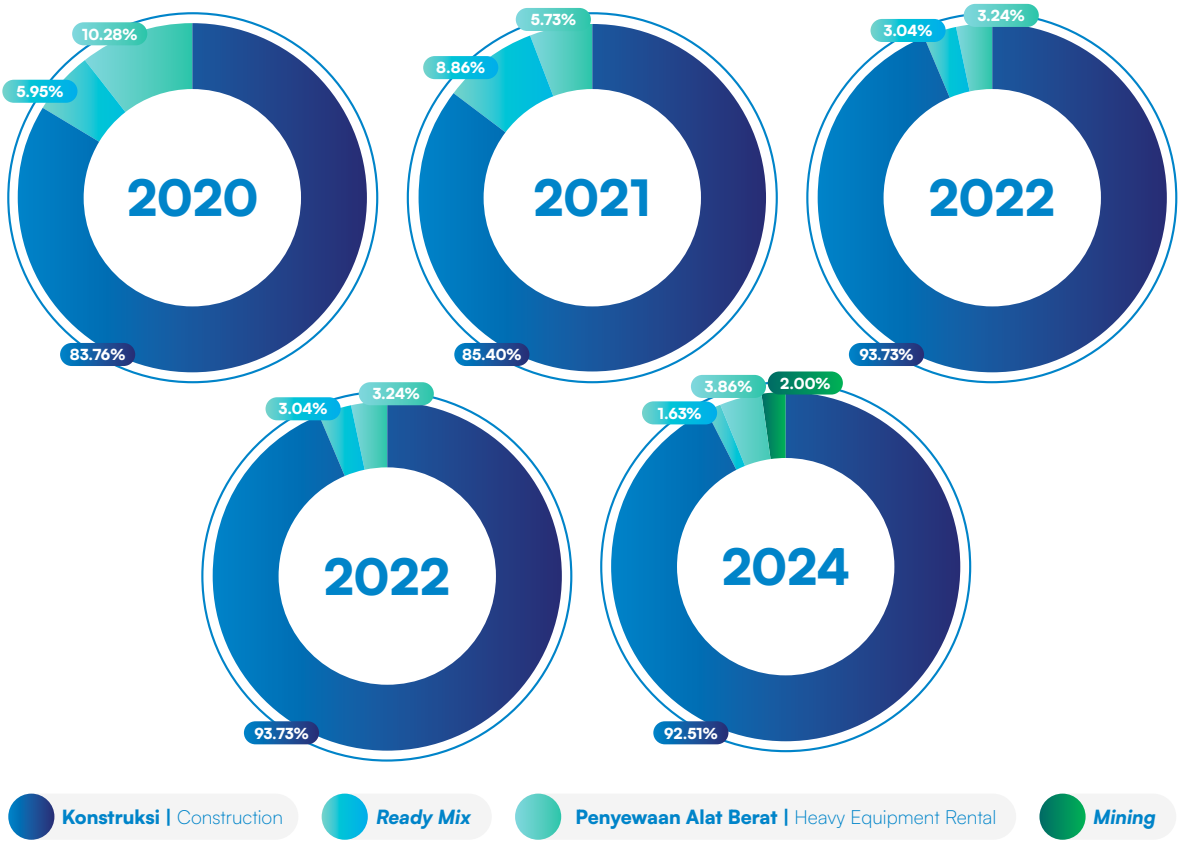
Kinerja Lini Bisnis: Pendapatan per Segmen

Business Line Performance: Revenue per Segment

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billions of Rupiah, unless otherwise stated	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Konstruksi Construction	3.506,81	3.212,76	3.407,24	2.397,51	1.957,48	9,15	↑	15,69	↑
Ready Mix Ready Mix	61,62	80,62	110,34	248,78	139,16	(23,57)	↓	(18,43)	↓
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	146,45	107,49	117,61	160,94	240,32	36,25	↑	(11,65)	↓
Mining Mining	75,93	-	-	-	-	-		-	
Total Pendapatan Total Revenue	3.790,81	3.400,87	3.635,19	2.807,23	2.336,96	11,47	↑	12,85	↑

Komposisi Pendapatan per Segmen

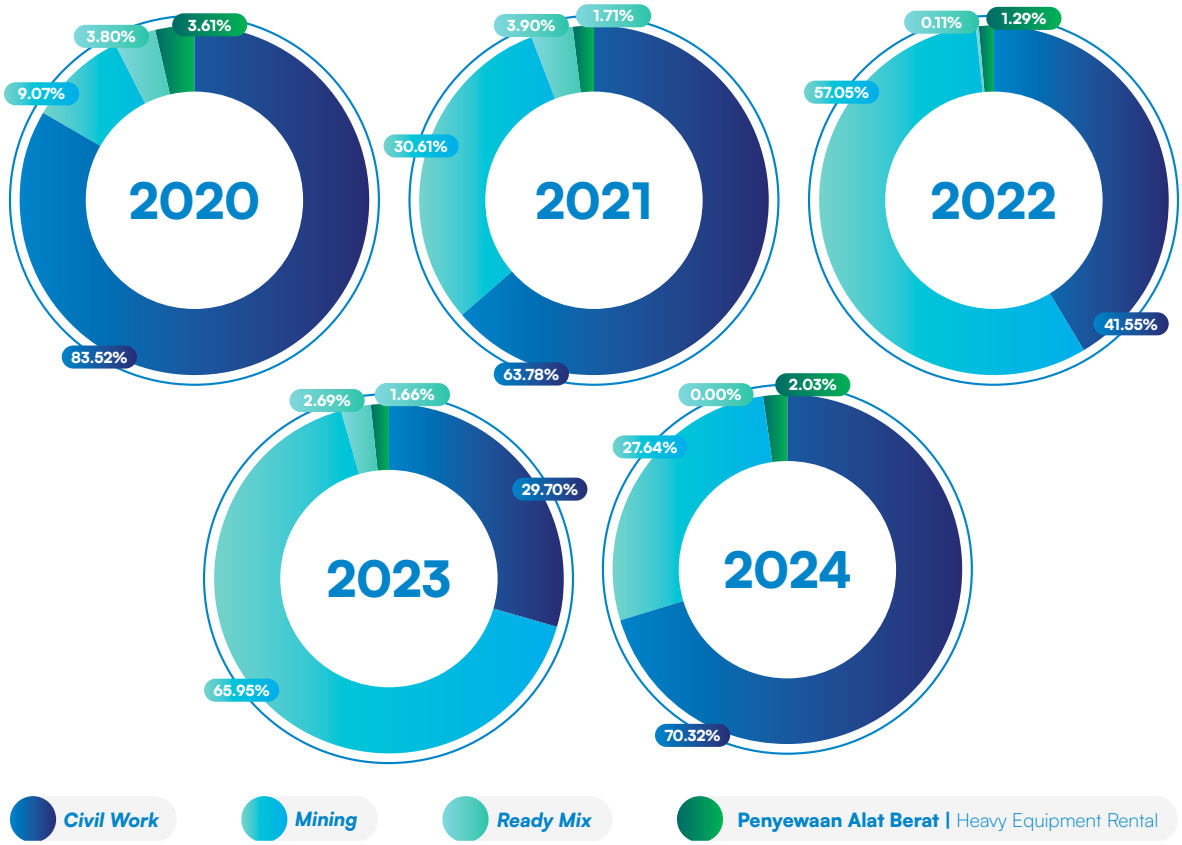
Composition of Revenue per Segment



Perolehan Kontrak Baru per Segmen atau Lini Bisnis
New Contract Acquisition by Segment or Business Line

Perihal Subject	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Konstruksi Construction									
Jasa Pertambangan Mining Services	4.795,07	4.452,59	2.992,41	1.715,28	255,39	7,69	↑	108,16	↑
Civil Work Civil Work	1.884,92	2.005,19	2.179,41	3.574,72	2.351,93	(6,00)	↓	64,82	↑
Subjumlah Konstruksi Subtotal Construction	6.679,99	6.457,78	5.171,82	5.290,01	2.607,32	3,44	↑	26,52	↑
Ready Mix Ready Mix	-	181,58	6,03	218,63	106,89	-		-	
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	138,51	112,27	67,47	95,83	101,7	23,37	↑	8,03	↑
Jumlah Perolehan Kontrak Baru Total New Contract Acquisition	6.818,50	6.751,63	5.245,32	5.604,47	2.815,92	0,99	↑	24,74	↑

Komposisi Perolehan Kontrak Baru per Segmen atau Lini Bisnis
Composition of New Contract Acquisition per Segment or Business Line



Ikhtisar Saham

Share Highlights

Sekilas Informasi Saham PPRE 2020-2024

Snapshot of PPRE Share 2020—2024

	2024	2023	2022	2021	2020
Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Opening Price (Rp/share)	80	125	174	264	240
Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Rp/share)	106	128	204	298	304
Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	50	74	121	148	74
Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	55	79	124	174	262
Jumlah Saham Beredar (juta lembar saham) Number of Shares Outstanding (million shares)	10.224.271.000	10.224.271.000	10.224.271.000	10.224.271.000	10.224.271.000
Bursa Saham Stock Exchange	**Bursa Efek Indonesia** Indonesia Stock Exchance				

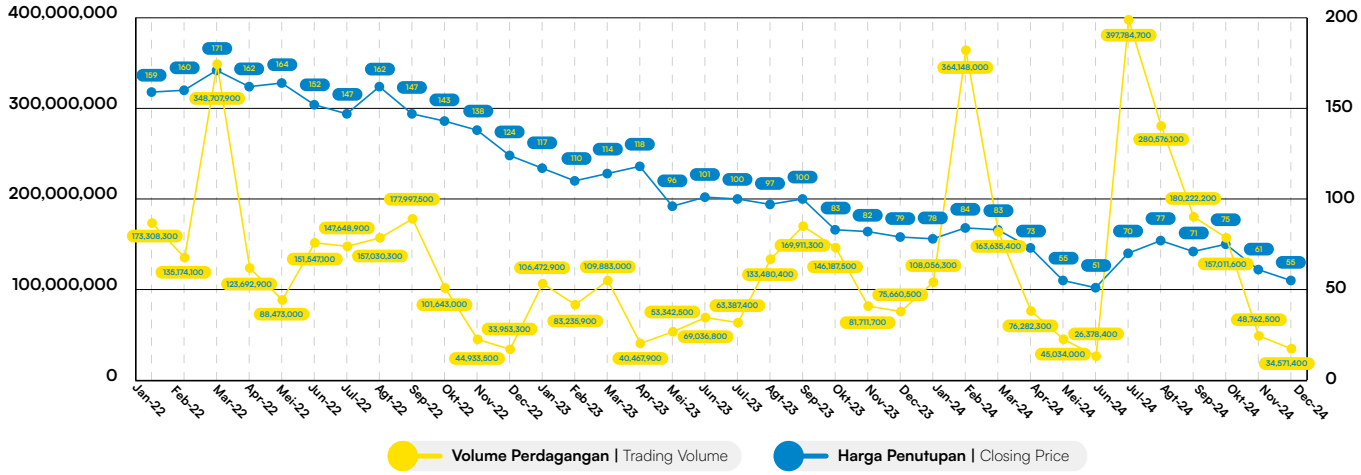


Informasi Perdagangan Saham PPRE 2022-2024
PPRE Share Trading Summary 2022—2024

Periode Period	**Jumlah Saham Beredar (lembar saham)** Number of Shares Outstanding (shares)	**Harga Pembukaan (Rp/lembar saham)** Opening Price (Rp/share)	**Harga Tertinggi (Rp/lembar saham)** Highest Price (Rp/share)	**Harga Terendah (Rp/lembar saham)** Lowest Price (Rp/share)	**Harga Penutupan (Rp/lembar saham** Closing Price (Rp/share)	**Volume Perdagangan (lembar saham)** Trading Volume (shares)	**Kapitalisasi Pasar (Rp)** Market Capitalization (Rp)
2024							
Triwulan I Quarter I	10.224.271.000	80	106	75	83	635.839.700	848.614.493.000
Triwulan II Quarter II	10.224.271.000	83	83	50	51	147.694.700	521.437.821.000
Triwulan III Quarter III	10.224.271.000	51	91	50	71	858.583.000	725.923.241.000
Triwulan IV Quarter IV	10.224.271.000	71	84	53	55	240.345.500	562.334.905.000
2023							
Triwulan I Quarter I	10.224.271.000	125	132	102	114	299.591.800	1.165.566.894.000
Triwulan II Quarter II	10.224.271.000	114	122	95	101	162.847.200	1.032.651.371.000
Triwulan III Quarter III	10.224.271.000	100	110	96	100	366.779.100	1.022.427.100.000
Triwulan IV Quarter IV	10.224.271.000	100	84	70	79	303.559.700	807.717.409.000
2022							
Triwulan I Quarter I	10.224.271.000	174	204	147	171	657.190.300	1.748.350.341.000
Triwulan II Quarter II	10.224.271.000	172	181	148	152	363.714.000	1.554.089.192.000
Triwulan III Quarter III	10.224.271.000	151	173	140	147	482.676.700	1.502.967.837.000
Triwulan IV Quarter IV	10.224.271.000	147	153	121	124	180.529.800	1.267.809.604.000

Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham dan Volume Perdagangan Saham PPRE Periode Januari 2022 s.d Desember 2024

Chart of PPRE Closing Stock Price Movements and Trading Volume from January 2022 to December 2024



Informasi tentang Aksi Korporasi

Information about Corporate Actions

Di sepanjang tahun 2023 dan 2024, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, serta perubahan nilai nominal saham. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, perubahan nilai nominal saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, jumlah efek konversi yang dilaksanakan, dan harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi, yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2023 and 2024, the Company did not carry out any corporate actions that resulted in changes to its shares, such as stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, or changes in the nominal value of shares. Accordingly, there is no information regarding the date of the corporate action, stock split ratio, reverse stock split, stock dividend, bonus shares, the number of conversion securities issued, changes in the nominal value of shares, the number of outstanding shares before and after the corporate action, the number of conversion securities exercised, or the share price before and after the corporate action that can be presented in this Annual Report.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Information on Temporary Suspension of Share Trading and/or Share Delisting

Di tahun 2023 dan 2024, Perusahaan tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perusahaan mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

In 2023 and 2024, the Company was not subject to any sanctions that could affect share trading activities on the Stock Exchange where the Company's shares are listed and traded, whether in the form of a temporary suspension of share trading and/or share delisting.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Highlights of Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds

"Pada 1 Juli 2022, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Tahap I Tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia dalam rangka memperkuat permodalan."

On July 1, 2022, the Company conducted the Public Offering of Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2022 on the Indonesia Stock Exchange in order to strengthen its capital structure.

Nama Name	**Tanggal Penerbitan** Issuance Date	**Nilai (Rp-miliar)** Value (Rp-billion)	**Tenor** Tenor	**Tingkat Bunga/ Imbalan** Interest Rate / Return	**Tanggal Jatuh Tempo** Tempo Due date	**Peringkat** Rating	**Status** Status
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PP PRESISI Tahap I Tahun 2022 Public Offering of Shelf Registration I PP PRESISI Phase I Year 2022							
Seri A Series A	**1 Juli 2022** July 1, 2022	**102,27**	**3 tahun** 3 years	**9,50% p.a**	**30 Juni 2025** June 30, 2025	**•2024: idBBB+(Pefindo)** **•2023: idBBB+(Pefindo)**	**Aktif** Active
Seri B Series B		**100,70**	**5 tahun** 5 years	**10,50% p.a**	**30 Juni 2027** June 30, 2027	**•2024: idBBB+(Pefindo)** **•2023: idBBB+(Pefindo)**	**Aktif** Active
Jumlah Total		**202,97**					

Informasi tentang Sumber Pendanaan Lainnya

Information Regarding Other Funding Sources

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menerbitkan instrumen keuangan seperti *Medium Term Notes* (MTN) atau surat utang dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

Until the end of 2024, the Company did not issue financial instruments such as Medium Term Notes (MTN) or other forms of debt securities. Accordingly, there is no information regarding other sources of funding.

Kilas Peristiwa 2024

2024 Events Highlights

Februari
February

- Pelaksanaan *Refreshment* dan Sosialisasi Manajemen Risiko untuk meningkatkan *awereness* karyawan PP Presisi.
- Peringatan Bulan K3 Nasional.
- Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

- Implementation of Refreshment and Risk Management Socialization to Increase Employee Awareness at PP Presisi.
- National Occupational Safety and Health (K3) Month Awareness.
- Socialization of Anti-Bribery Management System.

Maret
March

- Pembagian 250 paket sembako kepada warga sekitar lingkungan PP Presisi.
- Penerimaan *Awarding* Anugerah BUMN Track.

- Distribution of 250 grocery packages to the surrounding community of PP Presisi.
- Awarded BUMN Track Award.

April
April

Go live system PPRE Library dengan tujuan *sharing knowledge* karyawan PP Presisi di UKP ataupun diproyek.

Go live of the PPRE Library system with the aim of sharing knowledge among PP Presisi employees in UKP or on projects.

Mei
May

- PP Presisi berhasil melalui anak perusahaannya PT LMA berhasil mendapatkan kontrak Akses Bandara Dhoho yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur.
- Pemberian Beasiswa untuk anak pegawai *outsourcing* PP Presisi (SD, SMP, SMA).
- Pelaksanaan Donor Darah.

- PP Presisi, through its subsidiary PT LMA, successfully secured the Dhoho Airport Access contract located in Kediri, East Java.
- Provision of Scholarships for children of PP Presisi's outsourcing employees (Elementary, Middle, High School).
- Implementation of blood donation.

Juni
June

- Pelaksanaan RUPST.
- PP Presisi berhasil mendapatkan penambahan kontrak Hauling Road Tofu Position, Halmahera.
- Surveilance Sertifikasi ISO 9001, 14001,45001.
- Kunjungan Proyek BP Tol Japek dalam Monitoring Implementasi Manajemen Risiko.

- Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (RUPST).
- PP Presisi successfully secured an additional contract for the Hauling Road Tofu Position, Halmahera.
- Surveillance for ISO 9001, 14001, 45001 Certification.
- Project visit to BP Tol Japek for Monitoring the Implementation of Risk Management

Juli
July

- Pelaksanaan BOD Talk.
- *Refreshment* Manajemen Risiko bersama tim UKP.

- BOD Talk event.
- Risk Management Refreshment with the UKP team.

Agustus
August

PP Presisi melalui anak perusahaannya PT LMA berhasil mendapatkan kontrak Jalan Hauling ITHACA.

PP Presisi, through its subsidiary PT LMA, successfully secured the ITHACA Hauling Road contract

September
September

Pelaksanaan Webinar Saham PP Presisi untuk memperkenalkan dunia saham kepada teman-teman PP group.

Conducting PP Presisi Stock Webinar to introduce the stock market to PP Group members.

November
November

Implementasi *Maintenance system* SIMAP PP Presisi.

Implementation of the SIMAP Maintenance System at PP Presisi.

Desember
December

- Pelaksanaan *Public Expose*.
- PP Presisi berhasil mendapatkan kontrak pekerjaan *Mining Development Operation*.

- Implementation of the Public Expose.
- PP Presisi successfully secured the Mining Development Operation contract.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

Penghargaan Tahun 2024 Berskala Nasional
2024 National Scale Award



Anugerah BUMN 2024

Deskripsi Penghargaan:
Penghargaan The Best CEO Driving Execution

Pemberi Penghargaan:
BUMN TRACK

Acara/Kegiatan:
Penghargaan Business Reinvention untuk Optimalisasi Peluang Bisnis di Industri 4.0

Tanggal Diberikan:
13 Maret 2024

Description:
The Best CEO Driving Execution Award

Awarded By:
BUMN TRACK

Event/Activity:
Business Reinvention Award for Optimizing Business Opportunities in Industry 4.0

Date of Award:
March 13, 2024

Anugerah BUMN 2024

Deskripsi Penghargaan:
Penghargaan Pengembangan Talenta & SDM Unggul Perusahaan Terbaik

Pemberi Penghargaan:
BUMN TRACK

Acara/Kegiatan:
Penghargaan Business Reinvention untuk Optimalisasi Peluang Bisnis di Industri 4.0

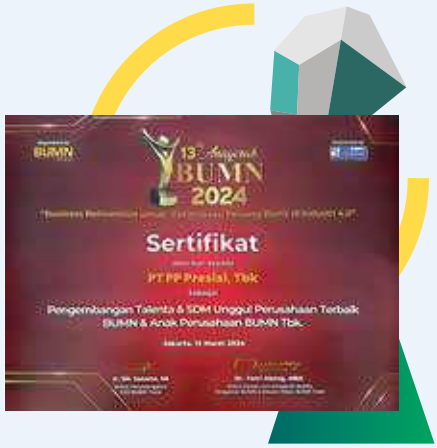
Tanggal Diberikan:
13 Maret 2024

Description:
The Best Company for Talent & HR Development Award

Awarded By:
BUMN TRACK

Event/Activity:
Business Reinvention Award for Optimizing Business Opportunities in Industry 4.0

Date of Award:
March 13, 2024



Diklat Implementasi SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Mining Safety Management System (SMKP) Implementation Training


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Human Resource Development Agency for Energy and Mineral Resources
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA
Human Resource Development Center for Geology, Mineral and Coal

SERTIFIKAT
CERTIFICATE
Nomor: 2024.SRDL.06/BPGD/2024
Nomor Registrasi: 7524NP-SMKP/DT/0458/BT/2024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

nama : Pipin Julianto
NIP/NRP/NIK : 2024062707920003
tempat / tanggal lahir : Lamongan / 27 Juli 1992
instansi / perusahaan : PT PP Presisi, Tbk.
telah menyelesaikan : Diklat Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Online Learning Angkatan 13
diselenggarakan dari : 01 Juli sampai dengan 06 Juli 2024
dinyatakan dengan hasil : Cukup Memuaskan

Bandung, 5 Agustus 2024
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara

Ir. Dwi Anggoro Ichsakrianto, M.Sc.

Deskripsi Penghargaan:
Penerapan SIstem Manajemen Keselamatan Pertambangan di Perushaan Jasa Pertambangan (IUJP)

Pemberi Penghargaan:
Kementrian ESDM

Acara/Kegiatan:
Diklat Implementasi

Tanggal Diberikan:
05 Agustus 2024

Description:
Implementation of the Mining Safety Management System in Mining Service Companies (IUJP)

Awarded By:
Ministry of Energy and Mineral Resources (Kementrian ESDM)

Event/Activity:
Implementation Training (Diklat Implementasi)

Date of Award:
August 5, 2024

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2024
Certifications Still Valid in 2024

ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 Quality Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
NQA

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
16 Agustus 2023

Masa Berlaku Hingga:
24 Agustus 2026

Certifying Body:
NQA

Date of Certification Issuance:
August 16, 2023

Valid Until:
August 24, 2026





ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
NQA

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
16 Agustus 2023

Masa Berlaku Hingga:
24 Agustus 2026

Certifying Body:
NQA

Date of Certification Issuance:
August 16, 2023

Valid Until:
August 24, 2026



ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14001:2015 Environmental Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
NQA

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
16 Agustus 2023

Masa Berlaku Hingga:
24 Agustus 2026

Certifying Body:
NQA

Date of Certification Issuance:
August 16, 2023

Valid Until:
August 24, 2026

SMK 3 Sistem Manajemen K3 PP 50 Tahun 2012
SMK 3 Occupational Health and Safety Management System PP 50 of 2012

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
Multi Sertifikasi Indonesia

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
06 Agustus 2024

Masa Berlaku Hingga:
06 Agustus 2027

Certifying Body:
Multi Sertifikasi Indonesia

Date of Certification Issuance:
August 6, 2024

Valid Until:
August 6, 2027



Laporan *Manajemen*

Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Upaya PT PP Presisi Tbk dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di sepanjang tahun 2024 menjadi kunci penting bagi keberhasilan seluruh Insan PP Presisi dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang adaptif. Untuk itu, izinkan saya mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2024, terutama dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat.

Honorable Shareholders and Stakeholders,

The efforts of PT PP Presisi Tbk in facing various challenges and dynamics throughout 2024 have been key to the success of all PP Presisi personnel in implementing various adaptive policies. Therefore, allow me to represent the Board of Commissioners in presenting the Company's Annual Report for the fiscal year 2024, particularly from the perspective of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions.



Bertindak Lincah untuk Menjaga Ketangguhan Perekonomian Nasional

Acting Swiftly to Preserve the Strength of the National Economy

Dinamika sektor konstruksi tentu erat kaitannya dengan kebutuhan konstruksi dan infrastruktur nasional, di mana hal tersebut tak lepas dari kondisi perekonomian global. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2024 memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2%, atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,3%. Negara maju mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8%, turun dari tahun sebelumnya sebesar 1,7%; sedangkan negara berkembang mencatat penurunan dari 4,4% di tahun 2023 menjadi 4,2% di tahun 2024. Demikian pula Tiongkok dan India, negara yang telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia dewasa ini, masing-masing mengalami perlambatan dari 5,2% dan 8,2% di tahun 2023 menjadi 4,8% dan 7% di tahun 2024.

Perlambatan ekonomi secara meluas ini terutama didorong oleh berbagai tekanan atas produksi dan pengiriman komoditas khususnya minyak, berlanjutnya konflik regional seperti Rusia-Ukraina dan Timur Tengah, dan berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang berdampak pada pasokan bahan makanan serta kebutuhan mendasar lainnya.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia masih menunjukkan kemampuannya untuk menjaga pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi perekonomian Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, melambat dibandingkan capaian tahun 2023 dengan catatan pertumbuhan sebesar 5,05% (c-to-c). Tak berbeda jauh, IMF dalam WEO edisi Oktober

The dynamics of the construction sector are certainly closely related to the national construction and infrastructure needs, which are inseparable from the global economic conditions. The International Monetary Fund (IMF), in its October 2024 edition of the World Economic Outlook (WEO), projected global economic growth at 3.2%, down from the previous year's 3.3%. Developed countries recorded economic growth of 1.8%, down from the previous year's 1.7%, while developing countries recorded a decrease from 4.4% in 2023 to 4.2% in 2024. Likewise, China and India, countries that have made significant contributions to the global economy today, each experienced slowdowns from 5.2% and 8.2% in 2023 to 4.8% and 7% in 2024.

This widespread economic slowdown is mainly driven by various pressures on the production and delivery of commodities, especially oil, continued regional conflicts such as in Russia-Ukraine and the Middle East, and various extreme weather events impacting the supply of foodstuffs and other basic needs.

Amidst these conditions, Indonesia still shows its ability to maintain its economic growth above global economic growth. The Central Bureau of Statistics (BPS) released a publication showing that Indonesia's economy grew by 5.03% in 2024, slowing down compared to the 2023 growth record of 5.05% (c-to-c). Similarly, the IMF in the October 2024 WEO projected Indonesia's economy to grow by 5%, which is relatively the same as the previous year.

Based on BPS data, on the production side, the highest growth occurred in the Other Services sector at 9.80%, followed by Transportation and Warehousing at 8.69%. Meanwhile, the

2024 memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5%, atau relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BPS, di sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80%, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69%. Sementara itu, lapangan usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan 7,02% atau meningkat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 4,91%; sedangkan Pertambangan mencatat pertumbuhan sebesar 4,90%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan catatan pertumbuhan sebesar 6,12%.

BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran terjadi pada semua komponen Produk Domestik Bruto (PDB) pengeluaran, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48%; diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,61%. Kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional yang dilaksanakan serentak pada Februari 2024 menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia pada sisi pengeluaran, di mana Pemerintah Indonesia menganggarkan belanja negara hingga Rp71,3 triliun untuk kegiatan 5 (lima) tahunan untuk menentukan pemimpin nasional.

Kunci penting bagi Indonesia dalam membentuk fondasi pembangunan yang kokoh adalah perkembangan ekosistem industri yang dapat mendukung tercapainya target Pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan sumber daya energi berbasis fosil yang pada akhirnya mampu mewujudkan target net zero emission atau nihil emisi di tahun 2060. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang dirilis pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional diarahkan kepada berbagai pengembangan teknologi ketenagalistrikan yang dapat mendukung target nihil emisi.

Ekosistem Electic Vehicle (EV) atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) juga berupaya dibentuk untuk dapat mendukung agenda besar ini, termasuk ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta insentif yang diberikan Pemerintah Indonesia bagi produsen EV. Pada muaranya, Pemerintah Indonesia berupaya terus mendorong hilirisasi komoditas nikel dan tembaga yang berperan besar dalam pembentukan ekosistem EV, di mana Indonesia merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia.

Meskipun kondisi komoditas nikel di tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang cenderung korektif, keputusan PP Presisi untuk memasuki industri pertambangan melalui jasa konstruksi tambang merupakan keputusan yang tepat. Prospek jangka panjang yang menjanjikan dalam industri pertambangan, khususnya hilirisasi nikel, menjadi pertimbangan fundamental yang dapat menjaga kelangsungan usaha PP Presisi di masa-masa mendatang.

Construction sector recorded a growth of 7.02%, an increase from the previous year's growth of 4.91%, while Mining recorded a growth of 4.90%, experiencing a decline compared to the previous year's growth of 6.12%.

BPS also recorded that Indonesia's economic growth from the expenditure side occurred in all components of Gross Domestic Product (GDP) expenditure, with the highest growth occurring in the Final Consumption Expenditure of Non-Profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) at 12.48%, followed by Government Consumption Expenditure (PK-P) at 6.61%. The national General Election activities held simultaneously in February 2024 became an important factor in driving Indonesia's economic growth on the expenditure side, where the Indonesian Government budgeted state spending up to Rp71.3 trillion for the five-year event to determine the national leader.

A key element for Indonesia in forming a strong development foundation is the development of an industrial ecosystem that can support the Indonesian Government's target to reduce fossil-based energy resources, ultimately achieving the net zero emission target by 2060. As outlined in the National Electricity General Plan (RUKN) released in 2024, it can be seen that the national electricity supply system development plan is directed towards various electricity technology developments that can support the net zero emission target.

The Electric Vehicle (EV) ecosystem or Battery-Based Electric Motor Vehicles (KBLBB) is also being formed to support this major agenda, including the availability of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) and Public Electric Vehicle Battery Charging Stations (SPBKLU) and the incentives provided by the Indonesian Government for EV producers. Ultimately, the Indonesian Government continues to push for the downstream processing of nickel and copper commodities, which play a major role in forming the EV ecosystem, where Indonesia is one of the largest nickel producers in the world. Even though nickel commodity conditions in 2024 show a trend of corrective fluctuations, PP Presisi's decision to enter the mining industry through mining construction services is the right decision. The promising long-term prospects in the mining industry, especially nickel downstream processing, are a fundamental consideration that can sustain PP Presisi's business continuity in the future.



Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi dan Kebijakan Perusahaan serta Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Supervision of the Implementation of Company Strategies and Policies as well as the Frequency and Method of Providing Advice to the Board of Directors

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intensif Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perusahaan serta inisiatif strategis kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum rapat gabungan yang membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris melaksanakan 8 (delapan) kali rapat internal dan 10 kali rapat gabungan dengan Direksi yang dilakukan dalam rangka membahas langkah-langkah strategi pencapaian RKAP tahun 2024. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan tersebut mencapai 97,77%, yang menunjukkan keseriusan baik Dewan Komisaris maupun Direksi untuk mengelola Perusahaan meningkatkan level kompetensinya. Beberapa agenda pembahasan yang cukup penting dalam rapat gabungan tersebut terutama mencakup:

The supervisory role of the Board of Commissioners is carried out through the intensive involvement of the Board of Commissioners in routinely providing direction for the preparation of the Company's work plan and strategic initiatives to the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors have joint meeting forums to discuss various agendas concerning work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the approval of the Board of Commissioners. These meetings serve as a form of coordination for discussing the periodic reports of the Board of Directors and providing responses, notes, and advice, which are recorded in the meeting minutes.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 8 (eight) internal meetings and 10 joint meetings with the Board of Directors in order to discuss strategic steps for achieving the 2024 work plan. Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at these joint meetings reached 97.77%, demonstrating the seriousness of both the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing the Company to enhance its level of competence. Some of the important discussion agendas in these joint meetings primarily included:

✅ Evaluasi kinerja Perusahaan, termasuk evaluasi atas kinerja Perusahaan tahun 2023 serta perumusan kebijakan strategis Perusahaan tahun 2024;	✅ Evaluation of the Company's performance, including the evaluation of the Company's performance in 2023 and the formulation of the Company's strategic policy for 2024;
✅ Pemantauan atas kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, khususnya pemantauan atas pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024;	✅ Monitoring the financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPIs), particularly the monitoring of the achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year 2024.
✅ Pemantauan atas utilisasi aset yang dimiliki Perusahaan;	✅ Monitoring the utilization of the Company's assets;
✅ Evaluasi penerapan kebijakan mutu (QHSE), pelayanan, sistem teknologi informasi, pengadaan dan pengelolaan SDM, baik kendala dan tantangan di tahun 2023 maupun strategi tahun 2024;	✅ Evaluation of the implementation of quality policies (QHSE), services, information technology systems, procurement, and human resources management, including the challenges and obstacles faced in 2023 as well as the strategies planned for 2024;
✅ Pemantauan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP), *Whistleblowing System* (WBS), dan Pengendalian Gratifikasi;	✅ Monitoring the implementation of Good Corporate Governance (GCG), particularly in the application of the Anti-Bribery Management System (SMAP), Whistleblowing System (WBS), and Gratification Control;

- ✅ Pemantauan atas permasalahan legal dan dampak potensialnya bagi Perusahaan;
- ✅ Pemantauan hasil asesmen GCG tahun buku 2023 serta tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2024;
- ✅ Pemantauan kinerja entitas anak; dan
- ✅ Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- ✅ Monitoring legal issues and their potential impact on the Company;
- ✅ Monitoring the results of the 2023 fiscal year GCG assessment and its follow-up actions through the end of 2024;
- ✅ Monitoring the performance of subsidiaries; and
- ✅ Preparation for the General Meeting of Shareholders (GMS).

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Direksi, khususnya dalam mengelola operasional Perusahaan dan menjaga kualitas mutu kepada pelanggan. Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris yang dapat menjadi perhatian Direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan antara lain adalah:

The Board of Commissioners appreciates the various strategic policies implemented by the Board of Directors, particularly in managing the Company's operations and maintaining quality standards for customers. Several recommendations from the Board of Commissioners that may be taken into consideration by the Board of Directors to enhance the Company's future performance include:

01 Diversifikasi Risiko dalam Lini Bisnis Jasa Pertambangan
Risk Diversification in the Mining Services Business Line

Fokus Perusahaan pada sektor jasa pertambangan, khususnya nikel, merupakan langkah strategis yang sejalan dengan tren global dan peningkatan permintaan bahan baku kendaraan listrik. Namun, ketergantungan pada 1 (satu) segmen pasar yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global dapat menjadi risiko bagi kestabilan pendapatan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk memperkuat strategi mitigasi risiko, seperti menjajaki diversifikasi komoditas mineral lainnya atau memperluas portofolio bisnis ke jasa pertambangan yang lebih luas, misalnya batubara atau mineral kritis lainnya yang memiliki permintaan tinggi.

The Company's focus on the mining services sector—particularly in nickel—is a strategic move aligned with global trends and the growing demand for electric vehicle raw materials. However, reliance on a single market segment that is highly sensitive to global price fluctuations may pose a risk to revenue stability. Therefore, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to strengthen risk mitigation strategies, such as exploring diversification into other mineral commodities or expanding the business portfolio into broader mining services, such as coal or other critical minerals with high demand.

02 Penguatan Efisiensi dan Optimalisasi Struktur Biaya
Enhancing Efficiency and Optimizing Cost Structure

Dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional akibat inflasi dan kebijakan moneter ketat, perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif efisiensi. Namun, masih terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut, khususnya dalam rantai pasok dan manajemen alat berat. Dewan Komisaris merekomendasikan peningkatan digitalisasi dan otomasi dalam pengelolaan proyek serta evaluasi strategi investasi alat berat, apakah lebih menguntungkan untuk menyewa dibandingkan membeli, guna mengurangi beban modal yang besar dan meningkatkan fleksibilitas keuangan.

In responding to rising raw material prices and operational costs driven by inflation and tight monetary policies, the Company has undertaken various efficiency initiatives. However, there is still room for further optimization, particularly in the supply chain and heavy equipment management. The Board of Commissioners recommends increasing digitalization and automation in project management, as well as evaluating the heavy equipment investment strategy—whether leasing is more cost-effective than purchasing—in order to reduce high capital expenditure and improve financial flexibility.

03 Kesiapan dalam Menghadapi Ketidakpastian Regulasi dan Tata Kelola ESG

Readiness in Facing Regulatory Uncertainty and ESG Governance

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap kepatuhan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, Perusahaan harus lebih proaktif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam jangka panjang, investasi pada keberlanjutan dapat menjadi faktor keunggulan kompetitif yang menarik bagi mitra strategis dan investor. Dewan Komisaris menekankan pentingnya penyusunan strategi keberlanjutan yang lebih terstruktur dan terukur, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pertambangan serta peningkatan transparansi dalam laporan ESG.

With the increasing demands for compliance in Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, the Company must take a more proactive approach to ensure adherence to evolving regulations at both national and international levels. In the long term, investing in sustainability can serve as a competitive advantage that appeals to strategic partners and investors. The Board of Commissioners emphasizes the importance of developing a more structured and measurable sustainability strategy, such as the implementation of environmentally friendly technologies in mining operations and enhancing transparency in ESG reporting.

Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan dan Dasar Penilaiannya

Assessment of the Board of Directors' Performance in Company Management and the Basis of Evaluation

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan penilaian mandiri melalui mekanisme penilaian internal Perusahaan, untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dari laporan tersebut, Dewan Komisaris melaporkan kepada pemegang saham dalam forum RUPS.

Untuk tahun 2024, penilaian kinerja Direksi mengacu kepada Kontrak Manajemen yang tertuang dalam dokumen RKAP tahun buku 2024 yang telah dirumuskan sejak Oktober 2023 dan telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Juli 2024.

Kriteria penilaian mencakup aspek keuangan Mencakup beberapa hal seperti EBITDA, ROIC-WACC, *Debt to EBITDA*, dan *Debt to Invested Capital*; aspek pelanggan mencakup Performance Index QHSE dan komposisi pendapatan dari proyek di luar kelompok usaha PTPP; aspek proses bisnis internal mencakup proyek *On Time On Budget, Fatality Rate, Equipment Utilization Rate* (PPRE), *Free Cash Flow*, dan nilai divestasi; serta aspek Learning & Growth mencakup HC Readiness, kepatuhan implementasi manajemen risiko, *Success Rate Legal Settlement*, penerapan GCG dengan standar anak usaha PTPP, implementasi penggunaan ERP,

The performance evaluation of the Board of Directors is conducted through a self-assessment mechanism within the Company, and subsequently reported to the Board of Commissioners. Based on this report, the Board of Commissioners submits its findings to the shareholders during the General Meeting of Shareholders (GMS).

For the year 2024, the performance evaluation of the Board of Directors refers to the Management Contract outlined in the 2024 fiscal year RKAP document, which was formulated in October 2023 and ratified by the Board of Commissioners and the Board of Directors on July 15, 2024.

The evaluation criteria include financial aspects such as EBITDA, ROIC-WACC, Debt to EBITDA, and Debt to Invested Capital; customer aspects such as QHSE Performance Index and revenue composition from projects outside the PTPP group; internal business process aspects such as On Time On Budget projects, Fatality Rate, Equipment Utilization Rate (PPRE), Free Cash Flow, and divestment value; as well as Learning & Growth aspects including HC Readiness, compliance with risk management implementation, Success Rate of Legal Settlement, GCG implementation according to PTPP subsidiary standards, ERP system implementation, and the level of internalization of the Company's culture.



Dari hasil penilaian yang telah dilakukan, KPI Korporat PPRE menunjukkan skor 2,71 dari skala 4,0, yang berarti bahwa pencapaian KPI korporat dinyatakan "Cukup".

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Direksi dan seluruh jajaran manajemen PP Presisi sepanjang tahun 2024. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mencermati berbagai aspek kinerja Perusahaan, baik dari sisi operasional, keuangan, tata kelola, manajemen risiko, hingga keberlanjutan dan digitalisasi. Berikut adalah beberapa pencapaian utama yang menjadi sorotan:

Based on the evaluation conducted, the Corporate KPI of PPRE scored 2.71 on a scale of 4.0, indicating that the achievement of the corporate KPI is considered "Satisfactory."

The Board of Commissioners appreciates the various accomplishments achieved by the Board of Directors and all levels of PP Presisi's management throughout 2024. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners has closely observed various aspects of the Company's performance, including operational, financial, governance, risk management, sustainability, and digitalization. Below are some of the key achievements that stand out:

Aspek Operasional:
Peningkatan Kapasitas dan Ekspansi Jasa Konstruksi Pertambangan

Sepanjang tahun 2024, PP Presisi berhasil memperkuat posisinya di sektor jasa pertambangan melalui berbagai langkah strategis. Salah satu pencapaian utama adalah perolehan kontrak baru di sektor pertambangan melalui entitas anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), dengan nilai Rp4,1 triliun. Kontrak ini mencakup proyek pembangunan *hauling road* untuk pertambangan batu bara, yang tidak hanya memperluas portofolio Perusahaan tetapi juga meningkatkan kapasitas operasional dalam mendukung berbagai proyek skala besar di industri pertambangan. Dengan ekspansi ini, PP Presisi menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan peluang di sektor jasa pertambangan yang menjadi fokus pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

Operational Aspect:
Capacity Improvement and Expansion of Mining Construction Services

Throughout 2024, PP Presisi successfully strengthened its position in the mining construction services sector through various strategic steps. One of the main achievements was the acquisition of new contracts in the mining sector through its subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), valued at IDR 4.1 trillion. This contract covers the construction project of a hauling road for coal mining, which not only expands the Company's portfolio but also enhances its operational capacity in supporting various large-scale projects in the mining industry. With this expansion, PP Presisi demonstrates its commitment to optimizing opportunities in the mining construction services sector, which is the focus of growth in the coming years.

Aspek Keuangan:
Kinerja Keuangan yang Solid

Meskipun dihadapkan dengan tantangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan kebijakan moneter yang lebih ketat, Perusahaan tetap mampu mempertahankan kinerja keuangannya dengan strategi yang adaptif. Perolehan kontrak baru dan efisiensi operasional menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pendapatan dan profitabilitas Perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa strategi diversifikasi dan optimalisasi aset telah membantu Perusahaan menjaga kesehatan neraca keuangan serta mengurangi potensi risiko terhadap volatilitas pasar.

Financial Aspect:
Solid Financial Performance

Despite facing external challenges such as commodity price fluctuations and tighter monetary policies, the Company has managed to maintain its financial performance with adaptive strategies. The acquisition of new contracts and operational efficiency have been key factors in sustaining the Company's revenue and profitability stability. The Board of Commissioners considers that the diversification and asset optimization strategies have helped the Company maintain a healthy financial balance sheet and reduce potential risks against market volatility.

Aspek Tata Kelola:
Peningkatan Standar Corporate Governance

Tahun 2024 juga menjadi tahun yang bersejarah bagi PP Presisi dalam hal penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk pertama kalinya, Perusahaan mengikuti ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan berhasil meraih skor 79,98, yang dikategorikan sebagai "*Good*" atau level 3. Capaian ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta praktik tata kelola yang sesuai dengan standar internasional. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah ini dan mendorong Perusahaan untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG guna memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, serta mendorong Perusahaan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari *Assessor*.

Governance Aspect:
Improvement of Corporate Governance Standards

The year 2024 also marked a historic milestone for PP Presisi in terms of implementing good corporate governance (GCG). For the first time, the Company participated in the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and successfully achieved a score of 79.98, which is categorized as "Good" or level 3. This achievement reflects the Company's commitment to improving transparency, accountability, and governance practices in line with international standards. The Board of Commissioners appreciates this step and encourages the Company to continue enhancing its compliance with GCG principles to strengthen investor and stakeholder trust, as well as to encourage the Company to follow up on the recommendations from the Assessor.

Aspek Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal:
Penguatan Sistem dan Mitigasi Risiko

Dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks, PP Presisi telah mengambil langkah strategis dalam meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Peningkatan efisiensi dalam rantai pasok serta implementasi sistem pengawasan berbasis digital menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan proses operasional dan memitigasi potensi risiko keuangan maupun operasional. Dewan Komisaris memandang bahwa Perusahaan telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam menerapkan pendekatan berbasis data dalam manajemen risiko, yang akan semakin meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha di tengah tantangan industri.

Risk Management and Internal Control Aspects:
System Strengthening and Risk Mitigation

In facing increasingly complex business dynamics, PP Presisi has taken strategic steps to enhance risk management and internal control systems. Improving supply chain efficiency and implementing digital-based monitoring systems are key elements in optimising operational processes and mitigating potential financial and operational risks. The Board of Commissioners believes that the Company has shown good progress in applying a data-driven approach to risk management, which will further enhance competitiveness and business resilience amidst industry challenges.

Aspek SDM:
Pengembangan SDM melalui PPRE Learning Center

Komitmen PP Presisi terhadap keberlanjutan tidak hanya diwujudkan dalam aspek lingkungan, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tahun 2024 menandai langkah maju perusahaan dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja dengan pembangunan PPRE *Learning Center*, yang difokuskan sebagai wadah pelatihan bagi mekanik baru di industri alat berat. Salah satu inisiatif utama dari program ini adalah pelaksanaan *batch* pertama dari *Fresh Mechanic Development Program* (FMDP), yang bertujuan untuk mencetak mekanik berkualitas tinggi guna mendukung operasional alat berat. Dewan Komisaris menilai bahwa inisiatif ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis serta memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Human Resources Aspect:
Development of Human Resources through PPRE Learning Center

PP Presisi's commitment to sustainability is not only realized in environmental aspects but also in the development of human resources (HR). The year 2024 marks a step forward for the company in enhancing workforce capacity with the establishment of the PPRE Learning Center, which is focused as a training facility for new mechanics in the heavy equipment industry. One of the main initiatives of this programme is the implementation of the first batch of the Fresh Mechanic Development Program (FMDP), which aims to produce high-quality mechanics to support heavy equipment operations. The Board of Commissioners believes that this initiative will provide long-term benefits for business sustainability and ensure the availability of competent workforce tailored to industry needs.

Pandangan atas Prospek Usaha Tahun 2025

Outlook on Business Prospects for the Year 2025

Tantangan perekonomian tahun 2025 diprediksi masih belum beranjak jauh dari kondisi tahun 2024. IMF dalam WEO edisi Januari 2025 memproyeksikan pertumbuhan perekonomian dunia sebesar 3,3%, tumbuh melandai dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,2%. Pertumbuhan ini terutama akan didorong perekonomian negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang berupaya menjalankan kebijakan proteksionisme oleh pemerintahan baru dalam rangka mengoptimalkan sumber daya internalnya. Di sisi lain, kebijakan ekonomi Amerika Serikat ini akan berdampak langsung atas inflasi dan neraca perdagangan dunia.

Inflasi global diprediksi akan mengalami penurunan terbatas yang akan menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju. Di sisi lain, suku bunga global yang masih tinggi berdampak terhadap pengetatan likuiditas dan terbatasnya arus modal masuk ke berbagai negara berkembang. Hal ini akan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara itu, fragmentasi dan proteksionisme akibat tensi geopolitik yang masih eskalatif, perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang belum mereda, serta risiko persaingan hegemoni AS-Tiongkok masih berlanjut.

Perekonomian Indonesia sendiri di tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh 5,2%, yang terutama akan ditopang bauran kebijakan fiskal dan moneter serta sektor keuangan. Konsumsi domestik diperkirakan masih kuat dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja.

The economic challenges in 2025 are predicted not to differ significantly from the conditions in 2024. In its January 2025 edition of the World Economic Outlook (WEO), the IMF projects global economic growth of 3.3%, a slight slowdown compared to 3.2% in 2024. This growth will primarily be driven by developed countries' economies, especially the United States, which is trying to implement protectionist policies by the new government to optimise its internal resources. On the other hand, these US economic policies will directly impact global inflation and trade balance.

Global inflation is expected to experience limited downturns, delaying the normalisation of monetary policy by central banks in developed countries. Meanwhile, high global interest rates affect liquidity tightening and limit the capital flow into various developing countries. This will put pressure on the exchange rates of developing countries, including Indonesia. Additionally, fragmentation and protectionism due to still-escalating geopolitical tensions, the Russia-Ukraine war, and unresolved conflicts in the Middle East, along with the ongoing US-China hegemony rivalry, persist.

Indonesia's economy in 2025 is expected to grow by 5.2%, mainly supported by a mix of fiscal and monetary policies and the financial sector. Domestic consumption is predicted to remain robust with controlled inflation and job creation. Economic transformation acceleration continues through industrial revitalisation, including downstream industry and the Electric Vehicles (EV) ecosystem, strengthening the service sector including the creative economy and digitalisation, and enhancing structural reforms to improve ease of doing business, and strengthen the competitiveness of export products and investments.

Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *Electric Vehicles* (EV), penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Berdasarkan hasil riset BCI Central, di tahun 2025 pasar konstruksi nasional diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang stabil, khususnya di sektor bangunan; meskipun tantangan diprediksi terjadi di konstruksi sipil akibat keterbatasan anggaran. Sektor bangunan juga diperkirakan akan mengalami peningkatan, sedangkan kategori proyek perumahan dan industri diharapkan menjadi kontributor terbesar terhadap nilai konstruksi bangunan tahun 2025. Prospek pasar ini diharapkan dapat memberikan gambaran optimis konstruksi Indonesia 1 (satu) tahun ke depan, sehingga dapat memberikan peluang untuk tumbuh bagi pelaku konstruksi Indonesia.

Dewan Komisaris memandang proyeksi yang disusun oleh manajemen untuk tahun 2025 dengan optimisme, terutama terkait dengan fokus Perusahaan pada layanan pertambangan seiring dengan peningkatan kapasitas dan permintaan mineral yang terus meningkat. Industri pertambangan, khususnya nikel, diproyeksikan memiliki prospek yang cerah. Permintaan global terhadap nikel terus meningkat seiring dengan transisi menuju ekosistem EV dan kebutuhan akan baterai penyimpanan energi. Namun, perlu dicatat bahwa pelaku usaha Tiongkok menguasai lebih kurang 75% kapasitas pemurnian nikel di Indonesia, yang dapat mempengaruhi dinamika pasar dan persaingan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menyetujui pembentukan Badan Pengelola Investasi sebagaimana telah terbentuk di Malaysia bernama Temasek, dengan modal awal sebesar Rp1.000 triliun. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pengembalian investasi, termasuk di sektor pertambangan dan infrastruktur. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk potensi hambatan dari tarif Amerika Serikat dan melemahnya permintaan global, yang dapat mempengaruhi ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin sejak September 2024 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris mendukung strategi manajemen untuk berfokus pada layanan pertambangan, terutama nikel, dengan catatan bahwa perusahaan harus tetap waspada terhadap dinamika pasar global dan domestik, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

According to BCI Central research, the national construction market in 2025 is expected to experience stable growth, especially in the building sector; although challenges are predicted in civil construction due to budget constraints. The building sector is also expected to increase, with residential and industrial project categories anticipated to be the largest contributors to the building construction value in 2025. This market prospect is expected to provide an optimistic picture of Indonesia's construction over the next year, providing growth opportunities for Indonesian construction actors.

The Board of Commissioners views the projections prepared by management for 2025 with optimism, particularly regarding the Company's focus on mining services in line with increasing capacity and demand for minerals. The mining industry, particularly nickel, is projected to have bright prospects. Global demand for nickel continues to rise in line with the transition towards the EV ecosystem and the need for energy storage batteries. However, it should be noted that Chinese businesses control approximately 75% of nickel refining capacity in Indonesia, which may influence market dynamics and competition.

Furthermore, the Indonesian Government has approved the formation of an Investment Management Agency as has been established in Malaysia, named Temasek, with an initial capital of Rp1,000 trillion. This step is expected to enhance performance and investment returns, including in the mining and infrastructure sectors. However, challenges remain, including potential barriers from US tariffs and weakening global demand, which may affect exports and economic growth. Bank Indonesia has lowered interest rates by 50 basis points since September 2024 to support economic growth.

Overall, the Board of Commissioners supports the management's strategy to focus on mining services, especially nickel, with the note that the company must remain vigilant about global and domestic market dynamics and ensure compliance with applicable regulations.



Pandangan atas Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

View on the Implementation of Good Corporate Governance Practices

Sebagai perusahaan terbuka dengan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari kelompok usaha (anak perusahaan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan berkepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip GCG terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Tanggung Jawab), Independensi (Kemandirian) dan Fairness (Kewajaran) yang dikenal sebagai TARIF ini menjadi dasar bagi Perusahaan dan seluruh entitas usaha di Indonesia untuk dapat menghadirkan pengelolaan organisasi bisnis yang akuntabel dan *compliance*.

Dewan Komisaris memandang, penerapan prinsip GCG di lingkungan Perusahaan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Direksi dan seluruh jajarannya terus berupaya untuk mengembangkan implementasi prinsip GCG, terutama terhadap kepatuhan atas peraturan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Pasar Modal pada umumnya. Dewan Komisaris meyakini komitmen PP Presisi dalam penerapan GCG dapat memaksimalkan nilai-nilai perusahaan, untuk meningkatkan nilai pemangku kepentingan, meningkatkan kinerja dan daya saing serta meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif.

Keberadaan organ-organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi memberikan bukti bahwa pengelolaan GCG di lingkup Perusahaan berjalan dengan baik. Kerja sama dalam hubungan yang harmonis antara Komite Audit dibantu oleh Komite Kepatuhan di bawah Dewan Komisaris dan Audit Internal di bawah Direksi menunjukkan adanya keseriusan Perusahaan untuk dapat membentuk proses audit internal yang seimbang dan terukur.

Secara khusus, Dewan Komisaris menyambut baik tindak lanjut dan pemenuhan keputusan pemegang saham yang tertuang dalam keputusan pemegang saham dalam forum RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasinya atas penilaian penerapan GCG untuk mendapatkan hasil atau *output* tata kelola dan evaluasi atas sejauh apa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di lingkup Perusahaan. Khususnya langkah perdana PP Presisi dalam melakukan penilaian berbasis ACGS di tahun 2024 dengan raihan skor 79,98 yang dikategorikan sebagai "*Good*" atau level 3.

Catatan penting bagi perkembangan GCG di lingkup Perusahaan adalah pengendalian internal dan pengelolaan risiko sesuai dengan bisnis inti dan penyesuaian terhadap tren pengelolaan risiko dewasa ini. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris telah berupaya untuk mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai salah satu agenda besar terkait perkembangan GCG.

As a publicly listed company on the Indonesia Stock Exchange, and as part of a State-Owned Enterprise (SOE) group, the Company is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). These GCG principles consist of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, known as TARIF, which serve as the foundation for the Company and all business entities in Indonesia to ensure accountable and compliant business management.

The Board of Commissioners views the application of GCG principles within the Company as continuously improving over time. The Board of Directors and all their staff continuously strive to develop the implementation of GCG principles, particularly regarding compliance with prevailing regulations on the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority (OJK). The Board of Commissioners believes that PP Presisi's commitment to implementing GCG can maximize corporate values to enhance stakeholder value, improve performance and competitiveness, and foster a conducive work environment.

The presence of supporting organs assisting the Board of Commissioners and Directors demonstrates that GCG management within the Company is functioning well. The harmonious relationship between the Audit Committee under the Board of Commissioners and Internal Audit under the Board of Directors shows the Company's seriousness in establishing a balanced and measurable internal audit process.

Specifically, the Board of Commissioners welcomes the follow-up and fulfillment of shareholder resolutions outlined in resolutions from the Annual General Meeting (AGM) held on June 5, 2024. The Board of Commissioners also appreciates the assessment of GCG implementation to achieve governance outcomes and evaluate the extent to which GCG principles have been applied within the Company. PP Presisi's pioneering step in conducting assessments based on ACGS in 2024, achieving a score of 79.98 categorized as "Good" or level 3, is particularly noteworthy.

A crucial aspect of GCG development within the Company is internal control and risk management in line with core business activities and adjustments to current risk management trends. The Board of Directors, together with the Board of Commissioners, has pursued the development of internal control systems and risk management as one of the major agendas related to GCG development.

Pandangan atas Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan dan Peran Dewan Komisaris dalam WBS Perusahaan

View on the Management of the Company's Whistleblowing System (WBS) and the Role of the Board of Commissioners in the Company's WBS

Perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG tak lepas dari kemampuan Perusahaan untuk menghadirkan sistem pelaporan pelanggaran yang mandiri dan bebas dari kepentingan manapun. Keberadaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS) memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Perusahaan telah melengkapi WBS-nya melalui pembentukan Tim Pelaksana Penerapan WBS yang dibentuk secara mandiri. Tim Pelaksana Penerapan WBS berperan menerima seluruh laporan yang masuk melalui WBS Perusahaan dan menindaklanjuti laporan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.
Dalam sistem WBS yang diterapkan di lingkungan Perusahaan, Dewan Komisaris berperan sebagai penanggung jawab pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Komisaris Utama dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor, jika terlapor anggota Dewan Komisaris. Pelaksanaan telaah atas laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris serta Komite Audit dan apabila diperlukan investigasi akan menggunakan investigator/auditor luar yang independen. Di sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pelaporan dan/atau pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan. Dewan Komisaris terus menghimbau Direksi dan jajaran manajemen untuk dapat terus mensosialisasikan keberadaan WBS Perusahaan agar penerapan GCG di lingkup PP Presisi dapat terus menunjukkan penguatan pada level yang diharapkan.

The development of the implementation of GCG (Good Corporate Governance) principles is inseparable from the Company's ability to provide an independent whistleblowing system that is free from any interests. The existence of a Whistleblowing System (WBS) allows for a reporting mechanism that ensures confidentiality and protection for the whistleblower.

The Company has enhanced its WBS by forming an independent WBS Implementation Team. This team is responsible for receiving all reports submitted through the Company's WBS and following up on reports while maintaining the confidentiality of the identity of both the reporter and the reported. In the WBS system implemented within the Company, the Board of Commissioners is responsible for the execution of the Whistleblowing System. In the case of violations committed by the Directors, the violation report is submitted to the Main Commissioner and/or non-reported members of the Board of Commissioners if the reported party is a member of the Board of Commissioners. The review of such violation reports is entrusted to the Board of Commissioners and the Audit Committee, and if necessary, an independent external investigator/auditor will be used for investigation. Throughout 2024, there were no reports or complaints submitted through the Company's WBS channel. The Board of Commissioners continues to urge the Directors and management to continue to promote the existence of the Company's WBS so that the implementation of GCG within the scope of PP Presisi can continue to show strengthening at the expected level.

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Assessment of the Performance of the Supporting Organs of the Board of Commissioners

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris tak lepas dari peran kinerja organ pendukungnya, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Kepatuhan. Penilaian terhadap kinerja ketiga organ pendukung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pelaporan yang telah diberikan oleh masing-masing organ, yang kemudian tertuang dalam *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing organ pendukung.

Di tahun 2024 Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja ketiga organ pendukung Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya organ pendukung tersebut, sebagai berikut:

The execution of supervisory duties by the Board of Commissioners is inseparable from the role of the performance of its supporting organs, which consist of the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance Committee. The evaluation of the performance of these three supporting organs is carried out through the execution of their duties and functions as well as the reports given by each organ, which are then reflected in the Key Performance Indicators (KPIs) of each supporting organ.

In 2024, the Board of Commissioners assessed that the performance of the three supporting organs of the Board of Commissioners had been running well and in accordance with the purpose of establishing these supporting organs, as follows:



Dewan Komisaris memandang Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Di sepanjang tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa tugas seperti menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Dewan Komisaris dan Komitenya; bertindak sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan; serta memastikan Dewan Komisaris dan organ pendukungnya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan menerapkan prinisp-prinsip GCG.

The Board of Commissioners views that the Secretary of the Board of Commissioners has carried out their duties and responsibilities in supporting the Board of Commissioners in executing its tasks. Throughout 2024, the Secretary of the Board of Commissioners has performed several duties such as organizing and documenting meetings of the Board of Commissioners and its committees; acting as a liaison between the Board of Commissioners and the internal as well as external parties of the Company; and ensuring that the Board of Commissioners and its supporting organs comply with prevailing regulations and implement the principles of GCG.



Komite Audit melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat di sepanjang tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) kali. Komite Audit juga mengkaji dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris memiliki referensi yang memadai untuk memberikan pendapat dan saran atas laporan manajemen, hasil temuan unit audit internal dan auditor eksternal, serta usulan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris, seperti rekomendasi Komite Audit atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2024.

Dari sisi penilaian berbasis kuantitas, Komite Audit mencatatkan capaian KPI hingga 95% dari bobot yang ditargetkan.

The Audit Committee carried out its duties effectively and held meetings throughout 2024 a total of 7 (seven) times. The Audit Committee also reviewed and provided input to the Board of Commissioners, giving them adequate references to express opinions and suggestions on management reports, findings of the internal audit unit and external auditors, as well as proposals from the Board of Directors requiring approval or recommendations from the Board of Commissioners. This includes the Audit Committee's recommendation on appointing a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for the 2024 fiscal year.

In terms of quantitative-based assessments, the Audit Committee recorded KPI achievements up to 95% of the targeted weight.



Komite Kepatuhan telah menyelenggarakan rapat di sepanjang tahun 2024 sebanyak 5 (lima) kali. Komite Kepatuhan juga melakukan telahaan atas berbagai kepatuhan yang diperlukan oleh manajemen untuk dapat memenuhi regulasi, seperti pemberian persetujuan dan arahan terhadap aksi korporasi, perkembangan penerapan keberlanjutan dari KPI, SMAP, *assessment* GCG, prosedur manajemen aset Perusahaan, proses nominasi hingga pengangkatan Direksi Perusahaan, serta manajemen risiko Perusahaan. Perlu diketahui bahwa peran Komite Nominasi dan Remunerasi bagian dari tugas dari Komite Kepatuhan.
Dari sisi penilaian berbasis kuantitas, Komite Kepatuhan mencatatkan capaian KPI hingga 95% dari bobot yang ditargetkan.

The Compliance Committee held a total of five (5) meetings throughout 2024. The Committee also conducted reviews of various compliance matters required by management to meet regulatory obligations. These included providing approvals and guidance on corporate actions, monitoring the development of sustainability implementation through KPIs, the Anti-Bribery Management System (SMAP), GCG assessments, the Company's asset management procedures, the nomination and appointment process of the Company's Directors, and the Company's risk management.

Dewan Komisaris memberikan apresiasinya atas seluruh masukan yang telah diberikan organ-organ pendukung untuk menunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners appreciates all the input provided by the supporting organs to support the supervisory duties of the Board of Commissioners.

Informasi tentang Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris

Information on Changes in the Composition and Structure of the Board of Commissioners

Berdasarkan keputusan pemegang saham yang tertuang dalam RUPS Tahunan tahun buku 2023 tanggal 5 Juni 2024, terdapat perubahan jumlah dan susunan Dewan Komisaris dengan kronologi yang dapat dilihat di bawah ini.

Based on the decision of the shareholders as stated in the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 on June 5, 2024, there are changes in the number and composition of the Board of Commissioners with a chronology that can be seen below.

Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Tahun 2024

Chronology of Changes in the Board of Commissioners in 2024

Periode 1 Januari s.d 5 Juni 2024 January 1 to June 5, 2024	**Periode 5 Juni s.d 31 Desember 2024** June 5 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)		Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Indra Jaya Rajagukguk diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Independen. At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, Indra Jaya Rajagukguk was honorably discharged from his position as Independent Commissioner.
Albert Simangunsong (komisaris) (Commissioner)	Albert Simangunsong (komisaris) (Commissioner)	
Muhammad Zahid (komisaris) (Commissioner)	Muhammad Zahid (komisaris) (Commissioner)	

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2024

Composition of the Company's Board of Commissioners as of 31 December 2024

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Appointment Basis	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Term of Office
Nur Rochmad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	• Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. • Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H. , Notaris di Jakarta Selatan. • Declaration of Meeting Decision Deed No. 41 dated 24 May 2023 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. • Declaration of Meeting Decision Deed No. 39 dated 27 April 2022 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023 until the General Meeting of Shareholders (GMS) to be held in 2028.	Ke -2 2nd
Albert Simangunsong	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 39 dated April 27, 2022, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.	20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 20, 2022 until the General Meeting of Shareholders (GMS) to be held in 2027.	Ke -1 1st
Muhammad Zahid	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 41 dated May 24, 2023, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023 until the General Meeting of Shareholders (GMS) to be held in 2028.	Ke -1 1st

Tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sejak 31 Desember 2024 hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini per tanggal 29 April 2025.

There has been no change in the composition of the Board of Commissioners from December 31, 2024 until the signing of this annual report on April 29, 2025.

Akhir Kata

Closing Statement

Dewan Komisaris mengajak seluruh Insan PP Presisi untuk memanjatkan syukur atas seluruh pencapaian kinerja yang telah ditorehkan Perusahaan di tengah situasi yang masih diliputi tantangan ekonomi dunia. Kepada seluruh pemegang saham dan investor, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasnya kepada Direksi atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam merumuskan berbagai langkah kebijakan yang cukup tepat di tengah tantangan yang ada. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perusahaan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal.

Dewan Komisaris sungguh berharap, keberhasilan di tahun 2024 menjadi catatan penting bagi seluruh pihak untuk dapat terus membangun kebersamaan dan merumuskan langkah yang tepat untuk membawa Perusahaan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

The Board of Commissioners invites all PP Presisi personnel to express gratitude for the Company's performance achievements amidst the ongoing challenges in the global economy. To all shareholders and investors, the Board of Commissioners extends its appreciation for the trust that has been given. The Board also expresses its gratitude to the Board of Directors for their cooperation and commitment in formulating appropriate policy measures in the face of existing challenges. Appreciation is also extended to all employees of the Company for their optimal contributions.

The Board of Commissioners sincerely hopes that the success achieved in 2024 will serve as a significant milestone for all parties to continue fostering unity and formulating the right steps to lead the Company toward better growth.

Jakarta, 29 April 2025
Atas nama Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk
Jakarta, April 29 2025
On behalf of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk



Nur Rochmad
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Inovasi dan ekspansi pada jasa infrastruktur pertambangan yang telah dilakukan PT PP Presisi Tbk dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan hasil yang cukup positif. Di tengah tantangan sektor konstruksi nasional yang masih terus menunjukkan kekhawatiran, PP Presisi mampu memperlihatkan kemampuannya untuk dapat tumbuh dengan cukup baik. Untuk itu, izinkan saya mewakili Direksi dan seluruh Insan PP Presisi, menyampaikan laporan kinerja Perusahaan tahun buku 2024 yang dapat memberikan gambaran tentang perjalanan PP Presisi dalam mengarungi tantangan dan berupaya meraih potensi terbaiknya.

Dear Shareholders and Stakeholders,

The innovation and expansion in mining infrastructure services carried out by PT PP Presisi Tbk in recent years have shown quite positive results. Amidst the ongoing concerns in the national construction sector, PP Presisi has been able to demonstrate its ability to grow quite well. Therefore, allow me, on behalf of the Board of Directors and all members of PP Presisi, to present the Company's performance report for the fiscal year 2024, which provides an overview of PP Presisi's journey in navigating challenges and striving to achieve its best potential.

Langkah Adaptif dan Pencapaian tahun 2024

View on the Implementation of Good Corporate Governance Practices

Industri konstruksi nasional menemui berbagai tantangan yang terjadi di sepanjang tahun 2024. Perekonomian global yang mengalami penurunan menjadi salah satu faktor yang berdampak pada perkembangan industri dan investasi di Indonesia. Tak hanya itu, ajang Pemilihan Umum (Pemilu) nasional yang digelar secara serentak pada Februari 2024 memberikan dampak pada perilaku menunggu dari berbagai pelaku usaha untuk dapat berinvestasi.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia di tahun 2024 mampu mencatatkan pertumbuhan di atas kinerja perekonomian dunia. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik tanggal 5 Februari 2025 menyebutkan bahwa lapangan usaha Konstruksi mencatat kinerja positif, dengan pertumbuhan sebesar 7,02% atau meningkat dari tahun sebelumnya dengan catatan pertumbuhan sebesar 4,91%. Hal ini juga sejalan dengan berbagai mega proyek yang terus berlanjut di tahun 2024 setelah tertahan akibat pandemi COVID-19 yang mendera pada periode 2020 hingga awal 2023.

Salah satu faktor penting sebagai pendorong pertumbuhan sektor konstruksi nasional adalah belanja Pemerintah Indonesia. Dengan anggaran mencapai Rp423 triliun atau 12,73% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, Pemerintah Indonesia berupaya

The national construction industry faced various challenges throughout 2024. The global economic downturn was one of the factors impacting the development of the industry and investment in Indonesia. Additionally, the national General Election (Pemilu) held simultaneously in February 2024 led many business actors to adopt a wait-and-see attitude towards investment.

Nevertheless, Indonesia's economy in 2024 was able to record growth above the global economic performance. In fact, the Central Statistics Agency (BPS) in its official statistical news on February 5, 2025, mentioned that the construction business field noted positive performance, with a growth of 7.02%, up from the previous year's growth record of 4.91%. This was also in line with various mega projects that continued in 2024 after being held back due to the COVID-19 pandemic from 2020 to early 2023.

One of the important factors driving the growth of the national construction sector is the spending of the Indonesian Government. With a budget reaching Rp423 trillion or 12.73% of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for 2024, the Indonesian Government is striving to accelerate the completion of national strategic projects such as the trans-Sumatra toll road, Patimban Port, and the construction of the Nusantara National Capital City (IKN). On the regulatory side, the enactment of Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022

melakukan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional seperti jalan tol trans Sumatera, Pelabuhan Patimban, maupun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di sisi regulasi, disahkannya Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mempercepat proses penyelesaiain birokrasi perizinan untuk mendorong aktivitas investasi, salah satunya di dunia industri konstruksi nasional.

Menghadapi berbagai tantangan yang ada, PP Presisi tetap melanjutkan hasil diversifikasi bisnis dari lini bisnis konstruksi ke lini bisnis jasa pertambangan. Untuk lini bisnis konstruksi, Perusahaan berfokus pada berbagai proyek yang bersinergi dengan entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, baik sebagai mitra Kerja Sama Operasi (KSO) maupun subkontraktor. Untuk sektor jasa pertambangan, Perusahaan berfokus untuk mengembangkan pasar di tambang mineral khususnya nikel, dengan pekerjaan berupa pengembangan fasilitas infrastruktur tambang dan pekerjaan penambangan bijih nikel. Di tahun 2024 Perusahaan juga melakukan kemitraan strategis dengan pihak ketiga untuk mendukung proses bisnis agar dapat berjalan lebih efisien dan menyumbang profitabilitas yang lebih baik. Di samping itu, PP Presisi juga terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan aset alat berat yang dimilikinya melalui layanan beton pra-cetak dan *ready mix* untuk berbagai proyek konstruksi sebagaimana telah dijalankan selama ini.

Penajaman fokus pada bisnis jasa kosntruksi pertambangan tentu tidak dilakukan hanya karena adanya peluang dan kesempatan. Berbekal aset peralatan berat yang dimiliki Perusahaan, yang disertai juga dengan pengalaman Perusahaan pada berbagai proyek infrastruktur dan konstruksi nasional berskala besar, tentu menjadi modal penting dalam keputusan untuk memperkuat bisnis jasa pertambangan tersebut.

Manajemen pun menyadari, industri pertambangan di sepanjang tahun 2024 memberikan catatan yang korektif. BPS dalam Berita Resmi Statistik-nya merilis adanya penurunan lapangan usaha Pertambangan, dari catatan pertumbuhan sebesar 6,12% di tahun 2023 menjadi 4,90% di tahun 2024. Namun, proyeksi pengembangan ekosistem *Electic Vehicle* (EV) atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di mana nikel menjadi salah satu komoditas mendasar dalam pembentukan ekosistem EV menjadi pertimbangan fundamental bagi Perusahaan untuk dapat menciptakan pertumbuhan bisnis dari peluang yang ada. Terutama dengan potensi Indonesia sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, yang juga ditopang oleh program Pemerintah Indonesia terkait hilirisasi nikel.

Hingga akhir tahun 2024, proyek jasa pertambangan yang dikerjakan Perusahaan meliputi:

on Job Creation into Law, accelerates the resolution of licensing bureaucracy to encourage investment activities, including in the national construction industry.

Facing various challenges, PP Presisi continues to pursue business diversification from the construction business line to the mining construction services line. For the construction business line, the company focuses on various projects that synergize with its parent entity, PT PP (Persero) Tbk, either as an Operational Cooperation (KSO) partner or subcontractor. In the mining construction services sector, the company focuses on developing markets in mineral mines, especially nickel, with work including the development of mining infrastructure facilities and nickel ore mining. In 2024, the company also entered into strategic partnerships with third parties to support business processes to run more efficiently and contribute to better profitability. Additionally, PP Presisi also strives to optimize its heavy equipment assets through pre-cast concrete and ready mix services for various construction projects as has been carried out so far.

The focus on the mining construction services business is not only due to opportunities and possibilities. Armed with the company's heavy equipment assets, along with the company's experience in various large-scale national infrastructure and construction projects, it becomes an important asset in the decision to strengthen the mining construction services business.

Management also acknowledges that the mining industry throughout 2024 showed corrective records. BPS in its official statistical news released a decline in the mining business field, from a growth record of 6.12% in 2023 to 4.90% in 2024. However, the projection of the development of the Electric Vehicle (EV) or Battery-Based Electric Motor Vehicle (KBLBB) ecosystem where nickel is a fundamental commodity in the formation of the EV ecosystem becomes a fundamental consideration for the company to be able to create business growth from the opportunities that exist. Especially with Indonesia's potential as one of the largest nickel producers in the world, supported by the Indonesian Government's program related to nickel downstreaming.

Until the end of 2024, the mining construction services projects undertaken by the company include:



- ✅ *Hauling Roads Upgrade* Weda Bay *Nickel*;
- ✅ *Secondary Hauling* Weda Bay *Nickel*;
- ✅ *Mining Development* Weda Bay *Nickel*;
- ✅ *Mines of* Bahadopi *Block 2 and 3 Project Above Ground and Infrastructure*;
- ✅ Quarry Development PT Vale Indonesia;
- ✅ *Mining Development and Operation* Weda Bay Nickel;
- ✅ Hauling Road Upgrade Huafei Biri Biri; dan
- ✅ *Hauling Road* to Tofu Position

Aspek permodalan juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan Perusahaan. Hingga akhir tahun 2024, permodalan Perusahaan mengalami penguatan yang cukup positif. Hal ini terlihat dari membaiknya rasio utang berbunga terhadap ekuitas dalam beberapa tahun terakhir; dari 61,52% di tahun 2022 menjadi 51,70% di tahun 2023 dan terus membaik menjadi 42,89% di tahun 2024. Hal ini tak lepas dari komitmen PP Presisi dalam melakukan pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya yang berdampak pada menurunnya jumlah pinjaman berbunga bersih.

Tahun 2024 juga menjadi momentum penting bagi Perusahaan, khususnya dalam hal pencatatan. Sebagaimana dapat dilihat pada Laporan Keuangan teraudit tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM), PP Presisi telah membukukan segmen pertambangan sebagai segmen tersendiri untuk memantau hasil segmen pertambangan dalam rangka pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja per segmen operasi, dalam hal ini terbagi menjadi 4 (empat) segmen yaitu bisns konstruksi, penyediaan fasilitas *ready mix*, persewaan alat berat, dan bisnis jasa pertambangan, dinilai berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Hingga akhir tahun 2024, segmen konstruksi masih memberikan kontribusi terbesar bagi bisnis PP Presisi, dengan kontribusi mencapai 92,51% terhadap pendapatan konsolidasian Perusahaan.

Dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, di tahun 2024 Perusahaan mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp6,818 miliar yang didominasi oleh perolehan kontrak baru lini bisnis jasa pertambangan. Perusahaan mampu meningkatkan pendapatannya 11,47%, dari Rp3,40 triliun di tahun 2023 menjadi Rp3,79 triliun di tahun 2024. Pertumbuhan laba tahun berjalan tercatat sebesar 12,33%, dari Rp172,78 miliar di tahun 2023 menjadi Rp194,09 miliar di tahun 2024. Tingginya pertumbuhan pendapatan laba bersih ini terutama didorong dengan efisiensi bisnis yang sejalan dengan aspek strategis perusahaan.

Capital structure is also an important factor in the management of the Company. By the end of 2024, the Company's capital structure showed a positive strengthening. This is reflected in the improvement of the interest-bearing debt-to-equity ratio in recent years, from 61.52% in 2022 to 51.70% in 2023, and further improving to 42.89% in 2024. This is a result of PP Presisi's commitment to debt repayment to banks and other financial institutions, which has led to a reduction in net interest-bearing loans.

The year 2024 also became an important momentum for the Company, particularly in terms of its financial reporting. As can be seen in the 2024 audited financial statements, audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM), PP Presisi has accounted for the mining segment as a separate segment to monitor mining segment results for decision-making on resource allocation and performance assessment. The performance of each operating segment, which is divided into four segments—construction business, ready-mix supply facilities, heavy equipment rental, and mining construction services—was evaluated based on operating profit or loss, measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements. By the end of 2024, the construction segment remained the largest contributor to PP Presisi's business, with a contribution of 92.51% to the Company's consolidated revenue.

With the ability to adapt well, in 2024 the Company recorded new contract acquisitions amounting to IDR 6.818 billion, dominated by new contracts in the mining services business line. The Company was able to increase its revenue by 11.47%, from IDR 3.40 trillion in 2023 to IDR 3.79 trillion in 2024. The growth in net profit for the year was recorded at 12.33%, from IDR 172.78 billion in 2023 to IDR 194.09 billion in 2024. This significant growth in net profit is primarily driven

Pada perimbangan posisi keuangan, aset Perusahaan mampu tumbuh 6,75% dengan perimbangan kenaikan liabilitas sebesar 7,91% dan ekuitas yang tumbuh 5,41%. Profil keuangan PP Presisi yang cukup sehat ini juga terlihat dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2024 yang meningkat signifikan hingga 69,65% dibandingkan akhir tahun 2023.

by business efficiencies aligned with the Company's strategic aspects.

In terms of financial position, the Company's assets grew by 6.75%, with liabilities increasing by 7.91% and equity growing by 5.41%. PP Presisi's solid financial profile is also evident from the significant increase of 69.65% in cash and cash equivalents by the end of 2024 compared to the end of 2023.



Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Proses Implementasi Strategi

The Role of the Board of Directors in Strategy Formulation and Strategy Implementation Process

Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dirumuskan dalam rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dokumen RKAP ini menjadi acuan berbagai target Perusahaan, yang pada akhirnya dituangkan dalam kontrak manajemen berbentuk *Key Performance Indicator* (KPI) meliputi masing-masing Direktorat hingga Divisi/Biro yang akan diturunkan hingga Performance Appraisal.

Direksi bersama jajaran manajemen, melalui masukan dari Dewan Komisaris, terus melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan Perusahaan serta implementasinya di seluruh level organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan Perusahaan masih relevan dengan perkembangan bisnis dan penerapannya telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target Perusahaan. Direksi berperan aktif untuk memastikan bahwa seluruh level organisasi memahami serta menerapkan strategi Perusahaan secara konsisten pada masing-masing unit bisnis. Untuk itu, Direksi terlibat langsung dalam pengawasan implementasi strategi serta memastikan bahwa seluruh bagian organisasi memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide-ide dan inovasi yang dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan.

Keterlibatan Direksi dalam pengawasan implementasi strategi terlihat dari pertumbuhan kontrak baru Perusahaan yang difokuskan pada bisnis inti, yaitu pada bisnis konstruksi sipil dan jasa pertambangan. Di samping itu, strategi *cost leadership* melalui efisiensi biaya produksi, penggunaan material yang efisien, serta penerapan sistem kerjasama strategis bagi pengadaan sparepart dan perawatan maupun perbaikan alat atau *Full Maintenance Contract* (FMC) juga menjadi bagian dari strategi yang diusung Direksi bersama jajarannya. Demikian pula pada strategi kontrak payung untuk mengikat harga material dan solar dengan harga yang lebih murah, upaya menjaga stabilitas fluktuasi kurs, maupun *Capital Expenditure* (Capex), Direksi terlibat aktif agar strategi Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

The Company's strategy and strategic policies are formulated in the work plan and budget, which is prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners in a Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors. This is then documented in the form of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The RKAP document serves as a reference for various Company targets, which are ultimately outlined in management contracts in the form of Key Performance Indicators (KPIs) covering each Directorate down to Divisions/Bureaus, and are further translated into Performance Appraisals.

The Board of Directors, together with the management team, continuously conducts periodic evaluations of the Company's strategy and policies, as well as their implementation across all levels of the organization, with input from the Board of Commissioners. This is done to ensure that the Company's strategy and policies remain relevant to business developments and that their implementation is aligned with the Company's goals and targets. The Board of Directors plays an active role in ensuring that all levels of the organization understand and consistently apply the Company's strategy within each business unit. As part of this, the Board of Directors is directly involved in overseeing the implementation of the strategy and ensuring that every part of the organization has equal opportunities to present ideas and innovations that can support the achievement of the Company's objectives.

The involvement of the Board of Directors in overseeing the implementation of the strategy is reflected in the growth of the Company's new contracts, which are focused on the core business areas, namely civil construction and mining construction services. Additionally, the cost leadership strategy, through production cost efficiency, efficient material use, and the implementation of strategic partnerships for spare part procurement and maintenance or repair, including Full Maintenance Contracts (FMC), is also part of the strategy put forward by the Board of Directors and its team. Similarly, for umbrella contract strategies to lock in lower material and fuel prices, efforts to stabilize currency fluctuations, as well as Capital Expenditure (Capex), the Board of Directors is actively involved to ensure the Company's strategies are executed as planned.

Pencapaian Target Tahun 2024

Target Achievement for the Year 2024

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan berhasil menunjukkan kinerja yang solid dan adaptif di tengah tantangan dinamis industri konstruksi dan infrastruktur. Dengan komitmen kuat terhadap *operational excellence*, inovasi berkelanjutan, dan penguatan sinergi antar entitas bisnis, PP Presisi mampu mencapai bahkan melampaui sejumlah target strategis yang telah ditetapkan sejak awal tahun.

Perolehan kontrak baru mencapai 129,90% dari target yang telah direvisi untuk tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi ekspansi pasar serta keberhasilan dalam mengakuisisi berbagai proyek strategis, terutama pada sektor jasa pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Untuk kinerja keuangan, PP Presisi mencatat realisasi pendapatan dan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan penguatan kinerja yang cukup baik, yang ditopang oleh kontribusi berkelanjutan dari lini jasa pertambangan dan konstruksi.

Demikian pula utang berbunga Perusahaan tercatat berhasil ditekan di bawah target. Hal ini menandakan pengelolaan utang yang disiplin dan efisien, terutama dalam menjaga leverage tetap terkendali. Keberhasilan ini juga tercermin dari rasio utang berbunga bersih terhadap modal yang berada pada tingkat yang sangat konservatif dan jauh di bawah target yang ditetapkan, di mana ini mencerminkan tingkat risiko keuangan yang rendah dan kapasitas pendanaan yang sehat untuk ekspansi ke depan.

Perimbangan posisi keuangan menunjukkan perjalanan Perusahaan telah sesuai pada jalur yang telah ditetapkan. Baik nilai aset, liabilitas, maupun ekuitas, seluruhnya tercatat di atas target yang ditetapkan. Ekspansi operasional dan peningkatan nilai proyek berjalan, diiringi nilai kewajiban yang masih dalam kendali, serta permodalan sendiri yang menguat, memberikan kekuatan bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh berkembang di masa mendatang.

Throughout 2024, the Company successfully demonstrated solid and adaptive performance amidst the dynamic challenges of the construction and infrastructure industry. With a strong commitment to operational excellence, continuous innovation, and strengthening synergies between business entities, PP Presisi was able to achieve and even surpass several strategic targets set at the beginning of the year.

New contract acquisitions reached 129.90% of the revised target for 2024. This achievement reflects the effectiveness of the market expansion strategy and success in acquiring various strategic projects, particularly in the mining services and infrastructure development sectors. For financial performance, PP Presisi recorded revenue and net profit attributable to the parent entity's owners that did not fully meet the set targets. However, the improved performance compared to the previous year shows a strong overall performance, supported by the continued contribution from mining and construction service lines.

Similarly, the Company's interest-bearing debt was successfully reduced below the target. This indicates disciplined and efficient debt management, particularly in keeping leverage under control. This success is also reflected in the net interest-bearing debt-to-equity ratio, which is at a very conservative level and well below the established target. This reflects a low financial risk level and a healthy funding capacity for future expansion.

The balance of the financial position shows that the Company's journey is on track with the established path. Both assets, liabilities, and equity all exceeded the set targets. Operational expansion and the increase in the value of ongoing projects, coupled with liabilities remaining under control and strengthened equity, provide the Company with the strength to grow and develop in the future.

Kendala, Tantangan, dan Solusinya

Obstacles, Challenges, and Solutions

Tantangan terbesar PP Presisi di tahun 2024 ditemukan dalam efisiensi proses bisnis, khususnya proses bisnis di sektor konstruksi. Sebagai kontraktor berbasis alat berat, Perusahaan sangat mengandalkan kinerja aset peralatan yang optimal untuk dapat mendongkrak profitabilitasnya. Hal ini menjadi fokus dan perhatian manajemen, terutama dengan potensi pasar konstruksi pertambangan nasional yang cukup besar. Untuk itu, di tahun 2024 Perusahaan menerapkan sistem perawatan alat berat melalui kemitraan strategis dengan pihak ketiga untuk menjaga produktivitas alat berat Perusahaan. Manajemen berharap, langkah penting ini akan mampu memberikan dampak positif bagi optimalisasi aset alat berat yang dimiliki Perusahaan di masa mendatang.

Tantangan lainnya muncul dari peluang dan risiko atas bisnis jasa pertambangan yang dijalani Perusahaan. Sebagai pelaku usaha yang telah bergerak cukup lama di sektor konstruksi, transisi untuk merambah jasa pertambangan tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda; meskipun aset alat berat yang dimiliki PP Presisi sebagian besar dapat digunakan baik pada sektor konstruksi maupun jasa pertambangan. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kompetensi pegawai di bidang pertambangan dan mekanik. Untuk itu, manajemen mengambil beberapa pendekatan strategis seperti rekrutmen tenaga ahli yang dapat menjawab tantangan ini.

Keberadaan tenaga profesional yang direkrut untuk proses grade control menjadi salah satu penyesuaian besar yang dilakukan Perusahaan. Berkembangnya industri pertambangan nikel nasional tentunya menciptakan daya saing tersendiri bagi para pelaku usaha, khususnya para penambang, untuk mendapatkan tenaga profesional yang berkualitas. Tak hanya itu, Perusahaan juga mengedepankan integritas dalam proses rekrutmen tenaga ahli, agar visi dan misi serta budaya korporasi tetap dapat menjadi prinsip utama dalam seluruh cakupan kegiatan yang dilakukan, termasuk operasi di lapangan.

PP Presisi's biggest challenge in 2024 is found in business process efficiency, especially in the construction sector. As a heavy equipment-based contractor, the Company heavily relies on optimal equipment asset performance to boost its profitability. This is a focus and concern for management, especially with the substantial potential in the national mining construction market. Thus, in 2024, the Company implements a heavy equipment maintenance system through strategic partnerships with third parties to maintain the productivity of its equipment. Management hopes that this crucial step will positively impact the optimisation of the Company's heavy equipment assets in the future.

Another challenge arises from the opportunities and risks of the mining construction services business pursued by the Company. As a long-time player in the construction sector, transitioning to mining construction services certainly requires a different approach; although most of PP Presisi's heavy equipment assets can be used in both the construction and mining construction services sectors. One of them is the need to enhance the competency of employees in the mining and mechanical fields. Therefore, management adopts several strategic approaches, such as recruiting experts who can address this challenge.

The presence of professionals recruited for the grade control process becomes one of the significant adjustments made by the Company. The growth of the national nickel mining industry certainly creates its own competitiveness for business players, especially miners, to acquire quality professionals. Furthermore, the Company also prioritises integrity in the recruitment process of experts, so that the vision and mission, as well as corporate culture, can remain the main principles in all activities conducted, including field operations.

Prospek Usaha Tahun 2025

Business Prospects for the Year 2025

Situasi tahun 2025 diprediksi masih akan diliputi berbagai kekhawatiran, terutama dengan kebijakan ekonomi protektif Amerika Serikat yang akan menciptakan gejolak pada inflasi dan neraca perdagangan dunia. Pemerintah Indonesia sendiri telah mempersiapkan berbagai langkah untuk dapat mengantisipasi kekhawatiran tersebut, termasuk revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *Electric Vehicles* (EV) sebagai salah satu pilar penting dalam akselerasi transformasi ekonomi nasional.

PP Presisi telah menyusun strategi korporat dengan melakukan percepatan pemulihan operasional bisnis guna meningkatkan profitabilitas yang akan berfokus pada lini bisnis konstruksi yaitu jasa pertambangan dan pekerjaan infrastruktur sipil. Untuk jasa pertambangan, Perusahaan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan, mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan, hingga kegiatan utama jasa pertambangan seperti pekerjaan *Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore hauling*, hingga *Road Maintenance*.

The situation in 2025 is predicted to still be filled with various concerns, especially with the United States' protective economic policies that will create fluctuations in global inflation and trade balances. The Indonesian government has prepared various measures to anticipate these concerns, including the revitalisation of industries such as downstream processing and the Electric Vehicles (EV) ecosystem as one of the important pillars in accelerating the transformation of the national economy.

PP Presisi has formulated a corporate strategy by accelerating the recovery of business operations to increase profitability, focusing on the construction business line, namely mining construction services and civil infrastructure work. For mining construction services, the company will provide integrated services across all mining service scopes, from the development of primary and supporting infrastructure for mining activities, to core mining service activities such as Mining Operation work, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore hauling, and Road Maintenance.

Perluasan cakupan pasar untuk linis bisnis jasa pertambangan.

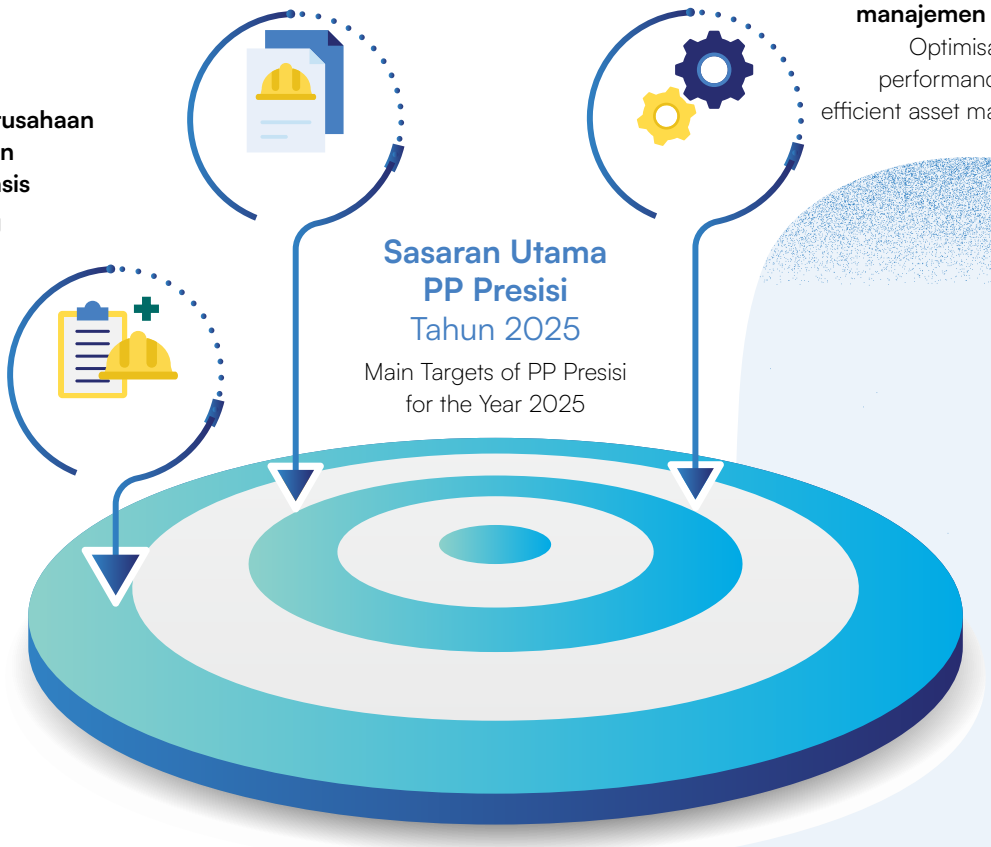
Expansion of market coverage for the mining construction services business line.

Optimalisasi kinerja operasi yang didukung sistem manajemen aset yang efisien.

Optimisation of operational performance supported by an efficient asset management system.

Mewujudkan perusahaan jasa tambang dan konstruksi berbasis

Realising a mining and construction service company based on



Sasaran Utama PP Presisi Tahun 2025

Main Targets of PP Presisi for the Year 2025

Langkah ini ditempuh melalui sinergi dengan entitas induk, PT PP (Persero) Tbk dengan skema *Join Operation* dan perolehan pasar jasa pertambangan eksternal dengan skema *main contractor*. PP Presisi juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis pertambangan serta kinerja peralatan melalui pengembangan sistem tersentralisasi yaitu SIMAP, didukung dengan melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi *key personil* di lini bisnis tambang. Pada aspek keuangan, PP Presisi akan memperkuat likuiditas melalui penguatan aset lancar janga pendek untuk dapat menutupi kewajiban, arus kas yang positif, peningkatan nilai kontrak baik dari perolehan kontrak baru maupun kontrak *carry over*, tingkat utang yang dapat terkelola, kinerja biaya yang efisien, serta profitabilitas yang konsisten.

Di tahun 2025, untuk dapat mencapai sasaran utama, Perusahaan telah menyusun strategi korporat dengan melakukan percepatan pemulihan operasional bisnis guna meningkatkan profitabilitas yang akan berfokus pada lini bisnis konstruksi yaitu jasa pertambangan dan pekerjaan infrastruktur sipil. Untuk jasa pertambangan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan hingga kegiatan utama jasa pertambangan yaitu: pekerjaan *Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore hauling*, hingga *Road Maintenance* dengan melakukan sinergi dengan PT PP (Persero) Tbk selaku entitas induk dengan skema Join Operation dan perolehan pasar jasa pertambangan eksternal dengan skema *main contractor*. Perusahaan juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis jasa pertambangan, serta kinerja peralatan melalui pengembangan sistem tersentralisasi yaitu SIMAP yang didukung dengan melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi *key personil* di lini bisnis tambang.

This step is taken through synergy with the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, with a Joint Operation scheme and the acquisition of external mining services market through the main contractor scheme. PP Presisi will also optimize mining business operations and equipment performance through the development of a centralized system, SIMAP, supported by the fulfillment and enhancement of key personnel competencies in the mining business line.

On the financial aspect, PP Presisi will strengthen liquidity by improving current short-term assets to cover obligations, maintaining positive cash flow, increasing contract values from both new contract acquisitions and carryover contracts, managing debt levels effectively, ensuring efficient cost performance, and maintaining consistent profitability.

In 2025, to achieve its primary objectives, the Company has formulated a corporate strategy that focuses on accelerating the recovery of business operations to increase profitability, particularly in the construction business line, including mining services and civil infrastructure work. For mining construction services, the Company will provide integrated services across the entire scope of mining services, from the development of primary infrastructure and supporting mining activities to the main mining services, including Mining Operations, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore Hauling, and Road Maintenance, by establishing synergy with PT PP (Persero) Tbk as the parent entity under the Joint Operation scheme and acquiring the external mining services market through the main contractor scheme. The Company will also optimize mining construction services operations and equipment performance through the development of the SIMAP centralized system, supported by fulfilling and enhancing the competencies of key personnel in the mining business line.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Development of Good Corporate Governance Implementation

Sebagai perusahaan terbuka sekaligus sebagai bagian dari kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur GCG Perusahaan telah dikembangkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan proses atau mekanisme GCG sebagai aturan main yang memberikan definisi secara jelas tentang tugas, peran dan fungsi masing-masing organ dalam struktur GCG. Manajemen telah mengupayakan seluruh kelengkapan organ, khususnya pada organ yang mendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, yang berperan aktif dalam menjalankan fungsi kepatuhan, keterbukaan, dan audit internal di lingkup Perusahaan.

As a public company and part of the State-Owned Enterprise (BUMN) group, the Company is obliged to manage its business in compliance with applicable regulations and laws. The Company's GCG (Good Corporate Governance) structure has been developed according to relevant regulations and legislation. Likewise, the GCG processes or mechanisms serve as the rules of the game that clearly define the duties, roles, and functions of each organ within the GCG structure. Management has ensured the completeness of all organs, particularly those supporting the Board of Directors, namely the Corporate Secretary and Internal Audit, which actively play a role in executing compliance, transparency, and internal audit functions within the Company.

The fulfilment of shareholders' aspirations is also a vital aspect of managing GCG in line with best practices. Management achieves this

Pemenuhan aspirasi pemegang saham juga menjadi hal penting dalam pengelolaan GCG yang sesuai dengan praktik terbaik. Hal ini diwujudkan oleh manajemen melalui tindak lanjut atas hasil keputusan pemegang saham yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di sepanjang tahun 2024, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali penyelenggaraan RUPS yaitu RUPS Tahunan tahun buku 2023 tanggal 5 Juni 2024 di mana seluruh keputusan pemegang saham telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen.

Salah satu komitmen penting PP Presisi dalam meningkatkan praktik penerapan prinsip GCG ditempuh melalui evaluasi dan penilaian atas penerapan GCG yang telah dilakukan. Di tahun 2024, untuk pertama kalinya PP Presisi menggunakan pendekatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) sebagai instrumen penilaian, di mana pendekatan ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* berstandar internasional yang dikeluarkan the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan International Corporate Governance Network (ICGN). Berdasarkan penilaian yang dilakukan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), PP Presisi memperoleh skor 79,98 dengan kualifikasi kualitas penerapan GCG pada level 3 atau "*Good*". Di samping itu, melanjutkan proses di tahun-tahun sebelumnya, evaluasi penerapan GCG juga dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK NO. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan lampirannya. Dari berbagai evaluasi yang dilakukan, Perusahaan mendapatkan beberapa hal terkait evaluasi untuk peningkatan dan penguatan penerapan GCG di masa mendatang.

Fondasi terpenting dalam pelaksanaan prinsip GCG adalah penerapan kode etik sebagai etika bisnis yang berlandaskan pada nilai integritas. Manajemen menempatkan nilai-nilai budaya korporasi sebagai salah satu landasan bagi pembentukan etika bisnis yang akan menciptakan pengelolaan operasi dan bisnis berbasis akuntabilitas. Melalui integritas, implementasi etika bisnis akan memiliki dasar yang kuat, yang akan menjadi modal bagi Perusahaan untuk tumbuh lebih baik di masa-masa mendatang.

by following up on shareholders' resolutions expressed in the General Meeting of Shareholders (GMS). Throughout 2024, the Company held one GMS, namely the Annual GMS for the 2023 fiscal year on June 5, 2024, where all shareholder resolutions were well executed by management.

One of PP Presisi's key commitments to enhancing the practice of applying GCG principles is through evaluation and assessment of GCG implementation. In 2024, for the first time, PP Presisi used the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) approach as an assessment instrument, which was developed based on international standard Corporate Governance principles issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International Corporate Governance Network (ICGN). Based on the assessment conducted by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), PP Presisi received a score of 79.98 with the GCG implementation quality qualification at level 3 or "Good". In addition, continuing the process from previous years, the evaluation of GCG implementation was also carried out based on OJK Circular Letter NO. 32/SEOJK.04/2015 regarding Guidelines for Open Company Governance, and its attachments. From the various evaluations conducted, the Company obtained several points related to evaluation for the improvement and strengthening of GCG implementation in the future.

The most important foundation in implementing GCG principles is the application of a code of ethics as business ethics based on the value of integrity. Management places corporate cultural values as one of the foundations for forming business ethics that will create accountability-based operations and business management. Through integrity, the implementation of business ethics will have a strong foundation, which will become the capital for the Company to grow better in the future.



Perkembangan Pengelolaan Risiko dan Inisiatif Keberlanjutan

Development of Risk Management and Sustainability Initiatives

Kunci penting dalam pengembangan penerapan ESG dilandasi pada komitmen Perusahaan dalam mengelola risiko dan dampak yang muncul dari kegiatan operasi yang dilakukan, maupun risiko dan dampak atas dinamika di luar Perusahaan yang dapat berimbas pada kinerja operasi dan keuangan Perusahaan. Sejumlah inisiatif telah dilakukan, baik pada aspek kinerja operasi dan keuangan, tata kelola, hingga pengelolaan pemantauan dampak sosial dan lingkungan serta upaya remediasi yang dilakukan Perusahaan.

The key to the development of ESG (Environmental, Social, and Governance) implementation is based on the Company's commitment to managing the risks and impacts arising from its operational activities, as well as the risks and impacts of dynamics outside the Company that could affect the Company's operational and financial performance. A number of initiatives have been undertaken, covering operational and financial performance, governance, as well as the management of social and environmental impact monitoring and remediation efforts carried out by the Company.

Secara khusus PP Presisi telah menyusun Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Di luar kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Laporan Keberlanjutan menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam memantau risiko dan dampak dalam pengelolaan kegiatan operasi dan bisnisnya, serta keterbukaan informasi yang dapat membantu pemangku kepentingan khususnya investor dan pemegang saham.

Specifically, PP Presisi has prepared a Sustainability Report as a document that is inseparable from this Annual Report. Beyond compliance with applicable regulations and laws, the presence of the Sustainability Report is part of the Company's commitment to monitoring risks and impacts in the management of its operations and business activities, as well as providing transparency of information that can help stakeholders, particularly investors and shareholders.



Informasi tentang Perubahan Susunan dan Komposisi Direksi

Information on Changes in the Composition and Structure of the Board of Directors

Berdasarkan surat pengunduran diri Direktur Utama, serta keputusan pemegang saham yang tertuang dalam RUPS Tahunan tahun buku 2023 tanggal 5 Juni 2024, terdapat perubahan susunan dan nomenklatur Direksi dengan kronologi yang dapat dilihat di bawah ini.

Based on the resignation letter of the President Director and the decision of the shareholders as stated in the Annual General Meeting for the fiscal year 2023 on June 5, 2024, there is a change in the composition and nomenclature of the Board of Directors with the chronology detailed below.

Kronologis Perubahan Susunan dan Nomenklatur Direksi di Sepanjang Tahun 2024

Chronology of Changes in the Composition and Nomenclature of Directors Throughout 2024

Periode 1 Januari s.d 25 April 2024 January 1 to April 25, 2024	**Periode 25 April s.d 5 Juni 2024** April 25 to June 5, 2024	**Periode 5 Juni s.d 31 Desember 2024** June 5 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)			**I Gede Upeksa Negara mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT PP Presisi Tbk sebagaimana disampaikan dalam surat pengunduran diri tanggal 25 April 2024. Beliau diangkat sebagai Direktur Strategi Korporasi dan HCM entitas induk, PT PP (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan PT PP (Persero) Tbk tanggal 24 April 2024.** I Gede Upeksa Negara resigned as President Director of PT PP Presisi Tbk as submitted in his resignation letter dated April 25, 2024. He was appointed as Director of Corporate Strategy and HCM of the parent entity, PT PP (Persero) Tbk based on the Resolution of the Annual GMS of PT PP (Persero) Tbk dated April 24, 2024.

M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Director of Finance, Risk Management & Legal)	M Arif Iswahyudi (Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Acting President Director and concurrently Director of Finance, Risk Management & Legal)	M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	M Arif Iswahyudi merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Utama berdasarkan Surat Direksi PT PP (Persero) Tbk No. 063/EXT/PP/DU/2024 tanggal 25 April 2024. M Arif Iswahyudi concurrently serves as Acting President Director based on Decree of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk No. 063/EXT/PP/DU/2024 dated April 25, 2024. Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, beliau tidak lagi menjabat sebagai Plt. Direktur Utama. Pada kesempatan yang sama, Direktorat Keuangan Manajemen Risiko, dan Legal diubah menjadi Direktorat Keuangan & HCM. At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, he no longer served as Acting President Director. On the same occasion, the Directorate of Finance, Risk Management and Legal was changed to the Directorate of Finance & HCM.
Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Direktorat Operasi diubah menjadi Direktorat Pengelolaan Bisnis & Operasi. At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, the Directorate of Operations was changed to the Directorate of Business Management & Operations.
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) (Director of Business Planning & HCM)	Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) (Director of Business Planning & HCM)		Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2024, Yudi Setiawan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM). At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, Yudi Setiawan was honorably discharged from his position as Director of Business Planning & HCM).
		Arzan (Direktur Utama) (President Director)	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Arzan diangkat sebagai Direktur Utama. At the Annual GMS held on June 5, 2024, Arzan was appointed as President Director.

Susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2024

Composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Arzan	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 14 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta Selatan Arzan President Director Deed of Statement of Annual GMS Decision No. 14 dated 5 June 2024 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notary in South Jakarta 5 June 2024 until the GMS to be held in 2029 1st	5 Juni 2024 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 5 June 2024 until the General Meeting of Shareholders to be held in 2029	Ke -1 1st
Mohammad Arif Iswahyudi	Direktur Keuangan & HCM Director of Finance & HCM (Human Capital Management)	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., notaris di Jakarta Selatan. Deed of Statement of the Annual GMS Resolution No. 39 dated April 27, 2022, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta.	20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 20, 2022 until the GMS to be held in 2027.	Ke -1 1st
Rebimun	Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi Director of Business Management & Operations.	• Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 14 tanggal 23 Februari 2023 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., notaris di Jakarta Selatan. • Deed of Statement of the Annual GMS Resolution No. 14 dated February 23, 2023, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta. • Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di notaris Selatan. • Deed of Statement of the Annual GMS Resolution No. 39 dated April 27, 2022, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta.	23 Februari 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 February 23, 2023 until the GMS to be held in 2028.	Ke -1 2nd

Tidak terdapat perubahan susunan Direksi sejak 31 Desember 2024 hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini per tanggal 29 April 2025.

There has been no change in the composition of the Board of Directors from December 31, 2024 until the signing of this annual report on April 29, 2025.

Apresiasi dan Optimisme

Appreciation and Optimism

Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelangsungan usaha PP Presisi sebagai buah dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh pihak yang terlibat. Kepada Dewan Komisaris selaku representasi pemegang saham, Direksi menyampaikan rasa terima kasih atas arahan, nasihat dan pengawasan yang telah dilakukan. Demikian pula kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemegang saham dan investor, pelanggan, pemasok, maupun mitra usaha lainnya, Direksi menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terbina dengan baik.

Kepada seluruh Insan PP Presisi, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya atas seluruh dedikasi yang telah diberikan, khususnya dalam menghadapi kondisi tahun 2024 yang masih diliputi tantangan. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

With all humility, allow me to express gratitude to God Almighty for the continued success of PP Presisi, which is the result of the hard work and smart efforts of all parties involved. To the Board of Commissioners, as the representative of the shareholders, the Board of Directors extends its sincere appreciation for the guidance, advice, and supervision that have been provided. Likewise, to all stakeholders—including shareholders and investors, customers, suppliers, and other business partners—the Board of Directors expresses its gratitude for the well-established collaboration.

To all members of PP Presisi, the Board of Directors conveys its appreciation for the dedication that has been shown, especially in navigating the challenges of 2024. May this spirit of togetherness serve as a foundation for the Company to continue growing sustainably and delivering added value to shareholders and all stakeholders.

Jakarta, 29 April 2025
Atas nama Manajemen PT PP Presisi Tbk,
Jakarta, April 29 2025
On behalf of the Management of PT PP Presisi Tbk,



Arzan, Direktur Utama | President Director

Pernyataan Laporan Tahunan Telah Ditinjau dan Disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi

The Annual Report Statement has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Seluruh isi dalam Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk tahun buku 2024 telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui peninjauan dan persetujuan ini, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap seluruh isi Laporan Keberlanjutan ini.

The entire content of PT PP Presisi Tbk's Annual Report for the fiscal year 2024 has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Through this review and approval, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners, is responsible for the entire content of this Sustainability Report.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Nur Rochmad
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner



Albert Simangunsong
Komisaris
Commissioner



Muhammad Zahid
Komisaris
Commissioner

Pernyataan Laporan Tahunan Telah Ditinjau dan Disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi

The Annual Report Statement has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Seluruh isi dalam Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk tahun buku 2024 telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui peninjauan dan persetujuan ini, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap seluruh isi Laporan Keberlanjutan ini.

The entire content of PT PP Presisi Tbk's Annual Report for the fiscal year 2024 has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Through this review and approval, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners, is responsible for the entire content of this Sustainability Report.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29 2025

Direksi
Board of Directors

Arzan
Direktur utama
President Director

Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Keuangan & HCM
Finance & HCM Director

Rebimun
Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
Director of Business Management & Operations


KOMATSU

Profil Perusahaan

Company Profile



Identitas dan Informasi Umum Perusahaan

Company Identity and General Information

Nama Perusahaan
Company Name

PT PP Presisi Tbk

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

6 Mei 2004

May 6, 2004

Status Hukum
Legal Status

Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Terbuka (Tbk)

Limited Liability Company (PT), Public Company (Tbk)

Jumlah Karyawan
Number of Employees

253 orang

253 People

Entitas Anak
Subsidiary

PT Lancarjaya Mandiri Abadi

Media Sosial
Social Media

Instagram : @ptpp_presisi
Youtube : PT PP Presisi
Linkedin : PT PP Presisi Tbk

Situs Web
Website

www.pp-presisi.co.id

Bidang Usaha
Line of Business

Jasa konstruksi, *Engineering Procurement and Construction (EPC)*, pekerjaan mekanikal elektrikal, pengangkutan dan pergudangan, jasa penyewaan, perdagangan, jasa pertambangan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, industri pengolahan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, dan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

Construction services, Engineering Procurement and Construction (EPC), mechanical-electrical works, transportation and warehousing, rental services, trading, mining, architectural and engineering activities, as well as technical consulting, processing industry, capability improvement services in the construction sector, engineering and planning services, as well as development and optimization of the Company's resources utilization.

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Incorporation

Didirikan dengan nama PT Prima Jasa Aldodua berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 6 Mei 2004 yang dibuat dihadapkan Notaris Muhammad Chotib, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012, Tambahan No. 20149.

Established as PT Prima Jasa Aldodua based on Deed of Establishment No. 2 dated May 6, 2004 drawn up before Notary Muhammad Chotib, S.H., and validated by the Minister of Law and Human Rights by Decree No. C-16498HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004, and promulgated in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, Supplement No. 20149.

Hubungan Investor
Investor Relations

Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary
Mei Elsa Kembaren

E-mail: corsec@pp-presisi.co.id

Kepemilikan Saham
Shareholding

- PT PP (Persero) Tbk..... 76,99%
- Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan..... 0,02%
- Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan..... 4,40%
- Saham Treasury/yang Dibeli Kembali..... 1,06%
- Masyarakat..... 17,53%

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp2.400.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-up Capital

Rp1.022.427.100.000,-

Kode Saham
Ticker Code

PPRE

Lembaga Pencatatan Saham
Stock Listing Agency

Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange

Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52—53
Jakarta Selatan, 12190

Tanggal Pencatatan Saham
Listing Date

24 November 2017

November 24, 2017

PP PRESISI

Alamat Kantor
Office Address

Plaza PP Lt. 7, Jl TB Simatupang
No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760
Telepon: +6221 8414 119
E-mail: corsec@pp-presisi.co.id

Alamat Workshop
Workshop Address

Jl. Raya Narogong KM 15 Pangkalan 6,
Bekasi, 17153
Telepon: +6221 8248 3255/240
E-mail: headoffice@pp-presisi.co.id

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief Company History

Sejarah Singkat Perkembangan Perusahaan

Brief History of Company Development

PT PP Presisi Tbk, disebut juga "Perusahaan" atau "PP Presisi" atau "PPRE", didirikan pada tahun 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldodua yang menyediakan jasa penyewaan peralatan alat berat. Kemudian, Perusahaan diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk pada tanggal 6 Juni 2014. Pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah mengantarkan Perusahaan untuk melakukan transformasi bisnis dengan memasuki lini bisnis *civil work*, *foundation, erector*, dan *mining services*, yang secara terintegrasi memberikan nilai tambah kepada para pelanggan.

Pada tahun 2017, seiring dengan peningkatan kapabilitasnya PPRE melakukan akuisisi 51% atas kepemilikan atas kepemilikan PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Di tahun yang sama, PPRE melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga resmi menyandang status sebagai perusahaan publik.

Sejalan dengan pengembangan bisnis yang dilakukan, PPRE meningkatkan sistem dan kontrol melalui penerapan *Enterprise Resource Planning System, Application, and Product (ERP-SAP)*. Perusahaan juga menerapkan praktik terbaik sesuai standar ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai bagian dari pengembangan keunggulan operasional yang berkelanjutan. Proses ini kemudian dilanjutkan di tahun 2021 ketika PPRE meningkatkan kapabilitasnya dengan melakukan ekspansi pada potensi bisnis pertambangan melalui layanan jasa kontraktor tambang.

Untuk menjawab dinamika, Perusahaan mengklasterisasi lini bisnis menjadi *mining sesrvices, civil work, structure work, production plant*, dan *heavy equipment rental*. Hal ini menjadi komitmen Perusahaan untuk terus mengembangkan bisnis di bidang konstruksi dengan menyediakan kebutuhan pelanggan, meningkatkan pelayanan di semua bidang konstruksi dan non-konstruksi, serta memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menghasilkan manfaat bagi pemangku kepentingan. Berbagai pengembangan usaha masih akan terus dilakukan dengan memperhatikan pengendalian aspek lingkungan dan sosial.

Sebagai langkah upaya dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* dan meningkatkan *positioning* Perusahaan, di tahun 2022 Perusahaan terus berfokus pada lini bisnis utamanya yaitu *mining services* dan *civil work* sebagai kontraktor utama. Perolehan kontrak pada jasa pertambangan

PT PP Presisi Tbk, also known as "the Company" or "PP Presisi" or "PPRE", was established in 2004 under the name PT Prima Jasa Aldodua, engaging in heavy equipment rental services. Then, the Company was acquired by PT PP (Persero) Tbk on June 6, 2014. The acquisition by PT PP (Persero) Tbk, as a State-Owned Enterprise (SOE), has brought the Company to make a business transformation by entering the businesses of civil work, foundation, erector and mining services to offer added value to the customers.

In 2017, along with the enhancement of its capabilities, PPRE acquired 51% ownership of PT Lancarjaya Mandiri Abadi. In the same year, PPRE conducted an Initial Public Offering (IPO) and listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX), officially earning the status of a public company.

In line with its business development, the Company improved its systems and controls by implementing an Enterprise Resource Planning System, Application, and Product (ERP-SAP). The Company also applied the best practices according to the ISO 9001:2015 standard on Quality Management Systems, ISO 14001:2015 standard on Environmental Management Systems, and ISO 45001:2018 standard on Occupational Health and Safety Management Systems as part of developing sustainable operational excellence. The process continued in 2021 when PPRE enhanced its capabilities by expanding into the potential mining business through mining contracting services.

To respond to business dynamics, the Company has categorized its business lines into mining services, civil work, structure work, production plants, and heavy equipment rental. This reflects the Company's commitment to continuously developing its business in the construction sector by meeting customer needs, improving services in all construction and non-construction fields, and maximizing all available potential to deliver benefits to stakeholders. Various business developments will continue to be pursued while taking into account environmental and social control aspects.

To provide added value for stakeholders and improve the Company's position, in 2022 the Company continued to focus on its main business, namely mining services and civil work, as the main contractor. Securing contracts in mining and civil services as the main contractor is also the Company's effort to mitigate risks by obtaining longer contracts for mining services as a recurring income. Moreover, the Company's other businesses, such as production plants, structure work, and heavy equipment rental, continued to support the Company's main business. Driven by a strong fighting spirit, the Company will continue to focus on obtaining new contracts in its main business moving forward.

dan sipil sebagai kontraktor utama juga merupakan upaya Perusahaan dalam memitigasi risiko dengan perolehan kontrak yang lebih panjang pada jasa pertambangan sebagai *recurring income*. Selain itu, bisnis lain Perusahaan seperti *production plant, structure work* dan *heavy equipment rental* tetap menjadi bisnis *supporting* bagi bisnis utama Perusahaan. Ditopang dengan semangat juang yang tinggi, ke depannya Perusahaan akan terus mengarahkan fokus pada setiap Perolehan kontrak baru yang ada pada bisnis utama Perusahaan.

Peningkatan *positioning* Perusahaan untuk semakin berfokus pada lini bisnis utama yaitu *mining services* dan *civil work*, menjadi arah *kedepan* Perusahaan untuk dapat mewujudkan target Perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah untuk seluruh *stakeholder*. Pada tahun 2024 Perusahaan berfokus pada perluasan pangsa pasar pada proyek-proyek *mining services*, melalui momentum kebijakan Pemerintah dalam hilirisasi tambang mineral dengan semakin meningkatnya pembangunan *smelter* serta kebutuhan akan energi terbarukan yang memacu perkembangan industri mobil listrik yang akan didukung dengan peningkatan kebutuhan akan bahan baku tambang khususnya nikel sebagai bahan baku dalam industri baterai EV. Selain fokus pada *positioning* Perusahaan sebagai *mining contractor*, perusahaan juga melakukan *refocusing* pada peningkatan kualitas internal Perusahaan dari mulai peningkatan utilisasi dan kinerja alat berat, optimalisasi kinerja peralatan, peningkatan kompetensi *key* personil di lini bisnis *mining*, serta memaksimalkan teknologi terintegrasi.

The Company continues to increase its positioning to focus on the main business lines, i.e., mining services and civil work, as future direction to realize its targets, which can provide added value to all stakeholders. In 2024, the Company focuses on expanding its market share in mining services projects by seizing the momentum of Government policy in mineral mining downstream with the increasing construction of smelters and the need for renewable energy. It will spur the development of the electric car industry, which will be supported by an increase in the need for mining raw materials, especially nickel, which is a raw material in the EV battery industry. Apart from focusing on positioning the Company as a mining contractor, the Company is also refocusing on improving the Company's internal quality, starting from increasing heavy equipment utilization and performance, optimizing equipment performance, increasing the competency of key personnel in the mining business line, as well as maximizing integrated technology.



Informasi tentang Perubahan Nama dan Status Perusahaan
Information on Changes to the Company Name and Status

Dalam perjalanannya hingga tahun 2024, PPRE telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nama, sebagaimana dijelaskan pada bagan di bawah ini.

Throughout its journey until 2024, PPRE has undergone 5 (five) name changes, as explained in the chart below.

2004

PT Prima
Jasa Aldodua

1 Juli 2004 | July 1, 2004

Didirikan dengan nama PT Prima Jasa Aldodua berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 6 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Chotib, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012, Tambahan No. 20149.

Established as PT Prima Jasa Aldodua based on Deed of Establishment No. 2 dated May 6, 2004, drawn up before Notary Muhammad Chotib, S.H. and validated by the Minister of Law and Human Rights by Decree No. C-16498HT.01.01. TH.2004, dated July 1, 2004, and promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, Supplement No. 20149.

2014

PT PP
Alat Konstruksi

4 Juli 2004 | July 4, 2004

Menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PP Alat Konstruksi) berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 16 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., akta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-05280.40.20.2014 Tanggal 4 Juli 2014 dan akta telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU- 18939.40.22.2014 Tanggal 4 Juli 2014.

Became PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PP Alat Konstruksi) per the Deed of Minutes of Meeting No. 16 dated June 6, 2014, drawn up before Wiwiek Widhi Astuti, S.H., and validated by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-05280.40.20.2014 dated July 4, 2014, and the deed has been received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights Sismibakum through Receipt of Notification Letter No. AHU-18939.40.22.2014 dated July 4, 2014.

2014

PT PP
Peralatan Konstruksi

23 September 2014 | September 23, 2014

Menjadi PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi (PP Peralatan Konstruksi) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit, S.H., M.H., akta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-08361.40.20.2014 Tanggal 23 September 2014 dan akta telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-31393.40.22.2014 Tanggal 22 September 2014.

Became PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi (PP Peralatan Konstruksi) per the Circulaire Resolution in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 54 dated September 19, 2014, drawn up before Ilmiawan Dekrit, S.H., M.H., and validated by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-08361.40.20.2014 dated September 23, 2014, and the deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System (Sisminbakum) of Ministry of Law and Human Rights Sismibakum through Receipt of Notification Letter No. AHU-31393.40.22.2014 dated September 22, 2014.

2017

PT PP
Presisi

31 Mei 2017 | May 31, 2017

Menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) berdasarkan Akta No. 18 tanggal 5 Mei 2017 melalui Surat Keputusan No. AHU- 0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn. pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan akta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011798. AH.01.02 TAHUN 2017 Tanggal 31 Mei 2017.

Became PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) per Deed No. 18 dated May 5, 2017, through Decree No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN2017, dated May 5, 2017, drawn up before Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., replacing Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. and validated by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0011798.AH.01.02 TAHUN2017 dated May 31, 2017.

2017

PT PP
Presisi Tbk

14 Agustus 2017 | August 14, 2004

Karena terjadinya perubahan bentuk PPRE menjadi Perusahaan Terbuka, sehingga merujuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal Perusahaan berbentuk Perusahaan Terbuka, maka nama PT Pembangunan Perumahan Presisi atau disingkat PT PP Presisi ditambahkan "Tbk", sehingga menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk atau disingkat PT PP Presisi Tbk, hal ini sesuai dengan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017 yang mana akta dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-001.6606. AH.01.02.TAHUN2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan akta telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0162216 Tanggal 14 Agustus 2017.

Due to a change in company status to become a Public Company, thus referring to Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the name PT Pembangunan Perumahan Presisi, abbreviated as PT PP Presisi, is added "Tbk". Hence, the name became PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk, abbreviated as PT PP Presisi Tbk, per the Deed No. 27 dated August 14, 2017, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., through the Decree of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-001.6606.

Perubahan nama dilakukan karena adanya diversifikasi layanan serta transformasi bisnis. Di samping itu, perubahan status terjadi pasca Perusahaan resmi melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* dan mengubah status badan hukumnya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dengan perdagangan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

The name changes were carried out due to service diversification and business transformation. Additionally, the Company officially conducted an Initial Public Offering (IPO) and changed its legal entity status to a public company (Tbk) by trading shares listed on the Indonesia Stock Exchange.





Jejak Langkah

Milestones

2004

Mei | May

Perusahaan didirikan dengan nama PT Prima Jasa Aldodua yang menyediakan jasa penyewaan peralatan.

The Company was established under the name PT Prima Jasa Aldodua, which provides equipment rental services.

2014

Juni | June

Perusahaan di akuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk dan mengubah nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi atau disingkat PT PP ALKON.

The Company was acquired by PT PP (Persero) Tbk and changed its name to PT Pembangunan Perumahan Alat Kontruksi or PT PP ALKON.

September | September

Mengubah nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi atau disingkat PT PP ALAT.

The Company changed its name to PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi or PT PP ALAT.

2015

Juni | June

Memulai transformasi bisnis dengan memasuki lini bisnis *formwork*.

Starting business transformation by entering the formwork business.

2016

September | September

Memasuki bisnis *ready mix*.

Entering the ready mix business.

Memasuki usaha pekerjaan sipil dengan fokus pada proyek jalan tol dan bendungan.

Entering the civil work business focusing on toll road and dam projects.

2017

Mei | May

Mengubah nama kembali menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi.

The Company changed its name again to PT Pembangunan Perumahan Presisi, abbreviated as PT PP Presisi.

Juni | June

Mengakuisisi 51,00% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi.

Acquiring 51.00% shares of PT Lancarjaya Mandiri Abadi.

Juli | July

Peningkatan modal oleh PT PP (Persero) Tbk

PT PP (Persero) Tbk increased its capital in the Company.

Agustus | August

Perusahaan melakukan perubahan status menjadi Perusahaan Terbuka sehingga nama Perusahaan menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk atau disingkat PT PP Presisi Tbk.

The Company changed its status to be a Public Company; thus, the Company's name became PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk, abbreviated as PT PP Presisi Tbk.

November | November

Perusahaan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia.

The Company is listed as an issuer on Indonesia Stock Exchange.



Juli | July

Meningkatkan kapabilitas di bidang *soil improvement* melalui strategi aliansi internasional yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Perusahaan dengan PT Pratama Widya dan Sunward Intelligent Equipment Co Ltd untuk melakukan kerja sama dalam bidang solusi dan teknologi alat berat, fondasi, serta *soil improvement* melalui integrasi dan kolaborasi seluruh pihak terhadap proyek konstruksi di Indonesia serta dimungkinkannya proses alih teknologi di dalamnya.

The Company increased its capability in soil improvement through an international alliance strategy marked by the signing of an MoU between the Company, PT Pratama Widya, and Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., to collaborate in heavy equipment solution and technology, foundation, soil improvement through integration and collaboration among all parties on construction projects in Indonesia, as well as enable technology transfer process in it.

November | November

Perusahaan mulai merambah pekerjaan pembangunan infrastruktur tambang yang ditandai dengan menjadi kontraktor utama pada proyek Jalan Angkut Batubara Kalimantan Tengah-Kalimantan Timur.

The Company embarked on the mining infrastructure construction marked by becoming a main contractor for the Coal Hauling Road project in Central Kalimantan-East Kalimantan.

2019

Februari | February

Meningkatkan peran menjadi kontraktor utama pada Proyek *Overlay* Bandara Minangkabau.

The Company upgraded its role to be the main contractor for the Overlay of Minangkabau Airport Project.

Januari | January

Perusahaan melalui entitas anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi, meningkatkan peran dari subkontraktor menjadi kontraktor utama pada proyek Jalan Tol Non-Trans Jawa Selatan Lot. 9 Balekambang-Kedungsalam, Malang.

Through the Subsidiary PT Lancarjaya Mandiri Abadi, the Company upgraded its role from a subcontractor to a main contractor for the Non-Trans South Java Toll Road project, Lot. 9 Balekambang-Kedungsalam, Malang.

2018

Januari | January

Menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kumkang Kind Co Ltd, Korea Selatan tentang teknologi baru *formwork*.

Signing a Memorandum of Understanding (MoU) with Kumkang Kind Co Ltd, South Korea, on new formwork technology.

Juni | June

Memasuki bisnis *erector*. Meningkatkan pengangkutan batubara menjadi layanan penambangan terintegrasi.

Entering the erector business. Enhancing coal hauling into integrated mining services.

Desember | December

Perusahaan mulai merambah pekerjaan perbaikan infrastruktur yang ditandai dengan Proyek Pelebaran Jalan Tol Jagorawi. Perusahaan dan PT Sepuluh Sumber Anugerah mulai merambah bidang usaha bio-remediasi dan pengelolaan limbah lainnya dengan mendirikan PT Presisi Sumber Anugerah dengan kepemilikan saham PPRE sebesar 51,0%.

The Company embarked on the infrastructure improvement works marked by the Jagorawi Toll Road Widening Project. The Company and PT Sepuluh Sumber Anugerah began to venture into bio-remediation and other waste management businesses by establishing PT Presisi Sumber Anugerah with a share ownership of 51.0%.



2020

Januari | January

Perusahaan melakukan pembelian kembali saham senilai 1,06%.

The Company performed a shares buyback of 1.06%.

Februari | February

Perusahaan menandatangani MoU dengan PT Antam Resourcindo untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan infrastruktur jalan tambang termasuk jasa pengangkutan yang dibutuhkan oleh PT Antam Resourcindo.

The Company signed an MoU with PT Antam Resourcindo to cooperate in the construction of mining road infrastructure, including the transportation services required by PT Antam Resourcindo.

April | April

Acara *Ground Breaking* Bandara Dhoho Kediri dilakukan secara virtual. Acara ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Perhubungan. *Ground Breaking* merupakan tonggak permulaan dari pembangunan bandara yang akan dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh PT Lancarjaya Mandiri Abadi selaku entitas anak.

Dhoho Airport Kediri Groundbreaking event, which was conducted virtually. The Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs and the Minister of Transportation led the event. The groundbreaking is the initial airport construction milestone, which will be carried out by a consortium led by PT Lancarjaya Mandiri Abadi as the Company's Subsidiary.



2021

Februari | February

Merambah bisnis tambang nikel yang ditandai dengan penunjukan Perusahaan sebagai kontraktor tambang nikel pada Proyek Weda Bay untuk pekerjaan *mining development* dari mulai jalan hauling, infrastruktur, dan *stockpile* area yang merupakan perluasan dari pembangunan jalan hauling yang sedang dilakukan. Weda Bay merupakan salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia yang berlokasi di Halmahera.

Entered the nickel mining business as a nickel mining contractor at Weda Bay Project for mining development work, starting from hauling road, infrastructure, and stockpile area projects, an expansion of the ongoing hauling road construction. Weda Bay, located in Halmahera, is one of the largest nickel mines in Indonesia.

Desember | December

Perusahaan memperoleh kontrak baru perbaikan Proyek Dermaga Belinyu Kawasan Pangkal Balam yang berlokasi di Bangka Belitung milik PT Pelindo II.

The Company won a new contract to repair the Belinyu Pier in the Pangkal Balam Area, located in Bangka Belitung and owned by PT Pelindo II.

Agustus | August

Perusahaan melakukan pengerjaan proyek Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Kawasan Industri Terpadu Batang yang termasuk proyek strategis nasional.

The Company started the development of the Mandalika Special Economic Zone and Batang Integrated Industrial Estate project, which are national strategic projects.

2022

Agustus | August

Menyelesaikan Lintasan Sirkuit Mandalika sepanjang 4,3 km sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh Federation Internationale de Motocyclisme. Lintasan Sirkuit Mandalika merupakan bagian dari Proyek Pembangunan Kawasan Sirkuit Mandalika Lombok yang rencananya akan digunakan dalam ajang balap Super Bike dan MotoGP tahun 2022.

Completed the 4.3 km Mandalika Circuit Track per the International Standard issued by the Federation Internationale de Motocyclisme. Mandalika Circuit Track is a part of the Mandalika Lombok Circuit Area Development Project, which will be used in Super Bike and MotoGP racing events in 2022.

Desember | December

Pelaksanaan uji layak fungsi jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3A dihadiri oleh Tim KSO Proyek, TLKJ, BPJT, JBH, Korlantas dan Kemenhub dengan tujuan untuk menciptakan hasil aspal yang berkualitas sesuai standar.

Implementation of the functional feasibility test for Cinere-Jagorawi Toll Road Section 3A, attended by Project JO Team, TLKJ, BPJT, JBH, Korlantas, and the Ministry of Transportation to create quality asphalt products per the standards.



2024

Agustus | August

Penandatanganan kontrak proyek Jalan Hauling Ithaca melalui anak perusahaan PT PP Presisi Tbk yaitu PT Lancarjaya Mandiri Abadi, proyek infrastruktur pertambangan ini berlokasi di Kalimantan Timur.

The signing of the project contract for the Ithaca Hauling Road through the subsidiary of PT PP Presisi Tbk, PT Lancarjaya Mandiri Abadi. This mining infrastructure project is located in East Kalimantan.

2023

Januari | January

Penandatangan Kontrak Proyek Pembangunan Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN) yang dihadiri oleh Direktur Operasi Perusahaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak PPK Jembatan Pulau Balang Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang Kementerian PUPR. Penandatanganan proyek Pembangunan Dermaga Logistik IKN berfokus pada pekerjaan struktur dan sipil.

Contract Signing for the Construction of the National Capital City (IKN) Logistics Pier, attended by the Director of Operations and the Jembatan Pulau Balang PPK Contract Signing Officer from the Implementation Work Unit of the Ministry of PUPR. The contract signing focuses on structural and civil works projects.

Oktober | October

Opening Ceremony Hauling Road & Bridge Tofu Weda Bay Nickel Project dengan telah diselesaikannya pekerjaan Pembangunan Jembatan Tofu yang akan digunakan untuk jalan hauling. Acara diresmikan oleh *Manager Operation Construction* WBN dan dihadiri oleh *GM Mining Operation*, PJO HR Tofu PPRE.

Opening Ceremony of the Hauling Road & Bridge Tofu Weda Bay Nickel Project with the completion of the Tofu Bridge construction, which will be used for the hauling road. The event was inaugurated by the Manager of Operation Construction of WBN and attended by the GM of Mining Operation, PJO HR of PPRE.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Culture

Visi | Vision

Menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia dan regional.

To be a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia and the region.



Reviu Visi dan Misi oleh Manajemen
Vision and Mission Review by Management

Visi dan misi Perusahaan senantiasa ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Pernyataan terkait Visi dan Misi Perusahaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi yang tertuang dalam SK Dir No: 009/SK/DIR/PPRE/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Visi dan Misi Perusahaan. Visi dan Misi tersebut telah disetujui dan ditinjau secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi guna menyesuaikan dengan dinamika bisnis saat ini.

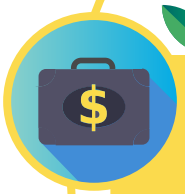
The Company's Vision and Mission are regularly reviewed involving the Board of Directors, Board of Commissioners, and other management levels to ensure their relevance to the Company's business development. The statements regarding the Company's Vision and Mission have been approved and signed by the Board of Directors as stated in Decree No: 009/SK/DIR/PPRE/2025 dated March 11, 2025, concerning the Company's Vision and Mission. These Vision and Mission statements have been approved and periodically reviewed by the Board of Commissioners and the Board of Directors to align with current business dynamics.

Misi | Mission



Menyediakan jasa konstruksi spesialis dengan diferensiasi produk dan pelayanan prima.

Providing specialist construction services with product differentiation and excellent service.



Meningkatkan bisnis terintegrasi yang memiliki layanan berdaya saing tinggi dan nilai tambah yang optimal bagi pemangku kepentingan.

Enhancing integrated business which has high competitive services as well as optimum added values for stakeholders.



Mengedepankan aspek QSHE dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan proses bisnis.

Prioritizing Quality, Safety, Health, and Environmental (QSHE) and good corporate governance in conducting business processes.



Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan produktif dan sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan.

Developing professional and productive human resources with corporate values.

Budaya dan Nilai-nilai Utama Perusahaan
Corporate Culture and Values

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan telah menerapkan nilai budaya AKHLAK sebagai penyempurnaan dari budaya perusahaan, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana arahan Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

As part of a State-Owned Enterprise (SOE), the Company implemented AKHLAK cultural values as a refinement of corporate culture, i.e., Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative, as directed by the Ministry of SOE via the Circular Letter of the Minister of SOE No. SE-7/MBU/07/2020 on Core Values for Human Resources of State-Owned Enterprises.

AKHLAK

A — Amanah | Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given

Panduan perilaku | Code of Conduct

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Fulfill promises and commitments.
- Responsibility for the duties, decisions, and actions taken.
- Uphold moral and ethical values.

K — Kompeten | Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continue to learn and develop capabilities

Panduan perilaku | Code of Conduct

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Improve self-competence in facing dynamic challenges.
- Help others learn.
- Complete tasks with the best quality.

H — Harmonis | Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Mutual care and respect for differences

Panduan perilaku | Code of Conduct

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Appreciate anybody regardless of their background.
- Keen on helping others.
- Establish a productive working environment.

L — Loyal | Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State

Panduan perilaku | Code of Conduct

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- Maintain the good name of fellow employees, Leaders, SOEs, and State.
- Willingness to sacrifice for the greater good.
- Obedient to the leaders as long as it doesn't contradict the law and ethics.

A — Adaptif | Adaptive

Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change

Panduan perilaku | Code of Conduct

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.
- Quickly adapt to be better.
- Perpetually upgrading by following technological developments.
- Act proactively.

K — Kolaboratif | Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergic cooperation

Panduan perilaku | Code of Conduct

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Offer opportunities to various parties to contribute.
- Be open to cooperation in creating added value.
- Encourage the use of various resources for common goals.

Makna Logo Perusahaan

Meaning of Company Logo

Logogram

Terdiri dari huruf "PP" dan 8 (delapan) garis lengkung dengan ketentuan warna dasar "Putih" dan warna logo atau lambang "biru tua"

Consists of the letters "PP" and 8 (eight) curved lines with the base color being "White" and the logo or symbol color being "dark blue"

Warna Dasar: Putih
Base color : White

Warna logo atau lambang: Biru Tua
Color of the logo (symbol) : Dark blue

Logotype

Logotype "PRESISI" menggunakan font "Sans Serif" yang mewakili ketegasan dan kekokohan. Pemilihan font "Sans Serif" juga menambahkan nilai integritas Perusahaan melalui produk yang kokoh.

The "PRESISI" logotype uses a "Sans Serif" font representing assertiveness and robustness. The font choice also adds value to the Company's integrity through solid products.

PP
PRESISI



Warna dasar putih berarti Perusahaan berkarya tanpa pamrih.

A white color base means the Company is ready to work selflessly.

Warna logo (lambang) biru tua berarti berkarya dengan setia dan patuh.

The dark blue logo (symbol) color means to work upholding loyalty and obedience principles.

PP adalah singkatan dari Pembangunan Perumahan.

PP is an abbreviation of Pembangunan Perumahan

8 garis lengkung berarti
The eight curved lines mean

Perusahaan berkarya di 8 penjuru angin (di mana saja).

The Company operates in eight corners of the wind (any place).

Perusahaan didirikan pada bulan kedelapan (Agustus).

The Company was established in the eighth month (August).

Lingkaran yang terbentuk oleh 8 garis lengkung berarti kesatuan tujuan yang utuh.

A circle formed by the eight curved lines means a complete unity of purpose.

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan Jasa

Business Activities, Products and Services

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Business Activities, Products and Services

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta No. 40 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris, di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0042779.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa konstruksi, *Engineering Procurement and Construction (EPC)*, jasa mekanikal elektrikal, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, perdagangan, jasa pertambangan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, industri pengolahan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, dan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut.

According to the Company's Articles of Association, which was last amended and ratified through Deed No. 40 dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary, in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0042779.AH.01.02. Year 2022 dated June 23, 2022, the purpose and objectives of the Company are to engage in construction services, Engineering Procurement and Construction (EPC), mechanical and electrical services, transportation and warehousing, rental and leasing activities without option rights, employment, travel agency and other business support activities, trade, mining services, architectural and engineering activities as well as technical consulting, manufacturing industry, services to enhance capabilities in the construction field, engineering and planning services, and the development and optimization of the Company's resources to produce high-quality and competitive goods and/or services to obtain or pursue profits to increase the Company's value by applying the principles of a Limited Liability Company.

Thus, the Company can carry out the following business activities.

✅ Sudah dilaksanakan
❌ Belum dilaksanakan

✅ Conducted
❌ Not Conducted

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Implementation of the Business Activities
Konstruksi Construction	
Konstruksi gedung | Building construction	✅
Konstruksi prapabrikasi bangunan gedung | Prefabricated construction of buildings	✅
Konstruksi jalan dan jalan rel | Road and railway construction	✅
Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah | Irrigation canal system, communication, and wastewater construction	✅

Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya | Irrigation canal system, communication, and other wastewater construction	❌
Konstruksi bangunan sipil lainnya | Other civil building construction	✅
Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya | Other special civil building construction	✅
Konstruksi paprabrikan bangunan sipil | Prefabricated construction of civil buildings	✅
Pembongkaran | Demolition	✅
Penyiapan lahan | Land preparation	✅
Instalasi sistem kelistrikan | Electrical system installation	✅
Instalasi saluran air (plambing), pemanas, dan pendingin | Plumbing, heating, and cooling installation	✅
Instalasi konstruksi lainnya | Other construction installation	✅
Penyelesaian konstruksi bangunan | Building construction completion	✅
Konstruksi khusus lainnya | Other special construction	❌
Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringannya | Electrical mechanical work including grid installation	✅
Engineering Procurement & Construction (EPC)	
Perminyakan | Oil	❌
Agro industri | Agro-industry	❌
Kelistrikan | Electricity	❌
Telekomunikasi | Telecommunication	❌
Petrokimia | Petrochemical	❌
Pengangkutan dan Pergudangan Transportation and Warehousing	
Angkutan jalan rel untuk penumpang | Rail transport for passengers	✅
Angkutan jalan rel untuk barang | Rail transport for cargo	✅
Angkutan bus dalam trayek | Routed bus transport	❌
Angkutan bus tidak dalam trayek | Non-routed bus transport	❌
Angkutan melalui saluran pipa | Pipeline transport	❌
Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek | Routed, non-bus land transport for passengers	❌
Angkutan darat lainnya untuk penumpang | Other land transport for passengers	❌
Angkutan darat untuk barang | Land transport for cargo	❌

	Angkutan jalan rel perkotaan dan wisata untuk penumpang | Rail transport for city and tourism area for passengers	❌
	Angkutan jalan rel lainnya | Other rail transport	❌
	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang | Domestic sea transport for passengers	❌
	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang | Overseas sea transport for passengers	❌
	Angkutan laut dalam negeri untuk barang | Domestic sea transport for cargo	❌
	Angkutan laut luar negeri untuk barang | Overseas sea transport for cargo	❌
	Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan untuk penumpang | River, lake, and crossing transport for passengers	❌
	Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan untuk barang | River, lake and crossing transport for cargo	❌
	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Rental and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support	
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya | Rental and leasing activities without option right for cars, buses, trucks, and similar vehicles	✅
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif | Rental and leasing activities without option right for creative industry machines and equipment	❌
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya | Rental and leasing activities without option right for machinery, tools, and other tangible goods	❌
	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Rental and Leasing Activities without Option Right for Transportation Equipment	
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih | Rental and leasing activities without option right for non-motorized land transportation vehicles with four or more wheels	❌
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air | Rental and leasing activities without option right for water transportation	❌
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi lainnya | Rental and leasing activities without option right of other transportation equipment	❌
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trading, Car and Motorcycle Repair and Service	
	Perdagangan Mobil | Car trading	✅
	Reparasi dan perawatan mobil | Car repair and service	❌
	Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil | Car spareparts and accessories trading	❌

	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya | Motorcycle trading, reparation, and service as well as motorcycle spareparts and accessories trading	❌
	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak | Fee or contract-based wholesale trading	❌
	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya | Wholesale of machinery, equipment and other supplies	❌
	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan | Wholesale of building material and supplies	✅
	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL | Wholesale of other products including scraps & parts that cannot be classified in other places	❌
	Perdagangan besar berbagai macam barang | Wholesale of various items	❌
	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko | In-store retail trading for building equipment and material, paints and glasses	❌
Industri Pengolahan Processing Industry		
	Industri barang refraktori (tahan api) | Refractory industry	❌
	Industri bahan bangunan dari tanah liat atau keramik | Clay or ceramic-based building material industry	❌
	Industri semen, kapur, dan gips | Cement, lime and plaster industry	❌
	Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes | Cement, lime, gypsum and asbestos-based industry	❌
	Industri barang dari batu | Stone-based industry	❌
	Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL | Other non-metal mineral-based industry that cannot be classified in other places	❌
	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan | Metal goods industry ready to install for buildings	❌
	Industri logam dasar besi dan baja | Iron and steel base metal industry	❌
	Industri pembuatan kapal, perahu dan struktur bangunan terapung | Shipbuilding, boat, and floating structure construction industry	❌
Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Mining and Excavation Supporting Activities		
	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam | Oil and gas mining supporting activities	❌
	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | Other mining and excavation supporting activities	✅
Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Professional, Scientific, and Technical Activities		
	Aktivitas kantor pusat | Head office activities	✅
	Aktivitas konsultasi manajemen | Management consulting activities	❌

Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu | Architectural and engineering activities as well as related technical consultancy	❌
Analisis dan uji teknis | Technical analysis and testing	❌
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa | Research and development of natural science as well as technological and engineering sciences	❌
Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi | Capability improvement services in construction field	❌
Jasa *engineering* dan perencanaa | Engineering and planning services	❌
Melakukan Usaha Pemasok, Jasa Keagenan, Jasa Handling Impor dan Ekspor dan Jasa Ekspedisi/Angkutan Darat serta Perdagangan Umum | Engage in supplier business, agency services, import and export handling services and freight/land transport services, as well as general trading	✅

Melakukan Usaha dalam Bidang Agro Industri yang Meliputi Pabrik Kelapa Sawit, Gula Biodiesel, Bioethanol, Biogas dan Biomassa Energi Termasuk Pengoperasian, Produksi, Pemeliharaan serta Pendistribusian
Engage in Agro Industry Sector Business, including Palm Oil Mills, Biodiesel Sugar, Bioethanol, Biogas, and Biomass Energy, including Operation, Production, Maintenance, and Distribution.

Industri minyak mentah/murni kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak goreng kelapa sawit | Crude palm oil and cooking palm oil industry	❌
Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya | Crude oil and other vegetable and animal fatty oil industry	❌
Industri gula | Sugar industry	❌
Industri bahan bakar dan minyak pelumas hasil pengilangan minyak bumi | Fuel and lubricating oil industry from petroleum refining activities	❌
Industri kimia dasar | Basic chemical industry	❌
Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik | Engage in Agro Industry sector includes factory	❌

Melakukan Usaha dalam Bidang Jasa dan Teknologi Informasi dan Kepariwisataan
Engage in the Service Sector and Tourism and Information Technology

Aktivitas agen perjalanan | Travel agency activities	❌
Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata | Tourism information and tourist attraction	❌
Melakukan usaha dalam bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam | Engage in industrial services sector for variety of metal special processing and metal goods	❌

Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di Bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur) Termasuk Jalan Tol, dan Industri
Investment and/or Business Management in Basic Infrastructure and Facilities, Including Toll Roads and Industry

Infrastruktur jalan tol, kereta api, dan pelabuhan | Toll road, railway, and port infrastructure	❌
Energi dan energi terbarukan | Energy and renewable energy	❌

Industri Pabrikasi Fabrication Industry		
	Reparasi produk logam pabrikasi: reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap | Fabrication metal product reparation: repair of ready-to-install metal products for buildings, tanks, water reservoirs, and steam generators	❌
	Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor | Repair of other transport, non-motorized vehicles	❌
	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, rambu dan sejenisnya | Sawmill and wood, rattan, and bamboo preservation industry	❌
	Industri *veneer*, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya | Plywood, veneer, and similar wood industry	❌
	Industri barang bangunan dari kayu | Wood-based building material industry	❌
	Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi | Finished goods material and component fabrication	❌
	Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung | Mechanical and electrical for construction, industry, and building	✅
	Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lainnya yang menunjang usaha pokok Perusahaan tersebut di atas | Electronic, and other business communication to support the Company's main business	❌
	Pabrikasi Bahan dan Komponen Produk Jadi | Finished goods material and Component Fabrication	❌
	Proyek Seberang Lautan | Overseas	❌
	Industri Alat Angkutan Lainnya Golongan Pokok Ini Mencakup Alat Angkutan Lain Seperti Pembuatan Kapal dan Perahu, Lori/Gerbong Kereta Api dan Lokomotif, Pesawat Udara dan Pesawat Angkasa Beserta Suku Cadangnya | Other means of transportation industry, main classes include other means of transportation such as manufacture of axes and boats, railroad lorry/carriage and locomotives, aircraft and spacecraft along with the spare parts	❌
	Penyedia tenaga listrik | Electricity supply	❌
	Penunjang tenaga listrik | Electricity support	❌
	Pengadaan distribusi gas alam dan buatan | Natural and artificial gas procurement and distribution	❌
	Pengadaan Uap/Air Panas, udara dingin dan produksi es | Procurement of steam/hot water, cold air, and ice production	❌
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Procurement of Water, Waste Management and Recycling, Waste and Garbage Disposal and Cleaning		
	***Treatment* air** | Water treatment	✅
	Pengumpulan air limbah | Wastewater collection	❌
	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | Non-hazardous waste collection	✅
	Pengumpulan limbah berbahaya | Hazardous waste collection	✅
	***Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya** | Hazardous wastewater treatment and disposal	❌

Pengadaan Air Water Procurement		
	Industri minuman ringan | Soft drink industry	❌
	Industri air kemasan dan air minum isi ulang | Bottled water and drinking water refill industry	❌
	Industri minuman lainnya | Other beverage industry	❌
Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya Non-Hazardous Waste Treatment and Disposal		
	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya | Non-hazardous waste treatment and disposal	✅
	Produksi kompos sampah organik | Organic waste compost production	❌
	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya | Hazardous waste treatment and disposal	❌
Pengelolaan Sampah dan Pemulihan Material Waste Management and Material Recovery		
	Pemulihan Material | Material recovery	❌
	Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya | Waste and other garbage remediation activities and management	❌
	Transportasi dan Pergudangan | Transportation and warehousing	❌
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Warehousing and Transportation Support Services		
	Pergudangan dan penyimpanan | Warehousing and storage	❌
	Aktivitas penunjang angkutan darat | Land transport support activities	❌
	Aktivitas penunjang angkutan perairan | Water transport support activities	❌
	Penanganan kargo (bongkar muat barang) | Cargo handling (loading and unloading	❌
	Aktivitas kebandarudaraan dan jasa pelayanan navigasi penerbangan | Airport activities and flight navigation services	❌
	Aktivitas penunjang angkutan lainnya | Other transportation support activities	❌

Surat Izin Usaha
Business Licence

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan telah mendapatkan surat izin usaha dari lembaga yang berwenang.

The Company has obtained necessary business licenses from authorized institutions to carry out its business activities.

Nama Surat Izin Business Licence	**Lembaga Pemberi** Issuance Body	**Masa Berlaku** Validity Period
Nomor Induk Berusaha Business Identification Number	**Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**30 Oktober 2018 s.d. Perusahaan tidak lagi menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.** October 30, 2018, until the Company Stopped Running Its Business and/or Activities
Izin Usaha Jasa Pertambangan Mining Service Business License	**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**16 Agustus 2023 s.d 22 Juni 2028** August 16, 2023 to June 22, 2028
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BG004 (Konstruksi Gedung Perbelanjaan) Construction Business Entity Certificate BG004 (Shopping Building Construction)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**6 Januari 2023 s.d. 5 Januari 2026** January 6, 2023 to January 5, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BG009 (Konstruksi Gedung Lainnya) Construction Business Entity Certificate BG009 (Other Building Construction)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**4 April 2023 s.d. 3 April 2026** April 4, 2023 to April 3, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) Construction Business Entity Certificate BS001 (Road Civil Building Construction)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**21 Desember 2022 s.d. 20 Desember 2025** December 21, 2022 to December 20, 2025
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BS002 (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Flyover dan Underpass) Construction Business Entity Certificate BS002 (Civil Building Construction of Bridges, Flyovers and Underpasses)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**3 Februari 2023 s.d. 2 Februari 2026** February 3, 2023 to February 2, 2026

Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BS003 (Konstruksi Jalan Rel) Construction Business Entity Certificate BS003 (Railroad Construction)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**6 Maret 2023 s.d. 5 Maret 2026** March 6, 2023 to March 5, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BS004 (Konstruksi Bangunan Jaringan Irigasi dan Drainase) Construction Business Entity Certificate BS004 (Irrigation and Drainage Network Building Construction)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**28 Februari 2023 s.d. 27 Februari 2026** February 28, 2023 to February 27, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BS010 (Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air) Construction Business Entity Certificate BS010 (Water Resources Infrastructure Building Construction)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Boar	**26 Januari 2023 s.d. 25 Januari 2026** January 26, 2023 to January 25, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi BS011 (Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan) Construction Business Entity Certificate BS011 (Non-Fishery Port Building Construction)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**2 Februari 2023 s.d. 1 Februari 2026** February 2, 2023 to February 1, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi IN001 (Instalasi Mekanikal) Construction Business Entity Certificate IN001(Mechanical Installation)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**2 Januari 2023 s.d. 1 Januari 2026** January 2, 2023 to January 1, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi IN004 (Instalasi Minyak dan Gas) Construction Business Entity Certificate IN004 (Oil and Gas Installation)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**2 Januari 2023 s.d. 1 Januari 2026** January 2, 2023 to January 1, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi KK001 (Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang) Construction Business Entity Certificate KK001 (Foundation and Pile Installation)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**1 April 2023 s.d. 31 Maret 2026** April 1, 2023 to March 31, 2026

Sertifikat Badan Usaha Konstruksi KK008 (Perkerasan Aspal) Construction Business Entity Certificate KK008 (Asphalt Pavement)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**1 April 2023 s.d. 31 Maret 2026** April 1, 2023 to March 31, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi KK012 (Pekerjaan Struktur Beton) Construction Business Entity Certificate KK012 (Concrete Structure Work)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**8 April 2023 s.d. 7 April 2026** April 8, 2023 to April 7, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi KK016 (Pemasangan Kerangka Baja) Construction Business Entity Certificate KK016 (Erection of Steel Framework)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**8 April 2023 s.d. 7 April 2026** April 8, 2023 to April 7, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PA001 (Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator) Construction Business Entity Certificate PA001 (Construction Equipment Rental With Operator)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**25 Januari 2023 s.d. 24 Januari 2026** January 25, 2023 to January 24, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PL003 (Penyiapan Lahan Konstruksi) Construction Business Entity Certificate PL003 (Construction Land Preparation)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**11 Maret 2023 s.d. 10 Maret 2026** March 11, 2023 to March 10, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PL004 (Pekerjaan Tanah) Construction Business Entity Certificate PL004 (Earthwork)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board.	**8 April 2023 s.d. 7 April 2026** April 8, 2023 to April 7, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PL008 (Pemasangan Perancah (Steiger) Construction Business Entity Certificate PL008 (Erection of Scaffolding (Steiger)	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal** Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	**20 Maretl 2023 s.d. 19 Maret 2026** March 20, 2023 to March 19, 2026

Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Oil and Gas Supporting Business Capacity Certificate	**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** Ministry of Energy and Mineral Resources	**1 Oktober 2023 s.d. Perusahaan tidak lagi menjalankan usaha dan/atau kegiatannya** October 1, 2023, until the Company Stopped Running Its Business and/or Activities

Produk dan Jasa
Products and Services

Sampai dengan tahun 2024, Perusahaan dan Entitas Anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi telah memiliki alat berat sebanyak 3.212 unit yang terdiri dari:

As of 2024, the Company and its Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi, have a total of 3,212 heavy equipment units, consisting of:

123 *Large Scale Fleet* (Non-Mobile)	Unit
Asphalt Mixing Plant	6
Batching Plant	19
Cement Deep Mixing	0
Crane Pancang	1
Crawler Crane	15
CSD	0
Drilling Rig	9
Launcher Gantry	2
Passenger Hoist	11
Placing Boom	1
Stone Crusher	17
Tower Crane	42

3.089 Large Scale Fleet (Mobile)	Unit
Articulated Dump truck	16
Asphalt Distributor	3
Asphalt Finisher	9
Baby Roller	6
Backhoe Loader	3
Breaker	89
Bulldozer	158
Car Mix	3
Cold Milling	1
Cold Recycling	0
Compressor	14
Concrete Paver	10
Concrete Pump	12
Crawler Dump Truck	1
Dump Truck	1.574
Excavator	530
Flat Deck	3
Forklift	4
Fuel Truck	39
Generating Set	90
Grapple	9
Impact Roller	1
Manhauler	28

Mine Pump	1
Motor Grader	51
Pile Hammer	2
Ripper	17
Self Loader	2
Skid Steer Loader	2
Submersible Pump	1
Tandem Roller	13
Telehandler	1
Tower Lamp	28
Towing Tractor	1
Tractor	1
Truck Boogie	1
Truck Box	1
Truck Crane	7
Truck Dolly	1
Truck Head	0
Truck Lowboy	1

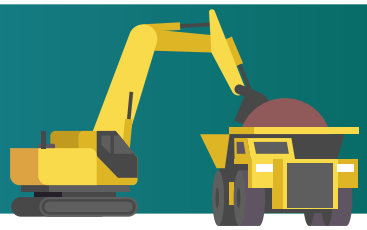
Truck Mixer	78
Truck Service	6
Tyre Roller	18
Vibro Roller	153
Water Tank Truck	49
Wheel Excavator	11
Wheel Loader	35
Truck Mounted Crane	5

Segmen atau Lini Bisnis
Segment or Line of Business

Lini Bisnis PP Presisi
Line of Business of PP PresisiLine



Jasa pertambangan
Mining Construction Services



Perusahaan mengembangkan *Capacity Engineering* melalui diversifikasi pada bidang jasa pertambangan secara komprehensif mulai dari *mining development* hingga *mining operation* seperti *overburden, ore hauling, barging* sampai dengan *hauling ore.* Didukung oleh pengalaman Perusahaan pada bidang pertambangan nikel, Perusahaan secara berkesinambungan mengoptimalkan aset dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan. Berikut daftar proyek yang dikerjakan pada tahun 2024.

The Company develops Capacity Engineering through comprehensive diversification in the mining construction services ranging from mining development to mining operations such as overburden, ore hauling, barging to ore hauling. Supported by the Company's experience in nickel mining, the Company continuously optimizes its assets and equipment to provide the best service to each customer. The following is a list of projects undertaken in 2024.

Proyek Jasa pertambangan Tahun 2024
Mining Construction Services Project in 2024

Nama Proyek Project Name	Status Pengerjaan Work Status	
	Selesai Done	Dalam Proses In progress
Secondary Hauling, Proyek Weda Bay Nickel Secondary Hauling, Weda Bay Nickel Project		✅
Mining Development, Proyek Weda Bay Nickel Mining Development, Weda Bay Nickel Project		✅
Mining Haul Road and Bridge from Kao Rahai to Tofu, Proyek Weda Bay Nickel Mining Haul Road and Bridge from Kao Rahai to Tofu, Weda Bay Nickel Project	✅	
Mines of Bahadopi Block 2 and 3 Project Above Ground and Infrastructure		✅
Quarry Development, PT Vale Indonesia		✅
Mining Development and Operation, Proyek Weda Bay Nickel Mining Development and Operation, Weda Bay Nickel Project		✅
Pekerjaan MO Tofu Weda Bay Nickel MO Tofu Weda Bay Nickel Work		✅
Hauling Road Tofu to Position Weda Bay Nickel		✅

Civil Work



Cakupan *civil work* Perusahaan, yaitu pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi atau kanal, bendungan, terowongan, struktural gedung, jalan, jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan pengeboran, dan pembukaan lahan. Saat ini, pekerjaan sipil yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi pekerjaan proyek infrastruktur, di antaranya pekerjaan proyek jalan, bendungan, dan dermaga. Dalam masing-masing proyek, Perusahaan melakukan pekerjaan pembukaan lahan, *cut and fill*, pengerasan lapisan jalan, beton, serta *rigid/flexible pavement*.

The Company's civil works include the construction of ports, airports, railroads, coastal safeguards, irrigation channels or canals, reservoirs, tunnels, building structures, roads, bridges, swamp reclamations, pipe installations, drillings, and land clearing. Currently, the civil works carried out by the Company include infrastructure projects, among others, works on roads, reservoirs, and docks. In every project, the Company performs land clearing, cut and fill, road paving, concrete, and rigid/flexible pavement.

Berikut daftar proyek yang dikerjakan pada tahun 2024.

The following is a list of projects undertaken in 2024.

Proyek Civil Works Tahun 2024
Civil Works Project 2024

Nama Proyek Project Name	**Status Pengerjaan** Work Status	
	Selesai Done	**Dalam Proses** In progress
PP Presisi		
Tol Indrapura Kisaran Indrapura Kisaran Toll Road	✅	
Upah Giling & Hampar Aspal Bandara VVIP Grind & Overlay VVIP Airport Asphalt		✅
KSO Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai Joint Operation Medan-Binjai Railway Development		✅
KSO Jembatan GORR Gorontalo Joint Operation GORR Gorontalo Bridge	✅	
KSO Pelabuhan SKPT Saumlaki Joint Operation SKPT Saumlaki Port	✅	
PT Lancarjaya Mandiri Abadi (Entitas Anak) (Subsidiary)		
Pembangunan Bangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Construction of the State Palace Building and Ceremonial Grounds in the Presidential Palace Area in the Nusantara Capital City		✅
Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Construction of Presidential Office Building in the Presidential Palace Area in the Nusantara Capital City		✅

Pembangunan Rumah Susun ASN 1 Construction of ASN Flats 1		✅

Selain itu, *civil work* juga mencakup structure work yang merupakan pekerjaan struktur dasar dari bangunan konstruksi/fondasi seperti penggalian tanah dan penguatan struktur tanah untuk memperkuat daya tanah yang menjamin kestabilan fondasi. Selain pekerjaan fondasi, Perusahaan juga memberikan layanan jasa pekerjaan formwork, yaitu konstruksi pendukung sementara dalam pembuatan beton.

In addition, civil work also includes structure work which is the work of the basic structure of the construction building/foundation such as excavation of soil and reinforcement of soil structure to strengthen soil power that ensures the stability of the foundation. In addition to foundation work, the Company also provides formwork services, which is a temporary supporting construction in making concrete.

Ready Mix/Production Plant

Lini bisnis *production plant*, Perusahaan terdiri dari *ready mix, batching plant, asphalt mix plant*, dan *stone crusher*. *Batching plant* baik pada *ready mix (cement)* maupun *asphalt* dan crusher berperan dalam mengolah material-material campuran atau batuan dasar menggunakan formulasi khusus, sehingga menghasilkan beton cor siap pakai maupun material aspal dan batu *split* yang siap disajikan pada area proyek.

The Company's production plant business consists of the ready mix, batching plant, asphalt mix plant, and stone crusher. Batching plants in the ready mix (cement), as well as asphalt and crusher, have a role in processing mixed materials or bedrock using special formulations, resulting in ready-to-use cast concrete as well as asphalt and split stone materials ready to be used in the desired project area.

Proyek *Production Plant* Tahun 2024
Production Plant Project 2024

Nama Proyek Project Name	Status Pengerjaan Work Status	
	Selesai Done	**Dalam Proses** In progress
Batching Plant Tol Indrapura Kisaran Batching Plant for Indrapura Kisaran Toll Road	✅	
Batching Plant Bayung Lencir Jambi	✅	
Batching Plant KIT Batang Proyek Pematangan Lahan Fase 2 Tahap 1 Batching Plant KIT Batang Land Maturation Project Phase 2 Stage 1	✅	
Batching Plant KIT Batang Proyek Pembangunan Infrastruktur Akses Jetty Kit Batang Batching Plant KIT Batang Jetty Kit Batang Access Infrastructure Development Project	✅	
Batching Plant Tol Jakarta-Cikampek Selatan II Batching Plant Jakarta-Cikampek Selatan II Toll Road		✅
Upah *Mixing* & Pengiriman Beton IKN IKN Concrete Mixing & Delivery Wages		✅
Upah Giling & Hampar Aspal Sumbu Barat Grind & Overlay West Axis Asphalt		✅
Upah Giling & Hampar Aspal 6C IKN Grind & Overlay 6C IKN Asphalt		✅
Supply Aspal *Fly Over* IKN Supply of Asphalt for IKN Flyover	✅	

Penyewaan Alat Berat / Heavy Equipment Rental

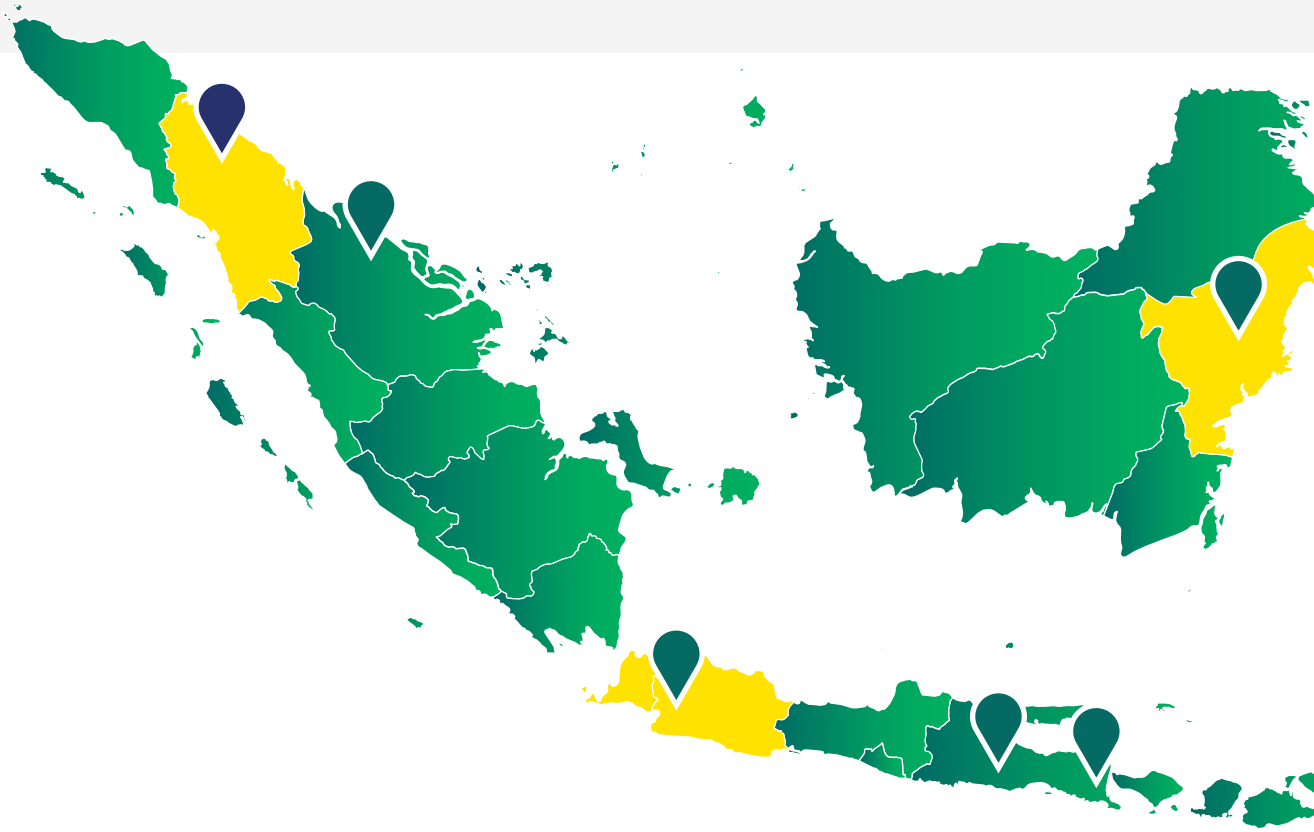
Penyewaan alat berat merupakan lini bisnis Perusahaan sebelum melakukan transformasi bisnis. Sampai saat ini, Perusahaan tetap mempertahankan bisnis tersebut. Sampai saat ini, Perusahaan tetap mempertahankan bisnis tersebut. Perusahaan memberikan jasa yang lengkap dengan memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan, prima, dan perawatan berjangka.

The rental of heavy equipment was the Company's line of business before undergoing a business transformation. To this day, the Company continues to maintain this business. The Company provides comprehensive services by ensuring the availability of reliable, excellent, and well-maintained equipment through scheduled maintenance.



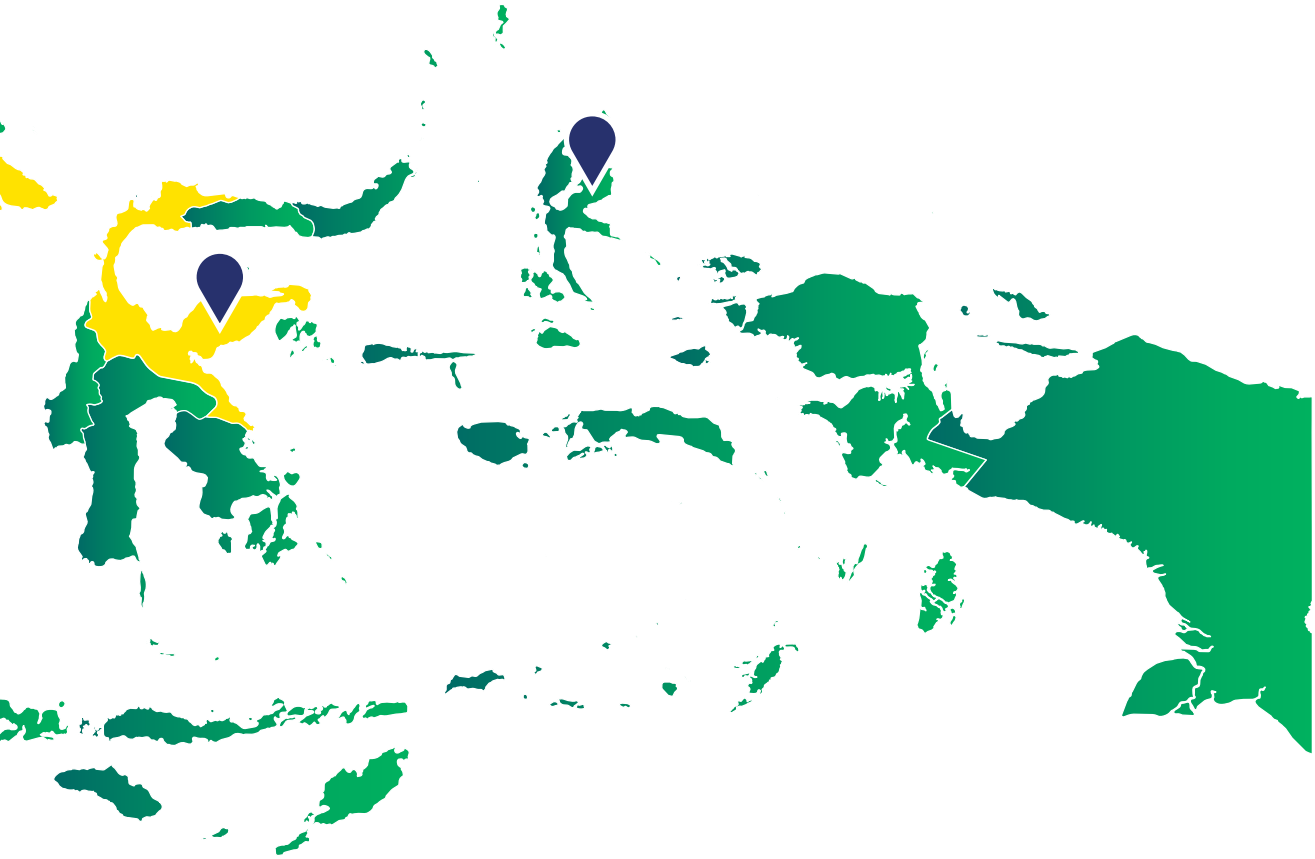
Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Business Network and Operational Area



Proyek PP Presisi | PP Presisi Projects

- *Secondary Hauling*, Proyek Weda Bay Nickel
  Secondary Hauling, Weda Bay Nickel Project
- *Mining Development*, Proyek Weda Bay Nickel
  Mining Development, Weda Bay Nickel Project
- Mines of Bahadopi Block 2 and 3 Project Above Ground and Infrastructure
- *Quarry Development*, PT Vale Indonesia
- Pekerjaan *MO Tofu* Weda Bay
  MO Tofu Weda Bay Work
- KSO Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai
  Joint Operation Medan-Binjai Railway Development
- Upah Giling & Hampar Aspal Bandara VVIP
  Grind & Overlay VVIP Airport Asphalt
- Upah Giling & Hampar Aspal Sumbu Barat
  Grind & Overlay West Axis Asphalt
- Upah Giling & Hampar Aspal 6C IKN
  Grind & Overlay 6C Asphalt
- Batching Plant Tol Jakarta-Cikampek Selatan II
  Batching Plant Jakarta-Cikampek Selatan II Toll Road
- Upah Mixing & Pengiriman Beton IKN
  IKN Concrete Mixing & Delivery



Proyek entitas anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi | Projects of subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi

- **Proyek di Kawasan IKN**
  Projects in the IKN Area
- **Probowangi Paket 3**
  Probowangi Package 3
- **Jalan Tol 6C**
  6C Toll Road
- **Sub BWP 1.B dan 1.C**
  Sub BWP 1.B and 1.C
- ***Landscape & Toll Road Connection* Bandara Kediri**
  Landscape & Toll Road Connection Kediri Airport
- **Tol Cinere Kukusan Seksi 3**
  Cinere Kukusan Toll Road Section 3
- **IKPP Karawang**
  IKPP Karawang

Keanggotaan dalam Asosiasi

Membership in Associations

Sebagai entitas anak dari PT PP (Persero) Tbk yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia, PPRE telah terdaftar dalam keanggotaan asosiasi industri.

As a subsidiary of PT PP (Persero) Tbk, specializing in integrated construction services based on heavy equipment and a leading player in Indonesia, PPRE is registered as a member of industry associations.

Nama Asosiasi Association Name	**Mulai Bergabung** Join Date	**Skala Asosiasi** Scope	**Posisi Perusahaan di Asosiasi** Position in the Association
Asosiasi Emiten Indonesia Association of Indonesian Issuers	**29 Januari 2019** January 29, 2019	**Nasional** National	**Anggota** Member
Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS) Association of National Construction Executor (ASPEKNAS)	**21 Desember 2022** December 21, 2022	**Nasional** Nasional National	**Anggota** Member
Perkumpulan Pelaksana Pekerjaan Infrastruktur Mandiri Association of Independent Infrastructure Work Executors	**27 Desember 2022** December 27, 2022	**Nasional** National	**Anggota** Member
Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) Indonesian Mining Services Association (ASPIND	**5 Januari 2023** January 5, 2023	**Nasional** National	**Anggota** Member

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Dengan terus memperhatikan perkembangan bisnis ke depan, PPRE telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dan diharapkan setiap lini organisasi mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tujuan Perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 025/SK/DIR/PPRE/2024.

By continuously considering future business developments, PPRE has established an appropriate organization structure, ensuring that each organizational line can perform its functions and duties in alignment with the Company's objectives. The Company's organizational structure has been established through Decree No. 025/SK/DIR/PPRE/2024.

Struktur Organisasi
PT PP Presisi Tbk

Organization Structure of PT PP Presisi Tbk

Per 31 Desember 2024
as of December 31, 2024



Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Composition and Profile of the Board of Commissioners

Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Periode 1 Januari s.d 5 Juni 2024 January 1 to June 5, 2024	**Periode 5 Juni s.d 31 Desember 2024** June 5 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)		Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Indra Jaya Rajagukguk diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Independen. At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, Indra Jaya Rajagukguk was honorably discharged from his position as Independent Commissioner.
Albert Simangunsong (komisaris) (Commissioner)	Albert Simangunsong (komisaris) (Commissioner)	
Muhammad Zahid (komisaris) (Commissioner)	Muhammad Zahid (komisaris) (Commissioner)	



Nur Rochmad

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Periode Jabatan: 24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Kedua

President Commissioner and Independent Commissioner
Term of Office: May 24, 2023 to the GMS to be held in 2028, Second Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 65 tahun
Kelahiran Jepara, 21 Maret 1959
Berdomisili di Jakarta Selatan , DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian
65 years old
Born in Jepara on March 21, 1959
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | History of Appointment and Legal Basis

Menjabat pada jajaran Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada tanggal 24 Mei 2023 yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 40 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022. Jabatan ini merupakan periode kedua dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan

Serving in the Company's Board of Commissioners as President Commissioner and Independent Commissioner on May 24, 2023, appointed according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 40 dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of 5 (five) years until the GMS that will be held in 2028. Previously, he has served as an Independent Commissioner since April 20, 2022, according to the Deed of Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholder No. 39 dated April 27, 2022. This position is his second term of office on the Company's Board of Commissioners.

Pendidikan | Education

- **Magister (S2) Ilmu Hukum** dari Universitas Airlangga dan
- **Sarjana (S1) Ilmu Hukum** dari Universitas Diponegoro (1983)

- Master of Law from Universitas Airlangga, Surabaya anD
- Bachelor of Law from Universitas Diponegoro (1983)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Tidak ada.

None

Riwayat Profesi | Professional History

- Senior Advisor Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 (2021-sekarang)
- Komisaris Independen PT PP Presisi Tbk (2022-2023)
- Staff Ahli Otoritas Jasa Keuangan (2020-2022)
- Komisaris Independen PT PP (Persero) Tbk (2019-2022)
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2015-2019)
- Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (2015)
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2014)
- Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (2013)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (2012)
- Kepala Pusat Penerangan Hukum (2011)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (2010)
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2008)
- Pengkaji pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2007)
- Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Umum Lain Keamanan dan Ketertiban Umum pada Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (2006)
- Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2004)
- Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (2003)
- Kepala Kejaksaan Negeri Bandung (2001)
- Kepala Bagian Rumah Tangga Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2001)
- Kepala Kejaksaan Negeri Bali (2000)
- Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (1999)
- Kasi Pidsus Kejaksaan Republik Indonesia - Tanjung Perak (1995)
- Kasi Pidsus Kejaksaan Republik Indonesia - Temanggung (1994)
- Kasi Datun Kejaksaan Republik Indonesia - Kendari (1992)
- Kasi Pidsus Pada Kejaksaan Republik Indonesia - Sultra (1991)

- Senior Advisor at Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 (2021-present)
- Independent Commissioner at PT PP Presisi Tbk (2022-2023)
- Expert Staff at the Financial Services Authority (2020-2022)
- Independent Commissioner at PT PP (Persero) Tbk (2019-2022)
- Deputy Attorney General on General Crimes at the Indonesian Attorney General's Office (2015-2019)
- Chairman of the Indonesian Prosecutor Association (2015)
- Deputy Attorney General on Civil Affairs and Administration at the Indonesian Attorney General's Office (2014)
- Deputy III at the Indonesian Coordinating Ministry of Politics, Law, and Security (2013)
- Head of the Provincial Prosecutor's Office of North Sumatera (2012)
- Head of Legal Information Center (2011)
- Head of the Provincial Prosecutor's Office of Gorontalo (2010)
- Deputy Head of the Provincial Prosecutor's Office of DKI Jakarta (2008)
- Reviewer of the Deputy Attorney General on Special Crimes at the Indonesian Attorney General's Office (2007)
- Head of Subdirectorate on Other Crimes, General Security and Public Order at the Directorate of Executionary Legal Action and Examination of Deputy Attorney General on General Crimes (2006)
- Assistant on General Crimes at the Provincial Prosecutor's Office of DKI Jakarta (2004)
- Intelligence Assistant at the Provincial Prosecutor's Office of East Java (2003)
- Head of Prosecutor's Office of Bandung (2001)
- Head of Household Section of the Indonesian Attorney General's Office (2001)
- Head of Prosecutor's Office of Bali (2000)
- Head of Administration Section of the Provincial Prosecutor's Office of East Java (1999)
- Head of Special Crime Section of the Indonesian Prosecutor's Office - Tanjung Perak (1995)
- Head of Special Crime Section of the Indonesian

- Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Republik Indonesia - Brebes (1989)
- Jaksa Fungsional Pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (1987)
- Pegawai Tata Usaha Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (1984)

Prosecutor's Office - Temanggung (1994)
- Head of Civil Affairs and State Administration of the Indonesian Prosecutor's Office Kendari (1992)
- Head of Special Crime Section of the Indonesian Prosecutor's Office - Southeast Sulawesi (1991)
- Functional Attorney at the Indonesian Prosecutor's Office - Brebes (1989)
- Functional Attorney at the Deputy Attorney General on Special Crimes (1987)
- Administrative Employee at the Deputy Attorney General on General Crimes (1984)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Audit (2022-sekarang)
Di luar Perusahaan: Senior Advisor PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-sekarang)

Within the Company:
Chairman of Audit Committee (2022-present)
Outside the Company: Senior Advisor at Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 (2021-present)

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.

Penghargaan | Awards

- Penghargaan Satya Lencana Karyasatya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2012)
- Penghargaan Jasa dan Kontribusi penanganan Kasus MV Silver Sea 2 Kategori Penuntutan dari kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2017)
- Hasan Wirayuda Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri (2018)
- Bintang Jasa Nararya dari Presiden Republik Indonesia (2019)

- The 20-Year Satya Lencana Karyasatya Award from the President of Indonesia (2012)
- Appreciation of Service and Contribution for handling the MV Silver Sea 2 Case in the Prosecution Category from the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2017)
- The Hasan Wirayuda Indonesian Citizen Protection Award from the Ministry of Foreign Affairs (2018)
- The Bintang Jasa Nararya Award from the President of Indonesia (2019)

Kepemilikan Saham di PPRE | Share Ownership in PPRE

Per 31 Desember 2024
beliau tidak memiliki saham di PPRE.

As of December 31, 2024
he does not own any shares in PPRE.

Keterangan: pernyataan independensi dari Komisaris Independen dapat dilihat dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Laporan Tahunan ini.

Note: the statement of independence of the Independent Commissioners can be found in the Good Corporate Governance chapter of this Annual Report.



Albert Simangunsong

Komisaris
Periode Jabatan: 20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027, Periode Pertama

Commissioner
Term of Office: April 20, 2022, until the GMS to be held in 2027, First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun
Kelahiran Jakarta, 1 Desember 1973
Berdomisili di Jakarta Timur , DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
51 years old
Born in Jakarta on December 1, 1973
Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | History of Appointment and Legal Basis

Menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Serving as a Commissioner as of April 20, 2022, according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 39 dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS to be held in 2027. This term of office is the first term, and previously, he has never served on the Company's Board of Commissioners.

Pendidikan | Education

- **Magister (S2) Ilmu Sosial dan Politik** dari Universitas Indonesia (2007)
- **Sarjana (S1) Teknik Sipil** dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (1999)

- **Master of Social and Political Science** Universitas Indonesia, Jakarta (2007)
- **Bachelor of Civil Engineering** Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta (1999)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Tidak ada.

None

Riwayat Profesi | Professional History

Direktur Utama PT Arto Group
(1999-2002)

President Director of PT Arto Group
(1999-2002)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan:
Anggota Komite Audit (2022-2024)

Di luar Perusahaan: Tidak ada

Within the Company:
Member of the Audit Committee (2022-2024)

Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di PPRE | Share Ownership in PPRE

Per 31 Desember 2024
beliau tidak memiliki saham di PPRE.

As of December 31, 2024
he does not own any shares in PPRE.

Keterangan: pernyataan independensi dari Komisaris Independen dapat dilihat dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Laporan Tahunan ini.

Note: the statement of independence of the Independent Commissioners can be found in the Good Corporate Governance chapter of this Annual Report.



Muhammad Zahid

Komisaris
24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Pertama

Commissioner
Term of Office: May 24, 2023, until the GMS to be held in 2028, First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Gresik, 15 Mei 1970
Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Indonesian Citizen
54 years old
Born in Gresik on May 15, 1970
Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | History of Appointment and Legal Basis

Menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 24 Mei 2023 yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Serving as a Commissioner as of May 24, 2023, appointed according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 41 dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of 5 (five) years until the GMS that will be held in 2028. This term of office is the first term, and previously, he has never served on the Company's Board of Commissioners.

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Ekonomi** dari
  Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2003)

- **Bachelor of Economics**
  Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2003)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Profesional, Ikatan Akuntan Indonesia, 14 Mei 2024.

Professional Level Professional Accountant Certification, Indonesian Institute of Accountants, May 14, 2024.

Riwayat Profesi | Professional History

- SVP Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PP (Persero) Tbk (2021 sekarang)
- Tim PUB Obligasi IV PT PP (Persero) Tbk Tahun 2024 (2023)
- Tim Organisasi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT PP (Persero) Tbk (2023)
- Senior Manajer Keuangan dan SDM Infra 2 PT PP (Persero) Tbk (2017-2021)
- Asisten Keuangan Cabang 4, Jawa Barat PT PP (Persero) Tbk (2016-2017)
- Asisten Keuangan Cabang 3, Jakarta PT PP (Persero) Tbk (2014-2016)
- Asisten Keuangan Cabang 4, Jawa Barat PT PP (Persero) Tbk (2007-2014)
- Site Administration Manager (SAM) Kantor Cabang IX (Siak) - PT PP (Persero) Tbk (2007)
- Site Administration Manager (SAM) Kantor Cabang IV (Riau) - PT PP (Persero) Tbk (2006-2007)
- Site Administration Manager (SAM) Kantor Cabang IV, (Dumai) - PT PP (Persero) Tbk (2004-2008)

- SVP of Accounting and Finance Division of PT PP (Persero) Tbk (2021-present)
- Shelf Registration Bonds IV Public Offering Team of PT PP (Persero) Tbk of 2024 (2023)
- Anti-Bribery Compliance Organization Team (FKAP) Anti-Bribery Management System of PT PP (Persero) Tbk (2023)
- Senior Manager of Finance and Infra 2 HC of PT PP (Persero) Tbk (2017-2021)
- Financial Assistant of Branch 4, West Java, PT PP (Persero) Tbk (2016-2017)
- Financial Assistant of Branch 3, Jakarta, PT PP (Persero) Tbk (2014-2016)
- Financial Assistant of Branch 4, West Java, PT PP (Persero) Tbk (2007-2014)
- Site Administration Manager (SAM) of Branch Office IX (Siak) - PT PP (Persero) Tbk (2007)
- Site Administration Manager (SAM) of Branch Office IV (Riau) - PT PP (Persero) Tbk (2006-2007)
- Site Administration Manager (SAM) of Branch Office IV (Dumai) - PT PP (Persero) Tbk (2004-2008)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Anggota Komite Audit (2023-sekarang)
Di luar Perusahaan: SVP Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PP (Persero) Tbk (2021-sekarang)

Within the Company: Member of the Audit Committee (2023-present)
Outside the Company: SVP of Finance and Accounting Division of PT PP (Persero) Tbk

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali dalam hal jabatannya sebagai SVP Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PP (Persero) Tbk.

He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. However, he is affiliated with the major and controlling shareholder through his position as the SVP of Finance and Accounting Division of PT PP (Persero) Tbk.

Kepemilikan Saham di PPRE | Share Ownership in PPRE

Per 31 Desember 2024 beliau memiliki saham di PPRE sebanyak 967.300 lembar saham.

As of December 31, 2024, he owns 967,300 shares in PPRE.

Keterangan: pernyataan independensi dari Komisaris Independen dapat dilihat dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Laporan Tahunan ini.

Note: the statement of independence of the Independent Commissioners can be found in the Good Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Susunan dan Profil Dewan Direksi

Structure and Profile of the Board of Directors

Kronologis Perubahan Susunan Direksi

Chronology of Changes in the Board of Directors

Periode 1 Januari s.d 25 April 2024 January 1 to April 25, 2024	**Periode 25 April s.d 5 Juni 2024** April 25 to June 5, 2024	**Periode 5 Juni s.d 31 Desember 2024** June 5 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)			I Gede Upeksa Negara mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT PP Presisi Tbk sebagaimana disampaikan dalam surat pengunduran diri tanggal 25 April 2024. Beliau diangkat sebagai Direktur Strategi Korporasi dan HCM entitas induk, PT PP (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan PT PP (Persero) Tbk tanggal 24 April 2024. I Gede Upeksa Negara resigned as President Director of PT PP Presisi Tbk as submitted in his resignation letter dated April 25, 2024. He was appointed as Director of Corporate Strategy and HCM of the parent entity, PT PP (Persero) Tbk based on the Resolution of the Annual GMS of PT PP (Persero) Tbk dated April 24, 2024.
M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Director of Finance, Risk Management & Legal)	M Arif Iswahyudi (Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Acting President Director and concurrently Director of Finance, Risk Management & Legal)	M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	M Arif Iswahyudi merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Utama berdasarkan Surat Direksi PT PP (Persero) Tbk No. 063/EXT/PP/DU/2024 tanggal 25 April 2024. Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, beliau tidak lagi menjabat sebagai Plt. Direktur Utama. Pada kesempatan yang sama, Direktorat Keuangan Manajemen Risiko, dan Legal diubah menjadi Direktorat Keuangan & HCM. M Arif Iswahyudi concurrently serves as Acting President Director based on Decree of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk No. 063/EXT/PP/DU/2024 dated April 25, 2024. At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, he no longer served as Acting President Director. On the same occasion, the Directorate of Finance, Risk Management and Legal was changed to the Directorate of Finance & HCM.

Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Direktorat Operasi diubah menjadi Direktorat Pengelolaan Bisnis & Operasi. At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, the Directorate of Operations was changed to the Directorate of Business Management & Operations.
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) (Director of Business Planning & HCM)	Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) (Director of Business Planning & HCM)		Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2024, Yudi Setiawan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM). At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, Yudi Setiawan was honorably discharged from his position as Director of Business Planning & HCM).
		Arzan (Direktur Utama) (President Director)	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Arzan diangkat sebagai Direktur Utama. At the Annual GMS held on June 5, 2024, Arzan was appointed as President Director.



Arzan

Direktur Utama
Periode Jabatan: 5 Juni 2024 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029, Periode Pertama

President Director
Term of Office: June 5, 2024 to the GMS to be held in 2029, First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun
Kelahiran Liwa, Lampung Barat, 19 September 1973.
Berdomisili di Kabupaten Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Indonesian citizen
51 years old
Born in Liwa, West Lampung, September 19, 1973.
Domiciled in Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | History of Appointment and Legal Basis

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 14 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Appointed as President Director based on the Deed of Resolution of the Annual GMS No. 14 dated June 5, 2024 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, for a term of 5 (five) years until the GMS to be held in 2029. This is his first term, he has never served on the Company's Board of Directors before.

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil** dari Universitas Lampung (2000).

- **Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering**
  Universitas Lampung (2000).

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi dari Kementrian PUPR (2019)

Construction K3 Intermediate Expert Certification from the Ministry of PUPR (2019)

Riwayat Profesi | Professional History

Berkarir di entitas induk, PT PP (Persero) Tbk sejak 2015. Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain *Project Manager Prof Madya (2015-2016)*, *Head of Branch* 2 (2016-2017), *General Manager Operation* Infra 2 (2017-2020), General Manager Operation 1 (2020-2021).

Worked at the parent entity, PT PP (Persero) Tbk since 2015. Held several positions, including Project Manager Prof Madya (2015-2016), Head of Branch 2 (2016-2017), General Manager Operation Infra 2 (2017-2020), General Manager Operation 1 (2020-2021).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

He is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di PPRE | Share Ownership in PPRE

Per 31 Desember 2024
beliau tidak memiliki saham di PPRE.

As of December 31, 2024
he does not own any shares in PPRE.



Mohammad Arif Iswahyudi

Direktur Keuangan & HCM
Periode Jabatan: 20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027, Periode Pertama

Director of Finance and HCM
Term of Office: April 20, 2022, until the GMS to be held in 2027, First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 42 tahun
Kelahiran Surabaya, 5 Desember 1982
Berdomisili di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Indonesian Citizen
42 years old
Born in Surabaya on December 5, 1982
Domiciled in Surabaya, East Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | History of Appointment and Legal Basis

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & HCM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 14 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., untuk masa jabatan meneruskan periode yang lalu. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal yang diangkat pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Serving as Director of Finance & HCM based on the Deed of Resolution of Annual GMS No. 14 dated June 5, 2024 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., for the term of office to continue the previous period. Previously, he served as Director of Finance, Risk Management & Legal appointed on April 20, 2022 based on the Deed of Resolution of the Annual GMS No. 39 dated April 27, 2022 drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, for a term of 5 (five) years until the GMS to be held in 2027. This position is his first term of office, and previously, he has never served on the Company's Board of Directors.

Pendidikan | Education

- **Magister (S2) Investasi dan Keuangan** dari Universitas Bournemouth (2018).
- **Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi** dari Universitas Airlangga Surabaya (2005).

- **Master of Investment and Finance** From the University of Bournemouth, United Kingdom (2018).
- **Bachelor of Economics in Accounting** From Universitas Airlangga, Surabaya (2005)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

- *Investor Relations* dari Indonesia Investor Relations Institute (2021)
- *Registered Security Analyst* dari CSA Institute (2018)

- Investor Relations from Indonesia Investor Relations Institute (2021)
- Registered Security Analyst from the CSA Institute (2018)

Riwayat Profesi | Professional History

Senior Manager Investor Relation, PT PP (Persero) Tbk (2017-2022)

Investor Relations Senior Manager at PT PP (Persero) Tbk (2017-2022)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi | Affiliations

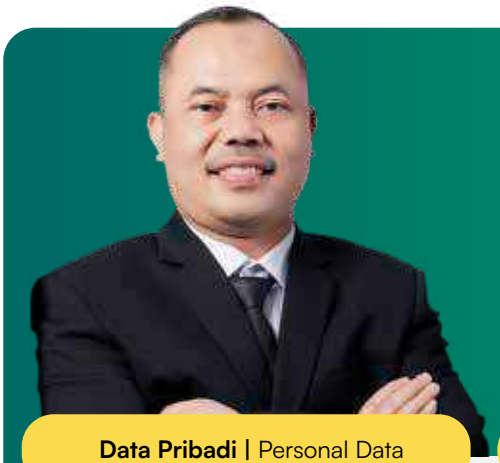
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

He is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di PPRE | Share Ownership in PPRE

Per 31 Desember 2024
beliau tidak memiliki saham di PPRE.

As of December 31, 2024
he does not own any shares in PPRE.



Rebimun

Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
Periode Jabatan: 23 Februari 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Kedua

Director of Business Management & Operations
Term of Office: February 23, 2023, until the GMS to be held in 2028, Second Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Purworejo, 10 Desember 1975
Berdomisili di Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Indonesian Citizen
49 years old
Born in Purworejo on December 10, 1975
Domiciled in Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | History of Appointment and Legal Basis

Menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 14 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., untuk masa jabatan meneruskan periode yang lalu. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Operasi yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 14 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode kedua dalam jajaran Direksi Perusahaan. Sebelum itu beliau telah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022.

Appointed as Director of Business Management & Operations based on the Deed of Resolution of Annual GMS No. 14 dated June 5, 2024 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, for the term of office to continue the previous period. Previously, he served as Director of Operations, appointed pursuant to Deed of Resolution of Extraordinary GMS No. 14 dated February 23, 2023 drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta for a term of 5 (five) years until the GMS to be held in 2028. This is his second term on the Company's Board of Directors. Previously, he has served as Director of Business Planning & HCM as of April 20, 2022 based on the Deed of Annual GMS Resolution No. 39 dated April 27, 2022.

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Teknik Sipil** dari STT YPKP (2006).
- **Bachelor of Civil Engineering** From Universitas Sangga Buana YPKP (2006)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

- *Investor Relations* dari Indonesia Investor Relations Institute (2021)
- *Registered Security Analyst* dari CSA Institute (2018)

- Investor Relations from Indonesia Investor Relations Institute (2021)
- Registered Security Analyst from the CSA Institute (2018)

Riwayat Profesi | Professional History

- *Project Manager* Proyek Tol Semarang Demak (2019-2022)
- *Project Manager* Runway 3 Soetta PT PP (Persero) Tbk (2017-2019)
- *Project Manager* WINRIP Paket 08 (2016-2017)

- Project Manager of the Semarang-Demak Toll Road Project (2019-2022)
- Project Manager of Runway 3 of Soetta at PT PP (Persero) Tbk (2017-2019)
- Project Manager of WINRIP Package 8 (2016-2017)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

He is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di PPRE | Share Ownership in PPRE

Per 31 Desember 2024
beliau tidak memiliki saham di PPRE.

As of December 31, 2024
he does not own any shares in PPRE.

Pejabat Eksekutif

Executive Officers



Wismo Suwego

Vice President, Internal Auditor

Usia Age	: :	38 tahun 38 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023
Menjabat Sejak In office since	: :	22 Mei 2023 May 22, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	22 Mei 2023 May 22, 2023



Mei Elsa Kembaren

Vice President, Corporate Secretary

Usia Age	: :	33 tahun 33 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 021/SK/DIR/PPRE/2024 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 021/SK/DIR/PPRE/2024
Menjabat Sejak In office since	: :	29 Juli 2024 July 29, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	17 Februari 2020 February 17, 2020



Yofi Hendri

Vice President, Equipment Operation

Usia Age	: :	47 tahun 47 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023
Menjabat Sejak In office since	: :	07 Agustus 2023 August 07, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	27 Juli 2023 July 27, 2023



Rully Panca Wahyuriawan

Vice President, Equipment Maintenance & Repair

Usia Age	: :	40 tahun 40 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 245/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 245/SK/DIR/PPRE/VIII/2023
Menjabat Sejak In office since	: :	10 Juli 2023 July 10, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	01 Juli 2011 July 01, 2011



Sahadewo Nalendro Bhawono

Vice President, Operation 1

Usia Age	: :	41 tahun 41 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 032/SK/DIR/PPRE/2024 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 032/SK/DIR/PPRE/2024
Menjabat Sejak In office since	: :	22 Agustus 2024 August 22, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	03 April 2023 April 03, 2023



Eko Septiyanto

Vice President, Operation 2

Usia Age	: :	43 tahun 43 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 038/SK/DIR/PPRE/2024 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 038/SK/DIR/PPRE/2024
Menjabat Sejak In office since	: :	17 September 2024 September 17, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	01 Agustus 2018 August 01, 2018



Maulana Andika

Vice President, Bidding & Engineering

Usia Age	: :	34 tahun 34 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 019/SK/DIR/PPRE/2024 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 019/SK/DIR/PPRE/2024
Menjabat Sejak In office since	: :	24 Juni 2024 June 24, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	24 Juni 2024 June 24, 2024



Debie Novalia

Vice President, Business Development & Asset Management

Usia Age	: :	35 tahun 35 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 034/SK/DIR/PPRE/2024 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 034/SK/DIR/PPRE/2024
Menjabat Sejak In office since	: :	22 Agustus 2024 August 22, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	01 Juli 2020 July 01, 2020



Gallery Rekayasa

Vice President, Finance & Accounting

Usia Age	: :	37 tahun 37 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 324/SK/DIR/PPRE/IX/2023 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 324/SK/DIR/PPRE/IX/2023
Menjabat Sejak In office since	: :	11 September 2023 September 11, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	11 September 2023 September 11, 2023



Dana Surya Kurniawan

Vice President, Operation Control

Usia Age	: :	39 tahun 39 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 037/SK/DIR/PPRE/2024 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 037/SK/DIR/PPRE/2024
Menjabat Sejak In office since	: :	22 Agustus 2024 August 22, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	01 November 2020 November 01, 2020



Yudhistira Bawa Yusha

Vice President, Supply Chain Management

Usia Age	: :	37 tahun 37 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 036/SK/DIR/PPRE/2024 Decree of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 036/SK/DIR/PPRE/2024
Menjabat Sejak In office since	: :	22 Agustus 2024 August 22, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	08 Juli 2024 July 08, 2024



Priyono

Manager, Quality Control

Usia Age	: :	33 tahun 33 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Penempatan Tugas No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23 Assignment Placement Letter No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23
Menjabat Sejak In office since	: :	17 Juli 2023 July 17, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	12 Juli 2012 July 12, 2012



Pipin Julianto

Manager, Health, Safety & Environment

Usia Age	: :	32 tahun 32 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Penempatan Tugas No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23 Assignment Placement Letter No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23
Menjabat Sejak In office since	: :	17 Juli 2023 July 17, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	03 April 2017 April 03, 2017



Aditya Yuli Indrawan

Manager, Equipment Performance & Admin

Usia Age	: :	34 tahun 34 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Penempatan Tugas No. 531/M/HCM/PPRE/VIII/23 Assignment Placement Letter No. 531/M/HCM/PPRE/VIII/23
Menjabat Sejak In office since	: :	28 Agustus 2023 August 28, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	27 Februari 2017 February 27, 2017



Fairuz Rizky Utami

Manager, Human Capital Management

Usia Age	: :	33 tahun 33 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Penempatan Tugas No. 310/M/HCM/PPRE/24 Assignment Placement Letter No. 310/M/HCM/PPRE/24
Menjabat Sejak In office since	: :	23 Agustus 2024 August 23, 2024
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	06 Maret 2023 March 06, 2023



Pradita Dewi Kusumawardhani

Manager, Legal

Usia Age	: :	31 tahun 31 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Memo No. 364/M/PP/SPT-HCM/2023 Memo No. 364/M/PP/SPT-HCM/2023
Menjabat Sejak In office since	: :	17 Juli 2023 July 17, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	17 Juli 2023 17 Juli 2023



Ayu Noviana Isman

Manager, Risk Management

Usia Age	: :	30 tahun 30 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Penempatan Tugas No. 215/M/HCM/PPRE/24 Assignment Placement Letter No. 215/M/HCM/PPRE/24
Menjabat Sejak In office since	: :	11 Juli 2023 July 11, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	20 November 2020 November 20, 2020



Yoan Sukma Ariezonna

Marketing Manager

Usia Age	: :	37 tahun 37 years old
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Penempatan Tugas No. 169/M/HCM/PPRE/III/23 Assignment Placement Letter No. 169/M/HCM/PPRE/III/23
Menjabat Sejak In office since	: :	03 April 2023 April 03, 2023
Bergabung di PP Presisi Sejak Joined the Company on	: :	01 Oktober 2020 October 01, 2020

Demografi Sumber Daya Manusia

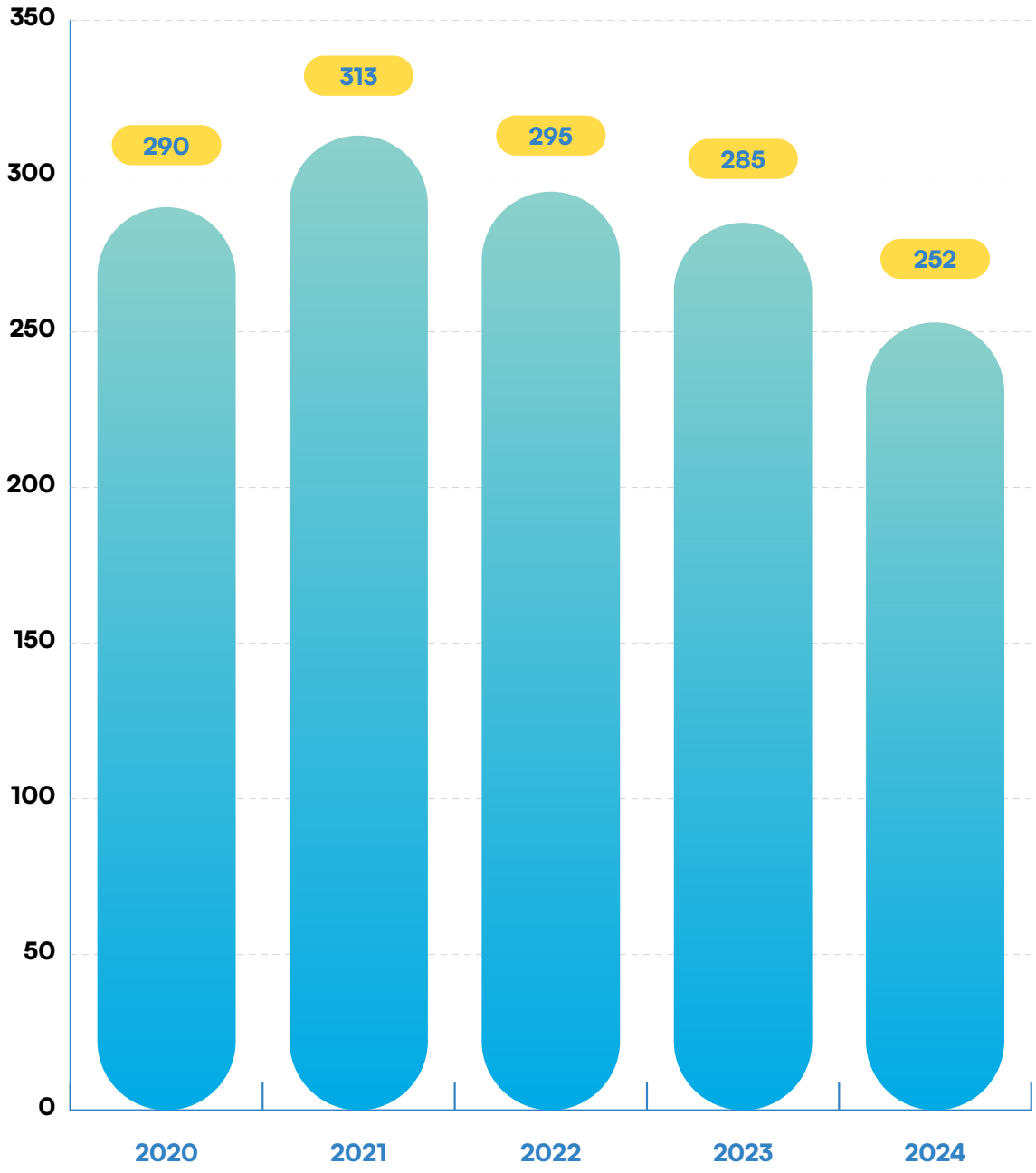
Human Capital Demographics

Di akhir tahun 2024, Perusahaan didukung oleh 252 karyawan, di mana jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 11,57% jika dibandingkan dengan jumlah karyawan di akhir tahun 2023 sebanyak 285 orang.

As of the end of 2024, the Company was supported by 252 employees, representing a decrease of 11.57% compared to the 285 employees at the end of 2023.

Perkembangan Jumlah Karyawan Periode 2020- 2024 (orang)

Development of the Number of Employees 2020-2024 (persons)



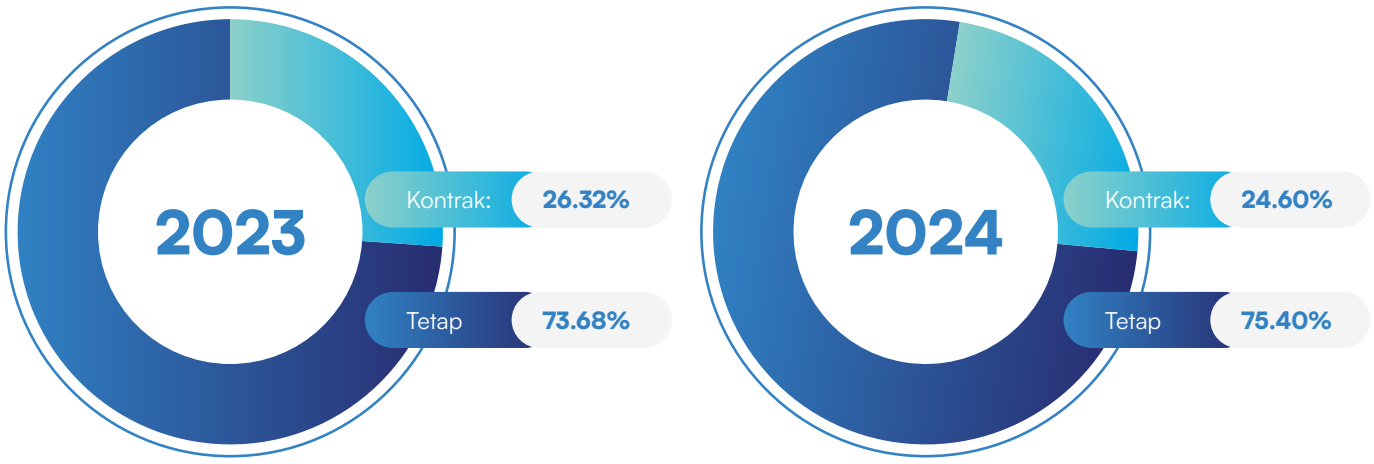
Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Number and Composition of Employees Based on Employment Status (persons)

Tahun Years	**Orang** Persons		**Status Kepegawaian** Employment Status		
			Tetap Permanent	**Kontrak** Contract	**Jumlah** Total
2024	L (Orang) M (Persons)		156	56	212
	P (Orang) F (Persons)		34	6	40
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(1)	190	62	252
	Komposisi (%) Composition (%)		75,40	24,60	100,00
2023	L (Orang) M (Persons)		167	68	235
	P (Orang) F (Persons		43	7	50
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(2)	210	75	285
	Komposisi (%) Composition (%)		73,68	26,32	100,00
Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Orang Persons	(3=1-2)	(20)	(13)	(33)
	%	(3/2)	(9,52)	(17,33)	(11,57)
			⬇	⬇	⬇

L = Laki-laki | P = Perempuan

M = Male | F = Female



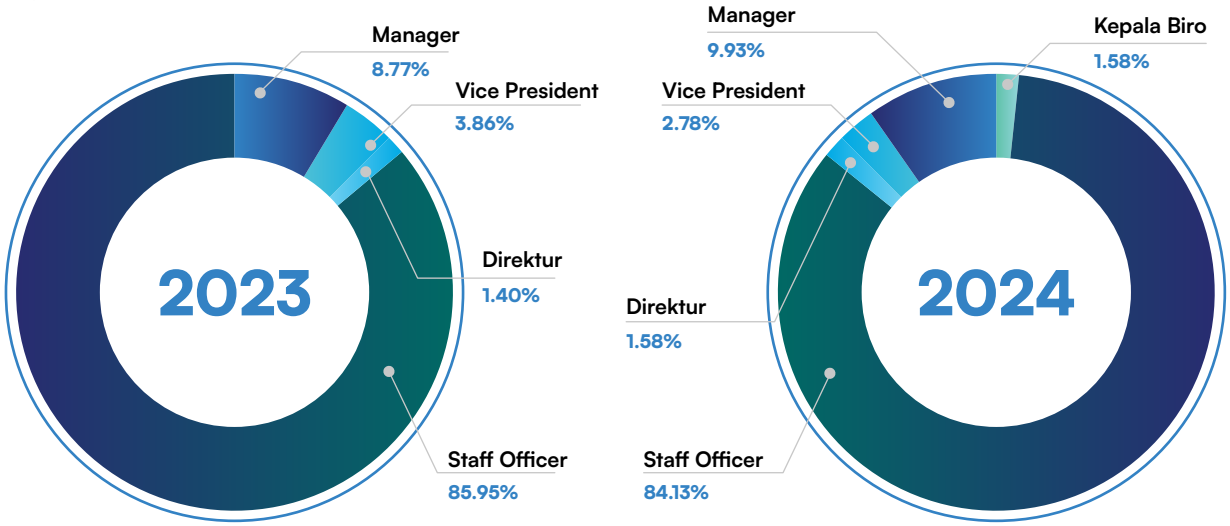
Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan (orang)

Number and Composition of Employees by Position Level (persons)

Tahun Years	**Orang** Persons		**Level Jabatan** Position Level					
			Staff Staff	**Manajer** Manager	**Kepala Biro** Head of Bureau	**Kepala Divisi** Head of Division	**Direktur** Director	**Jumlah** Total
2024	L (Orang) M (Persons)		181	18	3	6	4	212
	P (Orang) F (Persons)		31	7	1	1	-	40
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(1)	212	25	4	7	4	252
	Komposisi (%) Composition (%)		84,13	9,93	1,58	2,78	1,58	100,00
2023	L (Orang) M (Persons)		207	17	-	7	4	235
	P (Orang) F (Persons		38	8	-	4	-	50
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(2)	245	25	-	11	4	285
	Komposisi (%) Composition (%)		85,96	8,77	-	3,86	1,40	100,00
Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Orang Persons	(3=1-2)	(33)	0	4	(4)	0	(33)
	%	(3/2)	(13,47)	0	100,00	(36.36)	0	(11,57)
			⬇	⬆ ⬇	⬆	⬇	⬆ ⬇	⬇

L = Laki-laki | P = Perempuan

M = Male | F = Female



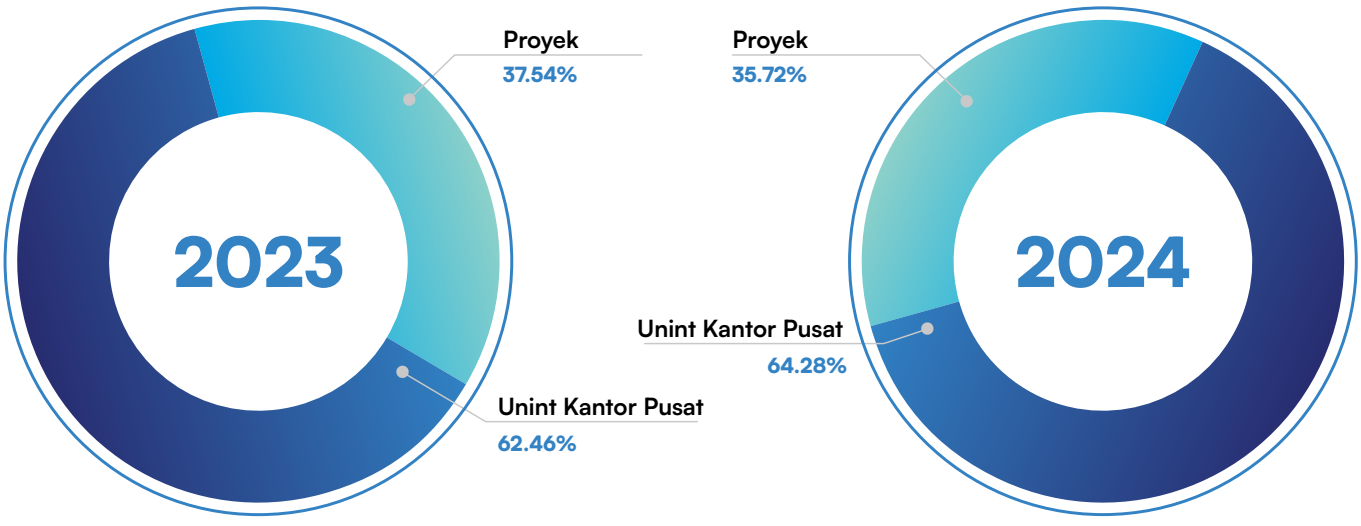
Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja (orang)

Number and Composition of Employees by Work Location (persons)

Tahun Years	**Orang** Persons		**Lokasi Kerja** Work Location		
			Proyek Project	**Unit Kantor Pusat** Head Office	**Jumlah** Total
2024	**L (Orang)** M (Persons)		89	123	212
	P (Orang) F (Persons)		1	39	40
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(1)	90	162	252
	Komposisi (%) Composition (%)		35,72	64,28	100,00
2023	**L (Orang)** M (Persons)		103	132	235
	P (Orang) F (Persons		4	46	50
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(2)	107	178	285
	Komposisi (%) Composition (%)		37,54	62,46	100,00
Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Orang Persons	(3=1-2)	(17)	(16)	(33)
	%	(3/2)	(15,88)	(8,99)	(11,57)
			⬇	⬇	⬇

L = Laki-laki | P = Perempuan

M = Male | F = Female



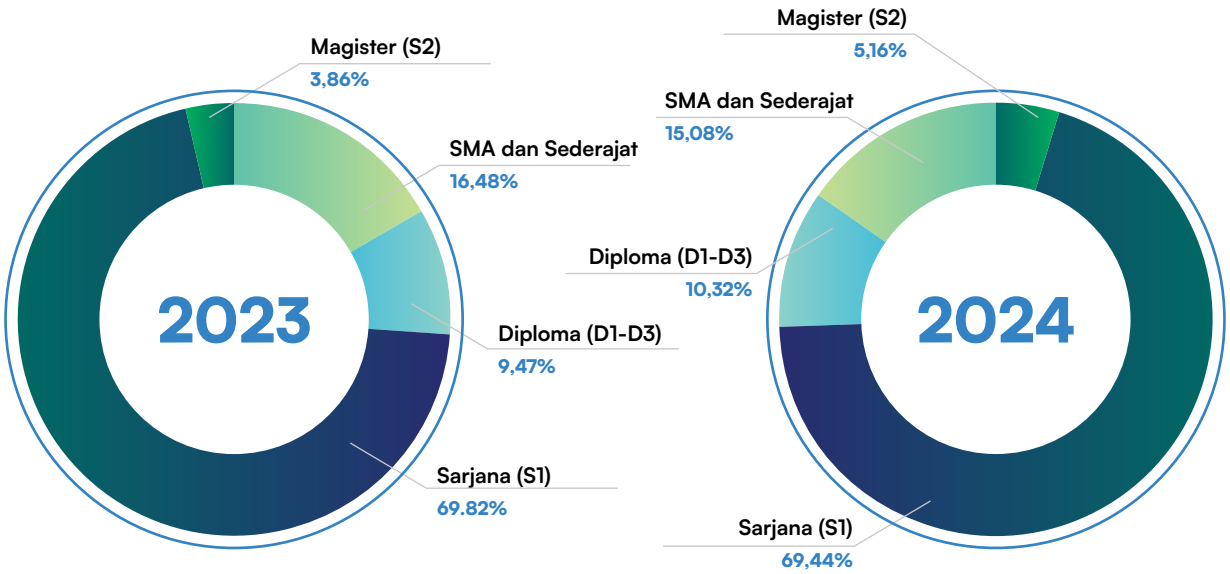
Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

Number and Composition of Employees by Education Level (persons)

Tahun Years	**Orang** Persons		**Jenjang Pendidikan** Education Level				
			Magister (S2) Master Degree	**Sarjana (S1)** Bachelor Degree	**Diploma (D1-D3)** Diploma	**SMA dan Sederajat** High School and Equivalent	**Jumlah** Total
2024	L (Orang) M (Persons)		11	139	24	38	212
	P (Orang) F (Persons)		2	36	2	0	40
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(1)	12	177	26	38	252
	Komposisi (%) Composition (%)		5,16	69,44	10,32	15,08	100,00
2023	L (Orang) M (Persons)		8	155	25	47	235
	P (Orang) F (Persons		3	44	2	1	50
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(2)	11	199	27	48	285
	Komposisi (%) Composition (%)		3,86	69,82	9,47	16,48	100,00
Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Orang Persons	(3=1-2)	2	(24)	(1)	(10)	(33)
	%	(3/2)	18,18	(12,06)	(3,70)	(20,83)	(11,57)
			⬆	⬇	⬇	⬇	⬇

L = Laki-laki | P = Perempuan

M = Male | F = Female



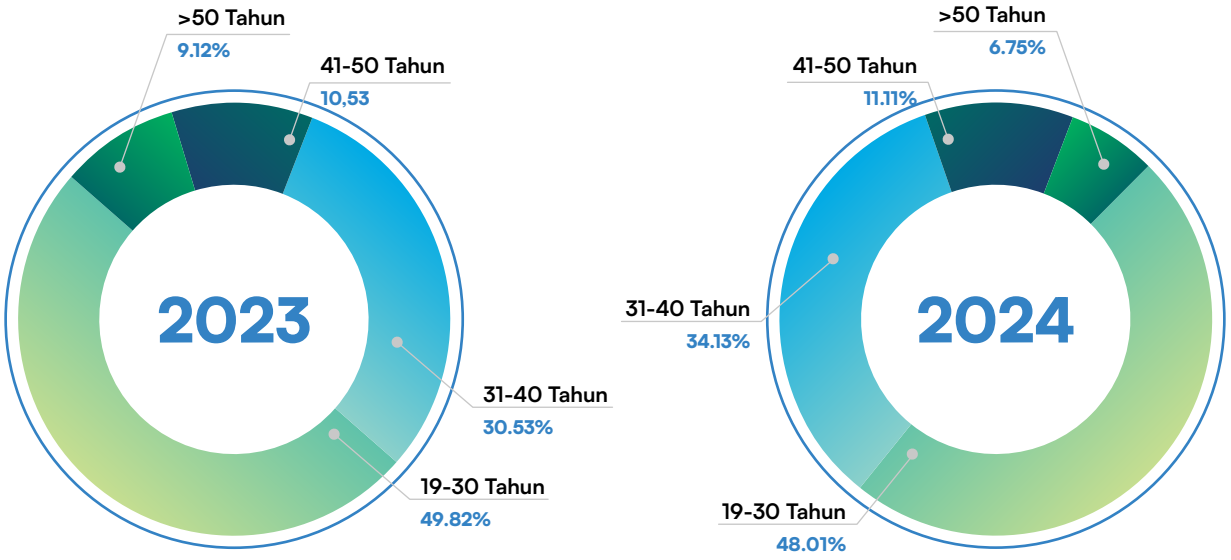
Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Number and Composition of Employees by Age Range (persons)

Tahun Years	**Orang** Persons		**Rentang Usia** Age Range				
			> 50 tahun > 50 years old	**41-50 tahun** 41-50 years old	**31-40 tahun** 31-40 years old	**19-30 tahun** 19-30 years old	**Jumlah** Total
2024	L (Orang) M (Persons)		17	27	74	94	212
	P (Orang) F (Persons)		-	1	12	27	40
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(1)	17	28	86	121	252
	Komposisi (%) Composition (%)		6,75	11,11	34,13	48,01	100,00
2023	L (Orang) M (Persons)		26	29	73	107	235
	P (Orang) F (Persons		-	1	14	35	50
	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(2)	26	30	87	142	285
	Komposisi (%) Composition (%)		9,12	10,53	30,53	49,82	100,00
Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Orang Persons	(3=1-2)	(9)	(2)	(1)	(21)	(33)
	%	(3/2)	(34,61)	(6.67)	(1,15)	(14,78)	(11,57)
			⬆	⬇	⬇	⬇	⬇

L = Laki-laki | P = Perempuan

M = Male | F = Female



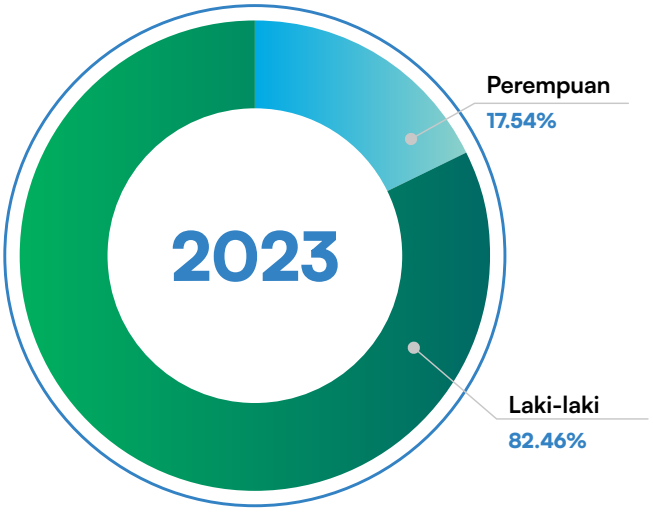
Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

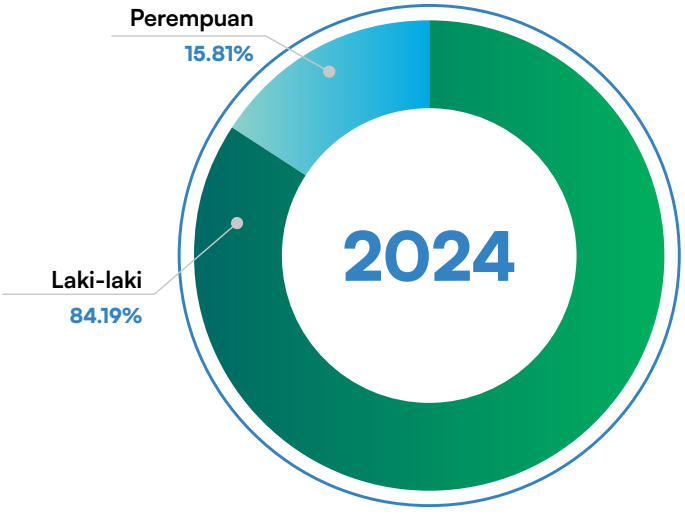
Number and Composition of Employees Based on Gender

Tahun Years	**Orang** Persons		**Jenis Kelamin** Gender		
			Laki-laki Male	**Perempuan** Female	**Jumlah** Total
2024	Jumlah (Orang) Total (Persons)	(1)	212	40	252
	Komposisi (%) Composition (%)		84,13	15,87	100,00
2023	Jumlah (Orang) Total (Persons)		235	50	285
	Komposisi (%) Composition (%)		82,46	17,54	100,00
Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Orang Persons	(3=1-2)	(23)	(10)	(33)
	%	(3/2)	(9,78)	(20,00)	(11,57)
			⬇	⬇	⬇

L = Laki-laki | P = Perempuan

M = Male | F = Female





Rincian tentang pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dan komitmen PPRE untuk tumbuh bersama seluruh karyawan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Details on the fulfillment of employment rights and PPRE's commitment to growing alongside all employees can be viewed in the Sustainability Report as an inseparable document from this Annual Report.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and Listing

Informasi terkait pencatatan saham Perusahaan yang telah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagai berikut:

The information regarding Company share listing issued in the Indonesia Stock Exchange is described as follows:

Uraian Description	Penawaran Umum Saham Perdana Initial Public Share Offering	Pembelian Kembali Saham Share Repurchase
Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	24 November 2017 November 24, 2017	6 Februari 2020 s.d 30 Juli 2021 February 6, 2020 to July 30, 2021
Total Saham yang Diterbitkan (Lembar Saham) Total Issued Shares (Shares)	10.224.271.000	
Harga Nominal (Rp) Nominal Price (Rp)	100	95-208
Harga Penawaran (Rp) Offering Price (Rp)	430	-
Total Saham Beredar (Lembar Saham) Total Shares Outstanding (Shares)	10.224.271.000	10.224.271.000

Informasi Pemegang Saham

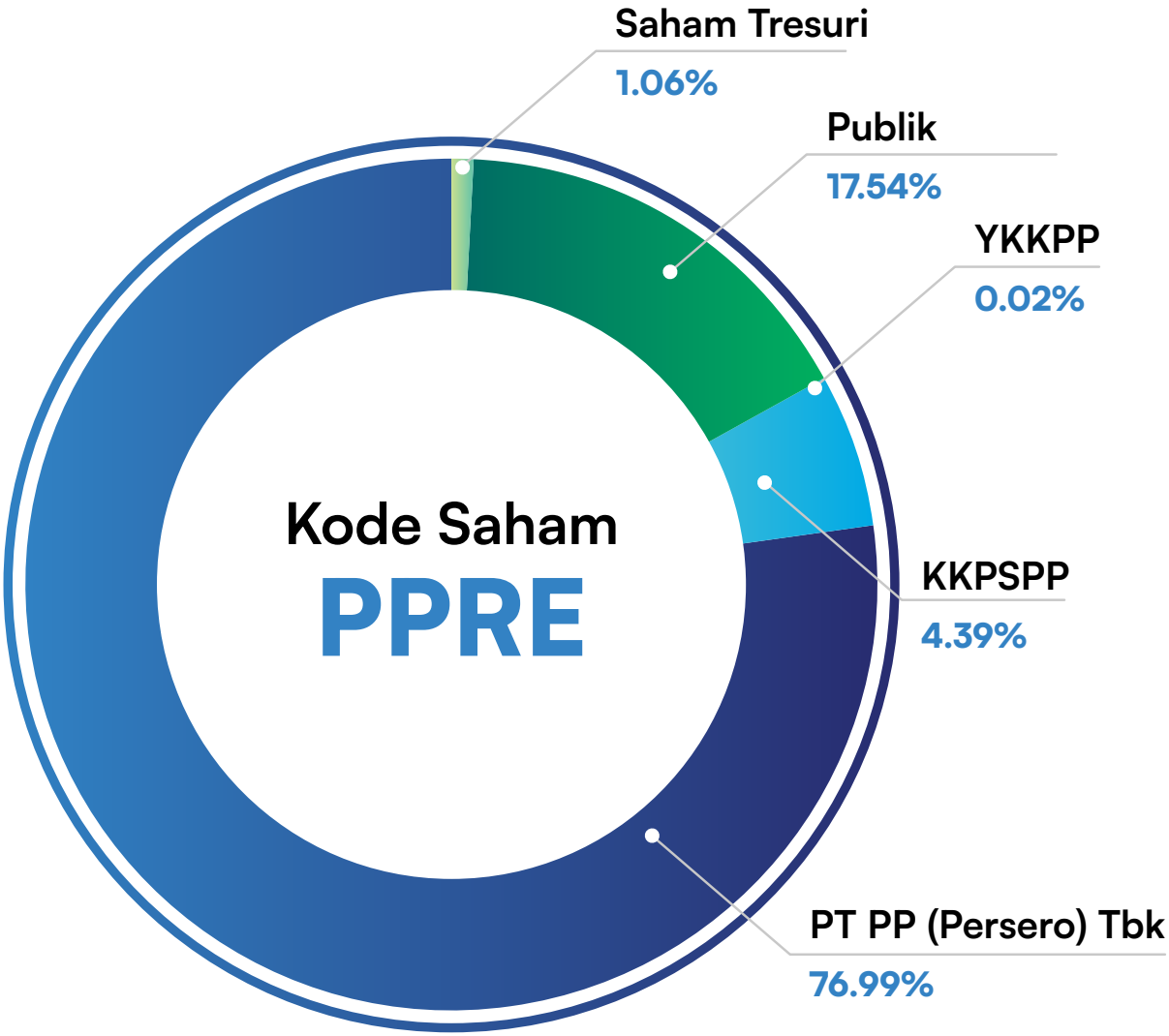
Shareholder Information

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024

Composition of Company Shareholders as of December 31, 2023 and December 31, 2024

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	**31 Desember 2024** | December 31, 2024			**31 Desember 2023** | December 31, 2023		
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	**Nilai (Rp)** Value (Rp)	**Kepemilikan Saham (%)** Share Ownership (%)	**Jumlah Saham (lembar)** Total Shares (shares)	**Nilai (Rp)** Value (Rp)	**Kepemilikan Saham (%)** Share Ownership (%)
Kepemilikan di atas 5% | More than 5% ownership						
PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99
Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP)	-	-	-	600.782.728	60.078.272.800	5,88
Subjumlah Kepemilikan di atas 5% Subtotal for more than 5% ownership	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99	8.472.262.728	847.226.272.800	82,86
Kepemilikan di bawah 5% | Less than 5% ownership						
Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP)	449.713.585	44.971.358.500	4,39	-	-	-
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	1.570.000	157.000.000	0,02	1.570.000	157.000.000	0,02
Publik (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%) Public (each less than 5% ownership)	1.793.448.715	179.344.871.500	17,54	1.642.379.572	164.237.957.200	16,06
Subjumlah Kepemilikan di bawah 5% Subtotal for less than 5% ownership	2.244.732.300	224.473.230.000	21,95	1.643.949.572	164.394.957.200	16,08
Jumlah Saham Beredar Total Shares Outstanding	10.116.212.300	1.011.621.230.000	98,94	10.116.212.300	1.011.621.230.000	98,94
Saham Tresuri (Saham yang Dibeli Kembali) | Treasury Shares (Repurchased Shares)						
Jumlah Saham Tresuri Total Treasury Shares	108.058.700	10.805.870.000	1,06	108.058.700	10.805.870.000	1,06
Jumlah Saham Total Shares	10.224.271.000	1.022.427.100.000	100,00	10.224.271.000	1.022.427.100.000	100,00



Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Information of Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan ("Transaksi") paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya Transaksi. Selanjutnya, Perusahaan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas Transaksi tersebut paling lambat 10 hari sejak terjadinya Transaksi. Terkait hal tersebut, Perusahaan telah menyampaikan laporan bulanan atas kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024 dari PT Datindo Entrycom melalui *e-reporting* kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

According to the Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.04/2017 on Ownership Report or Every Change in Public Company Share Ownership, every member of the Board of Commissioners and Board of Directors are obligated to submit information to the Company regarding their ownership and every change of the ownership of the Company's shares ("Transaction") at most three days after the Transaction occurs. Furthermore, the Company submits a report to the Financial Services Authority for the Transaction at most ten days after the Transaction occurs. Regarding the matter, the Company has submitted monthly reports of share ownership by members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2024 from PT Datindo Entrycom through e-reporting to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, baik Langsung Maupun Tidak Langsung
Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors, Directly and Indirectly

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham PPRE secara Langsung Direct PPRE Share Ownership				Kepemilikan PPRE secara Tidak Langsung Indirect PPRE Share Ownership			
	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Nur Rochmad (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) President Commissioner/ Independent Commissioner	-	-	-	-	.....	.....	-	-
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-	.....	.....	-	-
Muhammad Zahid (Komisaris (Commissioner)	967.300	0,009	967.300	0,009	.....	.....	-	-
Direksi Board of Directors								
Arzan (Direktur Utama) (President Director)	-	-	**Belum menjabat** Not yet in office		-	-	**Belum menjabat** Not yet in office	
M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)s (Director of Finance & HCM)	-	-	-	-	.....		-	-
Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	-	-	-	-	.....	.....	-	-
Jumlah Total	967.300	0,009	3.718.900	-	-	-	-	-

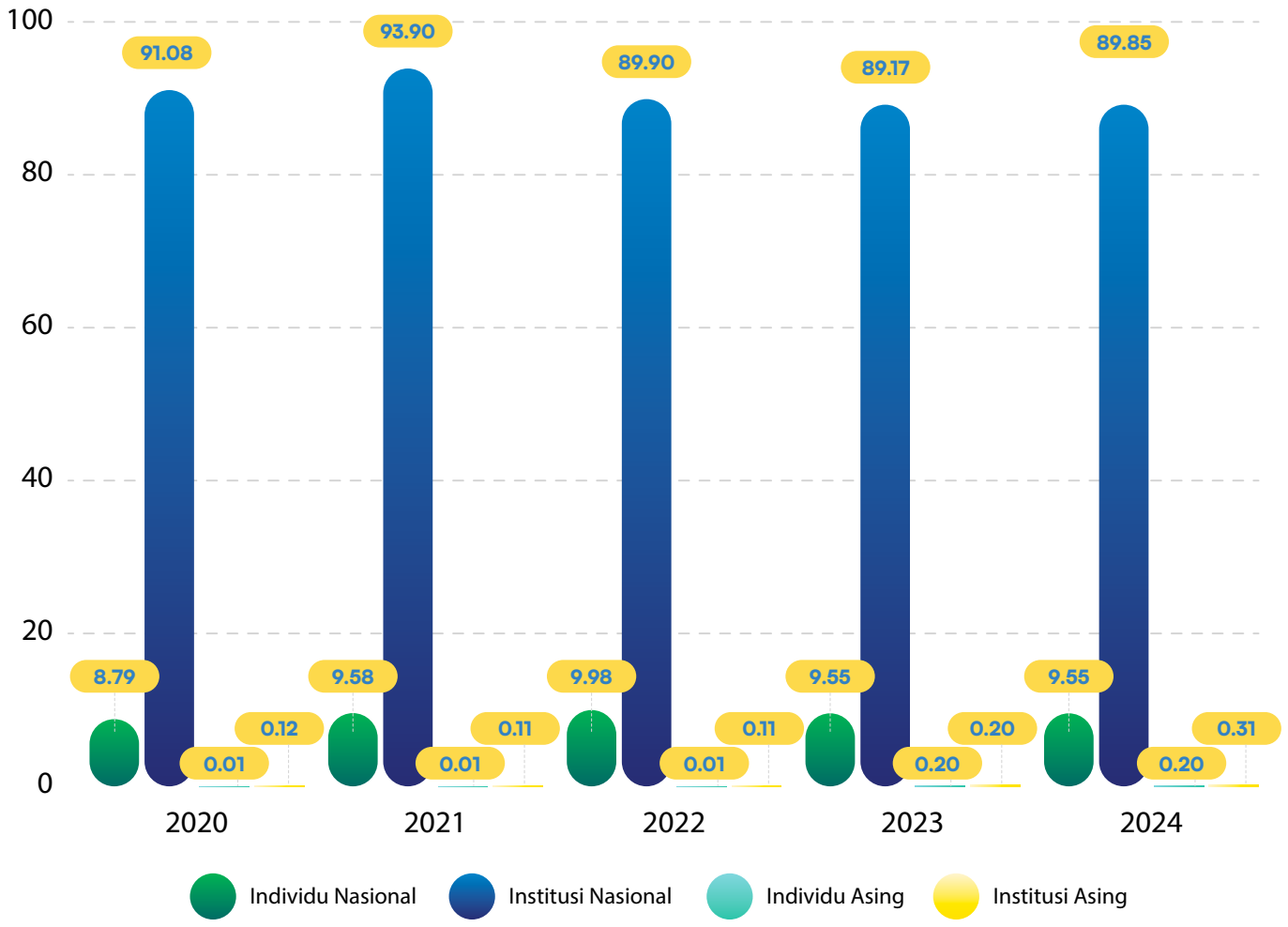
Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status
Shareholder Composition Based on Status

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	31 Desember 2024 December 31, 2024			31 Desember 2023 December 31, 2023		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Kepemilikan Nasional National Ownership						
Individu Nasional National Individual						
Perorangan Individual	6229	1.003.705.355	9,82	6.253	976.229.675	9,547
Institusi Institution						
Koperasi Cooperative	2	477.415.479	4,67	3	627.527.822	6,137
Yayasan Foundation	3	157.829.832	1.54	2	4.070.000	0,040
Dana Pensiun Pension Fund	5	253.839.245	2,48	4	253.839.200	2,482
Asuransi Insurance	3	150.332.100	1,47	3	150.332.100	1,470
Bank Bank	1	23.600.000	0,23	1	23.600.000	0,231
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	30	7.961.363.606	77,86	35	7.995.701.306	78,195
Lembaga Pemerintah Government Agencies	-	-	-	-	-	-
Reksadana Mutual Funds	4	54.149.871	0,53	4	62.423.585	0,610
Jumlah Institusi Nasional Total National Institution	49	9.186.588.833	89,85	52	9.117.494.013	89,166
Jumlah Kepemilikan Nasional Total National Ownership	6278	10.082.235.488	99,66	6.305	10.093.723.688	99,723

Kepemilikan Asing Foreign Ownership						
Individu Nasional National Individual	6	1.918.612	0,02	10	1.808.412	0,018
Institusi Institution	9	32.058.200	0,31	9	20.680.200	0,202
Jumlah Kepemilikan Asing Total Foreign Ownership	15	33.976.812	0,33	19	22.488.612	0,220
Saham Treasuri Treasury Shares		108.058.700	1,057		108.058.700	1,057
Jumlah Total	100,00	10.224.271.000	100,00	6.324	10.224.271.000	100,00

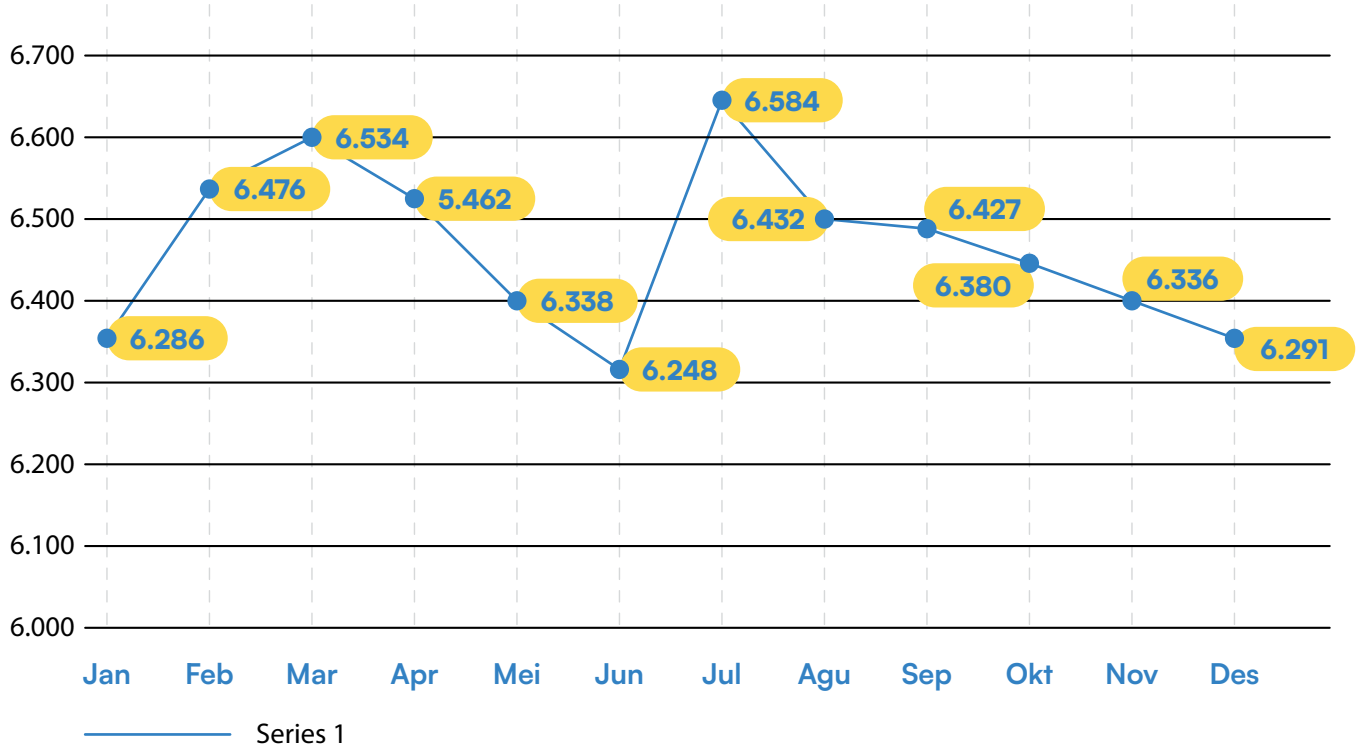
Tren Kepemilikan Saham PPRE Berdasarkan Status, Periode 2020-2024 (per 31 Desember di setiap tahunnya)

PPRE Share Ownership Trend by Status, Period 2020-2024 (as of December 31 of each year)



Jumlah Pemegang Saham PPRE dengan Kepemilikan Kurang dari 5% di Sepanjang Tahun 2024

Number of PPRE Shareholders with Less than 5% Ownership throughout 2024



Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

Information on Major/Controlling Shareholders up to Ultimate Shareholder Entities

PT PP (Persero) Tbk merupakan pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas induk Perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas mencapai 76,99%. Sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas induk Perusahaan, mayoritas saham PT PP (Persero) Tbk dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebanyak 51,00%.

PT PP (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "PTPP", merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta No. 48 tanggal 26 Agustus 1953. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi jasa konstruksi (gedung, sipil/infrastruktur, EPC, spesialis, plant dan peralatan) dan investasi (infrastruktur, properti, dan energi). Pada 9 Februari 2010, PTPP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PTPP.

PT PP (Persero) Tbk is the major/controlling shareholder as well as the Company's parent entity with a major shareholding of 76.99%. As the major/controlling shareholder as well as the Company's parent entity, the majority of PT PP (Persero) Tbk's shares are owned by the Government of Indonesia, as much as 51.00%.

PT PP (Persero) Tbk, hereinafter referred to as "PTPP", is a State-Owned Enterprise established by the government of Indonesia under the name of NV Pembangunan Perumahan according to Deed No. 48 dated August 26, 1953. The scope of the Company's activities covers construction services (building, civil/infrastructure, EPC, specialist, plants, and equipment) and investment (infrastructure, property, and energy). On February 9, 2010, PTPP listed its shares on the Indonesia Stock Exchange with the stock code PTPP.



PT PP (Persero) Tbk

Nama Perusahaan
Company Name

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pembangunan Perumahan Tbk atau disingkat PT PP (Persero) Tbk

PT Pembangunan Perumahan Tbk Limited Liability Company (Persero), abbreviated into PT PP (Persero) Tbk

Informasi Perubahan Nama
Information on Name Change

1971 **Perusahaan Perseroan (Persero)** PT Pembangunan Perumahan
1961 **Perusahaan Negara (PN)** Pembangunan Perumahan
1953 **NV Pembangunan Perumahan**

1971 PT Pembangunan Perumahan Limited Liability Company (Persero)
1961 Pembangunan Perumahan State Enterprise (PN)
1953 NV Pembangunan Perumahan

Domisili
Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

26 Agustus 1953
August 26, 1953

Tanggal Beroperasi
Date of Operations

26 Agustus 1953
August 26, 1953

Status Badan Hukum
Legal Entity Status

Perseroan Terbatas (PT);
Perusahaan Terbuka (Tbk);
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Limited Liability Company (PT);
Public Company (Tbk);
State-Owned Entity (SOE)

Dasar Hukum Pembentukan
Legal Basis of Establishment

Akta No. 78 tanggal 15 Maret 1973, dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 249 tanggal 4 Juni 1974

Deed No. 78 dated March 15, 1973, made before Notary Kartini Muljadi and approved by the Indonesian Ministry of Justice No. Y.A.5/105/2 dated March 30, 1974, and published in the Official Gazette of Indonesia No. 249 dated June 4, 1974

Bidang Usaha
Line of Business

Konstruksi (Gedung, Sipil/ Infrastruktur, EPC, Spesialis, Plant dan Peralatan) dan Investasi (Infrastruktur, Properti dan Energi)

Construction (Building, Civil/Infrastructure, EPC, Specialist, Plant, and Equipment) and Investment (Infrastructure, Property, and Energy)

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp750.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-up Capital

Rp500.000.000.000,-

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Pemerintah Republik Indonesia The Government of Indonesia	(51,00%)
Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP)	(0,03%)
Masyarakat (Masing-masing kurang dari 5%) Public (each less than 5%)	(48,74%)
Saham Treasury Treasury Shares	(0,23%)

Pencatatan Saham di Bursa Saham
Share Listing on the Stock Exchange

9 Februari 2010, Bursa Efek Indonesia
February 9, 2010, Indonesia Stock Exchange

Kode Saham di Bursa Saham
Stock Code on the Stock Exchange

PTPP

Obligasi
Bonds

Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023
Sustainable Bonds IV PTPP Phase I Year 2024 Sukuk Mudharabah Sustainable I PTPP Phase III Year 2023

Obligasi Berkelanjutan
III PTPP Tahap III Tahun 2023
Sustainable Bond III PTPP Phase III Year 2023

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Seri B
Sustainable Mudharabah Sukuk I PTPP Phase II Year 2022 Series A and Series B

Obligasi Berkelanjutan
III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Seri B
Sustainable Bonds III PTPP Phase II Year 2022 Series A and Series B

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A dan Seri B
Continuous Mudharabah Sukuk I PTPP Phase I Year 2021 Series A and Series B

Obligasi Berkelanjutan
III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A dan Seri B
Sustainable Bond III PTPP
Phase I Year 2021 Series A and Series B

Obligasi Berkelanjutan
II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A dan Seri B
Sustainable Bond II PTPP Phase II Year 2019
Series A and Series B

Jaringan Kelompok Usaha
Business Group Network

9 Entitas Anak Langsung, 22 24 Entitas Anak Tidak langsung, 25 22 Entitas Asosiasi, dan 2 Kerja Sama Operasi (KSO)

9 Direct Subsidiaries, 24 Indirect Subsidiaries, 22 Associated Entities, and 2 Joint Operations (KSO)

Alamat ,Nomor Telepon & Email
Address, phone & E-mail

Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57. Pasar Rebo,
Jakarta Timur 13760 . DKI Jakarta, Indonesia

Corporate Secretary
+62 21 840 3883 ext. 1016, corsec@ptpp.co.id

Sekilas Kinerja Keuangan (per 31 Desember 2024)
Brief Financial Performance
(as of December 31, 2024)

Jumlah Aset Total Assets	Rp56.589.716.015.594
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Rp41.334.800.497.741
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp15.254.915.517.853
Pendapatan Usaha Operating Income	Rp19.812.142.890.563
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	Rp129.437.886.973
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity	Rp129.437.886.973
Laba per Saham Dasar Basic Earnings per Share	Rp8,84

Dewan Komisaris
Board of Commissioner

Dhony Rahajoe
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Pundjung Setya Brata
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Istiono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Jaya Kesuma
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ernadhi Sudarmanto
Komisaris
Commissioner

Hedy Rahadian
Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Directors

Novel Arsyad
Direktur Utama
President Director

Yuyus Juarsa
Direktur Operasi bidang Gedung
Director of Building Operation

Agus Purbianto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)
Director of Finance and Risk Management

Yul Ari Pramuraharjo
Direktur Operasi bidang Infrastruktur
Director of Infrastructure Operation

Tommy Wiranata Anwar
Direktur Manajemen Risiko dan Legal
Director of Risk Management and Legal

I Gede Upeksa Negara
Direktur Strategi Korporasi dan HCM
Director of Corporate Strategy and HCM

PTPPTBK | PTPP_ID | PT PP PERSERO TBK | PTPP_ID

PRESISI
www.ptpp.co.id



Struktur Grup dan Kelompok Usaha

Group and Business Group Structure



Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures

Hingga 31 Desember 2024, Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) Entitas Anak.

As of December 31, 2024, the Company only has 1 (one) Subsidiary.

PT Lancarjaya Mandiri Abadi

Nama Entitas Anak
Name of Subsidiary

PT Lancarjaya Mandiri Abadi

Bidang Usaha
Line of Business

Jasa Konstruksi

Construction Services

Domisili
Domicile

Bekasi, Jawa Barat
Bekasi, West Java

Tahun Berdiri
Year of Establishment

1994

Tahun Penyertaan Modal oleh Perusahaan
Year of Equity Participation by the Company

1994

Tahun Beroperasi Komersial
Year of Commercial Operations

1994

Status Operasi
Operation Status

Beroperasi

Operating

Kepemilikan oleh Perusahaan (%)
Ownership by the Company (%)

2024	51,00
2023	51,00

Jumlah Aset (Rp-miliar)
Total Assets (Rp-billion)

2024	2.934,23
2023	2.367,18

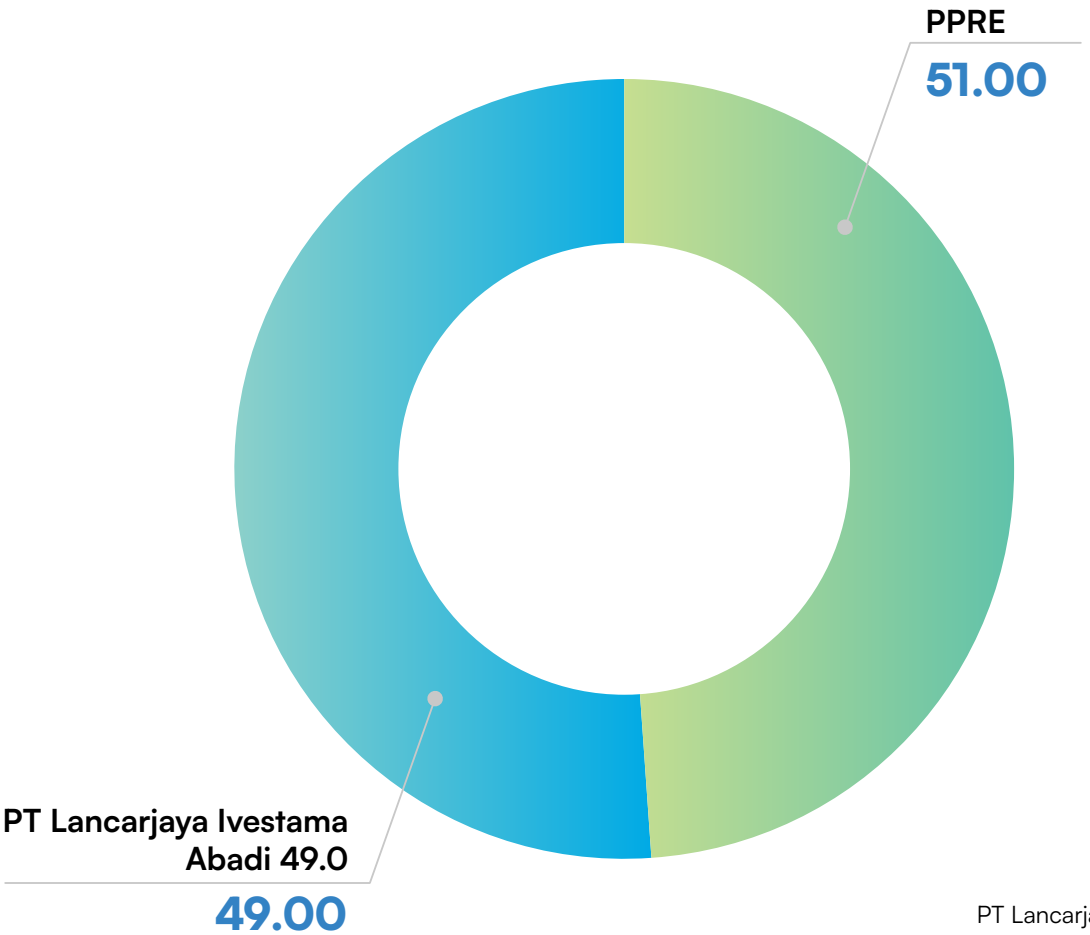


PPRE telah mengakuisisi saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi sejumlah 331.500 lembar saham dari pihak ketiga, mewakili 51,00% kepemilikan saham dengan harga Rp798.000.000.000. Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Pasal 3, maksud dan tujuan bidang usaha PT Lancarjaya Mandiri Abadi adalah:

PPRE has acquired 331,500 shares of PT Lancarjaya Mandiri Abadi from a third party, representing 51.00% share ownership with a price of Rp798,000,000,000. According to the latest Articles of Association Article 3, the business purpose and objectives of PT Lancarjaya Mandiri Abadi are:

- ✅ Melakukan usaha di bidang konstruksi (*general contractor*);
- ✅ Melakukan usaha di bidang pertambangan dan penggalian;
- ✅ Melakukan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi terutama penyewaan alat berat dan *dump truck*;
- ✅ Kontraktor pertambangan bahan angkut (mineral & batu bara).

- ✅ Engaging in construction (general contractor) business;
- ✅ Engaging in mining and excavation business;
- ✅ Engaging in the business of wholesale and retail trades, car repair and maintenance, rental and services in the sector of construction equipment, especially heavy equipment and dump truck rental;
- ✅ Contractor for mining transport material (minerals & coal).



PT Lancarjaya Mandiri Abadi
Jl. Raya Narogong KM. 12,5 No. 18
Bekasi, Jawa Barat 17152
Indonesia
Telepon: +6221-8250-365, +6221-8250-366

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance and Listing

Pada tahun 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I sebesar Rp202.980.000.000. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Obligasi Seri A dan Seri B. Obligasi Seri A diterbitkan sebesar Rp102.275.000.000 berjangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun. Sementara Obligasi Seri B diterbitkan sebesar Rp100.705.000.000 berjangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun.

In 2022, the Company issued PP Presisi Shelf Registration Bonds I Phase I amounting to Rp202,980,000,000. This bond consists of 2 (two) series, namely Series A and Series B Bonds. Series A Bonds were issued in the amount of Rp102,275,000,000 with a term of 3 (three) years, with a fixed interest rate of 9.50% per annum. Meanwhile, Series B Bonds were issued in the amount of Rp100,705,000,000 with a term of 5 (five) years and a fixed interest rate of 10.50% per annum.

Nama Efek Securities Name	**Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 Seri A** PP Presisi Shelf Registration Bonds I Phase I of 2022 Series A	**Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 Seri B** PP Presisi Shelf Registration Bonds I Phase I of 2022 Series B
Tanggal Penerbitan Date of Issuance	**23 Juni 2022** June 23, 2022	**23 Juni 2022** June 23, 2022
Tenor Tenor	**3 Tahun** 3 Years	**5 Tahun** 5 Years
Nilai Efek (Rp) Securities Value (Rp)	**102.275.000.000**	**100.705.000.000**
Tanggal Jatuh Tempo Due Date	**30 Juni 2025** June 30, 2025	**30 Juni 2027** June 30, 2027
Tingkat Suku Bunga(%) Interest Rate(%)	**9,50%**	**10,50%**
Peringkat Rating	• **2024: idBBB + (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)** • **2023: idBBB + (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**	• **2024 idBBB + (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)** • **2023: idBBB + (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Wali Amanat Trustee	• **PT BNI Sekuritas** • **PT BRI Danareksa Sekuritas** • **PT CIMB Niaga Sekuritas**	• **PT BNI Sekuritas** • **PT BRI Danareksa Sekuritas** • **PT CIMB Niaga Sekuritas**
Status Pembayaran Payment Status	**Belum Lunas** Not Yet Paid Off	**Belum Lunas** Not Yet Paid Off

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professions

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant Firm (KAP)	:	Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) Registrasi KMK : No.: 477/KM.1/2015 KMK Registration : No.: 477/KM.1/2015
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	:	Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati Registrasi: AP.1153. Registration: AP.1153
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	:	Jasa Audit Audit Services • Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 • Audit of the Financial Statements for Fiscal Year 2024
		Jasa Non Audit Non-Audit Services • Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan PSA No. 62 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. • Evaluasi Kinerja PPRE untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN RI No. KEP-100/MBU/ 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. • Compliance Audit on Adherence to Applicable Laws and Regulations in accordance with PSA No. 62 and the State Financial Audit Standards of BPK for the year ended December 31, 2024. • Performance Evaluation of PPRE for the Fiscal Year ended December 31, 2024, in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 on the Assessment of the Financial Health Level of SOEs.
Periode Penugasan Assignment Period	:	5 September 2024 s.d 31 Mei 2025 September 5, 2024 to May 31, 2025

Waktu Terbit Laporan Date of Statements Issuance	:	5 Maret 2025 5 March 2025

Biaya
Fee

: Jasa Audit
Audit Services

- Rp525.000.000,- (tidak termasuk pajak)
- Audit Services: Rp. 525,000,000,- (excluding tax)

Jasa Non Audit
Non-Audit Services

- Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak)
- Evaluasi Kinerja atas Penilaian Kinerja Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak)
- Compliance Audit on Adherence to Laws and Regulations Rp20,000,000 (excluding tax)
- Performance Evaluation on Performance Assessment Rp20,000,000 (excluding tax)

Notaris
Notary

Nama Name	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H
Alamat Address	:	Jl. Panglima Polim V No. 11 Jakarta Selatan
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Jasa Pendamping Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Notarial Assistance Services for the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023

Nama Name	:	Irfansah, S.H., M.Kn.
Alamat Address	:	Jl. Proklamasi Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Jasa Pendamping Pemberian Kuasa Direksi Kepada Vice President PPRE Assistance Services for the Granting of Power of Attorney by the Board of Directors to the Vice President of PPRE.

Nama Name	:	Sri Ismiyati, S.H., M.Kn.
Alamat Address	:	Ruko Artha Gading Niaga Blok B No. 7&8, Jl. Boulevard Artha Gading, RT.18/ RW.8, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Jasa Pendamping Pemberian Kuasa Direksi Kepada Vice President PPRE Assistance Services for Granting Power of Attorney from the Board of Directors to the Vice President of PPRE.

Nama Name	:	Dewi Tenty Septi Atiany, S.H., M.H., M.Kn.
Alamat Address	:	JL. Cempaka Putih Barat Raya, No. 11 D, 10560, RT.10/RW.3, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Jasa Notaris Perjanjian Dan Pengikatan Jaminan Atas Perolehan Fasilitas Kredit Dari Kreditur PPRE Notarial Services for Agreement and Security Binding on the Acquisition of Credit Facilities from PPRE's Creditor
Nama Name	:	Suswanti B. Sumarto, SE., SH., M.Kn
Alamat Address	:	Jl. Gading Elok Utara Blok FB2 No.12A, RT.15/RW.11, East Kelapa Gading, Kelapa Gading, North Jakarta City, Jakarta 14240
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Jasa Notaris Pembaharuan Pengikatan Agunan PPRE Atas Perolehan Fasilitas Kredit dari Kreditur PPRE. Notarial Services for Renewal of Collateral Binding by PPRE on the Acquisition of Credit Facilities from PPRE's Creditor.
Nama Name	:	M. KHOLID ARTHA ,SH
Alamat Address	:	Gedung Selmis Kav 6-7, Jl. Asem Baris Raya No 52, Tebet, Jakarta Selatan-12830
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Jasa Notaris Perolehan Fasilitas Sewa Pembiayaan PPRE dari Leasing PPRE. Notarial Services for the Acquisition of Lease Financing Facilities by PPRE from PPRE's Leasing.

KONSULTAN HUKUM
LEGAL CONSULTANT

Nama Name	:	Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners
Alamat Address	:	Menara BCA (Grand Indonesia) Lt.50 Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Konsultan Hukum Pendampingan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan fasilitas kredit lainnya Legal Consultant Assisting the Issuance of Sustainable Public Offering of Bonds and other credit facilities

KONSULTAN HUKUM
LEGAL CONSULTANT

Nama Name	:	Konsultan Hukum Dewi Djalal & Partners
Alamat Address	:	Pakuwon Tower, 22nd Floor Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Indonesia 12870 Telp: (021) 2290 3355 / +62 811 888 5765
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Pemberian pendapat hukum (legal memorandum) terkait rencana transaksi aksi korporasi PT PP Presisi Tbk Provision of legal opinion (legal memorandum) related to the corporate action transaction plan of PT PP Presisi Tbk.

JASA PENILAI
APPRAISAL AGENCY

Nama Name	:	KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan
Alamat Address	:	The Manhattan Square Building Mid Tower, 15th Floor Unit D Jln. TB Simatupang Kav, 1-S, RT.3/RW.3, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12560
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Penilaian Aset Alat Berat, Alat Ringan, dan Kendaraan untuk tujuan penghapusbukuan (divestasi) aset Asset Valuation of Heavy Equipment, Light Equipment, and Vehicles for the purpose of asset divestment

JASA PENILAI
APPRAISAL AGENCY

Nama Name	:	KJPP Firman Azis dan Rekan
Alamat Address	:	Jalan Dahlia No 5 RT 09/RW 03 Kel Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Penilaian Aset Alat Berat, Alat Ringan, dan Kendaraan untuk tujuan penghapusbukuan (divestasi) aset Asset Valuation of Heavy Equipment, Light Equipment, and Vehicles for the purpose of asset divestment

Jasa Penilai
Appraisal Services

Nama Name	:	KJPP Yufrizal, Deny Kamal, dan Rekan
Alamat Address	:	Jalan Raya Pasar Minggu Km 17 No. 12 A Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Penilaian Aset Alat Berat, Alat Ringan, dan Kendaraan untuk tujuan penghapusbukuan (divestasi) aset Asset Valuation of Heavy Equipment, Light Equipment, and Vehicles for the purpose of asset divestment

Biro Administrasi Efek
Securities Administration Bureau

Nama Name	:	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	:	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta, 10120 T: (+62 21) 350 8077 | F: (+62 21) 350 8078
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Menyediakan jasa administrasi efek Providing securities administration services

Wali Amanat
Trustee

Nama Name	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Alamat Address	:	Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Wali Amanat Penerbitan Obligasi Bond Issuance Trustee

Pemeringkat Efek
Securities Rating Agency

Nama Name	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Alamat Address	:	Equity Tower 30th Floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Service Provided	:	Jasa pemeringkatan obligasi Bond rating services

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company's Website

Perusahaan memiliki situs web resmi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan terhadap publik yang menyajikan informasi secara komunikatif dan ter-*update* dengan alamat www.pp-presisi.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi PPRE yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, serta mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang PPRE kepada khalayak luas.

Situs web resmi PPRE yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan amanat Pasal 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan menyampaikan informasi mengenai, antara lain:

The Company has an official website as one of the means to fulfill public transparency, providing communicative and up-to-date information at www.pp-presisi.co.id. This website is PPRE's official portal that is openly accessible at any time and any place, straightforward and simple, aiming to provide comprehensive, accurate, and actual information about PPRE for the public.

PPRE's official website is available in two languages, namely Indonesian and English, also according to Article 6 of the Regulation of the Finansial Services Authority (POJK) No. 8/POJK.4/2015 on the Website of Issuers or Public Company, which obligates the delivery of the following information:

- ✅ Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
- ✅ Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
- ✅ Informasi Tata Kelola Perusahaan;
- ✅ Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- ✅ General Information of the Issuer or Public Company;
- ✅ Information for Investors;
- ✅ Information on Corporate Governance;
- ✅ Information on Corporate Social Responsibility.

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Keterangan** Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Information regarding shareholders up to individual ultimate shareholders	✅	**Terdapat pada halaman Tentang Kami > Struktur Perusahaan** **https://pp-presisi.co.id/struktur-perusahaan** Available on About Us > Company Structure https://pp-presisi.co.id/struktur-perusahaan
Isi Kode Etik Content of the Code of Conduct	✅	**Terdapat pada halaman GCG > Kode Etik** **https://pp-presisi.co.id/kode-etik** Available on GCG > Code of Conduct https://pp-presisi.co.id/kode-etik
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information regarding the General Meeting of Shareholders (GMS) including at least the agenda materials discussed in the GMS, summarized minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of GMS announcement, date of GMS summons, date of the GMS, date of the announcement of the summarized minutes of the GMS	✅	**Terdapat pada halaman Hubungan Investor > RUPS** **https://pp-presisi.co.id/rups** Available on Investor Relations > RUPS https://pp-presisi.co.id/rups

Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statements (last 5 years)	✅	**Terdapat pada halaman Hubungan Investor > Laporan** **https://pp-presisi.co.id/laporan** Available on Investor Relations > Report https://pp-presisi.co.id/laporan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	✅	**Terdapat pada halaman Tentang Kami > Direksi** **https://pp-presisi.co.id/boards** Available on About Us > Boards https://pp-presisi.co.id/boards
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	✅	**Dewan Komisaris** **Terdapat pada halaman GCG > Piagam** **https://pp-presisi.co.id/piagam** **Direksi** **Terdapat pada halaman GCG > Piagam** **https://pp-presisi.co.id/piagam** **Komite Audit** **Terdapat pada halaman GCG > Piagam** **https://pp-presisi.co.id/piagam** **Komite Kepatuhan** **Terdapat pada halaman GCG > Piagam** **https://pp-presisi.co.id/piagam** **Unit Audit Internal** **Terdapat pada halaman GCG > Piagam** **https://pp-presisi.co.id/piagam** Board of Commissioners Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam Board of Directors Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam Audit Committee Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam Compliance Committee Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam Internal Audit Unit Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam

✅ **Tersedia**| Available ❌ **Tidak Tersedia**| Not Available

Semua informasi yang disajikan dalam website Perusahaan senantiasa diperbarui secara berkala untuk memberikan informasi ter-update bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Perusahaan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Instagram, Youtube, dan LinkedIn.

All of the information presented on the Company's website is always updated regularly to provide the most updated information for all stakeholders and the public. The Company also has social media accounts as a part of information and communication transparency towards all stakeholders, including Instagram, YouTube, and LinkedIn.

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas

Kinerja Perusahaan

Analysis and Management Discussion
on Company Performance



Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economic and Industry Overview

Perekonomian global sedang mengalami beberapa tantangan, dimulai dari pemulihan akibat pandemik Covid-19 sampai dengan isu ketegangan politik global. Isu tersebut berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas terutama di sektor energi yang mana pada tahun 2023 fluktuasi harga minyak mentah berada titik terendah yaitu 69,3 USD per barrel dan sempat melonjak ke angka 98,4 USD per barel pada pertengahan Oktober 2023. Isu ini juga membuat PDB dunia pada tahun 2024 yang diproyeksikan akan tumbuh 3% YoY pada tahun 2023 turun menjadi 2,9% YoY pada tahun 2024.

PDB Dunia diperkirakan akan tumbuh 2,9% YoY pada tahun 2024 terhadap tahun 2023. Isu lain yang menyebabkan turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global adalah pada sektor *real estate* di Tiongkok yang mengalami kemunduran akibat krisis moneter yang menyebabkan para developer tidak mampu menyelesaikan proyek sehingga *stigma negative* tumbuh dan menyebabkan ketidakpercayaan investor dan konsumen.

GDP Amerika Serikat dan Tiongkok selaku negara adidaya diproyeksikan pada tahun 2024 sebesar 4,2 % dan 1,5 %.

GDP untuk negara ASEAN — 5 diproyeksikan sebagai berikut:

The global economy continues to face a range of challenges, beginning with the recovery from the Covid-19 pandemic and extending to ongoing geopolitical tensions. These issues have contributed to fluctuations in commodity prices, particularly in the energy sector. In 2023, crude oil prices reached a low of USD 69.3 per barrel and surged to USD 98.4 per barrel by mid-October. As a result, the global GDP growth projection for 2024 has been revised downward from an initial estimate of 3% year-on-year (YoY) in 2023 to 2.9% YoY.

Global GDP is now expected to grow by 2.9% YoY in 2024 compared to 2023. Another factor contributing to the lowered projection is the slowdown in China's real estate sector, triggered by a financial crisis that has left many developers unable to complete their projects. This situation has led to increased negative sentiment and a decline in investor and consumer confidence.

The GDP of the United States and China—the world's two largest economies—is projected to grow by 4.2% and 1.5% respectively in 2024.

GDP projections for the ASEAN-5 countries are as follows:

	Projection GDP	
	2023	2024
Indonesia	**4,7 %**	**5,1 %**
Thailand	**3,8 %**	**3,9 %**
Vietnam	**6,4 %**	**6,6 %**
Philippines	**5,7 %**	**6,1 %**
Malaysia	**4,0 %**	**4,2 %**

Pertumbuhan di negara-negara berkembang di Asia telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian global. PDB rata-rata tingkat pertumbuhan negara-negara berkembang di Asia diperkirakan akan meningkat menjadi 5,3% pada tahun 2023 dan 5,4%. Pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan PDB riil ASEAN diperkirakan mencapai 4,6% pada tahun 2023 dan 4,8% pada tahun 2024, lebih lemah dibandingkan tahun 2022.

Economic growth in developing countries in Asia has shown resilience amid global uncertainty. The average GDP growth rate of developing countries in Asia is projected to rise to 5.3% in 2023 and 5.4% in 2024. Meanwhile, the average real GDP growth in ASEAN is estimated at 4.6% in 2023 and 4.8% in 2024, which is weaker compared to 2022.

The global economy continues to face several challenges, ranging from the global economic slowdown to geopolitical

Perekonomian global sedang mengalami beberapa tantangan, dimulai *Global Economic Slowdown* sampai dengan isu ketegangan politik global di timur Tengah dan masih berlangsungnya konflik Eropa Timur antara Russia dan Ukraina. Isu tersebut berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas terutama di sektor energi yang mana pada tahun 2024 fluktuasi harga minyak mentah berada titik terendah yaitu 67,3 USD per barrel dan sempat melonjak ke angka 86,4 USD per barel pada pertengahan April 2024. Isu tersebut berpengaruh kepada perkembangan ekonomi Republik Indonesia yang pada tahun 2024 diproyeksikan akan naik sebesar 5,1 % menjadi 4,75% pada kuartal 3 tahun 2024. Hal ini disertai dengan rasio inflasi yang rendah di rentang angka 2,5% ± 1% yaitu 1,75% di bulan Oktober 2024.

PDB Dunia diperkirakan akan tumbuh 2,9% YoY pada tahun 2025 terhadap tahun 2024. Isu lain yang menyebabkan turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global adalah pada sektor *real estate* di Tiongkok yang mengalami kemunduran akibat krisis moneter yang menyebabkan para developer tidak mampu menyelesaikan proyek sehingga *stigma negative* tumbuh dan menyebabkan ketidakpercayaan investor dan konsumen.

GDP Amerika Serikat dan Tiongkok selaku negara adidaya diproyeksikan pada tahun 2025 sebesar 4,2 % dan 1,5 %.

GDP untuk negara ASEAN — 5 diproyeksikan sebagai berikut:

tensions in the Middle East and the ongoing conflict in Eastern Europe between Russia and Ukraine. These issues have impacted commodity price fluctuations, particularly in the energy sector, where in 2024 crude oil prices hit a low of USD 67.3 per barrel and rose to USD 86.4 per barrel in mid-April 2024. These developments have affected Indonesia's economic performance, with its GDP growth projection for 2024 revised from 5.1% to 4.75% in the third quarter of 2024. This occurred alongside a low inflation rate within the target range of 2.5% ± 1%, recorded at 1.75% in October 2024.

Global GDP is projected to grow by 2.9% year-on-year (YoY) in 2025 compared to 2024. Another factor contributing to the downward revision of global economic growth is the decline in China's real estate sector, triggered by a financial crisis that has left many developers unable to complete their projects. This has fostered negative sentiment and led to declining investor and consumer confidence.

The GDP of the United States and China, as global superpowers, is projected to grow by 4.2% and 1.5% respectively in 2025.

GDP projections for the ASEAN-5 countries are as follows:

	Projection GDP	
	2024	2025
Indonesia	**5,1 %**	**5,2 %**
Thailand	**3,9 %**	**2,8 %**
Vietnam	**6,6 %**	**6,2 %**
Philippines	**6,1 %**	**6,1 %**
Malaysia	**4,2 %**	**4,7 %**

The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta China, Jepang, dan Korea Selatan atau disebut Asean+3 akan mencapai 4,2% pada 2024 dan menguat ke 4,4% pada 2025 mendatang.

The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) projects that economic growth in Southeast Asian countries as well as China, Japan, and South Korea—collectively known as ASEAN+3—will reach 4.2% in 2024 and strengthen to 4.4% in 2025.

Perekonomian Indonesia

Indonesian Economy

Suksesnya proses Pemilu Presiden RI tahun 2024 yang diakhiri dengan terpilihnya Presiden ke — 8 Republik Indonesia memberikan semangat baru dalam persiapan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2045 yang diberi nama Generasi Emas Indonesia 2045. Sasaran strategis dalam program tersebut adalah sebagai berikut :

The successful implementation of Indonesia's 2024 Presidential Election, which concluded with the election of the 8th President of the Republic of Indonesia, has brought renewed enthusiasm for preparing the country's economic growth toward 2045, known as Generasi Emas Indonesia 2045. The strategic goals of this program are as follows:

Indikator	2024 Target	2024 Target Draft	2045 Target
Nominal GDP	> USD 1.5 trillion > Rp 22,500 trillion	> USD 2.4 trillion > Rp. 35,500 trillion	> USD 9.8 trillion > Rp. 136,500 trillion
GDP Rank	Top 16	Top 10-15	Top 5
GNI per Capita	> USD 4.580 Middle income country	> USD 7.000 Middle income country	> USD 30.000 High income country
Absolute Poverty	<0,8%	0%	0 %
National Poverty	<7%	< 5%	< 1%
Life Expectancy	>70 Years	> 75 years	> 80 years
TB Cases per 100,000 people	< 350	< 50	< 10

Sumber : RPJMN 2025 Final Draft

Source: RPJMN 2025 Final Draft

Dalam sasaran strategis tersebut, Indonesia menargetkan atas pertumbuhan GDP dari target 2024 sebesar Rp 22 triliun menjadi Rp 35.000 Triliun di tahun 2029 dan menjadi negara Top 10 Peringkat GDP di dunia. Penurunan angka kemiskinan mutlak juga menjadi fokus yaitu menjadi 0% di tahun 2029. Hal ini menandakan target positif jangka pendek yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia.

As part of these strategic goals, Indonesia aims to increase its GDP from the 2024 target of Rp 22 trillion to Rp 35,000 trillion by 2029 and become one of the world's top 10 economies by GDP. The absolute eradication of poverty is also a key focus, with a target of 0% poverty by 2029. These goals reflect the Indonesian government's positive short-term ambitions.

Tantangan yang perlu dihadapi oleh Republik Indonesia untuk mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

The challenges that the Republic of Indonesia must address to achieve these targets include the following:

- **Climate Change**
- **Armed Geopolitical Conflicts** (e.g Russia-Ukraine War, Israel-Hamas War)
- **Potential for Armed Geopolitical Conflict near Indonesia** (e.g. Taiwan / Natuna Sea Dispute)
- **Limited Demographic Bonus Time**
- **Global Economic Slowdown**
- **Artificial Intelligence Disrupti**
- **The Threat of New Pandemic**
- **Increasing Global and Indonesian Population**

Salah satu sektor perekonomian yang ditargetkan untuk tumbuh di tahun 2029 adalah *downstreaming Nickel Industries* dengan Indonesia sebagai negara dengan Cadangan nikel terbesar di dunia saat ini menjadi incaran bagi investor yang bergerak di industri nikel dan baterai untuk membeli Cadangan nikel dari Indonesia. Berikut adalah rencana *donstreaming* nikel di Indonesia :

One of the economic sectors targeted for growth by 2029 is the downstreaming of the nickel industry. With Indonesia currently holding the largest nickel reserves in the world, the country has become a key destination for investors in the nickel and battery industries seeking to source nickel reserves from Indonesia. The following outlines Indonesia's nickel downstreaming plan:

Global Market Opportunity (Next 5 Years)

- The global sales of electric cars are projected to rise to 43 million units per year by 2030. — **43** million cars /year
- The global production capacity for electric cars will only reach 20 million cars per year by 2024. — **20** million cars /year

Indonesia's Capability Map

- Indonesia has the largest nickel reserves, a crucial component in battery manufacturing. — **No.1**
- Indonesia can partner with Australia, which has lithium reserves, also needed for battery production. — **IDxAU**
- Indonesia has partnered with global electric car manufacturers, including Hyundai, Wuling, and BYD. — **∞**

Strategic Partnership dengan sektor hulu pada bisnis nikel menjadikan posisi Indonesia saat ini sangat kuat di industri nikel. Salah satu pelaku industri yang sudah bekerja sama dengan Indonesia antara lain Indonesia Weda Industrial Park (IWIP), Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), BYD, Hyundai, Wuling, dan produsen kendaraan EV dan Produsen Baterai Lithium lainnya yang menggunakan nikel sebagai bahan utama dalam proses bisnisnya.

Strategic partnerships with upstream sectors in the nickel business have positioned Indonesia as a key player in the global nickel industry. Several industry players have already established collaborations with Indonesia, including Indonesia Weda Industrial Park (IWIP), Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), BYD, Hyundai, Wuling, as well as other electric vehicle (EV) manufacturers and lithium battery producers that use nickel as a primary material in their business processes.

Inisiatif dan Kebijakan Strategis Tahun 2024

Initiatives and Strategic Policies for 2024

Strategi dan Kebijakan Pengembangan di Tahun 2024

Development Strategy and Policy in 2024

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perusahaan telah menyusun strategi korporat dengan melakukan Percepatan Pemulihan Operasional Bisnis guna meningkatkan profitabilitas yang akan berfokus pada 2 lini bisnis utama yakni *Mining Services* dan *Civil Infrastructure*. Untuk *Mining Services* Perseroan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan hingga kegiatan utama jasa pertambangan yaitu: Pekerjaan *Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore hauling*, hingga *Road Maintenance*. Perseroan juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis *mining* serta kinerja peralatan melalui pengembangan *system* tersentralisasi yaitu SIMAP, didukung dengan melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi *key* personil di lini bisnis tambang.

Pada lini bisnis *Civil Work* Perseroan akan berupaya meningkatkan kinerja, kapabilitas operasional dan juga *project management* serta berupaya dalam melakukan percepatan peningkatan pengelolaan investasi dan divestasi alat berat. Fokus Perusahaan di sektor *Civil Work* adalah untuk menyokong proyek dari PP Group sehingga untuk proyek eksternal akan lebih diprioritaskan untuk lini bisnis *Mining*.

Adapun sasaran segmentasi pasar Perseroan akan fokus pada proyek PP Group untuk lini bisnis konstruksi. Sedangkan untuk proyek jasa pertambangan Perseroan akan fokus kepada pasar swasta. Untuk segmentasi pasar eksternal atau *non-group* Perseroan memproyeksikan komposisinya akan mencapai 78,14 %. Perseroan juga telah menargetkan tingkat utilisasi alat mencapai 85%.

Guna mendukung tercapainya percepatan pemulihan operasional bisnis serta agar dapat menjalankan lini bisnis tersebut dengan optimal, maka berikut adalah sasaran strategis dan inisiatif utama yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, inisiatif utama tersebut akan diturunkan ke dalam program kerja masing-masing Divisi/ Biro dan Departemen terkait.

To achieve these objectives, the Company has formulated a corporate strategy by accelerating the recovery of business operations to enhance profitability, with a focus on two main business lines: Mining Services and Civil Infrastructure. For Mining Services, the Company will provide integrated services across the entire spectrum of mining operations, ranging from the development of core and supporting infrastructure to key mining services activities, including Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore Hauling, and Road Maintenance. The Company will also optimize business operations in mining and improve equipment performance through the development of a centralized system, SIMAP, supported by efforts to fulfill and enhance the competencies of key personnel in the mining business line.

In the Civil Work business line, the Company will strive to improve performance, operational capability, and project management, as well as accelerate the management of heavy equipment investment and divestment. The Company's focus in the Civil Work sector is to support projects within the PP Group, while external projects will be prioritized under the Mining business line.

The Company's market segmentation strategy will primarily focus on internal projects within the PP Group for the construction business line, while targeting the private sector for its mining services operations. For external or non-group market segmentation, the Company projects that its composition will reach 78.14%. The Company has also set a target for equipment utilization to reach 85%.
To support the acceleration of business operational recovery and to ensure optimal execution of its business lines, the following are the strategic objectives and key initiatives that the Company will implement. These key initiatives will subsequently be translated into work programs for each relevant Division/Unit and Department.

Program Strategis RKAP 2024 PT PP Presisi Tbk
Strategic Program RKAP 2024 PT PP Presisi Tbk

Visi: **Menjadi Perusahaan Konstruksi Terintegrasi Berbasis Alat Berat Terkemuka di Indonesia**
To Become the Leading Heavy Equipment-Based Integrated Construction Company in Indonesia

Metrik Utama 2024
Strategic Objectives

Pemasaran	Penjualan	EBITDA
Strategic Objectives	Sales	
Rp 5.349 M	**Rp 4.114 M**	**Rp 844 M**
Laba Divestasi	Debt to Invested	Nilai Investasi
Strategic Objectives	Strategic Objectives	Strategic Objectives
Rp 27,6 M	**63,5%**	**Rp 316 M**

Tujuan Strategis
Strategic Objectives

- **Penciptaan nilai tambah untuk seluruh stakeholder**
  Creation of added value for all stakeholders
- **Perluasan pangsa pasar dan diversifikasi bisnis**
  Market share expansion and business diversification
- **Optimalisasi dan integrasi lini bisnis untuk mencapai sasaran Perseroan**
  Optimization & integration of business lines to achieve the Company's targets

	Mining	Civil Works
Accelerate	**Peningkatan Utilsasi dan Kinerja Alat Berat** Creation of added value for all stakeholders **Peningkatan Kinerja Operasi *Mining*** Creation of added value for all stakeholders	**Peningkatan kinerja operasional *civil work*** Improvement of Civil Work Operational Performance **Peningkatan kapabilitas *project management* & administrasi kontrak** Enhancement of Project Management & Contract Administration Capabilities **Percepatan pengelolaan investasi & divertasi aset** Acceleration of Investment Management & Asset Divestment
Optimize	**Optimalisasi manajemen operasial *mining* melalui pengendalian *single system*** Optimization of mining operational management through single system control **Optimalisasi Kinerja Peralatan** Optimization of Equipment Performance	**Optimalisasi pengendalian tersentralisasi *single system*** Optimization of Centralized Control through a Single System **Optimalisasi implementasi *strategic procurement*** Optimization of Strategic Procurement Implementation **Optimalisasi pencairan kas operasi** Optimization of Operating Cash Disbursement
Develop	**Pemenuhan dan peningkatan kompetensi *key* personal** Fulfillment and Enhancement of Key Personnel Competencies **Implementasi aset manajemen** Asset Management Implementation	**Pengurangan nilai bunga bank korporat** Optimization of Operating Cash Disbursement **Optimalisasi *turn over* tagihan bruto menjadi piuatang usaha** Optimization of Gross Billing Turnover into Trade Receivables

Enablers

- Peningkatan kapasitas keuangan
- Optimalisasi proses operasional bisnis
- Peningkatan Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko (*Risk Maturity*)
- Perbaikan Kapasitas Keuangan (Hutang, Piutang, Kas Bersih Korporat)
- Percepatan Pengembangan *Human Capital Management*

- Enhancement of Financial Capacity
- Optimization of Business Operational Processes
- Improvement of Risk-Based Decision Making (Risk Maturity)
- Improvement of Financial Capacity (Debt, Receivables, Corporate Net Cash)
- Acceleration of Human Capital Management Development

Rincian Masalah yang Muncul di Sepanjang Tahun 2024 dan Langkah Penyelesaian yang Dilakukan

Issues Arising in 2024 and Resolution Measures Taken

Di tahun 2024, PPRE menghadapi sejumlah permasalahan yang memiliki dampak baik signifikan maupun kurang signifikan, sebagai berikut:

In 2024, PPRE faced several challenges that had varying degrees of impact, both significant and minor, including the following:



Kekurangan Kebutuhan mekanik

kerjasama dengan pihak ke tiga dan akan dilakukan *training center* untuk pelatihan mekanik dan operator.

Shortage of mechanical personnel — Addressed through partnerships with third parties and the establishment of a training center to provide specialized training for mechanics and operators.



Kinerja alat

peningkatan produktifitas alat dengan memaksimalkan utilisasi alat pada proyek sipil, tambang maupun persewaan;

Equipment performance — Improved by enhancing equipment productivity through the maximized utilization of machinery across civil, mining, and rental projects.



Alat berat yang tidak optimal

untuk dilakukan divestasi pada alat yang sudah tidak beroperasi

Underutilized heavy equipment — Addressed by initiating the divestment of non-operational equipment.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Overview per Business Segment

Dalam menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan tahunan, Perusahaan menerapkan PSAK 108 tentang Segmen Operasi. Informasi pelaporan segmen operasi disajikan berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Segmen operasi sesuai laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disajikan melalui segmen primer yaitu segmen yang dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau produk yang dihasilkan, dan segmen sekunder yaitu segmen geografis di mana Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan terdaftar. Seluruh kegiatan konstruksi dan penjualan barang Perusahaan dilakukan di Indonesia dengan pelanggan dalam negeri, tidak terdapat rantai bisnis yang didapatkan dari kegiatan di luar negeri.

Segmen primer Perusahaan terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yakni kontruksi, *ready mix*, penyewaan alat berat, dan *Mining*.

In preparing the financial statements that serve as the basis for the annual report, the Company applies PSAK 108 on Operating Segments. Segment reporting information is presented based on operating profit or loss, measured in a manner consistent with the operating profit or loss presented in the Company's consolidated financial statements.

The operating segments, as reflected in the Company's consolidated financial statements, are presented through a primary segment, which is grouped based on the type of business or products produced, and a secondary segment, which is based on the geographical areas where the Company and its subsidiaries operate and are registered. All of the Company's construction activities and goods sales are conducted in Indonesia with domestic customers, with no business activities derived from operations abroad.

The Company's primary segments are divided into 4 (four) groups: construction, ready-mix, heavy equipment rental, and mining.

Segmen Usaha PP Presisi
PP Presisi Business Segments



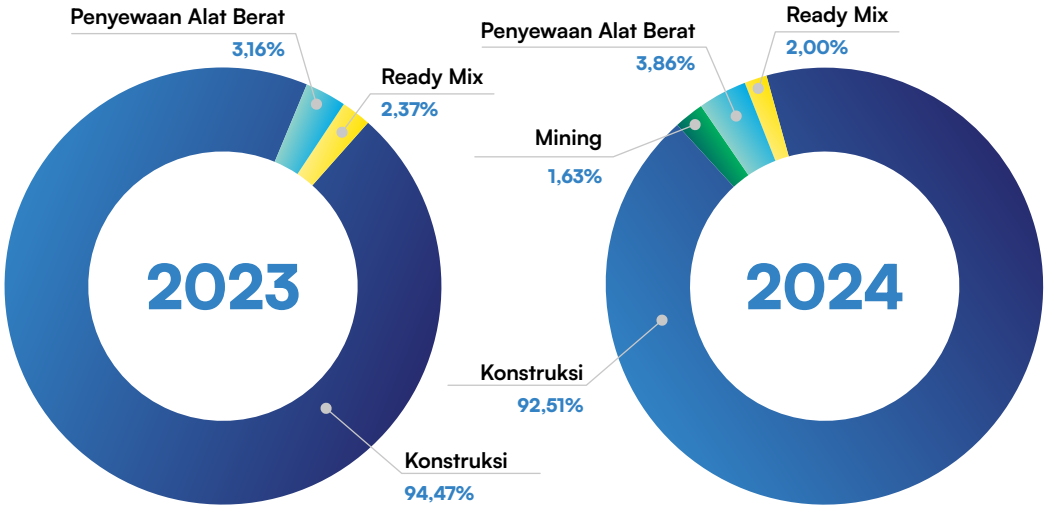
Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan kontribusi masing-masing segmen terhadap Pendapatan serta Aset konsolidasian Perusahaan.

To provide an initial overview of the business scale of each segment and its contribution to the Company, the following presents the contribution of each segment to the Company's consolidated Revenue and Assets.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Primer Terhadap Pendapatan PP Presisi
Contribution of Primary Segments to PP Presisi's Revenue

Segmen Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Konstruksi Construction	3.506,81	92,51	3.212,76	94,47	294,05	9,15	⬆
Ready Mix	61,62	1,63	80,62	2,37	(19,00)	(23,57)	⬇
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	146,45	3,86	107,49	3,16	38,96	36,25	⬆
Mining	75,93	2,00	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan konsolidasian Total consolidated revenue	3.790,81	100,00	3.400,87	100,00	389,94	11,47	⬆

Komposisi Pendapatan Segmen Primer Terhadap Pendapatan PP Presisi
Composition of Primary Segment Revenue to PP Presisi's Total Revenue



Pendapatan perusahaan di tahun 2024 sebesar Rp3,79 triliun., mengalami kenaikan 11,47% atau setara dengan Rp389,94 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,40 triliun. Pendapatan tahun 2023 dan 2024 didominasi oleh pendapatan dari segmen konstruksi, masing-masing sebesar 94,47% di tahun 2023 dan 92,51% di tahun 2024 terhadap jumlah pendapatan Perusahaan.

The Company's revenue in 2024 reached Rp3.79 trillion, an increase of 11.47% or equivalent to Rp389.94 billion compared to Rp3.40 trillion in 2023. In both 2023 and 2024, the revenue was predominantly driven by the construction segment, accounting for 94.47% in 2023 and 92.51% in 2024 of the Company's total revenue.

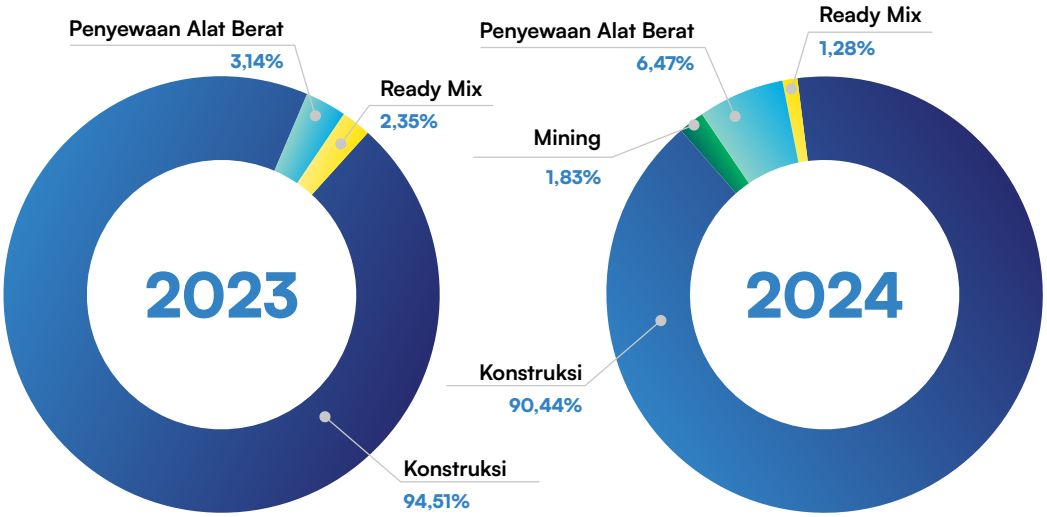
Jumlah dan Kontribusi Segmen Primer Terhadap Aset PP Presisi

Contribution of Primary Segments to PP Presisi's Assets

Segmen Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Konstruksi Construction	6.916,47	90,42	6.771,37	94,51	145,10	2,14	↑
Ready Mix	97,68	1,28	168,70	2,35	(71,02)	(42,10)	↓
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	495,04	6,47	224,92	3,14	270,12	120,10	↑
Mining	139,66	1,83	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Konsolidasian Total Consolidated Assets	7.648,85	100	7.164,99	100,00	483,86	6,75	↑

Komposisi Aset Segmen Primer Terhadap Aset PP Presisi

Composition of Primary Segment Assets to PP Presisi's Total Assets



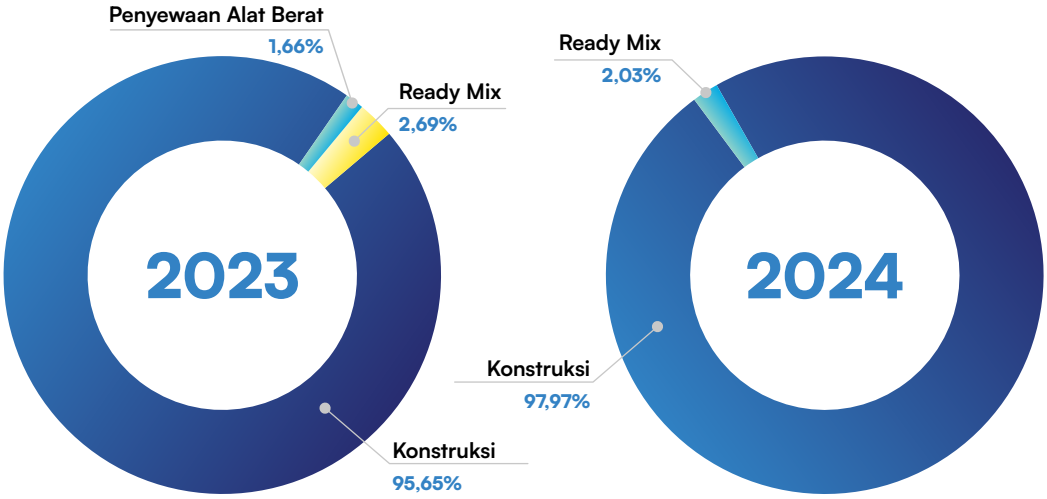
Jumlah aset Perusahaan di tahun 2024 sebesar Rp7,65 triliun, mengalami kenaikan 6,74% atau setara dengan Rp483,86 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp7,16 triliun. Jumlah aset Perusahaan didominasi oleh nilai aset dari segmen Konstruksi, dengan kontribusi masing-masing sebesar 94,51% di tahun 2023 dan 90,42% di tahun 2024 terhadap jumlah aset Perusahaan.

The Company's total assets in 2024 amounted to Rp7.65 trillion, reflecting a 6.74% increase or Rp483.86 billion compared to Rp7.16 trillion in 2023. The Company's total assets are dominated by the value of assets from the Construction segment, contributing 94.51% in 2023 and 90.42% in 2024 of the total assets.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Primer Terhadap Nilai Kontrak Baru PP Presisi
Contribution of Primary Segments to PP Presisi's New Contract Value

Segmen Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Konstruksi Construction	6.680,0	97,97	6.457,78	95,65	222,21	3,44%	↑
Ready Mix	0	0	181,58	2,69	(181,58)	(100%)	↓
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	138,51	2,03	112,27	1,66	26,24	23,37%	↑
Jumlah Nilai Kontrak Baru Total New Contract Value	6.818,50	100,00	6.751,63	100,00	66,87	0,99%	↑

Komposisi Kontrak Baru Segmen Primer Terhadap Nilai Kontrak Baru PP Presisi
Composition of Primary Segment New Contracts to PP Presisi's Total New Contract Value



Dari tabel dan bagan di atas, terlihat bahwa segmen Konstruksi menjadi penopang utama dalam bisnis yang dijalankan Perusahaan. Kegiatan usaha yang dikembangkan Perusahaan dan profitabilitas masing-masing segmen diuraikan di bawah ini.

From the table and chart above, it is evident that the Construction segment is the main pillar of the business operated by the Company. The business activities developed by the Company and the profitability of each segment are outlined below.

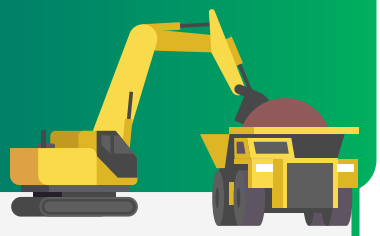
Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen Konstruksi

Construction Segment Operations and Business Model

Sebagaimana telah disampaikan pada bab Profil Perusahaan, segmen konstruksi Perusahaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama, yaitu jasa pertambangan dan pekerjaan sipil (termasuk di dalamnya pekerjaan struktur). Segmen ini menjadi bisnis inti Perusahaan.

As mentioned in the Company Profile section, the Company's construction segment consists of 2 (two) main activities: mining construction services and civil works (including structural works). This segment is the core business of the Company.

Jasa pertambangan
Mining Construction Services



Meliputi pekerjaan seperti *hauling road, mining development, hauling road maintenance, secondary hauling* dan *mining operation.*

include activities such as hauling road, mining development, hauling road maintenance, secondary hauling, and mining operation.

Konstruksi Sipil
Civil Work



Termasuk di dalamnya pekerjaan-pekerjaan struktur, meliputi pekerjaan seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan non-tol, bandara, pelabuhan/dermaga, bendungan, bangunan bertingkat, serta pembangkit listrik.

includes structural works, covering works such as infrastructure development of toll roads, non-toll roads, airports, ports/docks, dams, high-rise buildings, and power plants.

Strategi Bisnis Segmen Konstruksi

Business Strategy of the Construction Segment

Bisnis segmen konstruksi terutama dikembangkan melalui sinergi dengan entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional seperti proyek jalan tol, bandara dan dermaga. Di samping itu, dengan mengoptimalkan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki sejalan dengan dinamika pasar konstruksi di Indonesia, di tahun 2021 Perusahaan melakukan inisiatif strategis dengan memanfaatkan peluang bisnis pada sektor pertambangan

The construction segment business is primarily developed through synergy with the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, to work on national strategic projects such as toll road, airport, and port projects. In addition, by optimizing the competencies and capacities in line with the dynamics of the construction market in Indonesia, in 2021, the Company initiated a strategic move by capitalizing on business opportunities in the mining sector, particularly nickel. This decision is closely related to the scope

khususnya nikel. Keputusan ini tidak lepas dari lingkup pekerjaan jasa konstruksi tambang yang masih sesuai dengan aset peralatan yang dimiliki PP Presisi, seperti proyek konstruksi sipil (cut & fill) dengan alat-alat yang digunakan similar dengan alat yang digunakan pada proyek konstruksi pertambangan. Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan telah berhasil melibatkan diri pada berbagai jenis proyek konstruksi mulai dari jasa pertambangan seperti pekerjaan *hauling road, hauling road maintenance, hauling road upgrading, mining operation*, hingga pekerjaan sipil pada pekerjaan pengerasan tanah sampai dengan pengaspalan.

Strategi pengembangan kedepannya untuk lini bisnis konstruksi sipil, PT PP Presisi Tbk bersinergi dengan PT PP (Persero) Tbk dalam pengerjaan lini bisnis konstruksi sipil melalui proyek *feeding*.

of mining construction services, which align with the equipment assets owned by PP Presisi, such as civil construction projects (cut & fill) where the equipment used is similar to that used in mining construction projects.

By the end of 2024, the Company has successfully participated in various types of construction projects, ranging from mining construction services such as hauling road, hauling road maintenance, hauling road upgrading, mining operation, to civil works in land compaction and paving.

Looking ahead, the development strategy for the civil construction business line is for PT PP Presisi Tbk to collaborate with PT PP (Persero) Tbk in carrying out civil construction projects through feeding projects.

Kinerja dan Produktivitas Segmen Konstruksi

Performance and Productivity of the Construction Segment

Kinerja dan produktivitas segmen konstruksi dapat dilihat dari pemasaran yang tercermin dari perolehan kontrak baru, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

The performance and productivity of the construction segment can be measured by its marketing results, particularly through new contract acquisitions, as presented in the table below.

Jumlah dan Kontribusi Nilai Kontrak Baru Segmen Konstruksi per Kegiatan
Contribution of New Contract Value in the Construction Segment per Activity

Kegiatan Activity	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Jasa pertambangan Mining Construction Services	4.795,07	71,78	4.452,59	31,05	324,48	8% ↑
Konstruksi Sipil Civil Construction	1.884,92	28,22	2.005,19	68,95	(120,27)	(6%) ↓
Jumlah Nilai Kontrak Baru Segmen Konstruksi Total Value of New Contracts in the Construction Segment	6.679,99	100,00	6.457,78	100,00	222,21	3,44% ↑

Selaras dengan kebijakan strategis perusahaan terkait pemfokusan lini bisnis Perseroan yang mengutamakan lini bisnis jasa pertambangan (Jasa pertambangan), pada tahun 2024 perolehan kontrak baru lini bisnis Jasa pertambangan meningkat 139,13% dari tahun sebelumnya, atau senilai 2.789,86 Miliar. Kemudian, kontrak baru Jasa Konstruksi Sipil menurun 57,67% dari tahun sebelumnya.

In line with the Company's strategic policy to focus on its mining services business (Mining Construction Services), in 2024, the acquisition of new contracts in the Mining Construction Services segment increased by 139.13% compared to the previous year, amounting to Rp2,789.86 billion. Meanwhile, new contracts in the Civil Construction Services segment decreased by 57.67% compared to the previous year.

Profitabilitas Segmen Konstruksi

Profitability of the Construction Segment

Berikut disampaikan kinerja profitabilitas dari segmen konstruksi

The following presents the profitability performance of the construction segment.

Pos Akun Account Position	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp-billion)					
Pendapatan Revenue	3.506,81	3.212,76	294,05	9,15	↑
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(2.803,11)	(2.661,59)	(141,52)	5,32	↑
Laba Kotor Gross Profit	703,70	551,17	152,53	27,67	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(93,16)	(82,53)	(10,63)	12,88	↑
Pendapatan Keuangan Finance Income	0,80	1,40	(0,60)	(42,86)	↓
Pendapatan Lainnya Other Income	56,87	49,49	7,38	14,91	↑
Beban Lainnya Other Expenses	(46,74)	(41,63)	(5,11)	12,27	↑
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit from Joint Ventures	-	14,60	-	-	-
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss	(51,45)	(17,23)	(34,22)	198,61	↑
Beban Keuangan Finance Costs	(299,94)	(209,50)	(90,44)	43,17	↑
Pajak Tax	(92,44)	(96,38)	3,94	(4,09)	↓
Laba Bersih Setelah Pajak Net Profit After Tax	177,64	169,38	8,26	4,88	↑
Rasio Profitabilitas (%) | Profitability Ratio (%)					
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	20,07	17,16	2,91	-	↑
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Financial Position (Rp billion)					
Jumlah Aset Total Assets	6.916,47	6.771,37	145,10	2,14	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.756,51	3.639,85	116,66	3,21	↑

Perusahaan mencatat peningkatan pendapatan sebesar 9,15% yang didorong oleh realisasi proyek berulang di sektor pertambangan dan infrastruktur. Margin laba kotor membaik menjadi 20,07% berkat efisiensi biaya proyek. Namun, beban usaha dan beban keuangan meningkat masing-masing sebesar 12,88% dan 43,17%, mencerminkan ekspansi operasional dan peningkatan pinjaman berbunga. Meskipun demikian, laba bersih tetap tumbuh 4,88%, menunjukkan ketahanan profitabilitas. Dari sisi neraca, total aset dan liabilitas meningkat secara moderat.

The Company recorded a revenue increase of 9.15%, driven by the realization of recurring projects in the mining and infrastructure sectors. The gross profit margin improved to 20.07%, supported by project cost efficiency. However, operating expenses and finance costs rose by 12.88% and 43.17%, respectively, reflecting operational expansion and an increase in interest-bearing loans. Despite these challenges, net profit still grew by 4.88%, demonstrating resilient profitability. On the balance sheet side, total assets and liabilities recorded moderate growth.

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen *Ready Mix*

Ready Mix Segment Operations and Business Model

Kegiatan usaha *ready mix* di masing-masing proyek memiliki *batching plant* atau pabrik sementara yang memproduksi beton *ready mix*, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dari segi waktu dan sumber daya karena tidak diperlukannya pemakaian armada angkut ukuran besar untuk transportasi. Strategi ini menjamin kualitas beton tetap terjaga secara konsisten. Produksi beton dan agregat siap pakai ini dilakukan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan gedung.

The ready mix business operations in each project involve a batching plant or temporary factory that produces ready-mix concrete. This approach aims to achieve efficiency in terms of time and resources, as it eliminates the need for large transport fleets. This strategy ensures consistent concrete quality. The production of ready-mix concrete and aggregates is carried out for infrastructure projects and building construction.

Strategi Bisnis Segmen *Ready Mix*

Business Strategy of the Ready Mix Segment

Seiring dengan berjalannya strategi perusahaan terkait tentang pemfokusan lini bisnis pertambangan, manajemen Perseroan memutuskan untuk menekan pertumbuhan lini bisnis *ready mix* dan mengintegrasikannya menjadi satu dalam lini bisnis konstruksi sipil, hal ini bertujuan agar *asset ready mix* yang idle dapat dimanfaatkan dengan baik seiring bertambahnya jumlah kontrak konstruksi infrastruktur.

In line with the Company's strategy to focus on the mining business line, management has decided to limit the growth of the ready-mix business and integrate it into the civil construction segment. This aims to optimize the utilization of idle ready-mix assets, in line with the increasing number of infrastructure construction contracts.

Kinerja dan Produktivitas Segmen *Ready Mix*

Performance and Productivity of the Ready-Mix Segment

Kinerja dan produktivitas segmen *ready mix* dapat dilihat dari pemasaran yang tercermin dari perolehan kontrak baru, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

The performance and productivity of the ready-mix segment can be measured by its marketing results, particularly through new contract acquisitions, as presented in the table below.

Jumlah dan Kontribusi Nilai Kontrak Baru Segmen *Ready Mix*

Contribution of New Contracts in the Ready-Mix Segment

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Ready Mix	**0**	**181,58**	**(181,58)**	**(100%)**

Perolehan kontrak baru *ready mix* tidak tercerminkan dalam perolehan kontrak baru lini bisnis *ready mix* hal ini disebabkan oleh pencatatan kontrak baru *ready mix* yang sudah terintegrasi dalam kontrak baru lini bisnis infrastruktur sipil.

The acquisition of new ready-mix contracts are no longer reported separately, having been consolidated within the civil infrastructure business line's contract reporting.

Profitabilitas Segmen *Ready Mix*

Profitability of the Ready-Mix Segment

Berikut disampaikan kinerja profitabilitas dari segmen *ready mix*

Below is the profitability performance of the ready-mix segment.

Pos Akun Account Position	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp-billion)					
Pendapatan Revenue	61,62	80,62	(19,00)	(23,57)	↓
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(51,68)	(80,03)	28,35	(35,42)	↓
Laba Kotor Gross Profit	9,94	0,59	9,35	1.584,75	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(1,31)	(0,12)	(1,19)	991,67	↑
Pendapatan Lainnya Other Income	0,80	0,08	0,72	900,00	↑
Beban Lainnya Other Expenses	(0,66)	(0,08)	(0,58)	725,00	↑
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss	(0,73)	(0,02)	(0,71)	3.550,00	↑
Beban Keuangan Finance Costs	(4,24)	(0,33)	(3,91)	1.184,85	↑
Laba Bersih Setelah Pajak Net Profit After Tax	3,80	0,11	3,69	3.354,55	↑
Rasio Profitabilitas (%) | Profitability Ratio (%)					
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	16,13	0,73	0,57		↑
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Financial Position (Rp billion)					
Jumlah Aset Total Assets	97,68	168,70	(71,02)	(42,10)	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	53,05	90,02	(36,97)	(41,07)	↓

Segmen *Ready Mix* mencatat penurunan pendapatan sebesar 23,57% pada 2024, seiring dengan mulai dihentikannya operasional unit ini dan integrasinya ke dalam lini bisnis jasa konstruksi sipil mulai 2025. Pendapatan yang tercatat selama 2024 berasal dari *burn rate* kontrak-kontrak lama (*carry over*) yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Meskipun volume penjualan turun, efisiensi signifikan pada harga pokok pendapatan mendorong kenaikan laba kotor secara drastis.

Laba bersih melonjak 3.354,55% menjadi Rp3,80 miliar, didukung efisiensi operasional serta dimulainya proses penjualan atas kontrak yang didapat pada akhir tahun 2023. Penurunan aset dan liabilitas lebih dari 40% menandakan pengurangan skala operasional seiring proses penghentian unit bisnis ini.

The Ready-Mix Segment reported a 23.57% revenue decline in 2024, coinciding with the gradual cessation of its operations and integration into the civil construction services business line starting 2025. The 2024 revenue was generated from burn rates of carry-over contracts secured in previous years. Despite lower sales volume, significant cost efficiencies sharply boosted gross profit.

Net profit surged 3,354.55% to Rp3.80 billion, driven by operational efficiencies and initial execution of contracts obtained in late 2023. The over 40% reduction in both assets and liabilities indicates operational downsizing as part of this business unit's phase-out process.

Penyewaan Alat Berat
Heavy Equipment Rental

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen Penyewaan Alat Berat

Heavy Equipment Rental Segment Operations and Business Model

Penyewaan alat berat merupakan lini bisnis Perusahaan sebelum melakukan transformasi bisnis. Sampai dengan saat ini Perusahaan tetap mempertahankan bisnis penyewa alat berat dengan memberikan jasa yang lengkap serta memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan dan prima, yang diiringi dengan jaminan perawatan berjangka. Alat yang disewakan oleh Perusahaan berfokus pada alat-alat angkut orang dan barang seperti *tower crane, passenger hoist,* alat berat *earth moving* seperti *excavator* dan *vibro* dan juga *formwork*. Untuk alat berat lainnya digunakan untuk menunjang proyek-proyek konstruksi pada jasa pertambangan maupun pekerjaan sipil.

Pada akhir tahun 2024, jumlah alat berat Perseroan termasuk didalamnya alat berat yang dimiliki oleh anak perusahaan (PT LMA) berjumlah 3.212 yang mayoritas merupakan alat berat bergerak (*mobile*) yang dimanfaatkan untuk 2 lini bisnis utama Perseroan yaitu *Civil Work* dan juga *Mining Services*.

Heavy equipment rental was the Company's business line prior to its business transformation. To date, the Company continues to maintain its heavy equipment rental business by providing comprehensive services and ensuring the availability of reliable, high-quality equipment, backed by scheduled maintenance guarantees. The Company's rental fleet primarily focuses on personnel and material transport equipment, such as tower cranes, passenger hoists, and earth-moving machinery like excavators and vibro, as well as formwork. Other heavy equipment is utilized to support construction projects in both mining and civil work.

As of the end of 2024, the Company's heavy equipment inventory, including assets owned by its subsidiary (PT LMA), totaled 3,212 units, the majority of which are mobile equipment deployed for its two main business lines: Civil Work and Mining Services.

Strategi Bisnis Segmen *Ready Mix*

Business Strategy of the Heavy Equipment Rental Segment

Perusahaan tidak melakukan pengembangan bisnis pada jasa persewaan alat atau rental *heavy equipment*, Perusahaan hanya mempertahankan lini bisnis persewaan alat berat karena merupakan lini bisnis sejak Perusahaan didirikan.

The Company is not expanding its heavy equipment rental business, maintaining this segment only as it has been part of its core operations since the Company's founding.

Kinerja dan Produktivitas Segmen Penyewaan Alat Berat

Performance and Productivity of the Heavy Equipment Rental Segment

Kinerja dan produktivitas segmen penyewaan alat berat dapat dilihat dari pemasaran yang tercermin dari perolehan kontrak baru, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

The performance and productivity of the heavy equipment rental segment can be measured by its marketing results, particularly through new contract acquisitions, as presented in the table below.

Segmen Segment	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Penyewaan Alat Berat	**138,51**	**112,27**	**26,24**	**23,37%**

Perolehan kontrak baru penyewaan alat berat meningkat sebanyak 26,24 Miliar Rupiah pada tahun 2024, atau sebesar 23,27%.

The acquisition of new heavy equipment rental contracts increased by 26.24 billion Rupiah in 2024, or by 23.27%.

Profitabilitas Segmen Penyewaan Alat Berat

Profitability of the Heavy Equipment Rental Segment

Berikut disampaikan kinerja profitabilitas dari segmen Penyewaan Alat Berat.
The following presents the profitability performance of the Heavy Equipment Rental

Pos Akun Account Position	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp-billion)					
Pendapatan Revenue	146,44	107,49	38,95	36,24	↑
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(96,08)	(65,67)	(30,41)	46,31	↑
Laba Kotor Gross Profit	50,36	41,81	8,55	20,45	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(6,67)	(7,58)	0,91	(12,01)	↓
Pendapatan Lainnya Other Income	4,07	4,86	(0,79)	(16,26)	↓
Beban Lainnya Other Expenses	(3,34)	(4,80)	1,46	(30,42)	↓
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit from Joint Ventures	-	0,11	-	-	-
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss	(3,68)	(1,43)	(2,25)	157,34	↑
Beban Keuangan Finance Costs	(21,47)	(20,68)	(0,79)	3,82	↑
Pajak Tax	(9,53)	(9,01)	(0,52)	5,77	↑
Laba Bersih Setelah Pajak Net Profit After Tax	9,74	3,29	6,45	196,05	↑
Rasio Profitabilitas (%) | Profitability Ratio (%)					
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	34,39	38,90	(4,51)		↓
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Financial Position (Rp billion)					
Jumlah Aset Total Assets	495,04	224,92	270,12	120,10	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	268,87	120,02	148,85	124,02	↑

Segmen ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat sebesar 36,24% dibanding tahun sebelumnya, mencerminkan peningkatan volume pekerjaan atau keberhasilan akuisisi proyek baru. Namun, kenaikan harga pokok pendapatan yang lebih tinggi (46,31%) menekan margin laba kotor, yang menurun dari 38,90% menjadi 34,39%, meskipun secara nominal laba kotor tetap tumbuh 20,45%.

Laba bersih meningkat signifikan sebesar 196,05% menjadi Rp9,74 miliar, didorong oleh efisiensi pada beban usaha dan penurunan beban lainnya.

This segment recorded strong revenue growth of 36.24% compared to the previous year, reflecting an increase in work volume or the successful acquisition of new projects. However, a higher increase in cost of revenue (46.31%) pressured the gross profit margin, which declined from 38.90% to 34.39%, although gross profit in nominal still grew by 20.45%.

Net profit rose significantly by 196.05% to Rp9.74 billion, driven by efficiency in operating expenses and a reduction in other expenses.

Mining

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen *Mining*

Mining Segment Operations and Business Model

Sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan ketahanan bisnis pasca pandemi COVID-19, PT PP Presisi Tbk memperluas portofolio usahanya ke lini bisnis pertambangan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kompetisi di sektor konstruksi sipil, terutama dari perusahaan sejenis yang juga merupakan bagian dari BUMN Karya. Kegiatan usaha di sektor pertambangan khususnya mineral nikel, Perseroan fokus pada jasa *ore getting*, *overburden removal*, pengangkutan ore, hingga pembangunan infrastruktur tambang seperti jalan *hauling* dan fasilitas pendukung. Melalui pendekatan ini, Perusahaan tidak hanya memperkuat ketahanan arus kas dan portofolio pendapatan jangka panjang, tetapi juga memaksimalkan pemanfaatan alat berat dan SDM operasional yang sebelumnya difokuskan pada proyek konstruksi.

As part of its post-COVID-19 diversification and business resilience strategy, PT PP Presisi Tbk expanded its business portfolio into the mining sector. This move was taken in response to the increasing competition in the civil construction sector, particularly from similar companies that are also part of the BUMN Karya group. In its mining operations, particularly in nickel minerals, the Company focuses on services such as ore getting, overburden removal, ore transportation, and the development of mining infrastructure, including hauling roads and supporting facilities. Through this approach, the Company not only strengthens its cash flow resilience and long-term revenue portfolio but also maximizes the utilization of heavy equipment and operational human resources that were previously concentrated on construction projects.

Strategi Bisnis Segmen *Mining*

Business Strategy of the Mining

Pengembangan lini bisnis jasa pertambangan PT PP Presisi Tbk diarahkan untuk memperkuat posisi Perusahaan sebagai kontraktor *mining services* terintegrasi, khususnya di sektor tambang mineral nikel dan mineral serupa lainnya. Sejalan dengan dinamika industri dan kebutuhan akan diversifikasi pendapatan yang berkelanjutan, Perseroan saat ini memfokuskan lini bisnis jasa pertambangan sebagai lini bisnis utama, menggantikan ketergantungan historis pada proyek-proyek konstruksi sipil. Fokus ini didorong oleh tingginya permintaan jasa pertambangan di Indonesia akibat hilirisasi mineral, serta kesesuaian karakteristik pekerjaan tambang dengan aset alat berat dan kompetensi teknis yang telah dimiliki Perusahaan.

Pengembangan dilakukan melalui sinergi strategis dengan anak usaha maupun mitra swasta nasional yang bergerak di sektor pertambangan, dengan pendekatan berbasis aliansi jangka panjang (*long-term partnership*) pada proyek berskala besar. Perusahaan memanfaatkan kapabilitas alat berat dan SDM operasional untuk menjalankan berbagai layanan, mulai dari *ore getting* termasuk *overburden removal*, pembangunan dan pemeliharaan *hauling road, ore hauling* dan lain sebagainya.

Ke depan, strategi diarahkan pada penguatan portofolio proyek berulang (*repeat order*), peningkatan efisiensi operasional, serta ekspansi ke wilayah tambang baru melalui

The development of PT PP Presisi Tbk's mining services business line is aimed at strengthening the Company's position as an integrated mining services contractor, particularly in the nickel mining sector and other similar minerals. In line with industry dynamics and the need for sustainable revenue diversification, the Company is currently focusing on mining services as its main business line, shifting away from its historical reliance on civil construction projects. This focus is driven by the high demand for mining services in Indonesia due to mineral downstreaming, as well as the alignment between mining project characteristics and the Company's existing heavy equipment assets and technical competencies.

Development is carried out through strategic synergies with subsidiaries and national private partners engaged in the mining sector, using a long-term partnership approach for large-scale projects. The Company leverages its heavy equipment capabilities and operational human resources to deliver a range of services, including ore getting, overburden removal, construction and maintenance of hauling roads, ore hauling, and more.

Going forward, the strategy is directed toward strengthening the portfolio of repeat order projects, enhancing operational efficiency, and expanding into new mining areas through competitive commercial offerings. The Company is also exploring vertical integration with logistics providers and initial

penawaran komersial yang kompetitif. Perseroan juga menjajaki integrasi vertikal dengan penyedia logistik dan pengolahan awal (*ore processing*) untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat kendali dalam rantai pasok. Dengan landasan operasional yang kuat dan fokus strategis yang jelas, lini jasa pertambangan diharapkan menjadi pilar utama pertumbuhan berkelanjutan PT PP Presisi Tbk dalam jangka menengah hingga panjang.

ore processing operators to create added value and strengthen control over the supply chain. With a solid operational foundation and a clear strategic focus, the mining services business line is expected to become a key pillar of PT PP Presisi Tbk's sustainable growth in the medium to long term.

Kinerja dan Produktivitas Segmen *Mining*

Performance and Productivity of the Mining Segment

Kinerja dan produktivitas segmen *mining* dapat dilihat dari pemasaran yang tercermin dari perolehan kontrak baru, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

The performance and productivity of the mining segment can be measured by its marketing results, particularly through new contract acquisitions, as presented in the table below.

Jumlah dan Kontribusi Nilai Kontrak Baru Segmen Konstruksi per Kegiatan
Contribution of New Contract Value in the Construction Segment by Activity

Kegiatan Activity	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Jasa pertambangan Mining Services	**4.795,07**	**71,78**	**4.452,59**	**31,05**	**2.789,86**	**139,13%** ↑

Pada tahun 2024 perolehan kontrak baru lini bisnis Jasa pertambangan meningkat 139,13% dari tahun sebelumnya, atau senilai 2.789,86 Miliar.

In 2024, the acquisition of new contracts in the Mining Construction Services business line increased by 139.13% compared to the previous year, amounting to 2,789.86 billion Rupiah.



Profitabilitas Segmen *Mining*

Profitability of the Mining Segment

Berikut disampaikan kinerja profitabilitas dari segmen *mining*

The following presents the profitability performance of the mining segment.

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar) (Rp billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp billion)				
Pendapatan Revenue	75,93	-	-	-
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(61,72)	-	-	-
Laba Kotor Gross Profit	14,21	-	-	-
Beban Usaha Operating Expenses	-1,88	-	-	-
Pendapatan Keuangan Finance Income	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya Other Income	1,15	-	-	-
Beban Lainnya Other Expenses	(0,94)	-	-	-
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit from Joint Ventures	-	-	-	-
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss	(1,04)	-	-	-
Beban Keuangan Finance Expenses	(6,06)	-	-	-
Pajak Tax	(2,52)	-	-	-
Laba Bersih Setelah Pajak Net Profit After Tax	2,92	-	-	-
Rasio Profitabilitas (%) | Profitability Ratio (%)				
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	18,71	-	-	-
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-miliar) | Consolidated Financial Position (Rp billion)				
Jumlah Aset Total Assets	139,66	-	-	-
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	75,83	-	-	-

Pada tahun 2024, Perseroan mulai membuat profit center baru yang dikhususkan untuk seluruh pekerjaan pertambangan (termasuk pembangunan infrastruktur), hal ini mengakibatkan penjualan sektor lini bisnis pertambangan belum tercerminkan sepenuhnya dikarenakan hanya proyek baru yang didapat mulai tahun 2024 yang akan tercatat pada performa lini bisnis pertambangan.

In 2024, the Company established a new profit center specifically for all mining activities, including infrastructure development. Consequently, the sales performance of the mining business line has not been fully reflected, as only new projects secured from 2024 onwards are recorded under this segment.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

Strategi Pemasaran
Marketing Strategy

Sesuai dengan program strategis perusahaan dengan memfokuskan lini bisnisnya ke jasa pertambangan, PT PP Presisi Tbk memiliki strategi pemasaran berupa penambahan kapasitas *fleet* alat berat yang dikhususkan untuk lini bisnis jasa pertambangan, tercerminkan dalam penyerapan *capital expenditure* perusahaan yang mayoritas digunakan untuk menyokong lini bisnis jasa pertambangan, dengan persentase sebesar 65%, disusul dengan alat sub pekerjaan sipil sebesar 33% dan alat untuk persewaan kendaraan sebesar 2%.

Penguatan lini bisnis jasa pertambangan ini sesuai dengan rencana strategis berkepanjangan perusahaan dalam mendukung program hilirasi mineral yang di prioritaskan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan juga untuk mendukung kebutuhan dunia akan mineral pertambangan khususnya nikel untuk pembuatan *lithium-ion battery* yang akan dimanfaatkan untuk pembuatan mobil listrik. Kemudian, untuk lini bisnis utama Perusahaan lainnya yaitu *Civil Work*, akan tetap dikembangkan dengan proporsi yang menyesuaikan setelah lini bisnis prioritas utama Perusahaan yaitu *Mining Services*.

Untuk *Mining Services*, Perseroan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan mulai dari pembangunan infrasfukfur utama dan pendukung kegiatan pertambangan hingga kegiatan utama jasa pertambangan yaitu: Pekerjaan *Mining Operation, Mining Infrastucture Development, Secondary Ore hauling*, hingga *Road Maintenance*. Perseroan juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis *mining* serta kinerja peralatan melalui pengembangan *system* tersentralisasi yaifu SIMAP, didukung dengan melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi *key* personil di lini bisnis tambang. Pada lini bisnis *Civil Work* Perseroan akan berupaya meningkatkan kinerja, kapabilitas operasional dan juga *project management* serta berupaya dalam melakukan percepatan peningkatan pengelolaan investasi dan divestasi alat berat Fokus Perusahaan di seKor *Civil Work* adalah untuk menyokong proyek dari PP Group sehingga unfuk proyek ekstemal akan lebih diprioritaskan untuk lini bisnis *Mining*.

Capaian perolehan kontrak baru selama tahun 2024 mencapai senilai Rp 6,8 Triliun, dengan komposisi kontrak dari lini bisnis jasa pertambangan sebesar 70%, disusul dengan lini bisnis pekerjaan konstruksi sipil sebesar 28% dan persewaan alat berat sebesar 2%. Berdasarkan pemberi pekerjaan, PP Group menyumbang kontrak baru senilai 8% dan non-PP Group senilai 92%.

In line with its strategic initiatives to focus on mining services, PT PP Presisi Tbk has adopted a marketing strategy centered on expanding its heavy equipment fleet dedicated to this business line. This focus is reflected in the Company's capital expenditure absorption, with approximately 65% allocated to support the mining services segment, followed by 33% for civil works equipment, and 2% for vehicle rental equipment.

The strengthening of the mining services business line is aligned with the Company's long-term strategic plan to support the mineral downstreaming program prioritized by the Government of the Republic of Indonesia, as well as to address the global demand for mining minerals, particularly nickel, which is essential for the production of lithium-ion batteries used in electric vehicles. Meanwhile, the Company's other main business line, Civil Work, will continue to be developed in a proportion that adjusts based on the prioritization of Mining Services.

In the Mining Services segment, the Company provides integrated services across the full spectrum of mining activities, from the development of core and supporting mining infrastructure to key mining operations, including Mining Operations, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore Hauling, and Road Maintenance. To further optimize operational performance and equipment productivity, the Company is developing a centralized system, SIMAP, while also enhancing the competencies of key personnel within the mining division. In the Civil Work segment, the Company is committed to improving operational performance, project management capabilities, and accelerating the optimization of heavy equipment investment and divestment. The Company's primary focus for Civil Work is to support projects within the PP Group, while external projects will be prioritized under the Mining Services segment.

Throughout 2024, the Company secured new contracts worth Rp 6.8 trillion, with 70% derived from mining services, 28% from civil construction works, and 2% from heavy equipment rental. Based on the source of projects, contracts from the PP Group accounted for 8% of the total, while non-PP Group projects contributed 92%.

Informasi tentang Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain

Information regarding National Strategic Projects or Other Assignments

Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan dan/atau didapatkan selama tahun 2024 baik dari PT PP Presisi Tbk maupun anak usahanya adalah sebagai berikut:

The National Strategic Projects being undertaken and/or acquired in 2024 by PT PP Presisi Tbk and its subsidiaries are as follows:

1. Proyek Bandara VVIP IKN
2. Proyek Jalan Sumbu Barat IKN
3. Proyek Gedung BI IKN
4. Proyek Gedung Istana Presiden IKN



Penelitian dan Pengembangan

Research and Development

Penelitian dan pengembangan terkait kegiatan bisnis perusahaan berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan meliputi:

Research and development related to the Company's business activities focus on improving company performance, including:



Kajian Pengembangan Jasa Pertambangan

Mining Services Development Study

Pengembangan produksi jasa pertambangan melalui kajian perolehan alat berat untuk mendukung perolehan proyek baru di jasa pertambangan yang dilakukan secara internal. Kajian tersebut meliputi kajian teknis, risiko, bisnis, dan legal.

The development of mining services production is carried out through an internal study on the acquisition of heavy equipment to support the securing of new mining service projects. This study includes technical, risk, business, and legal assessments.



Kajian Teknis | Technical Assessment

Kajian teknis dilaksanakan dengan menilai parameter teknis seperti spesifikasi kebutuhan alat berat, produktivitas alat berat, after sales service atas perolehan alat berat, dan biaya operasional atas alat berat.

The technical assessment is carried out by evaluating technical parameters such as the specifications of heavy equipment requirements, heavy equipment productivity, after-sales service for the acquisition of heavy equipment, and the operational costs of the heavy equipment.



Kajian Bisnis | Business Assessment

Kajian bisnis dilaksanakan untuk melihat kelayakan suatu kegiatan investasi alat berat apakah layak dilaksanakan dilihat dari nilai proyeksi dari perolehan kontrak baru, jenis pekerjaan, proyeksi keuangan atas operasional alat berat, dan penilaian parameter bisnis berupa IRR, NPV, dan Payback period untuk setiap kegiatan investasi alat berat.

The business study is conducted to assess the feasibility of heavy equipment investment activities by analyzing projected values from new contract acquisitions, types of work, financial projections for equipment operations, and evaluating business parameters such as IRR, NPV, and Payback Period for each heavy equipment investment activity.

Kajian Risiko | Risk Assessment

Kajian risiko dilaksanakan dengan pendekatan quantitative *risk assessment* terhadap kegiatan korporasi investasi perusahaan sehingga setiap risiko yang teridentifikasi dapat dilihat dampaknya kepada perusahaan secara nyata, terukur, dan menghasilkan daftar risiko yang lebih komprehensif yang dapat dimitigasi dengan baik oleh perusahaan.

The risk study is carried out using a quantitative risk assessment approach for corporate investment activities, so that each identified risk can be seen in a tangible, measurable manner, resulting in a more comprehensive risk list that the Company can effectively mitigate.

Kajian Legal | Legal Assessment

Kajian legal dilaksanakan untuk mendukung kegiatan aksi korporasi perusahaan agar sesuai dengan tata kelola hukum yang berlaku di NKRI.

The legal study is conducted to support the Company's corporate actions in accordance with the applicable legal governance within the Republic of Indonesia.



Kajian Peningkatan Kinerja Investasi

Investment Performance Improvement Study

Peningkatan Kinerja Investasi diperlukan dengan melihat kondisi bisnis yang sangat dinamis baik secara makro dan mikro. Kajian dilakukan secara internal dengan pendekatan kuantitatif. Kajian dilaksanakan menggunakan asumsi memperpanjang durasi investasi dengan mempertimbangkan penjualan & biaya yang akan timbul selama perpanjangan durasi tersebut. Sehingga bisa memberikan insight untuk tindak lanjut terhadap masing-masing investasi yang dilakukan.

Kajian yang dilakukan menghasilkan beberapa opsi terhadap investasi seperti:

Investment performance improvement is necessary in view of the highly dynamic business conditions, both macro and micro. The study is conducted internally using a quantitative approach.

The study is carried out based on the assumption of extending the investment duration by considering the sales and costs that will arise during the extension period. This provides insights for follow-up actions on each investment.

The study results in several options for investments, such as

- Melanjutkan investasi dengan melakukan overhaul, / Continuing the investment by performing an overhaul
- Melanjutkan investasi sampai nilai buku dari asset tersebut habis. / Continuing the investment until the asset's book value is depleted
- Melakukan divestasi terhadap asset tersebut. / Divesting the asset

Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis

Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Information Presentation Standards and Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refer to the Financial Statements for the years ended December 31, 2024 and December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Aset

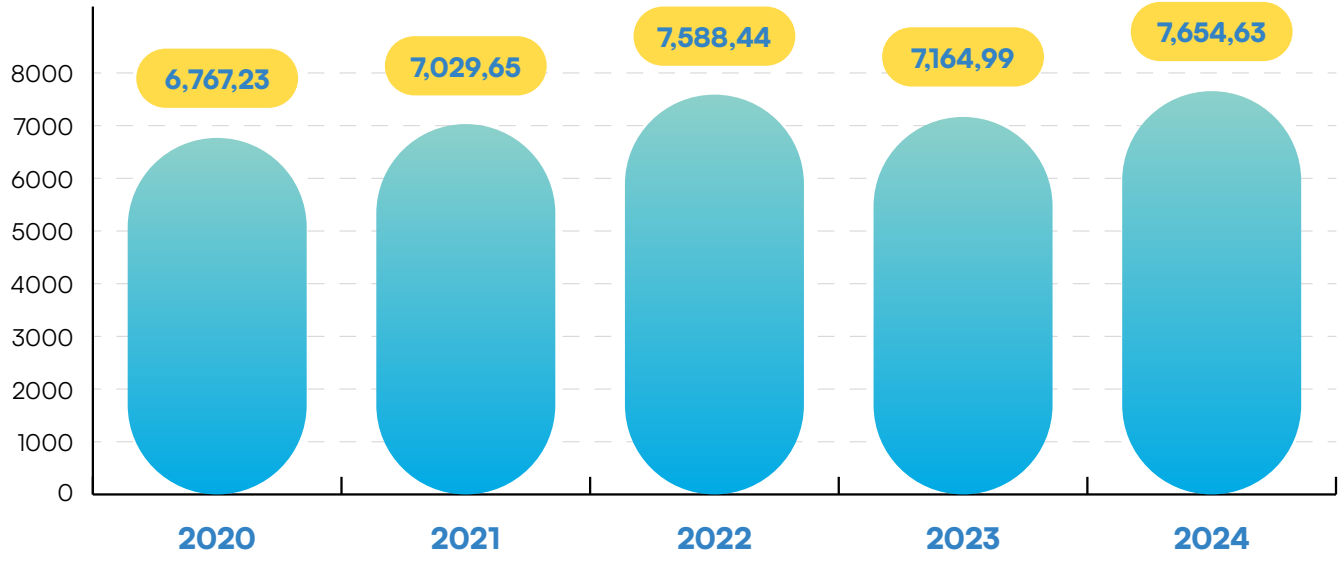
Assets

Jumlah Aset Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp7,65 triliun, mengalami kenaikan 6,74% dibandingkan Jumlah Aset tahun tahun 2023 mencapai Rp7,16 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2020-2024, Jumlah Aset Perusahaan mengalami pertumbuhan 3,11%"

The Company's total assets in 2024 reached Rp 7.65 trillion, an increase of 6.74% compared to the total assets in 2023, which amounted to Rp 7.16 trillion. Based on the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for the period 2020—2024, the Company's total assets recorded a growth of 3.11%

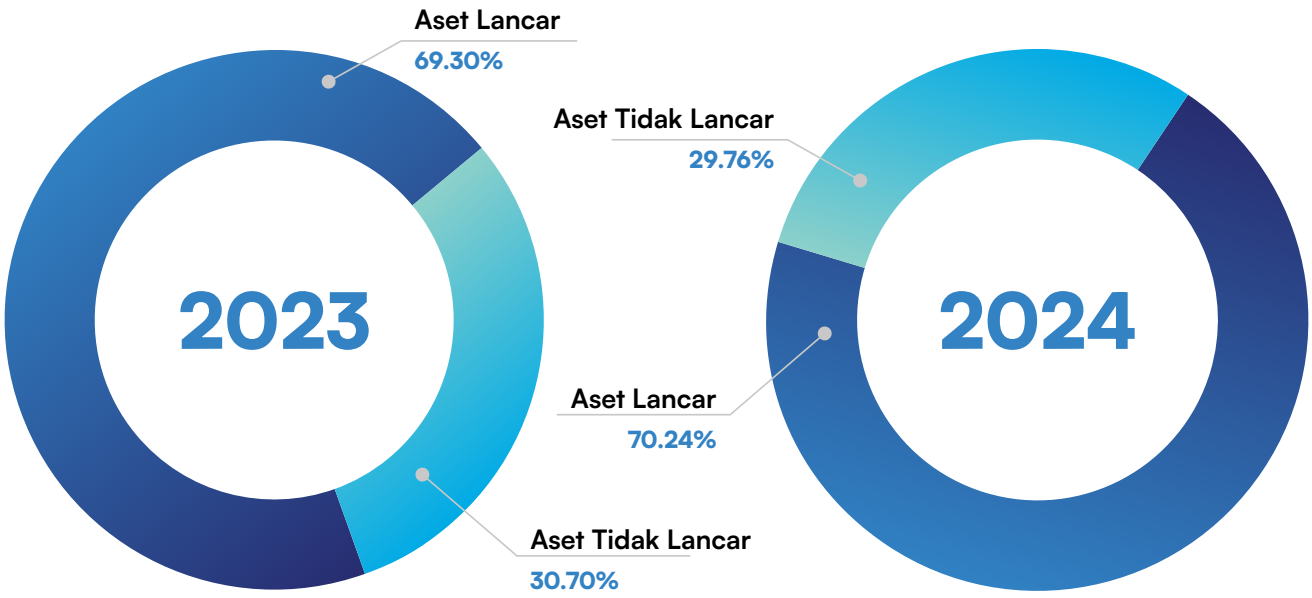
Perkembangan Jumlah Aset 2020-2024 (Rp-miliar)

Total Asset Growth 2020-2024 (Rp billion)



Jumlah Aset Tahun 2023-2024
Total Assets for 2023-2024

Aset Assets	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Aset Lancar Current Assets	5.372,28	70,24	4.965,57	69,30	406,71	8,19
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2.276,57	29,76	2.199,42	30,70	77,14	3,51
Jumlah Aset Total Assets	7.648,85	100	7.164,99	100,00	483,86	6,75



Aset Perusahaan terbagi atas aset lancar dan aset tidak lancar, di mana komposisi aset lancar dan aset tidak lancar di akhir tahun 2024 masing-masing sebesar 70,24% dan 29,76%. Jumlah aset Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp7,65 Triliun, mengalami kenaikan 6,74% atau setara dengan Rp 483,86 Miliar, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp7,16 triliun. Penjelasan rinci atas kinerja aset Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

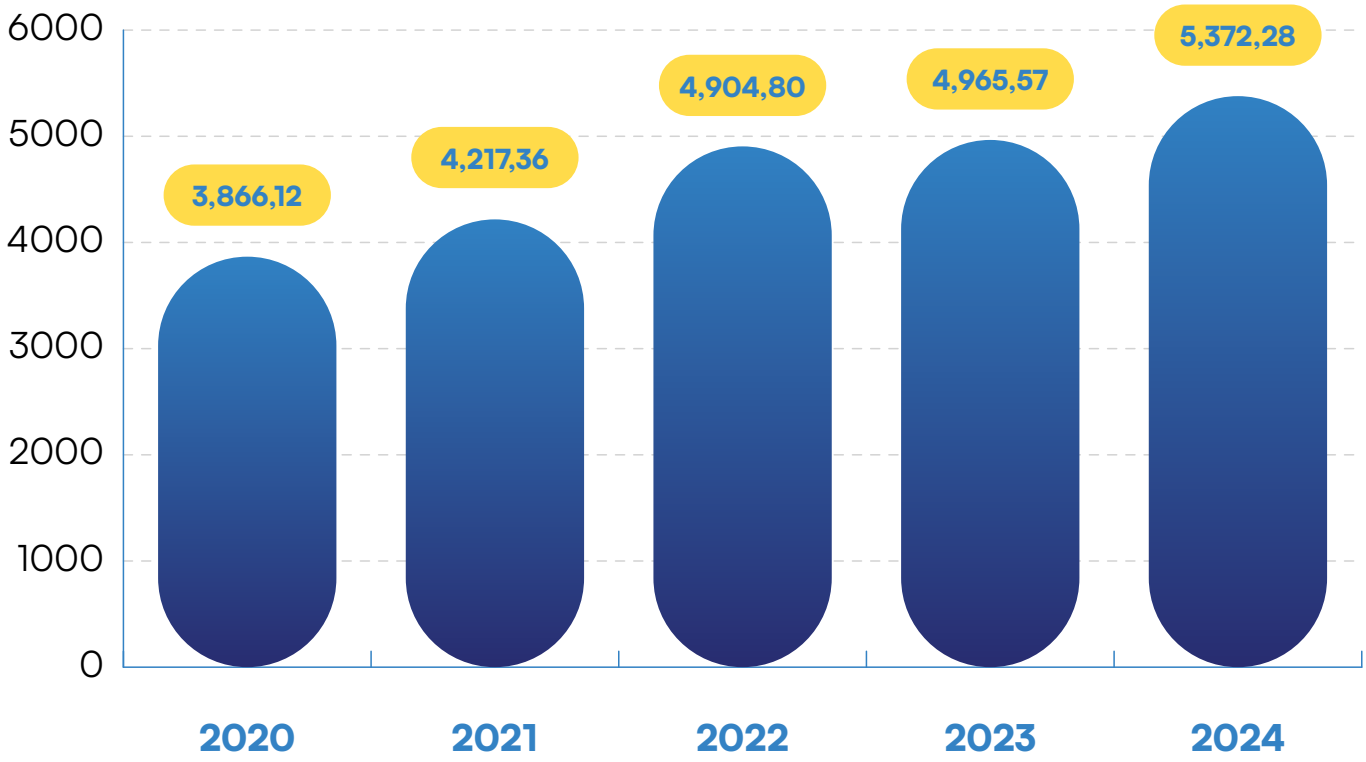
The Company's assets are divided into current assets and non-current assets, with the composition at the end of 2024 amounting to 70.24% and 29.76%, respectively. The Company's total assets in 2024 amounted to Rp 7.65 trillion, representing an increase of 6.74% or equivalent to Rp 483.86 billion compared to 2023, which stood at Rp 7.16 trillion. A detailed explanation of the Company's asset performance can be found below.

Aset Aset Lancar Current Assets

Aset Lancar Tahun 2023-2024
Current Assets for 2023-2024

Aset Lancar Current Assets	**2024** **(Rp-miliar)**	**2023** **(Rp-miliar)**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	268,06	158,01	110,05	69,65
Investasi Jangka Pendek Short Term Investment	112,75	107,76	4,99	4,63
Piutang Usaha - Bersih Trade Receivables - Net	1.370,51	1.506,63	(136,12)	(9,03)
Piutang Retensi - Bersih Retention Receivables - Net	107,57	195,80	(88,23)	(45,06)
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih Gross amount due from customers - Net	3.249,77	2.475,02	774,75	31,30
Piutang Sewa Pembiayaan Finance Lease Receivables	-	7,02	(7,02)	-
Piutang Lain-lain Other receivables	18,80	30,02	(11,22)	(37,38)
Persediaan Inventory	152,62	167,65	(15,03)	(8,97)
Uang Muka Advances	55,60	36,74	18,86	51,33
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	2,51	237,01	(234,50)	(98,94)
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses.	33,61	40,18	(6,57)	(16,35)
Aset Keuangan Lainnya Other finance asset	0,48	3,73	(3,25)	(87,13)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	5.372,28	4.965,57	406,71	8,19

Perkembangan Jumlah Aset Lancar 2020-2024 (Rp-miliar)
Current Assets 2020-2024 (Rp-billion)



Aset lancar Perusahaan di tahun 2024 sebesar Rp5,37 triliun, mengalami kenaikan 8,19% atau setara dengan Rp406,71 Miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,96 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan dari nilai kas yang bertambah dari penambahan kas dan setara kas, sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

The Company's current assets in 2024 amounted to Rp 5.37 trillion, an increase of 8.19% or equivalent to Rp 406.71 billion compared to 2023, which stood at Rp 4.96 trillion. This increase was primarily driven by the rise in cash value from the addition of cash and cash equivalents, as detailed below.

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas Perusahaan terdiri dari kas di bank dan deposito. Saldo kas dan setara kas Perusahaan di akhir tahun 2024 sebesar Rp268,06, meningkat 69,65% atau setara Rp110,05 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp158,01 miliar. Kenaikan ini disebabkan kenaikan dari nilai kas yang bertambah dari penambahan kas dan setara kas.

The Company's cash and cash equivalents consist of cash in banks and deposits. The balance of cash and cash equivalents at the end of 2024 amounted to Rp 268.06 billion, an increase of 69.65% or equivalent to Rp 110.05 billion compared to the balance at the end of 2023, which was Rp 158.01 billion. This increase was driven by the rise in cash value from the addition of cash and cash equivalents.

Bank yang Dibatasi Penggunaannya
Restricted Bank

Pada tahun 2024 tidak terdapat Aset lancar berupa Bank yang dibatasi penggunaannya.

In 2024, there were no current assets in the form of restricted bank.

Investasi Jangka Pendek
Short-Term Investments

Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka yang dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima Perusahaan dan entitas anak dari bank. Saldo investasi jangka pendek di akhir tahun 2024 sebesar Rp112,75 , meningkat 4,63% atau setara Rp4,99 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp107,76 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan deposito berjangka di CIMB Niaga.

Short-term investments consist of time deposits used as collateral for loans received by the Company and its subsidiaries from banks. The balance of short-term investments at the end of 2024 amounted to Rp 112.75 billion, an increase of 4.63% or equivalent to Rp 4.99 billion compared to the balance at the end of 2023, which was Rp 107.76 billion. This increase was due to the addition of time deposits at CIMB Niaga.

Piutang Usaha - Bersih
Trade Receivables - Net

Nilai piutang usaha - bersih Perusahaan hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp1,37 triliun, tercatat mengalami penurunan 9,03% atau setara Rp136,12 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp1,5 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya pencairan dari customer Perusahaan menggunakan rasio tingkat kolektibilitas piutang sebagaimana dapat dilihat pada bagian "Tingkat Kolektibilitas Piutang" dalam bab ini.

The value of the Company's trade receivables - net at the end of 2024 amounted to Rp 1.37 trillion, reflecting a decrease of 9.03% or equivalent to Rp 136.12 billion compared to the end of 2023, which was Rp 1.5 trillion. This decrease was due to collections from the Company's customers. The Company uses the receivables collectability ratio, which can be found in the "Receivables Collectability Ratio" section in this chapter.

Piutang Retensi - Bersih
Retention Receivables - Net

Piutang retensi merupakan pendapatan Perusahaan dan entitas anak yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan. Saldo Piutang Retensi - Bersih di akhir tahun 2024 mencapai Rp107,57 miliar, tercatat mengalami penurunan 45,06% atau setara Rp88,22 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp195,79 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pencairan dari customer.

Retention receivables represent the Company's revenue and that of its subsidiaries held by clients as a guarantee during the maintenance period. The balance of net retention receivables at the end of 2024 amounted to Rp 107.57 billion, reflecting a decrease of 45.06% or equivalent to Rp 88.22 billion compared to the balance at the end of 2023, which was Rp 195.79 billion. This decrease was due to collections from the Company's customers.

Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih
Gross amount due from customers - Net

Nilai tagihan bruto pemberi kerja - bersih hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp3,24 triliun, meningkat 31,3% atau setara Rp774,75 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp2,47 triliun. Kenaikan ini disebabkan terdapat kenaikan dari penjualan berbanding lurus dengan kenaikan tagihan bruto.

The value of net gross amount due from customers at the end of 2024 amounted to Rp 3.24 trillion, an increase of 31.3% or equivalent to Rp 774.75 billion compared to the end of 2023, which was Rp 2.47 trillion. This increase was due to a rise in sales, which directly corresponds to the increase in gross billings.

Piutang Sewa Pembiayaan
Finance Lease Receivables

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai penyewa untuk alat berat pada proyek hauling milik PT Weda Bay Nickel. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 4 (empat) tahun. Di akhir tahun 2024, Perusahaan tidak lagi mencatat adanya saldo piutang sewa pembiayaan jangka pendek, dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp7,02 miliar. Hal ini disebabkan sudah cairnya piutang tersebut dari owner.

The Company entered into a finance lease agreement as the lessee for heavy equipment on the hauling project owned by PT Weda Bay Nickel. The lease term is 4 (four) years. At the end of 2024, the Company no longer recorded any balance for short-term finance lease receivables, compared to a balance of Rp 7.02 billion at the end of 2023. This was due to the settlement of these receivables from the owner.

Piutang Lain-lain
Other Receivables

Piutang lain-lain jangka pendek Perusahaan terdiri dari piutang ke JO dan KSO . Nilai piutang lain-lain jangka pendek hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp18,8 miliar, mengalami penurunan 37,38% atau setara Rp11,22 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp30,02 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pencairan dari KSO JO.

The Company's short-term other receivables consist of receivables from Joint Operations (JO) and Operational Cooperation (KSO). The value of other short-term receivables at the end of 2024 amounted to Rp 18.8 billion, a decrease of 37.38% or equivalent to Rp 11.22 billion compared to the end of 2023, which was Rp 30.02 billion. This decrease was due to collections from the KSO and JO.

Persediaan
Inventories

Akun persediaan merupakan persediaan bahan untuk pembuatan bekisting kolom, bekisting dinding dan bahan *batching plant* serta suku cadang. Saldo Persediaan Perusahaan di akhir tahun 2024 mencapai Rp152,62, tercatat mengalami penurunan 8,97% atau setara Rp15,03 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp167,65 miliar. Penurunan ini disebabkan telah dipakainya persediaan tersebut untuk produksi.

The inventory account consists of materials for the production of column formworks, wall formworks, batching plant materials, and spare parts. The Company's inventory balance at the end of 2024 amounted to Rp 152.62 billion, reflecting a decrease of 8.97% or equivalent to Rp 15.03 billion compared to the balance at the end of 2023, which was Rp 167.65 billion. This decrease was due to the utilization of the inventory for production.

Uang Muka
Advances

Nilai uang muka hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp55,60, meningkat 51,33% atau setara Rp18,86 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp36,74 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya biaya persiapan proyek pada LMA

The value of advances at the end of 2024 amounted to Rp 55.60 billion, an increase of 51.33% or equivalent to Rp 18.86 billion compared to the end of 2023, which was Rp 36.74 billion. This increase was due to project preparation costs for the LMA.

Pajak Dibayar di Muka
Prepaid Taxes

Saldo pajak dibayar di muka di akhir tahun 2024 mencapai Rp2,51 miliar , tercatat mengalami penurunan 98,94% atau setara Rp234,51 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp237,01 miliar. Penurunan ini disebabkan set off antara uang muka dengan hutang pajak oleh auditor .

The balance of prepaid taxes at the end of 2024 amounted to Rp 2.51 billion, reflecting a decrease of 98.94% or equivalent to Rp 234.51 billion compared to the balance at the end of 2023, which was Rp 237.01 billion. This decrease was due to the set-off between the advance payments and tax liabilities by the auditor.

Biaya Dibayar di Muka
Prepaid Expenses

Nilai biaya dibayar di muka hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp33,61, mengalami penurunan 16,35% atau setara Rp6,57 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp40,18 miliar. Penurunan ini disebabkan telah habis masa manfaat dari asuransi alat.

The value of prepaid expenses at the end of 2024 amounted to Rp 33.61 billion, a decrease of 16.35% or equivalent to Rp 6.57 billion compared to the end of 2023, which was Rp 40.18 billion. This decrease was due to the expiration of the useful life of the equipment insurance.

Aset Keuangan Lainnya
Other Finance Asset

Nilai asset keuangan lainnya di akhir tahun 2024 mencapai Rp480 juta , tercatat mengalami penurunan 87,13% atau setara Rp3,25 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp3,73 miliar. Penurunan ini disebabkan asset tersebut sudah di amortisasi.

The value of other finance assets at the end of 2024 amounted to Rp 480 million, reflecting a decrease of 87.13% or equivalent to Rp 3.25 billion compared to the balance at the end of 2023, which was Rp 3.73 billion. This decrease was due to the amortization of these assets.

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets

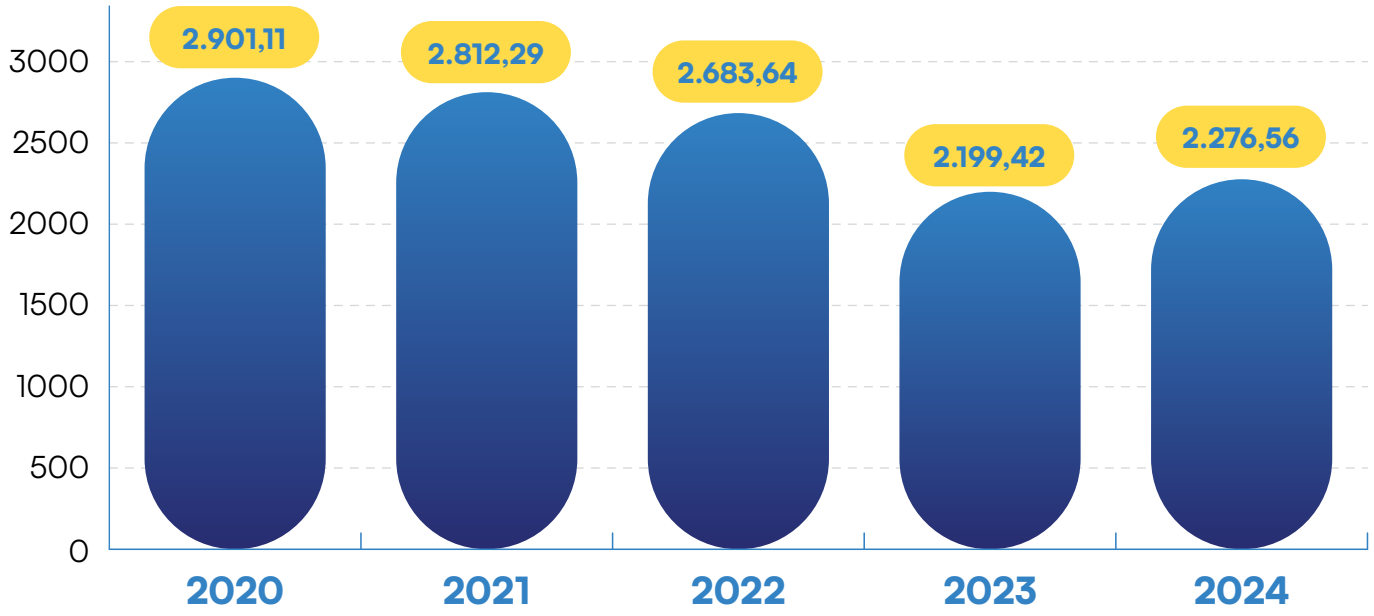
Aset Tidak Lancar Tahun 2023-2024
Non-Current Assets 2023-2024

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Piutang Sewa Pembiayaan Finance lease receivables	-	5,04	(5,04)	-
Investasi pada Ventura Bersama Investment in joint venture	7,81	11,67	(3,86)	(33,08)
Aset Hak Guna - Bersih Right-of-use assets - Net	784,92	431,89	353,03	81,74

Aset Tetap - Bersih Fixed assets - Net	1.230,44	1.500,70	(270,26)	(18,01)
Goodwill	246,86	246,86	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Intangible assets	6,53	3,25	3,28	100,92
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	2.276,56	2.199,42	77,14	3,51

Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar 2020-2024 (Rp-miliar)

Total Non-Current Assets 2020-2024 (Rp billion)



Jumlah aset tidak lancar Perusahaan di tahun 2024 sebesar Rp2,27 triliun, mengalami kenaikan 3,51% atau setara dengan Rp77,14 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,19 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan capex , sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

The Company's non-current assets in 2024 amounted to Rp2.27 trillion, an increase of 3.51% or equivalent to Rp77.14 billion compared to 2023, which stood at Rp2.19 trillion. This increase was mainly due to the addition of capex, as detailed below.

Piutang Sewa Pembiayaan

Finance Lease Receivables

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai penyewa untuk alat berat pada proyek *hauling* milik PT Weda Bay Nickel. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 4 (empat) tahun. Tidak ada Saldo piutang sewa pembiayaan jangka panjang di akhir tahun 2024, tercatat mengalami penurunan 100% atau setara Rp5,04 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp5,04 miliar. Penurunan ini disebabkan sudah cairnya piutang tersebut dari owner.

The Company entered into a finance lease agreement as a lessee for heavy equipment used in the hauling project owned by PT Weda Bay Nickel. The lease term is 4 (four) years. There were no long-term finance lease receivable balances at the end of 2024, recording a 100% decrease or equivalent to Rp5.04 billion compared to the balance at the end of 2023, which stood at Rp5.04 billion. This decrease was due to the receivables having been settled by the owner.

Piutang Lain-lain
Other Receivables

Piutang dari KSO merupakan biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup dan akan ditagihkan kepada KSO. Piutang lain-lain kepada PT Selama Indah Dua merupakan pinjaman yang diberikan oleh LMA, entitas anak, untuk membiayai operasional PT Selama Indah Dua. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 9,75% per tahun dan telah diperpanjang dengan addendum No. 003/ADD-III/PPM/LMA-SI/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 26 Mei 2025. Piutang pegawai merupakan kebijakan pemberian kredit karyawan LMA mengacu pada surat edaran LMA No. 663/LMA/HRD/EM/XI/2020 perihal pinjaman kredit karyawan dengan masa pinjaman satu tahun.

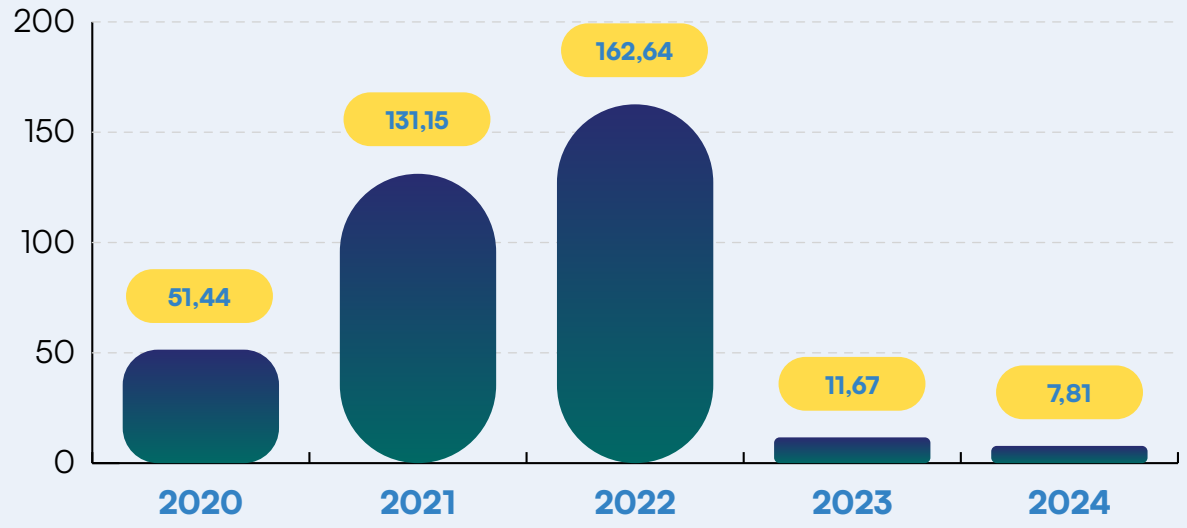
Receivables from KSO represent expenses that were initially paid by the Group and will be billed to the KSO. Other receivables from PT Selama Indah Dua represent a loan provided by LMA, a subsidiary, to finance the operations of PT Selama Indah Dua. The loan bears interest at 9.75% per annum and has been extended through Addendum No. 003/ADD-III/PPM/LMA-SI/II/2024 dated February 2, 2024, until May 26, 2025. Employee receivables refer to the employee credit policy of LMA, based on LMA Circular Letter No. 663/LMA/HRD/EM/XI/2020 regarding employee loan credits, with a loan term of one year.

Investasi pada Ventura Bersama
Investment in Joint Ventures

Perusahaan memiliki Investasi pada ventura bersama yaitu Kerja Sama Operasi (KSO) PPRE — RPJ, KSO PP Presisi — Duta Pratama Indah, KSO PT PPRE — Sarana, dan KSO PP Presisi — Yalapersada. Nilai investasi pada ventura bersama hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp7,81 miliar, mengalami penurunan 33,08% atau setara Rp3,86 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp11,67 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pencairan dari proyek JO dan KSO.

The Company holds investments in joint venture, namely the Operational Cooperation (KSO) of PPRE — RPJ, KSO PP Presisi — Duta Pratama Indah, KSO PT PPRE — Sarana, and KSO PP Presisi — Yalapersada. The value of investments in joint ventures as of the end of 2024 reached Rp7.81 billion, a decrease of 33.08% or equivalent to Rp3.86 billion compared to the end of 2023, which stood at Rp11.67 billion. This decrease was due to disbursements from JO and KSO projects.

Perkembangan Nilai Investasi pada Ventura Bersama 2020-2024 (Rp-miliar)
Investment in joint venture 2020-2024 (IDR billion)



Aset Hak Guna-Bersih
Right-of-Use Assets - Net

Perusahaan dan entitas anak menyewa beberapa aset termasuk kendaraan, alat berat dan *tower crane*. Masa sewa rata-rata adalah 3 tahun. Perusahaan memiliki opsi untuk membeli peralatan manufaktur tertentu dengan jumlah nominal pada akhir masa sewa. Kewajiban Perusahaan dijamin dengan hak milik pesewa atas aset yang disewa untuk sewa tersebut. Saldo aset hak guna-bersih di akhir tahun 2024 mencapai Rp784,92 miliar , tercatat meningkat 81,74% atau setara Rp353,03 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp431,89 miliar. Kenaikan ini disebabkan Penambahan capex.

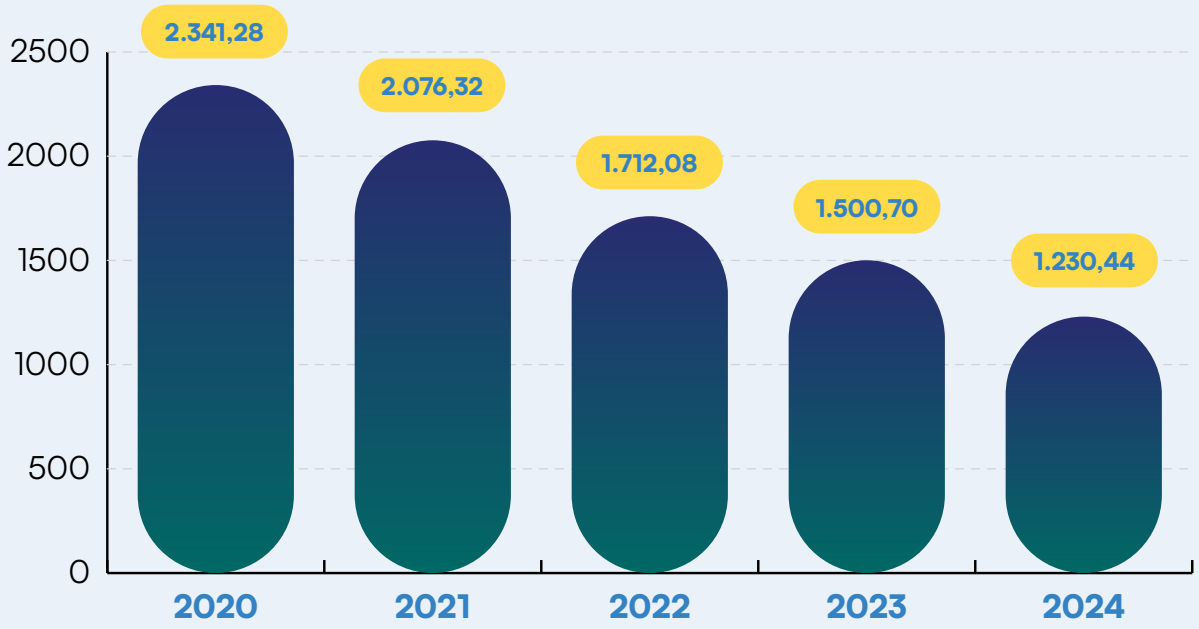
The Company and its subsidiaries lease several assets, including vehicles, heavy equipment, and tower cranes. The average lease term is 3 years. The Company has the option to purchase certain manufacturing equipment for a nominal amount at the end of the lease term. The Company's obligations are secured by the lessor's ownership rights to the leased assets. The balance of right-of-use assets - net at the end of 2024 reached Rp784.92 billion, an increase of 81.74% or equivalent to Rp353.03 billion compared to the balance at the end of 2023, which stood at Rp431.89 billion. This increase was due to the addition of capex.

Aset Tetap-Bersih
Fixed Assets - Net

Nilai aset tetap-bersih hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp1,23 triliun, mengalami penurunan 18,01% atau setara Rp270,26 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp1,5 triliun. Penurunan ini disebabkan sudah habisnya nilai buku asset tetap dan divestasi .

The value of Fixed assets - Net as of the end of 2024 reached Rp1.23 trillion, a decrease of 18.01% or equivalent to Rp270.26 billion compared to the end of 2023, which stood at Rp1.5 trillion. This decrease was due to the full depreciation of fixed assets and divestments.

Perkembangan Aset Tetap 2019-2023 (Rp-miliar)
Fixed Asset 2019-2023 (IDR billion)



Goodwill

Merupakan *goodwill* atas transaksi kombinasi bisnis entitas anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi, pada tahun 2017. Saldo *goodwill* di akhir tahun 2024 mencapai Rp246,86 miliar , tercatat sama dengan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp246,86 miliar. Hal ini disebabkan tidak ada penurunan nilai *goodwill* dari kjpp. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas *goodwill* tersebut di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang mengharuskan Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai atas *goodwill*, selain dari pengujian tahunan yang diungkapkan pada Laporan Keuangan teraudit.

This represents goodwill arising from the business combination transaction of the subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi, in 2017. The goodwill balance at the end of 2024 reached Rp246.86 billion, remaining the same as the balance at the end of 2023, which also stood at Rp246.86 billion. This was due to no impairment of goodwill based on the appraisal report. Management believes that there were no indications of impairment of the above goodwill for the years ended December 31, 2024, and 2023 that would require the Company to conduct an impairment test, aside from the annual test disclosed in the audited Financial Statements.

Aset Tidak Berwujud
Intangible Assets

Aset tidak berwujud Perusahaan berupa perangkat lunak dengan kepemilikan lisensi resmi dari SAP, Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant, Autocad dan Visio. Nilai aset tidak berwujud hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp6,53 miliar, meningkat 100,92% atau setara Rp3,28 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp3,25 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan software baru.

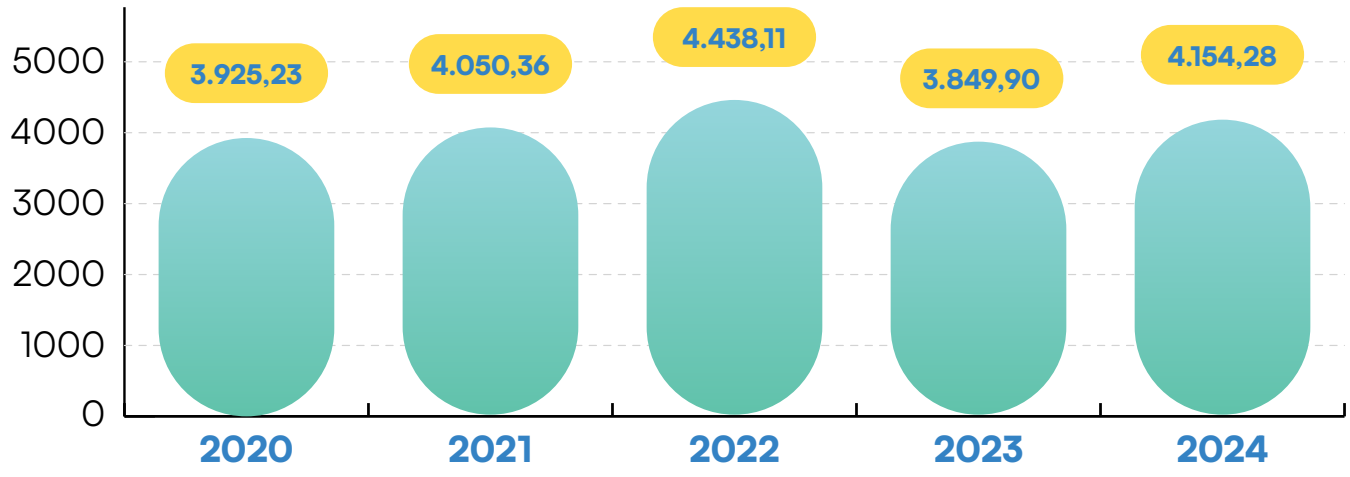
The Company's intangible assets consist of software with official licenses from SAP, Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant, Autocad, and Visio. The value of intangible assets as of the end of 2024 reached Rp6.53 billion, an increase of 100.92% or equivalent to Rp3.28 billion compared to the end of 2023, which stood at Rp3.25 billion. This increase was due to the addition of new software.

Liabilitas
Liabilities

Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp4,15 triliun, mengalami kenaikan 7,91% dibandingkan tahun tahun 2023 sebesar Rp3,85 triliun.

The Company's total liabilities in 2024 amounted to Rp4.15 trillion, an increase of 7.91% compared to 2023, which stood at Rp3.85 trillion.

Perkembangan Jumlah Aset 2020-2024 (Rp-miliar)
Total Liabilities 2020-2024 (Rp billion)



Jumlah Liabilitas Tahun 2023-2024
Total Liabilities for 2023-2024

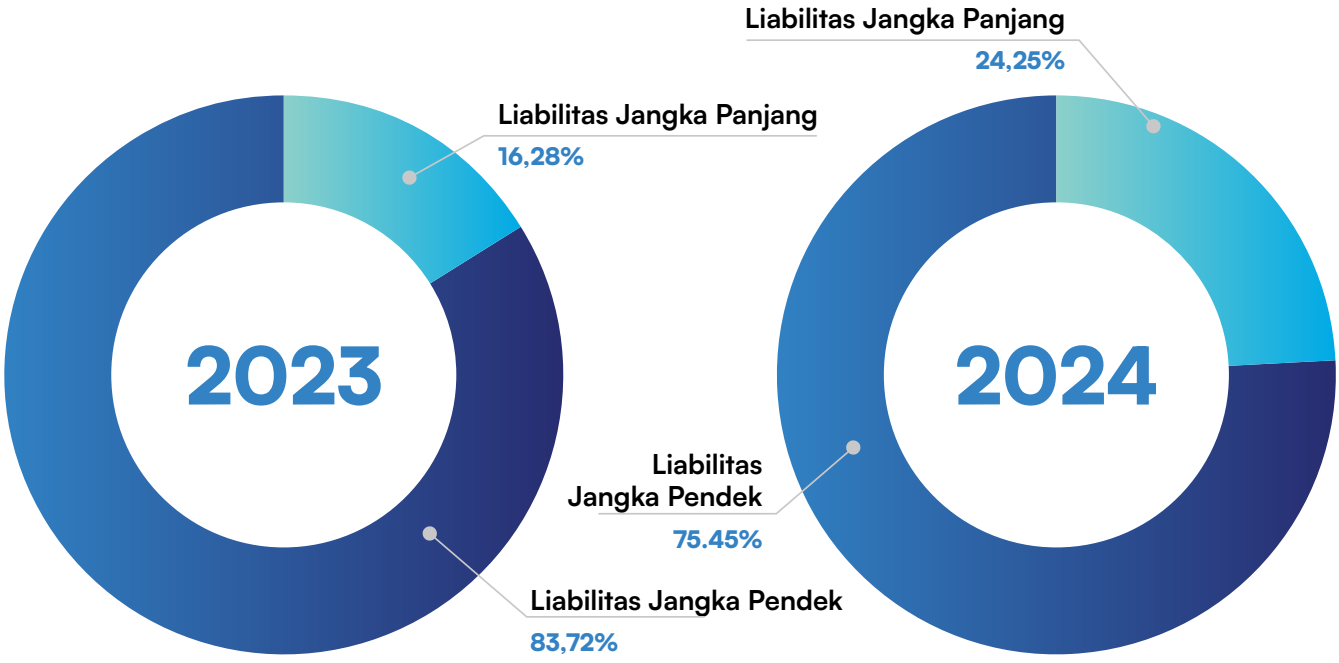
Liabilitas Liabilities	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.134,26	75,45	3.223,01	83,72	(88,75)	(2,75)	↓
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.020,02	24,55	626,89	16,28	393,13	62,71	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.154,28	100	3.849,90	100,00	304,38	7,91	↑

Liabilitas Perusahaan terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Komposisi liabilitas Perusahaan pada akhir tahun 2024 terdiri dari 74,45% liabilitas jangka pendek dan 24,55% liabilitas jangka panjang.

Jumlah liabilitas Perusahaan di tahun 2024 mengalami kenaikan 7,91% atau setara dengan Rp304,38 miliar, dari Rp3,85 triliun di tahun 2023 menjadi Rp4,15 triliun di tahun 2024. Penjelasan rinci atas kinerja liabilitas Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

The Company's liabilities consist of current liabilities and non-current liabilities. As of the end of 2024, the composition of the Company's liabilities was 74.45% current liabilities and 24.55% non-current liabilities.

The Company's total liabilities in 2024 increased by 7.91%, equivalent to IDR 304.38 billion, from IDR 3.85 trillion in 2023 to IDR 4.15 trillion in 2024. A detailed explanation of the Company's liability performance is provided below.

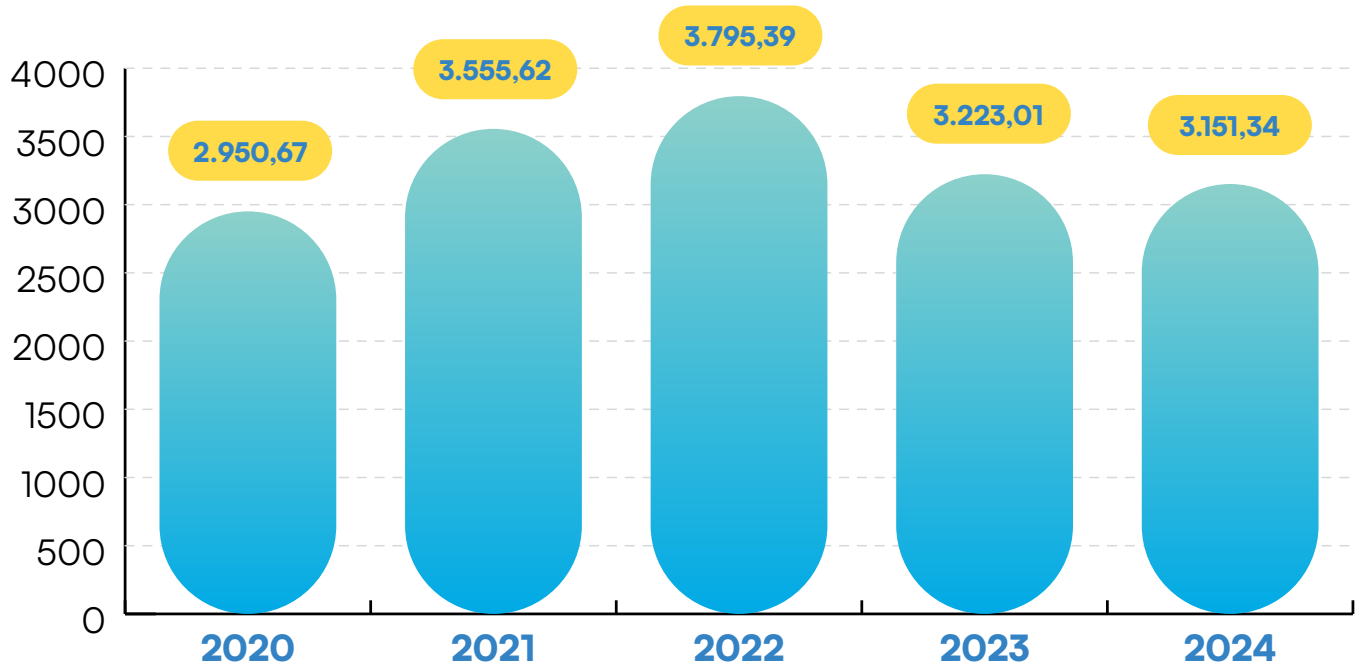


Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2023-2024
Current Liabilities 2023-2024

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2024 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Utang Usaha Trade payables	1.695,03	1.112,30	582,73	52,39
Uang Muka Pemberi Kerja Advances from project owner	377,23	41,77	335,46	803,11
Utang Lain-Lain Other payables	101,47	102,81	(1,34)	(1,30)
Utang Pembelian Aset Tetap Property and equipment purchase payables	-	78,12	(78,12)	-
Utang Pajak Taxes payable	46,54	327,20	(280,66)	(85,78)
Utang Bank Jangka Pendek Short Term Bank Loan	566,77	1.017,52	(450,75)	(44,30)
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun Current maturity of long term - bank loans	168,20	187,13	(18,93)	(10,12)
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun Current maturity of long term - liabilities	77,36	356,15	(278,79)	(78,28)
Utang Obligasi Bond Payables	101,66	-	101,66	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	3.134,26	3.223,01	(88,75)	(2,75)

Perkembangan Liabilitas Jangka Pendek 2020-2024 (Rp-miliar)
Current Liabilities 2020-2024 (Rp billion)



Per 31 Desember 2024, Perusahaan berhasil mencatatkan liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,13 triliun, mengalami penurunan 2,75% atau setara dengan Rp88,75 miliar dibandingkan liabilitas jangka pendek tahun 2023 sebesar Rp3,22 triliun. Penurunan ini disebabkan pembayaran liabilitas utang jangka pendek yang jatuh temp , sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

As of December 31, 2024, the Company recorded current liabilities of Rp3.13 trillion, a decrease of 2.75% or equivalent to Rp88.75 billion compared to current liabilities in 2023, which stood at Rp3.22 trillion. This decrease was due to the settlement of maturing short-term debt, as detailed below.

Utang Usaha
Trade Payable

Saldo utang usaha di akhir tahun 2024 mencapai Rp1,69 triliun, tercatat mengalami peningkatan 52,39% atau setara Rp582,73 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp1,11 triliun. Kenaikan ini disebabkan Adanya persiapan proyek baru di PT LMA.

The trade payable balance at the end of 2024 reached Rp1.69 trillion, recording an increase of 52.39% or equivalent to Rp582.73 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp1.11 trillion. This increase was due to preparations for a new project at PT LMA.

Uang Muka Pemberi Kerja
Advances from project owner

Nilai uang muka pemberi kerja hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp377,23 miliar, meningkat 803,11% atau setara Rp335,46 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp41,77 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya uang muka dari owner di PT LMA.

The value of advances from project owner as of the end of 2024 reached Rp377.23 billion, an increase of 803.11% or equivalent to Rp335.46 billion compared to the end of 2023 of Rp41.77 billion. This increase was due to advances from the owner at PT LMA.

Utang Lain-Lain
Other Payables

Saldo utang lain-lain di akhir tahun 2024 mencapai Rp101.47 miliar , tercatat mengalami penurunan 1,30% atau setara Rp1,34 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp102,81 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran ke vendor

The other payables balance at the end of 2024 reached Rp101.47 billion, recording a decrease of 1.30% or equivalent to Rp1.34 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp102.81 billion. This decrease was due to payments to vendors.

Utang Pajak
Taxes Payable

Nilai utang pajak hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp46,54 miliar, mengalami penurunan 85,78% atau setara Rp280,66 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp327,20 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran pph ke direktorat pajak.

The taxes payable balance as of the end of 2024 reached Rp46.54 billion, a decrease of 85.78% or equivalent to Rp280.66 billion compared to the end of 2023 of Rp327.20 billion. This decrease was due to the payment of income tax to the tax directorate.

Utang Bank Jangka Pendek
Short Term Bank Loan

Saldo utang bank jangka pendek di akhir tahun 2024 mencapai Rp566,77 miliar, tercatat mengalami penurunan 44,30% atau setara Rp450,75 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo ke perbankan.

The short term bank loan balance at the end of 2024 reached Rp566.77 billion, recording a decrease of 44.30% or equivalent to Rp450.75 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp1.01 trillion. This decrease was due to the repayment of matured loans to the banks.

Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun
Current maturity of long term - bank loans

Nilai utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp168,20 mengalami penurunan 10,12% atau setara Rp18,93 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp187,13 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo ke perbankan.

The value of long-term bank loans due within 1 (one) year as of the end of 2024 reached Rp168.20 billion, a decrease of 10.12% or equivalent to Rp18.93 billion compared to the end of 2023 of Rp187.13 billion. This decrease was due to the repayment of matured loans to the banks.

Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun
Current maturity of long term — liabilities

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun termasuk liabilitas sewa. Saldo Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun di akhir tahun 2024 mencapai Rp77,36, tercatat mengalami penurunan 78,28% atau setara Rp278,79 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp356,15 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo.

Long-term liabilities due within 1 (one) year include lease liabilities. The balance of Current maturity of long term — liabilities at the end of 2024 reached Rp77.36 billion, recording a decrease of 78.28% or equivalent to Rp278.79 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp356.15 billion. This decrease was due to the repayment of matured liabilities.

Utang Obligasi
Bonds Payable

Utang Obligasi di akhir tahun 2024 tercatat Rp101,66 miliar. Utang Obligasi ini disebabkan pencairan obligasi di tahun 2022.

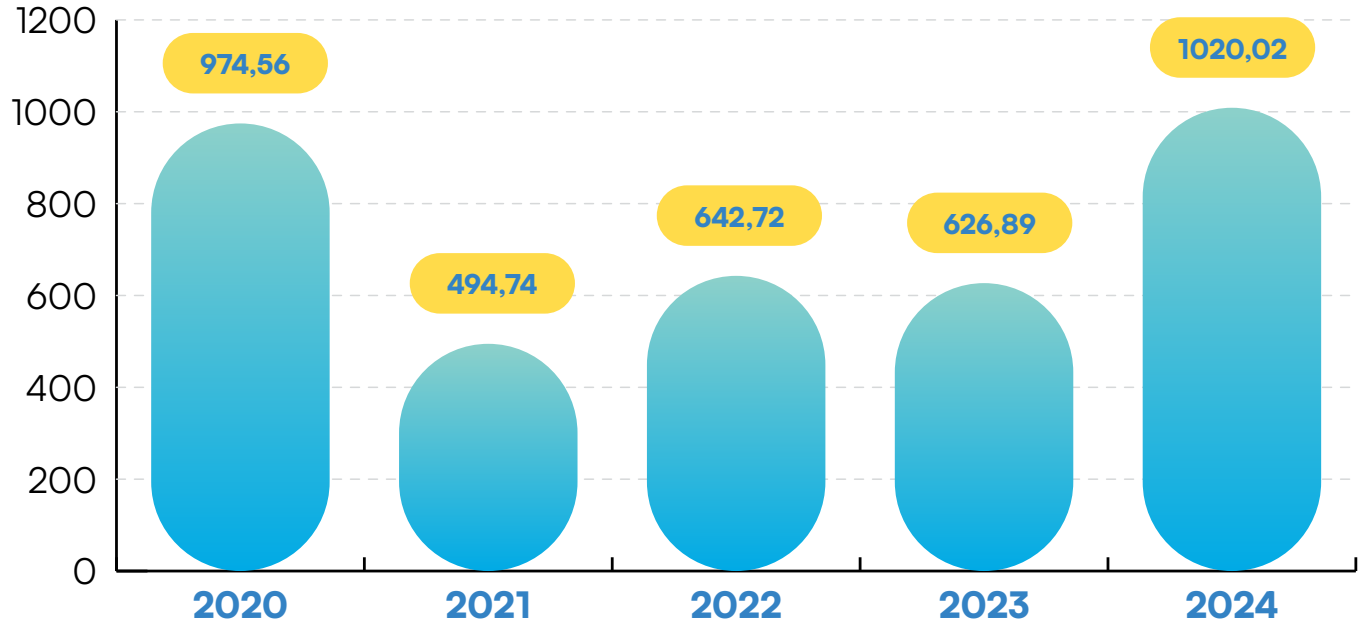
The bond payables at the end of 2024 were recorded at Rp101.66 billion. These bond payables resulted from the bond issuance in 2022.

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2023-2024
Non-Current Liabilities 2023-2024

Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	2024 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefit Liabilities	19,87	17,21	2,66	15,46
Utang Bank Jangka Panjang-Bersih Long Term Bank Loans - Net	43,69	117,20	(73,51)	(62,72)
Liabilitas Jangka Panjang-Bersih Long Term Liabilities-Net	855,55	290,24	565,31	194,77
Utang Obligasi Bonds Payable	100,91	202,25	(101,34)	(50,11)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	1020,02	626,89	393,13	62,71

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2020-2024 (Rp-miliar)
Total Non-Current Liabilities 2020-2024 (IDR billion)



Jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan di tahun 2024 sebesar Rp1,02 triliun, mengalami kenaikan 62,71% atau setara dengan Rp393 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2023 sebesar Rp626,89 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya perpindahan utang jangka pendek ke jangka panjang , sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

The Company's total non-current liabilities in 2024 amounted to Rp1.02 trillion, an increase of 62.71% or equivalent to Rp393 billion compared to the total non-current liabilities in 2023 of Rp626.89 billion. This increase was due to the reclassification of short term debt to long term debt, as detailed below.

Liabilitas Imbalan Pascakerja
Post-Employment Benefit Liabilities

Saldo liabilitas imbalan pascakerja di akhir tahun 2024 mencapai Rp19,87 miliar, tercatat mengalami peningkatan 15,46% atau setara Rp2,66 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp17,21 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya Cadangan untuk pensiunan yang dihitung Kembali oleh aktuaris.

The balance of post-employment benefit liabilities at the end of 2024 reached Rp19.87 billion, recording an increase of 15.46% or equivalent to Rp2.66 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp17.21 billion. This increase was due to the pension reserves recalculated by the actuary.

Utang Bank Jangka Panjang - Bersih
Long Term Bank Loans - Net

Nilai utang bank jangka panjang - bersih hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp43,69 miliar, mengalami penurunan 62,72% atau setara Rp73,51 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp117,20 miliar. Penurunan ini disebabkan pembayaran Utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo

The value of net long-term bank loans as of the end of 2024 reached Rp43.69 billion, recording a decrease of 62.72% or equivalent to Rp73.51 billion compared to the end of 2023 of Rp117.20 billion. This decrease was due to the repayment of matured long-term loans.

Liabilitas Jangka Panjang - Bersih
Long Term Liabilities-Net

Liabilitas jangka panjang - bersih termasuk liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun dan liabilitas sewa. Saldo liabilitas jangka panjang - bersih di akhir tahun 2024 mencapai Rp855,55 miliar , tercatat mengalami peningkatan 194,77% atau setara Rp565,31 mliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp290,24 miliar. Kenaikan ini disebabkan peningkatan CAPEX melalui hutang leasing

Net long term liabilities include long term liabilities after deducting the portion due within 1 (one) year and lease liabilities. The balance of net long-term liabilities at the end of 2024 reached Rp855.55 billion, recording an increase of 194.77% or equivalent to Rp565.31 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp290.24 billion. This increase was due to the reclassification from short-term debt.

Utang Obligasi
Bonds Payable

Nilai utang obligasi hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp100,91 miliar, mengalami penurunan 50,11% atau setara Rp101,34 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp202,25 miliar. Penurunan ini disebabkan berpindahnya utang obligasi ke jangka pendek karena akan jatuh tempo di 2025.

The value of bonds payable as of the end of 2024 reached Rp100.91 billion, recording a decrease of 50.11% or equivalent to Rp101.34 billion compared to the end of 2023 of Rp202.25 billion. This decrease was due to the reclassification of bonds payable to current liabilities as it is due in 2025.

Ekuitas

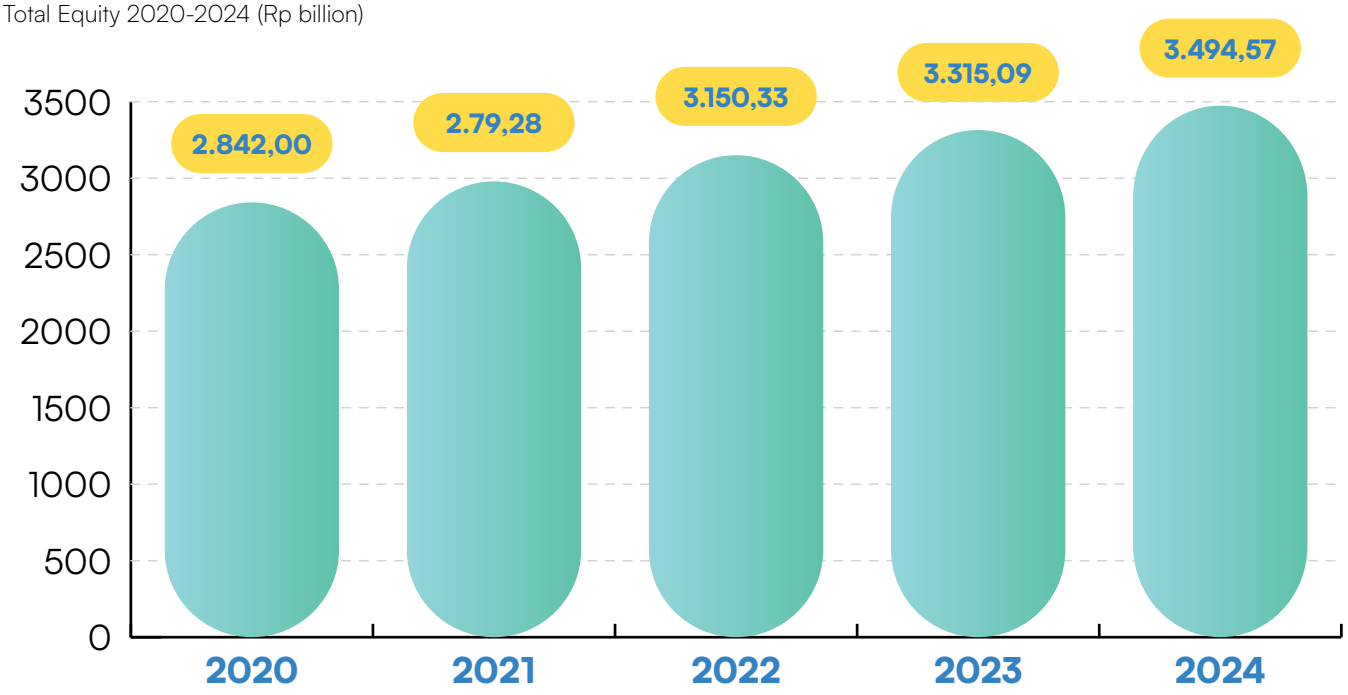
Equity

Jumlah ekuitas Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp3,49 triliun, mengalami kenaikan 5,41% dibandingkan tahun tahun 2023 sebesar Rp3,31 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2020-2024, jumlah ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 5,30%"

The Company's total equity in 2024 reached Rp3.49 trillion, recording an increase of 5.41% compared to 2023, which was Rp3.31 trillion. The Compound Annual Growth Rate (CAGR) of the Company's equity from 2020 to 2024 was 5.30%.

Perkembangan Jumlah Aset 2020-2024 (Rp-miliar)

Total Equity 2020-2024 (Rp billion)



Ekuitas Tahun 2023-2024

Equity in 2023-2024

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)		
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity attributable to owners of the parent entity					
Modal Saham Share capital	1.022,43	1.022,43	0,00	0,00	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	749,56	749,56	0,00	0,00	-
Saham Treasury Treasury Shares	(18,63)	(18,63)	0,00	0,00	-

Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	51,22	46,09	5,13	11,13
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	101,19	97,18	4,01	4,13
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	618,99	532,66	86,33	16,21
SubJumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Subtotal Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	2.524,76	2.429,29	95,47	3,93
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali Equity Attributable to Non-Controlling Interests	969,81	885,80	84,01	9,48
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.494,57	3.315,09	179,48	5,41

Di tahun 2024, Perusahaan membukukan nilai ekuitas sebesar Rp3,49 triliun, mengalami kenaikan 5,41% atau setara dengan Rp179,48 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.31 triliun. Hal ini terutama disebabkan kenaikan laba sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

In 2024, the Company recorded equity of Rp3.49 trillion, an increase of 5.41% or equivalent to Rp179.48 billion compared to 2023, which was Rp3.31 trillion. This increase was primarily due to the rise in profits, as detailed below.

Modal Saham
Share Capital

Modal saham adalah modal yang disetorkan oleh pemilik modal/pemegang saham Perusahaan. Saldo modal saham di akhir tahun 2024 mencapai Rp1.02 triliun, tercatat sama dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp1,02 triliun.

Share capital is the capital contributed by the Company's owners/shareholders. The share capital balance at the end of 2024 reached Rp1.02 trillion, which is the same as the balance at the end of 2023, amounting to Rp1.02 trillion.

Tambahan Modal Disetor
Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor adalah selisih lebih harga saham saat penerbitan dibandingkan dengan nilai nominal harga saham per lembar. Saldo tambahan modal disetor hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp749,56 miliar, mempunyai nilai yang sama dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp749,56 miliar.

Additional paid-in capital is the difference between the issuance price of shares and their nominal value per share. The balance of additional paid-in capital as of the end of 2024 reached Rp749.56 billion, the same as the balance at the end of 2023, which was also Rp749.56 billion.

Saham Treasury
Treasury shares

Pada tahun 2020, Perusahaan membeli kembali saham melalui Bursa Efek Indonesia sebesar 108.058.700 lembar saham dengan nilai perolehan sebesar Rp18,63 miliar yang dicatat sebagai saham treasuri yang merupakan pengurang ekuitas. Nilai saham treasury hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp18,63 miliar serupa dengan nilai akhir tahun 2023 sebesar Rp18,63 miliar.

In 2020, the Company repurchased shares through the Indonesia Stock Exchange amounting to 108,058,700 shares with a total acquisition value of Rp18.63 billion, which was recorded as treasury shares, a reduction in equity. The value of treasury shares as of the end of 2024 reached Rp18.63 billion, the same as the value at the end of 2023, which was also Rp18.63 billion.

Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari selisih nilai atas revaluasi aset tetap. Saldo penghasilan komprehensif lain di akhir tahun 2024 mencapai Rp51,22 miliar, tercatat mengalami peningkatan 11,13% atau setara Rp5,13 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp46,09 miliar. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya revaluasi asset tetap.

Other comprehensive income consists of the difference in the revaluation of fixed assets. The balance of other comprehensive income at the end of 2024 reached Rp51.22 billion, recording an increase of 11.13% or equivalent to Rp5.13 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp46.09 billion. This increase was due to the higher revaluation of fixed assets.

Saldo Laba
Retained Earnings

Saldo laba adalah akumulasi jumlah laba bersih yang telah dibukukan dikurangi dengan dividen yang telah dibayarkan yang menjadi porsi pemilik entitas induk. Saldo laba terdiri dari saldo laba yang ditentukan penggunaannya, serta saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Retained earnings are the accumulated amount of net profit that has been recorded, minus the dividends that have been paid to the parent entity's shareholders. Retained earnings consist of the appropriated retained earnings and the unappropriated retained earnings.

Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya

Saldo laba yang ditentukan penggunaannya adalah akumulasi jumlah laba bersih yang wajib dicadangkan oleh Perusahaan senilai 5% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan.

Saldo laba yang ditentukan penggunaannya tahun 2024 sebesar Rp101,19 miliar, mengalami kenaikan 4,13% atau setara dengan Rp4,01 miliar dibandingkan saldo laba yang ditentukan penggunaannya tahun 2023 sebesar Rp97,18 miliar. Hal ini terutama disebabkan adanya laba yang dicatat perusahaan.

Appropriated Retained Earnings

Appropriated retained earnings are the accumulated amount of net profit that must be reserved by the Company, amounting to 5% of the net profit attributable to the owner of parent entity, in accordance with the decision of the Annual General Meeting of Shareholders.

The appropriated retained earnings in 2024 amounted to Rp101.19 billion, recording an increase of 4.13% or equivalent to Rp4.01 billion compared to the appropriated retained earnings in 2023, which was Rp97.18 billion. This increase was primarily due to the profits recorded by the Company.

Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya adalah akumulasi jumlah laba bersih telah dibukukan dikurangi dengan pencadangan saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan dikurangi dengan dividen yang telah dibayarkan.

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tahun 2024 sebesar Rp 618,99 miliar, mengalami kenaikan 16,21% atau setara dengan Rp86,33 miliar dibandingkan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tahun 2023 sebesar Rp532,66 miliar. Hal ini terutama disebabkan adanya laba yang dicatat perusahaan.

Unappropriated Retained Earnings

Unappropriated retained earnings are the accumulated amount of net profit that has been recorded, minus the appropriated retained earnings and the dividends that have been paid.

The unappropriated retained earnings in 2024 amounted to Rp618.99 billion, recording an increase of 16.21% or equivalent to Rp86.33 billion compared to the unappropriated retained earnings in 2023, which was Rp532.66 billion. This increase was primarily due to the profits recorded by the Company.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah jumlah ekuitas yang dimiliki induk Perusahaan yang muncul akibat adanya laporan keuangan konsolidasi. Saldo ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di akhir tahun 2024 mencapai Rp2,52 triliun , tercatat mengalami peningkatan 3,93% atau setara Rp95,47 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2023 sebesar Rp2,42 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya laba yang dicatat perusahaan.

Equity attributable to owners of the parent entity is the amount of equity owned by the parent company that arises from the consolidated financial statements. The balance of equity attributable to the parent entity's owners at the end of 2024 reached Rp2.52 trillion, recording an increase of 3.93% or equivalent to Rp95.47 billion compared to the balance at the end of 2023 of Rp2.42 trillion. This increase was due to the profits recorded by the Company.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah jumlah ekuitas yang dimiliki kepentingan non pengendali yaitu pemilik selain induk Perusahaan yang muncul akibat adanya laporan keuangan konsolidasi.

Saldo ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp969,81 miliar, meningkat 9,48% atau setara Rp84,01 miliar dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar Rp885,80 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya laba yang dicatat perusahaan.

Equity attributable to non-controlling interests is the amount of equity owned by non-controlling interests, i.e., owners other than the parent company, which arises from the consolidated financial statements.

The balance of equity attributable to non-controlling interests as of the end of 2024 reached Rp969.81 billion, an increase of 9.48% or equivalent to Rp84.01 billion compared to the end of 2023, which was Rp885.80 billion. This increase was due to the profits recorded by the Company.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Statement of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2023-2024
Consolidated Profit and Loss and Other Comprehensive Income 2023-2024

Pos Akun Account Position	**2024 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**2023 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Pendapatan Revenue	3.790,81	3.400,87	389,94	11,47
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(3.012,59)	(2.807,30)	(205,29)	7,31
Laba Kotor Gross Profit	778,22	593,57	184,65	31,11
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit from Joint Ventures	-	14,71	-	-
Beban Usaha Operating Expenses	(103,02)	(90,23)	(12,79)	14,17
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss	(56,90)	(18,68)	(38,22)	204,60
Pendapatan/(Beban) Keuangan Finance Income/(Expense)	(330,90)	(229,11)	(101,79)	44,43
Pendapatan/(Beban) Lainnya Other Income/(Expense)	11,20	7,92	3,28	41,41
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(94,96)	(96,38)	1,42	(1,47)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	203,63	181,79	21,84	12,01
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(9,53)	(9,01)	(0,52)	5,77

Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	**194,09**	**172,78**	**21,31**	**12,33**	↑
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	**3,89**	**8,17**	**(4,28)**	**(52,39)**	↓
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**197,99**	**180,95**	**17,04**	**9,42**	↑
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	**90,34**	**80,22**	**10,12**	**12,62**	↑
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	**103,76**	**92,57**	**11,19**	**12,09**	↑
	194,10	**172,78**	**21,32**	**12,34**	↑
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	**95,46**	**85,75**	**9,71**	**11,32**	↑
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	**102,52**	**95,20**	**7,32**	**7,69**	↑
	197,98	**180,95**	**17,03**	**9,41**	↑
Laba Dasar per Saham (dalam Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (in Full Rupiah)	**8,84**	**7,85**	**0,99**	**12,61**	↑

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian "Tinjauan Operasi per Segmen Usaha" di atas, pendapatan Perusahaan dibentuk dari 4 (empat) segmen usaha, yaitu Konstruksi, Sewa, Ready Mix dan Mining

Di tahun 2024, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp3,79 triliun, mengalami kenaikan 11,47% atau setara dengan Rp389,94 miliar dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp3,40 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya kontrak baru dari pemberi kerja.

As previously mentioned in the "Operational Overview per Business Segment" section above, the Company's revenue is derived from 3 (three) business segments, namely Construction, Ready Mix, and Heavy Equipment Rental.

In 2024, the Company successfully recorded revenue of Rp3.79 trillion, an increase of 11.47% or equivalent to Rp389.94 billion compared to the 2023 revenue of Rp3.40 trillion. This increase was driven by the acquisition of new contracts from clients.

Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenue

Sejalan dengan pendapatan Perusahaan, beban pokok pendapatan juga dibentuk dari 3 (tiga) segmen usaha yang dimiliki.

In line with the Company's revenue, the cost of revenue is also derived from the 3 (three) business segments.

Beban Pokok Pendapatan Tahun 2023-2024
Cost of Revenue 2023-2024

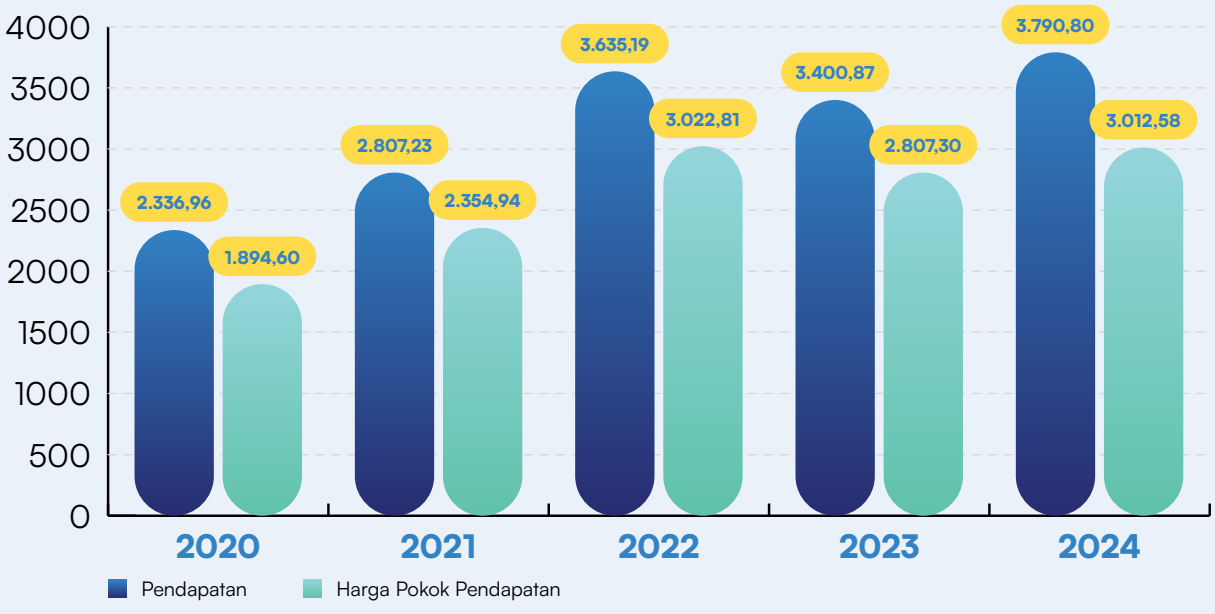
Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Konstruksi Construction				
Upah Wages	350,41	458,53	(108,12)	(23,58)
Bahan Materials	854,18	946,93	(92,75)	(9,79)
Overhead	676,66	571,65	105,01	18,37
Penyusutan Depreciation	533,97	488,19	45,78	9,38
Alat Equipment	388,03	196,29	191,74	97,68
Sub Jumlah Subtotal	2.803,25	2.661,59	141,66	5,32
Ready Mix				
Upah Wages	3,39	0,46	2,93	636,96
Bahan Materials	32,07	62,31	(30,24)	(48,53)
Overhead	8,41	9,88	(1,47)	(14,88)
Penyusutan Depreciation	2,59	4,42	(1,83)	(41,40)
Alat Equipment	5,22	2,97	2,25	75,76
Sub Jumlah Subtotal	51,68	80,03	(28,35)	(35,42)
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental				
Upah Wages	9,37	1,77	7,60	429,38

Bahan Materials	32,36	5,54	26,82	484,12	↑
Overhead	14,08	34,04	(19,96)	(58,64)	↓
Penyusutan Depreciation	11,52	2,78	8,74	314,39	↑
Alat Equipment	28,60	21,54	7,06	32,78	↑
Sub Jumlah Subtotal	95,93	65,67	30,26	46,08	↑
Mining					
Upah Wages	6,18	-	-	-	-
Bahan Materials	5,74	-	-	-	-
Overhead	18,36	-	-	-	-
Penyusutan Depreciation	24,26	-	-	-	-
Alat Equipment	7,17	-	-	-	-
Sub Jumlah Subtotal	61,71	-	-	-	-
Jumlah Total	3.012,58	2.807,30	205,28	7,31	↑

Beban pokok pendapatan tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,01 triliun, mengalami kenaikan 7,31% atau setara dengan Rp205,28 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,81 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya biaya persiapan proyek atas kontrak baru.

Cost of revenue in 2024 was recorded at Rp3.01 trillion, an increase of 7.31% or equivalent to Rp205.28 billion compared to Rp2.81 trillion in 2023. This increase was due to project preparation costs for new contracts.

Perkembangan Pendapatan dan Beban Pokok Pendapatan 2020-2024 (Rp-miliar)
Revenue and Cost of Revenue 2020-2024 (Rp billion)



Laba Kotor
Gross Profit

Laba kotor Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp778,22 miliar, mengalami kenaikan 31,11% atau setara dengan Rp184,65 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp593,57 miliar. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjualan.

The Company's gross profit in 2024 amounted to Rp778.22 billion, an increase of 31.11% or equivalent to Rp184.65 billion compared to Rp593.57 billion in 2023. This increase was driven by higher sales.

Bagian Laba Ventura Bersama
Share in profit of joint venture

Bagian laba ventura bersama merupakan keuntungan atau kerugian dari entitas ventura bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO). Per 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki 5 (lima) ventura bersama yang berkontribusi terhadap profitabilitas Perusahaan.

Share in profit of joint venture is the profit or loss of a joint venture entity in the form of an Operational Cooperation (KSO). As of December 31, 2024, the Company has 5 (five) joint ventures that contribute to the Company's profitability.

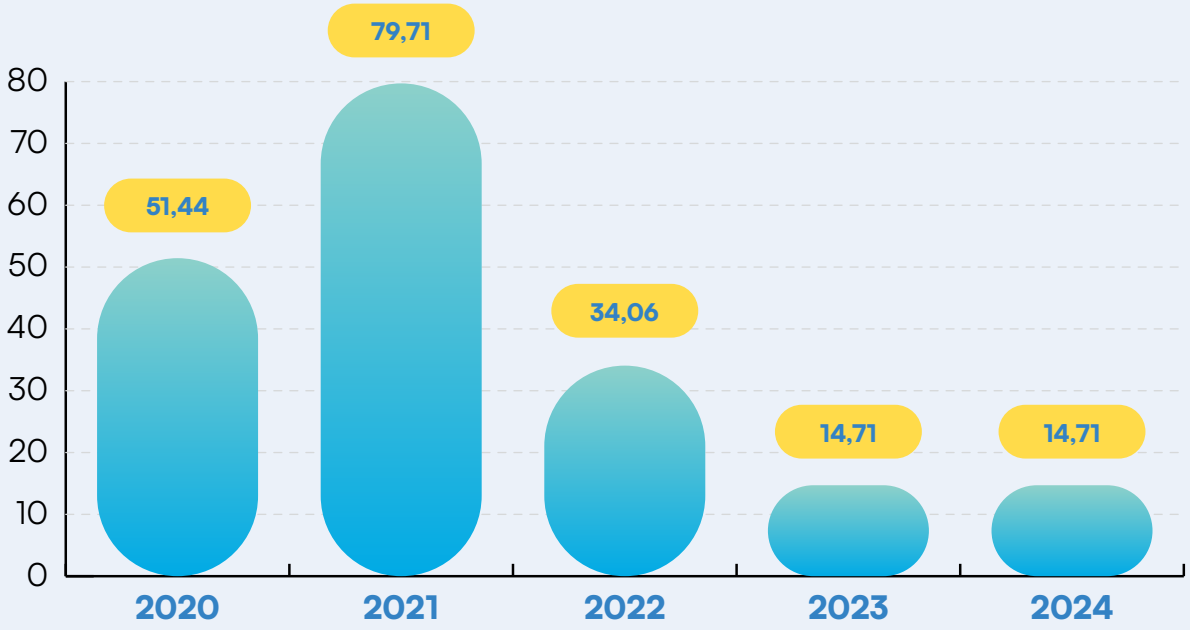
Bagian Laba Ventura Bersama dan Kontribusi Masing-masing Ventura Bersama Tahun 2023-2024
Share in profit of joint venture and Contribution of Each Joint Venture, 2023-2024

Ventura Bersama Joint Venture	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (IDR billion)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
KSO PPRE - RPJ	-	-	-	-	-	-
KSO PP Presisi - Sarana	-	-	0,50	3,40	-	-
KSO PPRE - Yala Persada Indonesia	-	-	1,25	8,50	-	-
KSO PP Presisi - Duta Pratama Indah	-	-	2,25	15,30	-	-
Jumlah Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit from Joint Ventures	-	100,00	14,71	100,00	-	-

Di tahun 2024,tidak terdapat bagian laba ventura bersama dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp14,71 miliar. Hal ini disebabkan sudah close proyek JO KSO

In 2024, there was no share in profit of joint venture compared to Rp14.71 billion in 2023. This was due to the closure of the JO KSO project.

Perkembangan Bagian Laba Ventura Bersama 2020-2024 (Rp-miliar)
Share in Profit of Joint Venture Development (Rp billion)



Beban Usaha
Operating Expenses

Beban usaha Perusahaan terdiri dari biaya pegawai, biaya umum, biaya penyusutan gedung, dan amortisasi aset tidak berwujud.

The Company's operating expenses consist of employee expenses, general expenses, building depreciation expenses, and amortization of intangible assets.

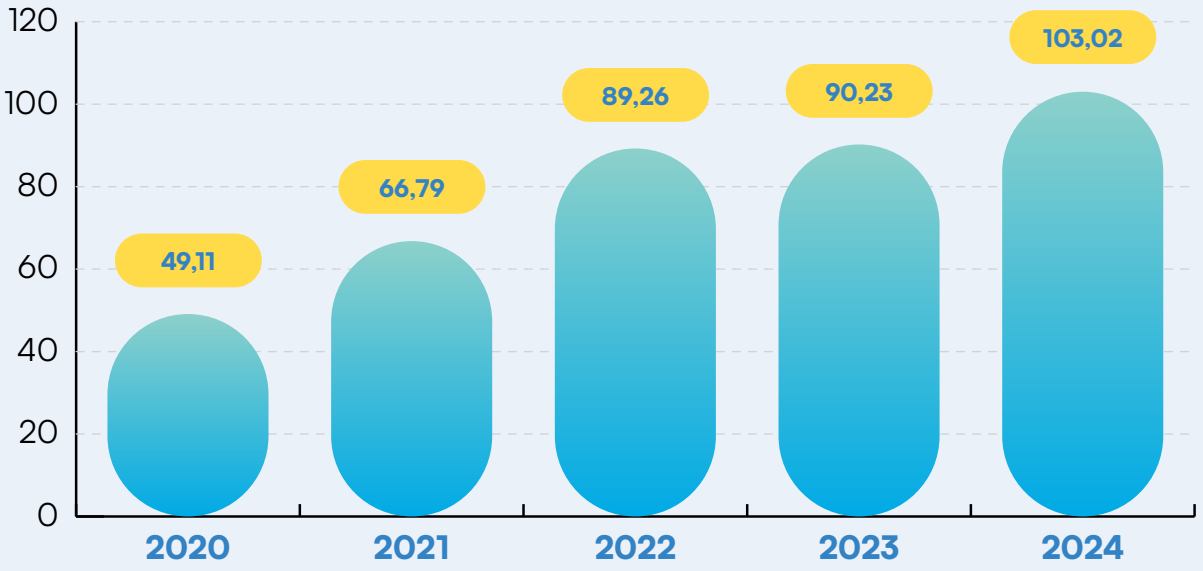
Beban Usaha Tahun 2023-2024
Operating Expenses 2023-2024

Pos Akun Account Position	**2024 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**2023 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase a(Decrease)		
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)	
Beban Pegawai Employee Expenses	73,95	65,86	8,09	12,28	↑
Beban Umum General Expenses	22,02	17,55	4,47	25,47	↑
Beban Penyusutan Gedung Building Depreciation Expense	5,74	5,22	0,52	9,96	↑
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Amortization of Intangible Assets	1,31	1,60	(0,29)	(18,13)	↓
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	103,02	90,23	12,79	14,17	↑

Di tahun 2024, beban usaha Perusahaan sebesar Rp103,02 miliar, mengalami kenaikan 14,17% atau setara dengan Rp12,79 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp90,23 miliar. Kenaikan ini disebabkan biaya persiapan proyek baru.

In 2024, the Company's operating expenses amounted to Rp103.02 billion, an increase of 14.17% or equivalent to Rp12.79 billion compared to Rp90.23 billion in 2023. This increase was due to the costs of preparing new projects.

Perkembangan Beban Usaha 2020-2024 (Rp-miliar)
Development of Operating Expenses 2020-2024 (Rp billion)



Kerugian Penurunan Nilai
Impairment Loss

Kerugian penurunan nilai merupakan Cadangan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Di tahun 2024, Perusahaan mencatatkan kerugian penurunan nilai sebesar Rp56,90 miliar, mengalami kenaikan 204,60% atau setara dengan Rp38,22 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp18,68 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya Cadangan atas CKPN.

Impairment losses represents a provision for the potential uncollectibility of receivables. In 2024, the Company recorded an impairment losses of Rp56.90 billion, an increase of 204.60% or equivalent to Rp38.22 billion compared to Rp18.68 billion in 2023. This increase was due to the provision for expected credit losses.

Pendapatan dan Beban Keuangan
Financial Income and Expenses

Rincian pendapatan dan beban keuangan dapat dilihat di bawah ini.

Details of finance income and expenses are presented below.

Pendapatan dan Beban Keuangan Tahun 2023-2024
Finance Income and Expenses 2023-2024

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar) (Rp billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Keuangan Financial Income				
Pendapatan Keuangan dari Sewa Financial Income from Leasing	0,80	1,40	(0,60)	(42,86)
SubJumlah Pendapatan Keuangan Subtotal Financial Income	0,80	1,40	(0,60)	(42,86)
Beban Keuangan Financial Expenses				
Beban Bunga dari Utang Bank Interest Expense from Bank Loans	(260,86)	(196,59)	(64,27)	32,69
Sewa Pembiayaan Finance Lease	(70,84)	(33,93)	(36,91)	108,78
SubJumlah Beban Keuangan Subtotal Financial Expenses	(331,70)	(230,51)	(101,19)	43,90
Jumlah Pendapatan/(Beban) Keuangan Total Financial Income/ (Expenses)	(330,90)	(229,11)	(101,79)	44,43

Di tahun 2024, pendapatan keuangan tercatat sebesar Rp 800 juta, mengalami penurunan 42,86% atau setara dengan Rp600 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,40 miliar. Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan dan bunga deposito. Sedangkan beban keuangan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp331,70 miliar, mengalami kenaikan 43,90% atau setara dengan Rp101,19 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp230,51 miliar. Kenaikan ini disebabkan Kenaikan bunga bank

In 2024, finance income was recorded at Rp800 million, a decrease of 42.86% or equivalent to Rp600 million compared to Rp1.40 billion in 2023. This decrease was due to lower income and deposit interest. Meanwhile, finance expenses in 2024 were recorded at Rp331.70 billion, an increase of 43.90% or equivalent to Rp101.19 billion compared to Rp230.51 billion in 2023. This increase was due to higher bank interest rates.

Pendapatan dan Beban Lainnya
Other Income and Expenses

Rincian pendapatan dan beban lainnya dapat dilihat di bawah ini.

Details of other income and expenses are presented below.

Pendapatan dan Beban Lainnya Tahun 2023-2024
Other Income and Expenses 2023-2024

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Lainnya Other Income				
Pendapatan di Luar Usaha Non-Operating Income	55,21	44,87	10,34	23,04
Pendapatan Jasa Giro - Bersih Net Demand Deposit Interest Income	4,83	4,56	0,27	5,92
Bagi Hasil Murabahah Murabahah Profit Sharing	-	0,63	-	-
Pemulihan Kerugian Nilai Piutang Recovery of Impairment Losses on Receivables	0,33	3,95	(3,62)	(91,65)
Pendapatan Bunga Deposito - Bersih Net Interest Income from Deposits	2,52	0,42	2,10	500,00
SubJumlah Pendapatan Lainnya Subtotal of Other Income	62,89	54,43	8,46	15,54
Beban Lainnya Other Expenses				
Administrasi bank Bank Administration	(34,06)	(28,63)	(5,43)	18,97
Beban di Luar Usaha Non-Operating Expenses	(17,30)	(17,55)	0,25	(1,42)
Amortisasi Emisi Obligasi Bond Issuance Amortization	(0,33)	(0,33)	0,00	0,00
SubJumlah Beban Lainnya Subtotal of Other Expenses	(51,69)	(46,51)	(5,18)	11,14
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lainnya Total Other Income/(Expenses)	11,20	7,92	2,96	37,37

Di tahun 2024, pendapatan lainnya tercatat sebesar Rp62,89 miliar, mengalami kenaikan 15,54% atau setara dengan Rp8,46 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp54,43 miliar. Kenaikan ini disebabkan divestasi alat. Sedangkan beban lainnya di tahun 2024 tercatat sebesar Rp51,69 miliar, mengalami kenaikan 11,14% atau setara dengan Rp5,18 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp46,51 miliar. Kenaikan ini disebabkan biaya atas divestasi alat

In 2024, other income was recorded at Rp62.89 billion, an increase of 15.54% or equivalent to Rp8.46 billion compared to Rp54.43 billion in 2023. This increase was due to the divestment of assets. Meanwhile, other expenses in 2024 were recorded at Rp51.69 billion, an increase of 11.14% or equivalent to Rp5.18 billion compared to Rp46.51 billion in 2023. This increase was due to costs related to the divestment of assets.

Pajak Penghasilan
Income Tax

Di tahun 2024, Perusahaan mencatat beban pajak penghasilan sebesar Rp9,53 miliar, mengalami kenaikan 5,77% atau setara dengan Rp520 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp9,01 miliar. Kenaikan ini disebabkan kenaikan hutang pajak

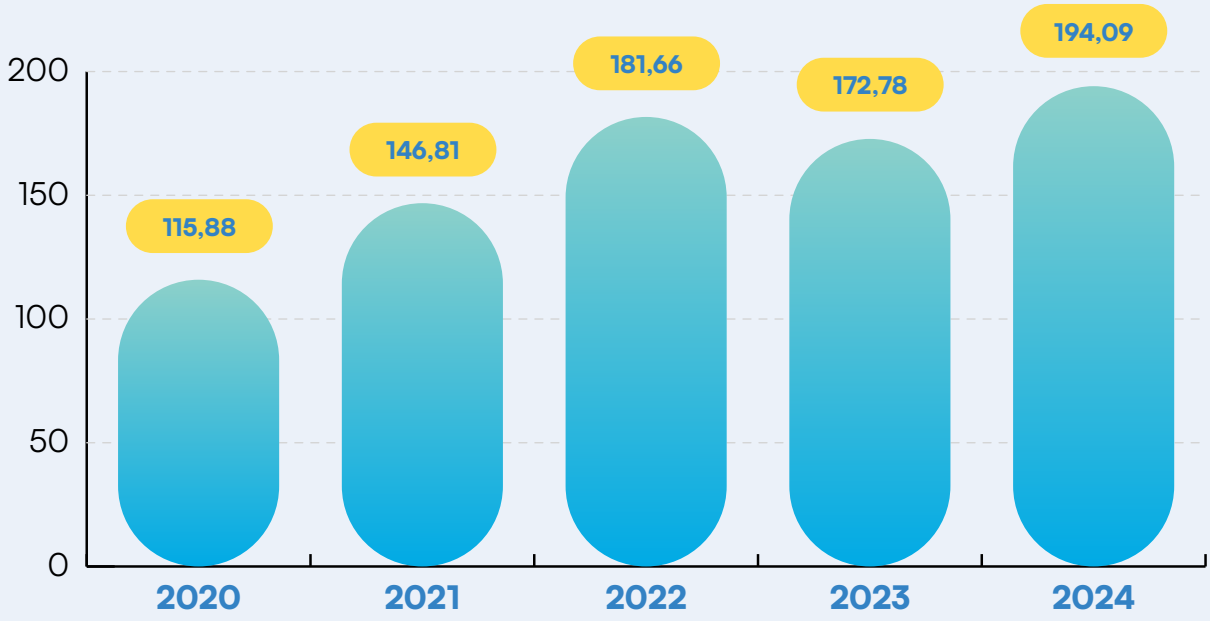
In 2024, the Company recorded income tax expenses of Rp9.53 billion, an increase of 5.77% or equivalent to Rp520 million compared to Rp9.01 billion in 2023. This increase was due to higher tax liabilities.

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year

Laba bersih tahun berjalan Perusahaan di tahun 2024 sebesar Rp194,09, mengalami kenaikan 12,33% atau setara dengan Rp21,31 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp172,78 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya kontrak baru

The Company's net profit for the year in 2024 amounted to Rp194.09 billion, an increase of 12.33% or equivalent to Rp21.31 billion compared to Rp172.78 billion in 2023. This increase was due to new contracts.

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan 2020-2024 (Rp-miliar)
Net Profit for the Year 2020-2024 (Rp billion)



Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income

Di tahun 2024, Perusahaan membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3,89 miliar, mengalami penurunan 52,39% atau setara dengan Rp4,28 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp8,17 miliar. Penurunan ini disebabkan imbalan pasca kerja aktuaris.

In 2024, the Company recorded other comprehensive income of Rp3.89 billion, a decrease of 52.39% or equivalent to Rp4.28 billion compared to Rp8.17 billion in 2023. This decrease was due to actuarial post-employment benefits.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Total Comprehensive Income for the Year

Per 31 Desember 2024, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp197,99 miliar, mengalami kenaikan 9,42% atau setara dengan Rp17,04 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp180,95 miliar. Kenaikan ini disebabkan Revaluasi asset.

As of December 31, 2024, the total comprehensive income for the year amounted to Rp197.99 billion, an increase of 9.42% or equivalent to Rp17.04 billion compared to Rp180.95 billion in 2023. This increase was due to asset revaluation.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Net profit for the year attributable to the owners of the parent entity

Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah pembagian laba bersih tahun berjalan untuk Perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan dari entitas anak yang terkonsolidasi. Laba ini digunakan sebagai dasar untuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan.

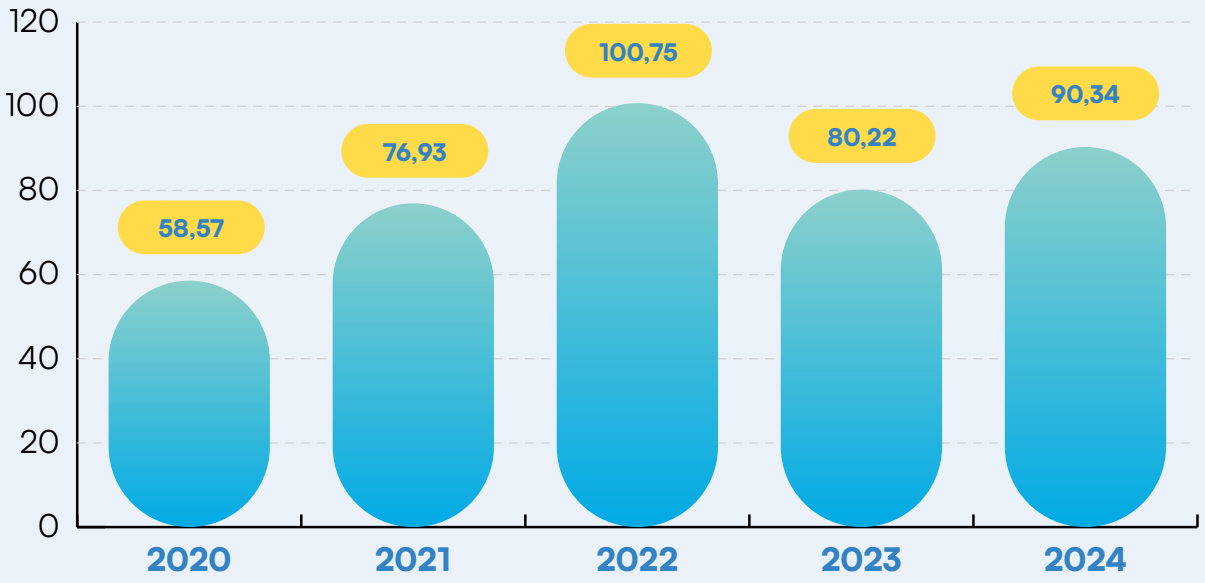
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar Rp90,34 miliar, mengalami kenaikan sebesar 12,62% atau setara dengan Rp10,12 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp80,22 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan Laba yang dicatat oleh perusahaan.

Net profit for the year attributable to the owners of the parent entity is the portion of the net income for the year allocated to the Company according to the ownership share of the consolidated subsidiaries. This income serves as the basis for the distribution of dividends to the Company's shareholders.

Net profit for the year attributable to the owners of the parent entity in 2024 amounted to Rp90.34 billion, an increase of 12.62% or equivalent to Rp10.12 billion compared to Rp80.22 billion in 2023. This increase was primarily due to the profit recorded by the Company.

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 2020-2024 (Rp-miliar)

Net Profit for the Year Attributable to Owners of Parent Entity 2020-2024



Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali

Net Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah pembagian laba bersih tahun berjalan untuk pemegang saham lainnya pada entitas anak sesuai dengan porsi kepemilikan pada entitas anak yang terkonsolidasi. Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali tahun 2024 sebesar Rp103,76 miliar, mengalami kenaikan sebesar 12,09% atau setara dengan Rp11,19 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp92,57 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan perusahaan berhasil mencatatkan laba

Net profit for the year attributable to non-controlling interests is the portion of the net profit for the year allocated to other shareholders in the subsidiaries according to their ownership share in the consolidated subsidiaries. Net profit for the year attributable to non-controlling interests in 2024 amounted to Rp103.76 billion, an increase of 12.09% or equivalent to Rp11.19 billion compared to Rp92.57 billion in 2023. This increase was primarily due to the company successfully recording a profit.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Total Comprehensive Income for the Year Attributable to the Owners of the Parent Entity

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah pembagian laba komprehensif tahun berjalan untuk Perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan dari entitas anak yang terkonsolidasi.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar Rp 95,46 miliar, mengalami kenaikan sebesar 11,32% atau setara dengan Rp9,71 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp85,75 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan revaluasi asset.

Total comprehensive income for the year attributable to the owners of the parent entity is the portion of the comprehensive income for the year allocated to the Company according to the ownership share in the consolidated subsidiaries.

Total comprehensive income for the year attributable to the owners of the parent entity in 2024 amounted to Rp95.46 billion, an increase of 11.32% or equivalent to Rp9.71 billion compared to Rp85.75 billion in 2023. This increase was primarily due to asset revaluation.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali
Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah pembagian laba komprehensif tahun berjalan untuk pemegang saham lainnya sesuai dengan porsi kepemilikan dari entitas anak yang terkonsolidasi.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali tahun 2024 sebesar Rp 102,52 miliar, mengalami kenaikan sebesar 7,69% atau setara dengan Rp7,32 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp95,20 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan revaluasi asset.

Total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests is the portion of the comprehensive income for the year allocated to other shareholders according to their ownership share in the consolidated subsidiaries.

Total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests in 2024 amounted to Rp102.52 billion, an increase of 7.69% or equivalent to Rp7.32 billion compared to Rp95.20 billion in 2023. This increase was primarily due to asset revaluation.

Laba Dasar per Saham
Basic Earnings per Share

Laba Dasar per Saham dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Berikut disampaikan perhitungan Laba Dasar per Saham tahun 2024 dan 2023.

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the relevant year. Below is the calculation of Basic Earnings per Share for 2024 and 2023.

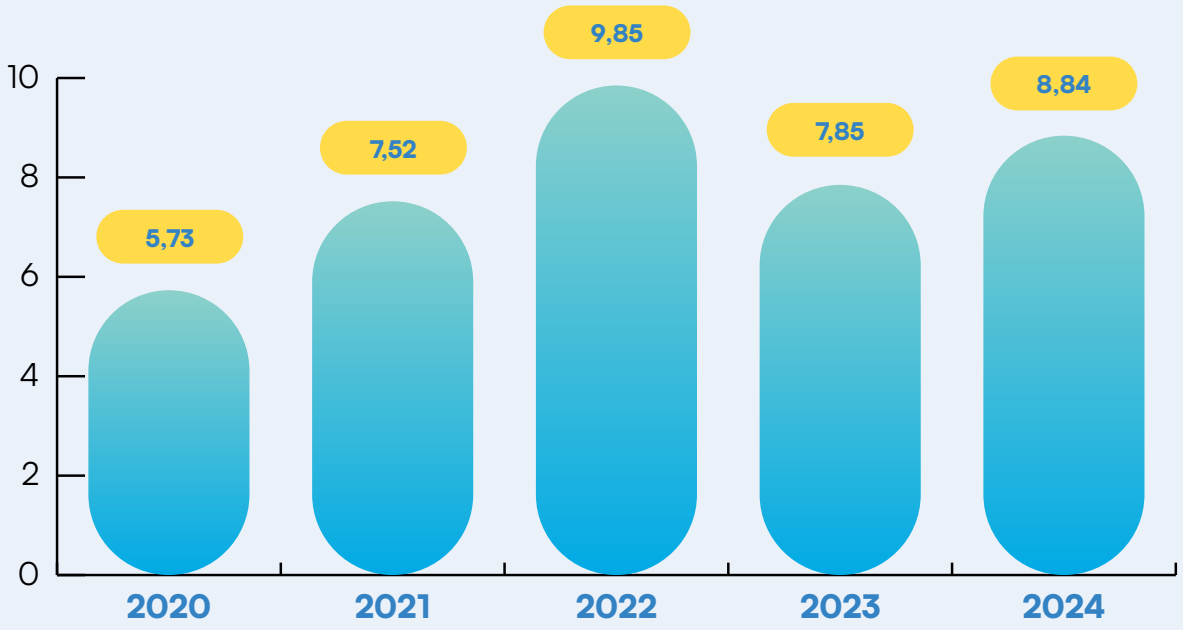
Pendapatan dan Beban Keuangan Tahun 2023-2024
Financial Income and Expenses for 2023-2024

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar) (Rp billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-miliar) Net Profit for the Year (Rp billion)	**194,09**	**172,78**	**21,31**	**12,33**
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp-miliar) Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp billion)	**90,34**	**80,22**	**10,12**	**12,62**
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (miliar lembar) Weighted Average Shares Outstanding (billion shares)	**10,22**	**10,22**	**-**	**-**
Laba Dasar per Saham (Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (full Rupiah)	**8,84**	**7,85**	**0,99**	**12,61**

Laba dasar per saham tahun 2024 sebesar Rp8,84 per lembar saham, meningkat 12,61% atau setara dengan Rp0,99 per lembar saham dibandingkan laba bersih per saham dasar tahun 2023 sebesar Rp7,85 per lembar saham. Kenaikan ini terutama disebabkan perusahaan berhasil mencatatkan laba

Basic earnings per share in 2024 amounted to Rp8.84 per share, an increase of 12.61% or equivalent to Rp0.99 per share compared to basic earnings per share in 2023 of Rp7.85 per share. This increase was primarily due to the Company successfully recording a profit.

Perkembangan Laba Dasar per Saham 2020-2024 (Rp)
Basic Earnings per Share 2020-2024 (Rp)



Atas kinerja laba rugi yang berhasil dibukukan di tahun 2024, Perusahaan mencatat rasio profitabilitas sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Based on the profit and loss performance recorded in 2024, the Company has recorded profitability ratios as shown below.

Pos Akun Account Position	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
Rasio Pertumbuhan | Growth Ratio				
Pendapatan (%) Revenue (%)	**11,47**	**(6,44)**	**17,91**	↑
Rasio Profitabilitas | Profitability Ratio				
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	**20,53**	**17,45**	**3,08**	↑
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	**17,81**	**15,23**	**2,58**	↑
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**2,38**	**2,36**	**0,02**	↑
Margin EBITDA (%) EBITDA Margin (%)	**33,09**	**30,00**	**3,09**	↑
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) Net Profit to Total Assets Ratio (%)	**1,18**	**1,12**	**0,06**	↑
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (%) Net Profit to Total Equity Ratio (%)	**2,59**	**2,42**	**0,17**	↑
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga (kali) EBITDA to Interest Expense Ratio (times)	**3,78**	**4,43**	**(14,67)**	↓
Rasio Utang terhadap EBITDA (kali) Debt to EBITDA Ratio (times)	**1,41**	**1,94**	**(27,32)**	↓

Keterangan: Perhitungan laba bersih menggunakan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

Note: The calculation of net profit uses the net profit attributable to the owners of the Parent Entity.

Kinerja keuangan Perseroan menunjukkan pemulihan yang solid pada tahun 2024, tercermin dari rasio pertumbuhan pendapatan yang mencatatkan kenaikan positif sebesar 11,47%, berbalik arah dari penurunan (6,44%) di tahun sebelumnya. Secara profitabilitas, seluruh margin utama mengalami peningkatan. Margin laba bruto naik menjadi 20,53% dari sebelumnya 17,45%, mencerminkan efisiensi dalam pengendalian harga pokok pendapatan. Margin laba usaha dan margin EBITDA masing-masing meningkat menjadi 17,81% dan 33,09%, menandakan pengelolaan biaya operasional yang lebih baik serta kontribusi positif dari pendapatan lain-lain dan efisiensi operasional.

Margin laba bersih relatif stabil, naik tipis dari 2,36% menjadi 2,38%, menunjukkan bahwa beban keuangan dan pajak masih menjadi tekanan terhadap laba akhir. Namun, rasio laba bersih terhadap aset (ROA) dan ekuitas (ROE) juga mencatatkan peningkatan, masing-masing menjadi 1,18% dan 2,59%, menunjukkan perbaikan dalam efektivitas pengelolaan aset dan modal.

Di sisi lain, rasio EBITDA terhadap beban bunga mengalami penurunan dari 4,43x menjadi 3,78x, mencerminkan adanya tekanan dari peningkatan beban bunga atau penurunan efisiensi arus kas operasional. Namun demikian, penurunan rasio utang terhadap EBITDA dari 1,94x menjadi 1,41x mengindikasikan perbaikan dalam struktur permodalan.

The Company's financial performance shows a solid recovery in 2024, as reflected by the revenue growth ratio, which posted a positive increase of 11.47%, reversing the decline of (6.44%) in the previous year. In terms of profitability, all key margins saw improvement. The gross profit margin increased to 20.53% from 17.45%, reflecting better control over the cost of revenue. The operating profit margin and EBITDA margin both increased to 17.81% and 33.09%, respectively, indicating improved operational cost management and positive contributions from other income and operational efficiencies.

The net profit margin remained relatively stable, slightly increasing from 2.36% to 2.38%, showing that finance expenses and taxes continue to pressure the bottom line. However, the net profit-to-assets (ROA) and net profit-to-equity (ROE) ratios also improved, reaching 1.18% and 2.59%, respectively, indicating better effectiveness in managing assets and equity.

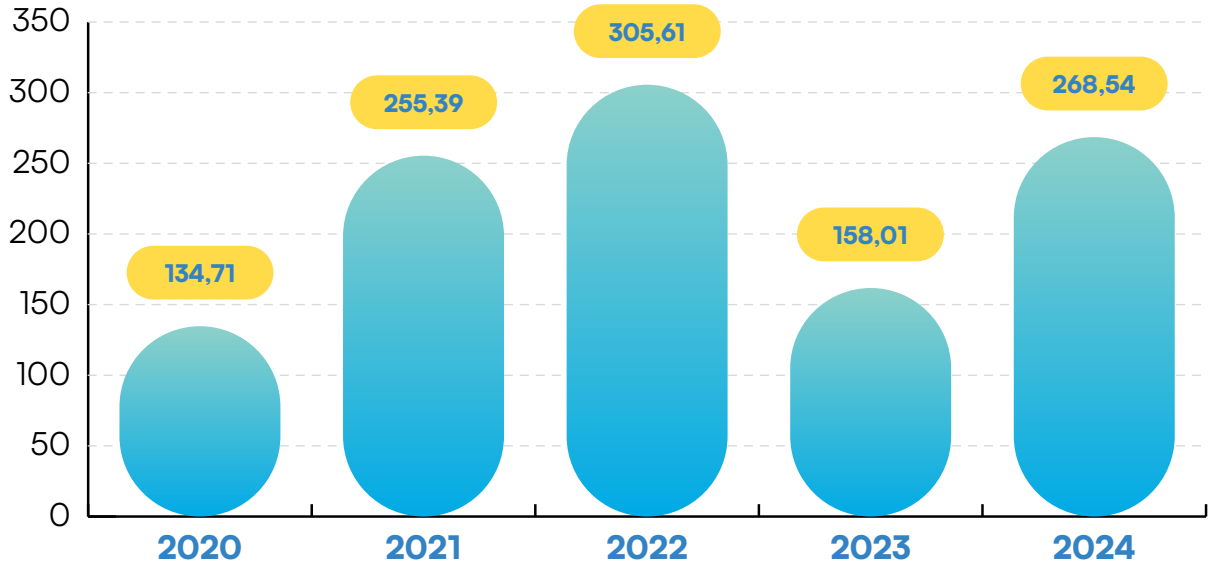
On the other hand, the EBITDA-to-interest expense ratio decreased from 4.43x to 3.78x, reflecting pressure from higher interest expenses or a decrease in operational cash flow efficiency. Nevertheless, the decline in the debt-to-EBITDA ratio from 1.94x to 1.41x indicates an improvement in the capital structure.

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Statement of Consolidated Cash Flow

Arus kas menggambarkan kemampuan kas Perusahan dalam suatu periode tertentu.

Cash flow reflects the Company's ability to generate cash over a specific period.

Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 2020-2024 (Rp-miliar)
Cash and Cash Equivalent Balance at End of Year 2020-2024 (Rp billion)



Arus Kas Konsolidasian Tahun 2023-2024
Consolidated Cash Flow 2023-2024

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	**766,42**	**63,63**	**702,79**	**1.104,49**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**(222,70)**	**209,32**	**(432,02)**	**(206,39)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**(433,67)**	**(420,55)**	**(13,12)**	**3,12**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**110,05**	**(143,87)**	**253,92**	**(176,49)**
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash & Cash Equivalents at the Beginning of the Year	**158,01**	**305,61**	**(147,60)**	**(48,30)**
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash & Cash Equivalents at the End of the Year	**268,06**	**158,01**	**110,05**	**69,65**

Ket * : terdapat reklarifikasi

Note * : reclassification

Di sepanjang tahun 2024, Kas dan Setara Kas Perusahaan mengalami kenaikan 66,02% atau setara Rp106,79 miliar, dari Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2023 sebesar Rp158,01 miliar menjadi Rp268,06 miliar di akhir tahun 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan pencairan piutang usaha sebagaimana akan diuraikan secara rinci di bawah ini.

Throughout 2024, the Company's Cash and Cash Equivalents increased by 66.02% or equivalent to Rp106.79 billion, from Rp158.01 billion at the end of 2023 to Rp268.06 billion at the end of 2024. This increase was primarily due to the collection of trade receivables, as will be detailed below.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Cash Flows from Operating Activities

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar) (Rp billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan kas dari pelanggan Cash Receipts from Customers	**4.539,69**	**2.980,31**	**1.559,38**	**52,32**
Pembayaran kas kepada: Cash Payments to:				
Pemasok dan subkontraktor Suppliers and subcontractors	**(3.140,10)**	**(2.186,96)**	**(953,14)**	**43,58**
Direksi dan karyawan Directors and employees	**(123,07)**	**(415,33)**	**292,26**	**(70,37)**
Kas yang dihasilkan dari operasi Cash generated from operations	**1.276,52**	**378,02**	**898,50**	**237,69**
Pembayaran pajak-pajak Payment of taxes	**(189,51)**	**(169,98)**	**(19,53)**	**11,49**
Restitusi pajak Tax restitution	**-**	**84,38**	**(84,38)**	**-**
Pembayaran bunga Interest payment	**(320,60)**	**(228,79)**	**(91,81)**	**40,13**
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**766,41**	**63,63**	**702,78**	**1.104,48**

Di tahun 2024, Perusahaan membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp766,41 miliar , mengalami kenaikan 1.104,48% atau setara dengan Rp702,78 miliar dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp63,63 miliar. Hal ini terutama disebabkan pencairan piutang usaha

In 2024, the Company recorded net cash flows from operating activities of Rp766.41 billion, an increase of 1,104.48% or equivalent to Rp702.78 billion compared to the net cash flows from operating activities of Rp63.63 billion in 2023. This was primarily due to the collection of trade receivables.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Cash Flows from Investing Activities

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar) (Rp billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Perolehan aset tetap Acquisition of Fixed Assets	(293,61)	(63,91)	(229,70)	359,41 ↑
Penerimaan penjualan aset tetap Proceeds from the Sale of Fixed Assets	56,68	39,82	16,86	42,34 ↑
Pembelian software Software Purchases	(5,15)	(1,89)	(3,26)	172,49 ↑
Penerimaan bunga Interest Receipts	4,30	7,01	(2,71)	(38,66) ↓
Deposito dijaminkan Restricted Deposits	-	1,72	(1,72)	-
Penerimaan bank yang dibatasi penggunaannya Receipts from Restricted Bank Accounts	-	29,50	(29,50)	-
Penerimaan investasi ventura bersama Receipts from Joint Venture Investments	3,86	86,88	(83,02)	(95,56) ↓
Piutang lain-lain pihak berelasi Other Receivables from Related Parties	11,22	110,19	(98,97)	(89,82) ↓
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi Net Cash provided by Investment Activities	(222,70)	209,32	(432,02)	(206,39) ↓

Arus kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2024 sebesar Rp 222,70 miliar, mengalami penurunan 206,39% atau setara dengan Rp432,02 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 di mana arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2023 sebesar Rp209,32 miliar. Penurunan ini disebabkan penambahan capex untuk alat baru

Net cash flows used in investing activities in 2024 amounted to Rp222.70 billion, a decrease of 206.39% or equivalent to Rp432.02 billion compared to 2023, when net cash flows from investing activities were Rp209.32 billion. This decrease was due to additional capital expenditures for new equipment.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Cash Flows from Financing Activities

Pos Akun Account Position	2024 (Rp-miliar) (Rp billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pembayaran dividen Dividend Payment	(18,51)	(54,26)	35,75	(65,89)
Penerimaan utang bank Bank Loan Receipts	2.473,32	2.982,71	(509,39)	(17,08)
Pembayaran utang bank Bank Loan Payments	(2.666,89)	(3.343,59)	676,70	(20,24)
Penerimaan utang non bank Non-Bank Loan Receipts	(73,62)	-	(73,62)	-
Pembayaran utang non bank Non-Bank Loan Payments	-	(173,67)	173,67	-
Penerimaan pinjaman pihak berelasi Receipts of Loans from Related Parties	-	180,46	(180,46)	-
Pembayaran pinjaman pihak berelasi Repayment of Loans to Related Parties	(147,97)	(12,20)	(135,77)	1.112,87
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used for Financing Activities	(433,67)	(420,55)	(13,12)	3,12

Di tahun 2024, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp 433,67 miliar, mengalami kenaikan 3,12% atau setara dengan Rp13,12 miliar dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2023 sebesar Rp420,55 miliar. Kenaikan ini disebabkan pembayaran utang berbunga

In 2024, net cash flows used in financing activities amounted to Rp433.67 billion, an increase of 3.12% or equivalent to Rp13.12 billion compared to the net cash flows used in financing activities of Rp420.55 billion in 2023. This increase was due to the repayment of interest-bearing debt.

Kemampuan Membayar Utang

Debt Repayment Ability

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

The Company's ability to repay debt is measured using the solvency ratio and liquidity ratio. The solvency ratio measures the Company's ability to repay all of its debts, both short-term and long-term. Meanwhile, the liquidity ratio measures the Company's ability to repay its short-term debts.

Pos Akun Account Position	**2024 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**2023 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times)	1,71	1,54	0,17	11,04
Rasio Kas (kali) Cash Ratio (times)	0,12	0,08	0,07	140,00
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
Rasio Kewajiban Berbunga terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Interest-Bearing Debt to Equity Ratio (times)	0,51	0,57	-0,09	-15,00
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (kali) Total Liabilities to Total Assets Ratio (times)	0,54	0,54	0	0,00
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Total Liabilities to Total Equity Ratio (times)	1,19	1,16	0,03	2,59

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio

Pada tahun 2024, rasio lancar Perusahaan sebesar 1,71 kali, naik 0,17 kali dibandingkan dengan rasio lancar tahun 2023 sebesar 1,54 kali. Sementara rasio kas Perusahaan sebesar 0,12 kali, naik 0,07 kali dibandingkan dengan rasio kas tahun sebelumnya sebesar 0,05 kali. Pencapaian rasio likuiditas tersebut mencerminkan Perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan asset yang dimilikinya

In 2024, the Company's current ratio was 1.71 times, an increase of 0.17 times compared to the 2023 current ratio of 1.54 times. Meanwhile, the Company's cash ratio was 0.12 times, an increase of 0.07 times compared to the previous year's cash ratio of 0.05 times. This liquidity ratio achievement reflects the Company's ability to meet its short-term obligations with its available assets.

Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio

Pada tahun 2024, rasio kewajiban berbunga terhadap ekuitas sebesar 0,51 kali, turun 0,09 kali dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0, 60 kali. Sedangkan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas sebesar 1,19 kali, naik 0,03 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,16 kali. Sementara, rasio liabilitas terhadap jumlah aset mempunyai nilai sama dengan tahun 2023 sebesar 0,54 kali. Pencapaian rasio solvabilitas tersebut menggambarkan Perusahaan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya dengan asset yang dimilikinya

In 2024, the interest-bearing debt-to-equity ratio was 0.51 times, a decrease of 0.09 times compared to 0.60 times in 2023. Meanwhile, the total liabilities-to-equity ratio was 1.19 times, an increase of 0.03 times compared to 1.16 times in the previous year. The liabilities-to-total assets ratio remained the same as in 2023 at 0.54 times. This solvency ratio achievement reflects the Company's ability to meet its long-term obligations with its available assets.



Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectability Ratio

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung rasio perputaran piutang dan jangka waktu penagihan rata-rata. Semakin kecil rasio perputaran piutang dan jangka waktu penagihan rata-rata menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

The Company's ability to collect receivables can be determined by calculating the receivables turnover ratio and the average collection period. A lower receivables turnover ratio and average collection period indicate the Company's faster ability to collect receivables.

Pos Akun Account Position	**2024 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**2023 (Rp-miliar)** (Rp billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Rasio Perputaran Piutang (kali) Accounts Receivable Turnover Ratio (times)	**0,85**	**0,84**	**0,01**	**1,00** ↑
Jangka Waktu Penagihan Rata-Rata (hari) Average Collection Period (days)	**429**	**433**	**-4,27**	**-0,99** ↓

Pada tahun 2024, rasio perputaran piutang Perusahaan sebesar 0,85 kali, meningkat 0,01 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,84 kali. Sementara, jangka waktu penagihan rata-rata selama 429 hari, lebih cepat 4 hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana jangka waktu penagihan rata-rata selama 433 hari. Hal ini memberikan gambaran perusahaan makin cepat dalam mencairkan piutang usaha.

Untuk dapat menggambarkan piutang usaha jangka pendek dan jangka panjang, berikut disampaikan piutang usaha berdasarkan umur piutang.

In 2024, the Company's receivables turnover ratio was 0.85 times, an increase of 0.01 times compared to 0.84 times in the previous year. Meanwhile, the average collection period was 429 days, 4 days faster than the previous year's average collection period of 433 days. This reflects the Company's improving ability to collect trade receivables more quickly.

To illustrate short-term and long-term trade receivables, the following presents the trade receivables based on their aging.

Piutang Usaha Berdasarkan Umur Piutang
Trade Receivables Based on Aging

Umur Piutang Accounts Receivable Aging	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
> 1 s.d 12 bulan > 1 to 12 months	1.369,46	1.514,42	(144,96)	(9,57)
> 12 s.d 15 bulan > 12 to 15 months	15,79	16,83	(1,04)	(6,18)
> 15 s.d 18 bulan > 15 to 18 months	64,39	9,76	54,63	559,73
> 18 s.d 21 bulan > 18 to 21 months	11,46	4,62	6,84	148,05
> 21 s.d 24 bulan > 21 to 24 months	11,49	51,06	(39,57)	(77,50)
> 24 s.d 27 bulan > 24 to 27 months	8,71	10,89	(2,18)	(20,02)
> 27 s.d 30 bulan > 27 to 30 months	2,03	0,74	1,29	174,32
> 30 s.d 33 bulan > 30 to 33 months	1,12	0,25	0,87	348,00
> 33 s.d 36 bulan > 33 to 36 months	1,39	0,12	1,27	1.058,33
> 36 bulan > 36 months	47,77	34,72	13,05	37,59
Sub Jumlah Subtotal	1.533,61	1.643,42	(109,81)	(6,68)
Dikurangi: **Cadangan kerugian penurunan nilai** Less: Allowance for Impairment Losses	(163,10)	(136,79)	(26,31)	19,23
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Total Trade Receivables - Net	1.370,51	1.506,63	(136,12)	(9,03)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is sufficient to cover the potential future uncollectibility of trade receivables.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Kebijakan dan Dasar Pemilihan Struktur Modal

Policy and Basis for Capital Structure Selection

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha, Perusahaan mengelola permodalannya dengan memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur modal secara aktif dan berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Struktur modal Perusahaan terdiri jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas, liabilitas - bersih dan jumlah ekuitas Manajemen secara berkala melakukan kajian atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari kajian tersebut, Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

In order to ensure business continuity, the Company manages its capital by providing returns to shareholders, offering benefits to other stakeholders, and maintaining an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Company actively and periodically reviews and manages its capital structure by considering future capital needs, capital efficiency, current and future profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditure, and projected strategic investment opportunities.

The Company's capital structure consists of the total loans less cash and cash equivalents, net liabilities, and total equity. Management periodically conducts a review of the Company's capital structure. As part of this review, Management considers the cost of capital and associated risks.

Struktur Modal

Capital Structure

Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing* atau rasio utang berbunga bersih terhadap ekuitas dengan perhitungan yang ditunjukkan sebagai berikut.

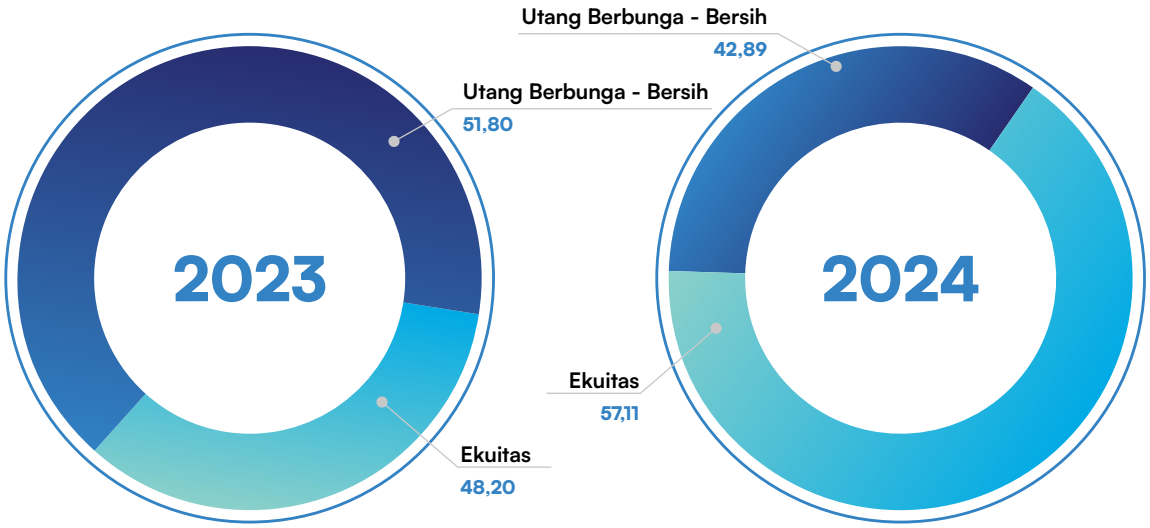
The Company monitors its capital based on the gearing ratio or the ratio of net interest-bearing debt to equity, with the calculation as follows.

Struktur Modal Tahun 2023-2024
Capital Structure for 2023-2024

Pos Akun Account Position	**2024 (Rp-miliar)**	**2023 (Rp-miliar)**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Pinjaman Berbunga Interest-Bearing Loans				
SubJumlah Pinjaman Berbunga Subtotal of Interest-Bearing Loans	**1.767,04**	**1.875,41**	**(108,37)**	**(5,78)**

Dikurangi: Less:					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	268,06	158,01	106,31	65,72	↑
Jumlah Utang Berbunga — Bersih Total Net Interest-Bearing Debt	1.498,97	1.717,4	(218,43)	(12,71)	↓
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.494,57	3.315,09	179,48	5,41	↑
Jumlah Struktur Modal Total Capital Structure	4.993,54	5.032,49	(38,95)	(0,77)	↓
Rasio Utang Berbunga - Bersih terhadap Ekuitas (%) Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio (%)	42,89	51,80			

Komposisi Struktur Modal Perusahaan Tahun 2023-2024
Company Capital Structure Composition 2023-2024



Perusahaan mengelola struktur permodalannya dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan usaha tetap terjaga, sekaligus mengoptimalkan keseimbangan antara liabilitas dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri atas total pinjaman yang dikurangi dengan kas dan setara kas, sehingga mencerminkan posisi liabilitas bersih terhadap total ekuitas. Manajemen secara berkala melakukan evaluasi terhadap struktur permodalan tersebut, dengan mempertimbangkan biaya pendanaan serta risiko-risiko yang terkait sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan strategis.

The Company manages its capital structure with the aim of ensuring the continuity of its business while optimizing the balance between liabilities and equity. The Company's capital structure consists of total debt minus cash and cash equivalents, reflecting the net liabilities position relative to total equity. Management periodically evaluates this capital structure, considering funding costs and associated risks as part of the strategic decision-making process.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Perusahaan melakukan investasi barang modal bertujuan untuk mencukupi kebutuhan alat berat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pengerjaan proyek-proyek yang dijalankan oleh Perusahaan. Adapun informasi investasi barang modal yang dijalankan Perusahaan di tahun 2024, adalah sebagai berikut

The Company makes capital investments to meet the heavy equipment needs required to complete the projects undertaken by the Company. The following is the information on the capital expenditure carried out by the Company in 2024:

Jenis Investasi Type of Investment	**Tujuan Investasi** Investment Purpose	**Nilai (Rp-miliar)** Value (Rp billion)
Investasi Alat berat *Mining* Mining Heavy Equipment Investment	**Proyek *Mining* HRM 1** Mining Project HRM 1	**21,72**
Investasi Alat Berat *Mining* Mining Heavy Equipment Investment	**Proyek *Mining* HRM 1** Mining Project HRM 1	**83,52**
Investasi IT IT Investment	**UKP**	**1,4**
Jumlah Total		**106,64**

Jumlah investasi barang modal tahun 2024 sebesar Rp106,64 mengalami penurunan (74%) atau setara dengan Rp307,38 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp414,02 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan belum adanya tambahan proyek baru.

The total capital expenditure in 2024 amounted to Rp106.64 billion, a decrease of 74% or equivalent to Rp307.38 billion compared to Rp414.02 billion in 2023. This decline was primarily due to the absence of new projects.

Pos Akun Account Position	**2024 (Rp-miliar)**	**2023 (Rp-miliar)**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Capital Expenditure Investment Realization	**106,64**	**414,02**	**(307,38)**	**(74,15)**

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Expenditure

Di tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang bukan dalam bentuk pendanaan.

In 2024, the Company has no material commitments for capital expenditure that are not in the form of financing.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Subsequent to the Date of the Accountant's Report

PP Presisi tidak melakukan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, tidak terdapat mitigasi dampak nilai tukar mata uang asing yang dilakukan Perusahaan.

PP Presisi does not conduct transactions in foreign currencies. Therefore, the Company does not mitigate the impact of foreign exchange rate fluctuations.

Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Information on the Impact of Foreign Exchange Rates

Dalam kegiatan operasi dan bisnisnya, PPRE tidak memiliki transaksi dalam bentuk mata uang asing. PPRE tidak menerapkan kebijakan lindung nilai dalam transaksi dengan menggunakan mata uang asing.

In its operations and business activities, PPRE does not engage in transactions involving foreign currencies. PPRE does not apply hedging policies in transactions using foreign currencies.

Pencapaian Target Tahun 2024

Achievement of 2024 Targets

Asumsi-asumsi dalam Menentukan Target Tahun 2024

Assumptions in Setting the 2024 Targets

Dalam menyusun target kinerja tahun 2024, Perseroan mengacu pada sejumlah asumsi makroekonomi nasional dan global yang berperan penting dalam memengaruhi dinamika sektor konstruksi dan pertambangan. Asumsi-asumsi ini disusun berdasarkan data outlook ekonomi nasional, proyeksi indikator fiskal dan moneter, serta tren harga komoditas energi dan nilai tukar yang berdampak langsung terhadap operasional dan proyeksi pendapatan Perusahaan.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada di kisaran 5,0% hingga 5,2%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,7%. Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi yang ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah melalui APBN, serta peningkatan investasi dan ekspor bersih. Kinerja fiskal hingga kuartal ketiga 2023 menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih solid, yang turut menopang pergerakan sektor-sektor strategis, termasuk konstruksi dan jasa pertambangan.

Tingkat inflasi nasional diperkirakan berada di kisaran 2,8% hingga 4,0%. Proyeksi ini tetap dalam koridor sasaran inflasi Bank Indonesia dan mempertimbangkan risiko tekanan harga pangan, energi, dan barang impor. Stabilitas harga ini menjadi landasan penting dalam perhitungan biaya proyek dan perencanaan belanja operasional Perusahaan.

Dari sisi moneter, suku bunga acuan Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diasumsikan berada pada level 6,7%, mengindikasikan masih ketatnya stance kebijakan moneter untuk menjaga daya saing pasar keuangan domestik dan menahan tekanan nilai tukar. Dalam konteks pendanaan proyek dan struktur pembiayaan, asumsi ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung estimasi biaya modal dan struktur *cost of fund*.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika diasumsikan berada dalam rentang Rp14.850 hingga Rp15.000 per USD. Asumsi ini memperhitungkan faktor global seperti arah kebijakan suku bunga *The Fed*, neraca perdagangan nasional, serta perkembangan geopolitik yang memengaruhi arus modal. Stabilitas nilai tukar menjadi kunci dalam menjaga harga bahan baku impor serta pembiayaan alat berat dan komponen lainnya dalam mata uang asing.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan berada di kisaran USD 80 hingga USD 82 per

In setting the performance targets for 2024, the Company refers to a number of national and global macroeconomic assumptions that play a key role in influencing the dynamics of the construction and mining sectors. These assumptions are based on national economic outlook data, projections of fiscal and monetary indicators, as well as trends in energy commodity prices and exchange rates, which have a direct impact on the Company's operations and revenue projections.

The Indonesian government projects national economic growth in 2024 to be in the range of 5.0% to 5.2%, higher than the previous year's achievement of 4.7%. This projection reflects optimism about the continued economic recovery, supported by strong household consumption, government spending through the state budget (APBN), and increased investment and net exports. Fiscal performance up to the third quarter of 2023 indicates that economic recovery remains solid, which also supports the movement of strategic sectors, including construction and mining services.

National inflation is expected to range from 2.8% to 4.0%. This projection stays within Bank Indonesia's inflation target, while considering risks from food, energy, and import price pressures. Price stability serves as an important foundation for calculating project costs and planning the Company's operational expenditures.

From a monetary perspective, the benchmark 10-year Government Bond (SBN) interest rate is assumed to be at 6.7%, indicating the continued tightness of the monetary policy stance to maintain the competitiveness of the domestic financial market and to resist exchange rate pressures. In the context of project financing and financing structure, this assumption is used as a basis for estimating capital costs and cost of funds structure.

The exchange rate of the Rupiah against the US Dollar is assumed to be in the range of Rp14,850 to Rp15,000 per USD. This assumption takes into account global factors such as the direction of the Fed's interest rate policy, the national trade balance, and geopolitical developments that affect capital flows. Exchange rate stability is crucial for maintaining the cost of imported raw materials and financing for heavy equipment and other components in foreign currencies.

Meanwhile, the Indonesian Crude Price (ICP) is assumed to

barel, yang dipengaruhi oleh ketidakpastian global termasuk ketegangan geopolitik dan kebijakan produksi OPEC+. Kenaikan harga komoditas energi ini turut memberikan dampak positif terhadap subsektor pertambangan, terutama batubara dan mineral energi lainnya. Hal ini menjadi momentum penting bagi Perseroan untuk memperkuat kontribusi segmen jasa pertambangan sebagai lini bisnis utama, seiring peningkatan permintaan alat berat dan jasa konstruksi tambang.

Secara keseluruhan, asumsi-asumsi tersebut menjadi acuan fundamental dalam menetapkan target pendapatan, struktur biaya, margin profitabilitas, serta strategi investasi dan pembiayaan untuk tahun 2024. Dengan mempertimbangkan faktor risiko dan peluang dari sisi makroekonomi, Perseroan menetapkan target yang realistis namun progresif dalam rangka menjaga kesinambungan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional.

range between USD 80 and USD 82 per barrel, influenced by global uncertainties including geopolitical tensions and OPEC+ production policies. The rise in energy commodity prices also positively impacts the mining subsector, particularly coal and other energy minerals. This presents an important opportunity for the Company to strengthen its contribution from the mining services segment as a core business line, with increased demand for heavy equipment and mining construction services.

Overall, these assumptions serve as fundamental references for setting revenue targets, cost structure, profitability margins, as well as investment and financing strategies for 2024. By considering macroeconomic risks and opportunities, the Company sets realistic yet progressive targets to ensure continued growth in financial and operational performance.

Pencapaian Target Tahun 2024

Target Achievement in 2024

Perihal Subject	**Realisasi 2024** 2024 Realization	**Target 2024** 2024 Target	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2024 (%)** Achievement of Realization Against 2024 Targets (%)	
	1	2	(1:2)	
Pemasaran | Marketing				
Perolehan Kontrak Baru (Rp-miliar) New Contract Acquisition (Rp-billion)	6.818,51	5.249,0	129,90	↑
Keuangan | Finance				
Pendapatan (Rp-miliar) Revenue (Rp-billion)	3.790,81	4.114,03	92,14	↓
Laba Kotor (Rp-miliar) Gross Profit (Rp-billion)	778,22	484,40	160,66	↑
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (Rp-miliar) Profit Before Income Tax (Rp-billion)	203,63	369,13	55,16	↓
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-miliar) Net Profit for the Year (Rp billion)	194,09	242,10	80,17	↓
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada | Net Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk (Rp-miliar) Owners of the Parent Entity (Rp billion)	90,34	242,09	37,32	↓
Kepentingan Non-Pengendali (Rp-miliar) Non-Controlling Interests (Rp billion)	103,75	-		↑ ↓
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rp-miliar) Total Comprehensive Income for the Year (Rp billion)	197,98	242,09	81,78	↓
EBITDA (Rp-miliar) EBITDA (Rp billion)	1.254,85	844,75	148,55	↑
Jumlah Aset (Rp-miliar) Total Assets (Rp billion)	7.654,63	5.237,18	146,16	↑

Jumlah Liabilitas (Rp-miliar) Total Liabilities (Rp billion)	4.160,06	3.324,31	125,14
Jumlah Ekuitas (Rp-miliar) Total Equity (Rp billion)	3.494,56	1.912,87	182,69
Struktur Modal | Capital Structure			
Utang Berbunga (Rp-miliar) Interest-Bearing Debt (Rp billion)	1.498,97	1.645,07	91,12
Jumlah Ekuitas (Rp-miliar) Total Equity (Rp billion)	3.494,57	1.912,87	182,69
Rasio Utang Berbunga - Bersih terhadap Modal (%) Net Interest-Bearing Debt to Capital Ratio (%)	0,51	0,86	59,30

Pemasaran | Marketing

PPRE berhasil membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp6,82 triliun, atau 129,90% dari target yang telah direvisi untuk tahun 2024 sebesar Rp5,25 triliun. Capaian ini melampaui ekspektasi dan mencerminkan efektivitas strategi ekspansi pasar serta keberhasilan perusahaan dalam mengakselerasi akuisisi proyek-proyek strategis, terutama pada sektor jasa pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Capaian signifikan ini menjadi modal penting bagi kesinambungan pendapatan tahun-tahun mendatang.

PPRE successfully recorded new contract acquisitions totaling Rp6.82 trillion, equivalent to 129.90% of the revised 2024 target of Rp5.25 trillion. This achievement exceeded expectations and reflects the effectiveness of the Company's market expansion strategy as well as its success in accelerating the acquisition of strategic projects, particularly in the mining services and infrastructure development sectors. This significant accomplishment serves as a vital asset for sustaining revenue in the coming years.

Posisi Keuangan | Financial Position

Total aset perusahaan meningkat signifikan menjadi Rp7,65 triliun, atau 146% dari target, didorong oleh ekspansi operasional dan peningkatan nilai proyek berjalan. Sementara itu, total liabilitas tercatat sebesar Rp4,16 triliun, atau 125% dari target, yang masih dalam kendali seiring peningkatan aset.

The Company's total assets increased significantly to Rp7.65 trillion, or 146% of the target, driven by operational expansion and the rising value of ongoing projects. Meanwhile, total liabilities stood at Rp4.16 trillion, or 125% of the target, which remains manageable in line with the asset growth.

Total ekuitas meningkat drastis menjadi Rp3,49 triliun, atau 183% dari target Rp1,91 triliun, mencerminkan penguatan posisi keuangan dan kemungkinan adanya penambahan modal dari pemegang saham atau penyesuaian nilai wajar investasi.

Total equity rose sharply to Rp3.49 trillion, or 183% of the target of Rp1.91 trillion, reflecting a strengthened financial position and the possibility of capital injections from shareholders or fair value adjustments of investments.

Pendapatan dan Profitabilitas | Revenue and Profitability

Pada sisi pendapatan, PPRE mencatat realisasi sebesar Rp3,79 triliun, atau mencapai 92% dari target tahun 2024. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, pendapatan menunjukkan pemulihan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, ditopang oleh kontribusi berkelanjutan dari lini jasa pertambangan dan konstruksi.

In terms of revenue, PPRE recorded a realization of Rp3.79 trillion, or 92% of the 2024 target. Although it did not fully meet the target, the revenue reflected a stronger recovery compared to the previous year, supported by sustained contributions from the mining services and construction segments.

Realisasi laba kotor tercatat sebesar Rp778,22 miliar, yang berarti 161% dari target, mengindikasikan efisiensi biaya yang signifikan dalam pelaksanaan proyek serta peningkatan efektivitas operasional.

Gross profit realization stood at Rp778.22 billion, equivalent to 161% of the target, indicating significant cost efficiency in project execution and improved operational effectiveness.

Namun demikian, laba sebelum pajak penghasilan hanya tercapai sebesar 55% dari target (Rp203,63 miliar dari target Rp369,13 miliar). Hal ini turut berdampak pada laba bersih tahun berjalan, yang hanya mencapai 80% dari target atau senilai Rp194,09 miliar.

However, profit before income tax reached only 55% of the target (Rp203.63 billion out of the Rp369.13 billion target). This also affected the net profit for the year, which reached only 80% of the target, amounting to Rp194.09 billion.

Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk hanya mencapai Rp90,34 miliar atau 37% dari target Rp242,09 miliar. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar laba bersih justru berasal dari entitas non-pengendali, dengan kontribusi sebesar Rp103,75 miliar. Hal ini mencerminkan dominannya porsi keuntungan dari entitas anak usaha dengan kepemilikan minoritas atau joint venture.

Net profit attributable to owners of the parent entity was only Rp90.34 billion or 37% of the Rp242.09 billion target. This composition shows that the majority of the net profit came from non-controlling interests, contributing Rp103.75 billion. This reflects the dominant share of profits originating from subsidiaries with minority ownership or joint ventures

Meskipun begitu, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan tercapai sebesar 82%, dan EBITDA menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar Rp1,25 triliun atau 149% dari target, menandakan arus kas operasional yang kuat.

Nevertheless, total comprehensive income for the year reached 82% of the target, and EBITDA showed excellent performance with a realization of Rp1.25 trillion or 149% of the target, indicating strong operating cash flow.

Struktur Modal | Capital Structure

Jumlah utang berbunga tercatat sebesar Rp1,50 triliun, atau 91% dari target. Ini menandakan pengelolaan utang yang disiplin dan efisien, terutama dalam menjaga leverage tetap terkendali.

Total interest-bearing debt was recorded at Rp1.50 trillion, or 91% of the target. This indicates disciplined and efficient debt management, particularly in maintaining controlled leverage.

Rasio utang berbunga bersih terhadap modal berada pada tingkat yang sangat konservatif yaitu 0,43, atau hanya 50% dari target yang diproyeksikan, mencerminkan tingkat risiko keuangan yang rendah dan kapasitas pendanaan yang sehat untuk ekspansi ke depan.

The net interest-bearing debt-to-equity ratio stood at a very conservative level of 0.43, or just 50% of the projected target, reflecting a low level of financial risk and a healthy funding capacity for future expansion.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Financial Health Level

PPRE memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Atas dasar landasan tersebut, Perusahaan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia atau "Pefindo" untuk melakukan penilaian atas pemeringkatan.

Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Pefindo pada tanggal 13 Maret 2024, peringkat PPRE di tahun 2024 adalah idBBB+ untuk periode 13 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025.

PPRE received a Corporate Health Level assessment based on the Indonesian Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Corporate Governance and Significant Activities of State-Owned Enterprises. Based on this framework, the Company appointed PT Pemeringkat Efek Indonesia or "Pefindo" to conduct the rating assessment.

According to the results issued by Pefindo on March 13, 2024, PPRE's rating for 2024 is idBBB+ for the period from March 13, 2024, to March 1, 2025.

Prospek Usaha Tahun 2025

Business Prospects for 2025

Tahun 2025 akan menjadi tahun optimis bagi Indonesia. Terbentuknya kepemimpinan nasional yang baru pasca hasil Pemilu nasional di awal tahun 2024, Pemerintah memiliki sejumlah target untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, termasuk pengembangan konstruksi dan infrastruktur nasional. Hal ini terlihat dari anggaran belanja negara sebesar Rp400,3 triliun untuk bidang infrastruktur dengan fokus pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun, optimisme tersebut harus diiringi dengan kewaspadaan, terutama dengan proyeksi defisit APBN.

Berdasarkan hasil riset BCI Central, di tahun 2025 pasar konstruksi nasional diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang stabil, khususnya di sektor bangunan; meskipun tantangan diprediksi terjadi di konstruksi sipil akibat keterbatasan anggaran. Nilai pasar proyek konstruksi pada tahun 2025 diperkirakan dapat tumbuh 5,48% dibandingkan tahun 2024. Proyek sipil yang diprediksi akan menjadi tulang punggung adalah proyek jalan dan jembatan, bendungan, pelabuhan dan pekerjaan sipil, serta pembangkit listrik.

Sektor bangunan diperkirakan meningkat 9,09% mencapai Rp227,76 triliun. Sedangkan kategori proyek perumahan dan industri diharapkan menjadi kontributor terbesar terhadap nilai konstruksi bangunan tahun 2025 dengan porsi masing-masing sebesar 28,29% atau senilai Rp64,44 triliun dan 24,75% atau senilai Rp56,37 triliun. Prospek pasar ini diharapkan dapat memberikan gambaran optimis konstruksi Indonesia 1 (satu) tahun ke depan, sehingga dapat memberikan peluang untuk tumbuh bagi pelaku konstruksi Indonesia.
Pada sektor pertambangan, Indonesia telah mengukuhkan posisinya sebagai produsen nikel terbesar di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global pada tahun 2025. Dominasi ini diperkuat oleh investasi signifikan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam pengembangan fasilitas pengolahan nikel di Indonesia. Namun, peningkatan produksi yang pesat telah menyebabkan penurunan harga nikel global hingga 45% pada tahun 2023, memicu rencana pemerintah untuk memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 150 juta ton pada tahun 2025 guna menstabilkan harga.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan, serta meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri nikel. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan kebutuhan investasi besar, prospek sektor konstruksi dan jasa pertambangan nikel di Indonesia pada tahun 2025 tetap menjanjikan. Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci dalam memanfaatkan peluang yang ada.

The year 2025 is expected to be an optimistic year for Indonesia. With the formation of new national leadership following the results of the national elections in early 2024, the Government has set several targets to boost Indonesia's economy, including the development of national construction and infrastructure. This is evident from the national budget allocation of Rp400.3 trillion for infrastructure, focusing on inclusive infrastructure development aimed at public welfare. However, this optimism must be accompanied by caution, especially with the projected budget deficit.

According to research from BCI Central, the national construction market is expected to experience stable growth in 2025, particularly in the building sector, although challenges are anticipated in civil construction due to budget limitations. The market value of construction projects in 2025 is expected to grow by 5.48% compared to 2024. Civil projects that are expected to be the backbone include road and bridge projects, dams, ports, civil works, and power plants.

The building sector is predicted to increase by 9.09%, reaching Rp227.76 trillion. The residential and industrial project categories are expected to be the largest contributors to the building construction value in 2025, with respective shares of 28.29% (Rp64.44 trillion) and 24.75% (Rp56.37 trillion). This market outlook is expected to provide an optimistic view of Indonesia's construction sector for the coming year, offering growth opportunities for construction players in Indonesia.

In the mining sector, Indonesia has solidified its position as the world's largest nickel producer, contributing about 60% of global production in 2025. This dominance is strengthened by significant investments from Chinese companies in the development of nickel processing facilities in Indonesia. However, the rapid increase in production has led to a 45% drop in global nickel prices in 2023, prompting the government to plan a reduction in nickel ore production quotas to 150 million tons in 2025 to stabilize prices.

This measure is expected to maintain a balance between supply and demand while increasing added value through the downstreaming of the nickel industry. Overall, despite challenges such as commodity price fluctuations and the need for significant investments, the outlook for the construction and nickel mining services sectors in Indonesia in 2025 remains promising. Government support through various policies and collaboration with the private sector will be key to capitalizing on available opportunities.

Rencana Kerja dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2025

Company Work Plan and Performance Projection for 2025

Proyeksi Kinerja Tahun 2025

Performance Projections for 2025

Dalam menyusun target-target kinerja tahun 2025, PT PP Presisi Tbk mengacu pada berbagai indikator ekonomi makro dan sektor strategis nasional yang relevan. Berdasarkan proyeksi dari AMRO dan lembaga internasional lainnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,9% YoY, sementara pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN+3 meningkat menjadi 4,4%. Untuk Indonesia sendiri, PDB tahun 2025 diproyeksikan tumbuh dalam rentang 4,8% hingga 5,6% didorong oleh optimisme terhadap transisi pemerintahan yang telah terlaksana dengan baik serta pelaksanaan program "Indonesia Emas 2045" yang menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural di berbagai sektor.

Dari sisi indikator makro, asumsi penyusunan RKAP 2025 memperhitungkan nilai tukar rupiah di kisaran Rp15.300 — Rp15.700 per USD, tingkat inflasi antara 1,5% hingga 3,5%, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan stabil di rentang USD 80 — 82 per barel, sejalan dengan tren fluktuasi komoditas global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur.

Kebijakan hilirisasi industri mineral, terutama nikel sebagai sektor unggulan nasional, memberikan peluang besar bagi PPRE dalam memperluas pasar jasa pertambangan. Pemerintah juga secara aktif menjalin kemitraan dengan pelaku global seperti IMIP, IWIP, dan produsen EV serta baterai terkemuka, menciptakan captive market jangka panjang. Dalam konteks ini, PPRE mengintegrasikan strategi peningkatan kompetensi internal dan pemanfaatan alat berat secara optimal untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Selain itu, asumsi penyusunan target tahun 2025 turut mempertimbangkan sejumlah arahan pemegang saham melalui Dewan Komisaris, termasuk di antaranya kolaborasi aktif dengan Divisi Infra 1 dan 2, efisiensi biaya operasional, serta pelaksanaan divestasi aset tidak produktif. Perusahaan juga menargetkan arus kas operasional minimum setara dengan laba bersih, serta pengendalian rasio utang terhadap ekuitas secara konservatif agar tetap menjaga likuiditas dan fleksibilitas keuangan.

Dengan kombinasi antara fundamental ekonomi yang terukur, dukungan kebijakan nasional, dan strategi korporasi yang adaptif, PT PP Presisi Tbk menetapkan target 2025 secara realistis namun tetap progresif, terutama dalam memperkuat lini bisnis jasa pertambangan dan konstruksi yang menjadi motor utama pertumbuhan perusahaan ke depan.

In formulating its 2025 performance targets, PT PP Presisi Tbk refers to various relevant macroeconomic indicators and national strategic sectors. Based on projections from AMRO and other international institutions, global economic growth in 2025 is expected to reach 2.9% year-on-year, while the ASEAN+3 region's growth is projected to increase to 4.4%. For Indonesia, GDP in 2025 is projected to grow within the range of 4.8% to 5.6%, driven by optimism surrounding the smooth government transition and the implementation of the "Indonesia Emas 2045" program, which aims to accelerate economic growth and structural transformation across various sectors.

From a macroeconomic perspective, the assumptions used in preparing the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) include an exchange rate in the range of Rp15,300 to Rp15,700 per USD, an inflation rate between 1.5% and 3.5%, and a 10-year government bond yield of 6.7%. Meanwhile, the Indonesian Crude Price (ICP) is assumed to remain stable in the range of USD 80 to 82 per barrel, in line with the global commodity fluctuation trends caused by geopolitical conflicts in the Middle East and Eastern Europe.

The downstream policy for the mineral industry, particularly nickel as a national priority sector, presents a significant opportunity for PPRE to expand its mining services market. The government is also actively fostering partnerships with global players such as IMIP, IWIP, and leading EV and battery manufacturers, creating a long-term captive market. In this context, PPRE integrates strategies to enhance internal competencies and optimize the utilization of heavy equipment to meet these demands.
Additionally, the formulation of the 2025 targets also takes into account several directives from shareholders through the Board of Commissioners, including active collaboration with Infra 1 and 2 Divisions, operational cost efficiency, and the divestment of non-productive assets. The Company also aims to achieve a minimum operating cash flow equivalent to net profit, and to maintain a conservative debt-to-equity ratio to ensure financial liquidity and flexibility.

With a combination of measured economic fundamentals, supportive national policies, and an adaptive corporate strategy, PT PP Presisi Tbk has set its 2025 targets in a manner that is both realistic and progressive, particularly in strengthening its mining services and construction business lines, which serve as the main drivers of the Company's future growth.

Proyeksi Kinerja Tahun 2025

Performance Projections for 2025

Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2025
Company Performance Projections for 2025

Perihal Subject	**Proyeksi Tahun 2025 Dibandingkan Realisasi Tahun 2024** 2025 Projections Compared to 2024 Actual Performance
Pemasaran Marketing	
Perolehan Kontrak Baru (Rp-miliar) New Contract Acquisition (Rp billion)	**52%** ⬆
Kinerja Keuangan Financial Performance	
Pendapatan Revenue	**79%** ⬆
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	**10%** ⬆
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity	**30%** ⬆
EBITDA	**15%** ⬆
Struktur Modal Capital Structure	
Rasio Utang Berbunga - Bersih terhadap Modal Capital Structure	**77,2%** ⬆
Dividen	
Pembayaran Dividen di Tahun 2025 atas Hasil Usaha Tahun 2024 Dividend Payment in 2025 Based on 2024 Business Results	**0%** ⬆

Pemasaran
Marketing

Perolehan Kontrak Baru diproyeksikan meningkat sebesar 52% dibandingkan realisasi tahun 2024.

New Contract Acquisitions are projected to increase by 52% compared to the realization in 2024.

Ini mencerminkan optimisme perusahaan terhadap prospek pasar di 2025 dan kesiapan untuk mengakuisisi proyek-proyek baru dalam skala yang lebih besar, khususnya di sektor pertambangan dan konstruksi.

This reflects the Company's optimism about market prospects in 2025 and its readiness to acquire larger-scale projects, particularly in the mining and construction sectors.

Kenaikan ini juga berpotensi menjadi katalis pertumbuhan pendapatan di tahun-tahun berikutnya, terutama jika dikombinasikan dengan efektivitas pelaksanaan proyek.

This increase also has the potential to serve as a catalyst for revenue growth in the coming years, especially when combined with effective project execution.

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Pendapatan diproyeksikan naik sebesar 79% dari capaian tahun 2024.

Revenue is projected to increase by 79% from the 2024 achievement.

- ✅ Proyeksi ini sangat agresif dan menunjukkan keyakinan perusahaan terhadap percepatan progres proyek-proyek yang telah dikontrak serta efisiensi pada siklus kas dan termin pembayaran.
- ✅ Kenaikan ini juga bisa didorong oleh backlog yang besar dari kontrak yang diperoleh pada 2024.

- ✅ This is a highly aggressive projection and reflects the Company's strong confidence in the accelerated progress of contracted projects as well as improved efficiency in cash cycles and payment terms.
- ✅ The increase may also be driven by a substantial backlog from contracts secured in 2024.

Laba Bersih Tahun Berjalan diperkirakan meningkat sebesar 10%

Net Profit for the Year is expected to grow by 10%.

- ✅ Kenaikan ini bersifat moderat dibandingkan lonjakan pendapatan, mengindikasikan bahwa meskipun volume usaha meningkat signifikan, margin keuntungan tetap dijaga dengan hati-hati.
- ✅ Faktor-faktor seperti beban bunga, depresiasi, dan efisiensi biaya menjadi elemen penting yang harus dimonitor.

- ✅ This is a moderate increase compared to the surge in revenue, indicating that despite a significant rise in business volume, profit margins are being carefully managed.
- ✅ Factors such as interest expenses, depreciation, and cost efficiency will be critical elements to monitor.

Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk diproyeksikan naik 30%.

Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity is projected to rise by 30%.

- ✅ Ini merupakan sinyal bahwa distribusi laba ke induk akan lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya.
- ✅ Kenaikan ini bisa juga mencerminkan konsolidasi entitas anak yang lebih menguntungkan atau pergeseran proporsi kepemilikan.

- ✅ This signals a more optimal profit distribution to the parent compared to the previous year.
- ✅ The increase may also reflect a more profitable consolidation of subsidiaries or a shift in ownership proportions.

EBITDA naik sebesar 15%, menandakan pertumbuhan kas operasional yang stabil.

EBITDA is expected to grow by 15%, indicating stable growth in operating cash flow.

- ✅ Meski tidak setinggi pertumbuhan pendapatan, peningkatan ini menunjukkan bahwa operasional inti masih mampu memberikan kontribusi positif secara kas, menjaga fleksibilitas finansial.
- ✅ While not as high as the revenue growth, this increase shows that core operations continue to contribute positively to cash flow, supporting financial flexibility.

Struktur Modal
Capital Structure

Rasio Utang Berbunga Bersih terhadap Modal diproyeksikan naik menjadi 77,2% dari 43% di tahun sebelumnya.

The Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio is projected to rise to 77.2% from 43% in the previous year.

- ✅ Ini berarti perusahaan akan lebih mengandalkan pendanaan berbasis utang untuk mendukung pertumbuhan.
- ✅ Meskipun leverage meningkat, hal ini masih dapat diterima apabila digunakan untuk mendanai proyek-proyek produktif yang berkontribusi langsung terhadap EBITDA.
- ✅ This indicates that the Company will rely more heavily on debt-based financing to support its growth.
- ✅ Although leverage is increasing, it remains acceptable if the funds are allocated to productive projects that directly contribute to EBITDA.

Dividen
Dividen

Dividen untuk tahun 2025 (berdasarkan laba tahun 2024) tetap 0%.

Dividend for 2025 (based on 2024 profits) will remain at 0%.

- ✅ Keputusan ini menunjukkan pendekatan konservatif dan fokus manajemen dalam mempertahankan likuiditas internal untuk ekspansi.
- ✅ Hal ini lazim dilakukan pada perusahaan yang sedang berada dalam fase pertumbuhan tinggi atau membutuhkan pembiayaan internal besar untuk proyek strategis.
- ✅ This decision reflects a conservative approach and the management's focus on maintaining internal liquidity for expansion.
- ✅ This is common for companies in high-growth phases or those requiring significant internal financing for strategic projects.

Kesimpulan Umum
Conclusion

Proyeksi tahun 2025 menunjukkan arah pertumbuhan yang kuat dan ambisius, khususnya pada aspek pendapatan dan perolehan kontrak baru. Namun demikian, pendekatan terhadap profitabilitas dan struktur modal menunjukkan kehati-hatian, terutama dalam menjaga arus kas dan memastikan leverage tetap produktif. Kebijakan tidak membagikan dividen semakin menegaskan fokus jangka panjang pada pertumbuhan dan penguatan posisi keuangan.

The 2025 projections indicate a strong and ambitious growth trajectory, particularly in terms of revenue and new contract acquisitions. However, the approach to profitability and capital structure reflects caution, especially in maintaining cash flow and ensuring that leverage remains productive. The decision not to distribute dividends further emphasizes the long-term focus on growth and strengthening the financial position.

Strategi dan Rencana Kerja Tahun 2025

Strategy and Work Plan for the Year 2025

Untuk dapat mencapai berbagai kinerja di atas, PP Presisi telah merumuskan strategi korporat yang dilandasi pada tantangan baru pada bisnis jasa pertambangan, baik dari sisi internal maupun eksternal sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

To achieve the various performance targets mentioned above, PP Presisi has formulated a corporate strategy based on new challenges in the mining construction services business, both from internal and external perspectives, as shown in the diagram below.

STRENGTHS

- **Menjadi salah satu BUMN Konstruksi yang masuk ke pasar tambang nikel**
  Being one of the state-owned construction companies in he nickel mining market
- **Memiliki kapasitas kepemilikan alat berat sebanyak 1600++ unit**
  Owning a fleet of over 1,600 heavy equipment units
- **Memiliki captive market di Weda Bay Nickel yang besar sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan perusahaan**
  Having a large captive market in Weda Bay Nickel, which helps maintain the company's financial stability
- **Memiliki kesempatan untuk masuk ke proyek strategis nasional melalui perusahaan induk (PTPP) dengan skema JO/Feeding atau melalui tender Eksternal**
  Having opportunities to participate in strategic national projects through the parent company (PTPP) via JO/Feeding schemes or external tenders

WEAKNESSES

- **Perlunya peningkatan kompetensi pegawai di bidang tambang dan mekanik**
  The need to improve employee competencies in mining and mechanics
- **Perlunya menurunkan biaya bunga bank baik itu atas leasing maupun KMK**
  The need to reduce bank interest costs, including for leasing and working capital loans (KMK)
- **Piutang Usaha masih tinggi**
  High trade receivables
- **Tingginya kewajiban pembayaran hutang usaha**
  High trade debt obligations
- **Rendahnya produktivitas alat berat dan occupancy rate alat berat**
  Low heavy equipment productivity and heavy equipment occupancy rate

OPPORTUNITIES

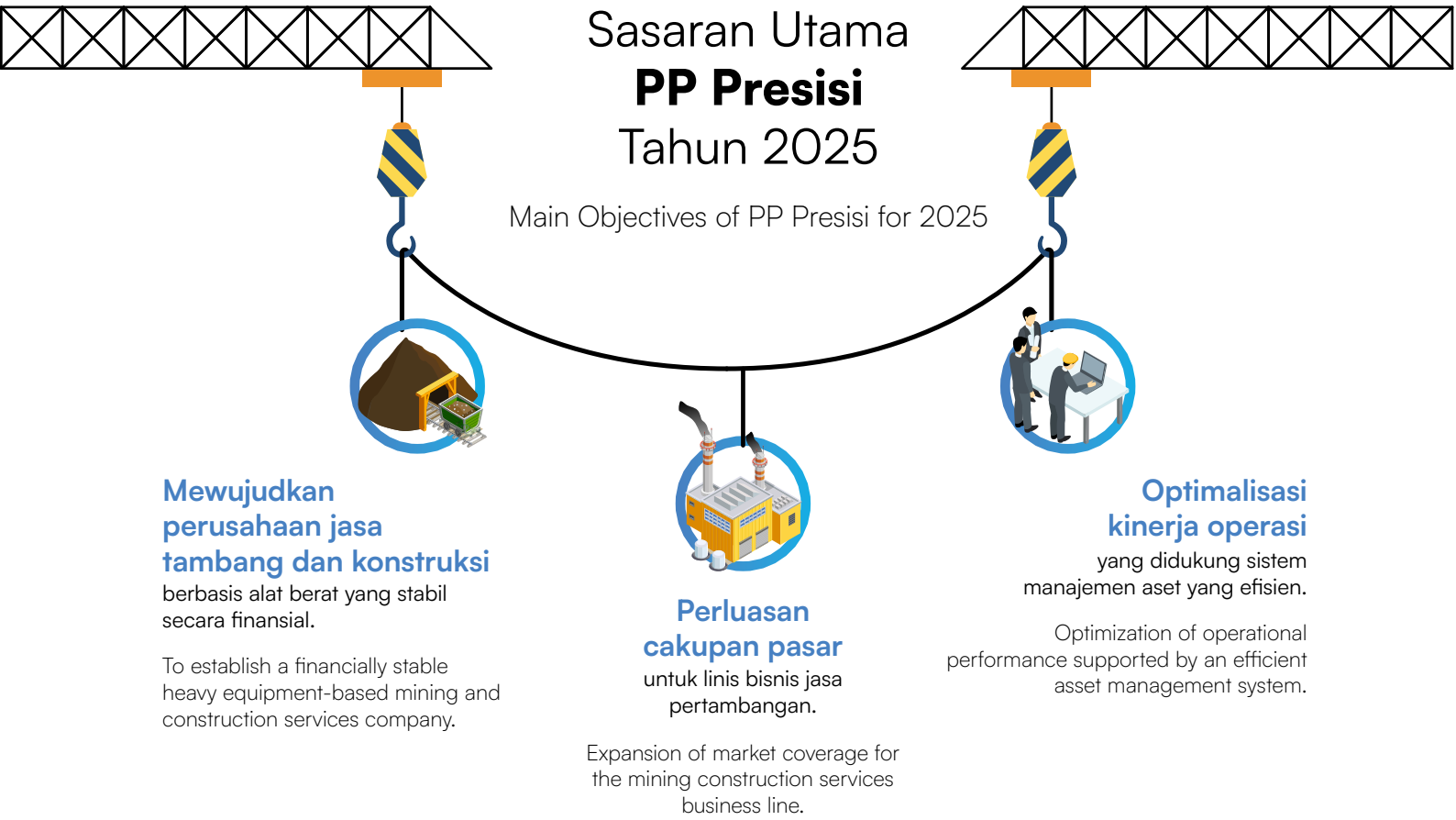
- **Ekspansi pasar di bidang tambang nikel yang dipengaruhi oleh potensi meningkkatnya konsumsi nikel**
  Market expansion in the nickel mining sector driven by the potential increase in nickel consumption
- **Peningkatan kompetensi di bidang tambang melalui lesson learned project dan sertifikasi**
  Enhancement of mining competencies through project lesson-learned and certification programs
- **Penjualan aset ventura bersama atas minat dari pihak luar terhadap aset ventura tersebut**
  Sale of joint venture assets due to external interest in those assets
- **Strategi hilirisasi nikel dari pemerintah Republik Indonesia**
  Nickel downstreaming strategy by the Government of the Republic of Indonesia

THREATS

- **Penurunan pasar konstruksi akibat tahun politik**
  Decline in the construction market due to the election year
- **Penurunan konsumsi komoditas nikel akibat resesi global**
  Decrease in nickel commodity consumption due to a global recession
- **Naiknya harga bahan baku utama (besi, solar, material alam) akibat dari krisis global**
  Increase in the prices of key raw materials (steel, diesel, natural materials) due to the global crisis
- **Keterbatasan jumlah alat berat sector tambang di vendor/dealer akibat besarnya permintaan pasar**
  Limited availability of mining equipment from vendors/dealers due to high market demand

Untuk itu, PP Presisi merumuskan strategi korporat dengan sasaran utama yang menekankan pada 3 (tiga) aspek yang terlihat pada bagan di bawah ini.

To address this, PP Presisi has formulated a corporate strategy with main objectives focusing on three key aspects, as shown in the diagram below.



Untuk mencapai sasaran utama di atas, Perusahaan telah menyusun strategi korporat dengan melakukan percepatan pemulihan operasional bisnis guna meningkatkan profitabilitas yang akan berfokus pada lini bisnis konstruksi yaitu jasa pertambangan dan pekerjaan infrastruktur sipil.

Untuk jasa pertambangan, Perusahaan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan hingga kegiatan utama jasa pertambangan seperti pekerjaan *Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore hauling*, hingga Road Maintenance melalui sinergi dengan entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, dengan skema Join Operation dan perolehan pasar jasa pertambangan eksternal melalui skema main contractor.

PP Presisi juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis konstruksi pertambangan serta kinerja peralatan melalui pengembangan sistem tersentralisasi yaitu SIMAP, didukung dengan melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi key personil di lini bisnis tambang.

To achieve the main objectives mentioned above, the Company has formulated a corporate strategy by accelerating business operational recovery to increase profitability. The strategy will focus on the construction business line, specifically mining services and civil infrastructure work.

For mining services, the Company will provide integrated services across the entire mining services scope, ranging from the development of main and supporting infrastructure for mining activities to core mining services such as Mining Operations, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore Hauling, and Road Maintenance. This will be done through synergy with the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, using a Joint Operation scheme and acquiring external mining services markets through the main contractor scheme.

PP Presisi will also optimize the mining construction business operations and equipment performance by developing a centralized system, SIMAP, supported by meeting and enhancing the competencies of key personnel in the mining business line.

Strategi Korporat PP Presisi Tahun 2025
PP Presisi Corporate Strategy for 2025

Key Objective

Meningkatkan Perusahaan jasa tambang & Konstruksi berbasis alat berat yagn stabil secara Finansial	Optimalisasi kinerja operasi Perusahaan yang didukung oleh system manajemen aset yang efisien	Perluasan cakupan pasar untuk lini bisnis jasa tambang
Strengthening the Heavy Equipment-Based Mining and Construction Services Company with Stable Financial Performance	Optimization of the Company's Operational Performance Supported by an Efficient Asset Management System	Market Expansion for the Mining Services Business Line

BUSINESSLINES

Expansion & Grow in Mining

- ✅ Meningkatkan Perolehan Kontrak Baru di WBN
  Increasing New Contract Acquisition in WBN
- ✅ Melakukan Penetrasi Pasar Mining ke Owner Baru
  Conducting Market Penetration into New Mining Owners

Selective in Civil Work

- ✅ Bersinergi dengan PTPP melalui skema feeding & Join Operation untuk melakukan penetrasi Pasar Civil Work secara selektif
  Synergizing with PTPP through feeding and Joint Operation schemes to conduct selective market penetration in Civil Work

Optimization in Rental Equipment

- ✅ Mengoptimalkan Utilisasi Asset Idle melalui Proyek Feeding & Sewa Eksternal
  Optimizing Idle Asset Utilization through Feeding Projects and External Rentals

Streamlining other Business Lines

- ✅ Pengurangan Lini bisnis & Percepatan Divestasi pada Aset (Production Plant & Structure Work)
  Business Line Reduction & Acceleration of Divestment in Assets (Production Plant & Structure Work)
- ✅ Melaksanakan Divestasi Aset Ventura Bersama sebagai program streamlining
  Executing Joint Venture Asset Divestment as part of the streamlining program

ENABLERS

Increase Financial Capability

- ✅ Melakukan percepatan pencairan WIP 1 untuk meningkatkan likuiditas perusahaan
  Accelerating the disbursement of WIP 1 to improve the company's liquidity
- ✅ Implementasi Program Cost Reduction
  Implementation of Cost Reduction Program

Improve Operational Process

- ✅ Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan monitoring untuk memaksimalkan produktivitas proyek
  Utilization of technology in planning and monitoring to maximize project productivity
- ✅ Melakukan Konsinyasi Sparepart Proyek Mining & Optimalisasi kinerja peralatan melalui preventive maintenance
  Conducting Spare Part Consignment for Mining Projects & Optimizing Equipment Performance through Preventive Maintenance

Optimize Asset Management

- ✅ Divestasi asset secara berkala untuk menjaga rasio occupancy rate
  Periodic asset divestment to maintain occupancy rate ratio
- ✅ Melakukan investasi secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan proyek Mining
  Conducting selective investments based on the needs of mining projects

Increase Employee Productivity

- ✅ Optimalisasi Produktivitas karyawan dengan Talent Movement & Program Perampingan
  Optimizing employee productivity through Talent Movement & Streamlining Programs
- ✅ Implementasi FMDP & PPRE Learning Center
  Implementation of FMDP & PPRE Learning Center

Pada lini bisnis *Civil Work*, Perusahaan akan berupaya meningkatkan kinerja, kapabilitas operasional, dan juga *project management*.

Perusahaan juga berupaya melakukan percepatan peningkatan pengelolaan divestasi alat berat atas aset alat berat dalam kondisi *idle*. Fokus perolehan pasar Perusahaan di sektor *Civil Work* adalah bersinergi dengan induk Perusahaan yaitu PT PP Persero Tbk dalam perolehan kontrak eksternal dengan skema *join operation*.

In the Civil Work business line, the Company will focus on improving performance, operational capabilities, and project management.

The Company will also work on accelerating the management of heavy equipment divestment for assets that are idle. The focus of the Company's market acquisition in the Civil Work sector is to collaborate with the parent company, PT PP (Persero) Tbk, in obtaining external contracts through the joint operation scheme.

Program Strategis Pemasaran **PP Presisi** Tahun 2025

Strategic Marketing Program of PP Presisi for 2025

Konstruksi Sipil
Civil Construction

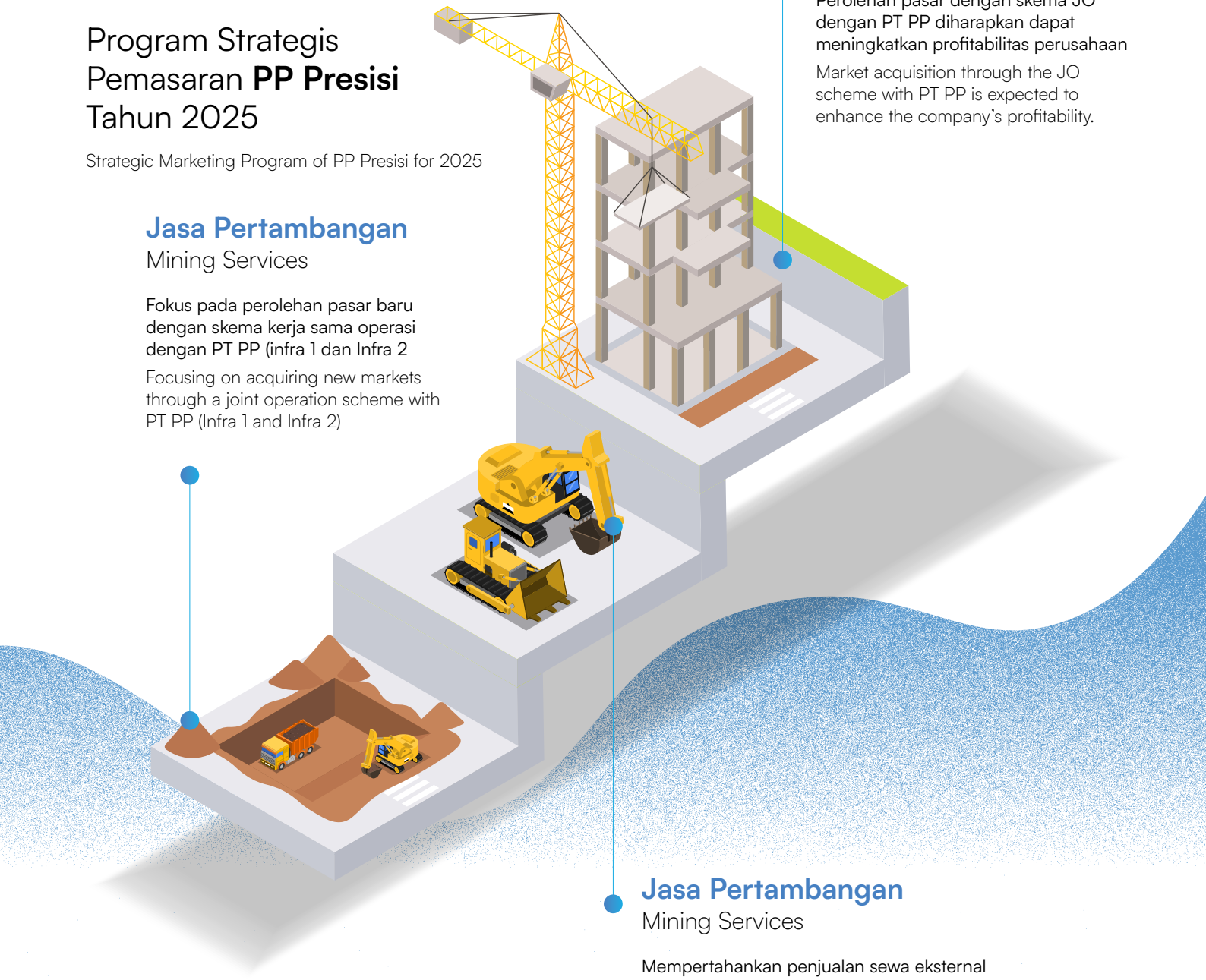
Perolehan pasar dengan skema JO dengan PT PP diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan

Market acquisition through the JO scheme with PT PP is expected to enhance the company's profitability.

Jasa Pertambangan
Mining Services

Fokus pada perolehan pasar baru dengan skema kerja sama operasi dengan PT PP (infra 1 dan Infra 2

Focusing on acquiring new markets through a joint operation scheme with PT PP (Infra 1 and Infra 2)



Jasa Pertambangan
Mining Services

Mempertahankan penjualan sewa eksternal ketika memang alat berat RFU tidak digunakan oleh operasional internal perusahaan.

Maintaining external rental sales when heavy equipment in RFU is not used by the company's internal operations.

PP Presisi juga melakukan inisiatif strategi di bidang penguatan kinerja keuangan dengan program strategis dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

PP Presisi is also implementing strategic initiatives in the area of strengthening financial performance, with the strategic programs outlined in the diagram below.

Program Strategis **PP Presisi** Tahun 2025

Strategic Programs of PP Presisi for 2025

Likuiditas yang Kuat
Strong Liquidity

Memiliki aset jangka pendek yang cukup untuk menutupi kewajiban

Having sufficient short-term assets to cover liabilities

Parameter: Current Ration, Quick Ration

Profitabilitas yang Konsisten
Consistent Profitability

Secara teratur menghasilkan laba dan arus kas positif dari operasi

Regularly Generating Profit and Positive Cash Flow from Operations

Parameter: GPM, NPM

Tingkat Hutang yang Terkelola
Managed Debt Level

Rasio utang terhadap ekuitas yang seimbang

Balanced Debt-to-Equity Ratio

DER, ICR

Arus Kas Positif
Positive Cash Flow

Arus kas operasional yang sehat yang mendukung Operasional, Investasi, dan Pendanaan

Healthy Operating Cash Flow Supporting Operations, Investment, and Financing

Parameter: NCFO, FCF

Ketersediaan Order Book
Order Book Availability

The value of carry-over and new marketing in the current year that can be converted into Company sales

The value of carry-over and new marketing in the current year that can be converted into Company sales

Parameter: Order Book Burn Rate

Kinerja Operasional Positif
Positive Operational Performance

Efisiensi perputaran kas Perusahaan atas biaya dan pendapatan operasional Perusahaan

Efficiency of the Company's Cash Turnover in Relation to Operational Expenses and Revenues

Parameter: TO, ARTO, APTO



Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 22 tentang penggunaan laba dan pembagian dividen, laba bersih Perusahaan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perusahaan.

In accordance with the applicable laws and the Company's Articles of Association, Article 22 regarding the use of profits and dividend distribution, the Company's net profit may be distributed to Shareholders as dividends after setting aside the mandatory reserve fund required by law. The dividend distribution must be approved by the Shareholders through a decision at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) based on the Company's recommendation.

Pembagian Dividen

Dividend Distribution

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, pemegang saham menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp80.215.559.126,- sebagai berikut:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) decision for fiscal year 2023, held on June 5, 2024, the shareholders agreed to allocate the net profit of the Company attributable to the owners of the parent entity for the fiscal year ended December 31, 2022, amounting to Rp80,215,559,126, as follows:

- ✅ Sebesar Rp4.010.777.956,- atau 5% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk digunakan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- ✅ Sebesar Rp76.204.781.170,- atau 95% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai saldo laba ditahan.

- ✅ An amount of Rp4,010,777,956, or 5% of the net profit attributable to the owners of the parent entity, to be used as a mandatory reserve in compliance with Article 70, paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and
- ✅ An amount of Rp76,204,781,170, or 95% of the net profit attributable to the owners of the parent entity, as retained earnings.

Mengacu pada hasil keputusan tersebut, maka di tahun 2024 Perusahaan tidak membagikan laba atas hasil usaha tahun buku 2023.

Referring to the decision, the Company did not distribute profits from the financial year 2023 in 2024.

Adapun pembagian dividen yang dilakukan Perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The dividend distribution made by the Company over the last 5 (five) years is as follows:

Tahun Pembagian Year of Distribution	**Tahun Dividen** Dividend Year	**Tanggal Pengumuman** Announcement Date	**Tanggal Pembayaran** Payment Date	**Dividen Kas yang Dibagikan (Rupiah)** Cash Dividends Distributed (Rupiah)	**Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham)** Dividend per Share (Rp/share)	**Rasio Pembagian Dividen (%)** Dividend Payout Ratio (%)
2024	**2023**	**5 Juni 2024** June 5, 2024	**Perusahaan tidak membagikan dividen sesuai keputusan pemegang saham yang tertuang dalam forum RUPS.** The Company did not distribute dividends in accordance with the shareholders' decision outlined in the GMS.			
2023	**2022**	**24 Mei 2023** May 24, 2023				
2022	**2021**	**20 April 2022** April 20, 2022	**20 Mei 2022** 20 May 2022	**7.692.916.304**	**0,76**	**10,0**
2021	**2020**	**9 Juni 2021** June 9, 2021	**9 Juli 2021** 9 July 2021	**11.713.871.788**	**1,16**	**20,0**
2020	**2019**	**3 Juni 2020** June 3, 2020	**3 Juli 2020** 3 July 2020	**66.255.088.159**	**6,50**	**20,0**



Perpajakan dan PNBP: Kontribusi Terhadap Negara

Taxation and Non-Tax State Revenue (PNBP): Contribution to the State

Perusahaan berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara, melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Kontribusi pajak dari Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp 233,94, mengalami penurunan sebesar 28% dari pembayaran pajak di tahun 2023 sebesar mencapai Rp324,73 miliar. Berikut disampaikan tabel kontribusi pajak Perusahaan.

The Company is committed to contributing to the state by fulfilling its tax obligations. The tax contribution from the Company in 2024 reached Rp233.94 billion, a decrease of 28% compared to the tax payment in 2023, which amounted to Rp324.74 billion. The following is a table of the Company's tax contributions.

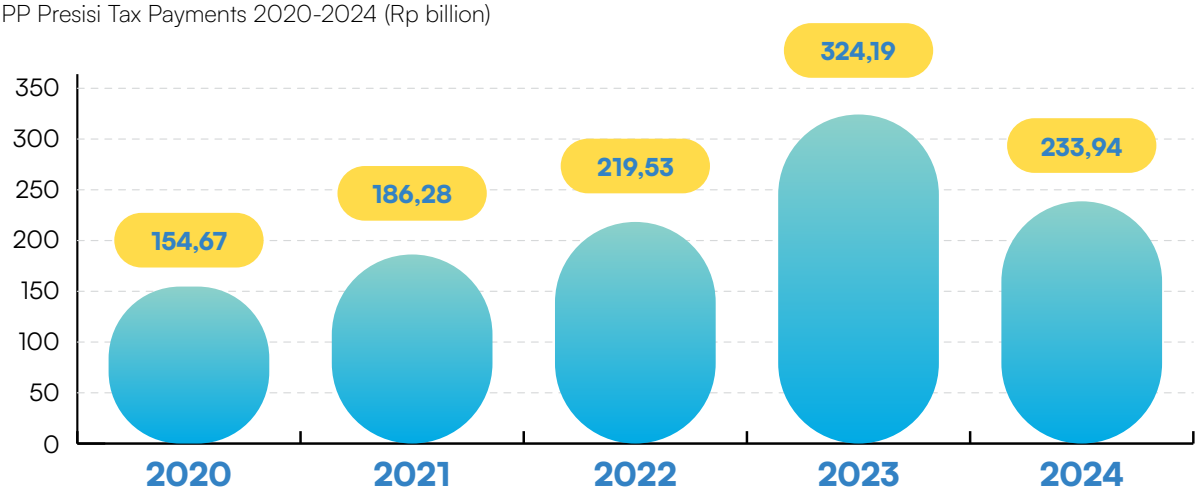
Jenis Pajak Type of Tax	2024 (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar)	Kenaikan (Penurunan) Increase a(Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp billion)	Persentase (%) Percentage (%)
PPh 23 Jasa Income Tax Article 23 Services	1,65	1,71	-0,06	-4%
PPh 23 Sewa Income Tax Article 23 Rent	3,69	1,33	2,36	177%
PPh 4(2) Konstruksi Income Tax Article 4(2) Construction	1,82	3,37	-1,55	-46%
PPh 4(2) Sewa Tanah Income Tax Article 4(2) Land Rent	0,512	1,09	-0,578	-53%
PPh 21 Income Tax Article 21	11,99	11,97	0,02	0%
PPh 25 Income Tax Article 25	4,41	4,3	0,11	3
PPN Value Added Tax (VAT)	209,87	300,98	-91,11	-30%
Jumlah Pajak yang Dibayarkan Total Tax Paid	233,94	324,74	-90,81	-28%

Perkembangan pembayaran pajak yang dipenuhi oleh Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of tax payments made by the Company over the past 5 (five) years can be seen in the chart below.

Perkembangan Pembayaran Pajak PP Presisi Tahun 2020-2024 (Rp-miliar)

PP Presisi Tax Payments 2020-2024 (Rp billion)



Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Perusahaan tidak memiliki kewajiban tertentu terkait setoran kepada negara berupa PNBP.

For Non-Tax State Revenue (PNBP), the Company does not have any specific obligations related to contributions to the state in the form of PNBP.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Fund Utilization from Public Offering

Informasi tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham

Realization Report of the Use of Proceeds from the Public Offering of Shares

Di tahun 2024 tidak terdapat kewajiban Perusahaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum saham sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Seluruh hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan pada tanggal 24 November 2017 telah habis digunakan untuk modal kerja pada akhir tahun 2022 sesuai laporan terakhir Perusahaan kepada OJK melalui Surat No. 001/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2022.

In 2024, the Company has no obligation to submit a report on the use of funds from the public offering of shares in accordance with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings. All proceeds from the initial public offering of shares conducted on November 24, 2017, have been fully utilized for working capital by the end of 2022, in accordance with the Company's last report to OJK through Letter No. 001/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2022.

Laporan hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 per 31 Desember 2024

Report on the Public Offering Results of Sustainable Bonds I PP Presisi Phase I Year 2022 as of December 31, 2024

Jenis Penawaran Umum Berkelanjutan Types of Shelf Public Offering	**Tanggal Efektif** Effective Date	**Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum** Actual Proceeds from Public Offering		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds from Public Offering	**Biaya Penawaran Umum** Public Offering Costs	**Hasil Bersih** Net Proceeds
	3	4	5	6
Penawaran Umum Berkelanjutan New Contract Acquisition (Rp-billion)	**30 Juni 2022**	**202.980.000.000**	**4.967.460.969**	**198.012.539.031**
Biaya penjamin emisi efek Underwriting fee)		**0,60%**		
Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Profession Service Fee		**0,40%**		
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institution Fee		**0,75%**		
Biaya lain-lain Other fees		**0,69%**		

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering of Bonds

Berikut disampaikan laporan realisasi penggunaan dana per 31 Desember 2024 dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 yang telah kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 7 Januari 2025 melalui Surat No. 002/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2025.

The following is the report on the realization of the use of funds as of December 31, 2024, from the proceeds of Public Offering of Shelf-Registered Bonds I Phase I of 2022, which has been submitted to the Indonesia Stock Exchange (IDX) on January 7, 2025, through Letter No. 002/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2025.

Tidak terdapat perubahan penggunaan dana dari prospektus penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022.

There have been no changes in the use of funds from the prospectus of Offering the Shelf-Registered Bonds I PP Presisi Phase I Year 2022.

	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Planned Use of Funds According to the Prospectus		**Realisasi Penggunaan Dana** Actual Use of Funds		**Sisa Dana Hasil Penawaran Umum** Remaining Proceeds from Public Offering
	Belanja Modal 70% Capital Expenditure 70%	**Moda Kerja 30%** Working Capital 30%	**Belanja Modal** Capital Expenditure (CapEx)	**Modal Kerja** EWorking Capital	**Total Sisa Dana Obligasi** Total Remaining Bond Proceeds
	7	8	9	10	11
	138.608.777.322	**59.403.761.709**	**77.268.500.297**	**59.403.761.709**	**61.340.277.025**

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha,Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, and/or Debt/ Capital Restructuring

Di tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan Divestasi, Investasi, Ekspansi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/Modal yang memenuhi kriteria transaksi material.

In 2024, the Company did not carry out any Divestments, Investments, Expansions, Mergers/Amalgamations, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring that meet the criteria for material transactions.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Kebijakan tentang Pihak Berelasi
Policy on Related Parties

Di tahun 2023, Perusahaan melakukan transaksi bersama pihak berelasi dengan tetap memperhatikan kewajaran dari setiap transaksi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor), yang meliputi:

In 2023, the Company engaged in transactions with related parties while ensuring the fairness of each transaction. Related parties refer to individuals or entities that are associated with the Company (reporting entity), including:

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

  Individuals or close family members who have a relationship with the reporting entity if the individual:

  - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;

    Has control or joint control over the reporting entity;
  - Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor;

    Has significant influence over the reporting entity;
  - Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau Entitas Induk dari entitas pelapor.

    Is a key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

- Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut.

  An entity is related to the reporting entity if it meets any of the following conditions:

  - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak, dan Entitas Anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);

    The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  - Satu entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau Entitas Asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

    One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture that is a member of a group, of which the other entity is a member);
  - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

    Both entities are joint ventures of the same third party;

Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah Entitas Asosiasi dari entitas ketiga;	An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;	The entity is a post-employment benefit plan for the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to reporting entity;
Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1);	The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (1);
Orang yang diidentifikasi dalam poin (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);	A person identified in point (1)(a) has significant influence over the entity or is a key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity);
Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada Entitas Induk dari entitas pelapor.	The entity, or a member of the group to which the entity belongs, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

Nama Pihak Berelasi Bertransaksi dan Sifat Hubungan
Names of Related Parties and Transactions, and Nature of Relationships

Nama-nama pihak berelasi dan bertransaksi, beserta sifat hubungan dengan Perusahaan diungkapkan dalam tabel berikut.

The names of related parties and transactions, along with the nature of their relationships with the Company, are disclosed in the following table.

Pihak Berelasi Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Sifat Transaksi** Nature of Transaction
PT PP (Persero) Tbk	**Pemegang Saham Pengendali langsung Perusahaan, pemberi kerja** Direct controlling shareholder of the Company, project owner	• **Piutang usaha** • **Piutang retensi** • **Tagihan bruto pemberi kerja** • **Uang muka pemberi kerja** • **Utang lain-lain** • **Pendapatan usaha** • Trade receivables • Retention receivables • Gross amount due from customers • Advances from project owner • Other payables • Revenue

YKKPP (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan)	**Pemegang Saham** Shareholder	**Utang lain-lain, Pendapatan Usaha** Other payables, Revenue
PT PP Properti Tbk	**Entitas sepengendali** Entity under common control	• **Piutang usaha** • **Uang muka pemberi kerja** • **Pendapatan usaha** • Trade receivables • Advances from project owner • Revenue
PT PP Urban	**Entitas sepengendali** Entity under common control	• **Piutang usaha** • **Piutang retensi** • **Utang Usaha** • **Pendapatan usaha** • Trade receivables • Retention receivables • Trade payables • Revenue
PT PP Infrastruktur	**Entitas sepengendali** Entity under common control	• **Piutang usaha** • **Pendapatan usaha** • Trade receivables • Revenue
PT PP Energi	**Entitas sepengendali** Entity under common control	**Pendapatan usaha** Revenue
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Board of Commissioners and Board of Directors of the Company	**Personil manajemen kunci** Key management personnel	**Kompensasi dan remunerasi** Compensation and remuneration
Karyawan Kunci Key Employees	**Personil manajemen kunci** Key management personnel	**Kompensasi dan remunerasi** Compensation and remuneration
PT Grahaprima Realtindo	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Piutang usaha** • **Tagihan bruto pemberi kerja** • Trade receivables • Gross amount due from customers
PT PPRO Sampurna Jaya	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Piutang usaha** • **Piutang retensi** • **Tagihan bruto pemberi kerja** • **Uang muka pemberi kerja** • Trade receivables • Retention receivables • Gross amount due from customers • Advances from project owner
PT PP Properti Suramadu	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Piutang usaha** • **Piutang retensi** • **Uang muka pemberi kerja** • Trade receivables • Retention receivables • Advances from project owner

PT Limasland Realty Cilegon	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Piutang usaha** • **Piutang retensi** • **Tagihan bruto pemberi kerja** • **Uang muka pemberi kerja** • Trade receivables • Retention receivables • Gross amount due from customers • Advances from project owner
PT Odira Energy Karang Agung	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	**Pendapatan Usaha** Revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Kas dan Setara Kas** • **Utang Bank** • Cash and Cash Equivalents • Bank Loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Kas dan Setara Kas** • **Utang Bank** • Cash and Cash Equivalents • Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Kas dan Setara Kas** • **Investasi Jangka Pendek** • Cash and Cash Equivalents • Short term invesments
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	**Kas dan Setara Kas** Cash and Cash Equivalentss
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	**Utang Bank** Bank Loans
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Kas dan Setara Kas** • **Piutang Usaha** • Cash and cash equivalents • Trade Receivables
PT Amarta Karya (Persero)	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	**Piutang Usaha** Trade Receivables
PT Angkasa Pura I (Persero)	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Piutang Usaha** • **Tagihan bruto pemberi kerja** • **Pendapatan Usaha** • Trade Receivables • Gross amount due from customers • Revenue
PT Angkasa Pura II (Persero)	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Piutang Retensi** • **Tagihan Bruto Pemberi Kerja** • Retention Receivables • Gross amount due from customers
PT Barata Indonesia (Persero)	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	**Utang Usaha** Trade payables

PT Brantas Abipraya (Persero)	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Tagihan Bruto Pemberi Kerja** • **Pendapatan Usaha** • Gross amount due from customers • Revenue
PT Dahana (Persero)	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	**Utang Usaha** Trade Payables
PT Hutama Karya Infrastruktur	**Entitas afiliasi** Affiliated entity	• **Piutang Usaha** • **Piutang Retensi** • Trade receivables • Retention receivables
PP Presisi - Sarana KSO	**Ventura Bersama** Joint Venture	• **Piutang Lain-lain** • **Investasi pada ventura bersama** • **Bagian Laba Ventura Bersama** • Other receivables • Investment in joint venture • Share in profit of joint venture
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	**Ventura Bersama** Joint Venture	• **Piutang Lain-lain** • **Investasi pada ventura bersama** • **Bagian Laba Ventura Bersama** • Other receivables • Investment in joint venture • Share in profit of joint venture
KSO PPRE - RPJ	**Ventura Bersama** Joint Venture	• **Investasi pada Ventura Bersama** • **Bagian Laba Ventura Bersama** • Investment in joint venture • Share in profit of joint venture
KSO PPRE - Yala Persada Indonesia	**Ventura Bersama** Joint Venture	• **Investasi pada Ventura Bersama** • **Bagian Laba Ventura Bersama** • Investment in joint venture • Share in profit of joint venture
LMA Konsorsium	**Ventura Bersama** Joint Venture	• **Piutang Usaha** • **Tagihan Bruto Pemberi Kerja** • **Piutang Lain-lain** • **Investasi pada Ventura Bersama** • **Uang Muka Pemberi Kerja** • **Pendapatan Usaha** • **Bagian Laba Ventura Bersama** • Trade receivables • Gross amount due from customers • Other receivables • Investment in joint venture • Advances from project owner • Revenue • Share in profit of joint venture
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	• **Piutang Retensi** • **Tagihan Bruto Pemberi Kerja** • **Pendapatan Usaha** • Retention receivables • Gross amount due from customers • Revenue

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	**Utang Usaha** Trade Payables
PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	**Utang Usaha** Trade Payables
PT Varia Usaha Beton	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	**Utang Usaha** Trade Payables
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	• **Piutang Usaha** • **Piutang Retensi** • **Tagihan Bruto Pemberi Kerja** • Trade Receivables • Retention Receivables • Gross Receivables from Employer
PT Waskita Beton Precast Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	**Utang Usaha** Trade Payables
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	• **Piutang Usaha** • **Piutang Retensi** • **Tagihan Bruto Pemberi Kerja** • Trade Receivables • Retention Receivables • Gross Receivables from Employer
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	• **Piutang Usaha** • **Pendapatan Usaha** • Trade Receivables • Operating Revenue
PT Wijaya Karya Beton Tbk	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	**Utang Usaha** Trade Payables
PT Multi Terminal Indonesia	**Entitas afiliasi** Affiliated Entity	**Utang Usaha** Trade Payables

Kewajaran dan Alasan Dilakukan Transaksi
Fairness and Reasons for Transactions

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum. Selain itu, transaksi dengan pihak berelasi juga dilakukan karena peran strategis Perusahaan sebagai *sub contractor* dan main *contractor* yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang didukung oleh kepemilikan alat berat yang sangat dibutuhkan.

Harga jual dan harga pembelian ditentukan berdasarkan perjanjian dan memiliki syarat dan kondisi yang sama pada pihak berelasi dan ketiga.

Transactions with related parties are conducted in accordance with generally accepted business practices. Additionally, transactions with related parties are carried out due to the Company's strategic role as both a subcontractor and main contractor, capable of undertaking construction projects supported by the ownership of essential heavy equipment.

The sale and purchase prices are determined based on agreements and have the same terms and conditions as those with third parties.

Realisasi Transaksi dan Saldo Transaksi
Realization of Transactions and Transaction Balances

Realisasi transaksi dan saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan manajemen kunci, serta sifat hubungannya diungkapkan dalam tabel berikut.

The realization of transactions and transaction balances with related parties and key management, along with the nature of the relationships, are disclosed in the table below.

Saldo Aset dari Pihak Berelasi
Balance of Assets from Related Parties

Pos Akun Account Position	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi Terhadap Aset Perusahaan (%) Contribution to Company Assets (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Kontribusi Terhadap Aset Perusahaan (%) Contribution to Company Assets (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	233,94	2,93	68,15	0,95	165,79	243,27	↑
Investasi jangka pendek Short-Term Investments	90,00	1,13	90,00	1,26	0,00	0,00	
Piutang Usaha Accounts Receivable	410,68	5,14	698,87	9,75	(288,19)	(41,24)	↓
Piutang Retensi Retention Receivables	38,92	0,49	157,07	2,19	(118,15)	(75,22)	↓
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers	468,46	5,86	628,76	8,78	(160,30)	(25,49)	↓
Piutang lain-lain Other Receivables	5,95	0,07	6,69	0,09	(0,74)	(11,06)	↓
Jumlah Aset dari Pihak Berelasi Total Assets from Related Parties	1.247,95	16,32	1.649,54	23,02	(401,59)	(24,35)	↓
Jumlah Aset Konsolidasian Total Consolidated Assets	7.648,85		7.164,99		483,86	6,75	↑

Saldo Liabilitas dari Pihak Berelasi
Liability Balance from Related Parties

Pos Akun Account Position	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi Terhadap Liabilitas Perusahaan (%) Contribution to Company Liabilities (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Kontribusi Terhadap Liabilitas Perusahaan (%) Contribution to Company Liabilities (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Utang usaha Accounts Payable	18,93	0,42	42,84	1,11	(23,91)	(55,81)	⬇
Utang Lain-lain Other Payables	232,54	5,12	395,33	10,27	(162,79)	(41,18)	⬇
Uang Muka Pemberi Kerja Advance from Customers	1,57	0,03	1,57	0,04	0,00	0,00	
Utang bank jangka pendek Short-Term Bank Loans	393,63	8,67	660,93	17,17	(267,30)	(40,44)	⬇
Utang bank jangka panjang Long-Term Bank Loans	141,18	3,11	55,82	1,45	85,36	152,92	⬆
Jumlah Liabilitas dari Pihak Berelasi Total Liabilities from Related Parties	787,85	18,96	1.156,50	30,04	(368,65)	(31,88)	⬇
Jumlah Liabilitas Konsolidasian Total Consolidated Liabilities	4154,28		3.849,90		304,38	7,91	⬆

Transaksi dari Pihak Berelasi atas Pendapatan
Related Party Transactions on Revenue

Pos Akun Account Position	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perusahaan (%) Contribution to Company Revenue (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perusahaan (%) Contribution to Company Revenue (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Pendapatan dari Pihak Berelasi Revenue from Related Parties	466,43	1,23	870,53	25,60	(404,10)	(46,42)	⬇
Jumlah Pendapatan Konsolidasian Total Consolidated Revenue	3.790,81		3.400,87		389,94	11,47	⬆

Transaksi dari Pihak Berelasi atas Beban Umum Administrasi
Related Party Transactions on General Administration Expenses

Pos Akun Account Position	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi Terhadap Beban Usaha Perusahaan (%) Contribution to Company Operating Expenses (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (IDR billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Kontribusi Terhadap Beban Usaha Perusahaan (%) Contribution to Company Operating Expenses (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration	2,33	2,26	2,46	2,72	(0,13)	(5,28)	⬇
Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration	9,47	9,19	7,95	8,81	1,52	19,12	⬆
Jumlah Beban Usaha dari Pihak Berelasi Total Operating Expenses from Related Parties	11.8	11.45	10.41	11.54	1.39	13.35	⬆
Jumlah Beban Usaha Konsolidasian Total Consolidated Operating Expenses	103,02		90,23		(0,13)	(5,28)	⬇

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Company Policy Regarding Transaction Review Mechanism and Compliance with Relevant Regulations and Provisions

Perusahaan memiliki kebijakan terkait transaksi yang terdapat hubungan afiliasi yang didasarkan pada Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan **("POJK 42/20")**, sedangkan untuk Transaksi Material mendasarkan pada Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha **("POJK 17/20")**, antara lain dengan membuat Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen.

The Company has a policy related to transactions with affiliated parties based on OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK 42/20"). For Material Transactions, it follows OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Business Activity Changes ("POJK 17/20"), including the preparation of Fairness Opinion from an Independent Appraiser.

Transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan, sebagian kecil termasuk sebagai Transaksi Afiliasi, Benturan Kepentingan dan/atau transaksi material, yang mana dalam transaksi tersebut sebagiannya merupakan transaksi yang dapat dikecualikan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana POJK 42/20 dan/atau POJK 17/20, dengan ketentuan:

Some of the transactions carried out by the Company are classified as Affiliated Transactions, Conflicts of Interest, and/or Material Transactions, with some of these transactions exempted from fulfilling the obligations under POJK 42/20 and/or POJK 17/20, under the following conditions:

- Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle)*;

  A statement from the Board of Directors confirming that affiliated transactions have gone through proper procedures to ensure they are carried out according to common business practices, including adherence to the arm's length principle;

- Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle)*;

  The role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in ensuring that affiliated transactions are conducted according to common business practices and the arm's length principle;

- Pelaksanaan transaksi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan pemenuhan *Negative* Covenants kreditur Perusahaan.

  Transactions are carried out in compliance with applicable laws and regulations, including compliance with the Company's creditor Negative Covenants.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Pada tahun 2024 tidak ada informasi keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

In 2024, there was no financial information containing extraordinary or unusual events.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan

Changes in Legislation and Their Impact on Company Performance

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law

Penjelasan atas Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan

Explanation of the Enforced Regulations and/or Legislation

UU ini mengubah ketentuan beberapa undang-undang diantaranya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

This law changes the provisions of several laws, including Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services.

Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan

Quantitative Impact on the Company

Mempermudah bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha bisnis baru yang sebelumnya belum dimiliki oleh Perusahaan.

Facilitate the Company in carrying out new business activities that were previously not part of the Company's operations.

Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan

Qualitative Impact on the Company

Mempermudah bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha bisnis baru yang sebelumnya belum dimiliki oleh Perusahaan.

The simplification of licensing allows the Company to be more effective in managing the permits required for the Company's business processes.



Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI").

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

Starting from January 1, 2024, references to each PSAK and ISAK have been revised in accordance with the issuance by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The following amendments to the standards are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024:

Amendemen PSAK 201



Penyajian Laporan Keuangan tentang Kewajiban Diklasifikasikan Sebagai Lancar atau Tidak Lancar;

Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Liabilities Classified as Current or Non-Current;

Amendemen PSAK 201



Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;

Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Long-Term Liabilities with Covenants;

Amendemen PSAK 116



Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa—Balik;

Amendment to PSAK 116: Leases regarding Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions;

Amendemen PSAK 207



Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan

Amendment to PSAK 207: Statement of Cash Flows and amendment to PSAK 107: Financial Instruments Disclosures regarding Supplier Financing Arrangements;

Amendemen PSAK 409



Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Revision of PSAK 409: Accounting for Zakat, Infak, and Sedekah, and Revision of PSAK 401: Presentation of Shariah Financial Statements.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of these standards did not have a material impact on the amounts reported in the current year or in previous years.

Peta Usaha dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Business Map and Long-Term Company Plan

PT PP Presisi memetakan strategi jangka Panjang dalam tata Kelola bisnis Perusahaan yang terdeskripsikan sebagai berikut :

PP Presisi has mapped out a long-term strategy for the Company's business governance, which is described as follows:

Pengembangan dan Ekspansi Pasar di Lini Bisnis Jasa Pertambangan.

Market Development and Expansion in the Mining Services Business Line



Dalam menghadapi dinamika industri pertambangan yang terus berkembang, pengembangan dan ekspansi pasar menjadi strategi utama bagi perusahaan jasa pertambangan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan bisnis. Dengan meningkatnya permintaan global terhadap sumber daya mineral, peluang untuk memperluas layanan di sektor ini semakin terbuka lebar. Pada tahun 2025 PT PP Presisi menargetkan perolehan pasar baru. Perusahaan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan hingga kegiatan utama jasa pertambangan yaitu: Pekerjaan *Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore hauling*, hingga *Road Maintenance*.

In facing the ever-evolving mining industry dynamics, market development and expansion have become a key strategy for mining service companies to enhance competitiveness and broaden business reach. With the increasing global demand for mineral resources, opportunities to expand services in this sector are widening. In 2025, PT PP Presisi aims to capture new market opportunities. The Company will provide integrated services across the entire scope of mining services, from the development of primary and supporting infrastructure for mining activities to the core mining services, including: Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore Hauling, and Road Maintenance.

Selektif dalam Perolehan Kontrak Baru di Lini Bisnis Pekerjaan Sipil.

Selective in Acquiring New Contracts in the Civil Work Business Line



Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan anggaran yang signifikan sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara. Awalnya, pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun. Namun, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, dilakukan rekonstruksi anggaran yang mengurangi alokasi sebesar Rp60,47 triliun, sehingga pagu akhir menjadi Rp50,48 triliun. Sumber : (BPIW.PU.GO.ID)

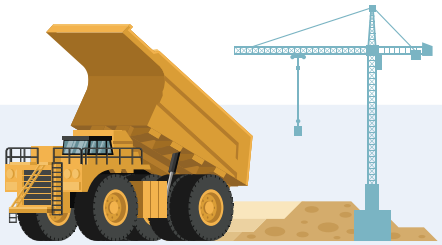
In 2025, the Ministry of Public Works (PU) experienced significant budget cuts as part of the government's effort to improve spending efficiency. Initially, the Ministry's budget was set at Rp110.95 trillion. However, through the Ministry of Finance Letter No. S-75/MK.02/2025 dated February 13, 2025, a budget reconstruction was made, reducing the allocation by Rp 60.47 trillion, bringing the final budget down to Rp 50.48 trillion. Source: (BPIW.PU.GO.ID)

Pemotongan anggaran ini berdampak pada berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, bendungan, dan irigasi sehingga sektor pekerjaan sipil PT PP Presisi akan mengalami tantangan yang cukup besar di tahun 2025. Rencana Perusahaan untuk berintegrasi dengan PP selaku Pemilik Saham Mayoritas akan dilaksanakan secara selektif mengingat ketersediaan proyek di lini bisnis pekerjaan sipil diproyeksikan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

These budget cuts will impact various infrastructure projects, including road, dam, and irrigation construction, which means that PT PP Presisi's civil work sector will face considerable challenges in 2025. The Company's plan to integrate with PP as the Majority Shareholder will be implemented selectively, considering the availability of projects in the civil work business line is expected to be fewer than in previous years.

Meningkatkan Efektivitas di Lini Bisnis Sewa Eksternal

Improving Effectiveness in the External Rental Business Line



Meningkatkan efektivitas di lini bisnis sewa eksternal menjadi kunci utama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal dan menjaga daya saing di pasar. Fokus utama terletak pada efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses sewa yang efisien.

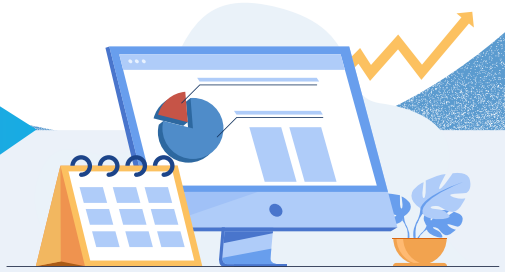
Strategi peningkatan efektivitas dilakukan melalui pemeliharaan peralatan yang terjadwal, optimalisasi manajemen aset, dan penerapan sistem monitoring real-time. Dengan memastikan ketersediaan unit yang andal dan respons cepat terhadap permintaan, bisnis sewa eksternal dapat memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi.

Improving effectiveness in the external rental business line is a key factor in optimally meeting customer needs and maintaining competitiveness in the market. The main focus is on operational efficiency, service quality, and the utilization of technology to support an efficient rental process.

The strategy to improve effectiveness is carried out through scheduled equipment maintenance, asset management optimization, and the implementation of a real-time monitoring system. By ensuring the availability of reliable units and providing quick responses to demand, the external rental business can deliver timely and high-quality services.

Perampingan Lini Bisnis Perusahaan

Streamlining the Company's Business Lines



Perampingan lini bisnis Perusahaan dilaksanakan untuk mengurangi beban atas asset yang tidak produktif yaitu beban penyusutan dan pemeliharaan alat. Beban tersebut akan dihilangkan dengan metode pelepasan asset secara parsial melalui Lelang umum. Lini bisnis yang akan dirampingkan antara lain *production plant, structure work, foundation*, dan *erection*.

Streamlining the Company's business lines is carried out to reduce the burden of non-productive assets, such as depreciation and equipment maintenance costs. These burdens will be eliminated through partial asset disposal via public auctions. The business lines to be streamlined include production plant, structure work, foundation, and erection.

Meningkatkan Kapasitas Keuangan Perusahaan

Improving the Company's Financial Capacity



Peningkatan kapasitas finansial perusahaan menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing di pasar. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi arus kas, efisiensi biaya operasional, dan diversifikasi sumber pendapatan.

Perusahaan berfokus pada peningkatan profitabilitas dan pengelolaan hutang Perusahaan yang lebih baik. Selain itu, strategi pembiayaan yang cermat melalui kemitraan strategis, dan akses terhadap sumber pendanaan baru dengan bunga yang lebih rendah menjadi kunci utama dalam meningkatkan likuiditas dan solvabilitas.

Improving the Company's financial capacity is a strategic step to ensure sustainable growth and competitiveness in the market. This effort is carried out through cash flow optimization, operational cost efficiency, and revenue source diversification.

The Company focuses on increasing profitability and better management of its debts. In addition, careful financing strategies through strategic partnerships and access to new funding sources with lower interest rates are key to improving liquidity and solvency.

Meningkatkan Produktivitas Karyawan

Improving Employee Productivity



Peningkatan produktivitas karyawan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan keterampilan, penerapan teknologi yang mendukung efisiensi kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan memberikan pelatihan berkelanjutan, sistem insentif yang adil, dan budaya kerja kolaboratif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja individu sekaligus mendorong inovasi. Produktivitas yang tinggi tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan, tetapi juga memberikan peluang bagi karyawan untuk berkembang secara profesional.

Improving employee productivity is a key factor in driving the Company's growth and sustainability. This effort is achieved through skill development, the implementation of technology that supports work efficiency, and creating a conducive work environment. By providing continuous training, fair incentive systems, and a collaborative work culture, the Company can enhance individual performance while fostering innovation. High productivity not only strengthens the Company's competitiveness but also provides opportunities for employees to grow professionally.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment and Progress in Implementing Good Corporate Governance

Landasan Penerapan dan Implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Foundation for the Application and Implementation of Corporate Governance Principles

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu kunci dalam membangun keberlanjutan usaha. Untuk itu, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta best *practicD*. Berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur dimutakhirkan secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan operasional dan finansial untuk dapat mewujudkan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha ke depannya.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is one of the key factors in building business sustainability. Therefore, the Company continuously strives to enhance the quality of GCG implementation based on applicable regulations and best practices. Various policies, guidelines, and procedures are regularly updated and adjusted to current conditions. The Company is committed to applying GCG principles in all operational and financial activities to achieve sustainable growth and long-term business continuity.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Foundation for Corporate Governance Implementation

Penerapan GCG di Perusahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

The implementation of GCG in the Company refers to applicable laws and regulations, including:

1 Undang-Undang Republik Indonesia:
Indonesian Law:

A Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Law No. 8 of 1995 on Capital Markets.

B Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

C Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Law No. 13 of 2003 on Manpower.

D Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia:
Regulations of the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange:

A

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies.

B

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies.

C

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.

D

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies.

E

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

F

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

G

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

H

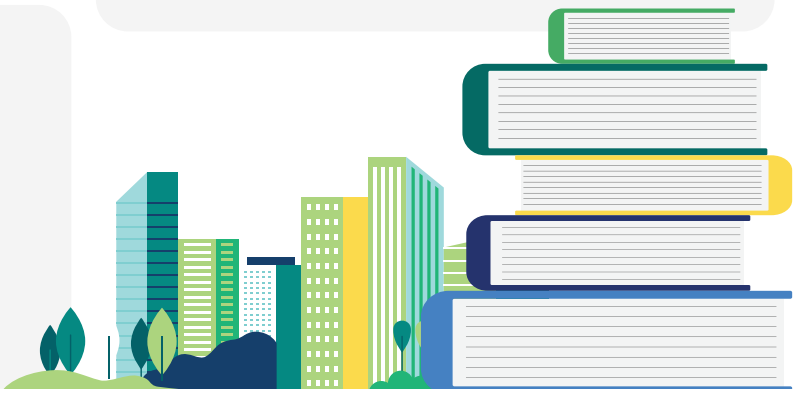
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.

I

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for Drafting the Internal Audit Unit Charter.



J

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.

K

Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00010/BEI/07-2023 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Ketentuan Terkait Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Board of Directors Circular Letter of PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00010/BEI/07-2023 of 2023 on Explanation of Provisions Related to the Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies.

3

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dirilis oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

The 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

4

Anggaran Dasar Perusahaan
The Company's Articles of Association



Tujuan dan Sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Objectives and Targets of Corporate Governance Implementation

Dengan penerapan prinsip GCG di atas, Perusahaan memiliki sejumlah tujuan dan sasaran sebagai berikut:

By implementing the above GCG principles, the Company aims to achieve the following objectives and targets:

	Tujuan Purpose	**Sasaran** Target
A	Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal, sehingga meningkatkan nilai perusahaan, serta mewujudkan kesinambungan Perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan dari pemangku kepentingan lainnya; Achieving optimal growth and returns to enhance company value and ensure long-term sustainability without neglecting the interests of other stakeholders.	Terlaksananya sistem manajemen strategi yang handal, sehingga mampu merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sejalan dengan rencana strategi perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. The implementation of a reliable strategic management system, enabling the formulation of a vision, mission, goals, and objectives that align with the Company's strategic plans, both in the short and long term.
B	Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Managing and guiding good relations between Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all stakeholders based on applicable laws and regulations.	Adanya keterbukaan serta komunikasi dua arah, baik dengan regulator, pelaku pasar modal, dan pemangku kepentingan lainnya. The establishment of transparency and two-way communication with regulators, capital market participants, and other stakeholders.
C	Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Supporting internal control and company development activities to achieve competitiveness at both national and international levels, thereby enhancing market confidence, driving investment flows, and promoting sustainable national economic growth.	Berfungsinya organ-organ pendukung kegiatan pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan. The effective functioning of supporting bodies for internal control and company development activities.
D	Mengelola sumber daya secara lebih amanah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Managing resources more responsibly by applying the principle of prudence.	Ditegakkannya komitmen dan aturan main dari praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika. The enforcement of commitment and rules for ethical business practices.

E	Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Enhancing accountability to stakeholders.	Tersedianya sumber daya manusia yang handal, unggul, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan. The availability of reliable, outstanding, and professional human resources, free from conflicts of interest.
F	Memperbaiki budaya kerja Perusahaan. Improving the Company's work culture.	Dipastikannya seluruh jajaran Perusahaan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui penghargaan dan sanksi. Ensuring that all levels of the Company understand and are able to carry out their duties, obligations, and responsibilities in accordance with applicable regulations, as well as being aware of rewards and sanctions.
G	Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan dengan meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan. Making the Company more valuable by improving the well-being of all employees and increasing benefits for stakeholders.	Ditingkatkannya kepedulian pada masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Enhanced awareness of the surrounding community and environmental sustainability.

Implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Principles within the Company

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Adapun implementasi di lingkup Perusahaan, dijelaskan ada tabel berikut:

In implementing GCG principles, the Company's management and employees adhere to five fundamental principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation within the Company is outlined in the following table:

Transparansi | Transparency

Penjelasan | Explanation	
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai Perusahaan.	Transparency in the decision-making process and openness in disclosing relevant information about the Company.

Implementasi | Implementation

- Proses pengambilan keputusan Pemegang Saham melalui RUPS telah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan telah dilaksanakan pada rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan bersama Direksi.
- Proses pengambilan keputusan Direksi berfungsi untuk melakukan pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan melalui mekanisme rapat Direksi dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.
- Perusahaan telah memiliki prosedur standar untuk menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, dan sasaran yang telah disampaikan pada unit kerja serta dikelola menggunakan software yang baik.
- Laporan keuangan diunggah di situs web Perusahaan dan situs web Bursa Efek Indonesia.
- Seluruh kebijakan Perusahaan telah dituangkan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi yang disediakan.

- The decision-making process of Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) has met the requirements of the Company's Articles of Association.
- The decision-making process of the Board of Commissioners serves as supervision and advisory to the Board of Directors and has been carried out in Board of Commissioners meetings as well as joint meetings with the Board of Directors.
- The decision-making process of the Board of Directors functions to manage the Company and has been conducted through Board of Directors meetings and joint meetings with the Board of Commissioners.
- The Company has established standard procedures for defining its vision, mission, strategy, policies, and objectives, which have been communicated to work units and managed using reliable software.
- Financial reports are uploaded on the Company's website and the Indonesia Stock Exchange website.
- All Company policies have been documented in writing and communicated to all stakeholders through the available communication channels.

Akuntabilitas | Accountability

Penjelasan | Explanation

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Clarity of functions, implementation, and organizational accountability to ensure effective company management.

Implementasi | Implementation

- Proses pengambilan keputusan Pemegang Perusahaan telah memiliki struktur organisasi, deskripsi pekerjaan untuk masing-masing jabatan, dan penilaian *key performance indicator* untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
- Perusahaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan telah melalui proses persetujuan dari Pemegang Saham Mayoritas dan dijelaskan secara rinci kepada seluruh unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap tahun.

- The Company has an organizational structure, job descriptions for each position, and key performance indicator (KPI) assessments for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- The Company has an Annual Work Plan and Budget, which has been approved by the Board of Commissioners and has undergone approval from the Majority Shareholder. It is detailed to all work units as a reference for carrying out duties each year.

- Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara transparan setiap triwulan.
- Auditor eksternal telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perusahaan dengan opini auditor independen adalah wajar dalam seluruh hal yang material.
- Perusahaan telah mempertanggungjawabkan dan mendapat pengesahan atas laporan tahunan pada saat RUPS.
- Perusahaan telah memberikan penghargaan dan sanksi kepada karyawan yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran.

- The Company carries out its duties and responsibilities transparently and reports its activities on a quarterly basis.
- An external auditor has reviewed the Company's financial statements, with an independent auditor's opinion stating that they are fairly presented in all material respects.
- The Company has accounted for and obtained approval for its annual report during the General Meeting of Shareholders (GMS).
- The Company has implemented a system of rewards for outstanding employees and sanctions for those who commit violations.

Tanggung Jawab | Responsibility

Penjelasan | Explanation

Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Compliance in company management with applicable laws and regulations as well as sound corporate principles.

Implementasi | Implementation

- Perusahaan memiliki Anggaran Dasar, infrastruktur GCG, dan kebijakan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Perusahaan dan seluruh karyawan selalu bersikap bijaksana dan berhati-hati sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan.
- Perusahaan setiap 2 tahun melakukan audit penerapan GCG oleh auditor eksternal serta self assessment setiap 2 (dua) tahun sekali. Hasil penilaian menunjukkan tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan material atas temuan audit kepatuhan.
- Perusahaan telah berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan Perusahaan, melalui program CSR dalam batas kewajaran dan kepatutan.
- Seluruh karyawan dan manajemen telah menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan untuk tunduk kepada Kode Etik dan etika bisnis yang telah ditetapkan.

- The Company has Articles of Association, GCG infrastructure, and Corporate Social Responsibility (CSR) management policies.
- The Company and all employees always act prudently and carefully in accordance with risk management policies, ensuring that tasks are carried out in compliance with regulations.
- Every two years, the Company conducts an external audit on GCG implementation and performs a self-assessment. The evaluation results indicate no significant or material increase in compliance audit findings.
- The Company has contributed to the surrounding community through CSR programs within reasonable and appropriate limits.
- All employees and management have signed a Compliance Statement to adhere to the established Code of Ethics and business ethics.

Independence | Independency

Penjelasan | Explanation

Perusahaan mengelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

The Company is managed professionally, free from conflicts of interest and undue influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and GCG principles.

Implementasi | Implementation

- Perusahaan telah memiliki kebijakan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- Perusahaan telah memiliki Nilai-Nilai Perusahaan yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
- Organ Perusahaan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, telah melaksanakan perannya tanpa ada intervensi dan mendominasi pihak lain.
- Perusahaan telah menerapkan GCG dengan hasil penilaian yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
- Pemegang Saham telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional dan independen.
- Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi *checks and balances* melalui komunikasi formal, seperti rapat dan persetujuan/penolakan Dewan Komisaris atas usulan Direksi.

- The Company has established a conflict of interest policy.
- The Company upholds core values of trustworthiness, competence, harmony, loyalty, adaptability, and collaboration.
- Corporate bodies, including the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, have fulfilled their roles without interference or dominance over one another.
- The Company has implemented GCG, with assessment results showing continuous improvement year after year.
- Shareholders have delegated part of their authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors to promote professional and independent company management.
- The Board of Commissioners and the Board of Directors have implemented a checks-and-balances function through formal communication, including meetings and the approval or rejection of proposals from the Board of Directors by the Board of Commissioners.

Kewajaran | Fairness

Penjelasan | Explanation

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness and equality in fulfilling the rights of every individual and other stakeholders arising from agreements and applicable laws and regulations.

Implementasi | Implementation

- Perusahaan telah memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan.

- The Company has established regulations governing the rights and obligations related to all stakeholders.

- Perusahaan telah memiliki kebijakan teknis operasional untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- Perusahaan memberikan perlakuan yang proporsional kepada seluruh mitra kerja.
- Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat melalui forum pertemuan, saluran komunikasi elektronik (situs *web*), dan *whistleblowing system* (WBS).

- The Company has implemented operational technical policies to provide services to all stakeholders through the ISO 9001:2015 Quality Management System.
- The Company ensures proportional treatment for all business partners.
- The Company provides opportunities for all stakeholders to express their opinions through meeting forums, electronic communication channels (website), and the whistleblowing system (WBS).

Jejak Langkah Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Milestones in the Implementation of Corporate Governance Within the Company

2016-2017

a **Meletakkan landasan dasar penerapan GCG** | Laying the foundation for GCG implementation:

- Merumuskan pedoman Kode Etik yang ditandatangani pada 14 September 2017. Kode Etik tersebut merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya serta Nilai-Nilai Perusahaan, menjadi Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja yang akan dijadikan sebagai acuan bagi insan Perusahaan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan.
- Melakukan *business process mapping* untuk memastikan kebutuhan standar operasional prosedur (SOP).

- Formulated the Code of Ethics guidelines, signed on September 14, 2017. The Code of Ethics represents the Company's commitment to implementing and embodying its Culture and Corporate Values, serving as a Business and Work Ethics Guide that must be adhered to and followed by all Company personnel.
- Conducted business process mapping to ensure the necessary standard operating procedures (SOPs).

b **Membentuk Infrastruktur GCG yang dibutuhkan:** | Establishing the necessary GCG infrastructure:

- Organ Perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Biro *Corporate Secretary* dan Biro Internal Audit.
- Pedoman Kerja bagi masing-masing Organ Perusahaan.

- The Company's organs include the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee, as well as the Corporate Secretary Bureau and the Internal Audit Bureau.
- Work Guidelines for each Corporate Organ.

c **Menyiapkan laporan tahunan 2019 yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang relevan** | Preparing the 2019 annual report in accordance with Financial Services Authority regulations and other relevant regulations.

d **Mempersiapkan assessment pelaksanaan GCG untuk tahun 2018** | Preparing the GCG implementation assessment for the year 2018.

e **Merumuskan Pedoman GCG** | Formulating the GCG Guidelines.

2018

a. **Mengesahkan Pedoman GCG pada 17 September 2018 |** Ratified the GCG Guidelines on September 17, 2018.

b. **Melakukan sosialisasi Pedoman Kode Etik dan Pedoman GCG kepada seluruh insan Perusahaan |** Conducted socialization of the Code of Ethics Guidelines and GCG Guidelines to all Company personnel.

c. **Penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan oleh seluruh insan Perusahaan |** Signing of the Compliance Statement by all Company personnel.

d. **Melakukan *assessment* atas penerapan GCG Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |** Conducting an assessment of GCG implementation by the Financial and Development Supervisory Agency.

e. **Penyempurnaan situs web Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang relevan serta untuk meningkatkan aspek keterbukaan |** Enhancing the Company's website in accordance with Financial Services Authority regulations and other relevant regulations to improve transparency.

f. **Penyempurnaan laporan tahunan tahun buku 2019 dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang relevan, serta meletakkan dasar yang kuat untuk penyusunan laporan yang mengacu kepada kriteria *Annual Report AwarC* |** Enhancing the 2019 annual report in accordance with Financial Services Authority regulations and other relevant regulations, while establishing a strong foundation for report preparation based on the Annual Report Award criteria.

2019

a. **Tindak lanjut terhadap hasil *assessment* pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |** Follow-up on the results of the GCG implementation assessment conducted by the Financial and Development Supervisory Agency.

b. **Mempersiapkan proses *assessment* pelaksanaan GCG selanjutnya untuk meningkatkan skor agar sama dengan skor GCG yang diperoleh Entitas Induk |** Preparing the next GCG implementation assessment process to improve the score to match the GCG score achieved by the Parent Entity.

c. **Harmonisasi GCG antara Perusahaan dengan Entitas Anak |** Harmonizing GCG between the Company and its Subsidiaries.

d. **Pembuatan laporan tahunan dengan mengacu pada kriteria *Annual Report AwarC* |** Preparing the annual report based on the Annual Report Award criteria.



2020

a. **Tindak lanjut terhadap hasil *assessment* pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |** Follow-up on the results of the GCG implementation assessment conducted by the Financial and Development Supervisory Agency.

b. **Mempersiapkan proses *assessment* pelaksanaan GCG |** Preparing the GCG implementation assessment process.

c. **Pembuatan laporan tahunan dengan mengacu pada kriteria *Annual Report Award* dan ikut serta dalam *Annual Report AwarC* |** Preparing the annual report based on the Annual Report Award criteria and participating in the Annual Report Award.

d. **Mengawasi praktik GCG pada Entitas Anak |** Supervising GCG practices in Subsidiaries.

2021

a. **Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* pelaksanaan GCG |** Follow-up on the recommendations from the GCG implementation assessment.

b. **Mempersiapkan proses *assessment* pelaksanaan GCG melalui *self assessment* yang didampingi oleh konsultan |** Preparing the GCG implementation assessment process through self-assessment assisted by a consultant.

c. **Mempersiapkan sosialisasi pelaksanaan GCG pada Entitas Anak |** Preparing the dissemination of GCG implementation in Subsidiaries.

d. **Penetapan *Management Policy*, Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan |** Establishment of Management Policy and Anti-Bribery Management System Standards.

e. **Perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan |** Obtaining ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification.

2022

a. **Tindak lanjut terhadap rekomendasi assessment pelaksanaan GCG |** Follow-up on the recommendations from the GCG implementation assessment.

b. **Mempersiapkan proses *assessment* pelaksanaan GCG oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |** Preparing the GCG implementation assessment process by the Financial and Development Supervisory Agency.

c. **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan implementasi GCG Perusahaan dengan merujuk pada *ASEAN Corporate Governance ScorecarC* |** Improving the quality of the Company's GCG infrastructure and implementation by referring to the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

2023

a **Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* pelaksanaan GCG |** Follow-up on the recommendations from the GCG implementation assessment.

b **Mempersiapkan proses *self assessment* pelaksanaan GCG dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |** Preparing the self-assessment process for GCG implementation with guidance from the Financial and Development Supervisory Agency.

c **Meningkatkan infrastruktur IT untuk menunjang program monitoring penerapan *good corporate governance* |** Improving IT infrastructure to support the monitoring of Good Corporate Governance implementation.

d **Revisi Standar Etika Perusahaan |** Revision of the Company's Code of Ethics.

2024

a **Tindak lanjut terhadap rekomendasi assessment Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS).|** Follow-up on the recommendations from the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment.

b **Penyelesaian aplikasi GCG untuk menunjang program monitoring penerapan good corporate governance. |** Completion of the GCG application to support the monitoring program for the implementation of good corporate governance.

c **Pemutakhiran pedoman-pedoman GCG yang berlaku dan penyempurnaan standar etika Perusahaan. |** Updating the applicable GCG guidelines and improving the Company's code of ethics.

d **Penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan standar Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan |** Implementation of Corporate Governance based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standards and

e **Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).|** Implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI).



Struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure and Process/Mechanism

Struktur tata kelola Perusahaan terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur GCG Perusahaan sebagai berikut.

The Company's governance structure consists of the main organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The management system follows a two-tier system, comprising the Board of Commissioners and the Board of Directors, each with clear authority and responsibilities as mandated by the Articles of Association and applicable laws and regulations. Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's GCG structure is as follows.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Biro Satuan Pengawasan Internal
Internal Audit Unit Bureau

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Komite Audit
Audit Committee

Komite Kepatuhan
Compliance Committee

Biro Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Bureau

Biro Satuan Pengawasan Internal
Internal Audit Unit Bureau

Agar organ dan struktur tata kelola di atas dapat berjalan dengan baik, termasuk aturan main yang membatasi ruang antar organ, Perusahaan mengembangkan proses atau mekanisme tata kelola yang dituangkan dalam bentuk perangkat kebijakan tata kelola, yaitu:

- Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir disahkan melalui Akta No. 10 tanggal 8 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., notaris di Jakarta Selatan.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yang terakhir disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui lembar pengesahan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* yang ditandatangani bersama pada pada 27 Desember 2023.
- Kode Etik, yang terakhir disahkan melalui Surat No. 154/EXT/KOM/PPRE/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Persetujuan untuk Bersama-sama Direksi Menandatangani Pedoman Kode Etik *(Code of Conduct)* PT PP Presisi Tbk.
- *Board Manual* Dewan Komisaris yang terakhir disahkan melalui lembar pengesahan yang ditandatangani bersama pada tanggal 28 November 2023.
- *Board Manual* Direksi yang terakhir disahkan melalui Surat No. 2706/EXT/DIR/PPRE/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Pengesahan Pedoman *Board of Director (BOD)* PT PP Presisi Tbk Tahun 2023.
- Piagam Komite Audit, yang terakhir disahkan melalui lembar pengesahan No. 01/PKA/PPRE/2023 yang ditandatangani bersama pada tanggal 26 September 2023.
- Piagam Komite Kepatuhan, yang terakhir disahkan melalui lembar pengesahan No. 01/PKK/PPRE/2023 yang ditandatangani bersama pada tanggal 26 September 2023.
- Pedoman Audit Internal, yang terakhir disahkan pada tanggal 18 Januari 2022.
- *Company Policy* tentang penetapan kebijakan di bidang kualitas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan, manajemen risiko, manajemen anti penyuapan, serta keamanan informasi, yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 14 Juni 2024.

To ensure that the corporate governance organs and structure function effectively, including the rules that define the boundaries between them, the Company has developed governance processes or mechanisms outlined in the form of governance policy instruments, namely:

- The Company's Articles of Association, last ratified through Deed No. 10 dated July 8, 2024, before Notary Fathiah Helmi, S.H., a notary in South Jakarta.
- The Corporate Governance Guidelines, last ratified by the Board of Commissioners and the Board of Directors through the approval sheet of the Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, jointly signed on December 27, 2023.
- The Code of Ethics, last ratified through Letter No. 154/EXT/KOM/PPRE/X/2023 dated October 19, 2023, regarding the Approval for the Joint Signing of the Code of Conduct Guidelines of PT PP Presisi Tbk by the Board of Directors.
- The Board of Commissioners' Manual, last ratified through an approval sheet jointly signed on November 28, 2023.
- The Board of Directors' Manual, last ratified through Letter No. 2706/EXT/DIR/PPRE/XII/2023 dated December 14, 2023, regarding the Notification of Ratification of the Board of Directors (BOD) Guidelines of PT PP Presisi Tbk for the Year 2023.
- The Audit Committee Charter, last ratified through the approval sheet No. 01/PKA/PPRE/2023, jointly signed on September 26, 2023.
- The Compliance Committee Charter, last ratified through the approval sheet No. 01/PKK/PPRE/2023, jointly signed on September 26, 2023.
- The Internal Audit Guidelines, last ratified on January 18, 2022.
- The Company Policy on setting policies in the fields of quality, Occupational Health and Safety (OHS), environment, risk management, anti-bribery management, and information security, ratified by the President Director on June 14, 2024.

- Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah direvisi dan disahkan bersama-sama oleh Direksi melalui lembar pengesahan bersama SMAP No. PPRE/BD/P/007 tanggal 12 Februari 2024.
- Surat Keputusan Direksi Nomor 057/SK/DIR/PPRE/2024 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024.
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang disahkan bersama-sama oleh Direksi dengan No. PPRE/SDM/P/007 tanggal 23 Mei 2023.

- The Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines, which were revised and jointly ratified by the Board of Directors through the joint approval sheet SMAP No. PPRE/BD/P/007 dated February 12, 2024.
- Board of Directors Decree Number 057/SK/DIR/PPRE/2024 concerning the Amendment of the Appointment of Officials Required to Submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) for the Year 2024.
- The Gratification Control Guidelines, jointly ratified by the Board of Directors under No. PPRE/SDM/P/007 dated May 23, 2023.

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Person in Charge of Corporate Governance Implementation

Untuk memastikan penerapan GCG berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang bernilai tinggi, Perusahaan memiliki Tim Pelaksana Penerapan GCG yakni Kepala Biro Satuan Pengawasan yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi No. 320/SK/DIR/PPRE/DIR/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Perubahan Tim Pelaksana Penerapan *Good Corporate Governance* Direksi PT PP Presisi Tbk. Adapun Susunan Tim Pelaksana Penerapan GCG Perusahaan sebagai berikut.

To ensure the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG) and deliver high-value outcomes, the Company has established a GCG Implementation Team, led by the Head of the Internal Audit Bureau. This appointment was made through the Board of Directors' Decree No. 320/SK/DIR/PPRE/DIR/VIII/2023, dated August 29, 2023, regarding the Amendment of the Good Corporate Governance Implementation Team of PT PP Presisi Tbk. The composition of the Company's GCG Implementation Team is as follows:

Jabatan di Tim Pelaksana Penerapan GCG Positions in the GCG Implementation Team	**Posisi di Perusahaan** Positions in the Company	**Nama Pejabat** Name of Officials
Ketua Chairperson	Direktur Keuangan & HCM Director of Finance & HCM	Mohammad Arif Iswahyudi
Wakil Ketua Tim Vice Chairman of the Team	Vice President, Corporate Secretary Director of Finance & HCM	Mei Elsa Kembaren
Sekretaris Secretary	Direktur Keuangan & HCM Director of Finance & HCM	Ridho Akbar
Anggota Members	Vice President, Internal Auditor	Wismo Suwego
	Vice President, Supply Chain Management	Yudhistira Bawa Yusha
	Vice President, Operation 1	Sahadewo Nalendro Bhawono

Anggota Members	Vice President, Operation 2	Eko Septiyanto
	Vice President, Equipment Operation	Yofi Hendri
	Vice President, Equipment Maintenance & Repair	Rully Panca Wahyuriawan
	Vice President, Bidding & Engineering	Maulana Andika
	Manager, Human Capital Management	Fairuz Rizky Utami
	Vice President, Business Development & Asset Management	Debie Novalia
	Vice President, Finance & Accounting	Gallery Rekayasa
	Marketing Manager	Yoan Sukma Ariezonna
	Manager, Corporate Secretary	Caroline Wahyuninggar
	Manager, Risk Management	Ayu Noviana Isman
	Manager, Legal	Pradita Dewi Kusumawardhani
	Manager, Equipment Performance & Admin	Aditya Yuli Indrawan
	Manager, Quality Control	Priyono
	Manager, Health, Safety & Environment	Pipin Julianto

Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana Penerapan GCG Perusahaan sebagai berikut:

Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim bertanggung jawab dalam pemantauan dan penerapan GCG Perusahaan yaitu:

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
- Menyusun rencana kerja untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman GCG.
- Memastikan keselarasan pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

The GCG Implementation Team's duties and obligations are as follows:

The Chairman and Vice Chairman are responsible for GCG monitoring and implementation, including:

- Monitoring and maintaining the Company's business activities to not deviate from applicable provisions.
- Monitoring and maintaining the Company's compliance with agreements and commitments made by the Company with third parties.
- Preparing a work plan to ensure that the Company complies with the Code of GCG.
- Ensuring the alignment of GCG implementation within the Company.

Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab mendukung tugas Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim sebagai berikut:

- Menyempurnakan Buku Pokok-Pokok Materi Penerapan GCG Perusahaan disesuaikan agar sejalan dan selaras dengan kepatuhan Perusahaan.
- Mengajukan inisiatif kepada Direksi Perusahaan untuk mengembangkan pengelolaan pelaksanaan GCG.
- Menentukan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan penerapan GCG.
- Merangkap tugas yang ada.
- Merekomendasikan konsultan GCG.
- Menjadi *counterpart* konsultan GCG.
- Melakukan pemantauan/asistensi pelaksanaan GCG Perusahaan secara berkala (apabila diperlukan).
- Memonitor semua dokumen Perusahaan yang diperlukan pada saat pelaksanaan *assessment* oleh konsultan GCG, dokumen disimpan dan diarsip di tempat yang layak untuk keperluan *assessment* yang berlaku.
- Menindaklanjuti hasil *assessment* maupun *self assessment.*
- Membantu Ketua Tim dalam memastikan keselarasan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

The Secretary has the duty and responsibility to support the Chairman and Vice Chairman's duties as follows:

- Completing the adjustment of GCG Implementation Principal Book to be in line with the Company's compliance.
- Propose initiatives to the Board of Directors to improve the GCG implementation management.
- Determining the budget for GCG implementation and development.
- Concurrently perform existing duties.
- Giving recommendations on GCG consultant.
- Become the counterpart for GCG consultants.
- Monitoring/assisting on GCG implementation periodically (if necessary).
- Keeping track of all Company documents required during the assessment conducted by the GCG consultant, documents are stored and archived in a suitable place for the assessment purposes.
- Following up on the results of assessment and selfassessment.
- Assisting the Team Chairman in ensuring the alignment of GCG implementation within the Company.

Tugas dan kewajiban Anggota Tim adalah mendukung tugas Ketua Tim antara lain sebagai berikut:

- Bertanggung jawab menyusun dan melengkapi semua dokumen Perusahaan yang diperlukan pada saat pelaksanaan *assessment* oleh Konsultan GCG, dokumen disimpan dan di arsip di tempat yang layak untuk keperluan *assessment* yang berlaku.
- Menindaklanjuti hasil *assessment* maupun *self assessment.*
- Membantu Ketua Tim, Wakil Ketua dan Sekretaris dalam memastikan keselarasan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Team Members have the duty and responsibility to support the Team Chairman's duties as follows:

- Responsible for compiling and completing all Company documents required during the assessment by the GCG Consultant. Documents are stored and archived in a suitable place for the assessment purposes.
- Following up on the results of the assessment and self-assessment.
- Assisting the Team Chairman, Vice Chairman, and Secretary to ensure the alignment of GCG implementation within the Company.

Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Evaluation, Monitoring, and Quality Improvement

Kualitas pelaksanaan GCG senantiasa dievaluasi secara berkala untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik yang sehat (best practice). Hasil penilaian tersebut merupakan rekomendasi yang digunakan sebagai landasan tindakan manajemen agar pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat dilakukan secara efektif.

The GCG implementation quality is evaluated periodically to obtain an overview of GCG implementation conditions in relation to applicable regulations and best practices. The assessment results are recommendations used as a basis for management actions so that Good Corporate Governance implementation can be carried out effectively.

Guna menghindari kerancuan dalam pemanfaatan laporan penilaian penerapan GCG ini, perlu ditegaskan bahwa penilaian penerapan GCG dilakukan bukan bertujuan untuk membandingkan pencapaian penerapan praktik-praktik GCG di antara Organ Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

To avoid confusion in using the GCG assessment report, it is important to note that GCG assessment is not carried out to compare GCG practice implementation among the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders/General Meeting of Shareholders (GMS) Organs.

Kriteria yang Digunakan Dalam Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

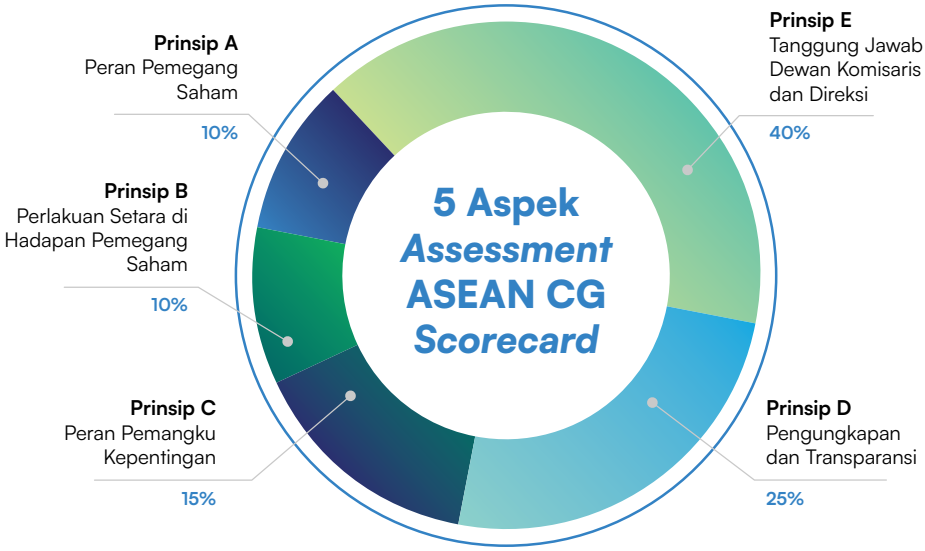
Criteria Used in Assessing the Implementation of Corporate Governance

Penilaian penerapan GCG Perusahaan di tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi atas ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Instrumen penilaian ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* berstandar internasional, terutama prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan International Corporate Governance Network (ICGN). Instrumen penilaian tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tingkat, yaitu Tingkat 1 penilaian atas 5 (lima) Prinsip, dan Tingkat 2 yaitu bonus dan penalti.

The assessment of the Company's GCG implementation in 2024 was conducted using the evaluation approach of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). This assessment instrument was developed based on internationally recognized Corporate Governance principles, particularly those issued by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the International Corporate Governance Network (ICGN). The assessment instrument was divided into two levels: Level 1, which evaluated five principles, and Level 2, which involved bonuses and penalties.

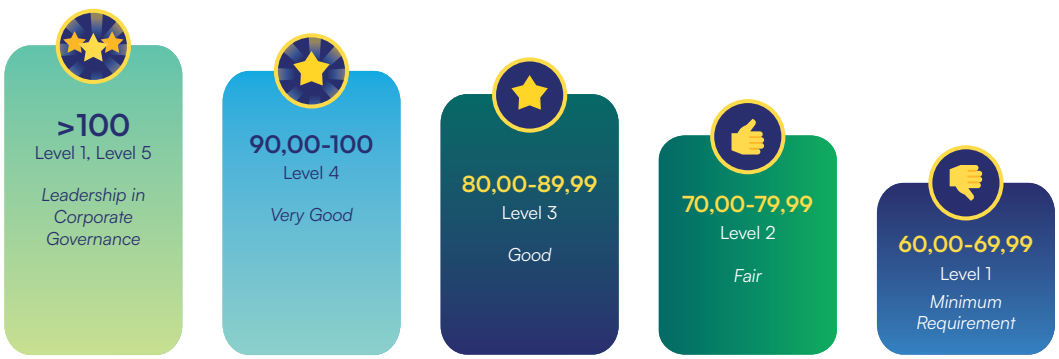
Tahun 2024 menjadi tahun perdana bagi Perusahaan untuk menggunakan pendekatan ACGS tersebut dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Berikut disampaikan bobot dan skor penilaian.

The year 2024 marked the Company's inaugural use of the ACGS approach, with the evaluation being conducted by a third party, the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Below are the weightings and scores of the assessment.



Hasil penilaian menggunakan level kinerja dan interpretasi dengan rentang skor sebagai berikut.

The assessment results were interpreted using performance levels and a scoring range as follows.



Keterangan | Description

Skor Nilai (poin) Score (points)	Kinerja CG CG Performance	Interpretasi Interpretation
60,00-69,99	Level 1	*Minimum Requirement,* memenuhi standar minimum sesuai UU dan regulasi Minimum Requirement, meets the minimum standards in accordance with laws and regulations.
70,00-79,99	Level 2	*Fair*, ada kesadaran kuat dan upaya mengadopsi standar internasional Fair, demonstrates strong awareness and efforts to adopt international standards.
80,00-89,99	Level 3	*Good*, Mengadopsi sebagian standar internasional Good, partially adopts international standards.
90,00-100	Level 4	*Very Good*, Mengadopsi secara penuh standar internasional Very Good, fully adopts international standards.
Di atas 100	Level 5	*Leadership in corporate governance*, melebihi level 1 (Struktur ACGS) Leadership in Corporate Governance, exceeds Level 1 (ACGS Structure).

Teknik penilaian ASEAN CG *Scorecard* didasarkan pada informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik *Corporate Governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sumber-sumber informasi atau dokumen-dokumen yang dimaksud diantaranya meliputi:

- Laporan tahunan;
- Laporan keuangan yang telah diaudit;
- Pengumuman Pemanggilan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun buku;
- Pengumuman Hasil RUPS untuk kinerja Perusahaan yang diadakan di tahun buku;
- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Pedoman kerja Dewan dan Komite-komite Dewan;
- Situs web Perusahaan; serta
- Informasi-informasi publik relevan lainnya.

The ASEAN CG Scorecard assessment technique is based on information or documents publicly available related to the Corporate Governance practices carried out by the Company. The sources of information or documents include, but are not limited to:

- Annual report;
- Audited financial statements;
- Announcement of the Annual GMS notice held in the fiscal year;
- Announcement of the GMS results for the Company's performance held in the fiscal year;
- Company's Articles of Association;
- Board and Committee work guidelines;
- Company's website; and
- Other relevant public information.

Penilaian penerapan GCG dengan ASEAN CG *Scorecard* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Penilaian
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

***Assessor*/Penilai**
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

Waktu Pengukuran
Praktik-praktik *Corporate Governance* tahun buku 2023

Metode Penilaian
Didasarkan pada informasi publik yang terdapat pada:

- Laporan tahunan 2023; laporan keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2023;
- Pengumuman Panggilan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tahun 2024 untuk kinerja perusahaan pada tahun buku 2023;
- Pengumuman Hasil RUPS untuk kinerja perusahaan pada tahun buku 2023;
- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Pedoman kerja dewan dan komite-komite dewan;
- Website Perusahaan; serta
- Informasi-informasi publik relevan lainnya.

The 2024 GCG implementation assessment using the ASEAN CG Scorecard is as follows:

Types of Assessment
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Assessor
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

Time of Measurement
Corporate Governance Practices in fiscal year 2023

Assessment Method
Based on public information contained in:

- 2023 annual report; audited financial statements for fiscal year 2023;
- Announcement of Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) held in 2024 for the company's performance in fiscal year 2023;
- Announcement of the results of the GMS for the Company's performance in fiscal year 2023;
- Company Articles of Association;
- Working guidelines of the board and board committees;
- Company website; and
- Other relevant public information.

Waktu Terbit Laporan
2024

Rincian hasil penilaian penerapan GCG Perusahaan dengan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Time of Issue
2024

The details of the Company's GCG implementation assessment result using the ASEAN Corporate Governance Scorecard for the year 2024 are as follows:

Aspek Pengujian | Assessment Aspect	**Bobot (%)** | Weight (%)	**Nilai Akhir** | Final Score
Tingkat 1 | Level 1		
Hak-hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	10,00	4,28
Perlakuan Setara di Hadapan Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders	10,00	6,42
Peran Pemangku Kepentingan Role of Stakeholders	15,00	13,84
Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	25,00	21,87
Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Responsibilities of the Board	40,00	33,57
Tingkat 2 | Level 2		
Bonus Bonus	-	4
Penalti Penalty	-	(4)
Skor Keseluruhan Total Score	100,00	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Quality of GCG Implementation	"Good" atau Level 3	

Berdasarkan skor akhir sebesar 80 poin, maka kinerja tingkat kepatuhan Perusahaan termasuk dalam predikat "Good" atau Level 3, yang berarti Perusahaan telah sepenuhnya menerapkan GCG dengan standar internasional sebagaimana dirumuskan dalam ACGS.

Selain hasil penilaian atas tingkat kepatuhan praktik CG berdasarkan standar ACGS, penilaian ini juga memberikan rekomendasi sebagai acuan/referensi untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi praktek GCG Perusahaan ke depan. Perusahaan berkomiten untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi penilaian yang akan ditindaklanjuti di tahun mendatang.

Based on the final score of 80 points, the Company's compliance performance falls under the "Good" or Level 3 category, which means the Company has fully implemented GCG according to international standards as formulated in the ACGS.

In addition to the assessment results on the level of CG practice compliance based on ACGS standards, this evaluation also provides recommendations as a reference for improving the Company's GCG implementation in the future. The Company is committed to following up on all assessment recommendations, which will be carried out in the coming year.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of Code of Governance for Public Companies

Dalam rangka meningkatkan penerapan GCG, Perusahaan senantiasa menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015. Peraturan tersebut mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus dilaksanakan Perusahaan.

To improve GCG implementation, the Company carries out all operational activities following Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 and Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015. The regulation covers five aspects, eight principles, and 25 recommendations from the Financial Services Authority regarding the GCG aspects and principles the Company must implement.

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect 1: Relations between a Public Company and Shareholders on Ensuring Shareholders Rights	
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS | Principle 1: Improving GMS Convention	
Rekomendasi 1 Recommendation 1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham. The Public Company has a voting technical procedure or method, either open or closed, prioritizing the Shareholders' independence and interest.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Perusahaan mengatur cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) pada RUPS dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir disahkan melalui Akta No. 10 tanggal 8 Juli 2024 dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Comply. The Company regulates the technical methods or procedures for collecting votes at the GMS in the Company's Articles of Association, which were most recently ratified through Deed No. 10 dated July 8, 2024, and the Rules for the General Meeting of Shareholders of the Company.
Rekomendasi 2 Recommendation 2	Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of Public Company's Board of Commissioners and Board of Directors attend the Annual GMS.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPRE hadir pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 5 Juni 2024. Comply. All Board of Commissioners and Board of Directors members of PPRE attended the Annual GMS held on June 5, 2024.
Rekomendasi 3 Recommendation 3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun. The GMS report summary is available on the Public Company's website for at least one year.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan. Comply. The GMS report summary is available on the Company's website.
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dan | Principle 2: Improving the Quality of the Public Company's Communication with its Shareholders or Investors	

Rekomendasi 4 Recommendation 4	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor. The Public Company has a policy on communication with its Shareholders or Investors.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Kebijakan tersebut diatur dalam *Work Instruction* Strategi Komunikasi dengan No. PPRE/SEK/P/006 tanggal 26 April 2022 tentang Pengelolaan Informasi Perusahaan yang diketahui Biro Corporate Secretary. Comply. The Company has a communication policy with the Shareholders or investors. The policy is stipulated in the Communication Strategy Work Instruction No. PPRE/SEK/P/006 dated April 26, 2022, on Management of Company Information known to the Corporate Secretary Bureau.
Rekomendasi 5 Recommendation 5	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam situs *web*. The Public Company disclosed its communication policy with Shareholders or investors on a website.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. *Work Instruction* Strategi Komunikasi telah dipublikasikan pada situs *web* Perusahaan dan Presisi *OnlinD*. Comply The Communication Strategy Work Instruction is disclosed through the Company's website and Presisi Online.
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: The Board of Commissioners' Roles and Functions	
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris | Principle 3: Strengthening the Board of Commissioners' Membership and Composition	
Rekomendasi 6 Recommendation 6	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The determination of the number of Board of Commissioners members considers the Public Company's condition.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Comply The determination of the number and appointment of Board of Commissioners members is determined by the GMS and has considered the Company's condition, which refers to applicable regulations and the Company's Articles of Association.
Rekomendasi 7 Recommendation 7	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of Board of Commissioners members' composition considers variety in required expertise, knowledge, and experience.

Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/ Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Comply The composition of Board of Commissioners members has fulfilled the various expertise, knowledge, and experience aspects required following the Company's line of business. The Board of Commissioners members are determined by the GMS considering the composition of Independent Commissioners in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/Public Companies, and the Financial Services Authority Circular No. 32/ SEOJK.04/2015, which has considered the diversity of expertise, knowledge, and experience required based on the proposal of the Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | Principle 4: Improving the Quality of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities Implementation	
Rekomendasi 8 Recommendation 8	Dewan Komisaris memiliki kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess its performance.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris tahun 2023. Comply The self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners' performance is outlined in the 2023 Board of Commissioners Work Procedure Guidelines.
Rekomendasi 9 Recommendation 9	Kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance is disclosed in the Public Company's Annual Report.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Dewan Komisaris Perusahaan telah mempunyai *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan kriteria pengukuran capaian kinerja secara kolegial. Comply The Company's Board of Commissioners has its Key Performance Indicators (KPI) and criteria to measure collegial performance achievements.
Rekomendasi 10 Recommendation 10	Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of any Board of Commissioners member in case they are involved in financial crimes.

Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris Perusahaan. Comply Policies related to the resignation of Board of Commissioners members involved in financial crimes are listed in the Board of Commissioners Manual.
Rekomendasi 11 Recommendation 11	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or Committee carrying out the Remuneration and Nomination Functions arranges the succession policy in nominating the Board of Directors members.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dijalankan oleh Komite Kepatuhan. Comply The Nomination and Remuneration Function is carried out by the Compliance Committee.
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: The Board of Directors' Function and Roles	
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi | Principle 5: Strengthening the Board of Directors' Membership and Composition	
Rekomendasi 12 Recommendation 12	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of Board of Directors members considers the Public Company's condition and decision-making effectiveness.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Penentuan jumlah Direksi telah disesuaikan dengan kegiatan dan skala usaha Perusahaan saat ini. Susunan anggota Direksi per 31 Desember 2024 sebagai berikut: Direktur Utama: Arzan Direktur Keuangan & HCM: Mohammad Arif Iswahyudi Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi: Rebimun Comply The determination of the number of Board of Directors has been adjusted to the current Company's activities and business scale. The composition of Board of Directors members as of December 31, 2024, is as follows. President Director: Arzan Director of Finance & HCM: Mohammad Arif Iswahyudi Director of Business Management & Operations: Rebimun
Rekomendasi 12 Recommendation 12	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of Board of Directors members considers the Public Company's condition and decision-making effectiveness.

Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Penentuan jumlah Direksi telah disesuaikan dengan kegiatan dan skala usaha Perusahaan saat ini. Susunan anggota Direksi per 31 Desember 2024 sebagai berikut: Direktur Utama: Arzan Direktur Keuangan & HCM: Mohammad Arif Iswahyudi Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi: Rebimun Comply The determination of the number of Board of Directors has been adjusted to the current Company's activities and business scale. The composition of Board of Directors members as of December 31, 2024, is as follows. President Director: Arzan Director of Finance & HCM: Mohammad Arif Iswahyudi Director of Business Management & Operations: Rebimun
Rekomendasi 13 Recommendation 13	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of Board of Directors composition considers the required expertise, knowledge, and experience diversity.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Pengusulan dan pengangkatan Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan tanggung jawab yang diemban di Perusahaan. Comply The Board of Directors nomination and appointment have considered the diversity of expertise, knowledge, and experience relevant to the responsibilities carried out in the Company.
Rekomendasi 14 Recommendation 14	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. The Board of Directors member controlling accounting or financial matters has the accounting expertise and/or knowledge.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Direktur Keuangan Perusahaan merupakan salah satu ahli keuangan terbaik yang berpengalaman di beberapa perusahaan serta memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan investasi yang dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan. Comply The Company's Director of Finance is one of the top financial experts with experience in several companies and a background in finance and investment, as detailed in the Company Profile section.
Prinsip 6: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi | Principle 6: Strengthening the Board of Directors' Membership and Composition	
Rekomendasi 15 Recommendation 15	Direksi mempunyai kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess its performance.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Direksi Perusahaan telah memiliki kebijakan penilaian kinerja self assessment untuk menilai kinerja Direksi. Comply The Board of Directors has a self-assessment policy to assess its performance.

Rekomendasi 16 Recommendation 16	Kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the Board of Directors performance is disclosed in the Public Company's annual report.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Self Assessment untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan. Comply The self-assessment to assess the Board of Directors performance has been disclosed in the annual report in the Corporate Governance section.
Rekomendasi 17 Recommendation 17	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy related to the resignation of any Board of Directors member in case they are involved in financial crimes.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi Perusahaan. Comply Policies regarding the resignation of Board of Directors members involved in financial crimes are listed in the Board of Directors Manual.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan |Aspect 4: Stakeholders' Participation	
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan | Principle 7: Improving Corporate Governance Aspect through Stakeholders' Participation	
Rekomendasi 18 Recommendation 18	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has a policy to prevent insider trading.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* terdapat pada Kode Etik yang di dalamnya mengatur terkait dengan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah, menyimpan, serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. Comply The policy to prevent insider trading is in the Code of Conduct, which regulates acquiring information through legitimate means, storing and using it following the applicable business ethics principles.
Rekomendasi 19 Recommendation 19	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti frauC*. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Perusahaan menetapkan kebijakan anti korupsi dan *anti fraud* yang dituangkan dalam Kode Etik, Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perusahaan agar tidak melakukan penyelewengan dan penyimpangan sejenisnya. Selain itu, sejak tahun 2020, Perusahaan telah menerapkan SMAP sebagai bentuk keseriusan Perusahaan dalam menerapkan kebijakan anti KKN. Comply The Company established anti-corruption and anti-fraud policies as outlined in the Code of Conduct. The Company also conducts dissemination to all employees not to commit fraud and similar violations. In addition, since 2020, the Company has implemented SMAP as a form of the Company's commitment to enforcing anti-corruption policies.

Rekomendasi 20 Recommendation 20	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy on selecting and improving supplier or vendor's capability.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Kebijakan Perusahaan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diatur di dalam *Work Instruction* Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No. PPRE/RP/W/005 tanggal 16 November 2023. Comply The Company's selection and capacity-building policies of suppliers or vendors have been regulated in the Work Instruction of Goods and Services Procurement No. PPRE/RP/W/005 dated November 16, 2023.
Rekomendasi 21 Recommendation 21	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditor rights.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban Perusahaan terhadap kreditur secara tepat waktu yang dituangkan dalam Pedoman Kebijakan Mengenai Hak & Kewajiban terhadap Kreditur & Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRD. Comply The Company is committed to carrying out its timely obligations to creditors as outlined in Policy Guidelines on the Rights & Obligations of Creditors & Management of the Use of Long-Term Loans of PPRE.
Rekomendasi 22 Recommendation 22	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *Whistleblowing System*. The Public Company has a Whistleblowing System policy.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Perusahaan memiliki mekanisme penegakan prosedur pengaduan pelanggaran yang tertuang dalam Pedoman *Whistleblowing System* PPRE Tahun 2024. Comply The Company has a mechanism for enforcing the whistleblowing procedure as stated in the Whistleblowing System Guideline of PPRE of 2024.
Rekomendasi 23 Recommendation 23	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy on long-term incentives granted to Board of Directors and employees.
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Perusahaan dalam memberikan insentif penghasilan atas penghargaan kepada Direksi dan karyawan berdasarkan atas prosedur Perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Comply The Company provides income incentives as an award to the Board of Directors and employees based on the Company's procedures as stated in the Company Regulations.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi | Aspect 5: Information Transparency	
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi |Principle 8: Improving Information Transparency Implementation	
Status dan Penerapan Status and Implementation	Terpenuhi. Selain memanfaatkan situs *web* dalam keterbukaan informasi, Perusahaan juga menggunakan berbagai jenis media sosial. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi lain adalah dengan memanfaatkan sistem keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan situs *web* Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Perusahaan juga telah menyusun *roadmap* tentang jadwal pengembangan proyek-proyek berbasis teknologi informasi dalam kurun waktu 5 tahun, yang dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Comply In addition to using the website for information disclosure, the Company also uses various types of social media. Another use of information technology is an information disclosure system integrated with the Indonesian Stock Exchange and Financial Services Authority's websites. The Company has also prepared a five-year roadmap for the information technology-based projects development from 2020 to 2024.
Rekomendasi 25 Recommendation 25	Laporan tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. The Public Company's annual report discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership of at least 5%, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership through the Major and Controlling Shareholders.



Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders and General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham Publik. Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

The Shareholder is a person or legal entity that legally owns one or more shares in the Company. The Company's shareholders consist of Major/Controlling Shareholders and Public Shareholders. Shareholders as capital owners have rights and responsibilities per the laws and regulations and the Company's Article Association.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan adalah PT PP (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 76,99%. Sementara 51,00% saham PT PP (Persero) Tbk dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, entitas pemilik akhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

The Major and Controlling Shareholder of PPRE is PT PP (Persero) Tbk, with a total share ownership of 76.99%. Meanwhile, 51.00% of PT PP (Persero) Tbk's shares are owned by the Indonesian Government. Thus, the ultimate owner entity of the Company is the Indonesian Government through the Ministry of SOE.

Hak Pemegang Saham

Shareholders Rights

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi hak-hak Pemegang Saham, yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola (GCG Code) sehingga Pemegang Saham dapat menggunakan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hak pemegang saham adalah sebagai berikut:

The Company is committed to protecting Shareholders Rights regulated in the Company's Article Association and Corporate Governance Guidelines (GCG Code) so that the Shareholders can exercise their rights per the applicable regulations. The Shareholders have the following rights:

- Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak menghadiri sebagai berikut:
  - Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua.
  - Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

- Shareholders, either individually or represented by a power of attorney, are entitled to attend the GMS.
- Shareholders entitled to attend the GMS are shareholders whose names are recorded in the Company's shareholders register one working day before the GMS summons.
- In the case of a second and third GMS, the terms for shareholders entitled to attend are as follows:
  - For the second GMS, shareholders who are entitled to attend are the shareholders who are recorded in the Company's shareholders register one working day before the summon for the second GMS.
  - For the third GMS, shareholders who are entitled to attend are shareholders recorded in the Company's shareholders register one working day before the summon for the third GMS.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.

Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Dalam hal RUPS tiap saham memberikan hal kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

In the event of a re-summon, as referred to in paragraph 12 point (2) of this article, shareholders entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are recorded in the Company's shareholders register one working day before the GMS resummon.

If the summons revision does not result in a repeated summon, as referred to in paragraph 12 point (2) of this article, shareholders who are entitled to attend follow the terms of shareholders as referred to in point (2).

If the GMS is held by Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (9) and Article 11 paragraph 12 point (17), as well as by shareholders as referred to in Article 11 paragraph 12 point (13), the list of shareholders may be submitted by the securities administration bureau and the Central Securities Depository to the GMS organizer.

At the time of GMS implementation, shareholders are entitled to obtain information on the meeting agenda and its related materials as long as they do not conflict with the Company's interests.

In the case of GMS, each share gives the owner the right to cast one vote.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Information Access to Shareholders

Perusahaan memberikan jaminan terhadap akses informasi yang setara kepada seluruh Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Laporan Keuangan Tahunan *AuditeC*.
2. Laporan Tahunan Perusahaan.
3. *Website* Perusahaan.
4. *Newsletter*.
5. *Company UpdatD*.
6. *One on one meeting*/NDR *Meeting*.
7. *Analyst Meeting*.
8. *Press ReleasD*.
9. Media Sosial.
10. *Public ExposD*.

To ensure that the corporate governance organs and structure function effectively, including the rules that define the boundaries between them, the Company has developed governance processes or mechanisms outlined in the form of governance policy instruments, namely:

1. The Audited Annual Financial Statements.
2. The Annual Report.
3. The Corporate Website.
4. Newsletters.
5. Company updates.
6. One-on-one meetings/NDR Meeting.
7. Analyst Meetings.
8. Press Releases.
9. Social Media.
10. Public Expose.

RUPS dan Jenis-Jenisnya

GMS and types of GMS

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan dan Anggaran

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the corporate governance structure. The GMS has rights and authority not given to the Board of Commissioners and Board of Directors within the limits specified in applicable laws and regulations and the Articles of Association. This

Dasar Perusahaan. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan/atau Direksi, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan minimal sekali dalam setahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan RUPS Lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar waktu RUPS Tahunan.

authority includes holding Board of Commissioners and Board of Directors accountable concerning Company management, Articles of Association amendment, appointing and dismissing the Board of Commissioners and/or Board of Directors, deciding on the distribution of tasks and management authority among the Board of Directors, etc.

The GMS consists of the Annual GMS, which is held at least once a year no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, and Other GMS, referred to as the Extraordinary GMS, which can be held outside the timeframe of the Annual GMS.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2024

GMS Implementation in 2024

Di sepanjang tahun 2024, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024.

Throughout 2024, the Company held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Tanggal 5 Juni 2024
Annual GMS for fiscal year 2023, June 5, 2024

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Tanggal 5 Juni 2024
Implementation of the Annual GMS for fiscal year 2023 on June 5, 2024

Hari/Tanggal | Day/Date

Rabu, 5 Juni 2024
Wednesday, June 5, 2024

Tempat | Venue

Plaza PP, Auditorium Wisma Subiyanto, Lt. 1
Jl.Letjen TB Simatupang no.57, Pasar Rebo,
Jakarta Timur

Waktu | Time

10.40 WIB
10.40 am Western Indonesian Time

Penghitung Suara Independen | Independent Vote Counter

Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom)
Share Registrar (PT Datindo Entrycom)

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

The stages of the Annual GMS implementation for fiscal year 2023 are as follows:

Perihal | Event	**Pemenuhan** | Fulfillment
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS kepada Regulator GMS Implementation Notification to the Regulator	19 April 2024 April 19, 2024
Pengumuman RUPS GMS Announcement	29 April 2024 April 29, 2024
Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation	5 Juni 2024 June 5, 2024

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS GMS Minutes Summary Announcement	7 Juni 2024, melalui situs *web* Perusahaan dan situs *web* Bursa Efek Indonesia June 7, 2024, through the Company's website and the Indonesia Stock Exchange website.
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK GMS Minutes Submission to OJK	7 Juni 2024 June 7, 2024

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan [PPRE]

RUPS Tahunan tahun buku 2023 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa nya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (*e-proxy*) melalui *online* eASY.KSEI sejumlah 8.639.199.773 saham atau sebesar 85,399% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dengan memerhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2023 telah dituangkan melalui Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 14 Tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2023 beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut.

The Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2023 was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) through online eASY.KSEI totaling 8,639,199,773 shares or 85.399% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company by taking into account the Register of Shareholders as of May 13, 2024 until 16:15 WIB.

The resolutions of the Annual GMS for fiscal year 2023 have been set forth in Deed of Minutes of Annual GMS No. 14 dated June 5, 2024 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, a notary in Jakarta.

The resolutions of the Annual GMS for the fiscal year 2023 along with its implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2024 are as follows.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Annual GMS for Fiscal Year 2023 Agenda and Resolutions as well as the Follow-up on the Resolutions

1

Mata Acara 1:
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas keputusan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Nihil.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = Nihil.
Tidak Setuju = Nihil.

Agenda 1:
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements, as well as Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Fiscal Year 2023, and to release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the management of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory decisions carried out during the Fiscal Year 2023.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Result:
Agree = 8,639,199,773 shares or 100% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = Nil.
Disagree = Nil.

Keputusan:
Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai Laporan Nomor: 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara 1 telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah diterbitkan pada tanggal 28 April 2023, sedangkan Laporan Keuangan Audited Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2023

Resolution:
Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Fiscal Year 2023 and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) in accordance with Report Number: 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024 dated March 1, 2024 with the opinion "fair, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", as well as granting release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company that has been carried out in the Fiscal Year ended December 31, 2023 as long as such actions do not constitute a criminal offense and/or violate the provisions of applicable laws and legal procedures, are reflected in the Company's report books, and do not cause losses to the Company and its subsidiaries.

Follow-up on the Resolution:
The resolution on agenda item 1 has been formalized in the deed of the GMS. The Company's Annual Report for the fiscal year 2022 was published on April 28, 2023, while the Company's Audited Financial Statements for the fiscal year 2022 were published on March 7, 2023.

2

Mata Acara 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Nihil.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = Nihil.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan Tahun Buku 2023 sebesar Rp80.215.559.126,- dengan rincian sebagai berikut:
- Cadangan wajib sebesar Rp4.010.777.956,- atau 5% dari Laba Bersih;
- Saldo Laba Ditahan sebesar Rp76.204.781.170,- atau 95% dari Laba Bersih.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara 2 ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Di tahun 2024 Perusahaan tidak membagikan dividen saham sesuai keputusan RUPS ini.

Agenda 2:
Determination of the Use of the Company's Net Income for Fiscal Year Ended December 31, 2023.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Result:
Agree = 8,639,199,773 shares or 100% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = Nil.
Disagree = Nil.

Resolution:
Determined the use of Net Income attributable to owners of the parent company for the Fiscal Year 2023 amounting to Rp80,215,559,126, - with the following details:
- Mandatory reserve amounting to Rp4,010,777,956,- or 5% of Net Income;
- Retained Earnings of Rp76,204,781,170,- or 95% of Net Income.

Follow-up on the Resolution:
The resolution on agenda item 2 has been formalized in the deed of this GMS. In 2024, the Company did not distribute stock dividends in accordance with this GMS resolution.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara 2 ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Di tahun 2024 Perusahaan tidak membagikan dividen saham sesuai keputusan RUPS ini.

Follow-up on the Resolution:
The resolution on agenda item 2 has been formalized in the deed of this GMS. In 2024, the Company did not distribute stock dividends in accordance with this GMS resolution.

3

Mata Acara 3:
Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Agenda 3:
Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for Fiscal Year 2024, and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Fiscal Year 2023, for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = Nihil.
Tidak Setuju = Nihil.

Voting Result:
Agree = 8,639,199,773 shares or 100% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = Nil.
Disagree = Nil.

Keputusan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 bagi Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi.

Resolutions:
1. Granted authority and power to the Majority Shareholders to determine the amount of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for Fiscal Year 2024, as well as Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for Fiscal Year 2023 for the Board of Commissioners.
2. Granted authority and power to the Board of Commissioners with prior written approval from Majority Shareholders to determine the amount of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for the Fiscal Year 2024, as well as Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Fiscal Year 2023 for the Board of Directors.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Berdasarkan Arahan dari Pemegang Saham Mayoritas dan Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/PPRE/DIR/2024 tanggal 26 November 2024 serta mengacu pada Arahan dari Pemegang Saham Mayoritas bahwa Tahun Buku 2024 tidak dilakukan pembagian tantiem bagi Dewan Komisaris & Direksi untuk tahun buku 2023, melainkan pemberian insentif bagi karyawan.

Follow-up on the Resolution:
Based on the Directive from the Majority Shareholder and the Board of Directors' Decree No. 046/SK/PPRE/DIR/2024 dated November 26, 2024, and in reference to the Directive from the Majority Shareholder, in Fiscal Year 2024 there will be no distribution of tantiem (bonuses) to the Board of Commissioners and Directors for the Fiscal Year 2023. Instead, incentives will be provided to employees.

4

Mata Acara 4:
Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024.

Agenda 4:
Determination of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Voting Result:
Agree = 8,639,199,773 shares or 100% of the total shares present at the Meeting.

Abstain = Nihil.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan KAP Pengganti dalam ha1 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Penetapan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 telah dilakukan melalui Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Penetapan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 telah dilakukan Dewan Komisaris melalui Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 oleh Dewan Komisaris dengan mepertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit.

Abstain = Nil.
Disagree = Nil.

Resolutions:
1. Appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024.
2. Granted delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additions/adjustments to the scope other than as stated above, including the appointment of Public Accountants, and other reasonable terms of appointment for the KAP.
3. Granted authority and power to the Board of Commissioners with prior written approval from the Majority Shareholders to determine the replacement KAP in the event that KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024, including determining the amount of audit fees and other requirements for the replacement KAP.

Follow-up on the Resolution:
The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct a general audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for Fiscal Year 2024 and other periods within Fiscal Year 2024 has been carried out through the Approval of the Annual General Meeting of Shareholders. The determination of the audit fee amount, the addition of necessary work scope, and other reasonable requirements for KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct a general audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for Fiscal Year 2024 and other periods within Fiscal Year 2023 has been made by the Board of Commissioners through the Approval of the Public Accountant Service Fee Amount for the Audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024 by the Board of Commissioners, taking into consideration the Recommendation from the Audit Committee.

5

Mata Acara 5:
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = Nihil.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
1. Menyetujui melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Agenda 5:
Approval of Amendments to the Articles of Association.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Result:
Agree = 8,639,199,773 shares or 100% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = Nil.
Disagree = Nil.

Resolutions:
1. Approved the amendment of the Company's Articles of Association.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut diatas; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Telah diberlakukan pada Perusahaan.

2. Approved to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the amendment as referred to in point 1; and
3. Granted power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this Agenda, including compiling and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment to the Company's Articles of Association, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with none being excluded, including to make additions and/or changes in the amendment to the Articles of Association if it is required by the competent authority.

Follow-up on the Resolution:
The resolution of this agenda item has been formalized in the deed of the GMS and has been enacted for the Company.

6

Mata Acara 6:
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Keputusan:
Mengingat Mata Acara Keenam Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini, maka kepada Ibu Notaris diharap mencatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah menyampaikan:
"Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan."

Agenda 6:
Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Resolution:
Considering that the Sixth Agenda Item of the Meeting is solely a report, no voting/approval is required for this Agenda Item. Therefore, the Notary is requested to record in the Minutes of Meeting that the Board of Directors has presented: "Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds."

7

Mata Acara 7:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = Nihil.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yaitu:

Agenda 7:
Approval of Changes in the Company's Management Structure.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Result:
Agree = 8,639,199,773 shares or 100% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = Nil.
Disagree = Nil.

Resolutions:
Approved the changes in the composition of the Company's management, namely:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat:
Saudara I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk Nomor 41 Tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Utama sejak tanggal pengangkatan sampai dengan ditetapkannya pelaksana tugas Direktur Utama tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat nomor 063/EXT/PP/DU/2024.

2. Memberhentikan dengan hormat:
   - Saudara Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk nomor 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM sejak tanggal pengangkatan;
   - Saudara Indra Jaya Rajagukguk sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk Nomor 18 Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris Independen sejak tanggal pengangkatan.

3. Sehubungan dengan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 maka memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sehubungan dengan tindakan-tindakannya selama masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut telah diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan secara akurat dan benar serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk dan peraturan perundang-undangan.

4. Mengangkat Saudara Arzan sebagai Direktur Utama.

5. Menghapuskan jabatan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM.

6. Mengubah struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:
   - Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Legal menjadi Direktur Keuangan & HCM;
   - Direktur Operasi menjadi Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi.

7. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 4 di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama /Komisaris Independen: Nur Rochmad

1. Confirming the dismissal with honor:
Mr. I Gede Upeksa Negara as President Director who was appointed based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk Number 41 dated May 24, 2023 made before Notary Fathiah Helmi S.H., and ratified all actions taken in connection with the implementation of his duties and authorities as President Director from the date of appointment until the determination of the acting President Director on April 24, 2024 based on letter number 063/EXT/PP/DU/2024.

2. Honorably dismissed:
   - Mr. Yudi Setiawan as Director of Business Planning and HCM who was appointed based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk number 41 dated May 24, 2023 made before Notary Fathiah Helmi S.H., and authorized all actions taken in connection with the implementation of his duties and authorities as Director of Business Planning & HCM since the date of appointment;
   - Mr. Indra Jaya Rajagukguk as Independent Commissioner who was appointed based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk Number 18 dated October 19, 2020 made before Notary Fathiah Helmi S.H., and authorized all actions taken in connection with the implementation of his duties and authorities as Independent Commissioner since the date of appointment.

3. In connection with the dismissal of the Board of Commissioners and Directors as referred to in point 1 and point 2, then provide full release and discharge (Acquit et de Charge) in connection with their actions during their tenure as long as these actions have been disclosed in the Company's books and records accurately and correctly and do not violate the provisions of the Articles of Association of PT PP Presisi Tbk and laws and regulations.

4. Appointed Mr. Arzan as President Director.

5. Abolished the position of Director of Business Planning & HCM.

6. Changed the organizational structure and nomenclature of the Board of Directors as follows:
   - Director of Finance, Risk Management and Legal became Director of Finance & HCM;
   - Director of Operations became Director of Business Management & Operations.

7. In connection with the matters referred to in points 1, 2, and 4 above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors be as follows:

   Board of Commissioners:
   President Commissioner/Independent Commissioner: Nur Rochmad
   Commissioner : Albert Simangunsong
   Commissioner : Muhammad Zahid

   Board of Directors:

Komisaris: Albert Simangunsong
Komisaris: Muhammad Zahid

Direksi:
Direktur Utama: Arzan
Direktur Keuangan & HCM: Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi: Rebimun

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan akan mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

9. Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Per 31 Desember 2024 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menyesuaikan dengan keputusan RUPS ini.

*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

President Director: Arzan
Director of Finance & HCM: Mohammad Arif Iswahyudi
Director of Business Management & Operations: Rebimun

8. Members of the Board of Directors appointed as referred to in point 4 (four) who still hold other positions that are prohibited by laws and regulations to be concurrently held by the Board of Commissioners or the Board of Directors at a State-Owned Enterprise Subsidiary, then the person concerned to resign or be dismissed from the position.

9. Granted power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make necessary adjustments or corrections if required by the competent authorities for the purpose of implementing the resolutions of the Meeting.

Follow-up on the Resolution:
The resolution of this agenda item has been formalized in the deed of the GMS. As of December 31, 2024, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company has been adjusted in accordance with this GMS resolution.

*) Per the provisions of Article 47 of OJK Regulation no. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya
Resolutions of the GMS in 2023 and the Follow-ups

Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu yaitu RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2023, dan RUPS Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023.

In 2023, the Company held 2 (two) GMS, namely the Extraordinary GMS held on February 23, 2023, and the Annual GMS for the fiscal year 2022 held on May 24, 2023.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2023
Extraordinary GMS Implementation on February 23, 2023

Hari/Tanggal | Day/Date
Kamis, 23 Februari 2023
Thursday, February 23, 2023

Tempat | Venue
Plaza PP, Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Waktu | Time
Pukul 09.30 s.d. selesai WIB
09.30 a.m. WIB until it's completed

Penghitung Suara Independen | Independent Vote Counter
Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom)
Share Registrar (PT Datindo Entrycom)

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa ini telah dituangkan melalui Akta Berita Acara RUPS No. 14 Tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPS Luar Biasa ini beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The resolutions of this Extraordinary GMS have been set forth in Deed of Minutes of GMS No. 14 dated February 23, 2023 made before Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta.

The resolutions of this Extraordinary GMS and its implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2023 are as follows.

Mata Acara RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2023 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 23, 2023, and Its Resolutions, as well as the Follow-Up Actions on the Meeting Resolutions

1

Mata Acara 1:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

Jumlah Penanya:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.471.112.204 saham atau 99,99% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = 11.100 saham atau 0,01% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan:
   - Sdr. Rebimun sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM; yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bulan April Tahun 2022, sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perusahaan;
   - Sdr. M Darwis Hamzah sebagai Direktur Operasi; yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bulan Oktober Tahun 2020, sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perusahaan.

2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan:
   - Sdr. Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM;
   - Sdr. Rebimun sebagai Direktur Operasi.

Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas maka susunan Pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Agenda 1:
Approval of Changes in the Company's Management Structure.

Number of Inquirers:
None.

Voting Results:
Agree: 8,471,112,204 shares or 99.99% of the total shares present at the Meeting.
Abstain: 11,100 shares or 0.01% of the total shares present at the Meeting*.
Disagree: None.

Resolution:
Approved the changes in the Company's Management Structure as follows:

1. Honorably dismissed the following individuals from their positions as Company management:
   - Mr. Rebimun as Director of Business Planning & HCM, appointed based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in April 2022, effective at the close of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and ideas provided during his tenure.
   - Mr. M Darwis Hamzah as Director of Operations, appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in October 2020, effective at the close of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and ideas provided during his tenure.

2. Appointed the following individuals as Company management:
   - Mr. Yudi Setiawan as Director of Business Planning & HCM.
   - Mr. Rebimun as Director of Operations.

The term of office shall comply with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable Capital Market regulations, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

3. Following the dismissal and appointment of Company management members as described above, the composition of the Company's management is as follows:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Yul Ari Pramuraharjo
Komisaris: Albert Simangunsong
Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen: Nur Rochmad

Direksi
Direktur Utama: Rully Noviandar
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal: M Arif Iswahyudi
Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM: Yudi Setiawan
Direktur Operasi: Rebimun

4. Anggota pengurus Perusahaan yang menjabat sebagaimana disebutkan angka 3 di atas, dilarang merangkap jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

5. Memberikan kuasa dan wewenang Perusahaan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan perubahan susunan pengurus Perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan rapat telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Sejak rapat ditutup, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menyesuaikan dengan keputusan RUPS ini.

*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

President Commissioner: Yul Ari Pramuraharjo
Commissioner: Albert Simangunsong
Independent Commissioner: Indra Jaya Rajagukguk
Independent Commissioner: Nur Rochmad

Board of Directors
President Director: Rully Noviandar
Director of Finance, Risk Management, and Legal: M Arif Iswahyudi
Director of Business Planning and HCM: Yudi Setiawan
Director of Operations: Rebimun

4. Management members mentioned above are prohibited from holding concurrent positions that are restricted under the prevailing laws and regulations for members of the Board of Directors or Board of Commissioners of State-Owned Enterprises. Therefore, the concerned individuals must resign or be dismissed from such positions.

5. Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to state the changes in a separate Notarial deed and to carry out all necessary actions related to these changes in accordance with applicable laws and regulations, including notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Follow-Up on the Resolution:
The resolutions of the Meeting have been incorporated into the Minutes of the EGM. As of the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has been adjusted in accordance with the resolutions of this Meeting.

*) Per the provisions of Article 47 of OJK Regulation no. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Tanggal 24 Mei 2023
Annual GMS for Fiscal Year 2022 Implementation on May 24, 2023

Hari/Tanggal | Day/Date
Rabu, 24 Mei 2023
Wednesday, May 24, 2023

Tempat | Venue
Plaza PP, Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Waktu | Time
Pukul 11.32 s.d. 13.35 WIB
11.32 a.m. to 1.35 p.m. WIB

Penghitung Suara Independen | Independent Vote Counter
Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom)
Share Registrar (PT Datindo Entrycom)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 telah dituangkan melalui Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 40 Tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

The resolutions of the Annual GMS for the fiscal year 2022 have been set forth in the Deed of Minutes of Annual GMS No. 40 dated May 24, 2023 made before Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The resolutions of the Annual GMS for fiscal year 2022 along with its implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2023 are as follows.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2022, Its Resolutions, and Follow-Up Actions on the Meeting Resolutions

1

Mata Acara 1:
Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Kegiatan Perusahaan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Audited Tahun Buku 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.643.022.038 saham atau 99,9983687% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = 141.000 saham atau 0,0016313% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perusahaan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat di dalam laporannya No. 00037/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara 1 telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah diterbitkan pada tanggal 28 April 2023, sedangkan Laporan Keuangan Audited Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah

Agenda 1:
Approval of the Company's Annual Report, including the Company Activity Report, Board of Commissioner's Supervisory Report for fiscal year 2022, and Ratification of the Company's Audited Financial Statements for December 31, 2022, Fiscal Year, as well as providing full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management and the Board of Commissioners for their supervisory actions which have been carried out in Fiscal Year 2022.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Results:
Agree = 8,643,022,038 shares or 99.9983687% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = 141,100 shares or 0.0016313% of the total shares present at the Meeting*.
Disagree = Nil.

Resolutions:
Approved the Company's Annual Report, including the Company Activity Report, Board of Commissioner's Supervisory Report, and ratified the Company's Audited Financial Statements for Fiscal Year ended December 31, 2022, audited by Public Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan according to its report No. 00037/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2023 dated March 7, 2023, with a "Fair in all material respects" opinion, as well as providing full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the Fiscal Year ended December 31, 2022, to the extent that such actions are not criminal acts and reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Resolution Follow-Up:
The resolution of agenda item 1 has been institutionalized in this GMS deed. The Company's Annual Report for fiscal year 2022 was published on April 28, 2023, while the Company's Audited Financial Statements for the fiscal year 2022 were published on March 7, 2023.

2

Mata Acara 2:
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 sebesar Rp100.751.654.542,- yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 5.037.582.727,- atau 5% dari Laba Bersih digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp 95.714.071.815,- atau 95% Saldo Laba Ditahan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara 2 ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Di tahun 2023 Perusahaan tidak membagikan dividen saham sesuai keputusan RUPS ini.

Agenda 2:
Approval of the appropriation of the Company's net profit for the fiscal year ended December 31, 2022.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Results:
Agree = 8,643,021,738 shares or 99.9983652% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = 141,300 shares or 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*.
Disagree = Nil.

Resolutions:
Approved the stipulation of appropriation of the Net Profit for Fiscal Year 2022 of Rp100,751,654,542.- attributable to owners of the Parent Entity as follows.
1. Rp 5,037,582,727, or approximately 5% of Net Profit, is used as a Mandatory Reserve to fulfill Article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Rp 95,714,071,815.- or 95% as Retained Earnings.

Resolution Follow-Up:
The resolution of agenda item 2 has been institutionalized in this GMS deed. In 2023 the Company did not distribute share dividends according to this GMS resolution.

3

Mata Acara 3:
Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2022, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2023.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2022 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Berdasarkan Arahan dari Pemegang Saham Mayoritas dan

Agenda 3:
Approval of Bonus for Fiscal Year 2022, Determination of Salary and/or Honorarium along with facilities and other benefits for Boards of Directors and Board of Commissioners members in 2023.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Results:
Agree = 8,643,021,738 shares or 99.9983652% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = 141,300 shares or 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*.
Disagree = Nil.

Resolutions:
Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of bonus for the Board of Commissioners and Board of Directors for Fiscal Year 2022, as well as determine the salary/honorarium along with other facilities and allowances for Board of Directors and Board of Commissioners members for Fiscal Year 2023.

Resolution Follow-Up:
Based on Directives from the Majority Shareholders and Decree

Surat Keputusan Direksi No. 188/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 tanggal 27 Juli 2023 serta mengacu pada Arahan dari Pemegang Saham Mayoritas bahwa Tahun Buku 2022 tidak dilakukan pembagian tantiem bagi Dewan Komisaris & Direksi untuk tahun buku 2022, melainkan pemberian insentif bagi karyawan.

of the Board of Directors No. 188/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 dated July 27, 2023, and refers to the Majority Shareholders directive that there will be no distribution of bonuses for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2022, but instead the provision of incentives for employees.

4

Mata Acara 4:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2023.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
1. Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Penetapan KAP Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 telah dilakukan melalui Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Penetapan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 telah dilakukan Dewan Komisaris melalui Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda 4:
Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for fiscal year 2023.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Results:
Agree = 8,643,021,738 shares or 99.9983652% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = 141,300 shares or 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*.
Disagree = Nil.

Resolutions:
1. Approved to appoint the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2023 and other periods within Fiscal Year 2023;
2. Delegating the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of fee for audit services, additional scope of work required, and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm;
3. Delegating the authority to the Board of Commissioners to determine a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan, for any reason, cannot complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2023 and other periods within Fiscal Year 2023, including determining the fee for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

Resolution Follow-Up:
The appointment of KAP Hertanto, Grace, Karunawan to carry out a general audit of the Company's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2023 and other periods within Fiscal Year 2023 has been carried out through the Approval of the Annual General Meeting of Shareholders Resolution. The determination of the amount of compensation for audit services, additional scope of work required, and other reasonable requirements for KAP Hertanto, Grace, Karunawan, to carry out a general audit of the Company's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2023 and other periods within Fiscal Year 2023 has been carried out by the Board of Commissioners through the Approved Amount of Public Accounting Services' Honorarium for Audit Services of the Company's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2023, considering recommendations from the Audit Committee.

5

Mata Acara 5:
Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.643.022.038 saham atau 99,9983687% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
Abstain = 141.000 saham atau 0,0016313% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN:
1. No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan mata acara ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Telah diberlakukan pada Perusahaan.

Agenda 5:
Confirmation to Implement the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises.
Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Results:
Agree = 8,643,022,038 shares or 99.9983687% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = 141,100 shares or 0.0016313% of the total shares present at the Meeting*.
Disagree = Nil.

Resolutions:
Approved the confirmation to implement the Regulation of the Minister of SOE:
1. No. PER-1/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises;
2. No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Governance and Significant Corporate Activities Guidelines for State-Owned Enterprises;
3. No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

along with their future changes.

Resolution Follow-Up:
The resolution of this agenda item has been institutionalized in this GMS deed. The regulations have been implemented in the Company.

6

Mata Acara 6:
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Keputusan:
Karena sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Pelaporan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, Perusahaan telah melaporkan di dalam Rapat atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 1 Tahap 1 PT PP Presisi Tbk per tanggal 31 Desember 2022, kepada OJK melalui Surat No. 007/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/PPRE/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

Agenda 6:
Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds.

Number of Questioners/Respondents:
None.

Resolutions:
Because it is a report, there is no decision-making process. The reporting is carried out to comply with Regulation No.30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds, the Company has reported at the Meeting on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds 1 Phase 1 of PT PP Presisi Tbk per December 31, 2022, to the OJK via Letter No. 007/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/PPRE/I/2023 dated January 16, 2023.

7

Mata Acara 7:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

Agenda 7:
Approval for Changes in Company Management.

Jumlah Penanya/Penanggap:
Tidak ada.

Hasil Penghitungan Suara:
Setuju = 8.643.021.738 saham atau mewakili 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat
Abstain = 141.300 saham atau mewakili 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*
Tidak Setuju = Nihil.

Keputusan:
Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat:
   - Sdr. Yul Ari Pramuraharjo sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 2 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta. dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris Utama sejak tanggal diundangkannya Permen No. 03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pemberhentian sementara Komisaris Utama Perusahaan pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat No. 182/EXT/PP/DU/2023;
   - Sdr. Nur Rochmad sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 22 tanggal 20 April 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr. Rully Noviandar sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 05 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.

3. Sehubungan dengan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 maka memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sehubungan dengan tindakan-tindakannya selama masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut telah diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan secara akurat dan benar serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk dan peraturan perundang-undangan.

4. Menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan:
   - Sdr. Nur Rochmad sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen;
   - Sdr. Muhammad Zahid sebagai Komisaris;
   - Sdr. I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Utama.
   - Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud

Number of Questioners/Respondents:
None.

Voting Results:
Agree = 8,643,021,738 shares, representing 99.9983652% of the total shares present at the Meeting.
Abstain = 141,300 shares, representing 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*.
Disagree: Nil.

Resolutions:
Approved Changes in the Company Management, as follows:

1. Honorably dismissed:
   - Yul Ari Pramuraharjo as the President Commissioner, who was appointed per Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk No. 2 dated June 9, 2021, by Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, and ratify all actions taken in connection with the implementation of his duties and authority as the President Commissioner since the date of promulgation of Ministerial Regulation No. 03/2023 on March 24, 2023, until the temporary dismissal of the President Commissioner determined on May 16, 2023, per Letter No. 182/EXT/PP/DU/2023;
   - Nur Rochmad as the Independent Commissioner, who was appointed per Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk No. 22 dated April 20, 2022, by Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.

2. Approved to honorably dismiss Rully Noviandar as the President Director, who was appointed per the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk No. 05 dated June 3, 2020, by Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta.

3. Due to the dismissal of the Board of Commissioners and Board of Directors referred to in points 1 and 2, they are granted full release and discharge (Acquit et de Charge) for the actions during their term of office as long as these actions have been disclosed in the Company's books and records in full, accurate, correct, and do not violate the provisions of the Articles of Association of PT PP Presisi Tbk and statutory regulations.

4. Approved to appoint the following name as the Company management:
   - Nur Rochmad as the President Commissioner and Independent Commissioner;
   - Muhammad Zahid as a Commissioner;
   - I Gede Upeksa Negara as the President Director.
   - With a term of office following the provisions of the Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss at any time.

5. Pursuant with matters on points 1, 2, and 4 above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner and Independent Commissioner: Nur Rochmad

pada poin 1, 2, dan 4 di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Nur Rochmad
Komisaris: Albert Simangunsong
Komisaris: Muhammad Zahid
Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk

Direksi
Direktur Utama: I Gede Upeksa Negara
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Perencanaan Bisnis & HCM: Yudi Setiawan
Direktur Operasi: Rebimun

6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan susunan Pengurus Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan susunan pengurus Perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan rapat telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Sejak rapat ditutup, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menyesuaikan dengan keputusan RUPS ini.

Commissioner: Albert Simangunsong
Commissioner: Muhammad Zahid
Independent Commissioner: Indra Jaya Rajagukguk

Board of Directors
President Director: I Gede Upeksa Negara
Director of Finance, Risk Management & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi
Director of Business Planning & HCM: Yudi Setiawan
Director of Operations: Rebimun

6. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed in point 4 are prohibited from holding other positions prohibited by statutory regulations to hold concurrent positions as Board of Commissioners or Board of Directors members of State-Owned Enterprises. In such cases, the person must resign or be dismissed from that position.

7. Granted the Company's power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to declare in a separate Notarial deed and take all necessary actions related to changes to the Company management composition per the applicable laws and regulations, including notifying changes to the Company management composition to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per the applicable regulations.

Resolution Follow-Up:
The resolution of this agenda item has been institutionalized in this GMS deed. As of the closing of the meeting, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors has adjusted to this GMS resolution.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ dalam perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan saran atau masukan secara umum dan/atau khusus kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

The Board of Commissioners is a corporate organ with the duty to supervise and provide general and/or specific advice or input to the Board of Directors following the Articles of Association. The Board of Commissioners' supervision includes supervision of the Board of Directors' policies in managing the Company and ensuring that the Company has implemented GCG principles. The Board of Commissioners' accountability to the GMS is a form of accountability for supervision over the Company's management in implementing GCG principles.

Pedoman Dewan Komisaris

Board of Commissioners Manual

Perusahaan memiliki Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris yang ditujukan untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Pedoman tersebut telah efektif dan diperbarui pada 28 November 2023.

The Company has guidelines for the Board of Commissioners' duties implementation intended to provide direction for the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties. The guidelines have been effective and updated on November 28, 2023.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

Komposisi Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Komisaris Utama. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Adapun masa jabatan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) periode paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir apabila tidak lagi memenuhi kriteria dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan.

The composition of the Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of whom is appointed as President Commissioner. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of whom is an Independent Commissioner. The term of office of the Board of Commissioners in 1 (one) period is a maximum of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss the Board of Commissioners before the end of their term of office if they no longer meet the criteria while taking into account the Company's Articles of Association.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2023

Composition of the Board of Commissioners in 2023

Di tahun 2024 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sejalan dengan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2023 tanggal 5 Juni 2024. Berikut disampaikan kronologi susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024.

In 2024 there were changes in the composition of the Board of Commissioners in line with the resolution of the Annual GMS for fiscal year 2023 on June 5, 2024. The following is a chronology of the composition of the Board of Commissioners throughout 2024 and the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2024

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners in 2024

Periode 1 Januari s.d 5 Juni 2024 January 1 to June 5, 2024	**Periode 5 Juni s.d 31 Desember 2024** June 5 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)		**Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Indra Jaya Rajagukguk diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Independen.** At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, Indra Jaya Rajagukguk was honorably discharged from his position as Independent Commissioner.

Albert Simangunsong (komisaris) (Commissioner)	Albert Simangunsong (komisaris) (Commissioner)	
Muhammad Zahid (komisaris) (Commissioner)	Muhammad Zahid (komisaris) (Commissioner)	

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nur Rochmad

Jabatan Position	: :	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	• Periode 2023-2028: Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. • Periode 2022-2023: Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan • Period 2023-2028: Deed of Meeting Resolution No. 41 dated May 24, 2023 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. • Period 2022-2023: Deed of Meeting Resolution No. 39 dated April 27, 2022 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in South Jakarta.
Masa Jabatan Term of Office	: :	24 Mei 2023 s.C. RUPS yang akan diselengarakan di tahun 2028 May 24, 2023 until the GMS to be held in 2028
Periode Jabatan Period of Service	: :	Ke-2 Second term

Albert Simangunsong

Jabatan Position	: :	Komisaris Commissioner
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution No. 39 dated April 27, 2022 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in Jakarta.
Masa Jabatan Term of Office	: :	20 April 2022 s.C. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 20, 2022 until the GMS to be held in 2027
Periode Jabatan Period of Service	: :	Ke-1 First term

Muhammad Zahid

Jabatan Position	: :	Komisaris Commissioner
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution No. 41 dated May 24, 2023 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.
Masa Jabatan Term of Office	: :	24 Mei 2023 s.C. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023 until the GMS to be held in 2028
Periode Jabatan Period of Service	: :	Ke-1 First term

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

All Board of Commissioners members' profiles are available in the Company Profile section of this Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, yakni:

1. Tugas Dewan Komisaris
   - Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi sebagai Dewan Komisaris secara professional.
   - Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
   - Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
   - Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
   - Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatanganinya.
   - Memastikan bahwa laporan tahunan Perusahaan dan laporan yang dibuat Direksi telah memenuhi standar pelaporan yang berlaku.
   - Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan melaporkan kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
   - Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
   - Memberikan nasihat, saran dan pengawasan kepada Direksi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG.
   - Memberikan persetujuan atas usulan Direksi tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro Internal Audit.
   - Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan

The Board of Commissioners duties and responsibilities are stipulated in the Board of Commissioners Manual, namely:

1. Duties of the Board of Commissioners
   - Continuously improve their competence and knowledge to professionally carry out their functions as the Board of Commissioners.
   - Approve the Company's development plan, Long-Term Plan, Annual Work Plan and Budget.
   - Provide advice and suggestions to the Board of Directors for the Company's benefit following the Company's goals and objectives.
   - Supervise the management of the Company by the Board of Directors.
   - Inspect and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign it.
   - Ensure that the annual report and other reports prepared by the Board of Directors have complied with applicable reporting standards.
   - Provide opinions and suggestions to the Board of Directors following the Board of Commissioners' supervisory duties and report any issues deemed important for the Company management to the GMS.
   - Follow the development of the Company's activities and immediately report to the GMS if the Company shows signs of a significant setback with suggestions on the necessary corrective steps.
   - Provide advice, suggestions, and supervision to the Board of Directors to implement GCG principles.
   - Approve the Board of Directors' recommendation on appointing and dismissing the Head of the Internal Audit Unit Bureau.
   - Periodically monitor the effectiveness of the internal control function.
   - Periodically monitor the effectiveness of information technology governance.

internal Perusahaan secara periodik.
- Memantau efektivitas pelaksanaan tata kelola teknologi informasi Perusahaan secara periodik.
- Melakukan koordinasi dan mengevaluasi akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS.
- Melaksanakan proses penunjukan calon akuntan publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan.
- Memastikan bahwa akuntan publik, Kepala Biro Internal Audit, Komite Audit, dan Komite lainnya memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dokumen-dokumen lainnya, dan informasi mengenai Perusahaan sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
- Menentukan dan menyampaikan kepada Direksi tentang nominasi atas dasar aspirasi Pemegang Saham Mayoritas.
- Melakukan tugas pengawasan lainnya dan tugas khusus yang ditentukan oleh RUPS.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris kolektif kolegial.
- Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.
- Bertanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris karena kesalahan dan kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- Anggota Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila Dewan Komisaris dapat membuktikan:
  - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
  - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang telah mengakibatkan kepailitan.
  - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kepailitan tersebut.

- Coordinate and evaluate the public accountant who audits the Company's books to be submitted as a proposal to the GMS.
- Carry out the appointment process for the public accountant candidate following the Company's provisions for goods and services procurement.
- Ensure that the public accountant, Head of the Internal Audit Bureau, Audit Committee, and other Committees have access to accounting records, supporting data, other documents, and Company information as long as it is necessary to carry out their duties.
- Determine and convey the nomination to the Board of Directors based on the Majority Shareholders' aspirations.
- Perform other supervisory duties and special tasks determined by the GMS.

2. Responsibilities of the Board of Commissioners
- Every Board of Commissioners member cannot act individually but based on a collegial collective Board of Commissioners decision.
- Every Board of Commissioners member is personally responsible for any Company's loss if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties.
- Every Board of Commissioners member is jointly responsible for errors and negligence in supervising the Board of Directors.
- Board of Commissioners members are not responsible for losses if the Board of Commissioners can prove that they:
  - Have carried out supervision in good faith and prudence for the Company's benefit and following the Company's goals and objectives;
  - Have no personal interest, directly or indirectly, in the Board of Directors actions resulted in bankruptcy;
  - Have advised the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of the bankruptcy.

Wewenang Dewan Komisaris

Board of Commissioners Authority

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, meliputi:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen lainnya, serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat

Following the Articles of Association and the Board of Commissioners Manual, the Board of Commissioners is authorized to give approval to the Board of Directors in carrying out certain legal actions, including:

1. To examine books, letters, and other documents, as well as examine cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;

2. To enter the premises, buildings, and offices used by the Company;

3. To request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the

lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
   - Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
   - Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
   - Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite-komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan termasuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komite tersebut;
   - Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (viii) setiap akhir tahun buku.
   - Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
   - Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
   - Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern
   - Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
   - Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Seluruh kewenangan Dewan Komisaris tersebut senantiasa memperhatikan peraturan perundangan dan Peraturan Perusahaan serta Pemegang Saham Mayoritas (apabila ada). Sementara itu, kewenangan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

management of the Company;

4. To know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;

5. To request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners Meeting;
   - Appoint and dismiss a Secretary of the Board of Commissioners;
   - Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
   - Establish Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee, and other committees if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities including appointing and dismissing members of the Committee;
   - Evaluate the performance of the committee that assists the implementation of its duties and responsibilities as referred to in point (viii) at the end of each financial year.
   - To use experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
   - Perform management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association
   - Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Supervisory Unit
   - Attend the Board of Directors Meeting and provide views on the matters discussed;
   - Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with the laws and regulations of the Articles of Association, and/or the resolutions of the General Meeting of Shareholders

All Board of Commissioners authority shall always take into account the prevailing laws and regulations as well as the Company and the Majority Shareholders' Regulations (if any). Meanwhile, other authorities are carried out following the provisions of applicable laws, regulations, and the Articles of Association.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Division of Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Commissioners

Pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 8 Juli 2024 tantang Perubahan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk. Berikut uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

The division of duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been regulated in Board of Commissioners Decree No. 013/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated July 8, 2024 concerning the Changes in Division of Duties and Authorities of Members of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk. The following is a description of the division of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
(President Commissioner/Independent Commissioner)

- Koordinator Kegiatan Anggota Dewan Komisaris;
- Kepatuhan dalam melaksanakan perundangan;
- Penyelenggaraan hingga keputusan RUPST/RUPSLB;
- Hubungan dengan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya;
- Kebijakan dan pelaksanaan Organisasi Perseroan;
- Kebijakan dan pelaksanaan bidang operasional Perseroan;
- Kebijakan dan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- Kordinator Tata Kelola terintegrasi.

- Activity Coordinator for Members of the Board of Commissioners;
- Compliance in implementing legislation;
- Organization up to the decision of the AGMS / EGMS;
- Relationship with Shareholders and other stakeholders;
- Policy and implementation of the Company's Organization;
- Policies and implementation of the Company's operational areas;
- Policy and implementation of KPIs of the Board of Commissioners and Board of Directors; and
- Coordinator of integrated Governance.

Albert Simangunsong (Komisaris)
(Commissioner)

- Kepatuhan dalam melaksanakan perundangan;
- Kebijakan dan *monitoring* pelaksanaan GCG;
- Kebijakan dan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris dan Direksi
- Kebijakan dan pelaksanaan bidang CSR
- *Monitoring* pelaksanaan penerapan GCG aspek Dewan Komisaris
- Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan, remunerasi dan nominasi); dan
- Kebijakan, pelaksanaan dan *monitoring* atas persetujuan Investasi/Aksi Korporasi.

- Compliance in implementing legislation;
- Policy and monitoring of GCG implementation;
- Policy and implementation of KPIs of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Policy and implementation in CSR
- Monitoring the implementation of GCG aspect of the Board of Commissioners
- Policy and HR management (development, remuneration and nomination); and
- Policy, implementation and monitoring of the approval of Investments/Corporate Actions.

Muhammad Zahid (Komisaris)
(Commissioner)

- Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal);
- Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko;
- Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan);
- Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT;
- Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan supply chain & ERP;
- Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perseroan;
- Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP;
- Kebijakan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan peralatan;
- Kebiiakan dan penerapan QSHE (Mutu, K-3 &Lingkungan), Grcen Catstrudion dan Sertifikasi; dan
- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

- Policy and monitoring of audit implementation (internal and external);
- Policy and implementation of Risk Management;
- Policy and HR management (development);
- Policy and implementation of business development and IT;
- Policy and implementation of supply chain & ERP procurement;
- Policy and implementation of the Company's finance;
- Policy on the preparation and monitoring of Annual RKA and RJPP;
- Policy and monitoring of equipment management implementation;
- Policy and implementation of OSHE (Quality, K-3 & Environment), Green Construction and Certification; and
- Policy of integrated Governance.

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris Baru

Onboarding Program for New Board of Commissioners

Perusahaan senantiasa memberikan program orientasi kepada semua anggota Dewan Komisaris yang baru dengan memberikan pemahaman mengenai peran, tugas dan tanggung jawab mereka, dan kepatuhan terhadap praktik dan kebijakan GCG. Tanggung jawab pengadaan program tersebut berada pada Biro *Corporate Secretary.*

Pelaksanaan pengenalan Perusahaan didokumentasikan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun metode pengenalan Perusahaan tersebut dapat berupa:

Presentasi, Pertemuan, Diskusi, dan Sejenisnya
Presentations, Meetings, Discussions, etc.

Kunjungan ke kantor pusat, baik Divisi atau Biro maupun entitas anak.

Visit to the Head Office, Division, Bureau, and Subsidiaries.

Sementara materi untuk program pengenalan Perusahaan meliputi:

1. Gambaran singkat Perusahaan, antara lain mengenai Visi, Misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka Panjang;
2. Struktur organisasi, pejabat Direksi, dan manajer Perusahaan;
3. Posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;
4. Sistem tata kelola Perusahaan, kewenangan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, mekanisme kerja di antara ketiga organ tersebut serta kegiatan penyempurnaan sistem GCG yang dilakukan oleh Perusahaan;
5. Organ-organ pendukung pelaksanaan sistem GCG seperti Komite Audit, Komite Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris, Biro *Corporate Secretary*, Biro *Internal Audit* dan akuntan publik;
6. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2024, Perusahaan tidak menyelenggarakan orientasi untuk Dewan Komisaris karena tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru.

The Company consistently provides onboarding programs to all new members of the Board of Commissioners, offering an understanding of their roles, duties, and responsibilities, as well as compliance with GCG (Good Corporate Governance) practices and policies. Responsibility for organizing these programs lies with the Corporate Secretary Bureau.

The implementation of the Company's onboarding is documented and reported to the Board of Commissioners and the Board of Directors. The methods for introducing the Company may include:

Peninjauan Lapangan dan Lokasi Proyek
Field and Project Location Survey

Pengkajian dokumen/program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan Perusahaan, entitas anak, serta proyek-proyek yang ditangani.

Review other documents/programs deemed relevant to the Company and Subsidiary's needs, as well as projects being worked on.

The materials for the Company's onboarding program are:

1. A brief description of the Company, e.g., the Company's Vision, Mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operation performance, strategies, as well as short and long-term business plans;
2. Organizational structure, Board of Directors members, and Company managers;
3. Competitive position, risks and other strategic issues;
4. Corporate governance system, GMS authority, Board of Commissioners and Board of Directors, working mechanism among the three organs and the Company's GCG system improvement activities;
5. Supporting organs for the corporate governance system implementation, such as the Audit Committee, Compliance Committee, Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary Bureau, Internal Audit Unit Bureau, and public accountants;
6. Board of Commissioners duties and responsibilities as well as prohibited matters.

In 2024, the Company did not conduct onboarding for the Board of Commissioners as there were no new members of the Board of Commissioners.

Rencana Program Kerja Dewan Komisaris 2025

Board of Commissioners Work Program Plan for 2025

Dalam memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab agar berjalan dengan baik, Dewan Komisaris telah menyusun rencana program pengawasan sebagai acuan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun yang akan datang yang telah disahkan pada 9 Oktober 2024. Adapun rencana program kerja Dewan Komisaris meliputi:

1. Bidang Pengawasan

Rencana Kerja Dewan Komisads Tahunan tahun 2025 selain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, juga secara khusus mengacu kepada sasaran korporasi, strategi perusahaan, dan kebijakan perusahaan yang disaiikan dalam Rencana Keria dan Anggaran Tahunan Perusahaan Tahun 2025.

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada hakekatnya adalah melaksanakan amanat pemegang saham untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan dan kebijakan Direksi dalam pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan, dan sesuai dengan maksud dan tuiuan Perusahaan.

2. Materi Pengawasan

Untuk mewuiudkan Visi dan Misi Perusahaan, maka sektor pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dengan memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam hal ini PT PP (Persero) Tbk. serta tetap mendasarkan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain meliputi:

- Pengawasan terhadap kepatuhan peraturan perundangan;
- Pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan entilas anak, serta kinerja proyek kerjasama operasi (KSO) dan perusahaan *Joint venture* (JV) yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, termasuk pelaksanaan CSR;
- Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko perusahaan;
- Pengawasan teknologi informasi perusahaan;
- Pengawasan terhadap manajemen QSHE (*Quality, Satety, Health & Environment*);
- Pengawasan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM);
- Pengawasan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- Pengawasan kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya;
- Pengawasan kebijakan pengelolaan entitas anak (*subsidiary governance*);
- Pengawasan sistem pengendalian intemal perusahaan (SPIP), *Whsitle Blowing System* (WBS),
- dan sistem pengelolaan gratifikasi;
- Pengusulan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan pengawasan kinerja KAP;
- Pengusulan remunerasi, nominasi, dan suksesi Direksi

To ensure the proper execution of duties and responsibilities, the Board of Commissioners has prepared a supervision program plan as a reference for the implementation of the Board of Commissioners' tasks in the upcoming year, which was approved on October 9, 2024. The Board of Commissioners' work program plan includes:

1. Supervision Area

The Annual Work Plan of the Board of Commissioners for 2025 is based not only on the prevailing laws and regulations as outlined above but also specifically refers to corporate objectives, company strategies, and company policies presented in the Company's Annual Work Plan and Budget for 2025.

In carrying out its supervisory role, the Board of Commissioners essentially fulfills the mandate of the shareholders to oversee and guide the implementation and policies of the Board of Directors in executing the Company's Long-Term Plan, the Annual Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, and the applicable laws and regulations, all for the benefit of the Company and in line with the Company's purpose and objectives.

2. Supervision Material

To realize the Company's Vision and Mission, the supervision sector carried out by the Board of Commissioners by taking into account the direction of the Majority Shareholder in this case PT PP (Persero) Tbk. and still based on the implementation of Good Corporate Governance, among others, includes:

- Supervision of compliance with laws and regulations;
- Supervision of the performance of the Company and its subsidiaries, as well as the performance of operational cooperation projects (KSO) and joint venture (JV) companies as outlined in the Annual Work Plan and Budget, including the implementation of CSR;
- Supervision of the implementation of the Company's risk management;
- Supervision of the Company's information technology;
- Supervision of QSHE (Quality, Safety, Health & Environment) management;
- Supervision of human resources (HR) management and development;
- Supervision of accounting policies and financial reporting;
- Supervision of procurement policies and their implementation;
- Supervision of subsidiary governance policies;
- Supervision of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS), and gratification management system;
- Proposal for the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) and supervision of the KAP's performance;
- Proposal for remuneration, nomination, and succession of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Monitoring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles;

dan Dewan Komisaris;
- Monitoring penerapan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- Persetujuan Rencana Keria dan Anggaran Tahunan tahun 2025;
- Kaiian dan persetujuan atas tindakan Direksi yang rnernerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- Tanggapan Dewan Komisaris atas laporan perusahan secara berkala dan persetujuan Laporan Tahunan;
- Monitoring kinerja proyek regular, dan investasi melalui kuniungan lapangan;
- Program pengembangan Dewan Komisaris;
- Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris:
- Pelaporan kinerja Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham; dan
- Evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris.

- Approval of the 2025 Annual Work Plan and Budget;
- Review and approval of Board of Directors' actions requiring the Board of Commissioners' approval;
- The Board of Commissioners' response to periodic company reports and approval of the Annual Report;
- Monitoring the performance of regular projects and investments through field visits;
- Board of Commissioners' development program;
- Monitoring the follow-up on decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners;
- Reporting the Board of Commissioners' performance to the Shareholders; and
- Evaluation of the performance of Committees under the Board of Commissioners.

Tabel Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025
Board of Commissioners Work Program Table for 2025

KEBIJAKAN POLICY	**PROGRAM KERJA** WORK PROGRAM	**KEGIATAN** ACTIVITY	**TARGET** TARGET	**WAKTU** TIME
Kebijakan Perusahaan Company policy	Monitoring, saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan: • Kepatuhan Manajernen terhadap peraturan yang berlaku. • Peraturan Interna/Kebijakan/ SOP. Monitoring, suggestions on the implementation of applicable regulations and laws for the Company: • Management Compliance with applicable regulations. • Internal Regulations/Policies/ SOPs.	Surat Letter Evaluasi Evaluation	- - -	Sesuai Kebutuhan As Required Sesuai Kebutuhan As Required
Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen Supervision and Direction of Management Control and Compliance	1. Melaksanakan Rapat Bersama/Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala. 1. Conducting Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors periodically.	Rapat gabungan Kinerja & Rapat gabungan Koordinasi Joint meeting of performance and Joint meeting of coordination	8x	Januari — Desember January - December

	• Evaluasi kinerja:
	  • Pemasaran
	  • Operasional
	  • Akuntansi dan Keuangan
	• Evaluasi kinerja investasi (yang disetujui) dan program strategis perusahaan
	• Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Dewan Komisaris
	
	• Performance evaluation:
	  • Marketing
	  • Operations
	  • Accounting and Finance
	• Performance evaluation of (approved) investments and strategic programs of the company
	• Other matters requiring Board of Commissioners' decision			

	2. Melaksanakan Rapat Intenal Dewan Komisaris bersama organ pendukung dan dapat mengundang pejabat satu level dibawah Direksi: • Pembahasan Kinerja • Update kondisi di Perusahaan 2. Conducting Internal Meetings of the Board of Commissioners with supporting organs and may invite officials one level below the Board of Directors: • Performance Discussion • Update on conditions in the Company	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings	7x	
	3. Memberikan pesetujuan atas aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar 3. Approving corporate actions proposed by the Board of Directors in accordance with the Articles of Association.	Surat Letter		Sesuai Kebutuhan As Required
	4. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang usulan RKAP Dewan Komisaris tahun 2026 4. Submit a written report on the proposed RKAP of the Board of Commissioners in 2026	Surat Letter	1x	Oktober October

Manajemen Risiko Risk Management	Menelaah kebijakan penerapan Sistem Manajemen Risiko *Monitoring*, saran atas pelaksanaan manajemen risiko Reviewing the Risk Management System implementation policy Monitoring, advice on the implementation of risk management	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	2x	April & Oktober April & October
Sistem Teknologi Informasi Information Technology System	Menelaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi Reviewing Information Technology System policies *Monitoring*, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi Monitoring, advice on the implementation of Information Technology System	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	1x	Februari February
Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) QSHE (Quality, K3 and Environment) Management	Menelaah kebijakan Manaiemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) di inlinekan dengan Program Kerja Divisi Reviewing QSHE (Quality, OHS and Environment) Management policies in line with the Division's Work Program *Monitoring*, saran atas penerapan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) Monitoring, advice on the implementation of QSHE (Quality, OHS and Environment) Management	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	2x	Maret & Agustus March & August

Pengendalian & Kepatuhan: Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), ***Whistle Blowing System*** (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi Control and Compliance: Supervision of the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistle Blowing System (WBS) and gratification management system	1. *Review* terhadap hasil pelaksanaan Auditor Internal (SPI) 1. Review of the results of the implementation of the Internal Auditor (SPI)	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	3x	Triwulanan Quarterly
	2. *Monitoring* dan saran atas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (SPIP) 2. Monitoring and advice on the Company's Internal Control System (SPIP) implementation	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	1x	November November
	3. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS 3. Monitoring, advice and follow-up on WBS reports	Arahan dan Laporan Direction and Report		Sesuai Kebutuhan As Required
	4. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi 4. Monitoring, advice and follow-up on gratification reports	Arahan dan Laporan Direction and Report		Sesuai Kebutuhan As Required
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Policy Implementation Supervision	1. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya. 1. Procurement Policy and Its Implementation.	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	1x	Maret March
	2. Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karir, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai. 2. Human Resource Management includes Recruitment, Career Management, Promotion, Mutation and Demotion of Employees.	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	2x	Triwulan I dan III Quarter I and III

	3. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. 3. Accounting Policies and Preparation of Financial Statements.	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction		Sesuai Kebutuhan As Required
	4. Pengelolaan Entitas Anak. 4. Management of Subsidiaries	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction		Sesuai Kebutuhan As Required
Renumerasi Renumeration	Menetapkan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) sesuai putusan RUPTS dan setelah mendapat persetujuan/arahan tertulis dari PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas PT PP Presisi Tbk. Note : Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku untuk Nominasi dan Suksesi menjadi wewenang penuh Penegang Saham Mayoritas. Determine the amount of remuneration (salary/ honorarium, facilities and benefits) in accordance with the decision of the AGMS and after obtaining written approval/ direction from PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder of PT PP Presisi Tbk. Note: In accordance with the Company's Articles of Association currently in effect, the authority for Nomination and Succession lies fully with the Majority Shareholder.	Surat Letter	1x	Maret March
Pengawasan Eksternal / KAP External Supervision / Public Accounting Firm (KAP)	1. Usulan Penunjukan KAP tahun buku 2025 1. Proposing the Appointment of KAP for the fiscal year 2025	Usulan Proposal Penunjukan Appointment	1x 1x	Oktober Oktober November November

	2. Evaluasi efektivitas kineria KAP tahun buku 2024 dan review terhadap hasil pelaksanaan audit. 2. Evaluation of the effectiveness of KAP performance for fiscal year 2024 and review of the audit results.	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	1x	Maret March
GCG & Tata Kelola Terintegrasi GCG & Integrated Governance	Monitoring penerapan tata kelola perusahaan yang baik : • Ketaatan terhadap UU • Ketaatan terhadap prosedur • Laporan ke Pihak Eksternal tepat waktu • Dan lain lain Monitoring the implementation of good corporate governance: • Compliance with the law • Compliance with procedures • Reports to external parties on time • Etc.	Evaluasi dan Arahan Evaluation and Direction	2x	Februari atau Maret atau sesuai kebutuhan February or March or as required
RUPST dan RUPSLB AGMS and EGMS	Pendapat dan Tanggapan terhadap hal - hal yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB • RUPST : BA Pimpinan RUPST, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris • RUPSLB : BA Pimpinan RUPSLB Opinions and Responses to matters discussed in the AGMS and EGMS • AGMS: Minutes of AGMS, Report of Board of Commissioners Supervisory Duties • EGMS : Minutes of EGMS	RUPST AGMS RUPSLB EGMS	1x -	Maret/April March/April Sesuai Kebutuhan As Required

Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action Investment, Business Development and Corporate Action	Memberikan persetujuan dan rekomendasi serta arahan terhadap recana Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar dan atau treshold PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Provide approval and recommendations as well as direction for Investment, Business Development and Corporate Action plans, in accordance with the limits of authority granted by the Articles of Association and or the threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.	Arahan, Rekomendasi, Persetujuan dan Laporan Directions, Recommendations, Approvals and Reports	-	Sesuai Kebutuhan As Required
Penyusunan RKA Tahunan 2026 dan RJPP Preparation of Annual RKA 2026 and RJPP	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKA tahunan 2026 dan Review RJPP: Advice and Approval on the preparation of annual RKA 2026 and RJPP Review:			
	1. Pandangan dan Masukan Dewan Komisaris terkait penyusunan RKA Tahunan 2026 dan RJPP 1. Board of Commissioners' views and inputs related to the preparation of the Annual RKA 2026 and RJPP	Surat (Himbauan, telaah dan arahan) Letters (Appeals, reviews and directions)	1x	September dan/ atau sesuai arahan dari PSM September and/ or according to directions from PSM
	2. Pembahasan BOD dan BOC atas Rancangan RKA Tahunan 2026 & RJPP 2. BOD and BOC discussion on the Annual RKA 2026 Draft & RJPP	Rapat Meeting	1x	Oktober/November October/November
	3. Pengesahan RKA Tahunan 2026 & RJPP 3. Ratification of Annual RKA 2026 & RJPP	Berita Acara Minutes of Events	1x	Oktober/November October/November

Laporan Manajemen Management Report	1. Laporan Evaluasi realisasi pencapaian Kinerja Perseroan Triwulanan Kepada Pemegang Saham Mayoritas 1. Quarterly Company Performance Achievement Evaluation Report to Majority Shareholders	Laporan Report	3x	1 bulan setelah Triwulanan 1 month after Quarterly
	2. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2025 (Tahunan) 2. Preparation of the 2025 Board of Commissioners Supervisory Report (Annual)	Laporan Report	1x	Februari February
	3. Persetujuan Laporan Tahunan 2025 (Annual Report) 3. Approval of the 2025 Annual Report	Persetujuan Approval	1x	Februari February
Pengembangan Dewan Komisaris Board of Commissioners Development	Seminar, Workshop atau sebagai narasumber Seminar, Workshop or as a resource person	Laporan Report	3x	Sesuai Kebutuhan As Required
Tindak lanjut hasil keputusan dan arahan Dewan Komisaris Follow up on the results of the Board of Commissioners' decisions and directions	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi/arahan Dewan Komisaris Monitoring the follow-up of the results of decisions, recommendations/directions of the Board of Commissioners	Laporan Report	4x	Sesuai Kebutuhan As Required
Evaluasi Kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris Performance Evaluation of Committees under the Board of Commissioners	Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Audit dan Komite Kepatuhan, periode: Submission of Audit Committee and Compliance Committee Activity Reports, period:			

	Tahunan untuk tahun buku 2024 Annual for fiscal year 2024	Evaluasi(KA & KK) Evaluation(KA & KK)	4x	Januari, April, Juli dan Oktober January, April, July and October
	Triwulanan tahun 2025 Quarterly for 2025			

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners' Supporting Organs

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan sistem *key performance indicator* dan dilaksanakan setiap tahun. Berikut disampaikan kirteria dan hasil penilaian kinerja Komite Audit tahun 2024.

Audit Committee Performance Assessment

The performance assessment of the Audit Committee is conducted by the Board of Commissioners using the key performance indicator system and is carried out annually. The following are the criteria and results of the Audit Committee performance assessment in 2024.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Komite Audit

Criteria and Results of Audit Committee Performance Assessment

No. No.	**Indikator Kinerja** Performance Indocator	**Deskripsi** Description	**Satuan** Unit	**Target** Target	**Bobot (%)** Weight (%)	**Realisasi** Realization	**Capaian KPI (%)** KPI Achivement (%)
Aspek Penilaian Obyektif (85%) Objective Assessment Aspect (85%)							
1	Pelaksanaan Program Kerja Komite Implementation of the Committee Work Program	Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Komite Achievement of targets set in the Committee Work Plan	Kali Times	16	75,00	16	75,00
2	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Dalam Rapat Komite dan Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2024 In the Committee Meetings and Board of Commissioners Meetings during 2023	Kali Times	8	10,00	6	7,50
Aspek Penilaian Subyektif (15%) Subjective Assessment Aspect (15%)							

3	Kompetensi & kerja sama Anggota Komite Competence & Cooperation of Committee Members	Kecukupan kompetensi Competency adequacy	2 = Baik 1 = cukup 0 = kurang 2 = Good 1 = Sufficient 0 = Poor	2	10,00	2	10,00
		Solidaritas kerjasama, keterlibatan dalam diskusi, inisiatif untuk diskusi antar Komite The solidity of cooperation, involvement in discussions, and initiative for inter-committee discussions.	2 = aktif/baik 1 = cukup aktif 0 = tidak aktif 2 = Active/ Good 1 = Moderately Active 0 = Inactive	2	5,00	1	2,50
Total Nilai | Total Amount					100,00		**95,00**

Penilaian Kinerja Komite Kepatuhan

Demikian pula penilaian kinerja Komite Kepatuhan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan sistem *key performance indicator* dan dilaksanakan setiap tahun. Berikut disampaikan kirteria dan hasil penilaian kinerja Komite Kepatuhan tahun 2024.

Performance Assessment of the Compliance Committee

Similarly, the performance assessment of the Compliance Committee is conducted by the Board of Commissioners using the key performance indicator system and is carried out annually. The following are the criteria and results of the Compliance Committee performance assessment in 2024.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Komite Kepatuhan

Criteria and Results of Compliance Committee Performance Assessment

No. No.	**Indikator Kinerja** Performance Indocator	**Deskripsi** Description	**Satuan** Unit	**Target** Target	**Bobot (%)** Weight (%)	**Realisasi** Realization	**Capaian KPI (%)** KPI Achivement (%)
Aspek Penilaian Obyektif (85%) Aspek Penilaian Obyektif (85%)							
1	Pelaksanaan Program Kerja Komite Implementation of the Committee Work Program	Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Komite Achievement of targets set in the Committee Work Plan	Kali Times	14	75,00	14	75,00
2	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Dalam Rapat Komite dan Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2024 In the Committee Meetings and Board of Commissioners Meetings during 2023	Kali Times	8	10,00	6	7,50

Aspek Penilaian Subyektif (15%) Aspek Penilaian Subyektif (15%)							
3	Kompetensi & kerja sama Anggota Komite Competence & Cooperation of Committee Members	Kecukupan kompetensi Competency adequacy	1 = cukup 0 = kurang 1 = sufficient 0 = insufficent	1	10,00	2	10,00
		Solidaritas kerjasama, keterlibatan dalam diskusi, inisiatif untuk diskusi antar Komite The solidity of cooperation, involvement in discussions, and initiative for inter-committee discussions.	1 = aktif/ baik 0 = tidak aktif 1 = Active/ Good 0 = Inactive	1	5,00	1	2,50
Total Nilai | Total Amount					100,00		**95,00**

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Komite Audit dan Komite Kepatuhan di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh pelaksanaan tugas oleh seluruh anggota komite telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan penilaian kinerja yang ditetapkan. Menundaklanjuti area of improvement nominasi dari hasil Assessment GCG tahun 2023, fungsi nominasi dan remunerasi dijalnkan oleh komite kepatuhan sesuai dengan pembagian tugas yg disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 009/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan diperbaharui sesuai SK No. 013/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 8 juli 2024

Based on the performance evaluation results of the Audit Committee and the Compliance Committee above, the Board of Commissioners assesses that all tasks performed by all committee members have been carried out properly in accordance with established procedures and performance evaluations. Following up on the areas of improvement for nominations from the 2023 GCG Assessment results, the nomination and remuneration functions are carried out by the compliance committee in accordance with the division of tasks ratified through the Board of Commissioners' Decree No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 12, 2023, and updated according to Decree No. 013/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated July 8, 2024.

Komisaris Independen

Independent Commissioners

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan seperti ditentukan oleh regulator. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% dari total Dewan Komisaris.

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who comes from outside the Company and meets the requirements as stipulated by regulators. In accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the number of Independent Commissioners must constitute at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen

Composition and Membership of Independent Commissioner

Komposisi Komisaris Independen sekurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun per 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen dari total anggota Dewan sebanyak 3 (tiga) orang atau 33,33%.

The composition of Independent Commissioners must be at least 30% of the total members of the Board of Commissioners. As of December 31, 2024, the Company had 1 (one) Independent Commissioner out of a total of 3 (three) members of the Board of Commissioners, equivalent to 33.33%.

Nama dan Jabatan Name and Position	Dasar Pengangkatan dan Periode Menjabat Basis of Appointment and Term of Office
Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen) (President Commissioner/Independent Commissioner)	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.

Kriteria dan Independensi Komisaris Independen

Criteria and Independence of Independent Commissioners

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan berikut selama memegang jabatannya sebagai Komisaris Independen.

Independent Commissioners must meet the following requirements while holding their position as Independent Commissioners.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Nur Rochmad
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya. An individual who works or reserves the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last six months, except for the reappointment as the Company's Independent Commissioner in the following period.	✅
Mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Owns shares, directly or indirectly, in the Company	❌
Mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi ataupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. Affiliated with the Company, Board of Commissioners members, Board of Directors members, or Major Shareholders of the Company	❌
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut. Has business relations, directly or indirectly, with the Company's business activities.	❌

✅ Ya
❌ Tidak

✅ Yes
❌ No

Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi dan telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui setiap tahun.

The Company's Independent Commissioner has met the independence criteria and has declared their compliance by signing a statement letter, which is renewed annually.

PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP, Wisma Robinson – 1st Floor
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403931

SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Nur Rochmad**
Jabatan	:	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Nama Perusahaan	:	PT PP Presisi Tbk
Alamat kantor	:	Jl. TB. Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Alamat domisili (sesuai KTP atau identitas lain)	:	Jl. Adhyaksa Raya No. A4 Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di PT PP Presisi Tbk sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 24 Mei 2023 adalah merupakan Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Januari 2024
Dewan Komisaris
PT PP Presisi Tbk

Nur Rochmad
Komisaris Utama dan
Komisaris Independen

PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP, Wisma Robinson – 1st Floor
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403931

SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Indra Jaya Rajagukguk**
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama Perusahaan	:	PT PP Presisi Tbk
Alamat kantor	:	Jl. TB. Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Alamat domisili (sesuai KTP atau identitas lain)	:	Jl. Empang Tiga I No.76 007/008 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Komisaris Independen di PT PP Presisi Tbk ("Perseroan") sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 20 April 2022 adalah merupakan Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Januari 2024
Dewan Komisaris
PT PP Presisi Tbk

Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh atas kepengurusan Perusahaan. Direksi bekerja dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors is a Corporate Organ with the responsibility and full authorization of Company management. The Board of Directors works by paying attention to the Company's interests and objectives and considering the interests of Shareholders and all stakeholders.

Pedoman Direksi

Board of Directors Manual

Perusahaan memiliki Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Direksi yang ditujukan sebagai pedoman kerja Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dituangkan di dalam Pedoman *Board of Director* (BOD) PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 yang telah berlaku dan diperbarui pada 14 Desember 2023.

The Company has Guidelines for the Board of Directors' Duties implementation, intended as working guidelines for the Board of Directors to carry out their duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, competently, independently, and accountably. This is contained in the Board of Directors Manual of PT PP Presisi Tbk of 2023, which came into effect and was updated on December 14, 2023.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Composition and Term of Office of the Board of Directors

Jumlah anggota Dewan Direksi sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. Sementara masa jabatan anggota Direksi yang ditetapkan dalam RUPS dalam 1 (satu) periode tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun atau terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

The Board of Directors must consist of at least 2 (two) members, one of whom is appointed as the President Director, and, if necessary, one may be appointed as the Vice President Director. The term of office for members of the Board of Directors, as determined by the General Meeting of Shareholders (GMS), is a maximum of 5 (five) years per term, starting from the date of appointment as decided by the GMS and ending at the conclusion of the 5th Annual GMS at the end of the term. This is subject to applicable laws and regulations in the Capital Market sector, without limiting the GMS's authority to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term ends.

Masa Jabatan Direksi berakhir apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

The term of office of a Director ends if they are proven to no longer meet the requirements for being a member of the Board of Directors under the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2024

Structure and Composition of the Board of Directors in 2024

Di tahun 2024 terdapat perubahan susunan Direksi sejalan dengan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2023 tanggal 5 Juni 2024. Berikut disampaikan kronologi susunan Direksi di sepanjang tahun 2024 dan susunan Direksi per 31 Desember 2024.

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Directors in line with the resolution of the 2023 Annual GMS held on June 5, 2024. Below is the chronology of the Board of Directors' composition throughout 2024 and the composition as of December 31, 2024.

Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2024

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors Throughout 2024

Periode 1 Januari s.d 25 April 2024 January 1 to April 25, 2024	**Periode 25 April s.d 5 Juni 2024** April 25 to June 5, 2024	**Periode 5 Juni s.d 31 Desember 2024** June 5 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)			I Gede Upeksa Negara mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT PP Presisi Tbk sebagaimana disampaikan dalam surat pengunduran diri tanggal 25 April 2024. Beliau diangkat sebagai Direktur Strategi Korporasi dan HCM entitas induk, PT PP (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan PT PP (Persero) Tbk tanggal 24 April 2024. I Gede Upeksa Negara resigned as President Director of PT PP Presisi Tbk as submitted in his resignation letter dated April 25, 2024. He was appointed as Director of Corporate Strategy and HCM of the parent entity, PT PP (Persero) Tbk based on the Resolution of the Annual GMS of PT PP (Persero) Tbk dated April 24, 2024.
M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Director of Finance, Risk Management & Legal)	**M Arif Iswahyudi** (Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Acting President Director and concurrently Director of Finance, Risk Management & Legal)	**M Arif Iswahyudi** (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	• M Arif Iswahyudi merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Utama berdasarkan Surat Direksi PT PP (Persero) Tbk No. 063/EXT/PP/DU/2024 tanggal 25 April 2024. • Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, beliau tidak lagi menjabat sebagai Plt. Direktur Utama. Pada kesempatan yang sama, Direktorat Keuangan Manajemen Risiko, dan Legal diubah menjadi Direktorat Keuangan & HCM. • M Arif Iswahyudi concurrently serves as Acting President Director based on Decree of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk No. 063/EXT/PP/DU/2024 dated April 25, 2024. • At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, he no longer served as Acting President Director. On the same occasion, the Directorate of Finance, Risk Management and Legal was changed to the Directorate of Finance & HCM.
Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	**Rebimun** (Direktur Operasi) (Director of Operations)	**Rebimun** (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Direktorat Operasi diubah menjadi Direktorat Pengelolaan Bisnis & Operasi. At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, the Directorate of Operations was changed to the Directorate of Business Management & Operations.
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) (Director of Business Planning & HCM)	**Yudi Setiawan** (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) (Director of Business Planning & HCM)		Pada RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2024, Yudi Setiawan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM). At the Annual GMS for the fiscal year 2023 held on June 5, 2024, Yudi Setiawan was honorably discharged from his position as Director of Business Planning & HCM).
		Arzan (Direktur Utama) (President Director)	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, Arzan diangkat sebagai Direktur Utama. At the Annual GMS held on June 5, 2024, Arzan was appointed as President Director.

Susunan Keanggotaan Direksi per 31 Desember 2024
Board of Directors Composition as of December 31, 2024

Arzan

Jabatan Position	: :	Direktur Utama President Director
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 Tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution No. 14 dated June 5, 2024 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, a notary in Jakarta.
Masa Jabatan Term of Office	: :	5 Juni 2024 s.C. RUPS yang akan diselengarakan di tahun 2029. June 5, 2024 until the GMS to be held in 2029.
Periode Jabatan Period of Service	: :	Ke-1 1st

Mohammad Arif Iswahyudi

Jabatan Position	: :	Direktur Keuangan & HCM Director of Finance & HCM
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution No. 39 dated April 27, 2022 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in South Jakarta.
Masa Jabatan Term of Office	: :	20 April 2022 s.C. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027. April 20, 2022 until the GMS to be held in 2027.
Periode Jabatan Period of Service	: :	Ke-1 1st

Rebimun

Jabatan Position	: :	Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi Director of Business Management & Operations
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	• Periode 2023-2028: Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 23 Februari 2023 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. • Periode 2022-2023: Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. • Period 2023-2028: Deed of Meeting Resolution No. 14 dated February 23, 2023 2023 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in South Jakarta. • Period 2022-2023: Deed of Meeting Resolution No. 39 dated April 27, 2022 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in South Jakarta.
Masa Jabatan Term of Office	: :	23 Februari 2023 s.C. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. February 23, 2023 until the GMS to be held in 2028
Periode Jabatan Period of Service	: :	Ke-2 Second term

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

All Board of Directors members' profiles are available in the Company Profile section of this Annual Report.

Independensi Direksi

Independence of the Board of Directors

Independensi Direksi merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga. Hal tersebut bertujuan agar Direksi senantiasa bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan. Untuk menjaga independensi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan Perusahaan atau mempengaruhi Direksi dalam menjalankan usaha Perusahaan;
2. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus usaha Perusahaan.

The independence of the Board of Directors is an essential aspect that must be maintained. This aims to ensure that the Board of Directors always acts in the best interests of the Company. To preserve independence, the Company has established the following provisions:

1. Aside from the Company's organs, no other party is allowed to interfere with the management of the Company or influence the Board of Directors in carrying out the Company's business;
2. Members of the Board of Directors are prohibited from engaging in activities that could compromise their independence in managing the Company's business.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi

Board of Directors Duties, Authorities, Responsibilities

Berdasarkan Piagam Tata Kerja Direksi, tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut.

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Based on the Board of Directors Charter, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows.

1. The Board of Directors has the duty to carry out and be responsible for Company management for the interest of the Company, following the Company's goals and objectives set forth in the Articles of Association and representing the Company inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as regulated in the laws and regulations and Articles of Association and/or GMS resolutions.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan secara tanggung renteng apabila dapat membuktikan:
   - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
   - Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

6. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

7. Tugas Direksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara:
   - Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
   - Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - Salah seorang Anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penempatan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan;
   - Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern; temuan auditor eksternal; nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris; laporan BPK; laporan BPKP; dan/atau temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud

2. In carrying out their duties and responsibilities in Company management, the Board of Directors is required to organize the Annual GMS and other GMS as stipulated in applicable laws and regulations and the Articles of Association.

3. Every Board of Directors member must carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and prudence.

4. Every Board of Directors member is jointly responsible for the Company's losses caused by the Board of Directors members' mistakes or negligence in carrying out their duties.

5. The Board of Directors members cannot be jointly held responsible for the Company's losses if they can prove that:
   - The loss is not due to their fault or negligence;
   - They have carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the interest and following the Company's goals and objectives;
   - They do not have a conflict of interest, directly or indirectly, over management actions that result in losses; and
   - They have taken measures to prevent said losses.

6. The Board of Directors is authorized to carry out the management with appropriate policies, following the goals and objectives stipulated in the Articles of Association.

7. The Board of Directors' duties based on the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises:
   - The Board of Directors must carry out their duties in good faith for the interests of the Company and be fully responsible for the Company management implementation;
   - The Board of Directors is obliged to manage the Company following the authority and responsibilities of the Board of Directors as regulated in the articles of association, laws, and regulations;
   - One member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors Meeting as the person responsible for Good Corporate Governance assignment and monitoring in the Company;
   - The Board of Directors is obliged to follow up on findings and recommendations from the risk management, compliance, and internal audit functions; external auditor's findings; Board of Commissioners' advice and supervision results; BPK report; BPKP report; and/or other findings and recommendations that the Board of Directors must follow up based on statutory provisions.

8. The Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to Company management for the interests of the Company and following the aims and objectives of the Company as well as representing the Company inside and outside the Court on all matters and all events with limitations regulated in laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

9. Direksi mempunyai hak dan berwenang untuk:
   - Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan;
   - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
   - Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
   - Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
   - Mengangkat dan memberhentikan *Corporate Secretary* dan/atau internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
   - Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan;
   - Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/ atau penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris, yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   - Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
   - Dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi selaku pemegang saham dan/ atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:
     - Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yakni seluruh kebijakan yang dapat secara material mempengaruhi kondisi anak perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah yang dituangkan dalam *blue print* untuk diratifikasi dalam RUPS

9. The Board of Directors has the right and authority to:
   - Establish policies deemed appropriate in the management of the Company;
   - Regulate the Board of Directors' transfer of powers to represent the Company inside and outside the court to one or several Board of Directors members specifically appointed for this purpose or to one or several Company employees, either individually or jointly and/or other bodies;
   - Manage provisions on the Company's employment affairs, including determining salary, retirement, pension plan, and other income for the Company's employees following the applicable laws and regulations;
   - Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
   - Appoint and dismiss the Corporate Secretary and/or Internal Audit with the Board of Commissioners' approval;
   - Write off bad debts per the provisions stipulated in the Articles of Association and subsequently be reported to the Board of Commissioners and accounted for in the annual report;
   - No longer collect interest receivables, fines, fees, and other receivables other than the principal that is carried out in the framework of restructuring and/ or settlement of receivables and other actions to settle the Company's receivables, with the obligation to report to the Board of Commissioners, in which the provisions and procedures for reporting are determined by the Board of Commissioners;
   - Perform any actions and other activities regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company to other parties and/or other parties to the Company, and represent the Company inside and outside the court on all matters and all events, with limitations as regulated in the laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.
   - With consideration to laws and regulations and the Company's Articles of Association, the Board of Directors as shareholders and/or majority shareholders in every subsidiary has the authority, among other things, to:
     - Determine, manage, control, and monitor strategic and operational policies that will be implemented by the subsidiary, i.e., all policies that can materially influence the subsidiary's condition and can provide added value as outlined in the blueprint to be ratified at the subsidiary's GMS;
     - Plan, decide, manage, and control strategic activities and functions, including handling cash management, logistics, procurement, capital expenditure, etc.;
     - Determine strategic and operational policies that have not been stipulated in the blueprint as referred to in Article 12 paragraph 2 letter a number 9 point 1.
     - Establish organizational structure policies one level below the subsidiary's Board of Directors by considering input from the subsidiary's Board of Commissioners;
     - Provide approval to the subsidiary's Board of Directors for operational actions that have not been determined in the subsidiary's Work Plan and

anak perusahaan;

- Merencanakan, memutuskan mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan *cash management,* logistik, pengadaan, *capital expenditure* dan lainnya;
- Menetapkan kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam *blue print* sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 huruf a angka 9 point 1
- Menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi anak perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris anak perusahaan;
- Memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang bersifat operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran anak perusahaan melalui mekanisme RUPS;
- Mendapatkan laporan dan penjelasan berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan serta memberikan keputusan di dalam maupun di luar forum RUPS anak perusahaan menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak perusahaan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, sewamenyewa, aset, kerjasama operasi (KSO), bangunan guna serah (BOT), bangunan milik serah (BowT), bangunan serah guna (BTO), dan perjanjian sejenisnya;
- Menyetujui penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan oleh anak perusahaan pada perusahaan lain;
- Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;
- Menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;
- Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau anak perusahaan dari anak perusahaan dimaksud, dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau menyetujui penjualan terhadap persediaan barang tidak dapat digunakan oleh anak perusahaan;
- Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merek dagang anak perusahaan;
- Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dani atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;
- Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/ atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;
- Menyetujui pembelian aset lahan dan/atau *land bank* untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris

Budget through the GMS mechanism;

- Obtain periodic reports and explanations from the subsidiaries' Board of Directors and/or Board of Commissioners and provide resolutions inside and outside the subsidiary's GMS forum to determine the value or term of cooperation between subsidiaries and business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leases, assets, joint operations (KSO), build, operate, and transfer (BOT), build, own transfer (BOwT), build, transfer, and operate (BTO), and other similar agreements;
- Approve capital participation and the amount of capital investment to be made by subsidiaries in other companies;
- Approve the establishment of subsidiaries and/or joint ventures from said subsidiaries;
- Approve the release of capital participation in subsidiaries and/or joint ventures of said subsidiaries;
- Approve the merger, consolidation, takeover, separation, and dissolvent of subsidiaries and/or subsidiaries of said subsidiaries, with a certain value determined by the Board of Commissioners;
- Approve the write-off of uncollectible receivables and/or approve the sale of unusable inventory by the subsidiary;
- Determine and/or change the logo and trademarks of subsidiaries;
- Approve the establishment of foundations, funding organizations, or associations with legal entities, directly or indirectly related to those formed by subsidiaries;
- Approve the imposition of fixed and routine costs and obligations for foundations, organizations, and/or associations with legal entities formed by subsidiaries;
- Approve the purchase of land and/or land bank assets for property business activities or used as fixed assets by first obtaining approval from the Board of Commissioners and a certain value determined by the Board of Commissioners;

10. The Board of Directors is obliged to:
    - Undertake and ensure the management of the Company's business and activities following its purposes, objectives, and business activities;
    - Establish, in time, the Company's Long-Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget, and other work plans and their amendments to be submitted to the Board of Commissioners for approval;
    - Prepare the Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, and minutes of the Board of Directors meetings;
    - Prepare the Annual Report, which, among others, contains the Financial Statements as a form of Company management accountability, reports on the Company's activities, reports on the Social and Environmental Responsibility implementation, details of problems arising during the fiscal year that affect the Company's business activities, reports on supervisory duties carried out by the Board of Commissioners

dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

10. Direksi berkewajiban untuk:
    - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
    - Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
    - Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
    - Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepengurusan Perusahaan, laporan mengenai kegiatan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau;
    - Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
    - Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun buku Perusahaan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
    - Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
    - Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    - Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya;
    - Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya;
    - Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
    - Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
    - Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu

during the past fiscal year, names of Board of Directors members and Board of Commissioners members, salaries and allowances for Board of Directors members and salaries or honoraria and allowances for Board of Commissioners members of the Company for the past year;
- Prepare Financial Statements based on the Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant to be audited;
- Deliver the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners within a maximum period of four months after the Company's fiscal year ends to the GMS for approval and ratification;
- Provide an explanation to the GMS on the Annual Report;
- Delivering the Balance Sheet and Income Statement that has been approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights following the provisions of laws and regulations;
- Prepare other reports mandated by the provisions of laws and regulations;
- Maintaining the Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report, and the Company's financial documents as well as other Company documents;
- Maintain the following in the Company: Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report, and the Company's financial documents as well as other Company documents;
- Procure and maintain the Company's bookkeeping and administration per the norms applicable to a Company;
- Prepare an accounting system following the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of handling, recording, storing, and supervising;
- Provide periodic reports following the applicable provisions, as well as other reports anytime at the request of the Board of Commissioners, by observing the laws and regulations, particularly regulations in the Capital Market sector;
- Prepare the Company's organizational structure, complete with the details and duties;
- Provide explanation on all matters questioned or requested by members of the Board of Commissioners by observing the laws and regulations and applicable regulations, particularly in the Capital Market sector;
- Perform other obligations following the provisions of the Articles of Association and those stipulated by the GMS;
- Prepare the Board of Directors charter;
- Together with the Board of Commissioners, develop a code of conduct that applies to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employees, and the Company's supporting organs, following the provisions of the prevailing laws and regulations;
- Establish guidelines and/or policies for the governance of construction and investment activities after obtaining prior approval from the Board of Commissioners;

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan khususnya di bidang Pasar Modal;
- Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal;
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS;
- Menyusun piagam Direksi;
- Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, serta organ pendukung yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan konstruksi dan investasi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Mengidentifikasi jenis-jenis perubahan lingkungan bisnis yang dapat berpengaruh pada kinerja Perusahaan, terkait aspek-aspek: perubahan kondisi politik nasional, arah pembangunan nasional, perubahan regulasi pemerintah, regulasi pasar modal, kondisi ekonomi makro, perubahan teknologi, persaingan pada lingkungan usaha sejenis. Perubahan lingkungan bisnis dapat dibahas dalam Rapat Direksi, *Management Review*, dan atau pertemuan rutin yang lain. Mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang berdampak signifikan dilaporkan ke Dewan Komisaris.

11. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

12. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

13. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- Identify types of changes in the business environment that may affect the Company's performance related to: changes in national political conditions, national development directions, changes in government regulations, capital market regulations, macroeconomic conditions, technological changes, and competition in similar business environments. Changes in the business environment can be discussed in the Board of Directors Meeting, Management Review, and/or other regular meetings. Changes in the business environment and problems that have a significant impact are reported to the Board of Commissioners.

11. In carrying out their duties, the Board of Directors must devote their full energy, thoughts, attention, and devotion to their duties, obligations, and the achievement of the Company's objectives.

12. The Board of Directors members shall comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

13. In carrying out their duties, each Board of Directors member is obliged to carry out their duties in good faith and with full responsibility for the interests and business of the Company by considering business risks and heeding the applicable laws and regulations.

14. Every Board of Directors member is jointly responsible for the Company's losses caused by the Board of Directors members' mistakes or negligence in carrying out their duties. The Board of Directors members cannot be held responsible for the Company's losses if the concerned Board of Directors member can prove that:
    - The loss is not due to their fault or negligence;
    - They have carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the interest and following the Company's goals and objectives;
    - They do not have a conflict of interest, directly or indirectly, over management actions that result in losses;
    - They have taken measures to prevent the losses. Actions taken by Board of Directors members other than those decided by Board of Directors meetings are the responsibility of the person concerned until the action in question is approved by a Board of Directors Meeting.

15. The following Board of Directors actions must obtain written approval from the Board of Commissioners to:
    - Releasing/transferring and/or pledging assets recorded as the Company's Fixed Assets/Non-Current Assets except for assets recorded as Current Assets, it is sufficient to notify the Board of Commissioners and Majority Shareholders;
    - Releasing/transferring assets recorded as inventory in the Company's Current Assets in one transaction;
    - Releasing/transferring assets below book value;
    - Entering into cooperation with business entities or other parties to carry out the main business activities;

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan, dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh napat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

15. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
    - Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset yang dicatatkan sebagai Aset Tetap/Aset Tidak Lancar Perusahaan kecuali untuk aset yang dicatatkan sebagai Aset Lancar cukup diberitahukan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas;
    - Melepaskan/memindahtangankan aset yang dicatat sebagai persediaan dalam Aset Lancar Perseroan dalam satu transaksi;
    - Melepaskan/memindahtangankan aset dibawah nilai buku;
    - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk melaksanakan kegiatan usaha utama;
    - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk melaksanakan kegiatan usaha utama yang tercantum dalam Anggaran Dasar, namun belum pernah dijalankan sebelumnya dan/atau kegiatan usaha yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar;
    - Melakukan penyertaan/setoran modal anak perusahaan dan perusahaan Patungan;
    - Melepaskan penyertaan modal termasuk melakukan perubahan struktur modal ditempatkan dan disetor pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan;
    - Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
    - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran perusahaan sehingga menjadi anak perusahaan dan perusahaan patungan Perseroan;
    - Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan
    - Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist).
    - Menerima pinjaman dana dari pihak lain, baik bersifat *cash loan* maupun non ------ *cash loan*
    - Menerima pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat ----- operasional, termasuk pinjaman kepada anak perusahaan;
    - Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati
    - Melakukan pembelian aset yang dicatatkan sebagai aset tidak lancar;
    - Entering into cooperation with business entities or other parties to carry out the main business activities listed in the Articles of Association, but have never been carried out before and/or business activities that have not been listed in the Articles of Association;
    - Investing/capital injection in subsidiaries and joint ventures;
    - Releasing capital investments including making changes to the structure of issued and paid-up capital in other companies, subsidiaries and joint ventures;
    - Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
    - Conduct merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution of companies so that they become subsidiaries and joint ventures of the Company;
    - Nominate the Company's representatives to become candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures.
    - Binding the Company as a guarantor (borg/avalist).
    - Receive loans from other parties, both cash loans and non-cash loans.
    - Receive short/medium/long term loans that are not operational in nature, including loans to subsidiaries;
    - Write off bad debts and dead goods inventory.
    - Purchasing assets that are recorded as non-current assets;
    - Purchasing equipment and vehicles that are recorded as fixed assets or non-current assets whether they are used alone to support project implementation or leased to other parties to provide income for the company;
    - Establish and change the Company's logo;
    - Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
    - Carry out the main business activities as referred to in Article 3 using financing by the Company in advance (turnkey/prefinancing projects) with certain values and criteria determined by the Board of Commissioners;
    - Take actions included in material transactions as stipulated by capital market laws and regulations with a certain value determined by the Board of Commissioners, unless such actions are included in material transactions that are excluded by prevailing capital market laws and regulations;
    - Take actions not stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);

16. Determination of limits and/or criteria by the Board of Commissioners for matters as referred to in points 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.g, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.l and 15.p are stated in the Board of Commissioners Determination Letter.

17. The Board of Commissioners approval specifically regarding points 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.9, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.l and 15.p with limitations and/or certain criteria, determined by the Board of Commissioners after obtaining approval from PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.

18. The Board of Directors' actions referred to in point 15.d, this paragraph as long as it is necessary in order to participate in tenders and / or to carry out projects and / or fulfill requirements and / or implementation of

- Melakukan pembelian peralatan dan kendaraan yang dicatatkan sebagai aset tetap atau aset tidak lancar baik yang digunakan sendiri untuk menunjang pelaksanaan proyek atau disewakan kepada pihak lain untuk memberikan pendapatan bagi perusahaan;
- Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
- Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 menggunakan pembiayaan oleh Perseroan terlebih dahulu (proyek *turnkey/ prefinancing*) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) RKAP;

16. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada point 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.g, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.l dan 15.p dituangkan dalam Surat Penetapan Dewan Komisaris.

17. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan poin 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.9, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.l dan 15.p dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan PT PP (Persero)Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas.

18. Tindakan Direksi sebagaimana yang dimaksud pada poin 15.d, ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/ atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas namun tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

19. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

20. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
    - Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau
    - Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan Pasal 3

main business activities commonly carried out in the business field concerned, do not require the approval of the Board of Commissioners and / or PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder but still pay attention to the provisions of the applicable laws and regulations.

19. Within a maximum period of 30 (thirty) days from the receipt of the complete application or explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners must provide a decision as referred to in paragraph 7 of this Article.

20. The Board of Directors must seek GMS approval to:
    - Transfer the Company's assets; or
    - Pledge the Company's assets as debt collateral; which constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not. Except as an executor of the Company's business activities in accordance with Article 3 of the Articles of Association.

21. The following actions can only be carried out by the Board of Directors after obtaining a written response from the Board of Commissioners and obtaining approval from the GMS for:
    - Perform actions included in material transactions as stipulated by the prevailing Laws and Regulations in the Capital Market with a value above 50% (fifty percent) of the Company's equity, unless such actions are included in material transactions exempted by the prevailing Laws and Regulations in the Capital Market;
    - Conducting transactions containing conflict of interest as stipulated in the prevailing laws and regulations in the Capital Market;
    - Conducting other transactions in order to comply with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
    - if within 30 (thirty) days from the receipt of the application or explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not provide a written response, the GMS may make a decision without a written response from the Board of Commissioners.

22. Legal actions as referred to in points 20 and 21 that are carried out without the approval of the GMS, remain binding on the Company as long as the other party in the legal action is in good faith.

23. The GMS may reduce the restrictions on the actions of the Board of Directors provided for in the Articles of Association or determine other restrictions to the Board of Directors in addition to those provided for in the articles of association.

24. The management policy is determined at the Board of Directors Meeting.

25. In order to carry out the management of the Company, each Member of the Board of Directors is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company in accordance

Anggaran Dasar.

21. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
    - Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dengan nilai atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di Pasar Modal;
    - Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
    - apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan- tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris

22. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 20 dan 21 yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perusahaan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

23. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam anggaran dasar ini.

24. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.

25. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perusahaan, setiap Anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

26. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 25, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

27. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka:
    - Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu Anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas tugas Direktur Utama dar/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;
    - Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis

with the policies and authority of the management of the Company determined by resolution of the Board of Directors.

26. If not stipulated otherwise in the Company's management policy as referred to in point 25, the President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company both inside and outside the Court.

27. In the absence or disability of the President Director for any reason, which need not be proven to a third party, then:
    - The Vice President Director shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director or the President Director shall appoint in writing one of the Members of the Board of Directors who is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director and/or Vice President Director if at the same time the Vice President Director is absent or absent;
    - The Vice President Director shall appoint in writing a Member of the Board of Directors authorized to perform the duties of the Vice President Director, or the Vice President Director shall appoint in writing a Member of the Board of Directors authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to perform the duties of the President Director and/or Vice President Director in the absence or disability of the President Director;
    - If the GMS does not appoint a Vice President Director, then in the absence or disability of the President Director for any reason, which need not be proven to a third party, the President Director shall appoint in writing a Member of the Board of Directors who is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director.

28. In the event that the President Director does not make an appointment, the longest serving member of the Board of Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director.

29. The Board of Directors, for certain acts on its own responsibility, is also entitled to appoint one or more persons as its representative or proxy, by granting to him/her or them the power for such certain acts as stipulated in the power of attorney.

30. The division of duties and authorities of each Member of the Board of Directors shall be determined by the GMS. In the event that the GMS does not stipulate the division of duties and authorities, the division of duties and authorities among the Board of Directors shall be determined by resolution of the Board of Directors.

31. The Board of Directors in managing the Company shall implement the instructions given by the GMS to the extent that they do not conflict with the Laws and Regulations

Anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis Anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;

- Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis Anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

28. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

29. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

30. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

31. Direksi dalam mengurus Perusahaan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan/ atau Anggaran Dasar ini.

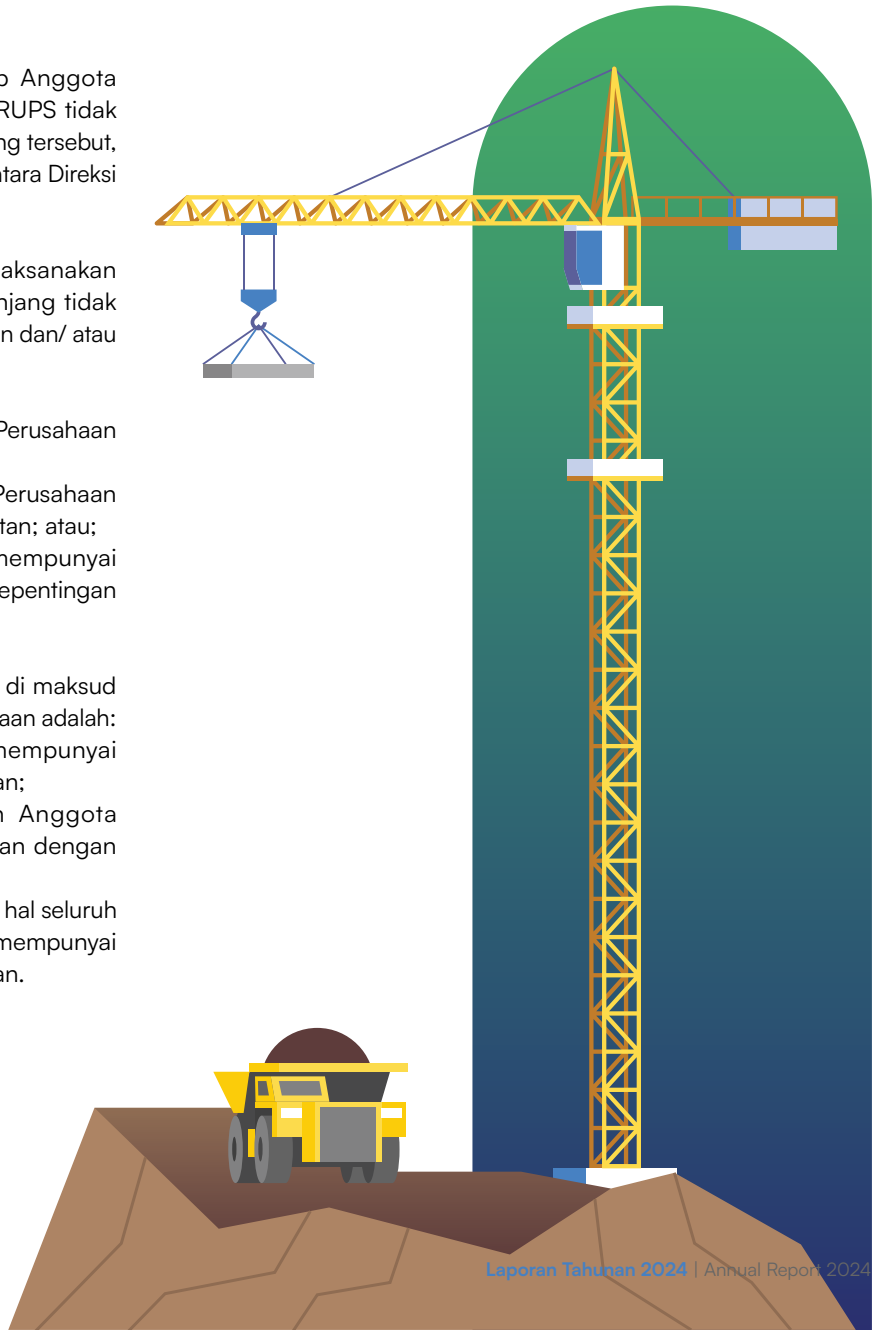
32. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
    - Terdapat perkara di Pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; atau;
    - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

33. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana di maksud dalam poin 37 yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
    - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
    - Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
    - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

and/or these Articles of Association.

32. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
    - There is a case in Court between the Company and the Member of the Board of Directors concerned; or;
    - The member of the Board of Directors concerned has interests that conflict with the interests of the Company.

33. In the event that there are circumstances as referred to in point 37, the person entitled to represent the Company is:
    - Other members of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company;
    - The Board of Commissioners in the event that all Members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
    - Other parties appointed by the GMS in the event that all Members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.



Hak Direksi

Board of Directors' Rights

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi, hak Direksi sebagai berikut.

1. Mendapatkan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2. Mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut;
   - Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS;
   - Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
   - Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS dan baru terbebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan;
   - Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

The independence of the Board of Directors is an essential aspect that must be maintained. This aims to ensure that the Board of Directors always acts in the best interests of the Company. To preserve independence, the Company has established the following provisions:

1. Receive a salary along with other facilities and/or allowances, including bonuses and retirement benefits, the type and amount of which are determined by the GMS, and this authority can be delegated to the Board of Commissioners.

2. Resign from their position before their term of office ends by submitting a written resignation request regarding their intentions to the Company, with the following conditions:
   - The Company is obliged to hold a GMS to decide on requests for resignation of the Board of Directors member no later than 90 days after receiving the resignation letter;
   - The Company is required to disclose the information to the public and submit it to OJK no later than two working days after receiving the Board of Directors resignation request and the GMS results;
   - Before the resignation is effective, the relevant Board of Directors member is still obliged to complete their duties and responsibilities following the Articles of Association and laws and regulations;
   - Resigned Board of Directors Members can still be held accountable as the Board of Directors members from the time of their appointment until the date of their resignation approval at the GMS and will only be free from responsibility after obtaining responsibility release at the Annual GMS;
   - In the event that the Board of Directors members' resignation results in the number of Board of Directors members being less than two people, the resignation is valid if determined by the GMS and new Board of Directors members have been appointed, thereby meeting the minimum requirements for the number of Board of Directors members.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Division of Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Direksi telah mengatur pembagian kerja di antara para anggota sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya, Direksi telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/DIR/PPRE/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembagian Tugas Direksi. Berikut uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi serta realisasinya.

The Board of Directors has regulated the division of duties among its members as determined in the appointment of Board of Directors members by the GMS. Furthermore, the Board of Directors has determined the division of duties and responsibilities of each member following the Decree of the Board of Directors No. 04/SK/DIR/PPRE/I/2023 dated January 2, 2023. The following describes the division of the Board of Directors' duties and responsibilities along with the realization.

Arzan (Direktur Utama)
(President Director)

- Pengelolaan kesekretariatan perusahaan;
- Pengelolaan pengawasan internal perusahaan;
- Pengelolaan kualitas proyek;
- Pengelolaan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja;
- Penyusunan RJPP dan RKAP;
- Pengendalian manajemen rantai pasok;
- Pengendalian operasi dan bisnis;
- Pengendalian manajemen risiko;
- Pengendalian pemasaran perusahaan;
- Pengendalian anak perusahaan melalui *parenting*;
- Pengembangan teknologi pendukung operasional.

- Corporate secretariat management;
- Internal corporate supervision management;
- Project quality management;
- Occupational health, safety, and environmental management;
- Preparation of the Long-Term Plan (RJPP) and Annual Work Plan and Budget (RKAP);
- Supply chain management control;
- Operations and business control;
- Risk management control;
- Corporate marketing control;
- Subsidiary control through parenting;
- Development of operational support technology.

Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
(Director of Finance & HCM)

- Pengelolaan akuntansi dan pajak;
- Pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan sumber daya manusia;
- Pengelolaan manajemen risiko;
- Pengelolaan legal;
- Penyusunan RJPP dan RKAP;
- Pengelolaan manajemen rantai pasok;
- Pengendalian pemasaran Perusahaan.
- Pengendalian Operasi dan Bisnis;
- Pengendalian Anak Perusahaan melalui parenting; dan
- Pengembangan teknologi pendukung operasional.

- Accounting and tax management;
- Financial management;
- Human resource management;
- Risk management;
- Legal management;
- Preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP);
- Supply chain management;
- Corporate marketing control;
- Operations and business control;
- Subsidiary control through parenting; and
- Development of operational support technology.

Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
(Director of Operations)

- Pengelolaan operasional proyek Civil work;
- Pengelolaan operasional proyek Mining;
- Pengelolaan kinerja operasional;
- Pengelolaan teknik dan tender;
- Pengelolaan bisnis dan aset Perusahaan;
- Penyusunan RJPP dan RKAP;
- Pengelolaan manajemen rantai pasok;
- Pengendalian Operasi dan Bisnis;
- Pengendalian manajemen risiko
- Pengendalian pemasaran perusahaan
- Pengendalian Anak Perusahaan melalui parenting; dan
- Pengembangan teknologi pendukung operasional.

- Management of civil work project operations;
- Management of mining project operations;
- Management of operational performance;
- Management of engineering and tenders;
- Management of the Company's business and assets;
- Preparation of the Long-Term Plan (RJPP) and Annual Work Plan and Budget (RKAP);
- Supply chain management;
- Operations and business control;
- Risk management control;
- Corporate marketing control;
- Subsidiary control through parenting; and
- Development of operational support technology.

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Onboarding Program for New Board of Directors Members

Perusahaan senantiasa memberikan program orientasi kepada semua anggota Dewan Komisaris yang baru dengan memberikan pemahaman mengenai peran, tugas dan tanggung jawab mereka, dan kepatuhan terhadap praktik dan kebijakan tata kelola perusahaan. Tanggung jawab pengadaan program tersebut berada pada Biro *Corporate Secretary* atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Biro *Corporate Secretary.* Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lain yang sesuai dengan kebutuhan. Program pengenalan ini dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direksi baru. Adapun metode pengenalan Perusahaan tersebut dapat berupa:

The Company organizes an onboarding program for new Board of Directors members by providing knowledge about their roles, duties and responsibilities, and compliance with corporate governance practices and policies. The responsibility for holding the program lies with the Corporate Secretary Bureau or anybody performing the Corporate Secretary Bureau's function. The Company's onboarding programs can include presentations, meetings, visits to the Company and document reviews, or other programs as needed. The onboarding program is held for a maximum of one month after the appointment of new Board of Directors members. The onboarding method can be in the form of:

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles Implementation	**Gambaran umum Perusahaan** The Company's Overview	**Visi dan Misi Perusahaan** Corporate Vision and Mission	**Budaya Perusahaan** Corporate Culture
Struktur Organisasi dan Job Description (President Commissioner and Independent Commissioner)	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors	Rencana Jangka Panjang Perusahaan The Company's Long-Term Plan (RJPP)	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan The Company's Budget and Work Plan (RKAP
Audit Internal dan Audit Eksternal Internal and External Audit	Komite Audit Audit Committee	Komite Kepatuhan Compliance Committee	Sistem-Sistem yang Berlaku di Perusahaan Applicable Systems in the Company

Di tahun 2024 terdapat pengangkatan Arzan sebagai Direktur Utama yang baru. Pelaksanaan program orientasi dan pengenalan Perusahaan kepada beliau dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 yang dilaksanakan di Wisma Robinson Lt.1 dan dihadiri oleh Komisaris Utama Bapak Nur Rochmad, Komisaris Bapak Muhammad Zahid, Komisaris Bapak Albert Simangunsong, Direktur Utama Bapak Arzan, Direktur Keuangan & HCM Bapak M. Arif Iswahyudi, Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi Bapak Rebimun.

In 2024, Arzan was appointed as the new President Director. The orientation and company introduction program for him was held on July 24, 2024, at Wisma Robinson, 1st floor, and was attended by the President Commissioner Mr. Nur Rochmad, Commissioner Mr. Muhammad Zahid, Commissioner Mr. Albert Simangunsong, President Director Mr. Arzan, Director of Finance & HCM Mr. M. Arif Iswahyudi, and Director of Business Management & Operations Mr. Rebimun.



Informasi tentang Keberadaan Komite Pendukung Direksi

Information on Supporting Committee of the Board of Directors

Hingga akhir tahun 2024 Direksi tidak membentuk komite di bawah Direksi.

As of the end of 2024, the Board of Directors did not established any committees under the Board of Directors.

Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

Information Transparency on the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on the Board of Commissioners and Board of Directors' Composition Diversity

Dalam menentukan Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan memiliki kebijakan formal dalam bentuk tertulis terkait kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam *Board Manual*, di mana *Board Manual* PP Presisi menyebutkan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan harus sedemikian rupa disesuaikan dengan besarnya kegiatan kompleksitas bisnis Perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.

In determining the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company has a written formal policy regarding the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition, which is regulated in the Board Manual, where PP Presisi Board Manual states that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors must be adjusted to the Company's immense complexity of activities and organizational structure to enable effective, precise, and fast decision-making, to achieve the Company's goals.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Nur Rochmad
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	: :	Indonesia Indonesia
Usia Age	: :	65 65
Gender Gender	: :	Pria Male
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	: :	Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Sarjana Hukum Doctor of Laws, Master of Laws and Bachelor of Laws
Keahlian Skill	: :	• Ilmu Hukum • Teknik Stratejik • Risiko Bisnis • *Legal & Compliance* • SDM/*Human Capital* • Sistem *Management & Safety* • Legal Science • Strategic Engineering • Business Risk • Legal & Compliance • HR/Human Capital • Management & Safety Systems

Albert Simangunsong
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	: :	Indonesia Indonesia
Usia Age	: :	51 51
Gender Gender	: :	Pria Male
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	: :	Magister Ilmu Sosial dan Politik dan Sarjana Teknik Sipil Master of Social and Political Sciences and Bachelor of Civil Engineering
Keahlian Skill	:	• *Engineering & Maintenance* • Bisnis/Niaga/ Pemasaran • Jasa Keuangan • SDM/*Human Capital* • Engineering & Maintenance • Business/Commerce/Marketing • Financial Services • HR/Human Capital

Muhammad Zahid
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	: :	Indonesia Indonesia
Usia Age	: :	54 54
Gender Gender	: :	Pria Male
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	: :	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics
Keahlian Skill	:	• Ilmu Ekonomi • *Finance and Accounting* • Infrastruktur Risiko Bisnis • Sistem *Management & Safety* • Economics • Finance and Accounting • Business Risk Infrastructure • Management & Safety Systems



Direksi
Board of Directors

Arzan
Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan Nationality	: :	Indonesia Indonesia
Usia Age	: :	51 51
Gender Gender	: :	Pria Male
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	: :	Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering
Keahlian Skill	:	• SDM/*Human Capital* • *Engineering & Maintenance* • Digitalisasi & IT • Operasi/Produksi/Proyek • Leadership
	:	• HR/Human Capital • Engineering & Maintenance • Digitalization & IT • Operations/Production/Projects • Leadership

Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Keuangan & HCM
Director of Finance & HCM

Kewarganegaraan Nationality	: :	Indonesia Indonesia
Usia Age	: :	42 42
Gender Gender	: :	Pria Male
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	: :	Magister Investasi dan Keuangan dan Sarjana Ekonomi Akuntansi Master of Investment and Finance and Bachelor of Economics in Accounting
Keahlian Skill	:	• Keuangan • Pengembangan Usaha/R&D • SDM/*Human Capital* • Bisnis/Niaga/ Pemasaran
	:	• Finance • Business Development/R&D • HR/Human Capital • Business/Commerce/Marketing

Rebimun
Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
Director of Business Management & Operations

Kewarganegaraan Nationality	: :	Indonesia Indonesia
Usia Age	: :	49 49
Gender Gender	: :	Pria Male
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	: :	Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering
Keahlian Skill	: :	• Risiko Bisnis • Sistem *Management & Safety* • Logistik/*Supply Chain*/*Asset*/GA • Operasi/Produksi/ Proyek
		• Business Risk • Management & Safety System • Logistics/Supply Chain/Asset/GA • Operation/Production/Project

Lebih lengkap tentang profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More details about the profiles of each Board of Commissioners and Board of Directors are available in the Company Profile section of this Annual Report.

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, dan Entitas Pemilik Akhir

Affiliation between Board of Commissioners, Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, and Ultimate Owner Entity

Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama/ Pengendali, dan/atau entitas pemilik akhir. Transparansi hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi, baik di bidang keuangan maupun keluarga, disampaikan melalui tabel di bawah.

The incumbent Board of Commissioners and Board of Directors have no financial affiliation, management affiliation, share ownership and/or family affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Major/ Controlling Shareholders, and/or the ultimate owner entity. The transparency of the affiliations of the Board of Commissioners and Directors, both financial and family, is presented in the table below.

Nama dan Jabatan Name and Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama / Pengendali** PT PP (Persero) Tbk as the Major / Controlling Shareholder	**Negara Republik Indonesia sebagai Entitas Pemilik Akhir** Republic of Indonesia as the Ultimate Owner Entity
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen) (President Commissioner/ Independent Commissioner)	❌	❌	❌	❌
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	❌	❌	❌	❌
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	❌	❌	✅	❌
Direksi Board of Directors				
Arzan (Direktur Utama) (President Director)	❌	❌	❌	❌
Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	❌	❌	❌	❌
Mohammad Arif Iswayudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	❌	❌	❌	❌

✅ Ada
❌ Tidak Ada

✅ Affiliated
❌ Not Affiliated

Nama dan Jabatan Name and Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with				
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama / Pengendali** PT PP (Persero) Tbk as the Major / Controlling Shareholder	**Negara Republik Indonesia sebagai Entitas Pemilik Akhir** Republic of Indonesia as the Ultimate Owner Entity	**Hubungan Kepengurusan** Management Relations
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen) (President Commissioner/ Independent Commissioner)	❌	❌	❌	❌	❌
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	❌	❌	❌	❌	❌
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	❌	❌	❌	❌	❌
Direksi Board of Directors					
Arzan (Direktur Utama) (President Director)	❌	❌	❌	❌	❌
Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	❌	❌	❌	❌	❌
Mohammad Arif Iswayudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	❌	❌	❌	❌	❌

✅ Ada | ❌ Tidak Ada ✅ Affiliated | ❌ Not Affiliated

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman GCG, di mana Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat internal paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Sementara, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui teleconference dengan tetap memperhatikan persyaratan keabsahan pengambilan keputusan.

The Board of Commissioners' meeting organization refers to the GCG Code, where the Board of Commissioners must hold an internal meeting at least once every two months and held if attended by a majority of all Board of Commissioners members. Meanwhile, joint meetings with the Board of Directors are held at least once every four months. Meetings can be held in person or via teleconference while still considering the requirements for the decision-making validity.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menyelenggarakan 8 (Delapan) kali rapat internal dengan frekuensi kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 8 (eight) internal meetings, with the attendance frequency of each Board of Commissioners member available in the following table:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2024

Board of Commissioners' Attendance Recapitulation on Internal Board of Commissioners Meetings in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Jumlah Wajib Rapat** Number of Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen) (President Commissioner/ Independent Commissioner)	8	8	100,00
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)* (Independent Commissioner)*	3	3	100,00
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	8	8	100,00
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	8	8	100,00
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			100,00

*) Indra Jaya Rajagukguk tidak lagi menjabat sejak 5 Juni 2024.

*) Indra Jaya Rajagukguk no longer served since June 5, 2024.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners and Attendance of the Board of Commissioners

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #01

INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #01

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:

24 Januari 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson lt.

AGENDA RAPAT:

1. Kinerja Perusahaan sd Triwulan IV 2023;
2. Update aksi Korporasi dan Permasalahan Hukum PT PP Presisi Tbk sd Triwulan IV 2023;
3. KPI Perusahaan;
4. KPI Individu Dekom Tahun 2023;
5. Progress Tindak Lanjut AOI Penerapan GCG 2022: Aspek Dekom 1

PESERTA RAPAT:

Seluruh Dewan Komisaris dan Komite

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:

Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:

January 24, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st floor

MEETING AGENDA:

1. Company Performance until Quarter IV 2023;
2. Update on Corporate Actions and Legal Issues of PT PP Presisi Tbk until Quarter IV 2023;
3. Company KPI;
4. Individual KPI of BOC in 2023;
5. Progress of Follow-up to AOI Implementation of GCG 2022: BOC Aspect

MEETING PARTICIPANTS:

All Board of Commissioners and Committees

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:

None.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #02

INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #02

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:

26 Maret 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson lt. 1

AGENDA RAPAT:

1. Kinerja Perusahaan sd Maret 2024;
2. Kebijakan Manajemen Resiko;
3. KPI Korporasi Audited Tahun 2024;
4. Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk;

Update aksi Korporasi dan Permasalahan Hukum PT PP Presisi Tbk sd Maret 2024.

PESERTA RAPAT:

Seluruh Dewan Komisaris, Sekretaris Komisaris dan Komite

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:

Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:

March 26, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st floor

MEETING AGENDA:

1. Company performance until March 2024;
2. Risk Management Policy;
3. Audited Corporate KPIs for 2024;
4. Subsidiaries of PT PP Presisi Tbk;

Update on Corporate actions and Legal Issues of PT PP Presisi Tbk until March 2024.

MEETING PARTICIPANTS:

All Board of Commissioners, Secretary of Commissioners and Committees

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:

None.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #03

INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #03

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:

4 Juli 2024; Online by Zoom Meeting

AGENDA RAPAT:

Pembahasan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk.

MEETING DATE AND VENUE:

July 4, 2024; Online by Zoom Meeting

MEETING AGENDA:

Discussion of the Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk..

PESERTA RAPAT:
Seluruh Dewan Komisaris, Sekretaris Komisaris, Abdullah Sigit, Mubari dan Bari Srisoenami.

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING PARTICIPANTS:
All Board of Commissioners, Secretary of Commissioner, Abdullah Sigit, Mubari and Bari Srisoenami.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #04
INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #04

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
22 April 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson lt. 1

AGENDA RAPAT:
1. Kinerja Perusahaan sd Triwulan I 2024;
2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan 2023;
3. Manajemen Resiko PT PP Presisi Tbk sd Triwulan I 2024;
4. KPI Manajemen PT PP Presisi Tbk;
5. Update aksi Korporasi dan Permasalahan Hukum PT PP Presisi Tbk sd Triwulan I 2024;
6. Hal — Hal Lain.

PESERTA RAPAT:
Seluruh Dewan Komisaris, Sekretaris Komisaris, Abdullah Sigit, Tri Saripalupi Andayani dan Mubari

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:
April 22, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st floor

MEETING AGENDA:
1. Company Performance until Quarter I 2024;
2. Recommendations and Follow-up on Audit Results of Financial Report 2023;
3. Risk Management of PT PP Presisi Tbk until Quarter I 2024;
4. KPI of PT PP Presisi Tbk Management;
5. Update on Corporate Actions and Legal Issues of PT PP Presisi Tbk until Quarter I 2024;
6. Other Matters.

MEETING PARTICIPANTS:
All Board of Commissioners, Secretary of Commissioner, Abdullah Sigit, Tri Saripalupi Andayani and Mubari.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #05
INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #05

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
23 Juli 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson lt. 1

AGENDA RAPAT:
1. Kinerja Perseroan sd Triwulan II 2024;
2. Kebijakan Mutu;
3. Manajemen Resiko PT PP Presisi Tbk sd Triwulan II 2024;
4. Kebijakan SDM;
5. Update aksi Korporasi dan Permasalahan Hukum PT PP Presisi Tbk sd Triwulan II 2024;
6. Hal — Hal Lain.

PESERTA RAPAT:
Seluruh Dewan Komisaris, Sekretaris Komisaris, Abdullah Sigit, Tri Saripalupi Andayani dan Bari Srisoenami.

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:
July 23, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st floor

MEETING AGENDA:
1. Company Performance until Quarter II 2024;
2. Quality Policy;
3. Risk Management of PT PP Presisi Tbk until Quarter II 2024;
4. HR Policy;
5. Update on Corporate Actions and Legal Issues of PT PP Presisi Tbk until Quarter II 2024;
6. Other Matters.

MEETING PARTICIPANTS:
All Board of Commissioners, Secretary of Commissioner, Abdullah Sigit, Tri Saripalupi Andayani and Bari Srisoenami.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #06
INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #06

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
23 Juli 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson lt. 1

AGENDA RAPAT:
Kinerja Manajemen Resiko TW II 2024.

PESERTA RAPAT:
Seluruh Dewan Komisaris, Sekretaris Komisaris, Komite dan Tim Manajemen Resiko.

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:
July 23, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st floor

MEETING AGENDA:
Risk Management Performance Q2 2024.

MEETING PARTICIPANTS:
All Board of Commissioners, Secretary of Commissioner, Committee and Risk Management Team.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #07
INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #07

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
25 Oktober 2024; Plaza PP lt. 3

AGENDA RAPAT:
1. Kinerja Perseroan sd Triwulan II 2024;
2. RKAP dan KPI Individu Dewan Komisaris Tahun 2025;
3. Manajemen Resiko PT PP Presisi Tbk sd Triwulan III 2024;
4. Update aksi Korporasi dan Permasalahan Hukum PT PP Presisi Tbk sd Triwulan III 2024;
5. Hal — Hal Lain.

PESERTA RAPAT:
Seluruh Dewan Komisaris, Sekretaris Komisaris dan Komite

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:
October 25, 2024; Plaza PP 3rd floor

MEETING AGENDA:
1. Company Performance until Quarter II 2024;
2. RKAP and Individual KPI of the Board of Commissioners in 2025;
3. Risk Management of PT PP Presisi Tbk until Quarter III 2024;
4. Update on Corporate Actions and Legal Issues of PT PP Presisi Tbk until Quarter III 2024;
5. Other Matters.

MEETING PARTICIPANTS:
All Board of Commissioners, Secretary of Commissioner and Committee

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #08
INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS #08

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
25 Oktober 2024; Plaza PP lt. 3

AGENDA RAPAT:
Kinerja Manajemen Risiko TW III 2024.

PESERTA RAPAT:
Seluruh Dewan Komisaris, Sekretaris Komisaris, Komite dan Tim Manajemen Resiko.

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:
October 25, 2024; Plaza PP 3rd floor

MEETING AGENDA:
Risk Management Performance Q3 2024.

MEETING PARTICIPANTS:
All Board of Commissioners, Secretary of Commissioner, Committee and Risk Management Team.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk melakukan pembahasan mengenai agenda-agenda yang lebih spesifik.

In addition, the Board of Commissioners is also required to hold joint meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months to discuss more specific agendas.

Sepanjang 2024, Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk mengadakan rapat gabungan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan tersebut disajikan sebagai berikut.

Throughout 2024, the Board of Commissioners invited the Board of Directors to hold joint meetings as many as 10 (ten) times with the attendance rate of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the joint meetings presented as follows.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris Mengundang Direksi Tahun 2024

Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jumlah Wajib Rapat** Number of Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Nur Rochmad (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) (President Commissioner/Independent Commissioner)	10	10	100,00
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)** (Independent Commissioner)**	5	5	100,00
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	10	10	100,00
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	10	9	90,00
Direksi Board of Directors			
Arzan (Direktur Utama) ** (President Director) **	5	5	100,00
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)* (President Director)*	6	6	100,00
Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	10	10	100,00

Mohammad Arif Iswayudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	10	10	100,00
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)** (Director of Business Planning and HCM)**	5	4	90,00
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			97,77

*) I Gede Upeksa Negara tidak lagi menjabat sejak 25 April 2024.
**) Arzan diangkat sejak 5 Juni 2024. Pada tanggal yang sama, Indra Jaya Rajagukguk dan Yudi Setiawan tidak lagi menjabat.

*) I Gede Upeksa Negara no longer served since April 25, 2024.
**) Arzan was appointed since June 5, 2024. On the same date, Indra Jaya Rajagukguk and Yudi Setiawan no longer served.

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Minutes of Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors and Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #01
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #01

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
24 Januari 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Masih Dinyatakan Belum Selesai (Closed);
2. Evaluasi Kinerja Tahun 2023;
3. Hambatan Pelaksanaan Program Kerja Peneroan Tahun 2023&Strategi 2024 serta progress pelaksanaan Tindak Lanjut Timeline Program Keria 2023;
4. Laporan Keuangan Intern 2023 & Pencapaian KPI Perseroan;
5. Progress Pelaksanaan Audit KAP Tahun 2023;
6. Evaluasi Penerapan Kebijakan Mutu (QHSE), Pelayanan, Sistem Teknologi Informasi, Pengadaan dan Pengelolaan SDM (kendala di tahun 2023 dan rencana perbaikan di tahun 2024);
7. Update Progress Pelaksanaan Assessment Maturitas Tahun 2023 dan Persiapan Assessment Mahrritas Tahun 2024; dan

Hal-hal lain yang memedukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
5. I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
6. Rebimun (Direktur Operasi)
7. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, ManRisk & Legal)
8. Mubari (Komite Audit)

MEETING DATE AND VENUE:
January 24, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
1. Evaluation of the Minutes of the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors that are still considered incomplete (Closed);
2. Evaluation of 2023 Performance;
3. Obstacles in the Implementation of the 2023 Work Program & 2024 Strategy, as well as progress on the Follow-up of 2023 Work Program Timeline;
4. 2023 Internal Financial Report & the Company's KPI Achievement;
5. Progress on the Implementation of the 2023 Public Accounting Firm (KAP) Audit;
6. Evaluation of the Implementation of Quality Policies (QHSE), Services, Information Technology Systems, Procurement, and Human Resource Management (challenges in 2023 and improvement plans for 2024);
7. Update on the Progress of the 2023 Maturity Assessment Implementation and Preparation for the 2024 Maturity Assessment; and
8. Other matters requiring decisions and directives from the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk.

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
5. I Gede Upeksa Negara (President Director)

9. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
10. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
11. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
12. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
13. Woro Endah Waraswati (Sekertaris Dewan Komisaris)
14. Ridho Akbar (Tim Corporate Secretary)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Yudi Setiawan (Direktur Pengembangan Bisnis & HCM), dikarenakan sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Proyek.

6. Rebimun (Director of Operations)
7. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance, ManRisk & Legal)
8. Mubari (Audit Committee)
9. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
10. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
11. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
12. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
13. Woro Endah Waraswati (Secretary of the Board of Commissioners)
14. Ridho Akbar (Corporate Secretary Team)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Yudi Setiawan (Director of Business Development & HCM), due to being on a business trip to the Project Site.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #02
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #02

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
26 Maret 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:
Sosialisasi Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
5. I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
6. Rebimun (Direktur Operasi)
7. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, ManRisk & Legal)
8. Mubari (Komite Audit)
9. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
10. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
11. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
12. Debie Novalia
13. Reinhart Parhorasan (Mgr Busdev)
14. Fauzi

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:
March 26, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
Socialization of the Implementation of SMAP (Anti-Bribery Management System) ISO 37001

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
5. I Gede Upeksa Negara (President Director)
6. Rebimun (Director of Operations)
7. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance, ManRisk & Legal)
8. Mubari (Audit Committee)
9. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
10. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
11. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
12. Debie Novalia
13. Reinhart Parhorasan (Mgr Busdev)
14. Fauzi

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #03
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #03

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
26 Maret 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Masih Dinyatakan Belum Selesai (Closed)
2. Evaluasi Kinerja sd Febuan 2024
3. Laporan Keuangan Audited Tahun 2023:

MEETING DATE AND VENUE:
March 26, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
1. Evaluation of the Minutes of the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors that are still considered incomplete (Closed);
2. Performance Evaluation until February 2024

- Laporan Laba Rugi Audited (dibandingkan Laporan Interim)
- Neraca Audited dan Rasio;
- KPI Korporat 2023Audited; dan
- Temuan Auditor

4. Progress Penyusunan Annual Report Tahun 2023
5. Persiapan RUPS Tahun Buku 2024
6. Kebijakan Manajemen Risiko
7. Progress Hasil Konsultasi Perseroan dengan Pemegang Saham Mayoritas Terkait PT PSA
8. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk

PESERTA RAPAT:

1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
5. I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
6. Rebimun (Direktur Operasi)
7. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, ManRisk & Legal)
8. Yudi Setiawan (Direktur Pengembangan Bisnis & HCM)
9. Mubari (Komite Audit)
10. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
11. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
12. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
13. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
14. Woro Endah Waraswati (Sekertaris Dewan Komisaris)
15. M. Ridho Akbar (Tim Corporate Secretary)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:

Tidak Ada.

3. Audited Financial Report for 2023:
   - Audited Profit and Loss Statement (compared to Interim Report)
   - Audited Balance Sheet and Ratio;
   - Audited Corporate KPI 2023; and
   - Auditor Findings
4. Progress of Preparation of the Annual Report for 2023
5. Preparation of the GMS for Fiscal Year 2024
6. Risk Management Policy
7. Progress of the Company's Consultation Results with Majority Shareholders Regarding PT PSA
8. Other matters requiring decisions and direction from the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk

MEETING PARTICIPANTS:

1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
5. I Gede Upeksa Negara (President Director)
6. Rebimun (Director of Operations)
7. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance, ManRisk & Legal)
8. Yudi Setiawan (Director of Business Development & HCM)
9. Mubari (Audit Committee)
10. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
11. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
12. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
13. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
14. Woro Endah Waraswati (Secretary of the Board of Commissioners)
15. M. Ridho Akbar (Team Corporate Secretary)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:

None.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #04

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #04

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:

23 April 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:

1. Manajemen Risiko Tahun 2024
2. Perubahan Manajemen Risiko Tahun 2024
3. Resume - Corporate Risk 2024 sd Triwulan I 2024
4. Update Corporate Risk sd Triwulan I Tahun 2024

PESERTA RAPAT:

1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
5. I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
6. Rebimun (Direktur Operasi)
7. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, ManRisk & Legal)
8. Yudi Setiawan (Direktur Pengembangan Bisnis & HCM)
9. Mubari (Komite Audit)
10. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
11. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)

MEETING DATE AND VENUE:

April 23, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:

1. Risk Management 2024
2. Changes in Risk Management 2024
3. Resume - Corporate Risk 2024 until Quarter I 2024
4. Corporate Risk Update until Quarter I 2024

MEETING PARTICIPANTS:

1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
5. I Gede Upeksa Negara (President Director)
6. Rebimun (Director of Operations)
7. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance, ManRisk & Legal)
8. Yudi Setiawan (Director of Business Development & HCM)
9. Mubari (Audit Committee)
10. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)

12. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
13. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
14. Mei Elsa Kembaren (Dept. Risk Manajement)
15. Ayu Noviana Isman (Dept. Risk Manajement)
16. Nathanael Parasian (Dept. Risk Manajement)
17. Nila Yunike (Dept. Risk Manajement)
18. Woro Endah Waraswati (Sekertaris Dewan Komisaris)
19. Ridho Akbar (Tim Corporate Secretary)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

11. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
12. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
13. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
14. Mei Elsa Kembaren (Dept. Risk Management)
15. Ayu Noviana Isman (Dept. Risk Management)
16. Nathanael Parasian ((Dept. Risk Management)
17. Nila Yunike (Dept. Risk Management)
18. Woro Endah Waraswati (Secretary of the Board of Commissioners)
19. Ridho Akbar (Corporate Secretary Team)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #05
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #05

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
23 April 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Masih Dinyatakan Belum Selesai (Closed)
2. Evaluasi Kinerja sd Triwulan I 2024
3. Perkembangan Kinerja LMA (Executive Summary)
4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2023
5. Himbauan Revisi Buku RKAP Tahun Buku 2024 (Jika diperlukan)
6. KPI Manajemen PT PP Presisi Tbk
7. Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan
8. Kebijakan Sistem Teknologi Informasi, Pengadaan dan Pengelolaan SDM
9. Update Permasalahan Legal PT PP Presisi Tbk
10. Update Progress Aksi Korporasi Yang Telah Disetujui Dewan Komisaris
11. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
5. I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
6. Rebimun (Direktur Operasi)
7. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, ManRisk & Legal)
8. Yudi Setiawan (Direktur Pengembangan Bisnis & HCM)
9. Mubari (Komite Audit)
10. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
11. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
12. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
13. Woro Endah Waraswati (Sekertaris Dewan Komisaris)
14. Ridho Akbar (Tim Corporate Secretary)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak Ada.

MEETING DATE AND VENUE:
April 23, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
1. Evaluation of the Minutes of the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Directors that are still considered incomplete (Closed);
2. Performance Evaluation until Quarter I 2024
3. Development of LMA (Executive Summary) Performance
4. Recommendations and Follow-up on the Results of the Audit of the Financial Report for 2023
5. Appeal for Revision of the RKAP Book for Fiscal Year 2024 (If necessary)
6. KPI of PT PP Presisi Tbk Management
7. Quality Policy (QHSE) and Service
8. Information Technology System Policy, Procurement and HR Management
9. Update on Legal Issues of PT PP Presisi Tbk
10. Update on Progress of Corporate Actions Approved by the Board of Commissioners
11. Other matters requiring decisions and direction from the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
5. I Gede Upeksa Negara (President Director)
6. Rebimun (Director of Operations)
7. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance, ManRisk & Legal)
8. Yudi Setiawan (Director of Business Development & HCM)
9. Mubari (Audit Committee)
10. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
11. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
12. Dyah Novian Tri Hadini (Corporate Secretary)
13. Woro Endah Waraswati (Secretary of the Board of Commissioners)
14. Ridho Akbar (Corporate Secretary Team)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #06
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #06

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
24 Juli 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:
Perkenalan Anggota Direksi Baru :
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
2. Visi dan Misi Perusahaan
3. Budaya Perusahaan
4. Gambaran Umum Perseroan
5. Struktur Organisasi dan Job Description
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan
7. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)
8. Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP)
9. Kebijakan Pengelolaan dan Penerapan Manajemen Risiko
10. Audit Internal dan Audit Eksternal
11. Komite Audit dan Komite Kepatuhan
12. Sistem-Sistem yang berlaku di Perusahaan

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Arzan (Direktur Utama)
5. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
6. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
9. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
10. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
11. Mei Elsa Kembaren (Corporate Secretary)
12. Woro Endah Waraswati (Sekertaris Dewan Komisaris)
13. Ridho Akbar (Tim Corporate Secretary)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen), karena sudah tidak menjabat sebagai komisaris independen

MEETING DATE AND VENUE:
July 24, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
Introduction of New Board of Directors Members:
1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles
2. Company Vision and Mission
3. Company Culture
4. Company Overview
5. Organizational Structure and Job Description
6. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors and things that are not permitted
7. Company Long-Term Plan (RJPP)
8. Company Work Budget Plan (RKAP)
9. Risk Management Policy and Implementation
10. Internal Audit and External Audit
11. Audit Committee and Compliance Committee
12. Systems applicable in the Company

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Arzan (President Director)
5. Rebimun (Business Management & Operations Director)
6. M. Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
9. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
10. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
11. Mei Elsa Kembaren (Corporate Secretary)
12. Woro Endah Waraswati (Secretary of the Board of Commissioners)
13. Ridho Akbar (Corporate Secretary Team)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Indra Jaya Rajagukguk (independent commissioner), because no longer serving as an independent commissioner

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #07
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #07

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
24 Juli 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Masih Dinyatakan Belum Selesai (Closed)
2. Evaluasi Kinerja sd Triwulan II 2024
3. Perkembangan Kinerja LMA (Executive Summary)
4. Progress dan Hamabatan Pelaksanaan Program Kerja Perseroan Semester I tahun 2024
5. Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan
6. Kebijakan Sistem Teknologi Informasi, Pengadaan dan

MEETING DATE AND VENUE:
July 24, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
1. Evaluation of the Minutes of the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Directors that are still considered incomplete (Closed);
2. Performance Evaluation until Quarter II 2024
3. Development of LMA (Executive Summary) Performance
4. Progress and Obstacles in the Implementation of the Company's Work Program for Semester I of 2024
5. Quality Policy (QHSE) and Service

Pengelolaan SDM
7. Update Permasalahan Legal PT PP Presisi Tbk
8. Update Progress Aksi Korporasi Yang Telah Disetujui Dewan Komisaris
9. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Arzan (Direktur Utama)
5. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
6. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
9. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
10. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
11. Mei Elsa Kembaren (Corporate Secretary)
12. Woro Endah Waraswati (Sekertaris Dewan Komisaris)
13. Ridho Akbar (Tim Corporate Secretary)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

6. Information Technology System Policy, Procurement and HR Management
7. Update on Legal Issues of PT PP Presisi Tbk
8. Update on Progress of Corporate Actions Approved by the Board of Commissioners
9. Other matters requiring decisions and direction from the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Arzan (President Director)
5. Rebimun (Business Management & Operations Director)
6. M. Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
9. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
10. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
11. Mei Elsa Kembaren (Corporate Secretary)
12. Woro Endah Waraswati (Secretary of the Board of Commissioners)
13. Ridho Akbar (Corporate Secretary Team)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #08
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #08

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
29 Oktober 2024; Ruang Rapat Senyiur - Balikpapan

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Masih Dinyatakan Belum Selesai (Closed)
2. Evaluasi Kinerja sd Triwulan III 2024
3. Perkembangan Kinerja LMA (Executive Summary)
4. Pembahasan Persiapan Penyusunan RKAP tahun 2025 & RJPP
5. Persiapan Evaluasi SPIP Tahun 2024
6. Progress Pelaksanaan Rekomendasi Audit Laporan Keuangan tahun 2023 dan Audit Intern SPI
7. Update Audit KAP Tahun 2024
8. Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan
9. Kebijakan Sistem Teknologi Informasi, Pengadaan dan Pengelolaan SDM
10. Update Permasalahan Legal PT PP Presisi Tbk
11. Update Progress Aksi Korporasi Yang Telah Disetujui Dewan Komisaris
12. Laporan Dinas Direksi
13. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Albert Simangunsong (Komisaris)
3. Arzan (Direktur Utama)
4. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)

MEETING DATE AND VENUE:
October 29, 2024; Senyiur Meeting Room - Balikpapan

MEETING AGENDA:
1. Evaluation of the Minutes of the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Directors that are still considered incomplete (Closed)
2. Performance Evaluation until Quarter III 2024
3. Development of LMA (Executive Summary) Performance
4. Discussion on Preparation of RKAP 2025 & RJPP
5. Preparation of SPIP Evaluation 2024
6. Progress of Implementation of Recommendations for Audit of Financial Report 2023 and SPI Internal Audit
7. Update of KAP Audit 2024
8. Quality Policy (QHSE) and Service
9. Information Technology System Policy, Procurement and HR Management
10. Update on Legal Issues of PT PP Presisi Tbk
11. Update on Progress of Corporate Actions Approved by the Board of Commissioners
12. Board of Directors' Service Report
13. Other matters requiring decisions and direction from the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Albert Simangunsong (Commissioner)
3. Arzan (President Director)

5. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
6. Ali Firdaus (Managing Director)
7. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
8. Mubari (Komite Audit)
9. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
10. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
11. Mei Elsa Kembaren (Corporate Secretary)
12. Woro Endah Waraswati (Sekertaris Dewan Komisaris)
13. Ridho Akbar (Tim Corporate Secretary)
14. Pepyka Agitha (Sekretaris Direksi)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Muhammad Zahid (Komisaris), karena berbenturan dengan Agenda lainnya.

4. Rebimun (Director of Business Management & Operations)
5. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance & HCM)
6. Ali Firdaus (Managing Director)
7. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
8. Mubari (Audit Committee)
9. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
10. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
11. Mei Elsa Kembaren (Corporate Secretary)
12. Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
13. Ridho Akbar (Corporate Secretary Team)
14. Pepyka Agitha (Secretary to the Board of Directors)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Muhammad Zahid (Commissioner), due to a scheduling conflict with another agenda.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #09
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #09

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
13 November 2024; Online by Zoom

AGENDA RAPAT:
Sosialisasi Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001PESERTA RAPAT:

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)
3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Arzan (Direktur Utama)
5. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
6. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Mubari (Komite Audit)
9. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
10. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
11. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
12. Wismo Suwego
13. Azzah Auliyah (Tim AI)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
November 13, 2024; Online by Zoom

MEETING AGENDA:
Socialization of the Implementation of SMAP (Anti-Bribery Management System) ISO 37001

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)
3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Arzan (President Director)
5. Rebimun (Director of Business Management & Operations)
6. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance & HCM)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Mubari (Audit Committee)
9. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
10. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
11. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
12. Wismo Suwego
13. Azzah Auliyah (AI Team)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #09
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS #09

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
13 November 2024; Online by Zoom

AGENDA RAPAT:
Pengesahan RKAP 2025

PESERTA RAPAT:
1. Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Muhammad Zahid (Komisaris)

MEETING DATE AND VENUE:
November 13, 2024; Online by Zoom

MEETING AGENDA:
Approval of the 2025 RKAP

MEETING PARTICIPANTS:
1. Nur Rochmad (President Commissioner/Independent Commissioner)
2. Muhammad Zahid (Commissioner)

3. Albert Simangunsong (Komisaris)
4. Arzan (Direktur Utama)
5. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
6. M. Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Mubari (Komite Audit)
9. Tri Saripalupi Andayani (Komite Audit)
10. Abdullah Sigit (Komite Kepatuhan)
11. Bari Srisoenami (Komite Kepatuhan)
12. Wismo Suwego
13. Azzah Auliyah (Tim AI)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

3. Albert Simangunsong (Commissioner)
4. Arzan (President Director)
5. Rebimun (Director of Business Management & Operations)
6. M. Arif Iswahyudi (Director of Finance & HCM)
7. Ali Firdaus (Managing Director)
8. Mubari (Audit Committee)
9. Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee)
10. Abdullah Sigit (Compliance Committee)
11. Bari Srisoenami (Compliance Committee)
12. Wismo Suwego
13. Azzah Auliyah (AI Team)

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Penyelenggaraan rapat Direksi tertuang dalam Piagam Tata Kerja Direksi, di mana Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal tersebut jika dipandang perlu. Rapat dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui teleconference dengan tetap memperhatikan persyaratan keabsahan pengambilan keputusan.

The organization of the Board of Directors meeting is stipulated in the Board of Directors Charter, where the Board of Directors is required to hold regular Board of Directors meetings at least 1 (one) time per month and may hold meetings outside the schedule if deemed necessary. Meetings may be held in person or via teleconference with due observance of the requirements for validity of decision-making.

Berikut rincian pelaksanaan rapat Direksi selama tahun 2024.

The following are the details of the implementation of the Board of Directors meetings during 2024.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal Direksi Tahun 2024

Attendance Recapitulation of the Board of Directors in Board of Directors' Meetings in 2024

Direksi Board of Directors	**Jumlah Wajib Rapat** Number of Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Arzan (Direktur Utama) ** (President Director) **	30	29	96.67
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)* (President Director)*	20	15	75.00
Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	50	48	96.00
Mohammad Arif Iswayudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	50	45	90.00
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)** (Director of Business Planning and HCM)**	26	20	76.92
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			86.92

*) I Gede Upeksa Negara tidak lagi menjabat sejak 25 April 2024.
**) Arzan diangkat sejak 5 Juni 2024. Pada tanggal yang sama, Yudi Setiawan tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

*) I Gede Upeksa Negara no longer served since April 25, 2024.
**) Arzan was appointed since June 5, 2024. On the same date, Yudi Setiawan no longer served on the Company's Board of Directors.

Risalah Rapat Direksi dan Kehadiran Direksi

Attendance Recapitulation of the Board of Directors in Board of Directors' Meetings in 2024

RAPAT DIREKSI #01
BOARD OF DIRECTORS MEETING #01

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
4 Januari 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Cashflow Desember 2023
2. Update Pemasaran PPRE & LMA
3. Realisasi Divestasi 2023
4. Realisasi kinerja Desember 2023 dan proyeksi januari 2024

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Yudi Setiawan - Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM
4. Debie Novalia - Vice President, Business Development & Asset Management
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Yofi Hendri - Vice President Equipment Operation
7. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
8. Wismo Suwego - VP Internal Audit
9. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - VP Operation 2
11. Pradita Dewi Kusumawardhani — Manager Legal
12. Yoan Sukma Ariezonna — Manager Marketing

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

MEETING DATE AND VENUE:
January 4, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Cash Flow for December 2023
2. Marketing Update for PPRE & LMA
3. Divestment Realization 2023
4. Performance Realization for December 2023 and Projections for January 2024

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. M. Arif Iswahyudi - Director of Finance & HCM
3. Yudi Setiawan - Director of Business Development & HCM
4. Debie Novalia - Vice President, Business Development & Asset Management
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
7. Yofi Hendri - Vice President Equipment Operation
8. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
9. Wismo Suwego - VP Internal Audit
10. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
11. Sahadewo Nalendro Bhawono - VP Operation 2
12. Pradita Dewi Kusumawardhani — Manager Legal
13. Yoan Sukma Ariezonna — Manager Marketing

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Rebimun (Director of Business Management & Operations)

RAPAT DIREKSI #02
BOARD OF DIRECTORS MEETING #02

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
11 Januari 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update manajemen dan operasional peralatan.
2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Berbasis Risiko Biro Internal Audit 2024.
3. Manpower plan operasi.
4. Program FMDP.

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama

MEETING DATE AND VENUE:
January 11, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Management and operational equipment updates.
2. 2024 Risk-Based Annual Audit Work Program of the Internal Audit Bureau.
3. Operations manpower plan.
4. FMDP program.

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director

2. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Debie Novalia - Vice President, Business Development & Asset Management
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Yofi Hendri - Vice President Equipment Operation
7. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
8. Adelia Auliyanti - VP HCM
9. Wismo Suwego - VP Internal Audit
10. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
11. Sahadewo Nalendro Bhawono - VP Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM

2. Rebimun - Director of Business Management & Operations
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Debie Novalia - Vice President, Business Development & Asset Management
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Yofi Hendri - Vice President Equipment Operation
7. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
8. Adelia Auliyanti - VP HCM
9. Wismo Suwego - VP Internal Audit
10. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
11. Sahadewo Nalendro Bhawono - VP Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
M. Arif Iswahyudi - Director of Finance & HCM

RAPAT DIREKSI #03
BOARD OF DIRECTORS MEETING #03

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
30 Januari 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Hasil Survey Akhlak dan ESS
2. Sosialisasi sistem BDE
3. Pembahasan LSB
4. Kajian investasi alat Proyek HRM
5. Pembahasan Outstanding Divestasi Kendaraan Operasional

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
5. Yofi Hendri - VP Equipment Operation
6. Adelia Auliyanti - VP HCM
7. Wismo Suwego - VP Internal Audit
8. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
9. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
10. Gallery Rekayasa - VP Finance and Accounting
11. Pradita Dewi Kusumawardhani — Manager Legal
12. Yoan Sukma Ariezonna — Manager Marketing

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
January 30 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Results of the Akhlak and ESS Survey
2. Socialization of the BDE system
3. Discussion of LSB
4. Investment review of HRM Project equipment
5. Discussion on Outstanding Divestment of Operational Vehicles

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Rebimun - Director of Business Management & Operations
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
5. Yofi Hendri - VP Equipment Operation
6. Adelia Auliyanti - VP HCM
7. Wismo Suwego - VP Internal Audit
8. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
9. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
10. Gallery Rekayasa - VP Finance and Accounting
11. Pradita Dewi Kusumawardhani — Manager Legal
12. Yoan Sukma Ariezonna — Manager Marketing

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #04
BOARD OF DIRECTORS MEETING #04

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
6 Februari 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update manajemen dan operasional peralatan.

MEETING DATE AND VENUE:
February 6 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Equipment management and operational updates.

2. Hasil inspeksi proyek Weda Bay.
3. Realisasi kinerja januari 2024.
4. Hold point proyek kit Batang.
5. Update proyek Saumlaki.
6. Struktur Organisasi proyek Weda Bay.
7. Remunerasi personil Idle.

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
5. Yofi Hendri - VP Equipment Operation
6. Adelia Auliyanti - VP HCM
7. Dana Surya Kurniawan - VP Bidding and Engineering
8. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
9. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
10. Gallery Rekayasa - VP Finance and Accounting
11. Dyah Novian Tri Hadini - VP Corporate Secretary
12. Pradita Dewi Kusumawardhani — Manager Legal

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

2. Weda Bay project inspection results.
3. January 2024 performance realization.
4. Hold point for Batang kit project.
5. Saumlaki project update.
6. Organizational structure of the Weda Bay project.
7. Remuneration for idle personnel.

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Rebimun - Director of Business Management & Operations
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
5. Yofi Hendri - VP Equipment Operation
6. Adelia Auliyanti - VP HCM
7. Dana Surya Kurniawan - VP Bidding and Engineering
8. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
9. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
10. Gallery Rekayasa - VP Finance and Accounting
11. Dyah Novian Tri Hadini - VP Corporate Secretary
12. Pradita Dewi Kusumawardhani — Manager Legal

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #05
BOARD OF DIRECTORS MEETING #05

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
15 Februari 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Proxy penandatanganan dokumen perusahaan.
2. Update manajemen dan operasional peralatan.
3. Standarisasi workshop proyek mining.

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
5. Yofi Hendri - VP Equipment Operation
6. Adelia Auliyanti - VP HCM
7. Dana Surya Kurniawan - VP Bidding and Engineering
8. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
9. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
10. Gallery Rekayasa - VP Finance and Accounting
11. Dyah Novian Tri Hadini - VP Corporate Secretary

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
February 15 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Proxy for signing company documents.
2. Update management and equipment operations.
3. Standardization of mining project workshops.

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Rebimun - Director of Business Management & Operations
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
5. Yofi Hendri - VP Equipment Operation
6. Adelia Auliyanti - VP HCM
7. Dana Surya Kurniawan - VP Bidding and Engineering
8. Dwi Agus Susanto - VP Operation 1
9. Rully Panca Wahyuriawan - VP Equipment Maintenance & Repair
10. Gallery Rekayasa - VP Finance and Accounting
11. Dyah Novian Tri Hadini - VP Corporate Secretary

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #06
BOARD OF DIRECTORS MEETING #06

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
20 Februari 2024, Head Office PT PPRE

MEETING DATE AND VENUE:
February 20 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Cashflow Februari dan Proyek Cashflow triwulan 1-2024
2. Update Pemasaran PPRE & LMA
3. Update Manajemen Dan Operasional Peralatan
4. Pembahasan penjualan proyek Weda Bay
5. Update proyek Saumlaki

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING AGENDA:
1. February Cashflow and Q1-2024 Project Cashflow
2. PPRE & LMA Marketing Update
3. Equipment Management and Operational Update
4. Discussion on Weda Bay Project Sales
5. Saumlaki Project Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #07
BOARD OF DIRECTORS MEETING #07

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
27 Februari 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update manajemen dan operasional peralatan
2. Case 1 HCM
3. Case 2 HCM
4. Case 3 HCM

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun- Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
8. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management

MEETING DATE AND VENUE:
February 27 2024, Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Equipment management and operational updates
2. Case 1 HCM
3. Case 2 HCM
4. Case 3 HCM

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Rebimun - Director of Business Management & Operations
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
8. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management

10. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
11. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
12. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
13. Manager, Operation 1

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM

10. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
11. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
12. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
13. Manager, Operation 1

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM

RAPAT DIREKSI #08
BOARD OF DIRECTORS MEETING #08

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
04 Maret 2024 Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Manfaat Asuransi Kesehatan
2. Pembahasan Investasi HRM
3. Update Manajemen dan Operasional Peralatan
4. Pembahasan HP 100% Proyek RDMP
5. Operasional Peralatan

PESERTA RAPAT:
1. Arzan Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi Direktur Keuangan & HCM
3. Yudi Setiawan Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM
4. Rebimun Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
March 04 2024 Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Benefits of Health Insurance
2. Discussion on HRM Investment
3. Update on Equipment Management and Operations
4. Discussion on 100% HP for RDMP Project
5. Equipment Operations

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Yudi Setiawan - Director of Business Planning & HCM
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
10. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
11. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
12. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #09
BOARD OF DIRECTORS MEETING #09

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
06 Maret 2024 , Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
Realisasi Kinerja Bulan Februari 2024

PESERTA RAPAT:
1. Arzan Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

MEETING DATE AND VENUE:
March 06 2024 , Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
Performance Realization for February 2024

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations

5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
8. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
8. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #10
BOARD OF DIRECTORS MEETING #10

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
20 Maret 2024 Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Manajemen dan Operasional Peralatan
2. Update proyek Saumlaki
3. Hasil Self Asesmen SPIP
4. Update Pemasaran PPRE & LMA

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
4. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
5. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
6. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
7. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
8. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
9. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
10. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
11. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

MEETING DATE AND VENUE:
March 20 2024 Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Management and Equipment Operations Update
2. Saumlaki Project Update
3. SPIP Self-Assessment Results
4. PPRE & LMA Marketing Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
4. Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
8. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
11. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
12. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
2. Rebimun - Director of Business Management & Operations

RAPAT DIREKSI #11
BOARD OF DIRECTORS MEETING #11

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
27 Maret 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi & Analisa Insiden Proyek Weda Bay Dan Program Pengendalian Insiden
2. Program Penerapan Carm Di Proyek

MEETING DATE AND VENUE:
March 26 2024, Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Evaluation & Analysis of the Weda Bay Project Incident and Incident Control Program
2. Implementation of CARM Program in the Project

3. Divestasi Alat Ringan Tahap 2

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

3. Phase 2 Light Equipment Divestment

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #12
BOARD OF DIRECTORS MEETING #12

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
28 Maret 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Kinerja Investasi Proyek Weda Bay
2. Remunerasi Karyawan Idle

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
March 26 2024, Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Weda Bay Project Investment Performance
2. Idle Employee Remuneration

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #13
BOARD OF DIRECTORS MEETING #13

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
02 April 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Manajemen dan Operasional Peralatan Remunerasi Karyawan Idle
2. Realisasi Kinerja Maret 2024
3. Tinjauan SMAP

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
April 02 2024, Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Equipment Management and Operations Update
2. March 2024 Performance Realization
3. SMAP Review

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #14
BOARD OF DIRECTORS MEETING #14

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
03 April 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Program Suksesi Jabatan
2. Tindak Lanjut Likuidasi PT PSA

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

MEETING DATE AND VENUE:
April 03 2024, Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Succession Program
2. Follow-up on the Liquidation of PT PSA

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #15
BOARD OF DIRECTORS MEETING #15

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
17 April 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
Proyeksi TW 2-2024

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM

MEETING DATE AND VENUE:
April 17 2024, Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
Projection Q2-2024

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Director of Business Management & Operations
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Suci Dwi Cahyani - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Bidding & Engineering
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM

RAPAT DIREKSI #16
BOARD OF DIRECTORS MEETING #16

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
07 Mei 2024, Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Realisasi Kinerja bulan April 2024
2. Pembahasan Proyek MO Tofu (Lanjutan)
3. Program Divestasi

PESERTA RAPAT:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain

MEETING DATE AND VENUE:
May 07 2024, Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. April 2024 Performance Realization
2. MO Tofu Project Discussion (Continuation)
3. Divestment Program

MEETING PARTICIPANTS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Director of Business Management & Operations
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain

Management
Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Arzan - Direktur Utama

Management
Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Arzan - President Director

RAPAT DIREKSI #17
BOARD OF DIRECTORS MEETING #17

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
14 Mei 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Manajemen & Operasional Peralatan
2. Update Tim Divestasi
3. Pembahasan Set Off PPRE-PPRO
4. Update Kinerja dan Kebutuhan Dana Korporasi
5. Update Pemasaran PPRE & LMA

PESERTA RAPAT:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Vice President, Bidding & Engineering
8. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
11. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
12. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Arzan - Direktur Utama

MEETING DATE AND VENUE:
May 14, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Update on Equipment Management & Operations
2. Update on Divestment Team
3. Discussion on Set Off PPRE-PPRO
4. Update on Corporate Performance and Funding Needs
5. Update on PPRE & LMA Marketing

MEETING PARTICIPANTS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Director of Business Management & Operations
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment
13. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Arzan - President Director

RAPAT DIREKSI #18
BOARD OF DIRECTORS MEETING #18

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
21 Mei 2024; Head Office PT PPRE

MEETING DATE AND VENUE:
May 21, 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Manajemen & Operasional Peralatan
2. Update kinerja proyek hauling Weda Bay
3. Kinerja Investasi Proyek Weda Bay TW1-2024
4. Laporan hasil audit PT LMA

PESERTA RAPAT:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Vice President, Bidding & Engineering
8. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
11. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Arzan - Direktur Utama

MEETING AGENDA:
1. Management & Operational Equipment Update
2. Hauling Project Performance Update for Weda Bay
3. Weda Bay Project Investment Performance Q1-2024
4. PT LMA Audit Report

MEETING PARTICIPANTS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Director of Business & Operations Management
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Arzan - President Director

RAPAT DIREKSI #19
BOARD OF DIRECTORS MEETING #19

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
28 Mei 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Inisiasi divestasi TC & alat berat
2. Update Manajemen & Operasional Peralatan
3. Evaluasi Alat Idle
4. Struktur Organisasi Proyek
5. Review struktur organisasi Divisi Busdev

PESERTA RAPAT:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Vice President, Bidding & Engineering
8. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
11. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Arzan - Direktur Utama

MEETING DATE AND VENUE:
May 28, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Initiation of TC & heavy equipment divestment
2. Update on Equipment Management & Operations
3. Evaluation of Idle Equipment
4. Project Organizational Structure
5. Review of the Business Development Division's organizational structure

MEETING PARTICIPANTS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Director of Business Management & Operations
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Vice President, Bidding & Engineering
9. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate Secretary
11. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
12. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Arzan - President Director

RAPAT DIREKSI #20
BOARD OF DIRECTORS MEETING #20

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
04 Juni 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
Realisasi Kinerja Bulan Mei 2024

PESERTA RAPAT:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
12. Maulana Andika - Vice President, Bidding & Engineering
13. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Arzan - Direktur Utama

MEETING DATE AND VENUE:
June 04, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
Performance Realization for May 2024

MEETING PARTICIPANTS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Director of Business & Operations Management
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate Secretary
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
11. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate Secretary
12. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
13. Maulana Andika - Vice President, Bidding & Engineering
14. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Arzan - President Director

RAPAT DIREKSI #21
BOARD OF DIRECTORS MEETING #21

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
11 Juni 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Manajemen & Operasional Peralatan
2. Program CARM Proyek
3. KPI Proyek 2024
4. Update Divestasi

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate

MEETING DATE AND VENUE:
June 11, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Equipment Management & Operational Update
2. Project CARM Program
3. 2024 Project KPI
4. Divestment Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Rebimun - Director of Business Management & Operations
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate

Secretary
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
11. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
12. Maulana Andika - Vice President, Bidding & Engineering
13. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Ali Firdaus - Managing Director

Secretary
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
10. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
11. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate Secretary
12. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
13. Maulana Andika - Vice President, Bidding & Engineering
14. Adelia Auliyanti - Vice President, Human Capital Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Ali Firdaus - Managing Director

RAPAT DIREKSI #22
BOARD OF DIRECTORS MEETING #22

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
24 Juni 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
Program kerja dan kinerja alat proyek hauling Weda Bay

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Ali Firdaus - Managing Director

MEETING DATE AND VENUE:
June 24, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
Work Program and Performance of Hauling Project Equipment in Weda Bay

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Rebimun - Director of Business Management & Operations
4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Ali Firdaus - Managing Director

RAPAT DIREKSI #23
BOARD OF DIRECTORS MEETING #23

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
26 Juni 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Pemasaran PPRE & LMA
2. Struktur organisasi PPRE
3. Revisi RKAP PPRE
4. Kajian Valuasi PT LMA
5. Kajian bisnis double capacity MO Weda Bay
6. Schedule capex alat proyek HRM

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

MEETING DATE AND VENUE:
June 26, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. PPRE & LMA Marketing Update
2. PPRE Organizational Structure
3. PPRE RKAP Revision
4. PT LMA Valuation Study
5. Business Study on Double Capacity MO Weda Bay
6. HRM Project Equipment Capex Schedule

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Rebimun - Business & Operations Management Director

4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
8. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
9. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President Corporate Secretary
10. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
    Surya Andriansyah Mustofa - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Ali Firdaus - Managing Director

4. Restian Dini Malini - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
9. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
10. Dyah Novian Tri Hadini - Vice President, Corporate Secretary
11. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
12. Surya Andriansyah Mustofa - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Ali Firdaus - Managing Director

RAPAT DIREKSI #24
BOARD OF DIRECTORS MEETING #24

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
02 Juli 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Pemasaran PPRE & LMA
2. Update manajemen dan operasional peralatan
3. Struktur organisasi UKP (lanjutan)
4. Kajian FS HRM (lanjutan)
5. Realisasi Kinerja bulan Juni 2024

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
6. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
7. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
8. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
11. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
    Surya Andriansyah Mustofa - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Ali Firdaus - Managing Director

MEETING DATE AND VENUE:
July 02, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. PPRE & LMA Marketing Update
2. Equipment Management and Operations Update
3. UKP Organizational Structure (continued)
4. FS HRM Study (continued)
5. Performance Realization for June 2024

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Rebimun - Director of Business & Operations Management
4. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
5. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
9. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
10. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
11. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
12. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
13. Surya Andriansyah Mustofa - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Ali Firdaus - Managing Director

RAPAT DIREKSI #25
BOARD OF DIRECTORS MEETING #25

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
08 Juli 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Pemasaran PPRE & LMA
2. Realisasi Cashflow Juni dan Proyeksi Cashflow Juli 2024

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
July 08, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. PPRE & LMA Marketing Update
2. June Cashflow Realization and July 2024 Cashflow Projection

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business & Operations Management
5. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #26
BOARD OF DIRECTORS MEETING #26

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
09 Juli 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Kinerja Peralatan
2. FOB Hauling Coal PT BA Menggunakan EV Truck

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
3. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
4. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
5. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
6. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
7. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Vice President, Human Capital Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director

MEETING DATE AND VENUE:
July 09, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Equipment Performance Update
2. PT BA Coal Hauling FOB Using EV Truck

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Rebimun - Director of Business Management & Operations
3. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
4. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
5. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
6. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
7. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Vice President, Human Capital Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
2. Ali Firdaus - Managing Director

RAPAT DIREKSI #27
BOARD OF DIRECTORS MEETING #27

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
16 Juli 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Divestasi Kendaraan Operasional
2. Update divestasi Alat Berat

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
7. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
July 09, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Operational Vehicle Divestment Update
2. Heavy Equipment Divestment Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business Management & Operations Director
5. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
7. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
8. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #28
BOARD OF DIRECTORS MEETING #28

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
23 Juli 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi sistem transtrack
2. Pemenuhan alat proyek weda bay
3. Update Pemasaran PPRE & LMA
4. Legalitas fasilitas PP di Bank Mandiri
5. Performance Appraisal

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
7. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
July 23, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Evaluation of the Transtrack system
2. Fulfillment of equipment for the Weda Bay project
3. Marketing updates for PPRE & LMA
4. Legality of PP facilities at Bank Mandiri

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
6. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
7. Gallery Rekayasa - Vice President, Finance & Accounting
8. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #29
BOARD OF DIRECTORS MEETING #29

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
29 Juli 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Pemasaran PPRE & LMA
2. Struktur Organisasi Perusahaan
3. Pemenuhan Alat Proyek Weda Bay

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
   Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
July 23, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. PPRE & LMA Marketing Update
2. Company Organizational Structure
3. Fulfillment of Weda Bay Project Equipment

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President of Corporate Secretary
6. Dwi Agus Susanto - Vice President, Operation 1
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
8. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Dana Surya Kurniawan - Vice President, OC & Supply Chain Management
10. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #30
BOARD OF DIRECTORS MEETING #30

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
06 Agustus 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Pemasaran PPRE & LMA
2. Realisasi kinerja Juli dan Proyeksi Kinerja Agustus 2024
3. Update Operasional Dan Manajemen Perlatan
4. Review Prosedur Rotable Part
5. Update Divestasi Alat Berat
6. Update Divestasi Saham PT LMA
7. Hasil Audit Divisi Peralatan

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Vice President, Operation 2
8. Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
10. Vice President, OC & Supply Chain Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
August 06, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. PPRE & LMA Marketing Update
2. July Performance Realization and August 2024 Performance Projection
3. Operational and Equipment Management Update
4. Review of Rotable Part Procedures
5. Heavy Equipment Divestment Update
6. PT LMA Share Divestment Update
7. Equipment Division Audit Results

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 2
7. Vice President, Operation 2
8. Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
10. Vice President, OC & Supply Chain Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #31
BOARD OF DIRECTORS MEETING #31

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
13 Agustus 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Program Peningkatan Kompetensi Mekanik
2. Follow Up Alat Idle Di Lokasi Proyek Non-Aktif
3. Update Pemasaran PPRE & LMA
4. Mekanisme Pembukuan Dan Penjualan Pada Operasi Dan Peralatan

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Vice President, Operation 2
8. Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
August 13, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Mechanical Competency Improvement Program
2. Follow-up on Idle Equipment at Inactive Project Sites
3. Update on PPRE & LMA Marketing
4. Bookkeeping and Sales Mechanism for Operations and Equipment

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President of Corporate Secretary
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Vice President, Operation 2
8. Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #32
BOARD OF DIRECTORS MEETING #32

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
21 Agustus 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Pemenuhan alat Proyek HRM
2. Update PA alat di Proyek Weda Bay
3. Asset Management Proses
4. Alur Proses Asuransi Alat
5. Rekapitulasi Asuransi Alat
6. Blanko Data Aset Management
7. Komposit Risiko PPRE sd TW 2-2024
8. Update Pemasaran PPRE & LMA

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Vice President, Operation 2
8. Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
10. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
August 21, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Fulfillment of HRM Project Equipment
2. Update of PA Equipment in Weda Bay Project
3. Asset Management Process
4. Equipment Insurance Process Flow
5. Equipment Insurance Recapitulation
6. Asset Management Data Form
7. PPRE Risk Composite up to Q2-2024
8. Update on PPRE & LMA Marketing

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Vice President, Operation 2
8. Vice President, OC & Supply Chain Management
9. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
10. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #33
BOARD OF DIRECTORS MEETING #33

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
30 Agustus 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi cashflow terhadap penjualan
2. Kajian likuidasi PSA
3. Evalusi WLA
4. Update Prognosa divestasi
5. Monitoring WIPS

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Vice President, Finance & Accounting
6. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
7. Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
9. Vice President, Finance & Accounting
10. Vice President, Finance & Accounting
11. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
12. Vice President, OC & Supply Chain Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
August 30, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Cash flow evaluation in relation to sales
2. PSA liquidation assessment
3. WLA evaluation
4. Divestment forecast update
5. WIPS monitoring

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Vice President, Finance & Accounting
6. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
7. Vice President, OC & Supply Chain Management
8. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
9. Vice President, Finance & Accounting
10. Vice President, Finance & Accounting
11. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
12. Vice President, OC & Supply Chain Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #34
BOARD OF DIRECTORS MEETING #34

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
02 September 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
Realisasi kinerja bulan agustus dan proyeksi kinerja bulan september 2024

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
9. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
September 02, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
Performance realization for August and performance projection for September 2024

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
9. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #35
BOARD OF DIRECTORS MEETING #35

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
09 September 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Kajian Konsultan
2. Update Pemasaran PPRE & LMA
3. Update Divestasi

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
9. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
September 09, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Consultant Study Update
2. PPRE & LMA Marketing Update
3. Divestment Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
9. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #36
BOARD OF DIRECTORS MEETING #36

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
10 September 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update manajemen dan operasional peralatan
2. Update Proyek MO WBN
3. Update Proyek Hauling WBN
4. Pemberian LOU Kepada Bank Mandiri

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Vice President, Finance & Accounting
7. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
8. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
9. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
11. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
September 10, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Management and operational equipment update
2. MO WBN Project update
3. WBN Hauling Project update
4. Issuance of LOU to Bank Mandiri

MEETING PARTICIPANTS:
Arzan - President Director
Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
Ali Firdaus - Managing Director
Rebimun - Business & Operations Management Director
Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
Vice President, Finance & Accounting
Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #37
BOARD OF DIRECTORS MEETING #37

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
17 September 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
Review Job Grading

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
September 17, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
Job Grading Review

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #38
BOARD OF DIRECTORS MEETING #38

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
24 September 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Pemasaran PPRE & LMA
2. Update manajemen dan operasional peralatan
3. Update Divestasi

PESERTA RAPAT:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
4. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
5. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
6. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
9. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
10. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Arzan - Direktur Utama

MEETING DATE AND VENUE:
September 24, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. PPRE & LMA Marketing Update
2. Equipment Management and Operations Update
3. Divestment Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Mohammad Arif Iswayudi - Director of Finance & HCM
2. Ali Firdaus - Managing Director
3. Rebimun - Director of Business & Operations Management
4. Mei Elsa Kembaren - Vice President of Corporate Secretary
5. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President of Supply Chain Management
6. Dana Surya Kurniawan - Vice President of Operation Control
7. Yofi Hendri - Vice President of Equipment Operation
8. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
9. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President of Operation 1
10. Eko Septiyanto - Vice President of Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #39
BOARD OF DIRECTORS MEETING #39

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
30 September 2024; Head Office PT PPRE

MEETING DATE AND VENUE:
September 30, 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Divestasi
2. Update Pemasaran PPRE & LMA
3. Update Kajian Konsultan

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
11. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada

MEETING AGENDA:
1. Divestment Update
2. PPRE & LMA Marketing Update
3. Consultant Review Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President,
11. Operation 1
12. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #40
BOARD OF DIRECTORS MEETING #40

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
01 Oktober 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Realisasi Kinerja September 2024
2. RKAP 2025

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
6. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
7. Vice President, Finance & Accounting
8. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
October 01, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Performance Realization for September 2024
2. RKAP 2025

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President,
6. Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #41
BOARD OF DIRECTORS MEETING #41

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
08 Oktober 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Penyusunan biaya pembuatan workshop rebuild proyek weda bay

MEETING DATE AND VENUE:
October 08, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Preparation of workshop rebuild project costs for Weda Bay

2. Update Pemasaran PPRE & LMA
3. Hasil Internal audit Divisi Operasi 1
4. Evaluasi Asuransi
5. Penyelesaian Saham PPRE di YKKPP
6. Kebutuhan Solar

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
11. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

2. Update on PPRE & LMA Marketing
3. Internal audit results of Operations Division 1
4. Insurance evaluation
5. Settlement of PPRE shares in YKKPP
6. Diesel fuel requirements

MEETING PARTICIPANTS:
7. Arzan - President Director
8. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
9. Ali Firdaus - Managing Director
10. Rebimun - Business & Operations Management Director
11. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
12. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
13. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
14. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
15. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
16. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
17. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #42
BOARD OF DIRECTORS MEETING #42

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
15 Oktober 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update manajemen dan operasional peralatan
2. Realisasi cashflow Juni dan Proyeksi Cashflow September & proyeksi Oktober 2024
3. Corporate risk RKAP

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
11. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
October 15, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Update on Equipment Management and Operations
2. Cashflow realization for June and Cashflow projections for September & October 2024
3. Corporate risk in RKAP

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
11. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #43
BOARD OF DIRECTORS MEETING #43

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
11 November 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
Update Pemasaran PPRE & LMA

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Vice President, Finance & Accounting
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
9. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
10. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
11. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
November 11, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
PPRE & LMA Marketing Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business & Operations Management
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Vice President, Finance & Accounting
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
9. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President,
10. Operation 1
11. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
12. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #44
BOARD OF DIRECTORS MEETING #44

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
18 November 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Pemasaran PPRE & LMA
2. Progress pengembangan IT
3. Realisasi Cashfow Oktober & proyeksi cashflow s/d Desember 2024

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
11. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
November 18, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. PPRE & LMA Marketing Update
2. IT Development Progress
3. October Cashflow Realization & Cashflow Projection until December 2024

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
6. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
7. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
8. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
9. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
10. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
11. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #45
BOARD OF DIRECTORS MEETING #45

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
26 November 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Evaluasi Kinerja MO & Hauling WBN
2. Safety Highlight Proyek Weda Bay Nickel
3. Corporate Risk Manajemen 2025
4. Kajian E-Catalogue LKPP dan Progress Tender Cetak Sawah
5. Pemaparan Trakindo hasil site asessment proyek Weda Bay

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
6. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
9. Vice President, Finance & Accounting
10. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
11. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
12. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
13. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
November 26, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. MO & WBN Hauling Performance Evaluation
2. Safety Highlights of the Weda Bay Nickel Project
3. Corporate Risk Management 2025
4. Review of LKPP E-Catalogue and Progress of Paddy Field Printing Tender
5. Trakindo Presentation of the Site Assessment Results for the Weda Bay Project

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
6. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
7. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
8. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
9. Vice President, Finance & Accounting
10. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
11. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
12. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
13. Pipin Julianto - Manager, Health, Safety & Environment

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #46
BOARD OF DIRECTORS MEETING #46

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
03 Desember 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update claim proyek OPS 1 (IKN dan Vale)
2. Pemaparan audit divisi operasi 2
3. Perhitungan pendapatan divestasi alat
4. Update Pemasaran PPRE & LMA

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting

MEETING DATE AND VENUE:
December 03, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Update OPS 1 project claims (IKN and Vale)
2. Presentation of operations division 2 audit
3. Calculation of equipment divestment revenue
4. Update on PPRE & LMA marketing

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting

9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
11. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
12. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
13. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
11. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
12. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
13. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #47
BOARD OF DIRECTORS MEETING #47

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
10 Desember 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Pembahasan Job Grading
2. Update Pemasaran PPRE & LMA

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
December 10, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Job Grading Discussion
2. PPRE & LMA Marketing Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #48
BOARD OF DIRECTORS MEETING #48

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
17 Desember 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Learning Center
2. Update Pemasaran PPRE & LMA
3. Rencana pemindahtanganan barang scrap
4. Update pemasangan payload rockbak
5. Update project MO Weda Bay

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President,

MEETING DATE AND VENUE:
December 17, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Learning Center
2. PPRE & LMA Marketing Update
3. Plan for the Transfer of Scrap Goods
4. Payload Rockbak Installation Update
5. MO Weda Bay Project Update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Director of Business Management & Operations
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President,

Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
11. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
11. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #49
BOARD OF DIRECTORS MEETING #49

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
23 Desember 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Pemaparan hasil audit divisi Bid&Eng dan BDAM
2. Update Pemasaran PPRE & LMA
3. Update MO Project Mining operation Weda Bay

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
11. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
12. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
December 23, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Presentation of audit results for Bid&Eng and BDAM divisions
2. Marketing update for PPRE & LMA
3. MO Project Mining Operation Weda Bay update

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director
5. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager
6. Sahadewo Nalendro Bhawono - Vice President, Operation 1
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Vice President, Finance & Accounting
9. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
10. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
11. Wismo Suwego - Vice President, Internal Auditor
12. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT DIREKSI #50
BOARD OF DIRECTORS MEETING #50

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
30 Desember 2024; Head Office PT PPRE

AGENDA RAPAT:
1. Update Kinerja Peralatan proyek WBN
2. Update Pemasaran PPRE & LMA

PESERTA RAPAT:
1. Arzan - Direktur Utama
2. Mohammad Arif Iswayudi - Direktur Keuangan & HCM
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

MEETING DATE AND VENUE:
December 30, 2024; Head Office PT PPRE

MEETING AGENDA:
1. Update of WBN Project Equipment Performance
2. Update of PPRE & LMA Marketing

MEETING PARTICIPANTS:
1. Arzan - President Director
2. Mohammad Arif Iswayudi - Finance & HCM Director
3. Ali Firdaus - Managing Director
4. Rebimun - Business & Operations Management Director

5. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
6. Mei Elsa Kembaren - Vice President Corporate Secretary
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
9. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
10. Vice President, Finance & Accounting
11. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

5. Yofi Hendri - Vice President, Equipment Operation
6. Mei Elsa Kembaren - Vice President, Corporate Secretary
7. Eko Septiyanto - Vice President, Operation 2
8. Dana Surya Kurniawan - Vice President, Operation Control
9. Yudhistira Bawa Yusha - Vice President, Supply Chain Management
10. Vice President, Finance & Accounting
11. Yoan Sukma Ariezonna - Marketing Manager

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS

Board of Commissioners and Board of Directors Attendance Rate in the GMS

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat RUPS Tahunan tahun buku 2023 tanggal 5 Juni 2024 adalah sebagai berikut.

The attendance rate of the Board of Commissioners and Board of Directors serving at the time of the Annual GMS for the fiscal year 2023 on June 5, 2024, is as follows.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS

Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors in the GMS

Nama dan Jabatan Name and Position	**RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Tanggal 5 Juni 2024** Annual GMS for fiscal year 2023 held on June 5, 2024	**Alasan Ketidakhadiran** Reason for Absence
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Nur Rochmad (Komisaris Utama/Komisaris Independen) (President Commissioner/Independent Commissioner)	✅	-
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	✅	-
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	✅	-
Direksi Board of Directors		
Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	✅	-
Mohammad Arif Iswayudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	✅	-
Rata-rata Kehadiran Average Attendance		

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 5 Juni 2024 hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors serving at the time of the Annual GMS for the fiscal year 2023 on June 5, 2024, were present at the meeting.

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Competency Development Programs for the Board of Commissioners and Board of Directors

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti pelatihan, workshop, seminar, konferensi, dan lain sebagainya untuk peningkatan kapasitas dan pemutakhiran pengetahuan Dewan Komisaris atas isu-isu terkini terkait Perusahaan. Berikut informasi kebijakan program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris Perusahaan.

1. Dewan Komisaris berwenang memperoleh pembelajaran pelatihan bagi Dewan Komisaris dan merencanakannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
2. Pembelajaran/pelatihan bagi anggota Dewan dapat diselenggarakan oleh internal ataupun eksternal Perusahaan.
3. Metode pembelajaran/pelatihan untuk peningkatan kompetensi antara lain berupa pelatihan, workshop, seminar, konferensi, dan sebagainya.
4. Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk kegiatan pelatihan bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang akan datang pada triwulan IV tahun berjalan.
5. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
6. Pelaksanaan program pelatihan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan sekurangnya mencakup tempat dan waktu penyelenggaraan, tema/topik pelatihan, penyelenggara, pelatih/pengajar, peserta, jadwal pelatihan, materi pelatihan, dan manfaat hasil pelatihan.

Kebijakan program peningkatan kompetensi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya untuk menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan.
2. Anggota Direksi perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dalam self-study dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, seminar, workshop, conference, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi.
3. Pendidikan berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri dan atas beban Perusahaan.

The Company is committed to improving the quality of the Board of Commissioners' duties and responsibilities by providing opportunities to attend training, workshops, seminars, conferences, etc., to increase the capacity and update the Board of Commissioners knowledge on the latest issues related to the Company. The following is information on the competency development program policy for the Board of Commissioners.

1. The Board of Commissioners has the authority to obtain training and plan them in the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
2. Learning/training for Board members can be organized internally or externally by the Company.
3. Learning/training methods to increase competency include training, workshops, seminars, conferences, etc.
4. The Board of Commissioners prepares a Company Work Plan and Budget for training activities for each member of the Board of Commissioners in the fourth quarter of the current year.
5. The training Implementation for the Board of Commissioners members is realized following the Board of Commissioners work plan.
6. The training program implementation is reported to the Board of Commissioners, including at least the place and time of implementation, training themes/topics, organizers, trainers/teachers, participants, training schedule, training materials, and benefits from the training results.

The competency development program policy for the Board of Directors is as follows:

1. The Board of Directors members must continuously increase and update their knowledge to carry out their Company management duties.
2. The Board of Directors members need to receive continuous education combined with self-study and participation in special education, training, seminars, workshops, and conferences, which can help increase the effectiveness of the Board of Directors functions.
3. The continuous education can be carried out domestically and abroad at the Company's expense.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Types and Content of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Nur Rochmad (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) (President Commissioner/Independent Commissioner)	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT PP Presisi Tbk
	The New Special Directorship Program: Agility in Facing 2025	Lombok, 28 - 29 November 2024 Lombok, November 28 - 29 2024	Indonesia Institut for Corporate Directorship
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)** (Independent Commissioner)**	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
	Executive On Boarding	14 Agustus 2024 August 14, 2024	PT PP (Persero) Tbk
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT PP Presisi Tbk
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
	Pelatihan Sistem Informasi & Pengendalian Internal Information Systems & Internal Control Training	Online, 29 — 30 April 2024 Online, April 29 — 30, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia
	Pelatihan Audit & Asurans Audit & Assurance Training		

Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	Pelatihan Manajemen Perpajakan Tax Management Training	Online, 29 — 30 April 2024 Online, April 29 — 30, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia
	Pelatihan Akuntansi Manajemen Lanjutan Advanced Management Accounting Training		
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 4 September 2024 Jakarta, September 4, 2024	PT PP (Persero) Tbk
	Leaders as Coach	Jakarta, 6 — 7 November 2024 Jakarta, November 6 — 7 2024	Maxima Consulting
	Pelatihan IFRS (International Financial Reporting Standards) S1 dan S2 IFRS (International Financial Reporting Standards) S1 and S2 Training	Jakarta, 13 — 14 November 2024 Jakarta, November 13 — 14 2024	PT PP (Persero) Tbk
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT. PP Presisi Tbk
Direksi Board of Directors			
Arzan (Direktur Utama) (President Director)	The New Special Directorship Program : Agility In Facing 2025	Lombok /28-29 Oktober 2024 Lombok /October 28-29 2024	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi) (Director of Business Management & Operations)	The New Special Directorship Program : Agility In Facing 2025	Lombok /28-29 Oktober 2024 Lombok /October 28-29 2024	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Mohammad Arif Iswayudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	Mandiri Investment Forum	Online, 5 Maret 2024 Online, March 5, 2024	Mandiri Group
	Training Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Online, 15-16 Mei 2024 Online, May 15 — 16, 2024	PT Risk Advisor & Performance

Mohammad Arif Iswayudi (Direktur Keuangan & HCM) (Director of Finance & HCM)	Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Online, 19 Mei 2024 Online, May 19, 2024	PT Risk Advisor & Performance

*) I Gede Upeksa Negara tidak lagi menjabat sejak 25 April 2024, posisinya digantikan Arzan pada tanggal 5 Juni 2024.
**) Indra Jaya Rajagukguk dan Yudi Setiawan tidak lagi menjabat sejak tanggal 5 Juni 2024.

*) I Gede Upeksa Negara no longer served since April 25, 2024, he was replaced by Arzan on June 5, 2024.
**) Indra Jaya Rajagukguk and Yudi Setiawan no longer served since June 5, 2024.

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Nomination

Kriteria Penentuan Dewan Komisaris

Criteria for Determining the Board of Commissioners

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik

2. Cakap melakukan perbuatan hukum

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
   - Tidak pernah dinyatakan pailit
   - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
   - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
     - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
     - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
     - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

In accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners, prospective members of the Board of Commissioners must meet specific criteria to be eligible for appointment as members of the Company's Board of Commissioners. These criteria are as follows:

1. Possess good character, morals, and integrity.

2. Be competent to perform legal actions.

3. Within 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:
   - Must not have been declared bankrupt.
   - Must not have served as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
   - Must not have been convicted of a criminal offense that harmed state finances and/or was related to the financial sector.
   - Must not have served as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who, during their term of office:
     - Failed to convene an Annual GMS
     - Had their accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to provide accountability as required to the GMS.
     - Caused a company that had obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial statements to the OJK.

4. Have a commitment to comply with laws and regulations.

5. Have knowledge and/or expertise in the field required by the company.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Procedure for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris wajib diselenggarakan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris lainnya. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat memiliki 1 (satu) periode yang paling lama 5 (lima) tahun masa jabatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Demikian pula sebelum jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perusahaan. Dalam kasus pemberhentian anggota Dewan Komisaris, wajib disertai dengan alasan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri, dan keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan membela diri.

The appointment and dismissal of the Board of Commissioners shall be held through the GMS in accordance with the Company's Articles of Association by taking into account the recommendations of other members of the Board of Commissioners. Members of the BOC who are appointed have 1 (one) period of maximum 5 (five) years of service and expire at the closing of the fifth Annual GMS. After the term of office ends, members of the BOC may be reappointed in accordance with the decision of the GMS. Similarly, before the term of office ends, a member of the BOC may resign by giving written notice of such intention to the Company. In the case of dismissal of a member of the BOC, it must be accompanied by the reasons for the dismissal, the provision of an opportunity to defend himself/herself, and the decision to dismiss after the person concerned defends himself/herself.

Kriteria Penentuan Direksi

Criteria for Determining the Board of Directors

Berdasarkan Pedoman Board of Director (BOD), kriteria yang harus dipenuhi Direksi pada saat diangkat selama menjabat meliputi:

1. Persyaratan Formal yaitu:
   - Orang perseorangan;
   - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
   - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
   - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

2. Persyaratan Material yaitu:
   - Keahlian;
   - Integritas;
   - Kepemimpinan;
   - Pengalaman;
   - Jujur;
   - Perilaku yang baik; dan
   - Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

3. Persyaratan Lainnya yaitu:
   - Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   - Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat

Based on the Board of Director (BOD) Guidelines, the criteria that must be met by the BOD upon appointment during their tenure include:

1. Formal Requirements, namely:
   - an individual;
   - Able to carry out legal actions;
   - Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment;
   - Never been a member of the Board of Directors and a member of the Board of Commissioners / Supervisory Board who was found guilty of causing an SOE, Subsidiary and / or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment; and
   - Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to State finances, SOEs, subsidiaries, other business entities and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.

2. Material requirements, namely:
   - Expertise;
   - Integrity;
   - Leadership;
   - Experience;
   - Honesty;
   - Good behavior; and
   - High dedication to advance and develop the Company.

3. Other Requirements, namely:
   - Not an administrator of a political party, candidate for legislative members, and/or legislative members in the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Regional Representative Council, and Regency / City Regional Representative Council;
   - Not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head, including acting head/deputy regional head;
   - Not serving as a member of the Board of Directors of an SOE or Subsidiary concerned for 2 (two) periods;

kepala/wakil kepala daerah;
- Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap sebagai jabatan anggota Direksi;
- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pemenuhan persyaratan di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perusahaan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan. Apabila calon Direksi yang baru diangkat diketahui tidak memenuhi persyaratan maka:

1. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan;

2. Pengangkatan calon Direksi tersebut batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui bahwa pengangkatan anggota Direksi tersebut tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan di dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Apabila anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut telah melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan sebelum pembatalan pengangkatan, maka perbuatan hukum yang dilakukan tersebut tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perusahaan; dan

5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan setelah pembatalan pengangkatan anggota

- Not currently serving as an official at a ministry/agency, member of the Board of Commissioners/Supervisory Board at another SOE, member of the Board of Directors at another SOE, member of the Board of Directors at a subsidiary and/or other business entity;
- Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrently held as a member of the Board of Directors;
- Dedicated and devote full time to their duties, which is stated in a statement from the person concerned;
- Physically and mentally healthy, i.e. not suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and
- Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have carried out the obligation to pay taxes for the last 2 (two) years.

Fulfillment of the above requirements must be contained in a statement letter signed by the prospective member of the Board of Directors and the letter is submitted to the Company. The statement letter shall be scrutinized and documented by the Company. If the newly appointed candidate for the Board of Directors is found not to fulfill the requirements then:

4. The Company must hold a GMS to replace members of the Board of Directors who do not meet the requirements;

5. The appointment of the candidate for the Board of Directors shall be null and void from the time when the other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners become aware of the non-fulfillment of the requirements, based on valid evidence, and the member of the Board of Directors concerned shall be notified in writing with due observance of the prevailing laws and regulations;

6. By no later than 2 (two) business days after it is known that the appointment of the member of the Board of Directors does not meet the requirements, the other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners must announce the cancellation of the appointment of the member of the Board of Directors concerned in the announcement media with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, and by no later than 7 (seven) business days notify the Minister in the field of Law and Human Rights to be recorded in accordance with the laws and regulations;

7. If the member of the Board of Directors who does not meet the requirements has performed legal acts on behalf of the Company prior to the cancellation of the appointment, then the legal acts performed remain binding and become the responsibility of the Company; and

8. Legal acts performed for and on behalf of the Company after the cancellation of the appointment of the member of the Board of Directors who does not meet the requirements are invalid and become the

Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

personal responsibility of the member of the Board of Directors concerned.

Prosedur Pengangkatan serta Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara Direksi

Procedures for the Appointment, Resignation and Temporary Dismissal of Directors

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi wajib diselenggarakan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi yang diangkat memiliki 1 (satu) periode yang paling lama 5 (lima) tahun masa jabatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Demikian pula sebelum jabatan berakhir, anggota Direksi dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perusahaan. Dalam kasus pemberhentian anggota Direksi, wajib disertai dengan alasan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri, dan keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan membela diri.

The Board of Directors appointment and dismissal procedure must be performed through the GMS in accordance with the Articles of Association of the Company by considering recommendations from the Board of Commissioners. The appointed Board of Directors member has 1 (one) term of office at a maximum of 5 (five) years that ends in the closing of the fifth Annual GMS since the appointment. After the term of office ends, the Board of Directors members can be reappointed according to the GMS resolution. Similarly, before the term ends, the Board of Directors members may resign by submitting a written notice regarding the matter to the Company. In the event of the Board of Directors members' dismissal, the dismissal reason, opportunity to defend themselves, and dismissal resolution must be included after the said member defends themself.

Sementara itu, prosedur pemberhentian sementara Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris setiap waktu apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. Selanjutnya, pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan dari pemberhentian. Selain itu, RUPS Luar Biasa perlu diselenggarakan untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula. Sedangkan, anggota Direksi yang diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut guna membela diri.

Meanwhile, the Board of Directors temporary dismissal procedure is conducted through Board of Commissioners meetings that can be held at any time when a Board of Directors member acts against the Articles of Association and prevailing laws and regulations, neglects their obligations, or there is an urgent reason for the Company's interest. Furthermore, the temporary dismissal must be notified to the person concerned with the reason for their dismissal. In addition, the Company needs to hold an Extraordinary GMS to decide whether the said member will be permanently terminated or return to their original position. The temporary dismissed Board of Directors member shall be given the opportunity to attend the Extraordinary GMS to defend themself.

Penyusunan Sistem Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

Preparation of the Nomination System for the Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris berwenang melakukan penyusunan dan pengawasan sistem nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berasal dari internal Perusahaan serta sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi atas dasar aspirasi Pemegang Saham Mayoritas, dengan kegiatan:

1. Analisis sistem nominasi yang berlaku di Perusahaan.
2. Pembandingan dengan perusahaan sejenis lainnya.

Komite Audit bertanggung jawab membantu pelaksanaan penyusunan sistem nominasi. Hasil penyusunan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas di tingkat Dewan Komisaris.

Adapun skema proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara adalah:

The Board of Commissioners has the authority to prepare and supervise the nomination system for the Board of Commissioners and Board of Directors candidates from the Company as well as the remuneration system for the Board of Commissioners and Board of Directors based on the Major Shareholders aspirations, with the following activities:

1. Analysis of the nomination system applied in the Company;
2. Comparison with other similar companies.

The Audit Committee are responsible for assisting the preparation of nomination system. The preparation results are submitted to the Board of Commissioners to be discussed at the Board of Commissioners level.

The nomination process scheme for the Board of Commissioners and/or Board of Directors members referring to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises are:

Dewan Komisaris menerima hasil *talent pool* dari Direksi, antara lain berupa *curriculum vitae* dan hasil uji kepatutan dan kelayakan dari lembaga profesional yang telah ditunjuk untuk melakukan *fit and proper test* sesuai ketentuan yang berlaku.

The Board of Commissioners receives the talent pool compilation from the Board of Directors, including the resume and the fit and proper test results from an appointed professional institution to carry out the fit and proper test following the applicable regulations.

Dewan Komisaris melakukan uji kepatuhan dan kelayakan dari lembaga profesional yang telah ditunjuk untuk melakukan uji fit and proper test sesuai ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Direksi.

The Board of Commissioners performs a fit and proper test from an appointed professional institution to carry out the fit and proper test following the applicable regulations on the requirements and procedures for appointing Board of Directors members.

Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas pedoman dan proses penilaian dan uji kepatuhan dan kelayakan bakal calon anggota Direksi, serta kajian atas penilaian yang disampaikan.

The Board of Commissioners reviews the assessment guidelines and process as well as the fit and proper test for the Board of Directors candidates, as well as reviewing the submitted assessments.

Penunjukan lembaga profesional yang akan melakukan uji kepatuhan dan kelayakan dilakukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi melalui koordinasi dengan Dewan Komisaris.

The appointment of a professional institution to carry out the fit and proper test is conducted by the Board of Commissioners or by the Board of Directors in coordination with the Board of Commissioners

Dewan Komisaris memberikan pendapat tertulis mengenai calon anggota Direksi sewaktu-waktu apabila diminta oleh Pemegang Saham, termasuk penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan dari lembaga profesional.

The Board of Commissioners provides written opinions regarding the Board of Directors member candidates at any time if requested by the Shareholders, including submission of the fit and proper test results from a professional institution.

Pengangkatan seorang calon anggota Direksi wajib mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam No. PER-3/ MBU/03/2023 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

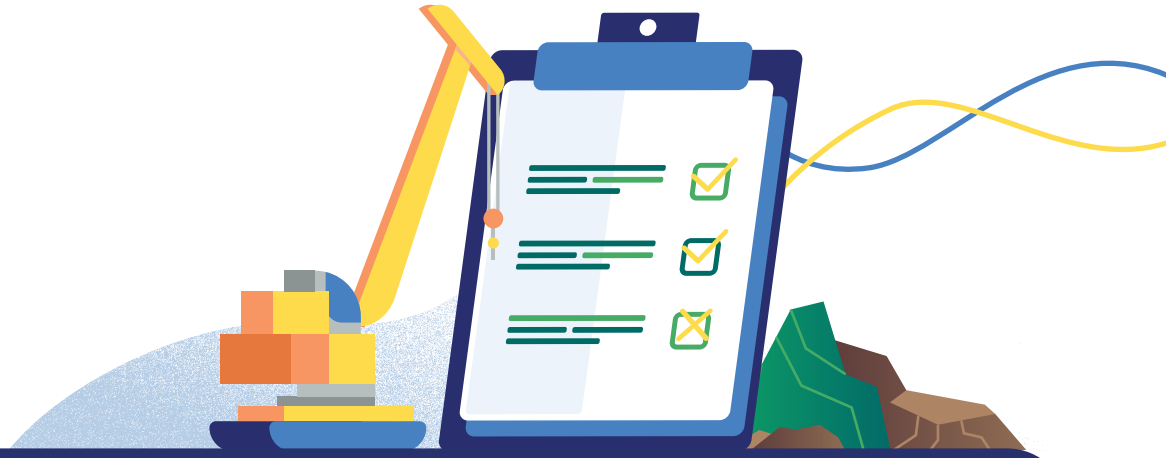
Adapun sumber bakal calon Direksi yang dapat mengisi posisi sebagai manajemen kunci Perusahaan sebagai berikut.

1. Anggota Kepala Divisi/Biro Entitas Induk yang sedang menjabat.
2. Anggota Direksi Entitas Anak yang sedang menjabat.
3. Pejabat internal Entitas Anak setingkat di bawah Direksi.
4. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan serendah-rendahnya 2 (dua) tingkat di bawah Direksi, atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Entitas Anak yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Direksi.
5. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

The appointment of a Board of Directors candidate must follow the fit and proper test process, which refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Candidates appointed as Board of Directors members must meet the formal requirements and other requirements stipulated in No. PER-3/MBU/03/2023 and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

The sources of potential Board of Directors candidates who can fill positions as key management of the Company are:

1. Current Head of Division/Bureau of the Parent Entity.
2. Current Board of Directors member of the Subsidiary.
3. Subsidiary's internal officers one level below the Board of Directors.
4. Relevant SOE internal officer that is at least two levels below the Board of Directors or a lower position following the related Subsidiary's level in the relevant SOE's organizational structure, which is determined by the Board of Directors.
5. Other sources who have good reputations, are relevant, and can be accounted for.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors' Performance

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2024 mengacu kepada Kontrak Manajemen yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2024 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 2 Januari 2024 dan adanya revisi RKAP Tahun Buku 2024 yang disahkan pada tanggal 15 Juli 2924. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara self assessment, yang kemudian dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui forum RUPS. Dewan Komisaris belum memiliki penilaian yang dilakukan secara individu.

Berikut disampaikan kriteria dan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2024.

The performance assessment of the Company's Board of Commissioners for 2024 refers to the Management Contract outlined in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for fiscal year 2024, which was approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors on January 2, 2024. The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted through self-assessment and subsequently reported to the Shareholders in the GMS forum. The Board of Commissioners has not yet implemented individual performance assessments.

Below are the criteria and results of the Board of Commissioners' performance assessment for 2024.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Criteria and Results of the Board of Commissioners' Performance Assessment

No. No.	Indikator Kinerja Performance Indocator	Deskripsi Description	Satuan Unit	Target Target	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Capaian KPI (%) KPI Achivement (%)
Aspek Proses Bisnis Internal (35%) | Internal Business Process Aspect (35%)							
1	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners	Rapat internal Dewan Komisaris bersama organ pendukung, dan dapat mengundang pejabat satu level di bawah Direksi Internal meeting of the Board of Commissioners with supporting organs, and may invite officials one level below the Board of Directors.	Kali Times	8	10,00	9	10,00
2	Pelaksanaan GCG Dewan Komisaris* Implementation of GCG by the Board of Commissioners*	Capaian nilai GCG aspek Dewan Komisaris berdasarkan Surat Edaran sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 (menggunakan nilai hasil Assessment Tahun 2022, sebelum peraturan dicabut) The GCG score achievement for the Board of Commissioners aspect is based on Circular Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 (using the assessment results from 2022, prior to the regulation being revoked).	Skor Score	90	15,00	93,08	15,00
3	Jangka Waktu Pemberian Keputusan atas Usulan Tindakan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris Timeframe for Decision-Making on Proposals Requiring Board of Commissioners' Approval	Rata-rata jangka waktu pemberian keputusan Dewan Komisaris setelah dokumen diterima secara lengkap (AD = 30 hari) The average timeframe for the Board of Commissioners to make a decision after receiving the complete documents (AD = 30 days).	Hari Day	30	10,00	30	10,00
Aspek Pengawasan dan Pemberian Arahan (55%) | Supervision and Guidance Aspects (55%)							
4	Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors	Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi Board of Commissioners meeting inviting the Board of Directors	Kali Times	8	10,00	10	10,00

5	Arahan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan dan Jalannya Perseroan Board of Commissioners' Directions on Company Policy and Operations	Arahan-arahan kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan sebagaimana kewajiban Dewan Komisaris yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Arahan berupa surat terbanyak 28 dan arahan didalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 8 kali. Instructions to the Board of Directors in the Letters/MoM of company management as part of the obligations of the Board of Commissioners as stated in the Articles of Association. There are 28 written instructions and 8 instructions delivered during the Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.	Surat/ MoM Ragab Letter/ MoM Ragab	8	15,00	25	15,00
6	Kunjungan Anggota Dewan Komisaris terhadap Kebijakan dan Jalannya Perseroan Visit of the Board of Commissioners Members to monitor project progress	Jumlah kunjungan Anggota Dewan Komisaris ke lokasi usaha, proyek dan/ atau investasia The number of visits by members of the Board of Commissioners to business locations, projects, and/or investments	Kali Times	2	10,00	2	10,00
7	Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Periodik Perseroan Presentation of the Board of Commissioners' Response to the Company's Periodic Report	Tanggapan Dewan Komisaris atas laporan triwulanan dan laporan tahunan (laporan triwulan IV termasuk dalam lingkup laporan tahunan) Response of the Board of Commissioners to the quarterly report and the annual report (the fourth quarter report is included in the scope of the annual report)	Surat Letter	3	10,00	3	10,00
8	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan kepada RUPS Submission of Supervisory Duty Report to the General Meeting of Shareholders (GMS)	Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku bersangkutan kepada RUPS Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners during the relevant fiscal year to the General Meeting of Shareholders (GMS).	Surat Letter	1	10,00	1	10,00
Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan (10%) | Learning and Growth Aspect (10%)							
9	Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Training Attended by Members of the Board of Commissioners	Jumlah diklat/seminar/benchmarking yang diikuti masing-masing Anggota Dewan Komisaris The number of trainings/seminars/ benchmarking sessions attended by each member of the Board of Commissioners	Surat Letter	3	10,00	5	10,00
Total Nilai | Total Score					100,00		100,00

Dari hasil penilaian di atas, Dewan Komisaris dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian serta telah mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan. Hasil penilaian kinerja tersebut dijadikan dasar dalam:

1. Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya.
2. Pemberian remunerasi, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
3. Pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Perbaikan tata kelola untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

Based on the assessment results above, the Board of Commissioners is deemed to have carried out its duties and responsibilities well in accordance with assessment procedures and criteria, and has achieved the targets set by the Company. The performance evaluation results serve as the basis for:

1. Granting full discharge of responsibilities.
2. Granting remuneration, both short-term and long-term.
3. Dismissing and/or reappointing the relevant members of the Board of Commissioners.
4. Improving governance to enhance the effectiveness of the Board of Commissioners' performance.

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Assessment of the Board of Directors

Penilaian kinerja Direksi Perusahaan tahun 2024 mengacu kepada Kontrak Manajemen yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2024 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 2 januari 2024 dan adanya revisi RKAP Tahun buku 2024 yang disahkan pada tanggal 15 Juli 2024. Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara self assessment melalui mekanisme penilaian internal Perusahaan, yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham melalui forum RUPS.

Berikut disampaikan kriteria dan hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2024.

The performance assessment of the Company's Board of Directors for the year 2024 refers to the Management Contract outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) document for the 2024 fiscal year, which was approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors on January 2, 2024, along with the revised RKAP for the 2024 fiscal year, approved on July 15, 2024. The performance assessment of the Board of Directors is conducted through self-assessment using the Company's internal evaluation mechanism, which is then reported to the Board of Commissioners and Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) forum.

Below are the criteria and results of the Board of Directors' performance assessment for 2024.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Criteria and Results of the Board of Directors' Performance Assessment

No. No.	Perspektif Perspektif	Sasaran Strategis Sasaran Strategis	KPI		Bobot (%) Bobot (%)	Skor Score	Skor x Bobot Skor x Bobot
1	Financial	1. Increase Profitability	1.1	EBITDA	9,0%	4	0,36
			1.2	ROIC >= WACC	9,0%	1	0,09
			1.3	Laba Divestasi	7,0%	1	0,07
		2. Strengthen Cashflow	2.1	Debt to EBITDA	9,0%	4	0,36
			2.2	Debt to Invested Capital	8,0%	4	0,32
			2.3	Cash Conversion Cycle	8,0%	4	0,32
			2.4	Net Cash Flow Available For Debt Services*	9,0%	1	0,09
		3. Increase Revenue	3.1	Revenue	5,0%	2	0,10
2	Customer	4. Maintain Stakeholder Satisfaction	4.1	Performance Index QHSE	2,0%	4	0,08
		5. Reinforce Market	5.1	Pemasaran Proyek Baru	2,0%	4	0,08

3	Internal Business Growth	6. Improve Operational Process	6.1	Proyek On Time On Budget	2,0%	1	0,02
			6.2	Zero Fatality Accident	2,0%	3	0,06
			6.3	Implementasi Program Kerja	4,0%	3	0,12
		7. Retrenchment Portfolio	7.1	Nilai Divestasi	8,0%	1	0,08
			7.2	Milestone Divestment	2,0%	3	0,06
		8. Enhance governance, Risk & Compliance	8.1	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	2,0%	3	0,06
			8.2	Success Rate Legal Settlement	3,0%	4	0,12
4	Learning & Growth	9. Improve Technology Management	9.1	Penguatan Implementasi ERP	4,0%	3	0,12
		10. Improve Talent & Organization Management	10.1	Produktivitas Karyawan	3,0%	1	0,03
			10.2	Tingkat Internalisasi Budaya Perusahaan	2,0%	4	0,08
Total					100%		2,71

Jenis KPI Types of KPI		**KPI** Key Performance Indicator	**Formula** Formula	**Bobot (%)** Bobot (%)	**Target 2024 (Sesuai RKAP)** 2024 Target (According to RKAP)	
					Skor Score	**Nilai** Value
KPI KORPORAT (Full Cascade)	1	EBITDA	= Laba Kotor + Laba JO - Biaya Usaha + Beban Depresiasi & Amortisasi + Laba (Rugi) Afiliasi + Laba (Rugi) Beda Kurs = Gross Profit + JO Profit - Operating Expenses + Depreciation & Amortization Expense + Profit (Loss) from Affiliates + Foreign Exchange Gain (Loss)	9,0%	4	0,36
	2	Debt to EBITDA	Total Debt (Interest Bearing)/ EBITDA	9,0%	4	0,36
	3	Revenue	= Nilai Revenue = Revenue Value	5,0%	2	0,10
	4	Proyek On Time On Budget	= ((Jumlah Proyek On Time (SPI) / Jumlah Proyek Aktif) x 50%)+((Jumlah Proyek On Budget (CPI) / Jumlah Proyek Aktif) x 50%) = ((Number of On-Time Projects (SPI) / Total Active Projects) x 50%) + ((Number of On-Budget Projects (CPI) / Total Active Projects) x 50%)	2,0%	1	0,02
	5	Zero Fatality accident		2,0%	4	0,08
	6	Produktivitas Karyawan Employee Productivity	= EBITDA / Jumlah pegawai (Organik PP , Organik AP & Non Organik AP) = EBITDA / Number of Employees (PP Organic, AP Organic & AP Non-Organic)	3,0%	2	0,06
	7	Tingkat Internalisasi Budaya Perusahaan Level of Corporate Culture Internalization	Hasil Survey Internalisasi Budaya Internalization of Corporate Culture Survey Results	2,0%	4	0,08

	8	Nilai Divestasi Divestment Value	Total Nilai Divestasi (Saham & Aset) Total Divestment Value (Shares & Assets)	10%	1	0,10
	9	Laba divestasi Salary and Honorarium	Nilai Divestasi - Nilai Buku Divestasi Divestment Value - Book Value of Divestment	10%	1	0,10
	10	Pengurangan Nilai Penyusutan Depreciation Reduction	Nilai Penyusutan Akibat Divestasi Depreciation Value Due to Divestment	5%	4	0,20
KPI KORPORAT (Partial Cascade)	11	Cash Conversion Cycle	= Inventory Turnover + Account Receivable Turnover - Account Payable Turnover = Inventory Turnover + Accounts Receivable Turnover - Accounts Payable Turnover	2,0%	4	0,08
	12	Net Cash Flow Available For Debt Services*	Saldo Cash Awal Tahun + Cash Flow From Operations + Cash Flow from Investing - Saldo Debt Beginning Cash Balance + Cash Flow from Operations + Cash Flow from Investing — Debt Balance	3,0%	1	0,03
	13	Performance Index QHSE	Skor Performance Index QHSE (7 Item QHSE) Performance Index QHSE Score (7 QHSE Items).	2,0%	4	0,08
	14	Laba Operasi Operating Profit	Jumlah laba operasi proyek (laba kotor reguler-pph final) Total project operating profit (regular gross profit — final income tax).	7,0%	2	0,14
	15	Rasio BPP Stand Alone Standalone COGS (Cost of Goods Sold) Ratio	BPP / Penjualan COGS / Revenue	7,0%	3	0,21
	16	Nett Cashflow Operasi	Cash In Operasi - Cash Out Operasi	6,0%	4	0,24
	17	Perolehan kontrak baru (standalone) Standalone New Contract Acquisition	Nilai pemasaran baru terhadap RKAPK tahun berjalan (NK-PPn) New marketing value against the current year's RKAPK (excl. VAT)	7%	1	0,07
	18	Order book burn rate (standalone)	Total penjualan / Order book Total sales / Order book	3%	3	0,09
	19	Akurasi Perhitungan Tender (standalone) Accuracy of Tender Calculation (Standalone)	Ratio PFC RAPK HP 10%/ Ratio RAPT kumulatif dari proyek yang telah melaksanakan HP 10% sampai dengan triwulan tersebut. PFC RAPK HP 10% Ratio / Cumulative RAPT Ratio from projects that have carried out 10% HP up to the respective quarter.	3%	2	0,06
	20	Success Rate Tender (Standalone)	Jumlah Tender yang dimenangkan/Jumlah tender yg telah diikuti & diumumkan (diluar dukungan tender) kumulatif sampai dengan triwulan tersebut. Number of Tenders Won / Number of Tenders Participated in and Announced (excluding tender support), cumulative up to the respective quarter.	3%	4	0,12
				9,0%		2,58

Jenis KPI Types of KPI	KPI Key Performance Indicator		Formula Formula	Bobot (%) Bobot (%)	Target 2024 (Sesuai RKAP) 2024 Target (According to RKAP)	
					Skor Score	Nilai Value
KPI KORPORAT	1	ROIC >=WACC	0	9%	1,00	0,09
	2	Debt to EBITDA	Total Debt (Interest Bearing)/ EBITDA	9%	4,00	0,36
	3	Debt to Invested Capital	= Total Debt (Interest Bearing) / (Total Debt (Interest Bearing) + equity)	8%	4,00	0,32
	4	Cash Conversion Cycle	= Inventory Turnover + Account Receivable Turnover - Account Payable Turnover	4%		-
	5	Net Cash Flow Available For Debt Services*	Saldo Cash Awal Tahun + Cash Flow From Operations + Cash Flow from Investing - Saldo Debt) ERP Implementation Score	4%	1,00	0,04
	6	Penguatan Implementasi ERP Strengthening ERP Implementation	Skor Implementasi ERP = EBITDA / Number of Employees (PP Organic, AP Organic & AP Non-Organic)	4%	4,00	0,16
	7	Blended cost of fund (konsolidasi)	Rata-rata tertimbang dari beban bunga atas realisasi pinjaman Weighted average of interest expenses on loan realizations.	12%	4,00	0,48
KPI UNIT SPESIFIK	8	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (konsolidasi)	EBITDA / (beban bunga thutang jangka panjang jatuh tempo) *Mengikuti angka RKAP EBITDA / (interest expense on maturing long-term debt) *Following RKAP figures.	12%	4,00	0,48
	9	Nett cashflow operasi (konsolidasi)	Cash in operasi - cash out operasi	12%	4,00	0,48
	10	CRTO (konsolidasi)	(Total WIP/Penjualan) x 365 hari (Total WIP / Sales) × 365 days	10%	1,00	0,10
	11	HC Readiness	Nilai HC Readiness Unit HC Readiness Unit Value	3%	3,00	0,09
	12	Rasio Biaya Usaha Terhadap RKAPK Biaya Usaha Masing-Masing Unit Operating Expense Ratio to the RKAPK Operating Expenses of Each Unit	(Realisasi biaya usaha unit (kendali HCM/ RKAPK biaya usaha unit)x100% (Actual unit operating costs (controlled by HCM/ RKAPK unit operating costs)) x 100%	5,0%	4,00	0,20
	13	Pemenuhan kompetensi karyawan Employee competency fulfillment	Jumlah skor aspek kompetensi pada tingkat medium - medium high Total score of competencies at the medium - medium high level.	5,0%	4,00	0,20
	14	Produktivitas Karyawan Produktivitas Karyawan	= EBITDA / Jumlah pegawai (Organik PP, Organik AP & Non Organik AP) = EBITDA / Number of employees (Organic PP, Organic AP & Non-Organic AP)	3%	2,00	0,06
				100%	1	3,06

Dari hasil penilaian di atas, Direksi dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian serta telah mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan. Hasil penilaian kinerja tersebut dijadikan dasar dalam:

1. Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya.
2. Pemberian remunerasi, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
3. Pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Perbaikan tata kelola untuk meningkatkan efektivitas kinerja Direksi.

Based on the above assessment results, the Board of Directors has been evaluated to have carried out its duties and responsibilities properly in accordance with procedures and assessment criteria, as well as achieving the targets set by the Company. The performance evaluation results serve as the basis for:

1. Granting full discharge of responsibilities.
2. Providing remuneration, both short-term and long-term.
3. Dismissing and/or reappointing the relevant members of the Board of Directors.
4. Improving governance to enhance the effectiveness of the Board of Directors' performance.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Dasar Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Basis for Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

Penentuan prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No. 110/SK/PP/DIR/2023 tentang Penetapan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Anak Perusahaan Utama dan Non Utama Tahun 2023.

The determination of procedures, basis for establishment, structure, and amount of remuneration for each member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Board of Directors' Decree of PT PP (Persero) Tbk No. 110/SK/PP/DIR/2023 concerning the Determination of Remuneration for the Board of Directors & Board of Commissioners of Primary and Non-Primary Subsidiaries for the Year 2023.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi
Remuneration Proposal and Determination Procedure

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Komisaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Pemegang Saham Mayoritas dari Entitas Induk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners and Board of Directors remuneration determination is conducted by the President Commissioner. This is in accordance with the resolution of the Majority Shareholders of the Parent Entity by considering the Board of Commissioners' recommendations.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Adapun struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

The remuneration structure and components for the Board of Commissioners and Board of Directors are presented as follows:

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji dan Honorarium Salary and Honorarium	1. Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur. 2. Perhitungan gaji anggota Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama. 1. The calculation of the President Commissioner's honorarium is 45% of the President Director's salary. 2. The calculation of the Commissioner's honorarium is 90% of the honorarium for the President Commissioner.	1. Gaji Direktur Utama diberikan dengan perhitungan grade sebagaimana tertuang dalam pedoman internal entitas induk, PT PP (Persero) Tbk. Gaji Direktur Utama juga menjadi perhitungan dasar bagi besaran honorarium Komisaris dan gaji Direksi lainnya. 2. Direktur: diberikan sebesar 85% dari gaji Direktur Utama 1. The President Director's salary is calculated using a grade as stated in the internal guidelines of the parent entity, PT PP (Persero) Tbk. The President Director's salary is also the basic calculation for the honorarium of Commissioners and other Directors' salaries. 2. Director: the salary is 85% of the President Director's salary.

Tunjangan Allowance	1. Tunjangan transportasi dibayarkan 20% dari honorarium. 1. Transportation allowance: 20% of the honorarium.	1. Tunjangan Posisi dan Tunjangan Jabatan: dibayarkan dengan besaran berdasarkan grade sebagaimana tertuang dalam pedoman internal entitas induk, PT PP (Persero) Tbk. 2. Tunjangan Perumahan: dibayarkan 40% dari gaji, diberikan maksimal senilai Rp27.500.000. 3. Tunjangan Operasional: sebesar tunjangan variabel sesuai job grade (termasuk transportasi, BBM dan Komunikasi) 1. Position Allowance: paid at a rate based on grade as stated in the internal guidelines of the parent entity, PT PP (Persero) Tbk. 2. Housing Allowance: 40% of salary, given a maximum amount of Rp27,500,000. 3. Operational Allowance: equal to variable allowance according to job grade (including transportation, fuel, and communications).
Tantiem Bonus	Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan, yang penentuan jumlahnya dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris setelah mendapat rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi. The Company may provide bonuses to Boards of Commissioners and Directors members based on a GMS resolution validating the annual report, of which authority to define the amount is delegated to the Board of Commissioners after receiving a recommendation from the Nomination and Remuneration Function.	

Selain struktur dan komponen tersebut, Perusahaan tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya. Perusahaan juga tidak memiliki kebijakan opsi saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Apart from the abovementioned structures and components, the Company does not provide other forms of remuneration. The Company also has no share option policy for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Kebijakan Dasar Terkait Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Basic Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Determination, and the Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Determination in 2024

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja, pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor yang lain yang relevan, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners' remuneration is determined by considering several factors such as performance, asset income, inflation rate, the Company's financial condition and capability, and other relevant factors, and does not conflict with prevailing laws and regulations.

Perhitungan Besaran Gaji dan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi

Calculation of the Amount of Salary and Honorarium for the Board of Commissioners and Directors

Direktur Utama	:	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh entitas induk, PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan)
President Director	:	100% (determined using internal guidelines set by the parent entity, PT PP (Persero) Tbk as the Company's Major/Controlling Shareholder)
Direksi Lainnya	:	Sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama
Other Directors	:	85% of the President Director's salary
Komisaris Utama	:	Sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama
President Commissioner	:	45% of the President Director's salary
Komisaris Lainnya	:	Sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama
Other Commissioners	:	90% of the President Commissioner's Honorarium

Sesuai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, terkait dengan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2023, pada mata acara ke-3 pemegang saham memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk tahun buku 2023 bagi Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk tahun buku 2023 bagi Direksi.

Menindaklanjuti surat dari Pemegang Saham Mayoritas no. 111/EXT/PP/DSH/2024 perihal Tanggapan Terkait Permohonan Arahan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023, Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun 2024 bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Presisi Tbk telah menetapkan besaran tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta menetapkan besarnya gaji/ honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

In accordance with the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for fiscal year 2023, held on June 5, 2024, regarding remuneration (salary/honorarium, facilities, and benefits) for fiscal year 2024, as well as performance incentives/bonuses/special incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for fiscal year 2023, the shareholders decided in the third agenda item:

1. To grant authority and power to the Majority Shareholder to determine the amount of remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for fiscal year 2024, as well as performance incentives/bonuses/special incentives for fiscal year 2023 for the Board of Commissioners.
2. To grant authority and power to the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the Majority Shareholder, to determine the amount of remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for fiscal year 2024, as well as performance incentives/bonuses/special incentives for fiscal year 2023 for the Board of Directors.

In response to the letter from the Majority Shareholder No. 111/EXT/PP/DSH/2024 regarding the Response to the Request for Direction on the Determination of the Use of Net Profit for the 2023 Fiscal Year, Performance Bonus/Special Incentive for the 2023 Fiscal Year, and Remuneration for 2024 for the Board of Commissioners and Directors, PT PP Presisi Tbk has determined the amount of bonuses (tantiem) for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as set the amount of salary/honorarium, allowances, and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 fiscal year.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Transparency of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors in 2024

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:

Information on the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors based on the decree above is as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Nur Rochmad **Komisaris Utama/Komisaris Independen** | President Commissioner/Independent Commissioner				
Masa Menjabat di Tahun 2024 | Serving Period in 2024			**1 tahun penuh** | 1 full year	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	❌	❌	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	❌	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			454.003.194	

Albert Simangunsong Komisaris | Commissioner				
Masa Menjabat di Tahun 2024 | Serving Period in 2024			**1 tahun penuh** | 1 full year	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	❌	❌	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	❌	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			408.602.880	

Muhammad Zahid Komisaris | Commissioner				
Masa Menjabat di Tahun 2024 | Serving Period in 2024			**1 tahun penuh** | 1 full year	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	❌	❌	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	❌	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			408.602.880	

Indra Jaya Rajagukguk Komisaris Independen | Independent Commissioner				
Masa Menjabat di Tahun 2024 | Serving Period in 2024			**Januari s.d Mei** | January to May	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	❌	❌	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	❌	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			175.730.190	

Arzan Direktur Utama | President Director				
Masa Menjabat di Tahun 2024 Serving Period in 2024			**Juni s.d Desember** June to December	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	✅	✅	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	✅	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			512.081.024	

I Gede Upeksa Negara Direktur Utama | President Director				
Masa Menjabat di Tahun 2024 Serving Period in 2024			**Januari s.d April** January to April	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	✅	✅	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	✅	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			814.130.380	

Rebimun Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi | Director of Business Management & Operations				
Masa Menjabat di Tahun 2024 Serving Period in 2024			**1 tahun penuh** 1 full year	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	✅	✅	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	✅	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			1.453.663.284	

Mohammad Arif Iswayudi Direktur Keuangan & HCM | Director of Finance & HCM				
Masa Menjabat di Tahun 2024 Serving Period in 2024			**Januari s.d Mei** January to May	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	✅	✅	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	✅	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			1.453.663.284	

Yudi Setiawan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM | Director of Business Planning and HCM				
Masa Menjabat di Tahun 2024 Serving Period in 2024			**Januari s.d Mei** January to May	
Gaji atau Honorarium per Bulan Salary or Honorarium per Month	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Kendaraan / Transportasi Vehicle / Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-employment insurance
✅	✅	✅	✅	✅
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	Tantiem / Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentive
✅	✅	✅	✅	❌
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2024 (Rp) Total Remuneration Paid in 2024 (Rp)			668.900.201	
Subjumlah Subtotal			4.902.438.173	
Jumlah Total			**6.349.377.317**	

Rasio Gaji

Salary Ratio

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan sebagai berikut.

Information on the salary ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees is as follows:

Uraian Description	**2024**	**2023**
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee Level to Lowest Employee Level	12 : 1	9,0 : 1
Direksi Tertinggi terhadap Direksi Terendah Highest Director Level to Lowest Director Level	1,2 : 1	2,0 : 1
Dewan Komisaris Tertinggi terhadap Dewan Komisaris Terendah Highest Commissioner Level to Lowest Commissioner Level	1,1 : 1	1,1 : 1
Direksi Tertinggi terhadap Dewan Komisaris Tertinggi Highest Director Level to Highest Commissioner Level	2,2 : 1	2,0 : 1
Direksi Tertinggi terhadap Karyawan Tertinggi Highest Director Level to Highest Employee Level	1,7 : 1	2,5 : 1

Hubungan antara Remunerasi dan Kinerja Perusahaan

Correlation between Remuneration and the Company's Performance

Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dikaitkan dengan:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri yang sama dan sejenis dengan kegiatan usaha Perusahaan dan yang sama skala industrinya dengan Perusahaan.
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.
3. Target kinerja dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variablD.
5. Kesesuaian peraturan dan perundang-undangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan.
6. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perusahaan.

The determination of the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration amount is based on each member's duties, responsibilities, and authorities, which correlates with:

1. Remuneration that applies to the same and similar industry with the Company's business and has the same industry scale as the Company.
2. The Boards of Commissioners and Boards of Directors' duties, responsibilities, and authorities related to the achievement of the Company's goals and performance.
3. Performance targets and performance of every Board of Commissioners and Board of Directors member.
4. The balance between fixed and variable allowances.
5. Conformity with laws and regulations in taxation and employment.
6. The principles of transparency, internal balance, and competitiveness with other companies.

Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja serta Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Long-Term Performance-Based Compensation Policy and Employee and/or Management Stock Option Plan

Hingga akhir tahun 2024 Perusahaan tidak melaksanakan Program Opsi Kepemilikan Saham baik oleh Manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) maupun oleh Karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP). Perusahaan juga belum memiliki kompensasi jangka panjang berbasis kinerja yang diberikan baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan.

Until the end of 2024, the Company does not carry out any Stock Option Programs, neither for the Management (Management Stock Option Program or MSOP) nor for Employees (Employee Stock Option Program or ESOP). The Company also has no long-term performance-based compensation to the Board of Commissioners, Board of Directors, or employees.

Pengungkapan Transaksi dan Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of the Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada Sekretaris Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari sejak terjadinya transaksi.

Di sepanjang tahun 2024, tidak terdapat transaksi saham PPRE oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The share ownership of members of the Board of Commissioners and Directors of the Company and other companies is consistently disclosed periodically through the share ownership list of the Board of Commissioners and Directors. All members of the Board of Commissioners and Directors are required to disclose the transactions of buying and selling securities to the Corporate Secretary of the Financial Services Authority (OJK) no later than 10 days after the transaction occurs.

Throughout 2024, there were no transactions of PPRE shares by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Komite Audit
Audit Committee

Perusahaan memiliki Komite Audit yang berperan dalam membantu efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap tugas Direksi dalam mengelola Perusahaan, khususnya pengawasan dalam hal pengendalian internal serta pelaporan keuangan dan manajemen.

The Company has an Audit Committee to assist the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight function on the Board of Directors' duties in managing the Company, particularly in terms of internal control as well as financial and management reporting.

Pedoman Komite Audit

Audit Committee Charter

Dalam membantu tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 26 September 2023 yang berisi panduan kerja Komite Audit termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan rapat Komite Audit.

In assisting the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities, the Audit Committee is equipped with an Audit Committee Charter signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on September 26, 2023. It contains work guidelines for the Audit Committee, including duties, responsibilities, and meeting implementation.

Kriteria Penentuan Komite Audit

Audit Committee Appointment Criteria

Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi serta kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang sehat. Anggota Komite Audit Perusahaan pada saat diangkat dan menjabat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Mematuhi Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan Perusahaan.
4. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa

All Committee members shall have high commitment and integrity as well as the ability and expertise in their work field to support the implementation of sound governance. Audit Committee Members must meet the following requirements at appointment and in office.

1. Have high integrity, ability, knowledge, and experience following their field of work and are capable of communicating properly.
2. Understand the financial statements, corporate business, particularly those related to the Company's services or business activities, audit process, risk management, laws and regulations in the capital market sector as well as other related laws and regulations.
3. Comply with the Audit Committee Code of Conduct established by the Company;
4. Have at least one member with educational background and expertise in accounting and finance;
5. Willing to improve their competencies continuously through education and training;
6. Not a person working in a public accounting firm, legal consulting firm, public appraisal service office, or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last six months;
7. Not a person who works or has the authority and

penilai dan/atau jasa konsultan lain kepada perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months, except for an Independent Commissioner;
8. Do not have direct or indirect shares in the Company.
9. In the event that an Audit Committee member acquires Company shares, directly or indirectly, as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of six months after the shares were acquired.
10. Not affiliated with Board of Commissioners members, Board of Directors members, or Major Shareholders.
11. Do not have business relationships, directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Ketentuan Masa Jabatan

Term of Office Provision

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a two-year term of office without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Susunan dan Komposisi Komite Audit Tahun 2024

Audit Committee Structure and Composition in 2024

Di tahun 2024 terdapat perubahan susunan Komite Audit, dengan kronologi perubahan dan susunan Komite Audit per 31 Desember 2024 dapat dilihat di bawah ini.

In 2024 there were changes in the composition of the Audit Committee, with the chronology of changes and the composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 can be seen below.

Kronologis Perubahan Susunan Komite Audit

Chronology of Changes in Audit Committee Composition

Periode 1 Januari s.d 21 Juni 2024 January 1 to June 21, 2024	**Periode 21 Juni s.d 31 Desember 2024** June 21 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
Nur Rochmad (Ketua / Komisaris Utama / Komisaris Independen) (Chairman / President Commissioner / Independent Commissioner)	Nur Rochmad (Ketua / Komisaris Utama / Komisaris Independen) (Chairman / President Commissioner / Independent Commissioner)	

Albert Simangunsong (Anggota / Komisaris) (Member / Commissioner)		**Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit, Dewan Komisaris memberhentikan dengan hormat Albert Simangunsong sebagai Anggota Komite Audit.** Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated June 21, 2024 regarding the Dismissal of Audit Committee Members, the Board of Commissioners honorably dismissed Albert Simangunsong as a Member of the Audit Committee.
Muhammad Zahid (Anggota / Komisaris) (Member / Commissioner)	Muhammad Zahid (Anggota / Komisaris) (Member / Commissioner)	
Tri Saripalupi Andayani (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	Tri Saripalupi Andayani (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	
Mubari (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	Mubari (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2024

Audit Committee Composition as of December 31, 2024

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode** Period
Nur Rochmad	Ketua / Komisaris Utama / Komisaris Independen Chairman / President Commissioner / Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/DEKOM/PPRE/2022 tanggal 25 April 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 007/SK/DEKOM/PPRE/2022 dated April 25, 2022	Mengikut masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	
Muhammad Zahid	Anggota Komisaris Member / Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 13 Juni 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 13, 2023	Mengikut masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	

Tri Saripalupi Andayani	Anggota / Pihak Independen Member / Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022	2022 s.C. 2025 2022 to 2025	Ke-2 2nd
Mubari	Anggota / Pihak Independen Member / Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022	2022 s.C. 2025 2022 to 2025	Ke-2 2nd

Nur Rochmad



Ketua Komite Audit/Komisaris Utama/Komisaris Independen

Chairman of the Audit Committee/President Commissioner/ Independent Commissioner

Data Pribadi | Personal Data

Profil Ketua Komite Audit Nur Rochmad dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile of the Chairman of the Audit Committee, Nur Rochmad, is available in the profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Muhammad Zahid



Anggota Komite Audit/Komisaris Independen

Member of the Audit Committee/Independent Commissioner

Data Pribadi | Personal Data

Profil Anggota Komite Audit Muhammad Zahid dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile of Audit Committee Member Muhammad Zahid can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Tri Saripalupi Andayani

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.C. 28 Mei 2025, Periode Ke-2

Audit Committee Member/Independent Party
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, Second Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 53 tahun
Kelahiran Surabaya, 12 April 1971
Domisili Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Indonesian citizen
53 years old
Born in Surabaya, April 12, 1971
Domiciled in Surabaya, East Java, Indonesia

Pendidikan | Education

Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Airlangga (2013)

Bachelor of Accounting from Airlangga University (2013)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

- Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (2023)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (2023)

- Certificate of Pension Funds General Management from the Indonesian Pension Fund Association (2023)
- Certificate of Pension Fund Risk Management from the Indonesian Pension Fund Association (2023)

Riwayat Profesi | Professional History

Berkiprah di entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, dan pihak berelasinya, yaitu Direktur Utama Dana Pensiun PT PP (Persero) Tbk (2023-sekarang); Direktur PT Gitanusa Sarana Niaga (2022-2023); *Senior Manager Head of Supply Chain Department* PT PP (Persero) Tbk (2017-2019); *Procurement Manager* PT PP (Persero) Tbk (2013-2016); *Account Payable Manager* PT PP (Persero) Tbk (2010-2013); dan *Account Manager* PT PP (Persero) Tbk (2006-2010).

Has been actively involved in the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, and its related parties, including serving as President Director of PT PP (Persero) Tbk's Pension Fund (2023-present); Director of PT Gitanusa Sarana Niaga (2022-2023); Senior Manager, Head of Supply Chain Department at PT PP (Persero) Tbk (2017-2019); Procurement Manager at PT PP (Persero) Tbk (2013-2016); Account Payable Manager at PT PP (Persero) Tbk (2010-2013); and Account Manager at PT PP (Persero) Tbk (2006-2010).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Direktur Utama Dana Pensiun PT PP (Persero) Tbk (2023-sekarang).

Within the Company: None.
Outside the Company: President Director of PT PP (Persero) Tbk Pension Fund (2023-present)

Hubungan Afiliasi | Affiliations

- Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.
- Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the major/controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.



Mubari

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2025, Periode Ke-2

Audit Committee Member/Independent Party
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, Second Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 50 tahun
Kelahiran Batang, 23 November 1974
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen
50 years old
Born in Batang, November 23, 1974
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan | Education

Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Bhayangkara Surabaya (2018)

Bachelor of Civil Engineering from Bhayangkara University Surabaya (2018)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Tidak ada.

None

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Berkiprah di entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, yaitu *Manajer Production Cost* (2017-2019); *Production Cost Officer* (2013-2017); *Procurement Officer* (2012-2013); *Cost Control Officer* (2012); *Purchasing Officer* (2011-2012); dan Staf *Site Engineering Manajer* Biaya (2010-2011).

Worked in the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, namely as Production Cost Manager (2017-2019); Production Cost Officer (2013-2017); Procurement Officer (2012-2013); Cost Control Officer (2012); Purchasing Officer (2011-2012); and Site Engineering Staff Cost Manager (2010-2011).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Within the Company: None.
Outside the Company: None.

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/ pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the major/ controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.

Independensi dan Hubungan Afiliasi Komite Audit

Audit Committee Independence and Affiliation

Seluruh anggota Komite audit telah memenuhi persyaratan independensi yang diuraikan sebagai berikut.

All Audit Committee members have met the following independence requirements.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Nur Rochmad	Muhammad Zahid	Tri Saripalupi Andayani	Mubari
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. A person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's operations in the last six months.	✅	✅	❌	❌
Mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan. Own shares, directly or indirectly, in the Company.	❌	✅	❌	❌

Mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Affiliated with the Boards of Commissioners or Board of Directors members or Major Shareholders of the Company.	❌	❌	❌	❌
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Have direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	❌	✅	❌	❌

✅ Ya
❌ Tidak

✅ Yes
❌ No

Pak Zahid mempunyai afiliasi dengan PT PP (Persero) Tbk, sekarang beliau juga menjabat sebagai SPV Divisi Keuangan dan Akutansi PT PP (Persero) Tbk.

Mr. Zahid has an affiliation with PT PP (Persero) Tbk, as he currently also serves as the SPV of the Finance and Accounting Division at PT PP (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit sebagai berikut.

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan kantor akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Biro Internal Audit dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Biro Internal Audit.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

The Audit Committee's duties and responsibilities based on the Audit Committee Charter are as follows.

1. Reviewing financial information to be released by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
2. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's activities.
3. Provide independent opinion in the event of dissenting opinion between the management and public accountant for the services provided.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of a public accounting firm based on independence, scope, and fees.
5. Reviewing the audit implementation by the Internal Audit Unit Bureau and monitoring the implementation of follow-up actions from the Internal Audit Unit Bureau findings by the Board of Directors.
6. Reviewing the risk management activities carried out by the Board of Directors.
7. Review and provide advice to the Board of Commissioners on potential conflicts of interest in the Company.
8. Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.
9. Reviewing the adequacy of audits conducted by public accountants to ensure that all important risks have been considered.

9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

10. Examine allegations of errors in the Board of Directors meeting resolutions or irregularities in implementing said resolutions.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Antar Komite Audit

Division of Duties and Responsibilities between Audit Committees

Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite Audit tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 21 Juni 2024. Uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

The division of duties and responsibilities of each Audit Committee member is outlined in the Board of Commissioners' Decree No. 008/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated June 21, 2024. The detailed description of the duties and responsibilities of each Audit Committee member is as follows:

No	Nama Name	Tugas Duties
1	• Nur Rochmad • Mubari • Tri Saripalupi Andayani	1. Koordinator Kegiatan Anggota Dewan Komisaris; 2. Kepatuhan dalam melaksanakan perundangan; 3. Penyelenggaraan hingga keputusan RUPST/RUPSLB; 4. Hubungan dengan Pemegang Saham dan stakeholders lainnya; 5. Kebijakan dan pelaksanaan Organisasi Perseroan; 6. Kebijakan dan pelaksanaan bidang operasional Perseroan; dan 7. Kebijakan dan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Coordinator of Board of Commissioners' Activities; 2. Compliance with Legal and Regulatory Requirements; 3. Implementation and Resolutions of AGMS/EGMS; 4. Relations with Shareholders and Other Stakeholders; 5. Policy and Implementation of Corporate Organization; 6. Policy and Implementation of the Company's Operational Activities; and 7. Policy and Implementation of KPI for the Board of Commissioners and Board of Directors
2	• Muhammad Zahid • Mubari • Tri Saripalupi Andayani	1. Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal); 2. Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; 3. Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan) 4. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; 5. Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan supply chain & ERP 6. Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perseroan; 7. Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; 8. Kebijakan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan peralatan; 9. Kebijakan dan penerapan QSHE (Mutu, K-3 & Lingkungan), Green Construction dan Sertifikasi; dan 10. Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan Investasi/Aksi korporasi.

		1. Policy and Monitoring of Audit Implementation (Internal and External); 2. Policy and Implementation of Risk Management; 3. Policy and Management of Human Resources (Development); 4. Policy and Implementation of Business Development and IT; 5. Policy and Implementation of Supply Chain & ERP Procurement; 6. Policy and Implementation of the Company's Financial Management; 7. Policy of Formulation and Monitoring of the Annual Budget Plan (RKA) and Long-Term Corporate Plan (RJPP); 8. Policy and Monitoring of Equipment Management Implementation 9. Policy and Implementation of QSHE (Quality, OHS & Environment), Green Construction, and Certification; and 10. Policy, Implementation, and Monitoring of Investment/Corporate Action Approvals

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Audit Committee Competency Development

Sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris, Anggota Komite Audit dapat mengikuti program pengembangan (Pendidikan atau Pelatihan) setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

In accordance with the Board of Commissioners' policy, Audit Committee Members may participate in development programs (Education or Training) at least once a year.

Komite Audit Audit Committee	**Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan** Types and Content of Education and Training	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Penyelenggara** Organizer
Nur Rochmad	Pelatihan Nur Rochmad dapat dilihat pada bagian Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Training attended by Nur Rochmad can be found in the Competency Development Program of the Board of Commissioners and Board of Directors section.		
Muhammad Zahid	Pelatihan Muhammad Zahid dapat dilihat pada bagian Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Training attended by Muhammad Zahid can be found in the Competency Development Program of the Board of Commissioners and Board of Directors section.		
Albert Simangunsong	Pelatihan Albert Simangunsong dapat dilihat pada bagian Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Training attended by Albert Simangunsong can be found in the Competency Development Program of the Board of Commissioners and Board of Directors section.		
Tri Saripalupi Andayani	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
	Implementasi Manajemen Risiko sesuai POJK No. 44/ POJK.05/2020 Implementation of Risk Management according to POJK No. 44/POJK.05/2020	Jakarta, 29 — 30 Mei 2024 Jakarta, May 29 — 30 2024	PT PP (Persero) Tbk

Tri Saripalupi Andayani	Risk Based Budgeting (RBB) — Anggaran Berbasis Resiko Risk Based Budgeting (RBB)	Online, 23 Oktober 2024 Online, October 23, 2024	DPS Consulting
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT PP Presisi Tbk
Mubari	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
	Pelatihan IFRS (International Financing Report Standarts) IFRS (International Financing Report Standards) Training	Jakarta, 4 September 2024 Jakarta, September 4, 2024	PT PP (Persero) Tbk
	Hospital Building Construction	Jakarta, 26 September 2024 Jakarta, September 26, 2024	PT PP (Persero) Tbk
	Digital Talent Series — Cyber Security Odyssey; Navigating Personal and Organizational Security in Digital Age	Jakarta, 2 November 2024 Jakarta, November 2, 2024	PT PP (Persero) Tbk
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT PP Presisi Tbk

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Penyelenggaraan rapat Komite Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit, di mana rapat tersebut dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Berikut rincian pelaksanaan rapat Komite Audit selama tahun 2024.

The holding of Audit Committee meetings is stipulated in the Audit Committee Charter, in which meetings are held at least once every three months and attended by more than half of the members. The Audit Committee meeting resolutions are taken based on deliberation for consensus. The following are details of Audit Committee meetings in 2024.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit Tahun 2024

Attendance Recapitulation of the Audit Committee in Audit Committee Meetings in 2024

Nama dan Jabatan Name of Position	**Jumlah Wajib Rapat** Number of Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Nur Rochmad (Ketua) (Chairman)	7	5	71,42
Albert Simangunsong (Anggota) (Member)	4	3	75,00
Muhammad Zahid (Anggota) (Member)	7	5	71,42
Tri Saripalupi Andayani (Anggota) (Member)	7	7	100,00
Mubari (Anggota) (Anggota)	7	6	85,71
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			80,71

*) Albert Simangunsong tidak lagi menjabat sejak 21 Juni 2024.

*) Albert Simangunsong no longer served since June 21, 2024.

Risalah Rapat Komite Audit dan Kehadiran Komite Audit

Audit Committee Meeting Minutes and Attendance

RAPAT KOMITE AUDIT #01

AUDIT COMMITTEE MEETING #01

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:

4 Januari 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 1

AGENDA RAPAT:

Pembahasan Realisasi Program Kerja Komite atas Tahun 2023

PESERTA RAPAT:

Komite Audit: Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
Komite Kepatuhan: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami
SeKom: Woro Endah Waraswati

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:

- Nur Rochmad tidak menghadiri rapat dikarenakan menghadiri meeting lain.
- Muhammad Zahid tidak menghadiri rapat dikarenakan menghadiri meeting lain.

MEETING DATE AND VENUE:

January 4, 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 1

MEETING AGENDA:

Discussion on the Realization of the Committee's Work Program for 2023

MEETING PARTICIPANTS:

Audit Committee: Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
Compliance Committee: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami
Secretary of the Board of Commissioners: Woro Endah Waraswati

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:

- Nur Rochmad was absent due to attending other meetings
- Muhammad Zahid was absent due to attending other meetings

RAPAT KOMITE AUDIT #02
AUDIT COMMITTEE MEETING #02

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
29 Januari 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 2

AGENDA RAPAT:
Pembahasan Korporat Risk Tahun 2024

PESERTA RAPAT:
Tim Manajemen Risiko: Mei Elsa Kembaren, Ayu Noviana Isman, Nathanael Parasian, Nila Yunieka
Komite Audit: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
January 29, 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 2

MEETING AGENDA:
Corporate Risk Discussion 2024

MEETING PARTICIPANTS:
Risk Management Team: Mei Elsa Kembaren, Ayu Noviana Isman, Nathanael Parasian, Nila Yunieka
Audit Committee: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE AUDIT #03
AUDIT COMMITTEE MEETING #03

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
26 Maret 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lantai 1

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Bulan Maret

PESERTA RAPAT:
Komite Audit: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
SeKom: Woro Endah Waraswati

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
March 26, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
Preparation for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors in March

MEETING PARTICIPANTS:
Audit Committee: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
Secretary of the Board of Commissioners: Woro Endah Waraswati

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE AUDIT #04
AUDIT COMMITTEE MEETING #04

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
22 April 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lantai 1

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan I 2024

PESERTA RAPAT:
Komite Audit: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
SeKom: Woro Endah Waraswati

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
April 22, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
Preparation for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors for Quarter I 2024

MEETING PARTICIPANTS:
Audit Committee: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
Secretary of the Board of Commissioners: Woro Endah Waraswati

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE AUDIT #05
AUDIT COMMITTEE MEETING #05

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
23 Juli 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lantai 1

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan II 2024

PESERTA RAPAT:
Komite Audit: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Tri Saripalupi Andayani
SeKom: Woro Endah Waraswati

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Mubari tidak menghadiri rapat dikarenakan sakit.

MEETING DATE AND VENUE:
July 23, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor

MEETING AGENDA:
Preparation for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors for Quarter II 2024

MEETING PARTICIPANTS:
Audit Committee: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Tri Saripalupi Andayani
Secretary of the Board of Commissioners: Woro Endah Waraswati

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
Mubari was absent due to sick

RAPAT KOMITE AUDIT #06
AUDIT COMMITTEE MEETING #06

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
25 Oktober 2024; Ruang Rapat Dekom — Plaza PP Lt.3

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan III 2024

PESERTA RAPAT:
Komite Audit: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
SeKom: Woro Endah Waraswati

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada

MEETING DATE AND VENUE:
October 25, 2024; Dekom Meeting Room — Plaza PP Lt. 3

MEETING AGENDA:
Preparation for Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors for Quarter III 2024

MEETING PARTICIPANTS:
Audit Committee: Nur Rochmad, Muhammad Zahid, Albert Simangunsong, Mubari, Tri Saripalupi Andayani
Secretary of the Board of Commissioners: Woro Endah Waraswati

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE AUDIT #07
AUDIT COMMITTEE MEETING #07

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
25 Oktober 2024; Ruang Rapat Dekom — Plaza PP Lt.3

AGENDA RAPAT:
Pembahasan Koordinasi Manajemen Resiko RKAP Tahun 2025

PESERTA RAPAT:
Komite Audit: Mubari, Tri Saripalupi Andayani
Komite Kepatuhan: Bari Srisoenami
Tim Manrisk: Ayu Noviana Isman, Nila Yunieka dan Yusdanu
SeKom: Woro Endah Waraswati

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada

MEETING DATE AND VENUE:
October 25, 2024; Dekom Meeting Room — Plaza PP Lt. 3

MEETING AGENDA:
Discussion of Risk Management Coordination of RKAP 2025

MEETING PARTICIPANTS:
Audit Committee: Mubari, Tri Saripalupi Andayani
Compliance Committee: Bari Srisoenami
Manrisk Team: Ayu Noviana Isman, Nila Yunieka and Yusdanu
Secretary of the Board of Commissioners: Woro Endah Waraswati

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

Program Kerja dan Realisasi Tugas serta Tanggung Jawab Komite Audit

Work Program and Realization of Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Di tahun 2024, Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya melalui kebijakan dan program kerja sebagai berikut.

In 2024, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities through the following policies and work programs.

No	**Kebijakan** Kebijakan	**Program Kerja** Program Kerja	**Kegiatan/Realisasi** Kegiatan/Realisasi
1	Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen	1. Melaksanakan koordinasi internal Komite Audit, mengikuti Rapat Dewan Komisaris, 2. Meneliti kelengkapan data atas aksi korporasi yang diajukan Direksi 3. Menyampaikan usulan Rencana Kerja/RKAP Dekom 1. Melaksanakan koordinasi internal Komite Audit, mengikuti Rapat Dewan Komisaris, 2. Meneliti kelengkapan data atas aksi korporasi yang diajukan Direksi 3. Menyampaikan usulan Rencana Kerja/RKAP Dekom	Terealisir mengikuti & menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris selama tahun 2024, pada tanggal: 1. 23 Januari 2. 24 Januari 3. 26 Maret 4. 23 April (2 kali Rapat 5. 23 Juli (2 kali Rapat 6. 24 October (2 kali Rapat) yang dilanjutkan mengikuti Rapat bersama Dekom dan Direksi. Bekerja sama dengan Komite Kepatuhan, memastikan bahwa Aksi Korporasi telah dijalankan sesuai Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar dan dan atau threshold PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas, selama tahun 2024 terealisasi - lihat no 12 Telah dilaksanakan, dan disampaikan ke Perseroan sesuai surat Dewan Komisaris: No. 107/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal: Penyerahan Rencana Anggaran Biaya Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2025 No.111/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal: Penyerahan Program Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2025 Realized participation in and preparation of materials for the Board of Commissioners' Coordination Meetings throughout 2024, on the following dates: 1. January 23 2. January 24 3. March 26 4. April 23 (two meetings) 5. July 23 (two meetings) 6. October 24 (two meetings) 7. followed by Joint Meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors. In collaboration with the Compliance Committee, ensured that Corporate Actions were carried out in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or the thresholds set by PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder, with implementation realized in 2024 — refer to point 12. Has been carried out and submitted to the Company in accordance with the Board of Commissioners' letters: No. 107/EXT/KOM/PPRE/2024 dated October 1, 2024, regarding the Submission of the Board of Commissioners' Budget Plan of PT PP Presisi Tbk for the Year 2025 No. 111/EXT/KOM/PPRE/2024 dated October 9, 2024, regarding the Submission of the Board of Commissioners' Work Program of PT PP Presisi Tbk for the Year 2025

2	Pengendalian dan Kepatuhan Program Kerja Perusahaan Pengendalian dan Kepatuhan Program Kerja Perusahaan	1. Review terhadap hasil pelaksanaan dan audit tahunan. 2. Review Laporan Triwulanan realisasi pelaksanaan Program Kerja Perusahaan. • Evaluasi Kinerja: • Evaluasi kinerja investasi dan program strategis perusahaan. 1. Review terhadap hasil pelaksanaan dan audit tahunan. 2. Review Laporan Triwulanan realisasi pelaksanaan Program Kerja Perusahaan. • Evaluasi Kinerja: • Evaluasi kinerja investasi dan program strategis perusahaan.	Evaluasi hasil LHP KAP Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan surat No. 005/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 5 April 2024 Review laporan Triwulanan dan realisasi pelaksanaan Program Kerja Perusahaan dilaksanakan didalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris setiap Triwulanan diantaranya: 1. Minit Rakom Triwulan I 2024 2. Minit Rakom Triwulan II 2024 3. Minit Rakom Triwulan III 2024 dan surat telaah Komite No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 2 May 2024 perihal Review Laporan Keuangan Audited PT PP Presisi Tbk Tahun 2023; Evaluasi hasil LHP KAP Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan surat No. 005/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 5 April 2024 Review laporan Triwulanan dan realisasi pelaksanaan Program Kerja Perusahaan dilaksanakan didalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris setiap Triwulanan diantaranya: 1. Minit Rakom Triwulan I 2024 2. Minit Rakom Triwulan II 2024 3. Minit Rakom Triwulan III 2024 dan surat telaah Komite No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 2 May 2024 perihal Review Laporan Keuangan Audited PT PP Presisi Tbk Tahun 2023;
3	Manajemen Risiko Manajemen Risiko	Menelaah kebijakan penerapan Sistem Manajemen Risiko: 1. Mengevaluasi Kebijakan Perusahaan tentang Manajemen Risiko. 2. Mengevaluasi Realisasi Laporan Manajemen Risiko tahun 2023, dan mengusulkan pemberian arahan. Menelaah kebijakan penerapan Sistem Manajemen Risiko: 1. Mengevaluasi Kebijakan Perusahaan tentang Manajemen Risiko. 2. Mengevaluasi Realisasi Laporan Manajemen Risiko tahun 2023, dan mengusulkan pemberian arahan.	Telaah Kebijakan Manajemen Risiko sudah dilaporkan ke Komisaris Utama melelui surat No. 011/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Telaah Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2024 Arahan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2023 telah disampaikan langsung melalui Rapat antara Dewan Komisaris, Komite dan Tim Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk pada tanggal 23 April 2024. Telaah Kebijakan Manajemen Risiko sudah dilaporkan ke Komisaris Utama melelui surat No. 011/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Telaah Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2024 Arahan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2023 telah disampaikan langsung melalui Rapat antara Dewan Komisaris, Komite dan Tim Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk pada tanggal 23 April 2024.
		Monitoring, saran atas pelaksanaan manajemen risiko Monitoring, saran atas pelaksanaan manajemen risiko	Monitoring atas pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan Dewan Komisaris dan Komite melalui sarana rapat dengan Tim Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk yang diadakan per Triwulanan, selama tahun 2024 telah diadakan sebanyak 3x pada: 1. 23 April 2024; 2. 23 Juli 2024; dan 3. 24 Oktober 2024

			Monitoring atas pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan Dewan Komisaris dan Komite melalui sarana rapat dengan Tim Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk yang diadakan per Triwulanan, selama tahun 2024 telah diadakan sebanyak 3x pada: 1. 23 April 2024; 2. 23 Juli 2024; dan 3. 24 Oktober 2024
4	Sistem Teknologi Informasi Sistem Teknologi Informasi	Menelaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi, SAP dan Program Pendukungnya Menelaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi, SAP dan Program Pendukungnya	Telaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi dilaksanakan dan dilaporkan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 037/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Telaah/Review Komite Audit terkait Kebijakan Sistem Teknologi Informasi. Telaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi dilaksanakan dan dilaporkan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 037/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Telaah/Review Komite Audit terkait Kebijakan Sistem Teknologi Informasi.
		Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi	Dewan Komisaris menyampaikan arahan melalui surat No. 134/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 11 Dec 2024 perihal Arahan terhadap Kebijakan Sistem Teknologi Informasi. Dewan Komisaris menyampaikan arahan melalui surat No. 134/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 11 Dec 2024 perihal Arahan terhadap Kebijakan Sistem Teknologi Informasi.
5	Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	Menelaah kebijakan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) Menelaah kebijakan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	Komite Audit membantu memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam memberikan arahan kepada Perseroan seuai dengan surat No. 127/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 5 Dec 24 perihal Arahan terhadap Kebijakan Mutu (QSHE) PT PP Presisi Tbk Monitoring dan pemberian saran, juga dilaksanakan saat Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Audit membantu memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam memberikan arahan kepada Perseroan seuai dengan surat No. 127/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 5 Dec 24 perihal Arahan terhadap Kebijakan Mutu (QSHE) PT PP Presisi Tbk Monitoring dan pemberian saran, juga dilaksanakan saat Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.
		Monitoring, saran atas penerapan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) Monitoring, saran atas penerapan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	Dewan Komisaris didampingi Komite Audit telah melakukan kunjungan Proyek: 1. Kunjungan Proyek Weda Bay Nickel Project pada tanggal 20 — 21 Juni 2024, dengan beberapa arahan antara lain: • Proyek agar memaksimalkan peformanya dikarenakan sebagai proyek strategis PP Presisi; • Program kerja sedapat mungkin sesuai RKAP terutama menjaga Cash Flow dan WIP yang lancar • Mitigasi risiko atas semua kegiatan pelaksanaan proyek dan selalu melihat legalitas Dokumen terutama yang terkait dengan Izin Pinjam Kawasan Hutan

	Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan)		Dewan Komisaris didampingi Komite Audit telah melakukan kunjungan Proyek: 1. Kunjungan Proyek Weda Bay Nickel Project pada tanggal 20 — 21 Juni 2024, dengan beberapa arahan antara lain: • Proyek agar memaksimalkan peformanya dikarenakan sebagai proyek strategis PP Presisi; • Program kerja sedapat mungkin sesuai RKAP terutama menjaga Cash Flow dan WIP yang lancar • Mitigasi risiko atas semua kegiatan pelaksanaan proyek dan selalu melihat legalitas Dokumen terutama yang terkait dengan Izin Pinjam Kawasan Hutan 2. Kunjungan Proyek Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Tol Kebangsaan Sisi Barat (Sumbu Barat) pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan beberapa arahan antara lain: • Proyek agar memaksimalkan peformanya sehingga target waktu dapat tercapai sesuai dengan kontrak • Program kerja sedapat mungkin sesuai RKAP terutama menjaga Cash Flow dan WIP yang lancar • Proses pengajuan pendanaan (skbdn) agar lebih tepat perencanaannya sehingga tdk ada komplain oleh vendor dalam hal pembayaran hutang. Karena di satu sisi pekerjaan dilapangan dituntut sangat cepat • Mitigasi risiko atas semua kegiatan pelaksanaan proyek terutama terkait dengan pemberi kerja (dalam hal ini PP Infra1) dengan pemilik proyek (misalnya kesiapan lahan, keterlambatan pelaksanaan, proses final account dsb) • Dekom mengapresiasi kualitas pekerjaan, setelah melihat langsung ke pekerjaan jalan di sumbu barat. 2. Kunjungan Proyek Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Tol Kebangsaan Sisi Barat (Sumbu Barat) pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan beberapa arahan antara lain: • Proyek agar memaksimalkan peformanya sehingga target waktu dapat tercapai sesuai dengan kontrak • Program kerja sedapat mungkin sesuai RKAP terutama menjaga Cash Flow dan WIP yang lancar • Proses pengajuan pendanaan (skbdn) agar lebih tepat perencanaannya sehingga tdk ada komplain oleh vendor dalam hal pembayaran hutang. Karena di satu sisi pekerjaan dilapangan dituntut sangat cepat • Mitigasi risiko atas semua kegiatan pelaksanaan proyek terutama terkait dengan pemberi kerja (dalam hal ini PP Infra1) dengan pemilik proyek (misalnya kesiapan lahan, keterlambatan pelaksanaan, proses final account dsb) • Dekom mengapresiasi kualitas pekerjaan, setelah melihat langsung ke pekerjaan jalan di sumbu barat.

6	Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), Whistle Blowing System (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi Supervision of the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistle Blowing System (WBS), and Gratification Management System	1. Review terhadap hasil Pelaksanaan Auditor Internal (SPI) 1. Review of the Results of the Internal Auditor (SPI) Implementation	Review dilakukan Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan surat No: • 008/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 8 May 2024 perihal Hasil Riview Buku Laporan Kegiatan Biro Internal Audit Triwulan I Tahun 2024; • 017/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Hasil Riview Buku Laporan Kegiatan Biro Internal Audit Triwulan II Tahun 2024; dan • 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan III 2024. The review was conducted by the Audit Committee and reported to the Board of Commissioners in accordance with the following letters: • No: 008/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated May 8, 2024 regarding the Review Results of the Internal Audit Bureau Activity Report Book for Q1 2024; • No: 017/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated August 16, 2024 regarding the Review Results of the Internal Audit Bureau Activity Report Book for Q2 2024; and • No: 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated October 22, 2024 regarding the Realization Report of the Audit Committee Work Program for Q3 2024.
		2. Monitoring dan saran atas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (SPIP) 2. Monitoring and recommendations on the implementation of the Company's Internal Control System (SPIP)	*Review* terhadap Laporan penerapan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Perusahaan Tahun 2023, sesuai surat No. 007/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 3 May 2024. Arahan Dekom sesuai dengan surat No. 050/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 6 May 2024 perihal Arahan SPIP Tahun 2023; Dekom memberikan saran agar: 1. Hasil Evaluasi SPIP tahun 2023 yang mencakup 5 (lima) komponen, sudah ada peningkatan dan pengembangan khususnya terkait komponen Lingkungan Pengendalian yang pencapaiannya pada tahun 2023 paling rendah yaitu sebesar 85,65% dan untuk selanjutnya agar tetap ditingkatkan dengan mengevaluasi dan monitoring atas pelaksanaan komponen Lingkungan Pengendalian. Review of the Report on the Implementation of the Evaluation Results of the Company's Internal Control System for 2023, in accordance with letter No. 007/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated May 3, 2024. Direction from the Board of Commissioners in accordance with letter No. 050/EXT/KOM/PPRE/2024 dated May 6, 2024 regarding SPIP 2023 Direction; the Board of Commissioners provided the following suggestions: 1. The results of the 2023 SPIP evaluation, which covered 5 (five) components, showed improvements and developments, particularly in the Control Environment component, which had the lowest achievement in 2023 at 85.65%. Going forward, it is recommended to continue enhancing this component through evaluation and monitoring of its implementation.

	Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), Whistle Blowing System (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi Supervision of the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistle Blowing System (WBS), and Gratification Management System.		2. Direksi agar meningkatkan kinerja pengendalian khususnya pada aspek sumber daya manusia yaitu belum adanya kebijakan yang terkait dengan workload analysis dan kebijakan yang terkait dengan evaluasi berkelanjutan dalam hal otorisasi, rekonsiliasi, pengendalian keuangan dan lindung nilai. 2. The Board of Directors is advised to enhance control performance, particularly in the aspect of human resources, namely the absence of policies related to workload analysis and continuous evaluation policies concerning authorization, reconciliation, financial control, and hedging.
			3. Peningkatan Data Kuesioner Karyawan sebagai metodologi untuk evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal agar tercapai data yang lebih valid dan akurat. 3. Improvement of the Employee Questionnaire Data as a methodology for evaluating the Internal Control System to achieve more valid and accurate data.
			4. Evaluasi penerapan SPIP tahun berikutnya dilaksanakan untuk periode penerapan SPIP dalam 1 tahun (dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024) sehingga dapat mendukung Direksi dalam memberikan asersi terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT PP Presisi Tbk; 4. Evaluation of the implementation of SPIP for the following year will be conducted for the SPIP implementation period of one year (from January 1 to December 31, 2024) to support the Board of Directors in providing assertions for the Annual Financial Statements of PT PP Presisi Tbk.
			5. Direksi agar memonitor pelaksanaan rekomendasi tersebut diatas, sehingga pelaksanaan kegiatan proses pengendalian bisnis menjadi lebih baik 5. The Board of Directors should monitor the implementation of the above recommendations to ensure that the business control processes are carried out more effectively.
		3. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS 3. Monitoring, suggestions, and follow-up on the WBS report.	Laporan WBS disampaikan secara rutin melalui Laporan Kegiatan Biro Internal Audit Triwulanan dan selama tahun 2024 tidak ada laporan terkait WBS. The WBS report is regularly submitted through the Quarterly Internal Audit Bureau Activity Report, and during 2024, there were no reports related to WBS.
		4. Monitoring saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi 4. Monitoring, suggestions, and follow-up on the gratification report.	Selama tahun 2024 tidak terdapat laporan terkait Gratifikasi dan secara rutin sudah disampaikan dalam Laporan Kegiatan Biro Internal Audit. During 2024, there were no reports related to Gratification, and it has been routinely submitted in the Internal Audit Bureau Activity Report.

7	Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance	Monitoring penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik: Ketaatan terhadap UU Ketaatan terhadap Prosedur Laporan ke pihak eksternal tepat waktu Dan lain-lain Monitoring the implementation of Good Corporate Governance: Compliance with Laws Compliance with Procedures Reports to external parties on time And others	Pada tahun 2024, program kerja Tata Kelola Terintegrasi belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya program parenting dari PT PP (Persero) Tbk selaku Induk PT PP Presisi Tbk. In 2024, the Integrated Governance work program could not be implemented due to the absence of a parenting program from PT PP (Persero) Tbk as the parent company of PT PP Presisi Tbk.
8	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Supervision of Policy Implementation	1. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya. 1. Procurement Policy and Its Implementation	Komite Audit meninjau kebijakan pengadaan atas Proses Bisnis khususnya pengadaan baik threshold penandatangan Kontrak dengan Vendor dan sinkronisasi dengan Prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi serta standar industri yang berlaku dan disampaikan Komite Audit kepada Dewan Komisaris sesuai surat No. 035/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Hasil Laporan Komite Audit atas Review terhadap Kebijakan Pengadaan, Mutu dan Pelayanan. The Audit Committee reviews the procurement policy on Business Processes, particularly procurement, including the contract signing threshold with vendors and its synchronization with procedures to ensure that the policy is transparent, accountable, and in compliance with applicable regulations and industry standards. This is reported by the Audit Committee to the Board of Commissioners as per letter No. 035/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated December 7, 2024, regarding the Audit Committee's Report on the Review of the Procurement, Quality, and Service Policies.
		2. Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karir, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai. 2. Human Resource Management includes Recruitment, Career Management, Promotion, Transfer, and Demotion of Employees.	Komite Audit berkoordinasi dengan Komite Kepatuhan memberikan usulan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya menjadi salah satu dasar Dewan Komisaris dalam memberikan arahan terkait: • surat No. 073/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Arahan terkait Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tahun 2024; • surat No. 094/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Arahan dan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tahun 2024; dan • surat No. 104/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Perubahan Struktur Organisasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi Tahun 2024

	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan		The Audit Committee coordinates with the Compliance Committee to provide proposals to the Board of Commissioners, which will then serve as one of the bases for the Board of Commissioners in giving directions related to:: • Letter No. 073/EXT/KOM/PPRE/2024 dated July 2, 2024 regarding Directions on the Organizational Structure Change of PT PP Presisi in 2024; • Letter No. 094/EXT/KOM/PPRE/2024 dated August 20, 2024 regarding Directions and Approval for the Organizational Structure Change of PT PP Presisi in 2024; and • Letter No. 104/EXT/KOM/PPRE/2024 dated September 17, 2024 regarding the Organizational Structure Change of PT Lancarjaya Mandiri Abadi in 2024.
		3. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan 3. Accounting Policies and Financial Reporting Preparation	Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi, setelah melalui proses telaah Komite Audit bekerjasama dengan Komite Kepatuhan, melalui surat Dewan Komisaris memberikan arahan diantaranya terkait: • surat No. 046/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Pengangkatan Plt Direktur Utama PT PP Presisi Tbk; dan • surat No. 088/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekertaris Perusahaan Komite Audit mengevaluasi Pedoman Akuntansi PT PP Presisi Tbk yang disampaikan Perseroan di awal Desember 2023 sesuai surat no. 040/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 20 Desember 2024. In relation to the changes in the Organizational Structure, after undergoing a review process by the Audit Committee in collaboration with the Compliance Committee, the Board of Commissioners provided guidance through a letter, including the following: • letter No. 046/EXT/KOM/PPRE/2024 dated April 26, 2024 regarding the Appointment of Acting President Director of PT PP Presisi Tbk; and • letter No. 088/EXT/KOM/PPRE/2024 dated July 24, 2024 regarding Approval Guidance for the Appointment of Corporate Secretary The Audit Committee evaluated the Accounting Guidelines of PT PP Presisi Tbk as submitted by the Company in early December 2023, in accordance with letter no. 040/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated December 20, 2024.
		4. Pengelolaan Entitas Anak. 4. Management of Subsidiaries.	Komite Audit berkoordinasi dengan Komite Kepatuhan telah melakukan telaah terhadap Aksi Korporasi Permohonan Arahan Pemegang Saham Mayoritas terkait dengan Permohonan Penegasan Kelanjutan atau pembuabaran atas Anak Perusahaan PPRE yaitu PT Presisi Sumber Anugerah (“PSA”), sesuai surat No. 024/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 27 Februari 2024. The Audit Committee, in coordination with the Compliance Committee, has conducted a review of the Corporate Action regarding the Majority Shareholder’s Request for Guidance related to the Request for Confirmation on the Continuation or Liquidation of the Subsidiary PPRE, PT Presisi Sumber Anugerah (“PSA”), as per letter No. 024/EXT/KOM/PPRE/2024 dated February 27, 2024.

9	Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak Remuneration, Nomination, and Succession of the Board of Directors as well as the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries.	1. Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi 1. Review of the proposed remuneration and nomination of the Board of Directors.	Menjadi wewenang Pemegang Saham Mayoritas (PSM) sehingga Dewan Komisaris tidak melakukan pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi. It is the authority of the Majority Shareholder (PSM), so the Board of Commissioners does not propose remuneration and nomination for the Board of Directors.
		2. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. 2. The proposal for bonuses/ performance incentives considers the performance evaluation results of the Board of Directors (KPI) and the achievement of the company's health level.	Komite Audit dan Komite Kepatuhan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk membuat surat permohonan arahan terkait penetapan tantiem/insentif kinerja Direksi karena hal tersebut menjadi wewenang Pemegang Saham Mayoritas (PSM). The Audit Committee and the Compliance Committee propose to the Board of Commissioners to issue a letter requesting guidance on the determination of bonuses/performance incentives for the Board of Directors, as this falls under the authority of the Majority Shareholder (PSM).
10	Pengawasan Eksternal / KAP External Supervision / Public Accounting Firm (KAP)	1. Usulan Penunjukan KAP 1. Proposal for Appointment of Public Accounting Firm (KAP)	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Auditor Eksternal yang dilakukan oleh Komite Audit sesuai dengan surat No. 005/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 5 April 2024, hal tersebut menjadi dasar Dewan Komisaris dalam melakukan penunjukan Jasa Akuntan Publik. Selanjutnya Dewan Komisaris berkoordinasi dengan PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik Based on the evaluation of the External Auditor's performance conducted by the Audit Committee in accordance with letter No. 005/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated April 5, 2024, this serves as the basis for the Board of Commissioners in appointing the Public Accounting Firm. Subsequently, the Board of Commissioners coordinates with PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder to make the appointment of the Public Accountant.
		2. Evaluasi efektivitas kinerja KAP 2. Evaluation of the effectiveness of the performance of the Public Accounting Firm (KAP). Review terhadap hasil pelaksanaan Audit Review of the results of the Audit implementation.	Evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit dan disampaikan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 005/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit terhadap Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023. The evaluation of the performance of the External Auditor is conducted by the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners through letter No. 005/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated April 5, 2024, regarding the Report on the Evaluation and Review of the Audit Committee on the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") for the fiscal year ending December 31, 2023.

11	RUPST dan RUPSLB RUPST dan RUPSLB	Pendapat dan Tanggapan terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB Opinions and Responses on matters discussed in the Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB).	RUPST tahun buku 2023 dilaksanakan pada tang-gal 05 Juni 2024. Komite Audit bersama dengan Komite Kepatuhan Saat RUPST tahun buku 2023, telah disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dekom tahun 2023 sesuai surat No. 060/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 Tidak terdapat RUPSLB pada tahun 2024. The Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) for the fiscal year 2023 was held on June 5, 2024. During the RUPST for the fiscal year 2023, the Audit Committee, together with the Compliance Committee, presented the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners for 2023, in accordance with letter No. 060/EXT/KOM/PPRE/2024 dated May 31, 2024, regarding the Response and Suggestions of the Board of Commissioners on the Audited Financial Statements for the Fiscal Year 2023 of PT PP Presisi Tbk, as well as the presentation of the Supervisory Task Report and Performance Realization of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023. There was no Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) in 2024.
12	Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action Investment, Business Development, and Corporate Action	Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris sebagai dasar dalam membuat persetujuan dan arahan terhadap rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*. Provide proposals to the Board of Commissioners as a basis for approving and directing the Investment, Business Development, and Corporate Action plans.	Komite Audit melakukan telaah terhadap beberapa aksi korporasi yang akan menjadi dasar Dewan Komisaris dalam memberikan keputusan/persetujuan, diantaranya: 1. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit terhadap Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Penyusunan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal PT PP Presisi Tbk (5 April 2024); The Audit Committee conducts a review of several corporate actions that will serve as the basis for the Board of Commissioners in making decisions/approvals, including: 1. The Report on the Results of the Evaluation and Review by the Audit Committee of the Corporate Action Request for Approval of the Preparation of the General Guidelines for the Internal Control System of PT PP Presisi Tbk (April 5, 2024); 2. Hasil Telaah/Review Revisi RKAP Tahun 2024 PT PP Presisi Tbk (9 Juli 2024); 2. The Results of the Review/Review of the Revised RKAP for 2024 of PT PP Presisi Tbk (July 9, 2024); 3. Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Investasi Aset Alat Berat Untuk Proyek Hauling Road Maintenance Tofu, Pos Maintenance & Water Managament PT Weda Bay Nickel (24 Juli 2024); 3. Request for Approval of the Implementation of Heavy Equipment Asset Investment for the Hauling Road Maintenance Tofu Project, Pos Maintenance & Water Management at PT Weda Bay Nickel (July 24, 2024);

	Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action Investment, Business Development, and Corporate Action		4. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alat Berat Triwulan 4 Tahap I Tahun 2024 (25 Oktober 2025); 4. Report on the Evaluation and Review by the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Heavy Equipment Asset Divestment Implementation for Q4 Stage I of 2024 (October 25, 2025). 5. Hasil Telaah/Review terhadap draft RKAP tahun 2025 (20 November 2024); 5. Review/Examination Results of the draft RKAP for the year 2025 (November 20, 2024). 6. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Penetapan Piagam Internal Audit PT PP Presisi Tbk (26 November 2024); 6. Report on the Evaluation and Review Results of the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Internal Audit Charter of PT PP Presisi Tbk (November 26, 2024). 7. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit Atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan atas penyusunan dan Penetapan Pedoman Pengaduan Pelanggan (*Whistle Blowing System*) PT PP Presisi Tbk (26 November 2024); 7. Report on the Evaluation and Review Results of the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Preparation and Establishment of the Customer Complaint Guidelines (Whistle Blowing System) of PT PP Presisi Tbk (November 26, 2024). 8. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alat Berat & Kendaraan Triwulan 4 Tahap 2 Tahun 2024 (5 Desember 2024); 8. Report on the Evaluation and Review Results of the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Implementation of the Divestment of Heavy Equipment & Vehicles in Quarter 4, Stage 2 of 2024 (December 5, 2024). 9. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Alat Berat & Dump Truck Triwulan 4 Tahap 3 Tahun 2024 (6 Desember 2024); 9. Report on the Evaluation and Review Results of the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Implementation of the Divestment of Heavy Equipment & Dump Trucks in Quarter 4, Stage 3 of 2024 (December 6, 2024).

	Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action Investment, Business Development, and Corporate Action.		10. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alform &PCH Triwulan 4 Tahap 4 Tahun 2024 (10 Desember 2024) 10. Report on the Results of the Evaluation and Review by the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Divestment of Assets Alform & PCH, Quarter 4, Phase 4, 2024 (December 10, 2024). 11. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alat Berat & Dump Truck Triwulan 4 Tahap 5 Tahun 2024 (20 Desember 2024); dan 11. Report on the Results of the Evaluation and Review by the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Divestment of Heavy Equipment & Dump Truck Assets, Quarter 4, Phase 5, 2024 (December 20, 2024); and 12. Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset PCH & Vertikal Triwulan 4 Tahap 6 Tahun 2024 (30 Desember 2024). 12. Report on the Results of the Evaluation and Review by the Audit Committee on the Corporate Action Request for Approval of the Divestment of PCH & Vertical Assets, Quarter 4, Phase 6, 2024 (December 30, 2024).
			Bersama dengan Komite Kepatuhan melakukan telaah terhadap kelengkapan dokumen, prosesnya, dan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan atau threshold PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. Telaah Aksi Korporasi: 1. Arahan terkait Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Fasilitas Kredit Eksisting dan Perolehan Baru Fasilitas Kredit Transaksi Khusus (5 Januari 2024); Together with the Compliance Committee, a review is conducted on the completeness of documents, processes, and others based on applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or thresholds of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder. Corporate Action Review: 1. Direction related to the Request for Approval of Changes to Existing Credit Facilities and the Acquisition of New Credit Facilities for Special Transactions (January 5, 2024); 2. Arahan terkait Pemberitahuan Atas Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Non-Cash Loan, Switchable Cash Loan Trade dan Perpanjangan Serta Penurunan Atas Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional (10 Januari 2024);

	Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action		2. Direction related to the Notification of Extension of the Term of Non-Cash Loan Facilities, Switchable Cash Loan Trade, and Extension and Reduction of Transactional Working Capital Credit Facilities (January 10, 2024); 3. Permohonan Arahan kepada PT PP (Persero) Tbk terhadap Surat Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk terkait dengan Permohonan Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk yaoti PT Presisi Sumber Anugerah (PSA) (27 Februari 2024); 3. Request for Direction to PT PP (Persero) Tbk regarding the Board of Commissioners' letter of PT PP Presisi Tbk concerning the Request for Confirmation of Continuation or Liquidation of PT PP Presisi Tbk's Subsidiary, PT Presisi Sumber Anugerah (PSA) (February 27, 2024); 4. Arahan Pemberitahuan Perpanjangan dan Perubahan Fasilitas Kredit pada Perbankan (25 Maret 2024); 4. Direction Notification for the Extension and Change of Credit Facilities with Banks (March 25, 2024); 5. Persetujuan dan Arahan atas Perolehan Fasilitas Kredit pada Perbankan (26 Maret 2024); 5. Approval and Direction on the Acquisition of Credit Facilities from Banks (March 26, 2024); 6. Arahan terkait Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tahun 2024 (5 Juli 2024); 6. Direction regarding the Organizational Structure Change of PT PP Presisi in 2024 (July 5, 2024); 7. Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (24 Juli 2024); dan 7. Direction regarding the Approval of the Appointment of Corporate Secretary (July 24, 2024); and 8. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk (20 Agustus 2024) 8. Approval of the Organizational Structure Change of PT PP Presisi Tbk (August 20, 2024).
13	Penyusunan RKA Tahunan 2025 dan RJPP Preparation of the 2025 Annual Budget Plan (RKA) and Long-Term Plan (RJPP)	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKA tahunan 2025 dan Review RJPP ; Suggestions and Approval for the preparation of the 2025 Annual Budget Plan (RKA) and Review of the Long-Term Plan (RJPP);	Selama Tahun 2024, Komite Audit melakukan telaah terhadap Draft Telaah RKAP During 2024, the Audit Committee conducted a review of the Draft Review of the RKAP.

		1. Tanggapan Komite Audit (Pandangan dan Masukan) atas Rancangan RKA Tahunan 2025 & RJPP; 1. Audit Committee's Response (Views and Input) on the Draft of the 2025 Annual Budget Plan (RKA) & Long-Term Plan (RJPP);	1. Hasil Telaah/Review Revisi RKAP Tahun 2024 PT PP Presisi Tbk (9 Juli 2024); dan 2. Hasil Telaah/Review terhadap draft RKAP tahun 2025 (20 November 2024). 2. Results of the Review/Revised RKAP 2024 of PT PP Presisi Tbk (July 9, 2024); and 2. Results of the Review of the Draft RKAP 2025 (November 20, 2024).
		2. Rapat Gabungan Pengesahan RKA Tahunan 2025 & RJPP. 2. Joint Meeting for the Ratification of the 2025 Annual Budget Plan (RKA) & Long-Term Plan (RJPP).	Pengesahan RKAP Tahun 2025 telah dilakukan pada tanggal 24 Desember 2024. The ratification of the 2025 RKAP was carried out on December 24, 2024..
14	Laporan Manajemen Management Report	1. Telaah atas Laporan Periodik (Laporan Keuangan yang dipublikasikan) 1. Review of Periodic Reports (Published Financial Statements)	Komite Audit telah melakukan telaah sesuai dengan surat No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 2 May 2024 perihal Review Laporan Keuangan Audited PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. The Audit Committee has conducted a review in accordance with letter No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated May 2, 2024, regarding the Review of the Audited Financial Statements of PT PP Presisi Tbk for the Year 2023.
		2. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dekom 2. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dekom	1. Laporan Kinerja tahun 2023 disampaikan sesuai surat No. 060/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2023; 1. The 2023 Performance Report was submitted in accordance with letter No. 060/EXT/KOM/PPRE/2024 dated May 31, 2024, regarding the Response and Suggestions of the Board of Commissioners on the Audited Financial Statements for the 2023 Fiscal Year of PT PP Presisi Tbk, as well as the Submission of the Supervisory Task Report and the Realization of the Performance of the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year;
			2. Surat No. 098/EXT/KOM/PPRE/2024 pada tanggal 30 Agustus 2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 2. Letter No. 098/EXT/KOM/PPRE/2024 dated August 30, 2024, regarding the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners Up to the Second Quarter of 2024.
			3. Surat No. 124/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2024; 3. Letter No. 124/EXT/KOM/PPRE/2024 dated November 18, 2024, regarding the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners Up to the Third Quarter of 2024;

		3. Persetujuan Laporan Tahunan (Annual Report) 3. Approval of the Annual Report	Telah dilaksanakan saat penyusunan Annual Report tahun 2024, diwakili oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Kepatuhan Untuk penyusunan Annual Report tahun 2024 dilaksanakan di Triwulan I tahun 2025. It was carried out during the preparation of the 2024 Annual Report, represented by the Secretary of the Board of Commissioners and the Compliance Committee. The preparation of the 2024 Annual Report will be carried out in the first quarter of 2025.
15	Tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arah Dekom Follow-up on the results of decisions, recommendations, and direction of the Board of Commissioners (Dekom).	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arah Dekom Monitoring of the follow-up on the results of decisions, recommendations, and direction of the Board of Commissioners (Dekom).	Koordinasi dengan Komite Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris maupun Manajemen/Perseroan, berdasarkan Minit Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. Coordination with the Compliance Committee, Secretary of the Board of Commissioners, and Management/ Company, based on the Minutes of the Board of Commissioners and Directors Coordination Meeting.
16	Evaluasi Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris Evaluation of the Performance of Committees under the Board of Commissioners.	Evaluasi kinerja Komite Audit: Tahunan Annual Evaluation of the Audit Committee's Performance.	Telah disampaikan kepada Dekom sesuai dengan Surat No. 003/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Audit PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Komite Audit Tahun 2023 It has been submitted to the Board of Commissioners in accordance with Letter No. 003/INT/KA/ DEKOMPPRE/2024 dated March 1, 2024, regarding the Submission of the Report on the Realization of the Implementation of the Audit Committee's Work Plan for PT PP Presisi Tbk in 2023 and the Evaluation of the Audit Committee's Performance in 2023.
		Semester 1 The first semester.	Evaluasi Kinerja Komite Audit, per Triwulan, diantaranya: Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I tahun 2024 disampaikan melalui surat No. 010/INT/KA/ DEKOMPPRE/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan I 2024; Evaluation of the Audit Committee's Performance, on a quarterly basis, including: The Audit Committee's First Quarter 2024 Activity Report was submitted through Letter No. 010/INT/KA/ DEKOMPPRE/2024 dated May 27, 2024, regarding the Report on the Realization of the Audit Committee's Work Program for the First Quarter of 2024.
			Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan II tahun 2024 disampaikan melalui surat No. 014/INT/KA/ DEKOMPPRE/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan II 2024; dan The Audit Committee's Second Quarter 2024 Activity Report was submitted through Letter No. 014/INT/KA/ DEKOMPPRE/2024 dated August 6, 2024, regarding the Report on the Realization of the Audit Committee's Work Program for the Second Quarter of 2024; and

			Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan III tahun 2024 disampaikan melalui surat No. 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan III 2024; The Audit Committee's Third Quarter 2024 Activity Report was submitted through Letter No. 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2024 dated October 22, 2024, regarding the Report on the Realization of the Audit Committee's Work Program for the Third Quarter of 2024;

Penelaahan Komite Audit

Audit Committee Review

Di tahun 2024, Komite Audit telah melakukan penelaahan atas pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

In 2024, the Audit Committee has conducted a review of the supervision of the Company's business activities with the following details.

Nomor Surat Nomor Surat	**Tanggal Surat** Tanggal Surat	**Perihal** Perihal
Hasil Telaah Hasil Telaah		
005/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	5 April 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit terhadap Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023
006/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	2 Mei 2024	Review Laporan Keuangan Audited PT PP Presisi Tbk Tahun 2023
007/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	3 Mei 2024	Review SPIP Tahun 2023
008/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	8 Mei 2024	Hasil Riview Buku Laporan Kegiatan Biro Internal Audit Triwulan I Tahun 2024
009/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	9 Juli 2024	Hasil Telaah/Review Revisi RKAP Tahun 2024 PT PP Presisi Tbk
011/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	8 Juli 2024	Telaah Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2024
012/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	9 Juli 2024	Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk (Proyek Weda Bay)
013/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	24 Juli 2024	Hasil Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Investasi Aset Alat Berat Untuk Proyek Hauling Road Maintenance Tofu, Pos Maintenance & Water Managament PT Weda Bay Nickel
015/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	26 November 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Penetapan Piagam Internal Audit PT PP Presisi Tbk

016/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	26 November 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit Atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan atas penyusunan dan Penetapan Pedoman Pengaduan Pelanggan (Whistle Blowing System) PT PP Presisi Tbk.
017/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	16 Agustus 2024	Hasil Riview Buku Laporan Kegiatan Biro Internal Audit Triwulan II Tahun 2024
020/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	22 Oktober 2024	Hasil Riview Buku Laporan Kegiatan Biro Internal Audit Triwulan III Tahun 2024
025/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	25 Oktober 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alat Berat Triwulan 4 Tahap I Tahun 2024
028/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	19 November 2024	Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk (Proyek IKN)
029/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	20 November 2024	Penyampaian telaah Draft RKAP 2025
032/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	5 Desember 2024	Review/Telaah Kebijakan Mutu/ QHSE PT PP Presisi Tbk
033/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	5 Desember 2024	Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alat Berat & Kendaraan Triwulan 4 Tahap 2 Tahun 2024
034/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	6 Desember 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Alat Berat & Dump Truck Triwulan 4 Tahap 3 Tahun 2024
035/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	7 Desember 2024	Hasil Laporan Komite Audit atas Review terhadap Kebijakan Pengadaan, Mutu dan Pelayanan
036/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	10 Desember 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alform &PCH Triwulan 4 Tahap 4 Tahun 2024
037/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	10 Desember 2024	Laporan Hasil Telaah/Review Komite Audit terkait Kebijakan Sistem Teknologi Informasi
039/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	20 Desember 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset Alat Berat & Dump Truck Triwulan 4 Tahap 5 Tahun 2024
040/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	20 Desember 2024	Laporan Hasil Telaah Komite Audit terkait Penyusunan Pedoman Akutansi PT PP Presisi Tbk
041/INT/KA/DEKOMPPRE/2024	30 Desember 2024	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Divestasi Aset PCH & Vertikal Triwulan 4 Tahap 6 Tahun 2024

Komite Audit juga telah mengeluarkan penelaahan bersama Komite Kepatuhan atas pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2024. Berikut informasi penelaahan yang dikeluarkan Komite Audit dan Komite Kepatuhan.

The Audit Committee has also issued a review in collaboration with the Compliance Committee regarding the supervision of the Company's business activities in 2024. Below is the information on the review issued by the Audit Committee and the Compliance Committee.

Nomor Surat Nomor Surat	**Tanggal Surat** Tanggal Surat	**Perihal** Perihal
Disposisi Telaah Disposisi Telaah		
080/INT/KOM/PPRE/XII/2023	22 Desember 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Update terhadap Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Fasilitas Kredit Eksisting dan Perolehan Baru Fasilitas Kredit Transaksi Khusus pada Fasilitas Perbankan
077/INT/KOM/PPRE/XII/2023	07 Desember 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Pemberitahuan stas Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Non Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Dan Perpanjangan Serta Penurunan Atas Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional pada Fasilitas Perbankan
007/INT/KOM/PPRE/2024	07 Maret 2024	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Perpanjangan dan Perubahan Fasilitas Kredit dari Fasilitas Perbankan
013/INT/KOM/PPRE/2024	21 Maret 2024	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan atas Perolehan Fasilitas Kredit dari Fasilitas Perbankan
022/INT/KOM/PPRE/2024	20 Juni 2024	Pembuatan Evaluasi dan Telaah atas Aksi Korporasi Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk.
028/INT/KOM/PPRE/2024	17 Juli 2024	Pembuatan Evaluasi dan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pengangkatan Corporate Secretary PT PP Presisi Tbk
031/INT/KOM/PPRE/2024	12 Agustus 2024	Pembuatan Evaluasi dan Telaah atas Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk
Hasil Telaah Hasil Telaah		
03/INT/KA&KK/DEKOM/PPRE/2024	04 Januari 202	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Fasilitas Kredit Eksisting dan Perolehan Baru Fasilitas Kredit Transaksi Khusus pada Fasilitas Perbankan

005/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2024	08 Januari 2024	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Atas Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Dan Perpanjangan Serta Penurunan Atas Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional pada Fasilitas Perbankan
009/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2024	21 Maret 2024	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Perpanjangan dan Perubahan Fasilitas Kredit dari Fasilitas Perbankan
011/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2024	25 Maret 2024	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan atas Perolehan Fasilitas Kredit dari Fasilitas Perbankan
014/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2024	28 Juni 2024	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk Tahun 2024
017/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2024	23 Juli 2024	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pengangkatan Corporate Secretary PT PP Presisi Tbk
020/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2024	16 Agustus 2024	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Persetuiuan Perubahan Struhur Organisasi PT PP Presisi Tbk

Rekomendasi dan Saran Komite Audit

Audit Committee Recommendations and Suggestions

Berikut rekomendasi dan saran Komite Audit di tahun 2024, yang telah disampaikan melalui hasil telaah ataupun surat Dewan Komisaris.

1. Perusahaan agar melakukan strategi jitu untuk dapat mencapai Target Kinerja dengan langkah-langkah yang berfokus perolehan kontrak baru.
2. Perusahaan agar membuat program peningkatan penjualan baik dari proyek yang sudah didapat maupun yang akan didapat dan dapat melanjutkan efisiensi biaya, berupaya mengurangi beban keuangan maupun operasional untuk memenuhi target akhir tahun.
3. Perusahaan agar mengoptimalkan Sistem Manajemen Risiko yang salah satu fungsinya sebagai early warning system untuk menambahkan profil Risiko sesuai dengan parenting dengan PSM sehingga permasalahan yang timbul dapat terdeteksi ataupun diminimalisir, dengan melakukan pengelolaan risiko yang telah termitigasi. Perseroan agar tetap menjaga kualitas dan mutu proyek untuk penerapan QHSE (*Quality, Health, Safety and Environment*) di semua proyek-proyek.
4. Direksi agar melaksanakan rekomendasi hasil validasi pencapaian KPI Triwulanan dan membuat strategi untuk mencapainya sehingga target KPI akhir tahun dapat dipenuhi sebagai bagian dari tindaklanjut rekomendasi KPI.

Here are the recommendations and suggestions from the Audit Committee for 2024, which have been conveyed through review results or letters from the Board of Commissioners:

1. The company should implement effective strategies to achieve Performance Targets through actions focused on acquiring new contracts.
2. The company should develop programs to increase sales from both existing and prospective projects, and continue cost efficiency efforts to reduce financial and operational burdens to meet the year-end targets.
3. The company should optimize the Risk Management System, one of its functions being an early warning system to enhance risk profiles in line with parenting and PSM, so that emerging issues can be detected or minimized through effective risk mitigation management. The company should also maintain the quality and standards of projects in implementing QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment) across all projects.
4. The Board of Directors should implement recommendations from the validation results of Quarterly KPI achievements and design strategies to meet these goals, ensuring the annual KPI targets are achieved as part of the KPI recommendation follow-up.

5. Direksi beserta jajarannya harus tetap menjalankan Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan *Good Corponte Govemance* yang baik.

5. The Board of Directors and its team must continue to manage the company in accordance with applicable regulations and good corporate governance practices.



Komite Kepatuhan
Compliance Committee

Komite Kepatuhan merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Kepatuhan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The Compliance Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in carrying out their duties and functions. The Compliance Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

Pedoman Komite Kepatuhan
Compliance Committee Charter

Dalam membantu tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, Komite Kepatuhan dilengkapi dengan Piagam Komite Kepatuhan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 26 September 2023.

In carrying out its duties and responsibilities, the Compliance Committee refers to the Compliance Committee Charter, signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on September 26, 2023.

Kriteria Penentuan Komite Kepatuhan
Compliance Committee Appointment Criteria

Berdasarkan Piagam Komite Kepatuhan, persyaratan yang harus dipenuhi anggota Komite Kepatuhan pada saat diangkat dan selama menjabat meliputi:
1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan perencanaan strategis, kewenangan pengambilan keputusan, pendelegasian kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban pada Perusahaan, sistem tata kelola Perusahaan dan sistem manajemen yang digunakan, sistem rekrutmen manajemen dan perencanaan karier pada Perusahaan, sistem penilaian kinerja serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya.
3. Mematuhi Kode Etik Komite Kepatuhan yang telah ditetapkan Perusahaan.
4. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang tata kelola Perusahaan.
6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan, atau mengawasi

According to the Compliance Committee Charter, the requirements that must be fulfilled by Compliance Committee members when appointed and during their tenure include:
1. Have high integrity, ability, knowledge, and experience following their field of work and are capable of communicating properly.
2. Understand the Company's business, especially those related to strategic planning, decision-making authority, delegation of authority and accountability mechanisms to the Company, the Company's governance system and management system applied, management recruitment system and career planning, performance assessment system, as well as prevailing laws and regulations in capital market sector and other related laws and regulations.
3. Comply with the Compliance Committee Code of Conduct established by the Company.
4. Willing to improve their competencies continuously through education and training.
5. Have at least one member with educational background and expertise in corporate governance.
6. Not a person working in a public accounting firm, legal consulting firm, public appraisal service office, or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last six months.
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months, except for an Independent Commissioner.
8. Do not have direct or indirect shares in the Company.
9. In the event that a Compliance Committee member

kegiatan perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
9. Dalam hal anggota Komite Kepatuhan memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

acquires Company shares, directly or indirectly, as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of six months after the shares were acquired.
10. Not affiliated with Board of Commissioners members, Board of Directors members, or Major Shareholders.
11. Do not have business relationships, directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Ketentuan Masa Jabatan

Term of Office Provision

Masa jabatan anggota Komite Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office of Compliance Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a two-year term of office without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Susunan dan Komposisi Komite Kepatuhan Tahun 2024

Compliance Committee Structure and Composition in 2024

Di tahun 2024 terdapat perubahan susunan Komite Kepatuhan, dengan kronologi perubahan dan susunan Komite Kepatuhan per 31 Desember 2024 dapat dilihat di bawah ini.

In 2024 there were changes in the composition of the Compliance Committee, with the chronology of changes and the composition of the Compliance Committee as of December 31, 2024 can be seen below.

Kronologis Perubahan Susunan Komite Kepatuhan

Chronology of Changes in the Composition of the Compliance Committee

Periode 1 Januari s.d 21 Juni 2024 January 1 to June 21, 2024	**Periode 21 Juni s.d 31 Desember 2024** June 21 to December 31, 2024	**Keterangan** Description
Indra Jaya Rajagukguk (Ketua / Komisaris Independen) (Chairman / Independent Commissioner)		Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pemberhentian & Pengangkatan Ketua Anggota Komite Kepatuhan, Dewan Komisaris memberhentikan dengan hormat Indra Jaya Rajagukguk sebagai Ketua Komite Kepatuhan. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated June 21, 2024 regarding the Dismissal & Appointment of the Chairman of the Compliance Committee, the Board of Commissioners honorably dismissed Indra Jaya Rajagukguk as Chairman of the Compliance Committee.

Abdullah Sigit (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	**Tri Saripalupi Andayani** (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	
Bari Srisoenami (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	**Mubari** (Anggota / Pihak Independen) (Member / Independent Party)	
	Albert Simangunsong (Ketua / Komisaris) (Chairman / Commissioner)	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pemberhentian & Pengangkatan Ketua Anggota Komite Kepatuhan, Dewan Komisaris mengangkat Albert Simangunsong sebagai Ketua Komite Kepatuhan. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated June 21, 2024 regarding the Dismissal & Appointment of the Chairman of the Compliance Committee Members, the Board of Commissioners appointed Albert Simangunsong as Chairman of the Compliance Committee.



Susunan Komite Kepatuhan per 31 Desember 2024

Compliance Committee Composition as of December 31, 2024

Albert Simangunsong

Jabatan Position	: :	Ketua / Komisaris Chairman / Commissioner
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 21 Juni 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated June 21, 2024
Masa & Periode Jabatan Term & Period of Office	: :	Mengikut masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners

Abdullah Sigit

Jabatan Position	: :	Anggota / Pihak Independen Member / Independent Party
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/SK/ PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 012/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022
Masa Jabatan Term of Office	: :	2022 s.d 2025 2022 to 2025
Periode Period	: :	Ke-2 2nd

Bari Srisoenami

Jabatan Position	: :	Anggota / Pihak Independen Member / Independent Party
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: :	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/SK/ PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 012/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022
Masa Jabatan Term of Office	: :	2022 s.d 2025 2022 to 2025
Periode Period	: :	Ke-2 2nd

Albert Simangunsong

Ketua Komite Kepatuhan/Komisaris



Data Pribadi | Personal Data

Profil Anggota Komite Kepatuhan Albert Simangunsong dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile of Compliance Committee Member Albert Simangunsong can be found in the Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Abdullah Sigit

Anggota Komite Kepatuhan/Pihak Independen
Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.C. 28 Mei 2025, Periode Ke-2

Member of Compliance Committee/Independent Party
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, 2nd Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 57 tahun
Kelahiran Yogyakarta, 29 Oktober 1967
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen
57 years old
Born in Yogyakarta, October 29, 1967
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan | Education

Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1991)

Bachelor of Law from Gadjah Mada University (1991)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Sertifikat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tahun 2025 — 2028

Certificate of Indonesian Advocates Association (Peradi) 2025 - 2028

Riwayat Profesi | Professional History

Berkarir di entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, sebagai *Senior Manager - Advisor Communication* (2017-2018); *Legal Affair Lead* (2016-2017); dan *Legal Affair* (2013-2016). Sebelumnya berkarir sebagai *Legal Officer* Proyek Patria Park PT Prakarsa Dirga Aneka (2006-2013) dan *Legal Officer* PT Prakarsa Dirga Aneka (2001-2006).

Pursued a career at the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, as Senior Manager - Advisor Communication (2017-2018); Legal Affairs Lead (2016-2017); and Legal Affairs (2013-2016). Previously worked as Legal Officer for the Patria Park Project at PT Prakarsa Dirga Aneka (2006-2013) and Legal Officer at PT Prakarsa Dirga Aneka (2001-2006).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Within the Company: None.
Outside the Company: None.

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/ pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the major/ controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.



Bari Srisoenami

Anggota Komite Kepatuhan/Pihak Independen
Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.C. 28 Mei 2025, Periode Ke-2

Compliance Committee Member/Independent Party
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, Second Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 62 tahun
Kelahiran Surakarta, 29 Maret 1962
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen
62 years old
Born in Surakarta, March 29, 1962
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan | Education

Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1988)

Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University (1988)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Tidak ada.

None.

Riwayat Profesi | Professional History

Berkarir di entitas induk, PT PP (Persero) Tbk sebagai *Financial Audit* Biro Satuan Pengawasan Intern (2017-2018); Auditor Keuangan Biro Satuan Pengawasan Intern (2004-2017); *Accounting* (2001-2004); Auditor Keuangan Biro Satuan Pengawasan Intern (1999-2001); Accounting (1988-1999). Selain jabatan tersebut, beliau memiliki pengalaman di bidang tata kelola perusahaan di entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, di antaranya menjadi

Pursued a career at the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, as Financial Audit Bureau of the Internal Audit Unit (2017-2018); Financial Auditor in the Internal Audit Unit (2004-2017); Accounting (2001-2004); Financial Auditor in the Internal Audit Unit (1999-2001); and Accounting (1988-1999). Additionally, she has experience in corporate governance at PT PP (Persero) Tbk, including serving as Coordinator of the Self-Assessment Implementation

Koordinator Tim Pelaksana *Self Assessment* Penerapan GCG (2012-2018); Sekretaris Tim Pelaksana Penerapan GCG (2008-2020); dan membantu Kepala SPI dalam pelaksanaan asesmen penerapan GCG oleh assessor independen (2004-2018).

Team for GCG (2012-2018); Secretary of the GCG Implementation Team (2008-2020); and assisting the Head of the Internal Audit Unit in the GCG assessment conducted by independent assessors (2004-2018).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Staff Fungsi Audit Internal Dana Pensiun PT PP (Persero) Tbk (2024-sekarang).

Within the Company: None.
Outside the Company: None.

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/ pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the main/ controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.

Independensi dan Hubungan Afiliasi Komite Kepatuhan

Compliance Committee Independence and Affiliation

Seluruh anggota Komite Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi yang diuraikan sebagai berikut.

All Compliance Committee members have met the following independence requirements.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Nur Rochmad	Muhammad Zahid	Tri Saripalupi Andayani
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. A person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's operations in the last six months.	✅	❌	❌
Mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan. Own shares, directly or indirectly, in the Company.	❌	❌	❌

Mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Affiliated with the Boards of Commissioners or Board of Directors members or Major Shareholders of the Company.	❌	❌	❌
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Have direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	❌	❌	❌

✅ Ya
❌ Tidak

✅ Yes
❌ No

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kepatuhan

Compliance Committee Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Komite Kepatuhan berdasarkan Piagam Komite Kepatuhan sebagai berikut.

1. Melakukan penelaahan atas mekanisme penerbitan informasi yang wajib dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap regulasi pasar modal yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan serta ketentuan tata kelola BUMN sebagaimana diatur oleh regulator.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan penilai sistem tata kelola atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan asesor GCG yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kompetensi, dan biaya.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan penilaian GCG oleh asesor internal maupun eksternal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG.
6. Menelaah mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan penerapan etika Perusahaan, termasuk di dalamnya sistem pengaduan dan pencegahan gratifikasi.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
9. Menelaah hubungan tata kelola antara Entitas Induk dengan Entitas Anak termasuk pola hubungan pembinaan Entitas Anak di dalam grup Perusahaan.
10. Membuat program kerja tahunan yang memuat telaah untuk memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan.

The Compliance Committee's duties and responsibilities based on the Compliance Committee Charter are as follows.

1. Conducts a review of the mechanisms for issuing information that the Company is required to release to the public and/or regulatory authorities.
2. Reviewing the Company's compliance with capital market regulations relating to the Company's activities as well as SOE governance provisions as regulated by the regulator.
3. Provide an independent opinion in the event of dissenting opinion between the Management and the governance system assessor for the services provided.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of GCG assessor based on independence, scope of assignment, competence, and fee.
5. Reviewing the GCG assessment implementation by internal and external assessors, as well as monitoring the follow-up implementation of GCG assessment results recommendations.
6. Reviewing the complaint handling mechanism relating to the corporate governance system and the implementation of ethics, including whistleblowing system and gratuity prevention.
7. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners on potential conflicts of interest within the Company.
8. Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.
9. Review the governance relationship between the Parent Entity and Subsidiary, including the guidance relationships pattern between Subsidiary in the Company group.
10. Prepare an annual Work Program that includes review to ensure that GCG has been implemented.



Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Komite Kepatuhan

Division of Compliance Committee Duties and Responsibilities

Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite Kepatuhan tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/SK/PPREDEKOM/2024 tanggal 21 Juni 2024 dan adanya perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 8 Juli 2024. Uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Komite Kepatuhan diuraikan sebagai berikut.

The division of duties and responsibilities of each member of the Compliance Committee is set out in the Decree of the Board of Commissioners No. 008/SK/PPREDEKOM/2024 dated June 21, 2024 and the amendment is in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 013/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated July 8, 2024. The description of the division of duties and responsibilities of each member of the Compliance Committee is described as follows.

No	Nama Name	Tugas Duties
1	Albert Simangunsong (Ketua) (Chairman)	1. Kepatuhan dalam melaksanakan perundangan; 2. Kebijakan dan monitoring pelaksanaan GCG; 3. Kebijakan dan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris dan Direksi; 4. Kebijakan dan pelaksanaan bidang CSR; 5. Monitoring pelaksanaan penerapan GCG aspek Dewan Komisaris. 6. Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan, remunerasi dan nominasi); dan 7. Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan Investasi/Aksi Korporasi. 1. Compliance in implementing legislation; 2. Policy and monitoring of GCG implementation; 3. Policy and implementation of KPIs for the Board of Commissioners and Board of Directors; 4. Policy and implementation in CSR field; 5. Monitoring the implementation of GCG aspects of the Board of Commissioners. 6. HR policies and management (development, remuneration and nomination); and 7. Policy, implementation and monitoring of Investment/Corporate Action approval.

2	Abdullah Sigit (Anggota) (Member)	1. Melakukan penelaahan atas mekanisme penerbitan informasi yang wajib dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas. 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap regulasi pasar modal yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan serta ketentuan tata kelola BUMN sebagaimana diatur oleh regulator. 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan penilai sistem GCG atas jasa yang diberikannya. 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan asesor GCG yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kompetensi, dan biaya. 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan penilaian GCG oleh asesor internal maupun eksternal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG. 6. Menelaah mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan penerapan etika Perusahaan, termasuk di dalamnya WBS dan pencegahan gratifikasi. 7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan. 8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. 9. Menelaah hubungan tata kelola antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, termasuk pola hubungan pembinaan Entitas Anak di dalam grup Perusahaan, dan 10. Membuat program kerja tahunan yang memuat telaah untuk memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan 1. Reviewing the mechanism for publishing information that the Company is obliged to release to the public and/or authorities. 2. Reviewing the Company's compliance with capital market regulations related to the Company's activities as well as SOE governance provisions as regulated by the regulator. 3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the GCG system assessor for the services provided. 4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of GCG assessors based on independence, scope of assignment, competence, and cost. 5. Reviewing the implementation of GCG assessments by internal and external assessors, as well as monitoring the implementation of follow-up on recommendations on the results of GCG implementation assessments. 6. Reviewing the complaint handling mechanism related to the Company's governance system and ethical implementation, including WBS and gratification prevention. 7. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners related to potential conflicts of interest of the Company. 8. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information. 9. Reviewing the governance relationship between the Parent Entity and its Subsidiaries, including the pattern of Subsidiaries' coaching relationship within the Company's group, and 10. Creating an annual work program that includes a review to ensure that GCG has been implemented.

3	Bari Srisoenami (Anggota) (Member)	1. Melakukan penelaahan atas mekanisme penerbitan informasi yang wajib dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas. 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap regulasi pasar modal yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan serta ketentuan tata kelola BUMN sebagaimana diatur oleh regulator. 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan penilai sistem GCG atas jasa yang diberikannya. 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan asesor GCG yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kompetensi, dan biaya. 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan penilaian GCG oleh asesor internal maupun eksternal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG. 6. Menelaah mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan penerapan etika Perusahaan, termasuk di dalamnya WBS dan pencegahan gratifikasi. 7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan. 8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. 9. Menelaah hubungan tata kelola antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, termasuk pola hubungan pembinaan Entitas Anak di dalam grup Perusahaan, dan 10. Membuat program kerja tahunan yang memuat telaah untuk memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan. 1. Reviewing the mechanism for publishing information that the Company is obliged to release to the public and/or authorities. 2. Reviewing the Company's compliance with capital market regulations related to the Company's activities as well as SOE governance provisions as regulated by the regulator. 3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the GCG system assessor for the services provided. 4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of GCG assessors based on independence, scope of assignment, competence, and cost. 5. Reviewing the implementation of GCG assessments by internal and external assessors, as well as monitoring the implementation of follow-up on recommendations on the results of GCG implementation assessments. 6. Reviewing the complaint handling mechanism related to the Company's governance system and ethical implementation, including WBS and gratification prevention. 7. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners related to potential conflicts of interest of the Company. 8. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information. 9. Reviewing the governance relationship between the Parent Entity and its Subsidiaries, including the pattern of Subsidiaries' coaching relationship within the Company's group, and 10. Creating an annual work program that contains reviews to ensure that GCG has been implemented.

Pengembangan Kompetensi Komite Kepatuhan

Compliance Committee Competency Development

Sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris, Anggota Komite Kepatuhan dapat mengikuti program pengembangan (Pendidikan atau Pelatihan) setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

According to the policy of the Board of Commissioners, members of the Compliance Committee may attend development programs (education or training) at least once a year.

Komite Kepatuhan Compliance Committee	**Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan** Types and Content of Education and Training	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Penyelenggara** Organizer
Albert Simangunsong	Pelatihan Albert Simangunsong dapat dilihat pada bagian Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Training attended by Albert Simangunsong can be found in the Competency Development Program for the Board of Commissioners and Board of Directors section.		
Indra Jaya Rajagukguk	Pelatihan Indra Jaya Rajagukguk dapat dilihat pada bagian Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Training attended by Indra Jaya Rajagukguk can be found in the Competency Development Program for the Board of Commissioners and Board of Directors section.		
Abdullah Sigit	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
	Risk Based Budgeting (RBB) — Anggaran Berbasis Resiko Risk Based Budgeting (RBB)	Online, 23 Oktober 2024 Online, October 23, 2024	DPS Consulting
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT PP Presisi Tbk
Bari Srisoenami	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 26 Maret 2024 Jakarta, March 26, 2024	PT PP Presisi Tbk
	Implementasi Manajemen Risiko sesuai POJK No. 44/ POJK.05/2020 Implementation of Risk Management according to POJK No. 44/ POJK.05/2020	Jakarta, 29 — 30 Mei 2024 Jakarta, May 29 — 30 2024	PT PP (Persero) Tbk

	Risk Based Budgeting (RBB) — Anggaran Berbasis Resiko Risk Based Budgeting (RBB)	Online, 23 Oktober 2024 Online, October 23, 2024	DPS Consulting
	Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT PP Presisi Tbk

Rapat Komite Kepatuhan

Compliance Committee Meetings

Kebijakan penyelenggaraan rapat Komite Kepatuhan tertuang dalam Piagam Komite Kepatuhan, di mana rapat tersebut dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komite Kepatuhan. Berikut rincian pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan selama tahun 2024.

The policy regarding Compliance Committee meetings is stated in the Compliance Committee Charter, in which the meetings are held periodically at least once a month, and attended by more than half the total members of the Compliance Committee. Below are the details on the Compliance Committee meetings held throughout 2024.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Kepatuhan pada Rapat Komite Kepatuhan Tahun 2024

Recapitulation of Compliance Committee Attendance in Compliance Committee Meetings in 2024

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jumlah Wajib Rapat** Number of Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Albert Simangunsong (Ketua)* (Chairman)*	2	2	100%
Indra Jaya Rajagukguk (Ketua)* (Chairman)*	3	3	100%
Abdullah Sigit (Anggota) (Member)	5	5	100%
Bari Srisoenami (Anggota) (Member)	5	5	100%
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			100&

*) Indra Jaya Rajagukguk tidak lagi menjabat sejak 21 Juni 2024. Posisinya digantikan oleh Albert Simangunsong.

*) Indra Jaya Rajagukguk no longer served since June 21, 2024. He was replaced by Albert Simangunsong.

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #01
COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #01

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
24 Januari 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 1.

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi TW IV 2023.

PESERTA RAPAT:
Komite Kepatuhan: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
SeKom: Woro Endah Waraswati.

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
January 24, 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 1.

MEETING AGENDA:
Preparation for the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors Quarter IV 2023.

MEETING PARTICIPANTS:
Compliance Committee: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
Secretary of Committee: Woro Endah Waraswati.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #02
COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #02

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
25 Maret 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 1.

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Bulan Maret.

PESERTA RAPAT:
Komite Kepatuhan: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
SeKom: Woro Endah Waraswati.

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
March 25, 2024; Wisma Subiyanto, Lounge 1.

MEETING AGENDA:
Preparation for the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors in March.

MEETING PARTICIPANTS:
Compliance Committee: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
Secretary of Committee: Woro Endah Waraswati.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #03
COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #03

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
19 April 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1.

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan I 2024.

PESERTA RAPAT:
Komite Kepatuhan: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
SeKom: Woro Endah Waraswati.

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
April 19, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor.

MEETING AGENDA:
Preparation for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors for the First Quarter of 2024.

MEETING PARTICIPANTS:
Compliance Committee: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
Secretary of Committee: Woro Endah Waraswati.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #04
COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #04

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
22 Juli 2024; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1.

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan II 2024.

PESERTA RAPAT:
Komite Kepatuhan: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
SeKom: Woro Endah Waraswati.

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
July 22, 2024; Wisma Robinson Meeting Room, 1st Floor.

MEETING AGENDA:
Preparation for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors Quarter II of 2024.

MEETING PARTICIPANTS:
Compliance Committee: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
Secretary of Committee: Woro Endah Waraswati.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #05
COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #05

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
24 Oktober 2024; Ruang Rapat Dekom — Plaza PP Lt.3.

AGENDA RAPAT:
Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan III 2024.

PESERTA RAPAT:
Komite Kepatuhan: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
SeKom: Woro Endah Waraswati.

KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR:
Tidak ada.

MEETING DATE AND VENUE:
October 24, 2024; Dekom Meeting Room — Plaza PP Lt.3.

MEETING AGENDA:
Preparation for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors Quarter III of 2024.

MEETING PARTICIPANTS:
Compliance Committee: Indra Jaya Rajagukguk, Abdullah Sigit, Bari Srisoenami.
Secretary of Committee: Woro Endah Waraswati.

ABSENT BOARD OF COMMISSIONERS:
None



Program Kerja dan Realisasi Tugas serta Tanggung Jawab Komite Kepatuhan

Work Programs and the Realization of Compliance Committee's Duties and Responsibilities

Di tahun 2024, Komite Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya melalui kebijakan dan program kerja sebagai berikut.

In 2024, the Compliance Committee has carried out its duties and responsibilities through the following policies and work programs.

No	Kebijakan Kebijakan	Program Kerja Program Kerja	Kegiatan/Realisasi Kegiatan/Realisasi
1	Kebijakan Perusahaan Kebijakan Perusahaan	Monitoring, saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan: • Kepatuhan Manajemen terhadap peraturan yang berlaku. • Peraturan Internal/ Kebijakan/SOP. Monitoring and suggestions on the implementation of applicable laws and regulations for the Company: • Management's compliance with applicable regulations. • Internal Regulations/Policies/ SOP.	Monitoring pada kelengkapan data Aksi Korporasi yang diajukan. • Review Pedoman Sekretaris Komisaris • Review Piagam Komite Audit 2024 • Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2024 • Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT PP Presisi Tbk Tahun 2024. • Review Piagam Audit InternalTahun 2024. • Review Pedoman WBS Tahun 2024. • Review Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024. Monitoring of the completeness of the Corporate Action data submitted. • Review of the Board Secretary Guidelines • Review of the Audit Committee Charter 2024 • Guidelines for the Implementation of the Board of Commissioners' Duties of PT PP Presisi Tbk for 2024 • Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) of PT PP Presisi Tbk for 2024 • Review of the Internal Audit Charter 2024 • Review of the Whistleblowing System (WBS) Guidelines for 2024 • Review of the Formation of the Integrated Governance Committee for 2024
2	Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen Supervision and Guidance on Management's Control and Compliance.	• Melaksanakan koordinasi intemal Komite Kepatuhan, mengikuti Rakom - Rapat Dewan Komisaris dan/atau sesuai arahan mengikuti Ragab - Rapat BeBama/ Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala 2 bulan sekali. • Conduct internal coordination of the Compliance Committee, attend Rakom - Board of Commissioners Meetings and/or, as necessary, attend Ragab - Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors every two months.	Terealisir mengikuti & menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris selama tahun 2024, pada tanggal: • 23 Januari • 24 Januari • 26 Maret • 23 April (2 kali Rapat) • 23 Juli (2 kali Rapat) • 24 October (2 kali Rapat) yang dilanjutkan mengikuti Rapat bersama Dekom dan Direksi, dengan tingkat keha-diran KK 95%. Successfully attended and prepared materials for the Board of Commissioners' Coordination Meetings throughout 2024, on the following dates: • January 23 • January 24 • March 26 • April 23 (2 meetings) • July 23 (2 meetings) • October 24 (2 meetings) yang dilanjutkan mengikuti Rapat bersama Dekom dan Direksi, dengan tingkat keha-diran KK 95%.

		• Memberikan persetujuan atas aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar • Approve corporate actions proposed by the Board of Directors in accordance with the Articles of Association.	Terealisasi, Dekom memberikan Persetujuan atas Aksi Korporasi yang diajukan Direksi, dengan melalui telaah terlebih dahulu dari Komite yang mengacu pada Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar dan Threshold PT PP Presisi Tbk yang berlaku. (lihat penjelasan no.9). Successfully realized, the Board of Commissioners (Dekom) approved the corporate actions proposed by the Board of Directors, after prior review by the Committee, in accordance with the applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the thresholds of PT PP Presisi Tbk. (See explanation no. 9).
		• Menyampaikan laporan secara tertulis tentang usulan RKAP Dekom tahun 2025 • Submit a written report on the proposed 2025 RKAP by the Board of Commissioners.	Telah dilaksanakan, dan disampaikan ke Perseroan sesuai surat Dewan Komisaris: • No. 107/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal: Penyerahan Rencana Anggaran Biaya Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2025 • No.111/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal: Penyerahan Program Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2025 It has been carried out and submitted to the Company in accordance with the letter from the Board of Commissioners: • No. 107/EXT/KOM/PPRE/2024 dated October 1, 2024, regarding the Submission of the Board of Commissioners' Budget Plan for PT PP Presisi Tbk for 2025. • No. 111/EXT/KOM/PPRE/2024 dated October 9, 2024, regarding the Submission of the Board of Commissioners' Work Program for PT PP Presisi Tbk for 2025.
3	Pengendalian & Kepatuhan: Pengawasan Pelaksanaan *Whistle Blowing Sysfem* (WBS) dan Sistem Pengelolaan Gratifikasi Control & Compliance: Supervision of the Implementation of the Whistleblowing System (WBS) and the Gratification Management System.	• *Monitoring*, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS • *Monitoring*, saran dan tindak laniut atas laporan gratifikasi • Monitoring, suggestions, and follow-up on WBS reports. • Monitoring, suggestions, and follow-up on gratification reports.	Laporan WBS disampaikan secara rutin melalui Laporan Kegiatan Biro Internal Audit Triwulanan dan selama tahun 2024 tidak ada laporan terkait WBS. Kebijakan Gratifikasi berkaitan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan untuk mendukung penerapan SMAP, Dewan Komisaris telah menyampaikan Tinjauan Dewan Pengarah atas SMAP PT PP Presisi Tbk melalui surat No. 039/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 4 April 2024 The WBS report is submitted regularly through the Quarterly Internal Audit Bureau Activity Report, and during 2024, there were no reports related to WBS. The Gratification Policy is related to the Anti-Bribery Management System (SMAP); to support the implementation of SMAP, the Board of Commissioners has submitted the Board of Trustees' Review of SMAP PT PP Presisi Tbk through letter No. 039/EXT/KOM/PPRE/2024 dated April 4, 2024.

4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Supervision of the Implementation of Policies.	Pengelolaan Entitas Anak. Management of Subsidiaries.	Komite kepatuhan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris pada tanggal 24 Januari 2024 terkait penegasan keberlanjutan anak perusahan PT PP Presisi Tbk yaotu PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA") dan kemudian Dewan Komisaris bersurat memohon arahan kepada PSM sesuai surat No. 024/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Permohonan Arahan terhadap Surat Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk terkait dengan Permohonan Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk yaitu PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA") . The Compliance Committee provided input to the Board of Commissioners during the Board's Internal Meeting on January 24, 2024, regarding the affirmation of the continuity of the subsidiary PT PP Presisi Tbk, namely PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA"). The Board of Commissioners then sent a letter requesting guidance from the Shareholders' Meeting (PSM) in accordance with letter No. 024/EXT/KOM/PPRE/2024 dated February 27, 2024, regarding the Request for Guidance on the Board of Commissioners' Letter of PT PP Presisi Tbk concerning the Request for Affirmation of the Continuity or Dissolution of the Subsidiary PT PP Presisi Tbk, PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA").
5	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan SDM Supervision of the Implementation of HR Policies.	Pengelolaan SDM meliputi Rekrutrnen, Manajemen Karir, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai. Human Resource Management includes Recruitment, Career Management, Promotions, Transfers, and Demotions of Employees.	Komite Audit berkoordinasi dengan Komite Kepatuhan memberikan usulan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya menjadi salah satu dasar Dewan Komisaris dalam memberikan arahan terkait: • surat No. 073/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Arahan terkait Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tahun 2024; • surat No. 094/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Arahan dan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tahun 2024; dan • surat No. 104/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Perubahan Struktur Organisasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi Tahun 2024 The Audit Committee, in coordination with the Compliance Committee, provides proposals to the Board of Commissioners, which then becomes one of the bases for the Board of Commissioners in providing guidance related to: • Letter No. 073/EXT/KOM/PPRE/2024 dated July 2, 2024, regarding Guidance on the Organizational Structure Changes of PT PP Presisi in 2024; • Letter No. 094/EXT/KOM/PPRE/2024 dated August 20, 2024, regarding Guidance and Approval of the Organizational Structure Changes of PT PP Presisi in 2024; and • Letter No. 104/EXT/KOM/PPRE/2024 dated September 17, 2024, regarding the Organizational Structure Changes of PT Lancarjaya Mandiri Abadi in 2024.

			Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi, setelah melalui proses telaah Komite Audit bekerjasama dengan Komite Kepatuhan, melalui surat Dewan Komisaris memberikan arahan diantaranya terkait: • surat No. 046/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Pengangkatan Plt Direktur Utama PT PP Presisi Tbk; dan • surat No. 088/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekertaris Perusahaan n relation to the organizational structure changes, after undergoing a review process, the Audit Committee, in collaboration with the Compliance Committee, provided guidance through a letter from the Board of Commissioners, including but not limited to the following: • Letter No. 046/EXT/KOM/PPRE/2024 dated April 26, 2024, regarding the Appointment of the Acting President Director of PT PP Presisi Tbk; and • Letter No. 088/EXT/KOM/PPRE/2024 dated July 24, 2024, regarding Guidance and Approval of the Appointment of the Corporate Secretary.
6	Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak Remuneration, Nomination, and Succession of the Board of Directors as well as the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries.	Pencapaian KPI Korporat. Achievement of Corporate KPIs.	Realisasi pencapaian KPI Korporat PPRE tahun 2022 telah dilaporkan ke PSM melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengaasan Dekom 2022 dengan surat no. 054/EXT/KOM/PPRE/V/ 2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022. Realisasi pencapaian KPI Korporat periode Triwulanan disampaikan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan kepada PSM, — lihat penjelasan no 11a The realization of the 2022 Corporate KPI achievements was reported to the Shareholders' Meeting (PSM) through the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for 2022, with letter No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 15, 2023, regarding the Response and Suggestions of the Board of Commissioners on the Audited Financial Statements for the 2022 Fiscal Year of PT PP Presisi Tbk, as well as the Submission of the Supervisory Task Report and Realization of the Board of Commissioners' Performance for the 2022 Fiscal Year. The realization of the quarterly Corporate KPI achievements is submitted in the Quarterly Performance Evaluation Report to the PSM — see explanation no. 11a.

		Monitoring pelaksanaan Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, yang telah diputuskan oleh PSM dalam hal ini PT PP (Persero)tbk Monitoring the implementation of Remuneration, Nomination, and Succession of the Company's Board of Directors, as well as the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, as decided by the Shareholders' Meeting (PSM), in this case, PT PP (Persero) Tbk.	Komite Kepatuhan menjalankan kegiatan ini dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-03/MBU/ 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan di bulan Maret 2023; dan KK telah mempelajari Peraturan diatas khusus-nya Bab V tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Menjadi wewenang Pemegang Saham Mayoritas (PSM) sehingga Dewan Komisaris tidak melakukan pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi. Komite Audit dan Komite Kepatuhan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk membuat surat permohonan arahan terkait penetapan tantiem/insentif kinerja Direksi karena hal tersebut menjadi wewenang Pemegang Saham Mayoritas (PSM). The Compliance Committee carries out this activity by referring to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/2023 concerning the Organizational Structure and Human Resources of State-Owned Enterprises, established in March 2023; and the Committee has studied this regulation, particularly Chapter V regarding the Procedures for the Appointment of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries. The authority lies with the Majority Shareholder (PSM), so the Board of Commissioners does not propose remuneration and nomination for the Board of Directors. The Audit Committee and the Compliance Committee propose to the Board of Commissioners to issue a letter requesting guidance regarding the determination of performance bonuses/incentives for the Board of Directors, as this falls under the authority of the Majority Shareholder (PSM).
7	GCG	1. Pelaksanaan Assessment penerapan GCG 2024, 1. Implementation of the GCG (Good Corporate Governance) Assessment for 2024.	Tahun 2024 tidak ada Assessment penerapan GCG 2024. Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Perseroan, sesuai dengan surat No. 015/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Pengukuran Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), agar berkoordinasi dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) selaku Induk Perseroan sehubungan dengan tidak berlakunya SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 terkait dengan penilaian dan evaluasi penerapan GCG. Sesuai hasil koordinasi Perseroan dengan PTPP dan sesuai surat No. 110/EXT/DIR/PPRE/2024 tanggal 6 Februari 2024 disampaikan bahwa Perseroan tidak melaksanakan Assessment Penerapan GCG untuk tahun buku 2023.

			In 2024, there was no GCG (Good Corporate Governance) Assessment conducted. The Board of Commissioners provided guidance to the Company, as per letter No. 015/EXT/KOM/PPRE/2024 dated January 25, 2024, regarding the Implementation of the Measurement of Good Corporate Governance (GCG) Practices, to coordinate with PT PP (Persero) Tbk (PTPP) as the parent company, regarding the non-application of SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning the assessment and evaluation of GCG implementation. According to the results of the coordination between the Company and PTPP and in accordance with letter No. 110/EXT/DIR/PPRE/2024 dated February 6, 2024, it was conveyed that the Company did not conduct the GCG Implementation Assessment for the 2023 fiscal year.
		2. Review Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG tahun buku 2023, 3. *Monitoring* atas penerapan prinsip - prinsip GCG, termasuk didalamnya pelaksanaan Tindak Lanjut AOI hasil *assessment/self assessment.* 2. Review of the GCG (Good Corporate Governance) Implementation Assessment Report for the 2023 fiscal year. 3. Monitoring the implementation of GCG principles, including the follow-up actions on the AOI (Areas of Improvement) from the assessment/self-assessment results.	1. Dewan Komisaris bersurat kepada Direksi Perseroan Nomor: 013/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Realisasi Tindak Lanjut AOI GCG Aspek Dekom 2. Dewan Komisaris bersurat kepada Direksi Perseroan No: 015/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Pengukuran Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) 1. The Board of Commissioners sent a letter to the Board of Directors of the Company, No. 013/EXT/KOM/PPRE/2024 dated January 22, 2024, regarding the Realization of the Follow-up Actions on the AOI (Areas of Improvement) GCG Aspects for the Board of Commissioners. 2. The Board of Commissioners sent a letter to the Board of Directors of the Company, No. 015/EXT/KOM/PPRE/2024 dated January 25, 2024, regarding the Implementation of the Measurement of Good Corporate Governance (GCG) Practices. Monitoring pada kelengkapan data Aksi Korporasi yang diajukan (lihat penjelasan no.9). AOI *Assessment* Penerapan GCG pada tahun-tahun sebelumnya sudah terlaksana. Menunggu arahan dari PTPP dan jika ada *Assessment* Penerapan GCG maka akan dilaksanakan di Triwulan I 2025. Monitoring the completeness of the corporate action data submitted (see explanation no. 9). The AOI Assessment of GCG Implementation in previous years has been completed. We are awaiting guidance from PTPP, and if a GCG Implementation Assessment is conducted, it will take place in the first quarter of 2025.

8	RUPST dan RUPSLB RUPST and RUPSLB	Pendapat & Tanggapan terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB. • RUPST: BA Pimpinan RUPST, Laporan Tugas Pengawasan Dekom; • RUPSLB: BA Pimpinan RUPSLB Opinions & Responses regarding the matters discussed in the Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB). • RUPST: Minutes of the Chairperson of the RUPST, Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; • RUPSLB: Minutes of the Chairperson of the RUPSLB.	RUPST tahun buku 2023 dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024. Komite Audit bersama dengan Komite Kepatuhan Saat RUPST tahun buku 2023, telah disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dekom tahun 2023 sesuai surat No. 060/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 Tahun 2024 tidak ada RUPSLB The RUPST for the 2023 fiscal year was held on June 5, 2024. During the RUPST for the 2023 fiscal year, the Audit Committee, together with the Compliance Committee, presented the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for 2023, in accordance with letter No. 060/EXT/KOM/PPRE/2024 dated May 31, 2024, regarding the Response and Suggestions of the Board of Commissioners on the Audited Financial Statements for the 2023 Fiscal Year of PT PP Presisi Tbk, as well as the Submission of the Supervisory Task Report and Realization of the Board of Commissioners' Performance for the 2023 Fiscal Year. There was no RUPSLB in 2024.
9	Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action* Investment, Business Development, and Corporate Action.	Memberikan persetujuan dan rekomendasi serta arahan terhadap rencana Investasi, Pengembang-an Bisnis dan *Corporate Action*, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar dan atau threshold PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas Memberikan persetujuan dan rekomendasi serta arahan terhadap rencana Investasi, Pengembang-an Bisnis dan Corporate Action, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar dan atau threshold PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas	Komite Kepatuhan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Komite Audit. Telaah terhadap kelengkapan dokumen, prosesnya, dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan atau threshold dari PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. Persetujuan (arahan/ rekomendasi) Dekom atas Aksi Korporasi Tahun 2024, diantaranya: • Arahan terkait Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Fasilitas Kredit Eksisting dan Perolehan Baru Fasilitas Kredit Transaksi Khusus (5 Januari 2024); • Arahan terkait Pemberitahuan Atas Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Non-Cash Loan, Switchable Cash Loan Trade dan Perpanjangan Serta Penurunan Atas Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional (10 Januari 2024); • Permohonan Arahan kepada PT PP (Persero) Tbk terhadap Surat Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk terkait dengan Permohonan Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk yaoti PT Presisi Sumber Anugerah (PSA) (27 Februari 2024); • Arahan Pemberitahuan Perpanjangan dan Perubahan Fasilitas Kredit pada Perbankan (25 Maret 2024); • Persetujuan dan Arahan atas Perolehan Fasilitas Kredit pada Perbankan (26 Maret 2024);

- Arahan terkait Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tahun 2024 (5 Juli 2024);
- Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (24 Juli 2024); dan
- Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk (20 Agustus 2024)

The Compliance Committee, either independently or in collaboration with the Audit Committee, reviews the completeness of documents, processes, and other aspects based on applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or the threshold set by PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.

Approval (guidance/recommendations) from the Board of Commissioners regarding Corporate Actions for 2024 includes:

- Guidance on the Request for Approval of Changes to Existing Credit Facilities and the Acquisition of New Special Transaction Credit Facilities (January 5, 2024);
- Guidance on the Notification of the Extension of Non-Cash Loan Credit Facilities, Switchable Cash Loan Trade, and Extension and Reduction of Transactional Working Capital Credit Facilities (January 10, 2024);
- Request for Guidance to PT PP (Persero) Tbk regarding the Board of Commissioners' Letter of PT PP Presisi Tbk regarding the Request for Confirmation of Continuation or Dissolution of the Subsidiary PT Presisi Sumber Anugerah (PSA) (February 27, 2024);
- Guidance on the Notification of the Extension and Changes to Credit Facilities with Banks (March 25, 2024);
- Approval and Guidance on the Acquisition of Credit Facilities with Banks (March 26, 2024);
- Guidance on Changes to the Organizational Structure of PT PP Presisi in 2024 (July 5, 2024);
- Approval Guidance for the Appointment of the Corporate Secretary (July 24, 2024);
- Approval of Changes to the Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk (August 20, 2024).

10	Penyusunan RKA Tahunan 2024 dan RJPP Preparation of the 2024 Annual Budget (RKA) and Long-Term Corporate Plan (RJPP).	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKA tahunan 2024 dan Review RJPP ; • Pandangan dan Masukan Komite Kepatuhan terkait Penyusunan RKA Tahunan 2024 & RJPP • Pembahasan BOD dan BOC atas Rancangan RKA Tahunan 2024 & RJPP • Pengesahan RKA Tahunan 2025 & RJPP Suggestions and Approval on the preparation of the 2024 annual RKA and Review of the RJPP; • Views and Inputs from the Compliance Committee regarding the Preparation of the 2024 Annual Budget (RKA) & Long-Term Corporate Plan (RJPP) • Discussion between the Board of Directors (BOD) and the Board of Commissioners (BOC) on the Draft of the 2024 Annual Budget (RKA) & RJPP • Approval of the 2025 Annual Budget (RKA) & Long-Term Corporate Plan (RJPP).	Selama Tahun 2024, Komite Kepatuhan membantu Komite Audit melakukan telaah terhadap Draft Telaah RKAP Perseroan, diantaranya: 1. Hasil Telaah/Review Revisi RKAP Tahun 2024 PT PP Presisi Tbk (9 Juli 2024); dan 2. Hasil Telaah/Review terhadap draft RKAP tahun 2025 (20 November 2024). 3. Dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan II pada tanggal 24 Oktober 2024 Pengesahan RKAP Tahun 2025 telah dilakukan pada tanggal 24 Desember 2024. Throughout 2024, the Compliance Committee assisted the Audit Committee in reviewing the Draft of the Company's Annual Work Plan (RKAP), including: • Results of the Review/Reassessment of the 2024 RKAP Revision of PT PP Presisi Tbk (July 9, 2024); and • Results of the Review/Reassessment of the 2025 RKAP draft (November 20, 2024). • Discussed in the Coordination Meeting with the Board of Commissioners and Directors for Quarter II on October 24, 2024. The ratification of the 2025 RKAP was carried out on December 24, 2024.

11	Laporan Manajemen Management Report	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Pemegang Saham Mayoritas (PSM), • Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dekom Tahunan, • Persetujuan Laporan Tahunan (*Annual Report*) • Preparation of Quarterly Performance Reports to the Majority Shareholder (PSM), • Preparation of the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners, • Approval of the Annual Report.	Telah terealisasi Komite Kepatuhan berkoordinasi dengan Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan kepada PSM, diantaranya surat: • surat No 124/EXT/KOM/PPRE/2024 pada tanggal 18 November 2024, perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Triwulan III Tahun 2024. • surat No 098/EXT/KOM/PPRE/2023 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 • surat No. 060/EXT/ KOM/PPRE/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 PT PP (Persero) Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. Has been realized that the Compliance Committee, in coordination with the Audit Committee, assisted the Board of Commissioners in the preparation of the Quarterly Performance Report submitted to the PSM, including the letter: • Letter No. 124/EXT/KOM/PPRE/2024 dated November 18, 2024, regarding the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk for the Third Quarter of 2024. • Letter No. 098/EXT/KOM/PPRE/2023 dated August 30, 2024, regarding the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners up to the Second Quarter of 2024. • Letter No. 060/EXT/KOM/PPRE/2024 dated May 31, 2024, regarding: Response and Suggestions of the Board of Commissioners on the Audited Financial Statements for the 2023 Fiscal Year of PT PP (Persero) Tbk and Submission of the Supervisory Duties Report and Performance Realization of the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year. Laporan Tugas Pengawasan Dekom Tahunan Tahun Buku 2023 disampaikan bersamaan dengan Evaluasi Kinerja tahun 2023 (*Audited*), akan dilaporkan ke PT PP (Persero) Tbk — PSM; sebelum pelaksanaan RUPST tahun buku 2023 pada tahun 2024. The Annual Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year was submitted together with the 2023
			Telah dilaksanakan saat penyusunan *Annual Report* tahun 2024, diwakili oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Kepatuhan Untuk penyusunan *Annual Report* tahun 2024 dilaksanakan di Triwulan I tahun 2025. It was carried out during the preparation of the 2024 Annual Report, represented by the Secretary of the Board of Commissioners and the Compliance Committee. The preparation of the 2024 Annual Report was conducted in the first quarter of 2025.

12	Pengembangan Dekom Board of Commissioners Development	Seminar, workshop atau sebagai nara sumber Seminars, workshops, or as a resource person.	Telah terealisir pada tanggal 24 Juli 2024, sesuai surat Direksi No. 691/EXT/DIR/PPRE/2024 tanggal 24 Juli 2024, perihal Undangan Rapat Perkenalan Direksi Baru PT PP PresisiTbk. Terealisir, dan monitoring dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Has been realized on July 24, 2024, in accordance with the Board of Directors' letter No. 691/EXT/DIR/PPRE/2024 dated July 24, 2024, regarding the Invitation to the Introduction Meeting of the New Board of Directors of PT PP Presisi Tbk. It has been realized, and monitoring is carried out by the Secretary of the Board of Commissioners.
13	Tindak lanjut hasil keputusan, dan arahan Dekom Follow-up on the results of decisions and directions from the Board of Commissioners.	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi/arahan Deko Monitoring the follow-up on the results of decisions, recommendations/directions from the Board of Commissioners.	Koordinasi dengan Komite Audit, Sekretaris Dewan Komisaris maupun Manajemen/Perseroan, berdasarkan Minit Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. Coordination with the Audit Committee, Secretary of the Board of Commissioners, and Management/Company, based on the Minutes of the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Directors.
14	Evaluasi Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris Performance Evaluation of the Committees under the Board of Commissioners.	Evaluasi Laporan kegiatan Komite Audit dan Komite Kepatuhan dengan periode triwulanan Evaluation of the activities report of the Audit Committee and Compliance Committee on a quarterly basis.	Telah disampaikan kepada Dekom sesuai dengan Surat No. 005/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 23 Janauri 2024 perihal Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Komite Kepatuhan Tahun 2023 Evaluasi Kinerja Komite Audit, per Triwulan, diantaranya: • Laporan Kegiatan Komite Kepatuhan Triwulan I tahun 2024 disampaikan melalui surat No. 009/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 24 Mei 2024; • Laporan Kegiatan Komite Kepatuhan Triwulan II tahun 2024 disampaikan melalui surat No. 011/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 5 Agustus 2024; dan • Laporan Kegiatan Komite Kepatuhan Triwulan III tahun 2024 disampaikan melalui surat No. 012/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

		It has been submitted to the Board of Commissioners in accordance with Letter No. 005/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 dated January 23, 2024, regarding the Submission of the Realization Report on the Implementation of the Work Plan of the Compliance Committee of PT PP Presisi Tbk for 2023 and the Evaluation of the Performance of the Compliance Committee for 2023. Evaluation of the Performance of the Audit Committee, on a quarterly basis, including: • The Activity Report of the Compliance Committee for the First Quarter of 2024 was submitted through Letter No. 009/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 dated May 24, 2024; • The Activity Report of the Compliance Committee for the Second Quarter of 2024 was submitted through Letter No. 011/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 dated August 5, 2024; and • The Activity Report of the Compliance Committee for the Third Quarter of 2024 was submitted through Letter No. 012/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 dated October 18, 2024.

Penelaahan Komite Kepatuhan

Compliance Committee Review

Di tahun 2024, Komite Kepatuhan telah melakukan penelaahan atas pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

In 2024, the Compliance Committee reviewed the supervision of the Company's business activities as described in the following details

Nomor Surat Letter Number	**Tanggal Surat** Letter Date	**Perihal** Subject
Disposisi Telaah Disposisi Telaah		
039/INT/KOM/PPRE/2024	16 November 2024	Pembuatan Telaah/Review atas Kontrak Manajemen (KPI) PT PP Presisi Tbk Dalam Draft RKAP 2025. Preparation of the Review/Assessment of the Management Contract (KPI) of PT PP Presisi Tbk in the Draft RKAP 2025.
045/INT/KOM/PPRE/2024	13 Desember 2024	Pembuatan Telaah atas Pemberitahuan Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi. Preparation of the Review on the Notification of the Distribution of Duties and Authorities of the Board of Directors.
Hasil Telaah Hasil Telaah		
003/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024	22 Januari 2024	Progress Report on the Follow-up Actions of the AOI from the GCG Implementation Assessment 2022 for the Board of Commissioners' Aspect as of December 31, 2023. Preparation of the Review/Assessment of the Management Contract (KPI) of PT PP Presisi Tbk in the Draft RKAP 2025.
016/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024	20 November 2024	Hasil Review Komite Kepatuhan terhadap Kontrak Manajemen (KPI) PT PP Presisi Tbk Dalam Draft RKAP 2025 Results of the Compliance Committee's Review of the Management Contract (KPI) of PT PP Presisi Tbk in the Draft RKAP 2025.
020/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024	26 Desember 2024	Hasil Review Komite Kepatuhan terhadap Pemberitahuan Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Results of the Compliance Committee's Review of the Notification of the Distribution of Duties and Authorities of the Board of Directors.

Adapun penelaahan Komite Kepatuhan bersama Komite Audit atas pengawasannya terhadap kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2024 telah termuat pada bab Tata Kelola Perusahaan bagian Komite Audit dalam laporan tahunan ini.

A joint review by the Compliance Committee and the Audit Committee on their supervision over the Company's business activities in 2024 has been included in the Corporate Governance chapter under the Audit Committee's section in this annual report.

Rekomendasi dan Saran Komite Kepatuhan

Compliance Committee Recommendation and Suggestions

Komite Kepatuhan sebagai organ dari Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada Perseroan, salah satu fungsinya adalah *monitoring* kepatuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan pengurusan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain dalam pelaksanaan Aksi Korporasi. Dalam melaksanakan fungsinya Komite Kepatuhan berkolaborasi dengan Komite Audit.

Komite Kepatuhan juga menjalankan tugas sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi; dan dalam menjalankan tugas ini Komite Kepatuhan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya manusia BUMN.

Berikut beberapa rekomendasi dan saran Komite Kepatuhan di tahun 2024 sesuai hasil telaah, yang telah disampaikan kepada Direksi melalui surat arahan Dewan Komisaris, antara lain:

The Compliance Committee, as an organ of the Board of Commissioners, is tasked with supervising and providing advice to the Company. One of its functions is to monitor the Company's compliance in conducting its management activities in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, including in the execution of Corporate Actions. In performing its function, the Compliance Committee collaborates with the Audit Committee.

The Compliance Committee also carries out the duties of the Remuneration and Nomination Committee. In fulfilling these duties, the Compliance Committee refers to applicable laws and regulations, including, among others, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Number Per-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs.

Below are the Compliance Committee's recommendations and suggestions in 2024, that have been delivered in review results or Board of Commissioners letter to the Board of Directors:

No	**Surat Arahan Dewan Komisaris berdasarkan telaah Komite Kepatuhan** Surat Arahan Dewan Komisaris berdasarkan telaah Komite Kepatuhan
1	**Pengelolaan Anak Perusahaan:** Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 024/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Permohonan Arahan terhadap Surat Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk terkait dengan Permohonan Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk yaitu PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA") kepada PT PP (Persero) Tbk sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk **(PPRE)** No.40 tanggal 27 April 2022, Pasal 16 ayat 7.i huruf h: Perbuatan-perbuatan dibawah ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: 'Melakukan penggabungan, peleburan, pengembilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan ketentuan di bidang Pasar Modal'; 2. Bahwa berdasarkan kepada surat PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas No. 10/EXT/PP/DSH/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi pada Anak Perusahaan PT PP (Persero) Tbk. Angka 5: Melakukan penggabungan, peleburan, pengembilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan menjadi kewenangan RUPS **Catatan:** RUPS dalam hal ini adalah RUPS PT PSA, dimana berdasarkan Akta PT PSA No. 2 tanggal 12 Mei 2022: PT PP Presisi Tbk adalah Pemegang Saham, untuk dapat melakukan RUPS, maka PT PP Presisi Tbk harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk dan PT PP (Persero) Tbk, sebagai Pemegang Saham Mayoritas. Bahwa keberlanjutan kegiatan usaha PT PSA menjadi tanggung jawab PT PP Presisi Tbk, sesuai dengan jumlah kepemilikan saham PT PP Presisi Tbk pada PT PSA, dan juga kepemilikan saham tersebut telah tercatat pula dalam laporan keuangan PT PP Presisi Tbk, sehingga PT PP Presisi Tbk perlu dengan segera melakukan tindak lanjut atas kegiatan usaha PT PSA

Subsidiary Management:
Based on the Board of Commissioners' Letter No. 024/EXT/KOM/PPRE/2024 dated February 27, 2024, regarding the Request for Direction on the Board of Commissioners' Letter of PT PP Presisi Tbk regarding the Request for Confirmation of Continuation or Dissolution of PT PP Presisi Tbk's Subsidiary, PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA"), to PT PP (Persero) Tbk, the following guidance is provided:

1. According to the Articles of Association of PT PP Presisi Tbk (PPRE) No. 40 dated April 27, 2022, Article 16 paragraph 7.i letter h: The following actions must receive written approval from the Board of Commissioners: 'Merging, consolidating, acquiring, separating, and dissolving subsidiaries and joint ventures with a value set by the Board of Commissioners, taking into account provisions in the Capital Market sector.'

2. Based on the letter from PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder No. 10/EXT/PP/DSH/2022 dated March 15, 2022, regarding the Limitations and/or Criteria of the Board of Commissioners' and Board of Directors' Authority over PT PP (Persero) Tbk's Subsidiaries, item 5: Merging, consolidating, acquiring, separating, and dissolving subsidiaries and joint ventures is the authority of the General Meeting of Shareholders (GMS).

The continuation of PT PSA's business activities is the responsibility of PT PP Presisi Tbk, in accordance with the shareholding percentage of PT PP Presisi Tbk in PT PSA. This shareholding is also recorded in the financial statements of PT PP Presisi Tbk. Therefore, PT PP Presisi Tbk must immediately take action to follow up on PT PSA's business activities.

2

Pengadaan Investasi Alat Berat:
Berdasarkan Surat Direksi No. 253/EXT/DIR/PPRE/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Permohonan Persetujuan atas Investasi Alat Berat pada Proyek *Hauling Road Maintenance* PT Weda Bay Nickel, Dewan Komisaris memberikan arahan sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Investasi Alat Berat tersebut diatas, adalah menjadi kewenangan dari Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk dan Pemegang Saham Mayoritas dalam hal ini PT PP (Persero) Tbk.
2. Direksi Perseroan agar selalu memperhatikan *cash flow* dalam merealisasikan pembayaran pokok dan Bunga serta selalu mengedepankan kajian risiko dan mitigasinya dalam pelaksanaan Investasi Alat Berat

Meminta Direksi Perseroan untuk melaksanakan Aksi Korporasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Procurement of Heavy Equipment Investment:
Based on the Directors' Letter No. 253/EXT/DIR/PPRE/2024 dated February 7, 2024, regarding the Request for Approval of Heavy Equipment Investment for the Hauling Road Maintenance Project at PT Weda Bay Nickel, the Board of Commissioners provides the following guidance:

1. The approval for the Heavy Equipment Investment mentioned above falls under the authority of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk and the Majority Shareholder, PT PP (Persero) Tbk.
2. The Board of Directors should always pay attention to cash flow when realizing principal and interest payments, and should consistently prioritize risk assessments and mitigation measures in the implementation of Heavy Equipment Investment.

The Board of Commissioners requests the Board of Directors to carry out the corporate actions as mentioned above in accordance with the Articles of Association, the Company's Regulations, relevant laws and regulations, and by prioritizing Good Corporate Governance.

3

Perubahan Struktur Organisasi:
Berdasarkan Surat Direksi PT PP Presisi Tbk No.814/EXT/D|R/PPRE/2024 tanggal 9 Agustus 2024 perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk;, Dewan Komisaris memberikan arahan sebagai berikut:
1. Menyetujui Perubahan Struktur Organisasi Perseroan sesuai hasil advisory Aksi Korporasi dengan HCM PT PP (Persero) Tbk. Perseroan agar memperhatikan arahan HCM PT PP (Persero) Tbk bahwa perubahan Departemen *Corporate Marketing* menjadi di bawah Dewan Direksi, disertai dengan menunjuk salah satu Direktur sebagai Pembina Departemen *Corporate Marketing* untuk mempermudah alur komunikasi dan *monitoring* pemasaran.
2. Menyiapkan Peraturan Perusahaan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari perubahan struktur organisasi tersebut, antara lain menyusun *job description* termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi;

3. terkait pengangkatan *Equipment Managing* Director, Dewan Komisaris meminta agar tidak sebatas pengelolaan peralatan yang sedang dipergunakan akan tetapi juga termasuk seluruh peralatan yang dimiliki PT PP Presisi Tbk termasuk peralatan yang idle yang membebani *cash flow* Perusahaan. *Equipment Managing* Director berlanggung jawab dalam perencanaan peralatan, pengelolaan produktifitas peralatan dan divestasi.
4. Menyusun proses koordinasi intemal Dewan Direksi dalam pembahasan lebih detail terkait perubahan struktur organisasi ini. Meminta Direksi Perseroan untuk melaksanakan Aksi Korporasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, Peraturan Perundang-undangan yang terkait serta dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Organizational Structure Change:
Based on the Directors' Letter of PT PP Presisi Tbk No. 814/EXT/DIR/PPRE/2024 dated August 9, 2024, regarding the Approval of the Organizational Structure Change of PT PP Presisi Tbk, the Board of Commissioners provides the following guidance:
1. Approves the change in the Company's organizational structure in accordance with the results of the Corporate Action advisory with HCM PT PP (Persero) Tbk. The Company must adhere to HCM PT PP (Persero) Tbk's guidance, which suggests that the Corporate Marketing Department be placed under the Board of Directors, along with the appointment of one of the Directors as the Department's Supervisor to facilitate communication flow and marketing monitoring.
2. Prepare further Company Regulations as the implementation of the organizational structure change, including drafting job descriptions, task distribution, and authority allocation for the Board of Directors.
3. Regarding the appointment of the Equipment Managing Director, the Board of Commissioners requests that the role not only manage the equipment currently in use but also include all equipment owned by PT PP Presisi Tbk, including idle equipment that burdens the Company's cash flow. The Equipment Managing Director will be responsible for equipment planning, productivity management, and divestment.
4. Develop internal coordination processes within the Board of Directors to discuss the organizational structure changes in more detail. The Board of Commissioners requests the Board of Directors to carry out the corporate actions as mentioned above in accordance with the Articles of Association, the Company's Regulations, relevant laws and regulations, and by prioritizing Good Corporate Governance..

4

Pengangkatan *Corporate Secretary.*
Berdasarkan Surat Direksi PT PP Presisi Tbk No. 704/EXT/DIR/PPRE/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan *Corporate Secretary*, Dewan Komisaris memberikan arahan sebagai berikut:
1. Menyetujui penunjukan Sdri Mei Elsa Kembaren, sebagaiVice President Corporate Secretary PT PP Presisi Tbk., melalui Memorandum PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, dengan ketentuan selama menjabat harus melengkapi persyaratan POJK No. 35/P0JK.0412014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sekurang-kurangnya: cakap melakukan perbuatan hukum; memiliki penqetahuan dan pemahaman di bidanq hukum, keuanqan, dan tata kelola perusahaan; memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dapat berkomunikasi dengan baik; dan berdomisili di Indonesia, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu mendasarkan pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Risk & Compliance dalam setiap tindakannya.
2. Bahwa sesuai POJK No 35/P0JK.0412014, maupun Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI nomor PER-2/MBU/0312023 tersebut diatas, bahwa tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan cukup penting antara lain sebagai penghubung Perseroan dengan pemangku kepentingan,
3. Untuk itu Vice President Corporate Secretary yang ditunjuk agar meningkatkan kompetensinya untuk memenuhi persyaratan yang diminta POJK nomor 35/POJK.04/2014 maupun Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU10312023, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam bidang Pasar Modal, dan
4. Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan kesanggupannya sebagai Sekretaris Perusahaan dan memenuhi persyaratan yang diwajibkan sesuai POJK nomor 35/POJK.04/2014 maupun Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/O312023 serta Peraturan Perundangundangan yang berlaku,

Meminta Direksi Perseroan untuk melaksanakan Aksi Korporasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang terkait serta dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Appointment of Corporate Secretary

Based on the Directors' Letter of PT PP Presisi Tbk No. 704/EXT/DIR/PPRE/2024 dated July 16, 2024, regarding the Request for Approval of the Appointment of Corporate Secretary, the Board of Commissioners has provided the following guidance:

1. Approves the appointment of Ms. Mei Elsa Kembaren as the Vice President of Corporate Secretary of PT PP Presisi Tbk, through a memorandum from PT PP (Persero) Tbk as the majority shareholder of the Company. It is required that during her tenure, she must meet the requirements of Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, which include: legal capacity, knowledge, and understanding in the fields of law, finance, and corporate governance; familiarity with the business activities of Issuers or Public Companies; good communication skills; and residing in Indonesia. Additionally, she must always adhere to Good Corporate Governance, Risk & Compliance in her daily tasks.
2. In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 and the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are crucial, including serving as a liaison between the Company and stakeholders.
3. The appointed Vice President of Corporate Secretary is required to enhance her competence to meet the qualifications required by POJK No. 35/POJK.04/2014, the Regulation of the Ministry of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, the Company's Articles of Association, and the relevant regulations, especially in the Capital Market field
4. The Vice President of Corporate Secretary is required to sign an Integrity Pact declaring her commitment as Corporate Secretary and meeting the required conditions as stipulated in POJK No. 35/POJK.04/2014, the Regulation of the Ministry of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, and applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners requests the Board of Directors to carry out the corporate actions as mentioned above in accordance with the Articles of Association, the Company's Regulations, relevant laws and regulations, and by prioritizing Good Corporate Governance.

5

Perbankan.

Tahun 2024, Perseroan menyampaikan/mengajukan permohonan masalah perbankan antara lain Perubahan *Offering Letter* Fasilitas KMK dan TK pada PT Bank BRI (Persero) Tbk, Persetujuan atas Perolehan Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Pemberitahuan Perpanjangan dan Perubahan Fasilitas Kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, Tbk (Bank "BJB").

Untuk masalah Perbankan, pada dasarnya Dewan Komisaris memberikan arahan, antara lain:

1. Direksi selalu melakukan pembaharuan kajian Keuangan, Manajemen Risiko berikut mitigasinya dan Hukum sehingga pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bank
2. Komite melalui Dewan Komisaris meminta Direksi Perseroan mempersiapkan *schedule* rencana *cash flow* untuk merealisasikan pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bank;

3. Khusus untuk pembelian Alat Berat, Dewan Komisaris meminta agar Aksi Korporasi tersebut dilakukan sesuai Anggaran Dasar, *Threshold* dan Peraturan Perusahaan terkait

Meminta Direksi Perseroan untuk melaksanakan Aksi Korporasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, Peraturan Perundang-undangan yang terkait serta dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Banking Matters.

In 2024, the Company submitted requests regarding banking matters, including the amendment of the Offering Letter for the KMK and TK facilities with PT Bank BRI (Persero) Tbk, approval for obtaining a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and notification of the extension and modification of the credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank "BJB").

For banking matters, the Board of Commissioners has provided the following guidance:

1. The Board of Directors is to continuously update financial studies, risk management assessments, and their mitigation strategies, ensuring that principal and interest payments are made in accordance with the schedules provided by the bank.
2. The Committee, through the Board of Commissioners, requests that the Board of Directors prepare a cash flow schedule to ensure the timely realization of principal and interest payments as per the bank's schedule;
3. Specifically for heavy equipment purchases, the Board of Commissioners requests that such corporate actions be carried out in accordance with the Articles of Association, thresholds, and relevant company regulations.

The Board of Commissioners instructs the Board of Directors to execute the aforementioned corporate actions in accordance with the Articles of Association, company regulations, applicable laws and regulations, while prioritizing Good Corporate Governance (GCG).

6	**Penyusunan RKAP 2025** Sesuai program kerja Dewan Komisaris tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan sehubungan dengan tugas Penyusunan RKAP 2025 sesuai surat nomor 106/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 26 September 2024; yang pada dasarnya Dewan Komisaris memberikan arahan: 1. Mengacu kepada Surat arahan PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas, 2. Berdasarkan data realisasi September 2024 dan prognosa sampai dengan Desember 2024, 3. Menggunakan asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan, 4. Mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi, 5. KPI Korporasi 2025 disusun mengacu sementara sesuai KPI Korporasi 2024, dan *in-line* dengan Target RKAP 2025. **Preparation of the 2025 RKAP** In accordance with the Board of Commissioners' work program for 2024, the Board of Commissioners has provided guidance regarding the task of preparing the 2025 RKAP, as outlined in letter number 106/EXT/KOM/PPRE/2024 dated September 26, 2024. In essence, the Board of Commissioners has provided the following directions: 1. Referring to the direction letter from PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder, 2. Based on the realization data for September 2024 and the forecast up to December 2024, 3. Using accountable assumptions, 4. Considering potential risks that may occur, 5. The 2025 Corporate KPIs are to be prepared temporarily in line with the 2024 Corporate KPIs, and aligned with the 2025 RKAP Target.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Function

Perusahaan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan langsung oleh PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan.

Proses nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada ketentuan terkait sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Calon Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas kepada Kementerian BUMN selaku entitas pemilik akhir Perusahaan. Kementerian BUMN kemudian memutuskan nama Dewan Komisaris dan Direksi terpilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS selaku forum tertinggi Perusahaan.

The Company did not form a Nomination and Remuneration Committee. The nomination and remuneration function is run directly by PT PP (Persero) Tbk, the Company's majority shareholder.

The nomination and remuneration process for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to relevant provisions as stated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. Candidates of the Board of Commissioners and Board of Directors are proposed by PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder to the Ministry of SOE as the ultimate owner entity of the Company. The Ministry of SOE will then decide on the elected Board of Commissioners and Board of Directors candidates to be appointed by the GMS as the highest forum of the Company.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peranan penting untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam melaporkan pelaksanaan tugasnya terkait tata administrasi dan pendokumentasian kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris.

The Secretary of the Board of Commissioners has a significant role in supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties. The Secretary of the Board of Commissioners is directly responsible to the Board of Commissioners in reporting their duty implementation regarding the administration and documentation of the Board of Commissioners' activities.

Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris

Guidelines of the Secretary of the Board of Commissioners

Dalam membantu tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dilengkapi dengan Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris yang disahkan pada 23 Agustus 2023.

In supporting the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners is provided with the Guidelines of the Secretary of the Board of Commissioners approved on August 23, 2023.

Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris

Guidelines of the Secretary of the Board of Commissioners

Dalam membantu tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dilengkapi dengan Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris yang disahkan pada 23 Agustus 2023.

In supporting the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners is provided with the Guidelines of the Secretary of the Board of Commissioners approved on August 23, 2023.

Ketentuan Masa Jabatan

Term of Office Provisions

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan dan staf Sekretariat Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perusahaan yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office of the Company's Secretary of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Secretariat staff is determined by the Board of Commissioners to be three years, and they can be reappointed for two years in the same company, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengangkat Woro Endah Waraswati untuk menjabat Sekretaris Dewan Komisaris.

Based on the Board of Commissioners' Decree No. 013/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 27, 2022, regarding the Extension of the Term of Office of the Secretary of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has appointed Woro Endah Waraswati to serve as the Secretary of the Board of Commissioners.

Woro Endah Waraswati

Sekretaris Dewan Komisaris
Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2025, Periode Ke-2

Secretary of the Board of Commissioners
Term of Office: May 28, 2022, to May 28 2025, Second Term



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 32 tahun
Kelahiran Jakarta, 22 Januari 1992
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
32 years old
Born in Jakarta on January 22, 1992
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan | Education

Sarjana (S1) Sastra dari Universitas Al-Azhar Indonesia (2009)

Bachelor of Literature from Universitas Al-Azhar Indonesia (2009)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Tidak ada.

None

Riwayat Profesi | Professional History

- *Administrator* Pondok Indah Hospital Group (2017-2018)
- *Management Staff* pada *Food and Beverage Company* di Osaka, Japan (2016-2017)
- *Administrator* PT International Test Center (2014-2016)
- *Secretary for Chairman* PT Ganergindo International (2013-2014)

- Administrator at Pondok Indah Hospital Group (2017-2018)
- Management Staff at a Food and Beverage Company in Osaka, Japan (2016- 2017)
- Administrator at PT International Test Center (2014-2016)
- Secretary for Chairman at PT Ganergindo International (2013-2014)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi | Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/ pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or PT PP (Persero) Tbk as the major/controlling shareholder as well as the Government of Indonesia as the ultimate owner entity of the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris serta Pelaksanaannya

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners and its Implementation

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2024 beserta realisasinya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners in 2024 and their implementation are described in the following table.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	**Realisasi 2024** Realization in 2024
Memastikan tersedianya informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan. Ensuring the availability of information for the Board of Commissioners to make decisions.	Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komite. Hal ini meliputi pengelolaan data laporan keuangan, laporan kinerja perusahaan, dan materi penting lainnya yang mendukung proses pengambilan keputusan, diantaranya pada kegiatan berikut: • Penunjukan kantor akuntan publik; • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024; • Persetujuan pembiayaan; • Persetujuan pengeluaran modal; • Laporan keuangan tahun 2024; • Penyusunan Top Sheet Dewan Komisaris per Triwulanan (dan pada waktu lainnya jika dibutuhkan); • Penetapan Honorarium dan Tunjangan Direktur Komisaris Tahun 2024; • Pengangkatan Sekretaris Perusahaan; • Persetujuan aksi korporasi; • Pengukuhan bersama Dewan Komisaris dan Direksi atas Pedoman yang berlaku di Perusahaan; dan • Persetujuan Dewan Komisaris lainnya. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komite. Hal ini meliputi pengelolaan data laporan keuangan, laporan kinerja perusahaan, dan materi penting lainnya yang mendukung proses pengambilan keputusan, diantaranya pada kegiatan berikut: • Penunjukan kantor akuntan publik; • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024; • Persetujuan pembiayaan; • Persetujuan pengeluaran modal; • Laporan keuangan tahun 2024; • Penyusunan Top Sheet Dewan Komisaris per Triwulanan (dan pada waktu lainnya jika dibutuhkan); • Penetapan Honorarium dan Tunjangan Direktur Komisaris Tahun 2024; • Pengangkatan Sekretaris Perusahaan; • Persetujuan aksi korporasi; • Pengukuhan bersama Dewan Komisaris dan Direksi atas Pedoman yang berlaku di Perusahaan; dan • Persetujuan Dewan Komisaris lainnya.

Memastikan tersedianya informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ensuring the availability of information for the needs of the Board of Commissioners, including information regarding regulations and provisions relevant to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	Sekretaris Dewan Komisaris memastikan Perusahaan mempersiapkan informasi untuk Dewan Komisaris, seperti: • Laporan Kinerja Perusahaan; • Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (SPI); • Laporan Manajemen per Triwulan; • Laporan Kinerja dan Perkembangan Anak Perusahaan; • Laporan Manajemen Risiko; • Laporan Kegiatan Biro Corporate Secretary; • Pedoman/Piagam yang berlaku di Perusahaan; dan • Laporan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris. serta memastikan bahwa informasi yang diberikan mudah dipahami, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku, guna mendukung efektivitas dan efisiensi Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan strategis. Sekretaris Dewan Komisaris memastikan Perusahaan mempersiapkan informasi untuk Dewan Komisaris, seperti: • Laporan Kinerja Perusahaan; • Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (SPI); • Laporan Manajemen per Triwulan; • Laporan Kinerja dan Perkembangan Anak Perusahaan; • Laporan Manajemen Risiko; • Laporan Kegiatan Biro Corporate Secretary; • Pedoman/Piagam yang berlaku di Perusahaan; dan • Laporan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris. serta memastikan bahwa informasi yang diberikan mudah dipahami, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku, guna mendukung efektivitas dan efisiensi Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan strategis.
Memastikan penyelenggaraan rapat-rapat Komisaris, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin dengan berbagai pihak serta menyiapkan risalah rapat untuk disahkan pada rapat berikutnya. Ensuring the holding of Board of Commissioners meetings, both regular and non-regular, with various parties and preparing the minutes of meetings to be approved in the next meeting.	Dalam rapat Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris berperan dalam hal: • Berkoordinasi dengan pihak terkait perihal Undangan yang mencakup Agenda, tanggal dan tempat pelaksanaan rapat; • Mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum rapat berlangsung; • Memastikan kesiapan perlengkapan di venue rapat; • Melakukan pembuatan risalah rapat (bersinergi dengan pihak-pihak terkait); dan • Penyampaian risalah rapat kepada Dewan Komisaris dan perwakilan Direksi (Sekretaris Perusahaan). Adapun hal tersebut diatas dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris disetiap kegiatan Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite-komite Dewan Komisaris. Semua proses tersebut diatas dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris disetiap kegiatan Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite-komite Dewan Komisaris untuk mendukung efektivitas rapat serta memastikan dokumentasi yang lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam rapat Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris berperan dalam hal: • Berkoordinasi dengan pihak terkait perihal Undangan yang mencakup Agenda, tanggal dan tempat pelaksanaan rapat; • Mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum rapat berlangsung; • Memastikan kesiapan perlengkapan di venue rapat; • Melakukan pembuatan risalah rapat (bersinergi dengan pihak-pihak terkait); dan • Penyampaian risalah rapat kepada Dewan Komisaris dan perwakilan Direksi (Sekretaris Perusahaan).

	Adapun hal tersebut diatas dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris disetiap kegiatan Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite-komite Dewan Komisaris. Semua proses tersebut diatas dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris disetiap kegiatan Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite-komite Dewan Komisaris untuk mendukung efektivitas rapat serta memastikan dokumentasi yang lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Melakukan pemantauan atas tindak lanjut keputusan yang telah diambil oleh Dewan Komisaris di dalam rapat. Monitoring the follow-ups of decisions made by the Board of Commissioners in meetings.	Sekretaris Dewan Komisaris melakukan pemantauan secara rutin terhadap tindak lanjut keputusan yang telah diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait atas tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dilaksanakan sesuai rencana dan dalam waktu yang ditentukan. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan pemantauan secara rutin terhadap tindak lanjut keputusan yang telah diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait atas tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dilaksanakan sesuai rencana dan dalam waktu yang ditentukan.
Melaporkan atas adanya keterlambatan tindak lanjut keputusan yang telah diambil oleh Dewan Komisaris di dalam rapat. Reporting the delay in following up on decisions made by the Board of Commissioners in meetings.	Sekretaris Dewan Komisaris melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi keterlambatan tindak lanjut keputusan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi keterlambatan tindak lanjut keputusan Dewan Komisaris.
Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham; Bagian Dewan Komisaris Coordinating the preparation of advice and opinions regarding the agenda and materials of the General Meeting of Shareholders on the Board of Commissioners' part.	Sekretaris Dewan Komisaris mengakomodir dan mengumpulkan kebutuhan data yang diperlukan, setelah itu Sekretaris bersama Dewan Komite menyusun materi yang akan dibacakan oleh Dewan Komsiaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sekretaris Dewan Komisaris mengakomodir dan mengumpulkan kebutuhan data yang diperlukan, setelah itu Sekretaris bersama Dewan Komite menyusun materi yang akan dibacakan oleh Dewan Komsiaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris baik untuk keperluan Komisaris dan Komite-Komitenya. Ensuring the implementation of secretarial activities in the scope of the Board of Commissioners, be it for the need of the Board of Commissioners or its Committees.	Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan penyelenggaraan kegiatan dibidang kesekretariatan seperti: • Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam struktur Dewan Komisaris sehingga koordinasi dan integrasi terwujud dengan baik; • Memantau, mengawasi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; • Terselenggaranya rapat Internal Dewan Komisaris; • Terselenggaranya rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi; • Terselenggaranya rapat Internal Komite Dewan Komisaris; • Menyiapkan dokumentasi pertemuan rutin kesekretariatan dan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dan Komite; • Mengakomodir kebutuhan data/dokumen Komite dalam proses telaah Aksi Korporasi; • Mengakomodir kebutuhan data/ dokumen Komite dalam penyusunan Program Kerja Dewan Komisaris dan Anggaran Biaya Dewan Komisaris; • Mengkorrdinasi kegiatan kesekretariatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris; • Terlaksananya Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dan Komite melalui Pelatihan dan seminar; • Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan kebutuhan Dewan komisaris dan Komite; • Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, dan informasi kepada Dewan Komisaris dan Komite; • Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan • Sekretaris memastikan komunikasi yang lancar antara Dewan Komisaris, Komite-Komite, dan pihak internal atau eksternal lainnya, untuk mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan penyelenggaraan kegiatan dibidang kesekretariatan seperti: • Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam struktur Dewan Komisaris sehingga koordinasi dan integrasi terwujud dengan baik; • Memantau, mengawasi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; • Terselenggaranya rapat Internal Dewan Komisaris; • Terselenggaranya rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi; • Terselenggaranya rapat Internal Komite Dewan Komisaris; • Menyiapkan dokumentasi pertemuan rutin kesekretariatan dan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dan Komite; • Mengakomodir kebutuhan data/dokumen Komite dalam proses telaah Aksi Korporasi; • Mengakomodir kebutuhan data/ dokumen Komite dalam penyusunan Program Kerja Dewan Komisaris dan Anggaran Biaya Dewan Komisaris; • Mengkorrdinasi kegiatan kesekretariatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris; • Terlaksananya Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dan Komite melalui Pelatihan dan seminar; • Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan kebutuhan Dewan komisaris dan Komite; • Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, dan informasi kepada Dewan Komisaris dan Komite; • Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan • Sekretaris memastikan komunikasi yang lancar antara Dewan Komisaris, Komite-Komite, dan pihak internal atau eksternal lainnya, untuk mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan.

Melakukan kegiatan administratif dalam lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris dan Komite. Carrying out administrative activities within the scope of the Board of Commissioners, be it for the need of the Board of Commissioners or its Committees.	Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan administratif seperti: - Administrasi pada kegiatan Dewan Komisaris; - Administrasi pada kegiatan Komite Audit dan Komite Kepatuhan; - Administrasi surat keluar dan atau masuk Dewan Komisaris; - Administrasi Dokumen Dewan Komisaris dan Komite; dan - Administrasi Dokumen Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan administratif seperti: • Administrasi pada kegiatan Dewan Komisaris; • Administrasi pada kegiatan Komite Audit dan Komite Kepatuhan; • Administrasi surat keluar dan atau masuk Dewan Komisaris; • Administrasi Dokumen Dewan Komisaris dan Komite; dan • Administrasi Dokumen Sekretaris Dewan Komisaris.
Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Protecting the confidentiality of all classified documents.	Sekretaris Dewan Komisaris menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang harus dirahasiakan dengan cara mengimplementasikan prosedur pengamanan yang ketat terhadap dokumen-dokumen penting, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Sekretaris memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dokumen-dokumen tersebut. Untuk dokumen elektronik, Sekretaris memastikan bahwa akses dibatasi dengan sistem keamanan seperti password dan enkripsi, sementara dokumen fisik disimpan dalam tempat yang aman, seperti lemari arsip terkunci. Semua tindakan ini dilakukan untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang harus dirahasiakan dengan cara mengimplementasikan prosedur pengamanan yang ketat terhadap dokumen-dokumen penting, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Sekretaris memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dokumen-dokumen tersebut. Untuk dokumen elektronik, Sekretaris memastikan bahwa akses dibatasi dengan sistem keamanan seperti password dan enkripsi, sementara dokumen fisik disimpan dalam tempat yang aman, seperti lemari arsip terkunci. Semua tindakan ini dilakukan untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan perusahaan.
Pelaksanaan pedoman Sekretaris Dewan Komisaris. Pelaksanaan pedoman Sekretaris Dewan Komisaris.	Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti dan mengimplementasikan tugas Sekretaris Dewan Komisaris seperti yang tercantum pada Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 2023. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mengutamakan transparansi, akurasi, dan kerahasiaan informasi sesuai pedoman yang ditetapkan. Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti dan mengimplementasikan tugas Sekretaris Dewan Komisaris seperti yang tercantum pada Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 2023. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mengutamakan transparansi, akurasi, dan kerahasiaan informasi sesuai pedoman yang ditetapkan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Competency Development of the Secretary of the Board of Commissioners

Sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dapat mengikuti program pengembangan (Pendidikan atau Pelatihan) setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

According to the policy of the Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners may participate in development programs (education or training) at least once a year.

Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Types and Content of Education and Training	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Penyelenggara** Organizer
Implementasi Keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris — Dewan Komisaris & GCG Implementation of the Existence of the Secretary of the Board of Commissioners — Board of Commissioners & GCG	Online, 12 — 13 November 2024 Online, November 12 — 13, 2024	Arcarta Consultant
Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan Refreshment of Anti-Bribery Management System	Jakarta, 13 November 2024 Jakarta, November 13, 2024	PT PP Presisi Tbk



Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of the Board of Directors

Corporate Secretary
Corporate Secretary

Biro Corporate Secretary dibentuk sebagai organ pendukung Direksi untuk menjaga hubungan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan melalui publikasi aktivitas Perusahaan, serta memelihara kewajaran, konsistensi, dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi.

The Corporate Secretary Bureau was established as a supporting organ of the Board of Directors to maintain the relations between the Company and stakeholders by publishing Company activities and maintaining the fairness, consistency, and transparency of corporate governance matters and corporate actions.

Kriteria Penentuan Biro *Corporate Secretary*
Corporate Secretary Bureau's Appointment Criteria

Sesuai dengan Pedoman GCG, persyaratan yang harus dipenuhi Kepala Biro *Corporate Secretary* selama menjabat, meliputi:

According to the GCG Guidelines, the requirements that must be met by the Head of the Corporate Secretary Bureau in their term are:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   Capable of taking legal actions.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola Perusahaan.
   Knowledgable and insightful in legal, financial, and corporate governance matters
3. Memahami kegiatan usaha Perusahaan.
   Understanding the Company's business activities.
4. Dapat berkomunikasi dengan baik.
   Able to communicate well.
5. Berdomisili di Indonesia.
   Domiciled in Indonesia.

Kepala Biro Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

The Head of the Corporate Secretary Bureau is appointed and dismissed through the decision of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Kepala Biro *Corporate Secretary*
Profile of the Head of the Corporate Secretary Bureau

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No: 021/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Pengangkatan Vice President Corporate Secretary, Mei Elsa Kembaren dipercaya untuk menjabat posisi. Vice President Corporate Secretary. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 041/EXT/DIR/PPRE/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.

Based on the Board of Directors' Decree No. 021/SK/DIR/PPRE/2024 dated July 29, 2024, regarding the Appointment of the Vice President Corporate Secretary, Mei Elsa Kembaren is entrusted with the position of Vice President Corporate Secretary. The appointment has been reported to OJK with letter No. 041/EXT/DIR/PPRE/VII/2024 dated July 31, 2024.



Mei Elsa Kembaren

Kepala Biro Corporate Secretary
Menjabat sejak 29 Juli 2024
Head of the Corporate Secretary Bureau
In office since July 29, 2024

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 33 tahun
Kelahiran Medan, 27 Mei 1991
Domisili Tangerang Selatan, Jawa Barat, Indonesia

Indonesian
33 years old
Born in Medan, May 27, 1991
Domiciled in South Tangerang, West Java, Indonesia

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Teknik Sipil** dari Politeknik Universitas Sumatera Utara (2012)
- **Bachelor of Civil Engineering from** Politeknik Universitas Sumatra Utara (2012)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

- *Certified Risk Management Professional,* Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) (31 Maret 2024 s.d 31 Mei 2026)
- *Certified Banking Legal Consultant,* Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia (22 Desember 2022 s.d 22 Desember 2025)
- Certified Risk Management Professional, Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) (March 31, 2024 to May 31, 2026)
- Certified Banking Legal Consultant, Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia (December 22, 2022 to December 22, 2025)

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

Sejak tanggal 17 Februari 2020
sebagai *Production Control Utama* (POB)

Since February 17, 2020
as Main Production Control (POB)

Riwayat Profesi | Professional History

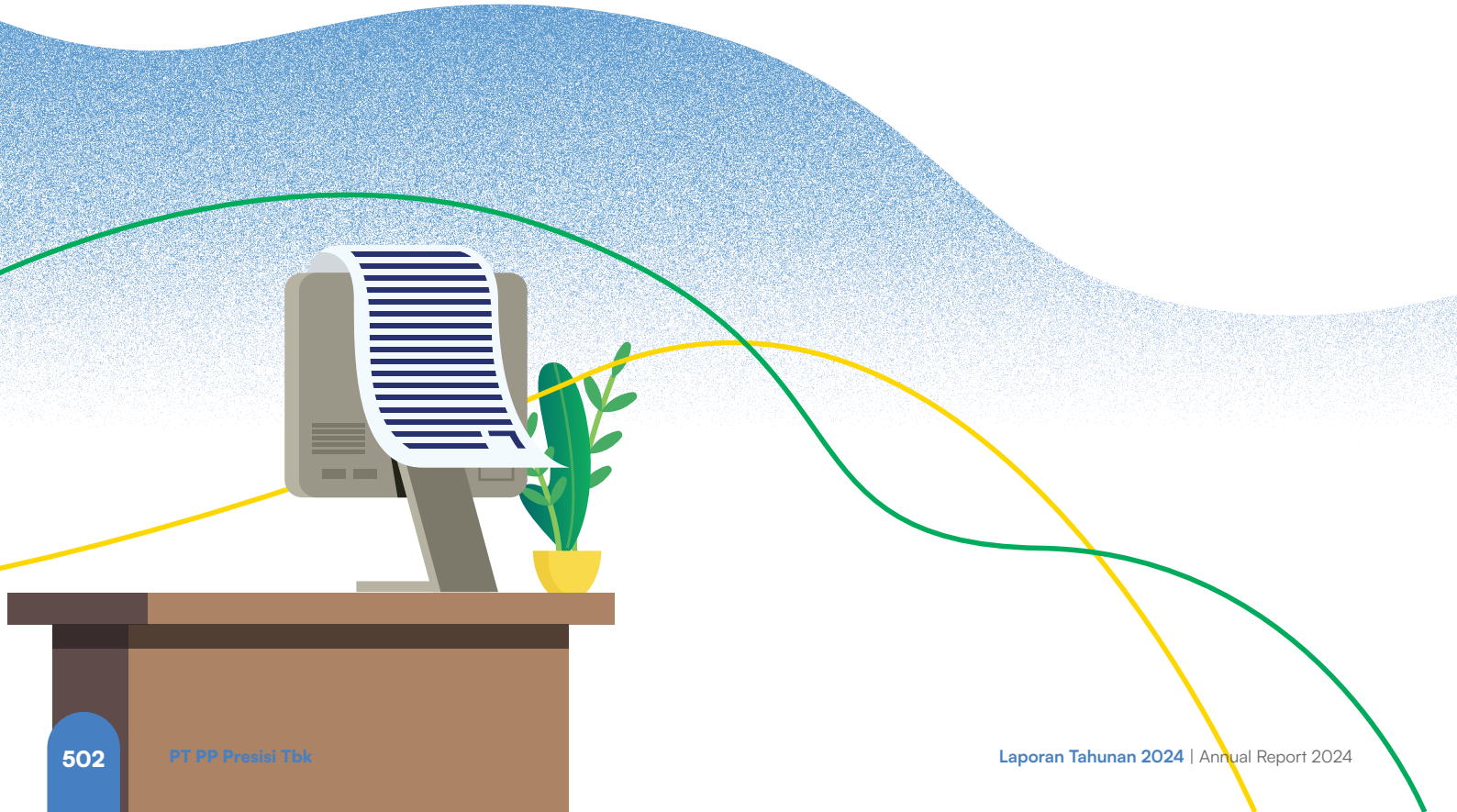
Berkarir di lingkup entitas induk, PT PP (Persero) Tbk dan Perusahaan sebagai entitas anak, yaitu Manager Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2023-sekarang); Kepala Departemen Manajemen Risiko, PT PP Presisi Tbk (2020-2023); Production Control Utama (POB) PT PP Presisi Tbk (2020); Production & Cost Control, PT PP (Persero) Tbk (2020); dan Junior Officer Production & Cost Control Section, PT PP (Persero) Tbk (2018-2020).

Worked in the parent entity, PT PP (Persero) Tbk and the Company as a subsidiary, namely Manager of Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2023-present); Head of Risk Management Department, PT PP Presisi Tbk (2020-2023); Main Production Control (POB), PT PP Presisi Tbk (2020); Production & Cost Control, PT PP (Persero) Tbk (2020); and Junior Officer Production & Cost Control Section, PT PP (Persero) Tbk (2018-2020).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Anggota Komite PT Lancarjaya Mandiri Abadi Bagian Operasi dan Risiko (2022-sekarang)

Within the Company: None
Outside the Company: Committee Member of PT Lancarjaya Mandiri Abadi, Operation and Risk Section (2023-present)

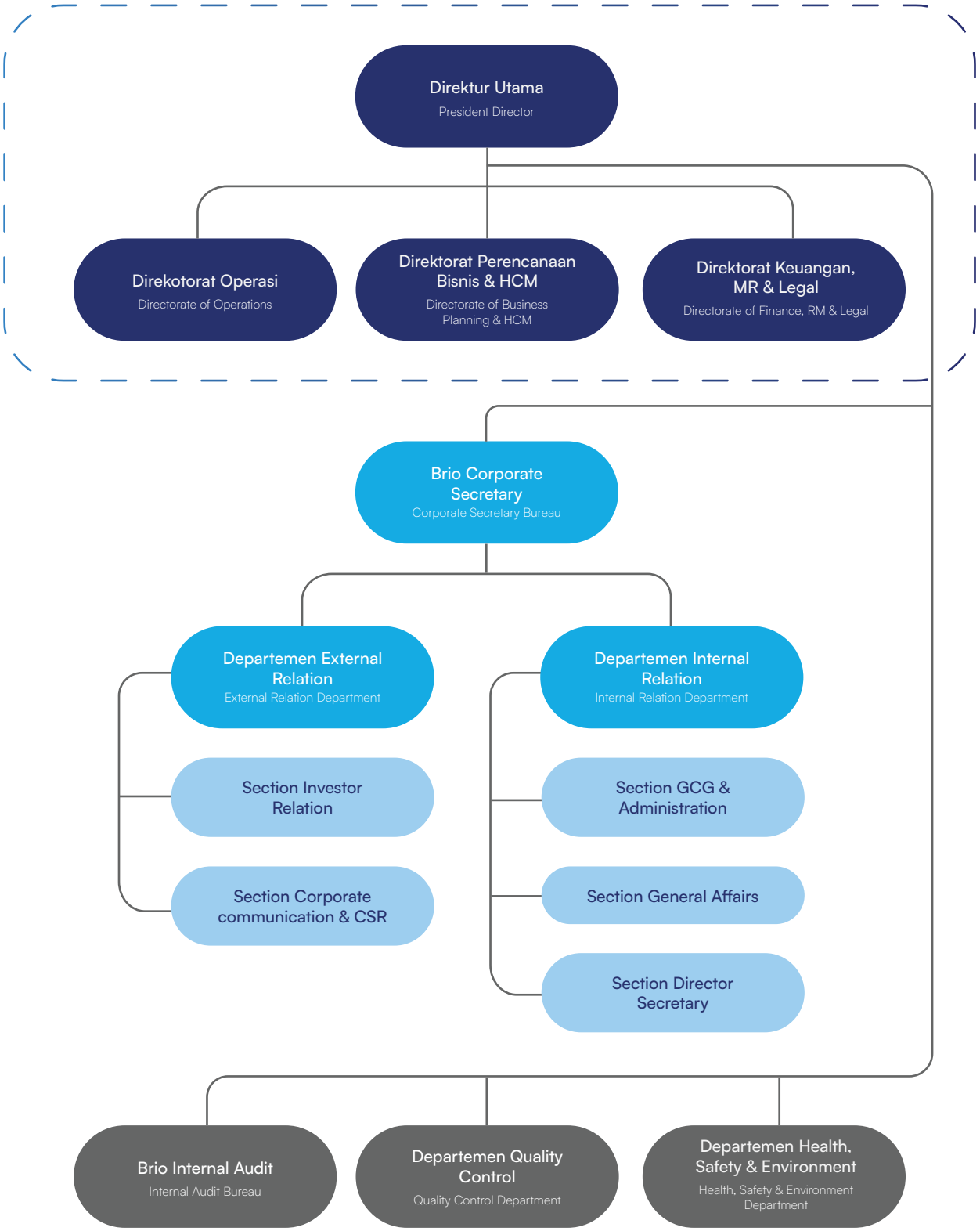


Struktur Organisasi Biro *Corporate Secretary*

Corporate Secretary Bureau's Organizational Structure

Struktur organisasi Biro Corporate Secretary ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Biro Corporate Secretary sebanyak 10 orang termasuk GA dan VP Corporate Secretary.

The organizational structure of the Corporate Secretary Bureau is established by the Board of Directors based on Decree No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 dated August 21, 2024, regarding the Amendment to the Company's Organizational Structure. As of December 31, 2024, the number of employees in the Corporate Secretary Bureau is 10, including the General Affairs (GA) and the Vice President (VP) of Corporate Secretary.



Sertifikasi Profesi Biro *Corporate Secretary*

Corporate Secretary Bureau's Professional Certification

Sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh karyawan Biro Corporate Secretary sebagai berikut.

Professional certifications owned by Corporate Secretary Bureau employees are as follows.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Nama Sertifikasi** Certification Name	**Lembaga Sertifikasi** Certification Institution
Mei Elsa Kembaren (Vice President Corporate Secretary)	Certified Investor Relations Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi Managemen Risiko (LSPMR)
	Certificate Banking Legal Consultant	Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Biro Corporate Secretary

Duties and Responsibilities as well as Realization of the Corporate Secretary Bureau

Tugas dan tanggung jawab Biro Corporate Secretary di tahun 2024 beserta realisasinya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary Bureau in 2024 and their implementation are described in the following table.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024
Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Being up to date on capital market developments, especially on applicable capital market laws and regulations.	**Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan menginformasikannya kepada manajemen.** Keeping up with developments in the capital market, particularly the regulations and legislation applicable to the capital market sector, and communicating this information to management.
Memberikan masukkan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Advising the Board of Directors to comply with capital market laws and regulations.	**Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Masukkan tersebut mengenai keterbukaan informasi dan aksi korporasi.** Provided input to the Board of Directors to ensure compliance with the laws and regulations in the capital market sector. This input pertains to information disclosure and corporate actions.
Membantu Direksi dalam pelaksanaan GCG. Assisting the Board of Directors in implementing GCG.	Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan; Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; Menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa; Menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan Melaksanakan program orientasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Implemented information disclosure to the public, including ensured the availability of information on the Company's website; Submitted reports to the Financial Services Authority (OJK) in a timely manner; Organized and documented the Annual GMS and Extraordinary GMS; Organized and documented meetings of the Board of Commissioners and/or Board of Directors; and Conducted orientation programs for the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

Sebagai penghubung Perusahaan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Liaising the Company with Shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.	**Memastikan kepentingan dari Pemegang Saham, regulator, Otoritas Jasa Keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya dapat tersampaikan kepada Direksi, dan sebaliknya.** Ensured that the interests of shareholders, regulators, the Financial Services Authority (OJK), and other stakeholders are communicated to the Board of Directors, and vice versa.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Protecting the confidentiality of classified documents, data, and information, except to fulfill obligations according to laws and regulations or decided otherwise in laws and regulations.	**Mengelola dokumen-dokumen Perusahaan dengan baik dan terstruktur.** Managed the Company's documents in a well-organized and structured manner.
Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan. Prohibited from directly or indirectly acquiring personal gain that causes a loss for the Company.	**Biro Corporate Secretary tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan.** The Corporate Secretary Bureau does not seek personal gain, either directly or indirectly, that could harm the Company.
Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Attend education and/or training.	**Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan melalui seminar dan workshop.** Conducted education and training programs through seminars and workshops.
Menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari perusahaan. Delivering information to the public, which is official information from the Company.	**Informasi yang disampaikan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi.** The information delivered to the public is official information.
Mengelola rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta mencatat agenda, risalah rapat, kebijakan, keputusan dan data-data yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Managing joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors and recording agendas, minutes of the meetings, policies, decisions, and data produced in the meetings.	**Mendokumentasikan pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.** Documented the implementation of joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum. Supporting the Board of Directors in generally resolving Company issues.	**Menangani dan mengoordinasikan permasalahan secara umum.** Handled and coordinated issues in general.
Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG. Monitoring the implementation of applicable regulations while adhering to GCG principles.	**Memastikan agar jalannya aplikasi peraturan yang berlaku tetap berpedoman pada prinsip GCG.** Ensured that the implementation of applicable regulations remains guided by GCG principles.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan pemodal. Providing services to the public or stakeholders by providing the information required by investors.	**Biro Corporate Secretary selalu memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, investor, analis, dan media agar tersampaikan informasi yang dibutuhkan pemodal. Media penyampaian informasi tersebut diantaranya melalui laporan tahunan, situs web perusahaan, media cetak, media sosial, paparan publik, dan siaran pers.** The Corporate Secretary Bureau consistently provided services to Shareholders, investors, analysts, and the media to ensure that investors receive the necessary information. The channels for delivering this information include annual reports, the company website, print media, social media, public exposés, and press releases.

Korespondensi Biro *Corporate Secretary*

Corporate Secretary Bureau's Correspondence

Di tahun 2024, Biro Corporate Secretary melakukan keterbukaan informasi yang telah disusun dan dilaporkan secara berkala kepada regulator serta pihak berkepentingan lainnya. Hal ini merupakan wujud kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In 2024, the Corporate Secretary Bureau implemented information transparency which has been prepared and reported periodically to regulators and other parties of interest. This is the embodiment of the Company's compliance with applicable laws and regulations.

Berikut keterbukaan informasi kepada masyarakat di media massa, situs web Bursa Efek Indonesia, dan Sistem Pelaporan Emiten Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, yang telah dilakukan oleh Biro Corporate Secretary yang dilakukan di tahun 2024.

Below is the information transparency towards the public on mass media, the Indonesia Stock Exchange website, and the Financial Services Authority's Issuer Reporting System that was implemented by the Corporate Secretary Bureau in 2024.

Nomor Surat Letter Number	**Tanggal Surat** Letter Date	**Tujuan** To	**Perihal** Subject
001/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024	**02 Januari 2024** January 02, 2024	**OJK-IDX**	**Tanggapan Terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-519/ PM.212/2023.** Response to the Financial Services Authority (OJK) letter No.S-519/ PM.212/2023.
002/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024	**09 Januari 2024** January 09, 2024	**OJK-IDX**	**Daftar Pemegang Saham Dec 23** List of Shareholders Dec 23
003/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024	**12 Januari 2024** January 12, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I PT PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022 per 31 Desember 2023.** Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds I Phase I of PT PP Presisi Tbk year 2022 as of December 31, 2023.
004/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024	**31 Januari 2024** January 31, 2024	**OJK-IDX**	**Press Release "PP Presisi Berhasil Raih Kontrak Baru hingga Rp 6,7 Triliun" Bertumbuh Hampir 30% dari Tahun Sebelumnya.** Press Release "PP Presisi Successfully Obtains New Contracts Worth Rp6.7 Trillion" Growing Almost 30% from the Previous Year.
005/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024	**31 Januari 2024** January 31, 2024	**OJK-IDX**	**Tanggapan Atas Permintaan Laporan Data Emiten Anak & Manajemen Entitas Anak Perusahaan Tercatat.** Response to Request for Report of Subsidiary Issuer Data & Management of Listed Subsidiary Entities.
006/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024	**06 Februari 2024** February 06, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Daftar Pemegang Saham Jan 24.** List of Shareholders Report Jan 24.

007/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024	**20 Februari 2024** February 20, 2024	**OJK-IDX**	**Jawaban Pertanyaan IDX tentang Volatilitas Transaksi.** Answer to IDX Question on Transaction Volatility.
008/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/II/2024	**22 Februari 2024** February 22, 2024	**OJK-IDX**	**Koreksi Penyampaian Dokumen Penunjukan KAP & AP.** Correction of Submission of KAP & AP Appointment Documents.
009/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024	**05 Maret 2024** March 05, 2024	**OJK-IDX**	**Penyampaian Laporan Keuangan.** Submission of Financial Reports.
010/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024	**06 Maret 2024** March 06, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Daftar Pemegang Saham Feb 24.** List of Shareholders Report Feb 24
011/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024	**13 Maret 2024** March 13, 2024	**OJK-IDX**	**Press Release "PP Presisi berhasil Catatkan Laba 172 Miliar pada tahun 2023".** Press Release "PP Presisi Successfully Records Profit of 172 Billion in 2023".
012/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024	**14 Maret 2024** **March 14, 2024**	**OJK-IDX**	**Koreksi Laporan Daftar Pemegang Saham Februari 2024.** Correction of the February 2024 Shareholder List Report.
013/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024	**21 Maret 2024** March 21, 2024	**OJK-IDX**	**Press Release "PP Presisi Raih 2 Penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah BUMN Awards ke-13 tahun 2024".** Press Release "PP Presisi Wins 2 Awards at the 13th BUMN Awards in 2024".
014/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024	**28 Maret 2024** March 28, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Informasi atau Fakta Material: KI Penjualan Aset yang sudah tidak produktif bagi PPRD.** Material Information or Fact Report: KI Sales of Assets that are no longer productive for PPRD.
015/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024	**28 Maret 2024** March 28, 2024	**OJK-IDX**	**Request Diskusi dengan OJK terkait Jadwal Buyback.** Request for Discussion with OJK regarding Buyback Schedule.
016/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IV/2024	**18 April 2024** April 18, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Daftar Pemegang Saham Maret 2024.** List of Shareholders Report March 2024
017/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IV/2024	**19 April 2024** April 19, 2024	**OJK-IDX**	**Pemberitahuan RUPST TB 2023 ke OJK.** AGMS Fiscal Year 2023 Announcement to OJK.
018/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IV/2024	**29 April 2024** April 29, 2024	**OJK-IDX**	**Surat pengantar Pengumuman RUPST TB 2023 ke IDX .** Cover letter of AGMS Fiscal Year 2023 Announcement to OJK.

019/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IV/2024	**29 April 2024** April 29, 2024	**OJK-IDX**	**Surat pengantar bukti iklan Pengumuman RUPST TB 2023 ke IDX.** Cover letter of proof of advertisement of the AGMS Fiscal Year 2023 Announcement to IDX
020/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IV/2024	**30 April 2024** April 30, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Tahunan TB 2023.** Annual Report Fiscal Year 2023.
021/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**07 Mei 2024** May 07, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan DPS Apr 24.** DPS Report Apr 24.
022/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**08 Mei 2024** May 08, 2024	**OJK-IDX**	**Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Untuk Tahun Buku 31 Desember 2023.** Submission of the Results of the Audit Committee's Evaluation of the Implementation of Audit Services for the Fiscal Year ended December 31, 2023.
023/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**14 Mei 2024** **May 14, 2024**	**OJK-IDX**	**Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT PP Presisi Tbk.** Submission of Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT PP Presisi Tbk.
024/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**15 Mei 2024** May 15, 2024	**OJK-IDX**	**Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT PP Presisi Tbk.** Submission of Proof of Advertisement for Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the Fiscal Year 2023 of PT PP Presisi Tbk.
025/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**23 Mei 2024** May 23, 2024	**OJK-IDX**	**Surat Tanggapan atas Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk.** Response Letter to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk.
026/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**31 Mei 2024** May 31, 2024	**OJK-IDX**	**Press Release: "Kontribusi Nyata PPRE terhadap masyarakat melalui Rangkaian Acara HUT ke-20".** Press Release: "PPRE's Real Contribution to Society through a Series of 20th Anniversary Events".
027/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**06 Juni 2024** June 06, 2024	**OJK-IDX**	**Press Release: "PPRE Gelar RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 "Perubahan Pengurus membawa Semangat Baru Perseroan untuk Semakin Tumbuh Berkelanjutan".** Press Release: "PPRE Holds Annual GMS for Fiscal Year 2023" Changes in Management Bring New Spirit to the Company for Sustainable Growth".

028/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024	**07 Juni 2024** June 07, 2024	**OJK-IDX**	**Ringkasan RUPST TB 2023 dan Cover Noted Notaris.** Summary of FY 2023 GMS and Notary Cover Note.
029/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VI/2024	**10 Juni 2024** June 10, 2024	**OJK-IDX**	**Bukti Ringkasan RUPST TB 2023.** Proof of Summary of FY 2023 AGMS.
030/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VI/2024	**11 Juni 2024** June 11, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.** Report on the Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024.
031/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VI/2024	**10 Juni 2024** June 10, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan DPS Mei 2024.** DPS Report May 2024.
032/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VI/2024	**12 Juni 2024** June 12, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Persetujuan KAP 2024.** 2024 KAP Approval Report.
033/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VI/2024	**24 Juni 2024** June 24, 2024	**OJK-IDX**	**Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Terkait Perubahan Komite Audit PT PP Presisi Tbk** Disclosure of Information That the Public Needs to Know Regarding Changes to the Audit Committee of PT PP Presisi Tbk
034/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**03 Juli 2024** July 03, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I PT PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022 per 30 Juni 2024** Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Continuous Public Offering I of PT PP Presisi Tbk Phase I in 2022 as of June 30, 2024
035/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**05 Juli 2024** July 05, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Daftar Pemegang Saham Juni 2024** List of Shareholders Report June 2024
036/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**05 Juli 2024** July 05, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi** Report on Use of Public Offering Funds
037/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**08 Juli 2024** July 08, 2024	**OJK-IDX**	**Risalah RUPST Tahun Buku 2023** Minutes of the AGMS for Fiscal Year 2023
038/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**10 Juli 2024** July 10, 2024	**OJK-IDX**	**Volatilitas Transaksi** Transaction Volatility
039/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**11 Juli 2024** July 11, 2024	**OJK-IDX**	**Penyampaian Daftar Khusus Direksi & Dekom** Submission of Special List of Directors and Board of Commissioners
040/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**19 Juli 2024** July 19, 2024	**OJK-IDX**	**Laporan Perkembangan Pengalihan Kembali Saham Hasil Pembelian Kembali** Progress Report on the Transfer of Shares from the Buyback

041/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VII/2024	**31 Juli 2024** July 31, 2024	OJK-IDX	**KI Perubahan Corsec PPRE 2024** Disclosure of Information on Changes to the 2024 PPRE Corsec
042/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/VIII/2024	**07 Agustus 2024** August 07, 2024	OJK-IDX	**Daftar Pemegang Saham Juli 2024** List of Shareholders Report July 2024
043/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IX/2024	**05 September 2024** September 05, 2024	OJK-IDX	**Daftar Pemegang Saham Aug 2024** List of Shareholders Report August 2024
044/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IX/2024	**05 September 2024** September 05, 2024	OJK-IDX	**Press Release : "Kontrak Baru Rp 6,3 Triliun Sampai Dengan Agustus 2024 Di Raih PP Presisi"** Press Release: "New Contract Worth Rp 6.3 Trillion as of August 2024 Obtained by PP Presisi"
045/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IX/2024	**13 September 2024** September 13, 2024	OJK-IDX	**Surat Perintah Kerja - SPK 2024** Work Order Letter - SPK 2024
046/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/IX/2024	**25 September 2024** September 25, 2024	OJK-IDX	**Tanggapan Terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-2044/ PM.212/2024** Response to Financial Services Authority (OJK) Letter No.S-2044/PM.212/2024
047/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2024	**08 Oktober 2024** October 08, 2024	OJK-IDX	**Daftar Pemegang Saham September 2024** List of Shareholders Report September 2024
048/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2024	**16 Oktober 2024** October 08, 2024	OJK-IDX	**Pemberitahuan Rencana RUPSLB TB 2024 PT PP Presisi Tbk.** Notice of the 2024 EGMS Plan of PT PP Presisi Tbk.
049/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2024	**08 November 2024** November 08, 2024	OJK-IDX	**Daftar Pemegang Saham September 2024.** Shareholders List September 2024.
050/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2024	**04 Desember 2024** December 04, 2024	OJK-IDX	**Pemberitahuan Penyelenggaraan Public Expose TB 2024 PT PP Presisi Tbk.** Notification of the 2024 TB Public Expose of PT PP Presisi Tbk.
051/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2024	**10 Desember 2024** December 10, 2024	OJK-IDX	**Pemberitahuan Rencana RUPSLB TB 2024 PT PP Presisi Tbk.** Notice of the 2024 EGMS Plan of PT PP Presisi Tbk.
052/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2024	**14 Desember 2024** December 14, 2024	OJK-IDX	**Daftar Pemegang Saham September 2024.** Shareholders List September 2024.
053/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2024	**20 Desember 2024** December 20, 2024	OJK-IDX	**Pemberitahuan Penyelenggaraan Public Expose TB 2024 PT PP Presisi Tbk.** Notification of the 2024 TB Public Expose of PT PP Presisi Tbk.

Hubungan Investor
Investor Relations

Perusahaan terus berupaya menjaga komunikasi dengan para Pemegang Saham, investor, analis, dan media untuk membangun dan mengembangkan kepercayaan publik, serta meningkatkan pemahaman tentang kegiatan bisnis Perusahaan. Komunikasi rutin juga diharapkan mampu memperkuat goodwill dan reputasi Perusahaan di kalangan investor, analis, serta media.

Di tahun 2024, kegiatan hubungan investor Perusahaan yang dilakukan dalam bentuk daring maupun luring dengan rincian sebagai berikut:

The Company consistently strives to maintain communication with Shareholders, investors, analysts, and the media to build and develop public trust and improve the comprehension of the Company's business activities. Regular communication is also expected to strengthen the Company's goodwill and reputation among investors, analysts, and the media.

In 2024, the Company's investor relations activities were carried out virtually and offline as described by the following details:

Jenis Kegiatan Activity Type	**Frekuensi** Frequency
Analyst Meeting	**12**
Company Update Presentation Material	**4**
Siaran Press Release Press Release Broadcast	**12**
Newsletter	**4**
Public Expose	**1**

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

Sebagai bentuk perwujudan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan untuk mengakses informasi dan data perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap melalui situs web www.pp-presisi.co.id. Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, situs web ini juga merupakan upaya Perusahaan dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan. Situs web tersebut memuat berbagai informasi mengenai profil perusahaan, unit bisnis, hubungan investor, GCG, tanggung jawab sosial perusahaan, dan informasi lainnya. Di samping itu, Perusahaan menyediakan sarana penyampaian informasi dengan menghubungi kantor pusat Perusahaan secara langsung dan melalui media sosial Perusahaan dengan alamat sebagai berikut:

As an embodiment of transparency principles and compliance with laws and regulations regarding information transparency, the Company continuously facilitates access to its information and data in a timely, accurate, and comprehensive manner through the website www.pp-presisi.co.id. Besides functioning as a means of delivering information to the public, this website is also a form of the Company's effort to implement corporate governance and transparency towards all stakeholders. The website contains various information regarding the company profile, business units, investor relations, GCG, corporate social responsibility, and other information. Moreover, the Company provides an information delivery facility through direct contact with the Company's head office and social media with the following address:

Kepala Biro Corporate Secretary PT PP Presisi Tbk

Plaza PP Wisma Robinson Lt. 1
Jl. TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760

Telephone
+6221 841 4119

Email
corsec@pp-presisi.co.id

Fax
+6221 823 0353

Website
www.pp-presisi.co.id

Laporan Tahunan | Annual Report

Perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut dapat diakses melalui situs web Perusahaan dengan alamat www.pp-presisi.co.iC. Selain itu, laporan tahunan juga tersedia dalam bentuk cetak.

The Company discloses financial information, important information, and other Company matters in annual reports and financial statements. These reports are accessible at the Company website at www.pp-presisi.co.id. Furthermore, the annual report is also available in printed form.

Situs Web Perusahaan dengan Alamat www.pp-presisi.co.id | Company Website at www.pp-presisi.co.id

Situs web berperan penting dalam tata kelola keterbukaan informasi. Di mana pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan. Situs web memungkinkan penyampaian informasi yang tidak terbatas dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Perusahaan Publik, Perusahaan telah memiliki media untuk penyediaan Informasi publik berupa situs web yang ditangani secara langsung oleh Biro Corporate Secretary dan Departemen IT. Dalam hal ini, situs web dapat diakses melalui laman www.pp-presisi.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Di samping itu, Perusahaan senantiasa memperbarui situs web secara berkala dalam rangka memberikan informasi terbaru terkait Perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, situs web Perusahaan juga menyediakan nomor kontak, alamat e-mail, dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

Websites play an important role in information transparency governance, in which information disclosure and availability on the Company website will benefit the public and stakeholders. Websites allow unlimited information to be delivered rapidly, accurately, and inexpensively.

According to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies, the Company has owned a means to provide public information in the form of a website directly handled by the Corporate Secretary Bureau and the IT Department. In this case, the website is accessible at www.pp-presisi.co.id in Indonesian and English.

Moreover, the Company continues to update the website regularly to provide the latest Company information to stakeholders and to comply with applicable laws and regulations. Furthermore, the Company website also provides contact numbers, e-mail, and a postal address that are accessible for further communication with stakeholders.

Media Cetak | Print Media

Perusahaan juga menyediakan sejumlah sarana komunikasi berbentuk media cetak, yaitu Buletin, Newsletter, Brosur, dan Leaflet (pada saat pameran).

The Company also provides several means of communication in print media form, namely Bulletins, Newsletters, Brochures, and Leaflets (during exhibitions).

Paparan Publik | Public Expose

Perusahaan senantiasa melakukan paparan publik tahunan atau paparan publik kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum tentang aktivitas operasi dan proses usaha Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan memandang bahwa paparan publik yang dilakukan akan membantu Perusahaan dalam menyampaikan informasi yang lebih luas dan menjangkau khalayak lebih banyak. Untuk itu, Perusahaan melakukan pemaparan publik yang disajikan dalam bentuk presentasi kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang diundang.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah mengadakan paparan publik dengan rincian sebagai berikut.

The Company consistently holds annual public exposure or public expose for Shareholders, stakeholders, and the general public discussing the Company's operational activities and business process. Regarding this matter, the Company deems that the public expose will help the Company to deliver information with a greater range and reach more audiences. For this reason, the Company holds public expose in the form of presentations to Shareholders, stakeholders, and invited parties.

As of December 31, 2024, the Company has held public expose with the following details.

Waktu Pelaksanaan Date	**Tempat Pelaksanaan** Venue	**Pihak yang Menghadiri** Attending Parties
18 Desember 2024 December 18, 2024	**Virtual Zoom Meeting**	**Seluruh Direksi PPRE** All PPRE Board of Directors

Dalam rangka menyebarkan informasi terkait kegiatan, Perusahaan telah menerbitkan siaran pers sepanjang tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

To disseminate information regarding activities, the Company has issued press releases throughout 2024 with the following details:

Tanggal Date	**Judul Siaran** Press Title
8 Januari 2024 January 8, 2024	**"Presiden RI Resmikan Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 PP Presisi Sukses Menyelesaikan Komitmen dengan Pekerjaan Tepat Waktu dan Kualitas Terbaik"** "President of the Republic of Indonesia Inaugurates Cinere—Jagorawi Toll Road Section 3 Project — PP Presisi Successfully Fulfills Commitment with Timely Completion and Top Quality Work"
30 Januari 2024 January 30, 2024	**"PP Presisi Berhasil Raih Kontrak Baru hingga Rp 6,7 Triliun" Bertumbuh Hampir 30% dari Tahun Sebelumnya** "PP Presisi Successfully Secures New Contracts Worth Up to IDR 6.7 Trillion" — Growing by Nearly 30% from the Previous Year
6 Maret 2024 March 6, 2024	**"PP Presisi berhasil Catatkan Laba 172 Miliar pada tahun 2023"** "PP Presisi Successfully Records IDR 172 Billion in Profit in 2023"
18 Maret 2024 March 18, 2024	**"PP Presisi Raih 2 Penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah BUMN Awards ke-13 tahun 2024"** "PP Presisi Wins 2 Awards at the 13th BUMN Awards 2024"
28 Mei 2024 May 28, 2024	**"Kontribusi Nyata PPRE terhadap masyarakat melalui Rangkaian Acara HUT ke-20"** "PPRE's Real Contribution to the Community through a Series of Events for its 20th Anniversary"
5 Juni 2024 June 5, 2024	**PPRE Gelar RUPS Tahunan Tahun Buku 2023** **"Perubahan Pengurus membawa Semangat Baru Perseroan untuk Semakin Tumbuh Berkelanjutan"** PPRE Holds Annual General Meeting for Fiscal Year 2023 "Management Changes Bring a New Spirit for the Company to Grow More Sustainably"
3 September 2024 September 3, 2024	**PPRE Gelar RUPS Tahunan Tahun Buku 2023** **"Perubahan Pengurus membawa Semangat Baru Perseroan untuk Semakin Tumbuh Berkelanjutan"** PPRE Holds Annual General Meeting for Fiscal Year 2023 "Management Changes Bring a New Spirit for the Company to Grow More Sustainably"
16 September 2024 September 16, 2024	**PPRE Gelar RUPS Tahunan Tahun Buku 2023** **"Perubahan Pengurus membawa Semangat Baru Perseroan untuk Semakin Tumbuh Berkelanjutan"** PPRE Holds Annual General Meeting for Fiscal Year 2023 "Management Changes Bring a New Spirit for the Company to Grow More Sustainably"
30 September 2024 September 30, 2024	**"Meningkatkan Awareness Keuntungan Berinvestasi Saham, PPRE Selenggarakan Webinar Saham 2024"** "Raising Awareness of the Benefits of Investing in Stocks, PPRE Holds 2024 Stock Investment Webinar"
26 November 2024 November 29, 2024	**"PP Presisi Melakukan Assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024"** "PP Presisi Conducts ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Assessment 2024"
18 Desember 2024 December 18, 2024	**"PT PP Presisi Sukses Gelar Public Expose 2024: Kinerja Positif dan Transformasi Strategis Perseroan"** "PT PP Presisi Successfully Holds 2024 Public Expose: Positive Performance and Strategic Transformation of the Company"
20 Desember 2024 December 20, 2024	**"PT PP Presisi Luncurkan Program FMDP dan PPRE Learning Center untuk Tingkatkan Kompetensi SDM"** "PT PP Presisi Launches FMDP Program and PPRE Learning Center to Enhance Human Resource Competence"

Pengembangan Kompetensi Biro *Corporate Secretary*

Corporate Secretary Bureau's Competency Development

Sepanjang tahun 2024, Biro Corporate Secretary tidak mengikuti program Pendidikan & pelatihan.

Throughout 2024, the Corporate Secretary Bureau did not participate in any education and training programs.

Penilaian Kinerja Biro *Corporate Secretary*

Corporate Secretary Bureau's Performance Assessment

Penilaian atas kinerja Biro Corporate Secretary dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Key Performance Indicator Korporat. Penilaian terhadap kinerja Biro Corporate Secretary dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut:

Assessment of the Corporate Secretary Bureau's performance is carried out by the Board of Directors according to the procedures and criteria set in the Corporate Key Performance Indicator. The assessment of the Corporate Secretary Bureau's performance uses the following assessment aspects:

1 ***Financial***
Financial

- Efektivitas program CSR.
  Effectiveness of CSR programs

2 ***Costumer***
Customer

- Tingkat kepuasan unit internal terkait.
  Satisfaction level of relevant internal units.
- Tingkat kepuasan eksternal terhadap Biro Corporate Secretary.
  External satisfaction level towards the Corporate Secretary Bureau.
- Skor *Brand Awareness.*
  Brand Awareness Score.

3 ***Internal Process Business***
Internal Process Business

- Tingkat keberhasilan RUPS.
  GMS success rate.
- Tingkat pelaksanaan rapat Direksi.
  Board of Directors meeting implementation rate.
- Peningkatan citra perusahaan melalui press release.
  Company reputation growth through press release.
- Peningkatan citra perusahaan melalui hubungan dengan investor.
  Company reputation growth through investor relations.
- Tingkat pelaporan perusahaan ke pasar modal.
  Company reporting rate to the capital market.

4 ***Learning and Growth***
Learning and Growth

- Jumlah temuan berdasarkan hasil audit GCG (*area of improvement*) yang ditindaklanjuti.
  Number of findings based on followed-up GCG audit results (area of improvement).
- Skor implementasi GCG.
  GCG implementation score.
- *Human resource readiness.*
  Human resources readiness.
- Hasil penilaian di tahun 2024 menunjukan skor sebesar 3,13 dari skor maksimum 4,00 dengan kategori Baik (B).
  The assessment results in 2024 show a score of 3,13 out of a maximum score of 4.00 with the category

Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Internal Audit
Internal Audit Unit

Biro Internal Audit dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan, kajian, serta usulan perbaikan untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

The Internal Audit Bureau was established to aid the Board of Directors in evaluating the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance processes by examining, reviewing, and suggesting improvements to secure the Company's investment and assets.

Pedoman Biro *Internal Audit*

Internal Audit Bureau's Guidelines

Biro Internal Audit memiliki Piagam Kerja Biro Internal Audit yang telah dimutakhirkan pada 22 Januari 2024 dan telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The Internal Audit Bureau has an Internal Audit Charter that was updated on January 22, 2024, and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors.

Persyaratan Profesional Biro *Internal Audit*

Internal Audit Bureau's Professional Requirement

Auditor Biro Internal Audit harus memiliki integritas dan perilaku yang profesional, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya, independen, memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup, serta sesuai job requirement yang ditetapkan, antara lain:

Auditors of the Internal Audit Bureau must maintain their integrity and act professionally, honestly, and objectively in the implementation of their duties, be independent, sufficiently competent and experienced, and adhere to the job requirement that has been set, as described below:

1. Kepala Biro Internal Audit memiliki tingkat Pendidikan minimal Strata 1 (S1) baik jurusan teknik ataupun keuangan, mempunyai pengalaman minimal sebagai Project Manager, Manajer Pengembangan Sistem, Kepala Bagian Teknik, atau Kepala Bagian Keuangan.
   The Head of the Internal Audit Bureau's education level is at least at the Bachelor's level, majoring in either engineering or finance, experienced at least as a Project Manager, System Development Manager, Head of the Engineering Section, or Head of the Finance Section.
2. Internal Auditor bidang operasional memiliki pendidikan minimal S1 jurusan teknik, mempunyai pengalaman di bidang pengendalian operasi minimal setingkat Site Engineering Manager.
   The Internal Auditor of operations holds at least a Bachelor's degree in engineering, experienced in operational control at least equivalent to the Site Engineering Manager.
3. Internal Auditor bidang keuangan memiliki pendidikan minimal S1 jurusan akuntansi atau keuangan minimal setingkat Site Administrasi *Manager*.
   The Internal Auditor of finance holds at least a Bachelor's degree in accounting or finance at least equivalent to Site Administration Manager.
4. Internal Auditor bidang GCG memiliki pendidikan minimal S1 jurusan Teknik atau Non Teknik minimal setingkat Site Administrasi Manager atau Site Engineering Manager;
   The Internal Auditor for GCG must have at the minimum a Bachelor's degree in Engineering or Non-Engineering, at least equivalent to Site Administration Manager or Site Engineering Manager level.
5. Memiliki pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
   Knowledgeable about audit methods and other fields of science relevant to their area of duties.

6 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Knowledgeable about laws and regulations in the capital market as well as other relevant laws and regulations.

7 Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
Capable of effectively interacting and communicating orally and in writing.

8 Memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.
Understand the principles of GCG and risk management.

9 Kepala Biro Internal Audit dan Auditor Biro Internal Audit wajib mendapatkan sertifikasi dengan mengikuti pendidikan dari lembaga pendidikan Internal Auditor.
The Head and Auditors of the Internal Audit Bureau must be certified through education programs from Internal Auditor educational institutions.

10 Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
Willing to improve their professional knowledge, skills, and capabilities continuously;

11 Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Biro Internal Audit segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Every appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Bureau must be reported immediately to the Financial Services Authority.

12 Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugas.
Possess integrity and exhibit professional, independent, honest, and objective behavior in carrying out duties.



Profil Vice President Internal Auditor

Profile of Vice President Internal Auditor

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal, Wismo Suwego dipercaya untuk menjabat posisi Kepala Biro Internal Audit Perusahaan. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Keterbukaan Informasi No. 041/EXT/CS/ OJK-IDX/PPRE/V/2023, tanggal 24 Mei 2023.

According to the Decree of the Board of Directors No.116/SK/DIR/PPRE/V/2023 dated Mei 22, 2023, on the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit, Wismo Suwego was entrusted as the Head of the Internal Audit Bureau of the Company. This appointment has been reported to OJK through Letter of Information Transparency No. 041/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2023 dated May 24, 2023.



Wismo Suwego

Kepala Biro Satuan Pengawas Internal
Menjabat sejak 22 Mei 2023
Head of the Internal Audit Unit
In office since May 22, 2023

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 38 tahun
Kelahiran Semarang, 22 November 1986
Domisili Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian Citizen
38 years old
Born in Semarang on November 22, 1986
Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Teknik Sipil** dari Universitas Borobudur, Jakarta (2011)

- **Bachelor of Civil Engineering from** Universitas Borobudur, Jakarta (2011)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

Certified Qualified Internal Audit , (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019).

Certified Qualified Internal Audit (QIA) from Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019).

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

Sejak tanggal 22 Mei 2023
sebagai Vice President Internal Auditor

Joined the Company on May 22, 2023
as Vice President Internal Auditor

Riwayat Profesi | Professional History

Berkarir di lingkup entitas induk, PT PP (Persero) Tbk, sebagai Senior Operasional Auditor (2023); Operational Auditor (2022-2023); Junior Operational Auditor (2017-2020); Site Engineering Manager Cabang IV - DVO 2 (2015-2017); dan Site Engineering Cabang IV - DVO 2 (2011-2015).

Pursued a career within the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, serving as Senior Operational Auditor (2023); Operational Auditor (2022-2023); Junior Operational Auditor (2017-2020); Site Engineering Manager at Branch IV - DVO 2 (2015-2017); and Site Engineer at Branch IV - DVO 2 (2011-2015).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak Ada

Within the Company: None
Outside the Company: None

Struktur dan Kedudukan Biro *Internal Audit*

Structure and Position of the Internal Audit Bureau

Biro Internal Audit dipimpin oleh seorang Vice President Internal Auditor selaku Kepala Biro Satuan Pengawas Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama juga dapat memberhentikan *Vice President Internal Auditor* atas persetujuan Dewan Komisaris, jika *Vice President Internal Auditor* tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Biro Internal Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Kerja Biro Internal Audit dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. *Vice President Internal Auditor* bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sedangkan, Auditor duduk dalam Biro Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada *Vice President Internal Auditor.*

Biro Internal Audit minimal terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Kepala Biro Internal Audit, 1 (satu) orang auditor internal bidang operasional, dan 1 (satu) orang auditor internal bidang keuangan dan asesor GCG.

Susunan Tim Pemeriksa setiap objek, terdiri dari Ketua Tim dan anggota penanggung jawab pemeriksaan dirangkap oleh Kepala Biro Internal Audit. Kedudukan Biro Internal Audit dalam struktur organisasi harus setara dengan peran dan tanggung jawab dalam pengungkapan pandangan dan pemikiran dari hasil evaluasi yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan manajemen dan pihak lain.

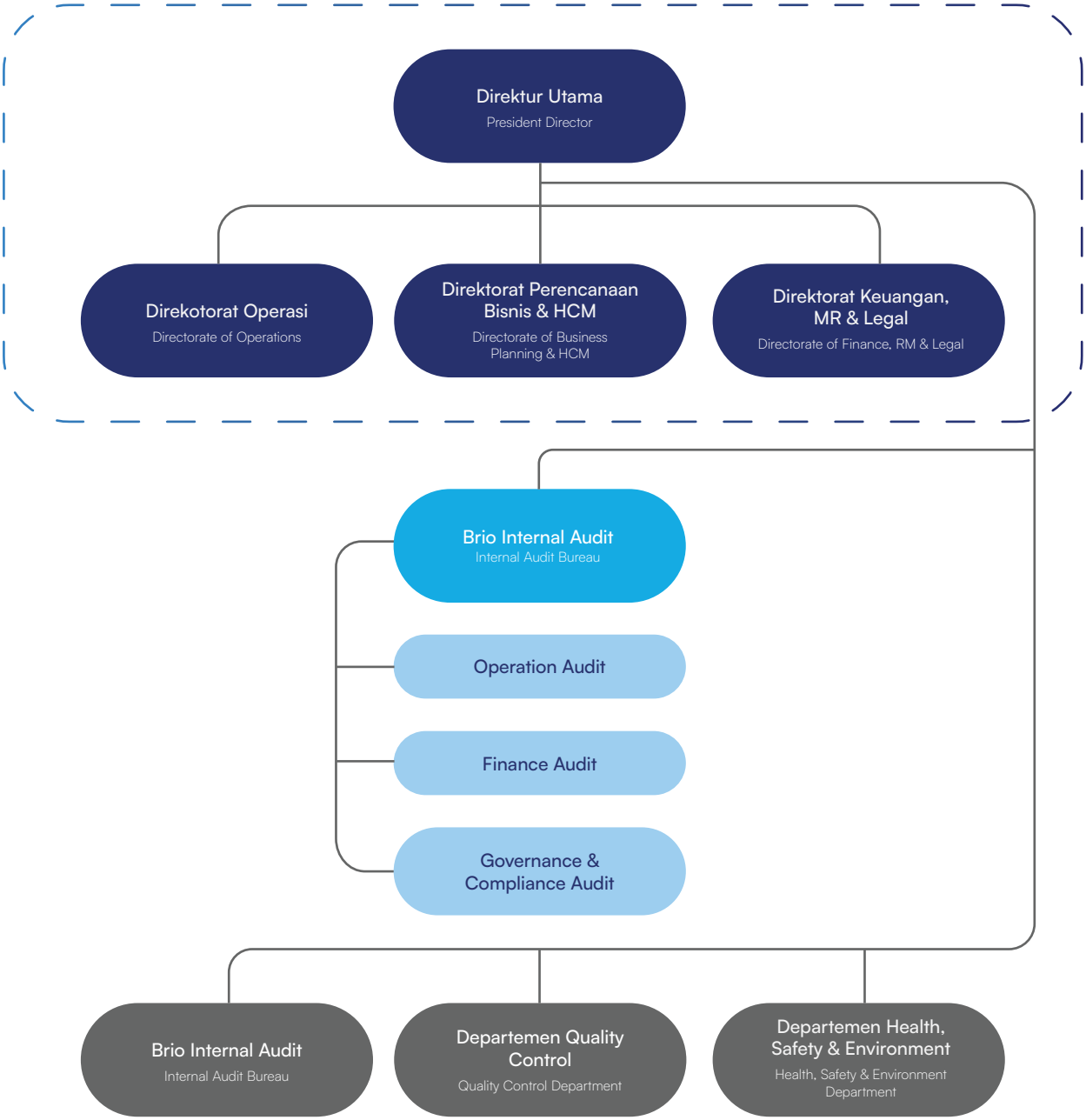
Adapun struktur organisasi Biro Internal Audit ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan.

The Internal Audit Bureau is led by a Vice President Internal Auditor, who serves as the Head of the Internal Audit Unit. The Vice President Internal Auditor is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The President Director may also dismiss the Vice President Internal Auditor, with the approval of the Board of Commissioners, if the Vice President Internal Auditor does not meet the qualifications required for the role as stipulated in the Internal Audit Bureau Charter and/or fails or is deemed incompetent in carrying out their duties. The Vice President Internal Auditor reports directly to the President Director, while auditors within the Internal Audit Bureau report directly to the Vice President Internal Auditor.

The Internal Audit Bureau consists of at least one (1) Head of the Internal Audit Bureau, one (1) internal auditor specializing in operational matters, and one (1) internal auditor specializing in financial matters and GCG assessment.

The audit team for each audit object consists of a Team Leader and team members, with the Head of the Internal Audit Bureau also serving as the responsible party for the audit. The Internal Audit Bureau's position in the organizational structure must be aligned with its role and responsibilities to ensure independent evaluation and reporting, free from influence or pressure from management or other parties.

The organizational structure of the Internal Audit Bureau is established in accordance with the Board of Directors' Decision No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 dated August 21, 2024, regarding Changes to the Company's Organizational Structure.



Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Biro Internal Audit sebanyak 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut.

As of December 31, 2024, the number of employees in the Internal Audit Bureau was four (4) persons, with the following details:

Nama Name	**Jabatan** Position
Wismo Suwego	***Vice President Internal Audit***
Enggartiasto Dwi Prakoso	**Auditor Internal Bidang Operasional** Internal Auditor for Operations
Erwin Simon Siregar	**Auditor Internal Bidang Keuangan** Internal Auditor for Finance
Azzah Auliya Ardindasari	**Auditor Internal Bidang Governance & Compliance Audit** Internal Auditor for Governance & Compliance Audit

Sertifikasi Profesi Biro *Internal Audit*

Internal Audit Bureau Professional Certification

Pelaksanaan fungsi audit internal di Perusahaan mengacu pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari The Institute of Internal Auditors. Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki Kepala Biro Internal Audit dan auditor sebagai berikut.

The implementation of the internal audit function in the Company refers to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing issued by The Institute of Internal Auditors. The professional certifications held by the Head of the Internal Audit Bureau and auditors are as follows:

Nama Name	**Nama Sertifikasi** Certification Name	**Lembaga Sertifikasi** Certification Institution
Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit)	***Certified Qualified Internal Audit* (QIA)**	**Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)**

Visi dan Misi Biro Internal Audit

Vision and Mission of the Internal Audit Bureau

Visi | Vision

Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, objektif dan memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam pencapaian visi dan misi perusahaan.

To be a strategic partner that is professional, independent, objective, and adds value to management in achieving the company's vision and mission.

Misi | Mision

Meningkatkan dan melindungi nilai perusahaan dengan memberikan assurance, saran dan wawasan berbasis risiko yang objektif.

Enhance and protect company value by providing objective, risk-based assurance, advice, and insights.



Mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016.

Support the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) in accordance with ISO 37001:2016

Melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian intenal, pengelolaan risiko dan proses GCG.

Conduct systematic evaluations to improve the effectiveness of internal control implementation, risk management, and GCG processes



Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga menjadi auditor internal yang profesional, integritas, objektif, kerahasiaan dan kompetensi.

Develop human resources to become professional internal auditors with integrity, objectivity, confidentiality, and competence.

Kode Etik Biro *Internal Audit*

Internal Audit Bureau Code of Conduct

Untuk menerapkan budaya Etik dalam profesi Internal Audit, Auditor Internal PT PP Presisi Tbk mengacu pada Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal atau Kode Etik Audit Internal yang berlaku secara Internasional, yang meliputi prinsip-prinsip perilaku dan aturan perilaku yang mengatur integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi:

To uphold an ethical culture in the internal audit profession, Internal Auditors at PT PP Presisi Tbk adhere to the Code of Conduct established by the Internal Audit Association or the internationally recognized Internal Audit Code of Conduct. This code includes principles and behavioral rules governing integrity, objectivity, confidentiality, and competence.

1. Integritas Auditor Internal memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (trust) yang menjadi dasar untuk penilaian (Judgement) yang handal. Aturan Perilaku:

   - Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab;
   - Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi;
   - Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi Auditor Internal atau Perusahaan;
   - Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan Perusahaan yang etis dan telah sesuai dengan hukum.

   Integrity, Internal Auditors uphold integrity by building trust, which serves as the foundation for reliable judgment. Behavioral Rules:

   - Work honestly, diligently, and responsibly;
   - Comply with laws and disclose information as required by legal and professional regulations;
   - Refrain from engaging in unlawful activities or any actions that may tarnish the Internal Audit profession or the company;
   - Show respect and contribute to achieving ethical and legally compliant corporate objectives.

2. Objektivitas Auditor Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor Internal melakukan penilaian secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat (judgement). Aturan Perilaku:

   - Tidak terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengurangi atau dianggap mengurangi objektivitas Auditor Internal dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   - Tidak menerima apa pun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan profesional;
   - Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diaudit.

   Objectivity, Internal Auditors demonstrate high objectivity in collecting, evaluating, and communicating information related to audited activities or processes. They make balanced assessments, considering all relevant factors without being influenced by personal or external interests. Behavioral Rules:

   - Avoid operational activities that may compromise or appear to compromise objectivity, including any involvement or relationships that create conflicts of interest;
   - Do not accept anything that could weaken or be perceived as weakening professional judgment;
   - Disclose all known material facts that, if omitted, could distort audit reports.

3 Kerahasiaan Auditor Intemal menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut. Aturan Perilaku:

- Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat melaksanakan tugas;
- Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran Perusahaan yang etis dan legitimasi.

Confidentiality, Internal Auditors respect the value and ownership of information received and do not disclose such information without proper authorization unless required by legal or professional obligations. Behavioral Rules:

- Exercise caution in using and safeguarding information obtained during audits
- Refrain from using information for personal gain or in any way that violates the law or hinders ethical and legitimate corporate objectives.

4 Kompetensi Auditor Internal menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aturan Perilaku:

- Hanya terlibat dalam audit apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam audit tersebut;
- Melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan standar praktik profesional Internal audit;
- Senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa yang diberikan.

Competence, Internal Auditors apply the necessary knowledge, skills, and experience to perform audit duties effectively. Behavioral Rules:

- Participate only in audits where they possess the required knowledge, skills, and experience;
- Conduct internal audit functions in accordance with professional standards;
- Continuously improve their expertise, effectiveness, and the quality of services provided.

Independensi Biro Internal Audit

Independence of Internal Audit Bureau

Perusahaan menjamin independensi Biro Internal Audit dengan memastikan seluruh kegiatan operasional telah dikendalikan dan dikelola dengan efektif, transparan, dan objektif sesuai dengan pengetahuan serta keterampilan auditor dalam menjalankan tugas. Melalui independensi Biro Internal Audit, Perusahaan berharap dapat meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan.

The Company ensures the independence of the Internal Audit Bureau by guaranteeing that all operational activities are controlled and managed effectively, transparently, and objectively, in accordance with the auditors' knowledge and skills in performing their duties. Through the independence of the Internal Audit Bureau, the Company aims to enhance value and improve its operations.

Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Biro *Internal Audit*

Duties and Responsibilities of Internal Audit Bureau and the Realization

Berdasarkan Piagam Kerja Biro Internal Audit, tugas dan tanggung jawab utama Biro Internal Audit adalah membantu Direktur Utama dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah pemeriksaan internal bidang operasional dan keuangan untuk memastikan bahwa peraturan perusahaan serta pengelolaan proyek berjalan sesuai dengan harapan Perusahaan. Pemeriksaan audit internal secara berkala sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan atau (Program Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan). Adapun tugas dan tanggung jawab Biro Internal Audit secara umum sebagai berikut.

Based on the Internal Audit Bureau Charter, the primary duty and responsibility of the Internal Audit Bureau is to assist the President Director in fulfilling their responsibilities, particularly in internal audits related to operational and financial matters, to ensure that company regulations and project management align with the Company's expectations. Internal audits are conducted periodically in accordance with the Annual Audit Work Program or the Company's Annual Work and Budget Plan. The general duties and responsibilities of the Internal Audit Bureau are as follows:

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	**Realisasi 2024** Realization in 2024
Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan termasuk perhitungan anggaran biaya yang berkaitan dengan audit dan meminta arahan Direksi dalam penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan. Develop an annual audit work program, including budget calculations related to auditing, and seek guidance from the Board of Directors in preparing the annual audit work program.	**Telah Terealisasi** Implemented
Melakukan identifikasi permasalahan perusahaan untuk dapat menetapkan objek pemeriksaan di bidang operasional maupun keuangan perusahaan. Identify company issues to determine audit objects in the operational and financial areas of the company.	**Telah Terealisasi** Implemented
Melakukan pemeriksaan terhadap objek yang telah ditetapkan. Conduct audits on the designated objects.	**Telah Terealisasi** Implemented
Melakukan kajian untuk mengetahui akar permasalahan atas terjadinya penyimpangan. Conduct assessments to identify the root causes of deviations.	**Telah Terealisasi** Implemented
Melakukan penilaian kecukupan atas sistem pengendalian internal. Assess the adequacy of the internal control system.	**Telah Terealisasi** Implemented
Memberikan usulan perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Direktur Utama. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities being audited to the President Director.	**Telah Terealisasi** Implemented
Menyiapkan dan mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan. Prepare and document audit working papers.	**Telah Terealisasi** Implemented
Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Prepare audit result reports and submit them to the President Director and Board of Commissioners.	**Telah Terealisasi** Implemented

Mengawasi pelaksanaan rekomendasi (tindak lanjut) dari hasil pemeriksaan yang disampaikan ke audit. Penanggung jawab memonitor pelaksanaan tindak lanjut adalah Ketua Tim. Oversee the implementation of recommendations (follow-up) of the audit results submitted to the audit. The person in charge of monitoring the implementation of the follow-up is the Team Leader.	**Telah Terealisasi** Implemented
Bekerja sama dengan Komite Audit. Work closely with the Audit Committee.	**Telah Terealisasi** Implemented
Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Conduct special examinations if necessary.	**Telah Terealisasi** Implemented
Melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan. Penilaian dilakukan oleh asesor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Conduct an assessment of the quality assurance program and the overall improvement of the internal audit function. The assessment is conducted by an independent assessor at least once every 5 (five) years.	**Telah Terealisasi** Implemented
Menjadi counterpart saat dilakukan penilaian penerapan GCG oleh asesor independen. Serving as a counterpart during the assessment of GCG implementation by an independent assessor.	**Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, tidak perlu dilakukan asesmen GCG sehingga tugas tersebut tidak dilakukan.** Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, there is no need to conduct a GCG assessment, so the task was not carried out.
Melakukan *assessment* penerapan GCG setiap 2 (dua) tahun sekali. Conduct an assessment of GCG implementation every 2 (two) years.	**Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, tidak perlu dilakukan asesmen GCG sehingga asesmen tidak dilaksanakan** Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, there is no need to conduct a GCG assessment so the assessment was not carried out.
Mengawasi pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian GCG. Oversee the implementation of GCG assessment recommendations.	**Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, tidak perlu dilakukan asesmen GCG sehingga tugas tersebut tidak dilakukan** Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, there is no need to conduct a GCG assessment so the task was not carried out.
Meninjau ulang secara berkala buku pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan GCG di Perusahaan dan melakukan revisi jika terjadi ketidaksesuaian dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku. Periodically review the guidebook related to the implementation of GCG in the Company and revise it if there is any inconsistency with the prevailing laws/regulations.	**Telah Terealisasi** Implemented
Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas. Conduct inspection and assessment of efficiency and effectiveness.	**Telah Terealisasi** Implemented
Conduct inspection and assessment of efficiency and effectiveness. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities performed.	**Telah Terealisasi** Implemented

Pengembangan Kompetensi Biro *Internal Audit*

Internal Audit Bureau Competency Development

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi karyawan Biro Internal Audit dengan harapan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas audit internal di lingkup Perusahaan. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Biro Internal Audit di sepanjang tahun 2024.

The Company facilitates the implementation of development programs for the Internal Audit Bureau employees, with the expectation of positively impacting productivity and the effectiveness of internal audits within the Company. Below are the competency development activities attended by the Internal Audit Bureau in 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan** Types and Contents of Education and Training	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Penyelenggara** Organizer
Wismo Suwego	**Seminar Petunjuk Teknis Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (Internal Control Over Financial Reporting) BUMN** Seminar on Technical Instructions for Internal Control Over Financial Reporting BUMN	**Kementrian BUMN/ Triwulan IV** Ministry of State-Owned Enterprises/ Quarter IV	**Kementrian BUMN** Ministry of State-Owned Enterprises
	Seminar & Arahan Annual Audit Plan Seminar & Directions for Annual Audit Plan	**FKSPI/ Triwulan IV** FKSPI/ Quarter IV	**FKSPI**
Enggartiasto Dwi Prakoso	**Pengelolaan tugas-tugas audit** Management of audit tasks	**PPAK/ Triwulan I** PPAK/ Quarter I	**PPAK**
Azzah Auliya Ardindasari	**Belum ada** None		
Erwin Simon Siregar	**Komunikasi & psikologi audit** Audit communication and psychology	**PPAK/ Triwulan I** PPAK/ Quarter I	**PPAK**

Pelaporan Biro *Internal Audit*

Internal Audit Bureau Reporting

Kebijakan Pelaporan | Reporting Policy

Pelaporan Biro Internal Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit wajib diadakan secara berkala, paling sedikit setiap 3 bulan sekali dalam setahun.

The Internal Audit Bureau is required to conduct regular reporting to the Board of Commissioners, Directors, and Audit Committee at least once every 3 months within a year.

Pelaksanaan Pelaporan | Implementation of Reporting

Di tahun 2024, Biro Internal Audit telah melakukan laporan triwulan secara rutin, baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun Komite Audit. Adapun pelaporan yang diberikan mencakup kegiatan audit Biro Internal Audit, temuan khusus, dan pengendalian internal

In 2024, the Internal Audit Bureau has carried out routine quarterly reporting to the Board of Commissioners, Directors, and Audit Committee. The reports provided include the activities of the Internal Audit Bureau, specific findings, and internal controls.

Laporan Hasil Pemeriksaan Tugas Biro *Internal Audit*

Internal Audit Bureau Examination Results Report

Tugas dan tanggung jawab Biro Internal Audit di tahun 2024 beserta realisasinya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

The duties and responsibilities of the Internal Audit Bureau in 2024, along with their implementation, are outlined in the table below.

Audit			
Triwulan Quarter	**Rencana** Plan	**Realisasi** Realization	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
1	**Divisi Equipment** Equipment Division	**Sudah Terlaksana** Implemented	100
2	**Divisi Operasi 1** Operations 1 Division	**Sudah Terlaksana** Implemented	100
3	**Divisi Operasi 2** Operations 2 Division	**Sudah Terlaksana** Implemented	100
4	**Divisi Business Development & Asset management** Business Development & Asset Management Division	**On progress TW IV** On progress Quarter IV	90
5	**Divisi Bidding & Engineering** Bidding & Engineering Division	**On progress TW IV** On progress Quarter IV	90

Non-Audit
***Monitoring* Hasil Audit.** Monitoring Audit Results.
Penyusunan PKT/PKPT. Preparation of PKT/PKPT.
Monitoring Hasil Audit. Monitoring Audit Results.
Mengikuti seminar dari luar, Iuran FKSPI, dll. Attending external seminars, FKSPI Contributions, etc.
***Self Assessment* GCG.** GCG Self Assessment.
Evaluasi SPIP. SPIP Evaluation.
Menyusun Laporan Triwulan (TW) dan Laporan Whistleblowing System (WBS). Preparing Quarterly Reports and Whistleblowing System (WBS Reports.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Audit Findings and Follow-up

NO.	**Auditee** Auditee	**Temuan** Findings	**Tindak Lanjut** Follow-up
1.	**Divisi Equipment** Equipment Division	**Prosedur/WI belum dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini, tidak adanya standar pencatatan periodic service&corrective maintenance sehingga mengurangi efektivitas perawatan aset, tidak adanya integrasi antara divisi equipment dengan pencatatan periodic service maupun corrective maintenance proyek.** Procedures/WI have not been adjusted to current conditions, there is no standard for recording periodic service & corrective maintenance, thus reducing the effectiveness of asset maintenance, there is no integration between the equipment division and recording periodic service or corrective maintenance for the project.	**Peningkatan sosialisasi prosedur, konsistensi pengiriman data dari proyek ke divisi equipment atas data PS dan CM, koordinasi dengan divisi equipment terkait mengembangan simap agar terdapat integrasi PS dan CM dengan Divisi Equipment.** Improved socialization of procedures, consistency of data delivery from projects to the equipment division for PS and CM data, coordination with related equipment divisions to develop SIMAP so that there is integration of PS and CM with the Equipment Division.
2.	**Divisi Equipment** Equipment Division	**Terdapat perbedaan pengakuan penjualan divisi equipment dengan biaya sewa internal proyek.** There is a difference in the recognition of equipment division sales with internal project rental costs.	**Pembuatan format rakop dan format baku jurnal biaya operating cost.** Creation of RAKOP format and standard journal format for operating cost expenses.
3.	**Divisi Equipment** Equipment Division	**Terdapat total 142 unit alat berat dan dump truck yang berstatus rusak berat (idle) dan kondisinya tidak mungkin dilakukan perbaikan yang terdapat di Gudang Cariu, Narogong, dan Surabaya.** There are a total of 142 heavy equipment units and dump trucks in severely damaged (idle) condition, which are beyond repair, located in the Cariu, Narogong, and Surabaya warehouses.	**Percepatan program divestasi dengan mencari potential buyer.** Acceleration of the divestment program by seeking potential buyers.
4.	**Divisi Operation 1** Operation 1 Division	**Realisasi kinerja sampai dengan Juni 2024 tercapai dan sampai dengan Desember 2024 tidak tercapai.** Performance realization was achieved up to June 2024 but not achieved by December 2024.	**Mengoptimalkan sisa orderbook yang ada sehingga mengenerate penjualan berkualitas.** Optimizing the remaining order book to generate quality sales..
5.	**Divisi Operation 1** Operation 1 Division	**Beberapa proses HP terlambat dan proses realisasi pengendalian terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur seperti tidak diupdatenya addendum pada SIMAP, tidak terlaksananya inspeksi rutin, tidak seluruh poin HP pada prosedur dibahas saat holdpoint.** Some HP processes are delayed, and the realization of control processes does not comply with procedures, such as the failure to update addendums in SIMAP, the lack of routine inspections, and the omission of certain HP points in the procedure during the hold point discussion.	**Melakukan review prosedur HP agar sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan saat ini dan pembuatan timeline pengesahan dokumen laporan HP.** Reviewing HP procedures to align with the current business conditions of the company and creating a timeline for the approval of the HP report document.

6.	**Divisi Operation 1** Operation 1 Division	**Dari total 118 proyek yang tercatat sejak 2016, hanya 2,54% yang menyelesaikan tutup buku 1, dan 1,69% yang menyelesaikan tutup buku 2.** Out of a total of 118 projects recorded since 2016, only 2.54% have completed closing book 1, and 1.69% have completed closing book 2.	**Perlu dilakukan sosialisasi khusus terkait dengan tutup buku.** A special socialization regarding book closing needs to be conducted.
7.	**Divisi Operation 2** Operation 2 Division	**Total WIP 1 s.d Agustus 2024 adalah 573 M yang terdiri dari piutang konstruksi dan piutang retensi. Selain itu terdapat WIP 2 sebesar 886 M yang terdiri dari tagihan bruto, factoring, dan WIP 2 real.** The total WIP 1 up to August 2024 is 573 M consisting of construction receivables and retention receivables. In addition, there is a WIP 2 of 886 M consisting of gross bills, factoring, and WIP 2 real.	**Segera melakukan rapat koordinasi dengan Divisi FINACC dan OC terkait penjurnalan nilai backcharge secara akuntansi sehingga bisa menggambarkan kinerja proyek Divisi Operasi 2 secara real.** Immediately conduct a coordination meeting with the FINACC and OC Divisions regarding the accounting journalization of backcharge values to accurately reflect the performance of Division Operation 2 projects.
8.	**Divisi Operation 2** Operation 2 Division	**27% dari total 15 holdpoint (HP) tidak terlaksana sesuai dengan range progres tahapan holdpoint.** 27% of a total of 15 holdpoints (HP) were not implemented in accordance with the progress range of holdpoint stages.	**Menyusun jadwal dan monitoring pelaksanaan holdpoint mengacu pada progres proyek agar sesuai dengan prosedur.** Prepare a schedule and monitor the implementation of holdpoints by referring to project progress to ensure compliance with procedures.
9.	**Divisi Operation 2** Operation 2 Division	**Realisasi penjualan sC. Agustus 2024 dan s.d Desember 2024 tidak tercapai.** Sales realization up to August 2024 and up to December 2024 not achieved.	**Berkoordinasi dengan Divisi Equipment untuk meningkatkan PA sesuai target rencana agar penjualan sesuai RKAP bisa tercapai dan koordinasi dengan SCM mengenai kepastian kedatangan supply sparepart untuk menjaga konsistensi PA Alat.** Coordinate with the Equipment Division to improve PA according to the planned targets to achieve sales as per RKAP, and collaborate with SCM to ensure the timely arrival of spare part supplies to maintain PA consistency.

Pelaksanaan Koordinasi dan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

Coordination and Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee

Di samping pelaksanaan tugas terkait pemenuhan fungsi audit internal, Biro Internal Audit juga secara rutin melaporkan berbagai hal terkini terkait pelaksanaan tugas fungsi audit internal, baik berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, maupun laporan kepada Direksi. Di sepanjang tahun 2024, Biro Internal Audit menghadiri rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit sebanyak 9 (sembilan) kali Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat-rapat tersebut.

In addition to carrying out tasks related to fulfilling the internal audit function, the Internal Audit Bureau also routinely reports on various current matters regarding the execution of internal audit functions, both by coordinating with the Board of Commissioners and/or the Audit Committee and by reporting to the Board of Directors. Throughout 2024, the Internal Audit Bureau attended meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee a total of 9 (nine) times. Below is a summary of the agenda and minutes of these meetings.

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #01

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #01

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
04 Januari 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Cashflow Desember 2023
2. Update Pemasaran

PESERTA RAPAT:
3. I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
4. Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
5. Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM)
6. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
7. Restian Dini Malini &
8. Suci Dwi Cahyani (Vice President, OC & Supply Chain Management)
9. Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance)
10. Galery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
11. Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary
12. Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
13. Pradita Dewi Kusumawardhani (Manager Legal)
14. Yoan Sukma Ariezonna (Manager Marketing)
15. Dana Surya (Vice President, Bidding & Engineering)
16. Dwi Agus Susanto (Vice President, Operation 1)
17. Sahadewo Nalendro (Vice President, Operation 2)
18. Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
19. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

MEETING DATE AND VENUE:
January 04, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. December 2023 Cashflow
2. Marketing Update

MEETING PARTICIPANTS:
3. I Gede Upeksa Negara (President Director)
4. Mohammad Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
5. Yudi Setiawan (Business Planning & HCM Director)
6. Rebimun (Business Management & Operations Director)
7. Restian Dini Malini (Vice President, OC & Supply Chain Management)
8. Suci Dwi Cahyani (Vice President, OC & Supply Chain Management)
9. Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance)
10. Galery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
11. Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
12. Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
13. Pradita Dewi Kusumawardhani (Manager, Legal)
14. Yoan Sukma Ariezonna (Manager, Marketing)
15. Dana Surya (Vice President, Bidding & Engineering)
16. Dwi Agus Susanto (Vice President, Operation 1)
17. Sahadewo Nalendro (Vice President, Operation 2)
18. Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
19. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #02

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #02

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
11 Januari 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Berbasis Risiko Biro

PESERTA RAPAT:
1. BOD
2. VP-CORSEC
3. VP-IA

MEETING DATE AND VENUE:
January 11, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. Risk-Based Annual Inspection Work Program Bureau

MEETING PARTICIPANTS:
1. BOD
2. VP-CORSEC
3. VP-IA

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #03

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #03

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
30 Januari 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Hasil Survey Akhlak dan ESS
2. Sosialisasi Sistem BDE

PESERTA RAPAT:
1. Dwi Agus Susanto (Vice President, Operation 1)
2. Dana Surya (Vice President, Bidding & Engineering)
3. Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
4. Yoan Sukma Ariezonna (Manager Marketing)
5. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)
6. Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance)
7. Debie Novalia (VP Business Development)
8. Restian Dini Malini &
9. Suci Dwi Cahyani (Vice President, OC & Supply Chain Management)
10. Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
11. Pradita Dewi Kusumawardhani (Manager Legal)
12. Galery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
13. Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)

MEETING DATE AND VENUE:
January 30, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. Survey Results on Ethics and ESS
2. BDE System Socialization

MEETING PARTICIPANTS:
1. Dwi Agus Susanto (Vice President, Operation 1)
2. Dana Surya (Vice President, Bidding & Engineering)
3. Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
4. Yoan Sukma Ariezonna (Manager, Marketing)
5. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)
6. Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance)
7. Debie Novalia (Vice President, Business Development)
8. Restian Dini Malini (Vice President, OC & Supply Chain Management)
9. Suci Dwi Cahyani (Vice President, OC & Supply Chain Management)
10. Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
11. Pradita Dewi Kusumawardhani (Manager, Legal)
12. Galery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
13. Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #04

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #04

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
21 Mei 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Laporan Hasil Audit PT LMA

PESERTA RAPAT:
1. I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
2. Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
3. Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM)
4. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
5. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)
6. Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
7. Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)

MEETING DATE AND VENUE:
May 21, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. Audit Report of PT LMA

MEETING PARTICIPANTS:
1. I Gede Upeksa Negara (President Director)
2. Mohammad Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
3. Yudi Setiawan (Business Planning & HCM Director)
4. Rebimun (Business Management & Operations Director)
5. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)
6. Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
7. Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #05

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #05

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
06 Agustus 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Hasil Audit Divisi Peralatan

PESERTA RAPAT:
2. Arzan (Direktur Utama)
3. Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
4. Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM)
5. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
6. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
7. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

MEETING DATE AND VENUE:
August 06, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. Equipment Division Audit Results

MEETING PARTICIPANTS:
2. Arzan (President Director)
3. Mohammad Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
4. Yudi Setiawan (Business Planning & HCM Director)
5. Rebimun (Business Management & Operations Director)
6. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
7. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #06

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #06

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
30 Agustus 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Monitoring WIPS

PESERTA RAPAT:
1. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
2. Sahadewo Nalendro Bhawono (Vice President, Operation 1)
3. Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance)
4. Pradita Dewi Kusumawardhani (Manager, Legal)
5. Ayu Noviana Isman (Manager, Risk Management)
6. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)
7. Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)

MEETING DATE AND VENUE:
August 30, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. WIPS Monitoring

MEETING PARTICIPANTS:
1. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
2. Sahadewo Nalendro Bhawono (Vice President, Operation 1)
3. Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance)
4. Pradita Dewi Kusumawardhani (Manager, Legal)
5. Ayu Noviana Isman (Manager, Risk Management)
6. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)
7. Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #07

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #07

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
08 Oktober 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Hasil Audit Divisi Operasi 1
2. Evaluasi Asuransi

PESERTA RAPAT:
3. Arzan (Direktur Utama)
4. Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
5. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
6. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
7. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

MEETING DATE AND VENUE:
Oktober 08, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. Audit Results of Operations Division 1
2. Insurance Evaluation

MEETING PARTICIPANTS:
3. Arzan (President Director)
4. Mohammad Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
5. Rebimun (Business Management & Operations Director)
6. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
7. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #08

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #08

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
03 Desember 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Hasil Audit Divisi Operasi 2

PESERTA RAPAT:
2. Arzan (Direktur Utama)
3. Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
4. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
5. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
6. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

MEETING DATE AND VENUE:
December 03, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. Audit Results of Operations Division 2

MEETING PARTICIPANTS:
2. Arzan (President Director)
3. Mohammad Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
4. Rebimun (Business Management & Operations Director)
5. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
6. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

RAPAT BIRO INTERNAL AUDIT BERSAMA DIREKSI, KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT #09

INTERNAL AUDIT BUREAU MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE #09

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
23 Desember 2024; Ruang Rapat Lt 7

AGENDA RAPAT:
1. Hasil Audit Divisi Bidding & Engineering
2. Hasil Audit Divisi Business Development & Asset Management

PESERTA RAPAT:
3. Arzan (Direktur Utama)
4. Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan & HCM)
5. Rebimun (Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi)
6. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
7. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)

MEETING DATE AND VENUE:
December 23, 2024; 7th Floor Meeting Room

MEETING AGENDA:
1. Audit Results of the Bidding & Engineering Division
2. Audit Results of the Business Development & Asset Management Division

MEETING PARTICIPANTS:
3. Arzan (President Director)
4. Mohammad Arif Iswahyudi (Finance & HCM Director)
5. Rebimun (Business Management & Operations Director)
6. Mei Elsa Kembaren (Vice President, Corporate Secretary)
7. Wismo Suwego (Vice President, Internal Auditor)



Penilaian Kinerja Biro *Internal Audit*

Performance Evaluation of the Internal Audit Bureau

Penilaian atas kinerja Biro *Internal Audit* dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* Korporat. Penilaian terhadap kinerja Biro *Internal Audit* dilakukan dengan aspek penilaian sebagai berikut.

The performance evaluation of the Internal Audit Bureau is conducted by the Board of Directors in accordance with procedures and criteria established in the Corporate Key Performance Indicator. The evaluation of the Internal Audit Bureau's performance is carried out based on the following assessment aspects.

A ***Costumer:***

Customer:

- Tingkat kepuasan unit internal terkait.
  Satisfaction level of the relevant internal unit.

B ***Internal Process Business:***

Internal Process Business:

- Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan sesuai surat tugas (operasional, kepatuhan, dan investasi).
  Timeliness of completion of audit reports in accordance with the assignment letter (operational, compliance, and investment).
- Pelaksanaan audit sesuai program kerja tahunan (operasional, kepatuhan, dan investasi).
  Execution of audits according to the annual work program (operational, compliance, and investment).
- Jumlah laporan hasil pengawasan yang dihasilkan (operasional, kepatuhan, investasi).
  Number of audit reports produced (operational, compliance, investment).

C ***Learning And Growth:***

Learning And Growth:

- Penerapan GCG.
  Implementation of Good Corporate Governance (GCG).
- Jumlah sertifikasi auditor/pelatihan.
  Number of auditor certifications/trainings.
- Kepatuhan implementasi manajemen risiko.
  Compliance with risk management implementation.
- *Human resource readiness*
  Human resource readiness

Hasil penilaian di tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 3,45 dari skor maksimum 4,00 dengan kategori B (Baik).

The evaluation results in 2024 show a score of 3,45 out of a maximum score of 4.00 in the category B (Good).



Fungsi *Quality Control*
Quality Control Function

Departemen *Quality Control* (QC) dibentuk dalam rangka mengelola aspek kualitas mengenai tata kelola dan strategi Perusahaan agar mutu kualitas pekerjaan terjaga melalui prosedur, kebijakan dan kualifikasi sertifikasi yang tervalidasi sesuai kebutuhan. Departemen *Quality Control* juga dibentuk untuk memastikan berjalannya proses kualitas mutu atas produk dan layanan yang diberikan Perusahaan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Agar seluruh produk dan layanan PPRE memiliki acuan yang jelas dan berstandar internasional PPRE telah mengimplementasikan ISO 9001:2015 sejak tahun 2017.

The Quality Control (QC) Department was established to manage quality aspects related to the Company's governance and strategy, ensuring the quality of work is maintained through validated procedures, policies, and certification qualifications as required. The Quality Control Department is also formed to ensure the implementation of quality control processes for the products and services provided by the Company, meeting the expectations of stakeholders. To ensure that all PPRE products and services have clear references and meet international standards, PPRE has implemented ISO 9001:2015 since 2017.

Profil Kepala Departemen *Quality Control*

Profile of the Head of the Quality Control Department

Berdasarkan Surat Penempatan Tugas No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penugasan sebagai *Manager Quality Control*, Priyono dipercaya untuk menjabat posisi Manager Departemen *Quality Control* Perusahaan.

Based on the Task Assignment Letter No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023, regarding the Assignment as Quality Control Manager, Priyono has been entrusted with the position of Manager of the Company's Quality Control Department.



Priyono

Manager Quality Control
Menjabat sejak 13 Juli 2023
Quality Control Manager
In office since July 13, 2023

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 33 tahun
Kelahiran Semarang, 18 Januari 1991
Domisili Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Indonesian Citizen
33 years old
Born in Semarang on January 18, 1991
Domiciled in Bogor Regency, West Java, Indonesia

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Teknik Sipil** dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2015)
- **Bachelor of Civil Engineering from** Institute of Technology Sepuluh November (2015)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

- Sertifikasi Kompetensi Ahli Utama Teknik Jalan, BNSP (2024 — 24 April 2029)
- Sertifikasi Kompetensi Pengawas Operasional Pertama Pertambangan Mineral dan Batubara, BNSP (2024 s.C. 06 Februari 2029)
- SKK Ahli Madya Teknik Jembatan, BNSP (2022 s.d 28 November 2027)
- SKK Ahli Madya Manajemen Mutu, BNSP (2022 s.d 24 November 2027)
- SKK Ahli Utama K3 Konstruksi, BNSP (2023 s.d 16 Juni 2028)
- Sertifikasi Training Project Management Professional, Avenew Akademi Inovasi (2022)

- Senior Expert Competency Certification for Road Engineering, BNSP (2024 — April 24, 2029)
- First Operational Supervisor Competency Certification for Mineral and Coal Mining, BNSP (2024 until February 6, 2029)
- Associate SKK on Bridge Engineering, BNSP (2022 until November 28, 2027)
- Associate SKK on Quality Management, BNSP (2022 until November 24, 2027)
- Senior Expert SKK on Construction OHS, BNSP (2023 to 16 June 2028)
- Project Management Professional Training Certification, Avenew Akademi Inovasi (2022)

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

Sejak tanggal 2018
sebagai *Quality Control Coordinator*

Joined the Company on 2018
as Quality Control Coordinator

Riwayat Profesi | Professional History

Berkarir di lingkup entitas induk, PT PP (Persero) Tbk dan Perusahaan sebagai entitas anak, yaitu Kepala Departemen *Quality Control* PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2022-2023); *Quality Control Coordinator* PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2018-2022); *Quality Control* Officer PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/ Cabang V/ Proyek Revitalisasi Pabrik Gula Colomadu Karanganyar (2017- 2018); *Quality Control Officer* PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Cabang V/ Proyek Apartemen Pertamina Cilacap (2016-2017); *Quality Control Officer* PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Cabang V/ Proyek The Samator Surabaya (2013-2016); dan Staf Teknik PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Cabang V/Proyek RS Kariadi Semarang & RSI Harapan Anda Tegal (2012-2013).

Career within the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, and its subsidiary, holding the following positions: Head of Quality Control Department at PT PP Presisi Tbk/Head Office Unit (2022-2023), Quality Control Coordinator at PT PP Presisi Tbk/Head Office Unit (2018-2022), Quality Control Officer at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/Colomadu Sugar Factory Revitalization Project, Karanganyar (2017-2018), Quality Control Officer at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/Pertamina Cilacap Apartment Project (2016-2017), Quality Control Officer at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/The Samator Surabaya Project (2013-2016), and Technical Staff at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/Kariadi Hospital Semarang & RSI Harapan Anda Tegal Project (2012-2013).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak Ada

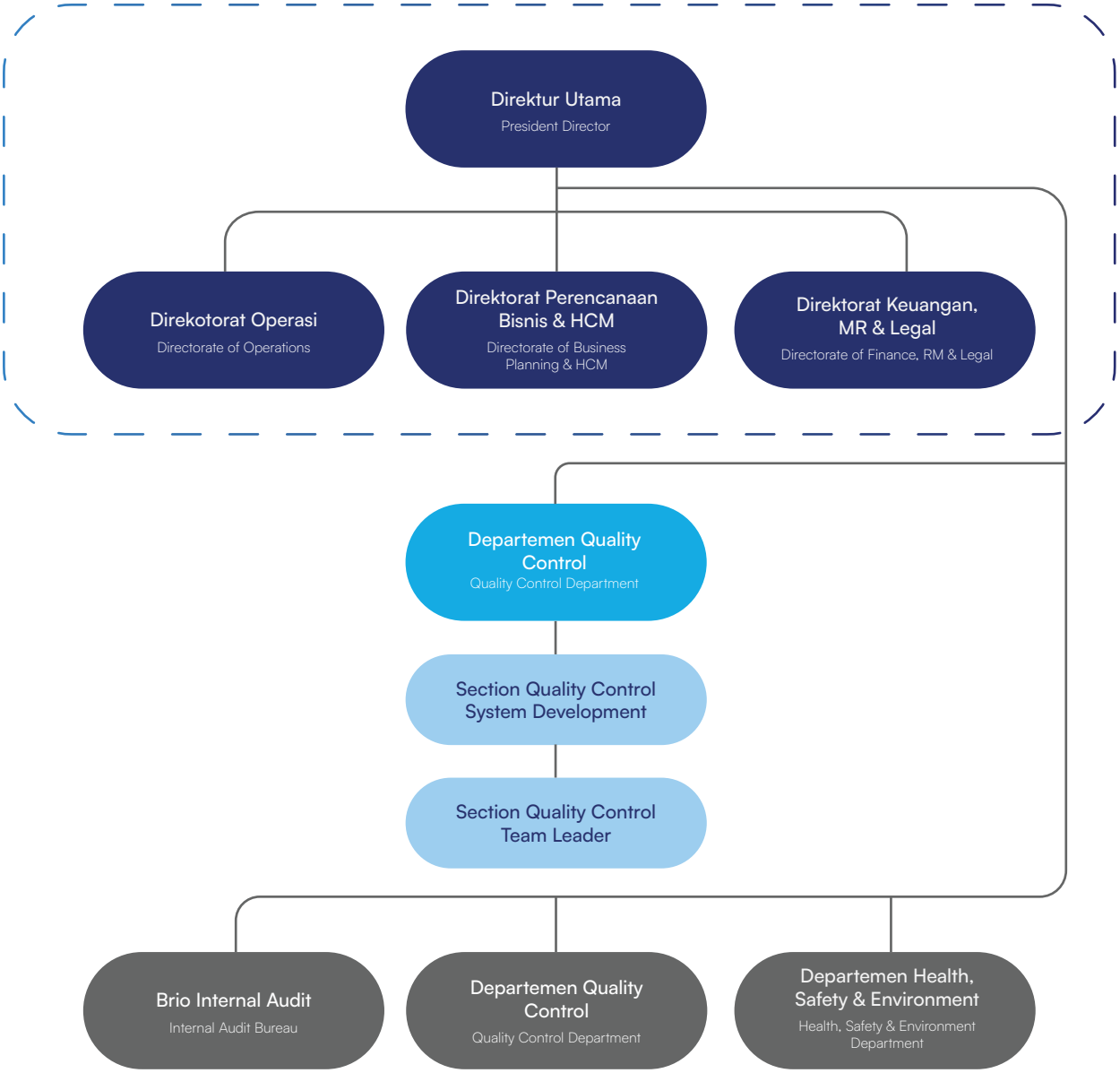
Within the Company: None
Outside the Company: None

Struktur Organisasi Departemen *Quality Control*

Organizational Structure of the Quality Control Department

Struktur organisasi Departemen *Quality Control* ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen *Quality Control* sebanyak 4 (empat) orang.

The organizational structure of the Quality Control Department is determined by the Board of Directors based on Decision Letter No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 dated August 21, 2024, regarding Changes to the Company's Organizational Structure. As of December 31, 2024, the number of employees in the Quality Control Department is 4 (four) people.



Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Departemen *Quality Control*

Performance Evaluation of the Internal Audit Bureau

Tugas dan tanggung jawab Departemen Quality Control adalah memastikan penerapan dan pengelolaan quality control di proyek dapat berjalan dengan baik serta mengembangkan kebijakan terkait dengan quality control dalam rangka pengelolaan sistem kualitas di proyek.

The duties and responsibilities of the Quality Control Department are to ensure the implementation and management of quality control in projects run effectively and to develop policies related to quality control as part of managing the quality system in projects.

Pengembangan Kompetensi Departemen *Quality Control*

Competency Development of the Quality Control Department

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi karyawan Departemen *Quality Control* dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan *Quality Control* di lingkup Perusahaan. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Departemen *Quality Control* di sepanjang tahun 2024.

The Company facilitates the implementation of development programs for employees of the Quality Control Department to enhance their competencies. This program is expected to have a positive impact on productivity and the effectiveness of Quality Control management within the Company. Below are the competency development programs attended by the Quality Control Department throughout 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan** Type and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Location/Date	**Penyelenggara** Organizer
Priyono ***Manager Quality Control***	**Sertifikasi Kompetensi Pengawas Operasional Pertama Pertambangan Mineral dan Batubara** Competency Certification for First Operational Supervisor in Mineral and Coal Mining	**Online Sertifikasi, 22-26 Januari 2024** Online Certification, January 22-26, 2024	**BNSP**
	Sertifikasi Kompetensi Ahli Utama Teknik Jalan Expert Competency Certification in Road Engineering	**Online Sertifikasi, 25 April 2024** Online Certification, April 25, 2024	**BNSP**
	Training Sampling dan Preparasi Bijih Nikel Training on Sampling and Preparation of Nickel Ore	**Online Training, 12 Januari 2024** Online Training, January 12, 2024	**Miners Education**
Yogi Tio Bagaskoro ***Team Leader Quality Control***	**Sertifikasi Kompetensi Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi** Competency Certification for Junior Expert in Construction Quality Management System	**Online Sertifikasi, 21 Mei 2024** Online Certification, May 21, 2024	**BNSP**
	Training Sampling dan Preparasi Bijih Nikel Training on Sampling and Preparation of Nickel Ore	**Online Training, 12 Januari 2024** Online Training, January 12, 2024	**Miners Education**
	Workshop and Sharing Knowledge Pekerjaan Bekisting Table Form Workshop and Sharing Knowledge on Table Formwork Work	**Proyek BNI Kawasan PIK 2, 27 Agustus 2024** BNI Project, PIK 2 Area, August 27, 2024	**Biro QHSE PT PP (Persero) Tbk**
	Training Quality Control Asphalt Pavement Quality Control Training for Asphalt Pavement	**Proyek Bandara VVIP IKN, 14-15 Mei 2024** VVIP IKN Airport Project, May 14-15, 2024	**Biro QHSE PT PP (Persero) Tbk**

Adi Indra Pratama ***Team Leader Quality Control***	**Sertifikasi Kompetensi Pengawas Operasional Pertama Pertambangan Mineral dan Batubara** Competency Certification for First Operational Supervisor in Mineral and Coal Mining	**Online Sertifikasi, 22-26 Januari 2024** Online Certification, January 22-26, 2024	**BNSP**
	Sertifikasi Kompetensi Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Competency Certification for Junior Expert in Construction Quality Management System	**Online Sertifikasi, 26 November 2024** Online Certification, November 26, 2024	**BNSP**
	Training Sampling dan Preparasi Bijih Nikel Training on Sampling and Preparation of Nickel Ore	**Online Training, 12 Januari 2024** Online Training, January 12, 2024	**Miners Education**
Gita Mulia Pranata Jr Off QC System Development	**Sertifikasi Kompetensi Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi** Competency Certification for Intermediate Expert in Construction Quality Management System	**Online Sertifikasi, 07 Agustus 2024** Online Certification, August 7, 2024	**BNSP**
	Training Sampling dan Preparasi Bijih Nikel Training on Sampling and Preparation of Nickel Ore	**Online Training, 12 Januari 2024** Online Training, January 12, 2024	**Miners Education**

Laporan Pelaksanaan Tugas Departemen Quality Control

Report on the Implementation of Tasks by the Quality Control Department

Di tahun 2024, Departemen Quality Control melaksanakan program kerja yaitu:

In 2024, the Quality Control Department carried out the following work programs:

1. Menyelenggarakan External Audit Surveillance ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 object sampling pada UKP dan Proyek Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II
   Conducting External Audit Surveillance ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 object sampling at UKP and Jakarta — Cikampek Selatan II Batching Plant Project

2. Melaksanakan Internal Audit PP Presisi Triwulan I (Weda Bay Mining Operation), Triwulan II (Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II), Triwulan III (Upah Giling dan Hampar Aspal Bandara VVIP IKN), dan Triwulan IV (Haul Road Position)
   Performing Internal Audit PP Presisi for Q1 (Weda Bay Mining Operation), Q2 (Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II), Q3 (Milling Wages and Asphalt Overlay at VVIP IKN Airport), and Q4 (Haul Road Position)

3. Melakukan Pendampingan Corporate Audit Biro QHSE Semester I (Weda Bay Mining Operation) dan Semester II (Mine Haul Road Vale)
   Assisting Corporate Audit Biro QHSE for Semester I (Weda Bay Mining Operation) and Semester II (Mine Haul Road Vale)

4. Menjalankan Program *Training QA & QC Management; Field Discuss Mine Geology*, Training Sampling dan Preparasi Bijih Nikel; Training Quality Control Asphalt Pavement; Training 10 Golden Steps for Best Quality, Training Identifikasi Potensi dan Kegagalan Mutu
   Implementing Training Programs, including QA & QC Management Training, Field Discussion on Mine Geology, Training on Sampling and Preparation of Nickel Ore, Training on Quality Control Asphalt Pavement, Training on 10 Golden Steps for Best Quality, and Training on Identifying Quality Potential and Failures

5

Melakukan *Inpection and Sharing Quality* pada Proyek Pelabuhan Perikanan Saumlaki, KAI Medan Binjai, Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II, Upah Giling dan Hampar Agregat, Aspal Sumbu Barat, Upah Giling dan Hampar Aspal Bandara VVIP IKN, Mine Haul Road Vale, Quarry Vale, Weda Bay Mining Operation, Weda Bay Mining Development dan Haul Road Position

Conducting Inspection and Quality Sharing at Saumlaki Fishing Port Project, KAI Medan Binjai Project, Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II, Milling Wages and Aggregate Overlay, West Axis Asphalt, Milling Wages and Asphalt Overlay at VVIP IKN Airport, Mine Haul Road Vale, Quarry Vale, Weda Bay Mining Operation, Weda Bay Mining Development, and Haul Road Position

6

Menjalankan Program *Peer Asisst* bersama Expert, Div Stratec, dan Biro QHSE PT PP (Proyek KAI Medan Binjai dan Proyek Haul Road Position)

Executing the Peer Assist Program with Experts, Strategic Division, and Biro QHSE PT PP (KAI Medan Binjai Project and Haul Road Position Project)

7

Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Proyek / Juklak (Proyek Weda Bay Mining Operation, Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II, Batching Plant Bayung Lencir Jambi, Proyek Upah Giling dan Hampar Agregat, Aspal Sumbu Barat, Proyek Upah Giling dan Hampar Aspal Bandara VVIP IKN dan Haul Road Position)

Assisting in the Preparation of Project Work Plans / Technical Guidelines for Weda Bay Mining Operation Project, Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II, Batching Plant Bayung Lencir Jambi, Milling Wages and Aggregate Overlay Project, West Axis Asphalt Project, Milling Wages and Asphalt Overlay Project at VVIP IKN Airport, and Haul Road Position

8

Asistensi Penyusunan *Work Method Statement* (Proyek KAI Medan Binjai, Proyek Upah Giling dan Hampar Agregat, Aspal Sumbu Barat, Proyek Upah Giling dan Hampar Aspal Bandara VVIP IKN, Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II, Batching Plant Bayung Lencir Jambi dan Haul Road Position)

Assisting in the Preparation of Work Method Statements for KAI Medan Binjai Project, Milling Wages and Aggregate Overlay Project, West Axis Asphalt Project, Milling Wages and Asphalt Overlay Project at VVIP IKN Airport, Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II, Batching Plant Bayung Lencir Jambi, and Haul Road Position

9

Menjalankan Forum Komunikasi *Quality; Biweekly Meeting*, FGD Quality, Validasi KPI Project bulanan, MR QC bulanan, MR Operasi bulanan, MR Biro QHSE bulanan dan MR Perusahaan Triwulan

Conducting Quality Communication Forums, including Biweekly Meetings, FGD Quality, Monthly Project KPI Validation, Monthly QC Management Reviews, Monthly Operations Management Reviews, Monthly Biro QHSE Management Reviews, and Quarterly Corporate Management Reviews

10

Melakukan Update Prosedur/WI/Standar *Quality*; Prosedur *Non-Conformance* QC, *Update Quality Target* dan *Standar Contamination Control*

Updating Procedures/WI/Quality Standards, including Non-Conformance QC Procedures, Quality Target Updates, and Contamination Control Standards

11

Melakukan Pengembangan *Sistem Quality; Dashboard Corrective Action* dan *Job Mix Formula* Aspal

Developing the Quality System, including Dashboard for Corrective Actions and Asphalt Job Mix Formula

12 Menyusun kelengkapan dokumen Tender; Proyek Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II, Batching Plant Bayung Lencir Jambi, Proyek Upah Giling dan Hampar Agregat, Aspal Sumbu Barat, Proyek Upah Giling dan Hampar Aspal Bandara VVIP IKN, dan Batching Plant KLN.

Preparing Tender Documentation for Batching Plant Jakarta — Cikampek Selatan II Project, Batching Plant Bayung Lencir Jambi, Milling Wages and Aggregate Overlay Project, West Axis Asphalt Project, Milling Wages and Asphalt Overlay Project at VVIP IKN Airport, and Batching Plant KLN

Penilaian Kinerja Departemen Quality Control

Performance Assessment of the Quality Control Department

Penilaian atas kinerja Departemen Quality Control dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Key Performance Indicator Korporat. Penilaian terhadap kinerja Departemen Quality Control dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut:

The performance assessment of the Quality Control Department is conducted by the Board of Directors in accordance with the procedures and criteria established in the Corporate Key Performance Indicator. The performance evaluation of the Quality Control Department is carried out through the following assessment aspects:

1 Internal Audit QHSE dan Corporate Audit Biro QHSE PT PP (Persero) Tbk dengan skor rata-rata 80,76% dari Target KPI 80%;

Internal Audit QHSE and Corporate Audit Biro QHSE PT PP (Persero) Tbk with an average score of 80.76% from the KPI Target of 80%

2 Customer Satisfaction Survey/Survey Kepuasan Pelanggan dengan skor rata-rata 93,51 % dari Target KPI 90%;

Customer Satisfaction Survey with an average score of 93.51% from the KPI Target of 90%;

3 Closing NC QC dengan skor rata-rata 95,14 % dari Target KPI 92%;

Closing NC QC with an average score of 95.14% from the KPI Target of 92%;

4 QC Compliance (QSIA) dengan skor rata-rata 90,60% dari Target KPI 87%;

QC Compliance (QSIA) with an average score of 90.60% from the KPI Target of 87%;

5 Quality Assesment dengan rata-rata 96,04% dari Target KPI 91,5%;

Quality Assessment with an average score of 96.04% from the KPI Target of 91.5%

6 Respon terhadap customer complaint dengan skor rata-rata 1,67 hari dari Target KPI 3 Hari;

Response to customer complaints with an average score of 1.67 days from the KPI Target of 3 days;

7 Pemenuhan Inspeksi QHSE dengan rata-rata 10 kali per Triwulan dari Target KPI 6 kali per Triwulan;

Fulfillment of QHSE Inspections with an average of 10 times per quarter from the KPI Target of 6 times per quarter.

Hasil penilaian di tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 3,07 dari skor maksimum 4,00 dengan kategori Baik (B).

The assessment results in 2024 show a score of 3.07 out of a maximum score of 4.00, with a "Good (B)" category.

Fungsi *Health, Safety & Environment*
Health, Safety & Environment Function

Departemen *Health, Safety & Environment* (HSE) dibentuk dalam rangka memastikan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat berjalan dengan baik dan konsisten di proses bisnis Perusahaan dan juga memastikan regulasi yang sudah ditentukan pemerintah terkait aspek keselamatan bisa diidentifikasi dan diterapkan oleh Perusahaan.

The Health, Safety & Environment (HSE) Department was established to ensure that the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) is effectively and consistently implemented throughout the Company's business processes. It also aims to ensure that government regulations related to safety aspects are identified and applied by the Company.

Profil Kepala Departemen *Health, Safety & Environment*

Profile of the Head of the Health, Safety & Environment Department

Berdasarkan Surat Penempatan Tugas No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penugasan Sebagai Manager *Health, Safety & Environment*, Pipin Julianto dipercaya untuk menjabat posisi *Manager* Departemen *Health, Safety & Environment.*

Based on Assignment Letter No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023, regarding the Appointment as Manager of Health, Safety & Environment, Pipin Julianto has been entrusted with the position of Manager of the Health, Safety & Environment Department.



Pipin Julianto

Manager Health, Safety & Environment
Menjabat sejak 17 Juli 2023
Health, Safety & Environment Manager
In office since July 17, 2023

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 32 tahun
Kelahiran Semarang, 27 Juli 1992
Domisili Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Indonesian Citizen
32 years old
Born in Semarang on July 27, 1992
Domiciled in Bogor, West Java, Indonesia

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Teknik K3** dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2014)

- **Bachelor of Occupational Health and Safety Engineering from** Institute of Technology Sepuluh November, Surabaya (2014)

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

- Ahli K3 Utama, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2023 s.d 2026)
- Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan, BNSP (2020 s.d 2024)
- Ahli K3 Konstruksi Madya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (2020 s.d 2023)
- Investigator Insiden, BNSP (2021 s.d 2025)
- Certified Training of Trainer (TOT), BNSP (2021 s.d 2024)

- Senior OHS Expert, National Professional Certification Agency (BNSP) (2023 to 2026)
- First Operational Supervisor (POP) in Mining, BNSP (2020 to 2024)
- Intermediate Construction OHS Expert, Construction Services Development Agency (LPJK) (2020 to 2023)
- Incident Investigator, BNSP (2021 to 2025)
- Certified Training of Trainer (TOT), BNSP (2021 to 2024)

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

Sejak tanggal 3 April 2017
sebagai *Health, Safety & Environment Officer*

Joined the Company on April 3, 2017
as a Health, Safety & Environment Officer.

Riwayat Profesi | Professional History

Berkarir di lingkup entitas induk, PT PP (Persero) Tbk dan Perusahaan sebagai entitas anak, yaitu Kepala Departemen HSE PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2022-2023); *Health, Safety & Environment Coordinator* PT PP Presisi Tbk/ Unit Kantor Pusat (2018-2022); *Health, Safety & Environment Officer* PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2017-2018); *Health, Safety & Environment Coordinator* Cabang V PT PP (Persero) Tbk (2015-2017); *Health, Safety & Environment Officer* Proyek Cabang V PT PP (Persero) Tbk (2014- 2015).

Career within the parent entity, PT PP (Persero) Tbk, and the Company as a subsidiary: Head of HSE Department at PT PP Presisi Tbk / Head Office Unit (2022-2023); Health, Safety & Environment Coordinator at PT PP Presisi Tbk / Head Office Unit (2018-2022); Health, Safety & Environment Officer at PT PP Presisi Tbk / Head Office Unit (2017-2018); Health, Safety & Environment Coordinator at Branch V PT PP (Persero) Tbk (2015-2017); Health, Safety & Environment Officer at Branch V Project PT PP (Persero) Tbk (2014-2015).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak Ada

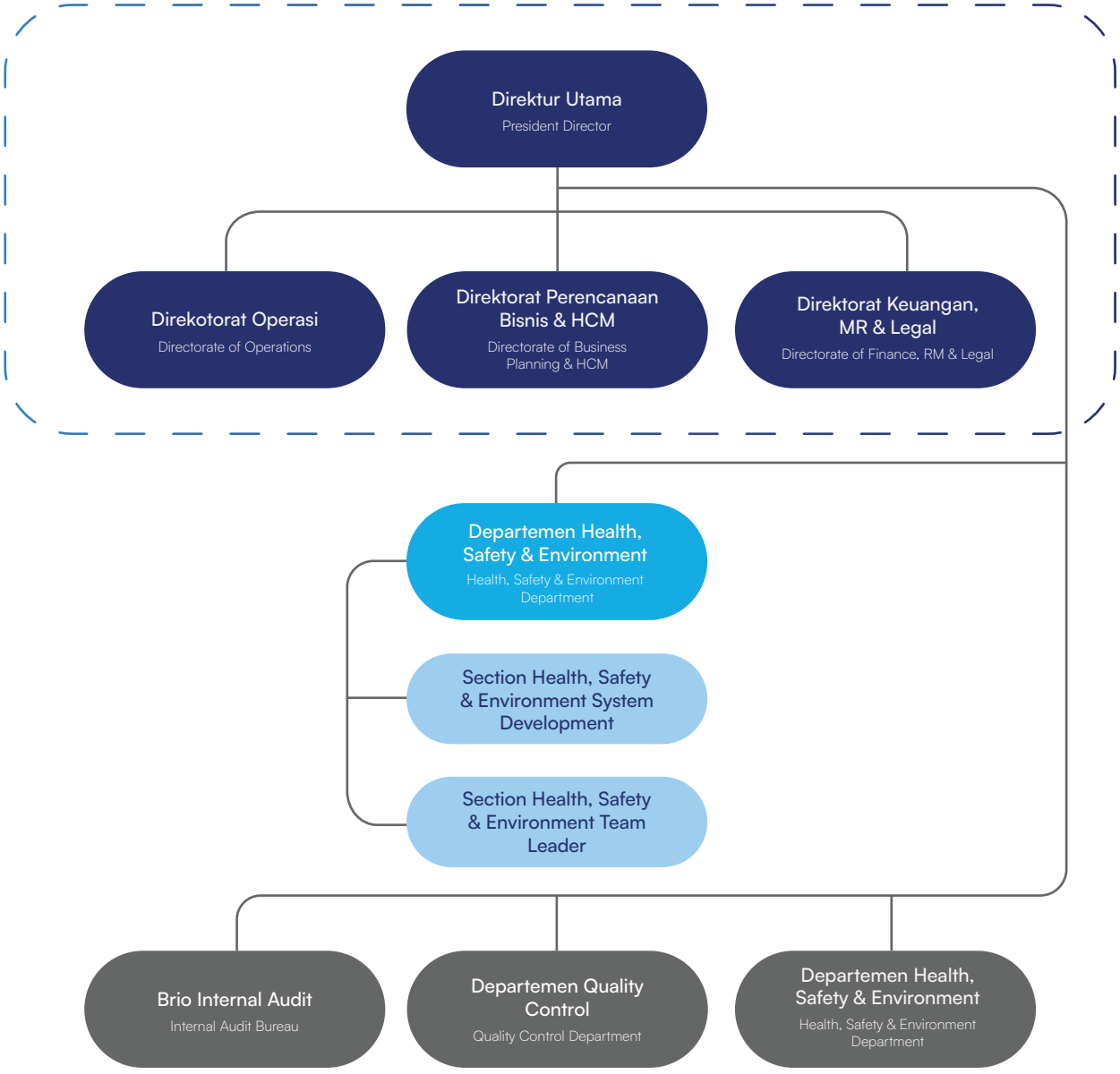
Within the Company: None
Outside the Company: None

Struktur Organisasi Departemen Health, Safety & Environment

Organization Structure of Health, Safety & Environment Department

Struktur organisasi Departemen Health, Safety & Environment (HSE) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen *Health, Safety & Environment* sebanyak 3 (tiga) orang.

The organization structure of the Health, Safety & Environment (HSE) Department is determined by the Board of Directors based on Decision Letter No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 dated August 21, 2024, regarding Changes to the Company's Organizational Structure. As of December 31, 2024, the Health, Safety & Environment Department consists of three employees.



Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Departemen *Quality Control*

Performance Evaluation of the Internal Audit Bureau

Tugas dan tanggung jawab Departemen *Health, Safety & Environment* adalah:

The duties and responsibilities of the Health, Safety & Environment (HSE) Department are:

1. Mengembangkan kebijakan, standar, dan sistem manajerial HSE di Perusahaan;
   Developing HSE policies, standards, and management systems within the Company;
2. Memastikan sistem manajemen ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, dan SMK3 telah diimplementasikan;
   Ensuring the implementation of ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, and SMK3 management systems;
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya *safety* di Perusahaan;
   Developing and implementing a safety culture within the Company;
4. Melakukan sosialisasi, *sharing knowledge,* pengalaman, *safety culture* serta pengembangan *skill* di lingkungan Perusahaan;
   Conducting socialization, knowledge sharing, experience exchange, safety culture promotion, and skill development within the Company;
5. Melakukan inspeksi HSE ke proyek secara langsung;
   Conducting direct HSE inspections at project sites;
6. Memberikan asistensi terhadap perencanaan, implementasi dan evaluasi HSE yang telah dibuat oleh proyek;
   Providing assistance in planning, implementing, and evaluating HSE programs developed by the projects;
7. Memastikan ketersediaan dokumen HSE yang dibutuhkan untuk proses lelang;
   Ensuring the availability of necessary HSE documents for the bidding process;
8. Memberikan bantuan dalam pemecahan permasalahan HSE di lingkungan Perusahaan;
   Assisting in resolving HSE-related issues within the Company;
9. Berperan sebagai *counterpart* dalam proses audit HSE dengan pihak eksternal.
   Acting as a counterpart in the HSE audit process with external parties.

Sertifikasi Profesi *Health, Safety & Environment*

Professional Certification of the Health, Safety & Environment

Untuk memperkuat kinerja pengawasan HSE dalam kegiatan operasinya, Perusahaan memberikan sertifikasi profesi bagi karyawan Departemen *Health, Safety & Environment*. Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Departemen *Health, Safety & Environment* sebagai berikut.

To strengthen HSE supervisory performance in its operations, the Company provides professional certification for employees of the Health, Safety & Environment Department. The professional certifications held by the employees of the Health, Safety & Environment Department are as follows.

Nama Name	**Nama Sertifikasi** Certification Name	**Lembaga Sertifikasi** Certifying Institution
Pipin Julianto ***Manager HSE***	**Ahli K3 Utama** Principal HSE Expert	**BNSP**
	POP Pertambangan Mining Operational Supervisor (POP)	**BNSP**
	Ahli K3 Madya Konstruksi Intermediate HSE Construction Expert	**LPJK**
	TOT (Training of Trainer) TOT (Training of Trainer)	**BNSP**
	AGT Cofined Space AGT Confined Space	**BNSP**
	Ahli K3 Umum General HSE Expert	**Kemnaker RI** Ministry of Manpower RI
	Inspektor Crane Crane Inspector	**BNSP**
	Petugas P3K First Aid Officer (P3K)	**Kemnaker RI** Ministry of Manpower RI
	Implementasi SMKP (Sistem manajemen Keselamatan Pertambangan) SMKP Implementation (Mining Safety Management System)	**BNSP**
	Auditor SMKP (Sistem manajemen Keselamatan Pertambangan) SMKP Auditor (Mining Safety Management System)	**BNSP**
Elvandi ***HSE Team Leader***	**Ahli K3 Utama** Principal HSE Expert	**Kemnaker RI** Ministry of Manpower RI
	Ahli K3 Konstruksi Construction HSE Expert	**BNSP**
	POP Pertambangan Mining Operational Supervisor (POP)	**BNSP**
	Ahli Utama K3 Konstruksi Principal Construction HSE Expert	**BNSP**

Ichwan Zunaidi ***HSE Team Leader***	**Ahli K3 Utama** Principal HSE Expert	**Kemnaker RI** Ministry of Manpower RI
	Ahli K3 Konstruksi Construction HSE Expert	**BNSP**
	POP Pertambangan Mining Operational Supervisor (POP)	**BNSP**
	Ahli Utama K3 Konstruksi Principal Construction HSE Expert	**BNSP**

Pengembangan Kompetensi Departemen *Health, Safety & Environment*

Competency Development of the Department Health, Safety & Environment

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi karyawan Departemen *Health, Safety & Environment* yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan *Health, Safety & Environment* di lingkup Perusahaan. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Departemen *Health, Safety & Environment* di sepanjang tahun 2024.

The company facilitates the implementation of development programs for employees in the Health, Safety & Environment (HSE) Department, which are expected to have a positive impact on productivity and the effectiveness of HSE management within the company. Below are the competency development programs attended by the HSE Department throughout 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan** Type and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Location/Date	**Penyelenggara** Organizer
Pipin Julianto ***Manager HSE***	**Implementasi SMKP (Sistem manajemen Keselamatan Pertambangan)** Implementation of SMKP (Mining Safety Management System)	**Bekasi, 20 September 2024** Bekasi, September 20, 2024	**BP ESDM**
	Auditor SMKP (Sistem manajemen Keselamatan Pertambangan) SMKP Auditor (Mining Safety Management System)	**Bekasi, 29 November 2024** Bekasi, November 29, 2024	**BP ESDM**

Laporan Pelaksanaan Tugas Departemen *Health, Safety & Environment*

Report on the Implementation of Duties of the Health, Safety & Environment Department

Di tahun 2024, Departemen *Health, Safety & Environment* melaksanakan program kerja yaitu:

In 2024, the Health, Safety & Environment Department carried out the following work programs:

1. Internal Audit QHSE ISO 45001:2018.
   Internal Audit of QHSE ISO 45001:2018.
2. Eksternal Audit SMK3 PP No. 50 tahun 2012 dalam rangka perpanjangan sertifikasi.
   External Audit of SMK3 based on Government Regulation No. 50 of 2012 for certification renewal.
3. Site visits dan technical coaching personal HSE project.
   Site visits and technical coaching for HSE project personnel.
4. Inspeksi HSE ke semua proyek.
   HSE inspections at all projects.

5 Pengelolaan database HSE .
Management of the HSE database.

6 Update Legal Compliance HSE pada SIMAP.
Update of HSE Legal Compliance on SIMAP.

Penilaian Kinerja Departemen *Health, Safety & Environment*

Performance Assessment of the Health, Safety & Environment Department

Penilaian atas kinerja Departemen *Health, Safety & Environment* dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Key Performance Indicator Korporat. Penilaian terhadap kinerja Departemen Health, Safety & Environment dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut.

The performance assessment of the Health, Safety & Environment Department is conducted by the Board of Directors based on the procedures and criteria established in the Corporate Key Performance Indicator (KPI). The assessment is carried out through the following aspects:

1 *Internal Audit Quality, Health, Safety & Environment* (QHSE);
Internal Audit of Quality, Health, Safety & Environment (QHSE).

2 *Closing* NC QHSE;
Closing of Non-Conformance (NC) QHSE.

3 QHSE *Compliance;*
QHSE Compliance.

4 *Legal Compliance* HSE;
HSE Legal Compliance.

5 Pemenuhan Inspeksi QHSE.
Fulfillment of QHSE Inspections.

Hasil penilaian di tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 93% dari target skor 92% dengan demikian untuk target KPI HSE telah Tercapai.

The 2024 assessment results show a score of 93% against a target score of 92%, indicating that the HSE KPI target has been achieved.



Fungsi Manajemen Risiko
Risk Management Function

Perusahaan membentuk Departemen *Risk Management* sebagai fungsi regulator, fasilitator, *monitoring*, dan *advisory* dalam pelaksanaan manajemen risiko setiap bisnis proses yang dijalankan oleh Perusahaan agar risiko yang ada dapat direduksi seminimal mungkin.

The company establishes the Risk Management Department as a regulatory, facilitative, monitoring, and advisory function in the implementation of risk management for each business process carried out by the company to minimize existing risks as much as possible.

Pedoman Departemen Risk Management

Guidelines for the Risk Management Department

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Departemen Risk Management mengacu pada Prosedur Manajemen Risiko No. PPRE/MR/P/003 poin 6.19 tentang Tugas dan Fungsi Departemen Risk Management.

The execution of duties and responsibilities of the Risk Management Department refers to Risk Management Procedure No. PPRE/MR/P/003, point 6.19, regarding the Duties and Functions of the Risk Management Department.

Profil Kepala Departemen Risk Management

Profile of the Head of the Risk Management Department

Berdasarkan Memorandum No. 215/M/HCM/PPRE/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Penugasan Sebagai Pjs Mgr-RM di Departemen Risk Management , Ayu Noviana Isman dipercaya untuk menjabat posisi *Manager Risk Management*.

Based on Memorandum No. 215/M/HCM/PPRE/2024, dated July 11, 2024, regarding the Assignment as Acting Manager of Risk Management in the Risk Management Department, Ayu Noviana Isman has been entrusted to hold the position of Risk Management Manager.



Ayu Noviana Isman

Manager Risk Management
Menjabat sejak 11 Juli 2024
Risk Management Manager
In office since July 11, 2024

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 30 tahun
Kelahiran Banjarnegara, 18 September 1994
Domisili Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Indonesian Citizen
30 years old
Born in Banjarnegara on September 18, 1994
Domiciled in Bogor, West Java, Indonesia

Pendidikan | Education

- **Sarjana (S1) Teknik Sipil** dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).

- **Bachelor of Civil Engineering from** Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).

Sertifikasi Profesi | Professional Certification

- Certified Risk Management Professional (CRMP), Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), berlaku mulai 27 Desember 2022 hingga 27 Desember 2024.
- Certified Risk Associate (CRA) Manajemen Risiko Madya, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM), berlaku mulai 10 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2025.

- Certified Risk Management Professional (CRMP), Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR), valid from December 27, 2022, to December 27, 2024.
- Certified Risk Associate (CRA) — Intermediate Risk Management, Capital Market Professional Certification Institute (LSP-PM), valid from August 10, 2022, to August 10, 2025.

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

Sejak tanggal 20 November 2020
sebagai *Officer, Risk Management Section.*

Joined the Company on November 20, 2020
an Officer in the Risk Management Section.

Riwayat Profesi | Professional History

- Manager, Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2024-sekarang)
- Senior Officer, Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2023-2024)
- Manajemen Risiko Muda, PT PP Presisi Tbk (2020-2023)
- Project Prod & Operational Control Maritim Tower, PT PP (Persero) Tbk (2019)
- Quantity Surveyor Maritim Tower, PT PP (Persero) Tbk (2019)
- Quantity Surveyor Pasar Ikan Muara Baru, PT PP (Persero) Tbk (2018)

- Manager, Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2024—present)
- Senior Officer, Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2023—2024)
- Junior Risk Management Officer, PT PP Presisi Tbk (2020—2023)
- Project Production & Operational Control, Maritim Tower, PT PP (Persero) Tbk (2019)
- Quantity Surveyor, Maritim Tower, PT PP (Persero) Tbk (2019)
- Quantity Surveyor, Pasar Ikan Muara Baru, PT PP (Persero) Tbk (2018)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak Ada

Within the Company: None
Outside the Company: None

Struktur Organisasi Departemen *Risk Management*

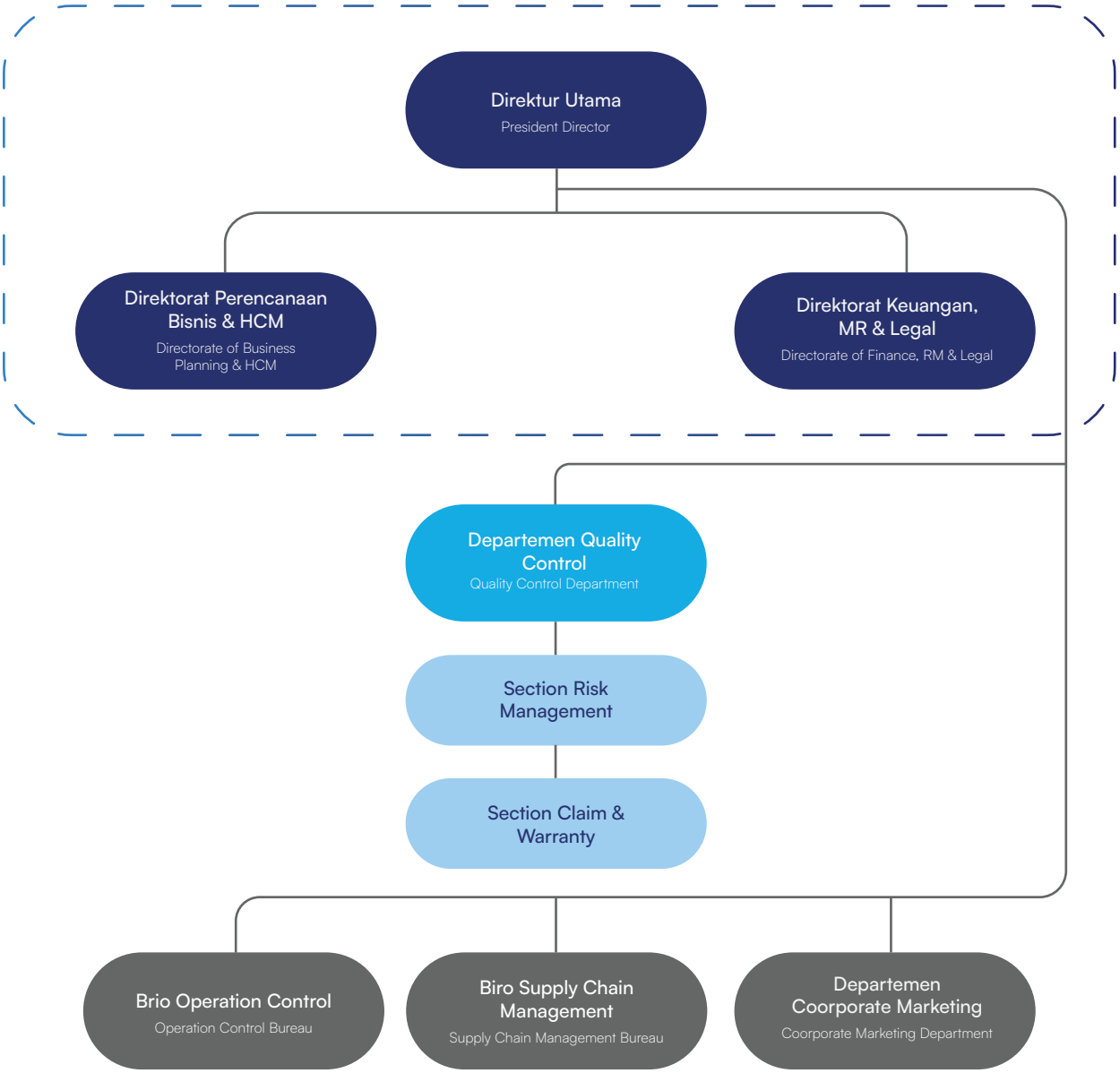
Organizational Structure of the Risk Management

Departemen *Risk Management* berada langsung di bawah Direksi, sehingga setiap bentuk pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direksi. Kepala Departemen *Risk Management* beserta personelnya ditunjuk dan dimutasikan oleh Direksi.

Adapun struktur organisasi Departemen *Risk Management* ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 025/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan sebagai berikut:

The Risk Management Department reports directly to the Board of Directors, meaning all its duties and responsibilities are accountable directly to the Board. The Head of the Risk Management Department and its personnel are appointed and reassigned by the Board of Directors.

The organizational structure of the Risk Management Department is established in accordance with Board of Directors' Decree No. 025/SK/DIR/PPRE/2024, dated August 21, 2024, regarding the Amendment of the Company's Organizational Structure, as follows:



Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen Manajemen Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the number of employees in the Risk Management Department is three (3) people, with the following details:

Nama Name	**Jabatan** Position
Ayu Noviana Isman	***Manager Risk Management*** Manager Risk Management
Nila Yunieka	***Junior Officer Risk Management*** Junior Officer Risk Management
Yanuar Danu Wijaya	***Officer Risk Management*** Officer Risk Management

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Sertifikasi profesi yang dimiliki Departemen Manajemen Risiko sebagai berikut.

The professional certifications held by the Risk Management Department are as follows.

Nama Name	**Nama Sertifikasi** Certification Name	**Lembaga Sertifikasi** Certifying Institution
Ayu Noviana Isman ***Manager Risk Management***	***Certified Risk Management Professional (CRMP)*** Certified Risk Management Professional (CRMP)	**Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)** Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
	Certified Risk Associate (CRA) Manajemen Risiko Madya Certified Risk Associate (CRA) Intermediate Risk Management	**Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM)** Capital Market Professional Certification Institute (LSP-PM)
Nila Yunieka ***Junior Officer Risk Management***	***Certified Risk Management Officer (CRMO)*** Certified Risk Management Officer (CRMO)	**Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)** Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
	Ahli Muda Teknik Bendungan Besar Junior Expert in Large Dam Engineering	**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri** Astekindo Independent Construction Professional Certification Institute
Yanuar Danu Wijaya ***Officer Risk Management***	**Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan** Junior Expert in Road Engineering	**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri** Astekindo Independent Construction Professional Certification Institute
	Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Senior Expert in Construction Management	**Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri Astekindo** Gataki Independent Construction Professional Certification Institute
	Ahli Utama K3 Konstruksi Senior Expert in Occupational Health & Safety (K3) Construction	**Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri** Gataki Independent Construction Professional Certification Institute

Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of the Risk Management Department

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Departemen Risk Management, sesuai Prosedur Manajemen Risiko No. PPRE/MR/P/003 poin 6.19 tentang Tugas dan Fungsi Departemen *Risk Management*, yaitu:

In general, the duties and responsibilities of the Risk Management Department, in accordance with Risk Management Procedure No. PPRE/MR/P/003, point 6.19, regarding the Duties and Functions of the Risk Management Department, are as follows:

1 *Regulator*
Regulator

- Mendesain kebijakan manajemen risiko Perusahaan.
  Design the company's risk management policies.
- Menyusun Prosedur dan Work Instruction terkait manajemen risiko.
  Develop procedures and work instructions related to risk management.

2 *Facilitator*
Facilitator

- Menyiapkan infrastruktur manajemen risiko seperti aplikasi untuk mempermudah pengelolaan manajemen risiko (eRisk).
  Prepare risk management infrastructure, such as applications to streamline risk management processes (eRisk).
- Memfasilitasi pembahasan manajemen risiko bersama Tim Manajemen Risiko Perusahaan.
  Facilitate risk management discussions with the Company's Risk Management Team.
- Memberikan pengetahuan terkait manajemen risiko baik internal maupun eksternal.
  Provide risk management knowledge both internally and externally.

3 *Monitoring*
Monitoring

- Memantau daftar risiko dan selalu memperbarui nilai kepatuhan unit.
  Monitor the risk register and continuously update the compliance scores of each unit.
- Meninjau efektivitas rencana penanganan.
  Review the effectiveness of risk mitigation plans.

4 *Advisory*
Advisory

- Sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko yang memberikan saran dan masukan berdasarkan daftar risiko kepada pengambil keputusan.
  Act as the Chair of the Risk Management Committee, providing recommendations based on the risk register to decision-makers.
- Membahas dan memberikan masukan terkait manajemen risiko tender/proyek/aksi korporasi/program kerja/program khusus/risiko sesuai permohonan unit lain.
  Discuss and provide insights on risk management in tenders, projects, corporate actions, work programs, special programs, and other risks as requested by different units.

Laporan Pelaksanaan Tugas Departemen Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of the Risk Management Department

Di tahun 2024, Departemen Manajemen Risiko melaksanakan program kerja yaitu:

In 2024, the Risk Management Department carried out the following work programs:

1. Maintenance infrastruktur Manajemen Risiko berbasis online (eRisk)
   Maintenance of the online-based Risk Management infrastructure (eRisk).
2. Program refreshment Manajemen Risiko Perusahaan
   Corporate Risk Management Refreshment Program.

3 Pendampingan penyusunan kajian risiko tender, kajian risiko proyek, kajian risiko program kerja, kajian risiko aksi korporasi, kajian risiko program khusus serta kajian risiko penyuapan
Assistance in preparing risk assessments for tenders, projects, work programs, corporate actions, special programs, and anti-bribery risks.

4 Evaluasi dan monitoring kepatuhan serta kesesuaian penerapan Manajemen Risiko Proyek dan UKP melalui kegiatan forum group discussion, hold point proyek, dan management review operasi bulanan
Evaluation and monitoring of compliance and alignment in project risk management and UKP through focus group discussions, project hold points, and monthly operations management reviews.

5 Asesmen Risk Maturity Index
Risk Maturity Index Assessment.

6 Pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko
Risk Management training and certification.

7 Program Parenting Anak Perusahaan
Subsidiary Company Guidance Program

Penilaian Kinerja Departemen Manajemen Risiko
Performance Evaluation of the Risk Management Department

Penilaian atas kinerja Departemen Manajemen Risiko dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Key Performance Indicator Korporat. Penilaian terhadap kinerja Departemen Manajemen Risiko dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut.

A ***Customer***
Customer

- Tingkat kepuasan unit internal.
  Internal unit satisfaction level.
- Realisasi pembahasan manajmen risiko tender.
  Realization of risk management discussions for tenders.
- Realisasi pembahasan kajian manajemen risiko aksi korporasi dan program khusus.
  Realization of risk management assessments for corporate actions and special programs.

B ***Internal Process Business***
Internal Process Business

- Implemenntasi roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko
  Implementation of the risk management improvement roadmap.

Hasil penilaian di tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 3,79 dari skor maksimum 4,00 dengan kategori A.

The performance evaluation of the Risk Management Department is conducted by the Board of Directors in accordance with the procedures and criteria established in the Corporate Key Performance Indicator (KPI). The assessment is carried out based on the following aspects:

C ***Learning And Growth:***
Learning And Growth:

- Kepatuhan implementasi manajemen risiko korporat.
  Compliance with corporate risk management implementation.
- *Risk maturity index.*
  Risk Maturity Index.
- Pelaporan manajemen risiko korporat.
  Corporate risk management reporting.
- *HR readiness.*
  HR readiness.
- Tingkat internalisasi budaya Perusahaan
  Level of internalization of corporate culture.
- Compliance WI/P/S unit
  Compliance with unit WI/P/S.

The 2024 evaluation results show a score of 3.79 out of a maximum 4.00, with a category rating of A.

Organ Eksternal: Akuntan Publik

External Body: Public Accountant

Akuntan Publik ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kewajaran laporan yang disajikan oleh Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris memberikan masukan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sementara itu, penentuan kantor akuntan publik dilakukan melalui keputusan RUPS.

A Public Accountant is appointed to examine the accuracy and fairness of the reports presented by the Board of Directors. Subsequently, the Board of Commissioners provides input on the audit results conducted by the public accountant. Meanwhile, the selection of the public accounting firm is determined through a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Kriteria Penentuan Kantor Akuntan Publik

Criteria for Determining a Public Accounting Firm



Auditor eksternal tidak memiliki hubungan afiliasi dan terbebas dari benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak lain yang memiliki kepentingan pada Perusahaan

External auditors must not have any affiliations and must be free from conflicts of interest with the Board of Commissioners, Board of Directors, and other parties with interests in the Company.



Kantor akuntan publik harus memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

The public accounting firm must have a good reputation and be registered with the Financial Services Authority.



Kantor akuntan publik harus memiliki kinerja yang baik dan menjunjung tinggi kode etik profesi

The public accounting firm must demonstrate good performance and uphold high professional ethical standards.

Penyampaian Arahan dan Penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit

Delivery of Directions and Assignments from the Board of Commissioners to the Audit Committee



Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit

Delivery of Directions and Assignments from the Board of Commissioners to the Audit Committee



Tindak lanjut Komite Audit dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal. Selanjutnya, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris

The Audit Committee follows up by evaluating the implementation of internal and external audits. Subsequently, the Audit Committee reports to the Board of Commissioners.



Dewan Komisaris menelaah rekomendasi Komite Audit dan melakukan pembahasan dengan Organ Dewan Komisaris dan calon Akuntan Publik

The Board of Commissioners reviews the Audit Committee's recommendations and conducts discussions with the Board of Commissioners' organs and prospective Public Accountants.



Dewan Komisaris menyusun konsep surat rekomendasi bersama Sekretaris Dewan Komisaris untuk di sampaikan pada saat RUPS

The Board of Commissioners drafts a recommendation letter together with the Secretary of the Board of Commissioners to be presented at the General Meeting of Shareholders (GMS).



Penetapan Akuntan Publik oleh RUPS

Appointment of the Public Accountant by the GMS.

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2024, terkait penunjukan Akuntan Publik, pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Based on the resolutions of the Annual GMS for the fiscal year 2023, held on June 5, 2024, regarding the appointment of a Public Accountant, the shareholders decided as follows:

1

Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM), untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024;

To appoint the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and other periods within the Fiscal Year 2024.

2

Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;

To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the audit fee, additional scope of work required, and other reasonable terms for the appointed Public Accounting Firm.

3

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) is unable, for any reason, to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and other periods within the Fiscal Year 2024. This includes determining the audit fee and other reasonable terms for the replacement Public Accounting Firm.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS di atas, Perusahaan telah melakukan penetapan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM), untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 melalui RUPS, Penetapan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dalam Tahun Buku 2024 telah dilakukan Dewan Komisaris melalui Surat No.058/EXT/KOM/PPRE/2024 perihal Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2024.

Following up on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) mentioned above, the Company has appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (affiliated with RSM) to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year through the GMS. The determination of the audit fee, the necessary expansion of the scope of work, and other reasonable requirements for KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year has been carried out by the Board of Commissioners through Letter No. 058/EXT/KOM/PPRE/2024 regarding Approval of the Honorarium for Public Accounting Services for the Audit of the Financial Statements of PT PP Presisi Tbk for the 2024 Financial Year.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024 Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year 2024	
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	**Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM)** **Registrasi: 477/KM.1/2015** Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (affiliated with RSM) Registration: 477/KM.1/2015
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	**Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati** **Registrasi: AP. 1153.** Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati Registration: AP. 1153
Jasa yang Diberikan Services Provided	**Jasa Audit** Audit Services
	Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Financial Statements for the 2024 Financial Year
	Jasa Non-Audit Non-Audit Services
	Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan PSA No. 62 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Audit of Compliance with applicable laws and regulations in accordance with the provisions of PSA No. 62 and BPK State Financial Audit Standards for the year ended December 31, 2024.
	Evaluasi Kinerja PPRE untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN RI No. KEP-100/MBU/ 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Performance Evaluation of PPRE for the financial year ended December 31, 2024 in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/ 2002 on the Assessment of the Health Level of SOEs.
Periode Penugasan Assignment Period	**5 September 2024 s.d 31 Mei 2025** September 5, 2024 until May 31, 2025
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Date	**5 Maret 2025** March 5, 2025
Biaya Fees	**Jasa Audit** Audit Services
	Rp525.000.000,- (tidak termasuk pajak) Rp 525,000,000 (excluding tax)
	Jasa Non-Audit Non-Audit Services
	Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak) Compliance Audit: Rp 20,000,000 (excluding tax)
	Evaluasi Kinerja atas Penilaian Kinerja Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak) Performance Evaluation on Health Level Assessment: Rp 20,000,000 (excluding tax)

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Akuntan Publik Laporan Keuangan Perusahaan 5 (tahun) tahun berturut-turut untuk tahun buku 2019 hingga 2024 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

For the sake of transparency, the Public Accountant for the Company's Financial Statements for the last 5 (five) consecutive years, from the fiscal year 2019 to 2024, is presented as shown in the table below:

Tahun Buku Financial Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Akuntan** Accountant	**Jasa** Service	**Opini** Opinion	**Biaya Jasa Audit (Rp)** Audit Fee (Rp)
2024	**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) Registrasi: 477 KM.1/2015** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (affiliated with RSM) Registration: 477/KM.1/2015	**Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati Registrasi: AP.1153** Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati Registration: AP.1153	**Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2024** Audit of consolidated financial statements as of December 31, 2024	**Wajar tanpa modifikasian** Fair without modification	**525.000.000**
2023	**Hertanto, Grace, Karunawan Registrasi KMK: 929/KM.1/2014** Hertanto, Grace, Karunawan Registration KMK: 929/KM.1/2014	**Bambang Karunawan, CPA Registrasi: AP.0912** Bambang Karunawan, CPA Registration: AP.0912	**Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023** Audit of consolidated financial statements as of December 31, 2023	**Wajar tanpa modifikasian** Fair without modification	**360.360.450**
2022	**Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014** Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) Registration No: 929/KM.1/2014	**Bambang Karunawan, CPA No. Izin: AP.0912** Bambang Karunawan, CPA Registration: AP.0912	**Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2022** Audit of consolidated financial statements as of December 31, 2022	**Wajar tanpa modifikasian** Fair without modification	**315.000.000**
2021	**Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014** Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) Registration No: 929/KM.1/2014	**Restiawan Adimuryanto No. Izin: AP.0632** Restiawan Adimuryanto License No.: AP.0632	**Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021** Audit of consolidated financial statements as of December 31, 2021	**Wajar tanpa modifikasian** Fair without modification	**300.0000.000**
2020	**Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014** Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) Registration No: 929/KM.1/2014	**Restiawan Adimuryanto No. Izin: AP.0632** Restiawan Adimuryanto License No.: AP.0632	**Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2020** Audit of consolidated financial statements as of December 31, 2020	**Wajar tanpa modifikasian** Unqualified opinion	**330.0000.000**
2019	**Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014** Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) Registration No: 929/KM.1/2014	**Bambang Karunawan, CPA No. Izin: AP.0912** Bambang Karunawan, CPA Registration: AP.0912	**Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019** Audit of consolidated financial statements as of December 31, 2019	**Wajar tanpa modifikasian** Fair without modification	**300.0000.000**

Pengendalian Internal

Internal Control

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan sistem yang disusun dalam rangka mengelola dan menjaga keuangan, operasional, serta sebagai indikator umum dalam mengukur penerapan GCG berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku. Pada 15 Desember 2022, Perusahaan telah memperbarui sistem pengendalian internal yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

The Internal Control System (SPI) is a system designed to manage and safeguard finances, operations, and serve as a general indicator for measuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on applicable regulations and guidelines. On December 15, 2022, the Company updated its internal control system, which has been approved by the President Director.



Sistem Pengendalian Internal Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Financial and Operational Internal Control Systems, and Compliance with Laws and Regulations

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengendalian internal melalui kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan. Adapun pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company is committed to enhancing its internal control system by adhering to applicable provisions and regulations, ensuring the availability of accurate, complete, and timely financial and management reports, and achieving efficiency and effectiveness in the Company's business activities. The financial and operational controls, as well as compliance with laws and regulations within the Company, are as follows:

1. Pemisahan fungsi, yang diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan memastikan bahwa:
   - Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi dari awal sampai akhir proses.
   - Penetapan dan pemisahan tanggung jawab dan tugas secara jelas, atas transaksi kepada karyawan yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, peninjauan, dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
   - Pelaksanaan pemeriksaan secara Independen.

   Segregation of Functions, aimed at reducing errors, fraud, and inefficiencies. The segregation of functions within the Company is carried out by ensuring that:
   - Prohibiting any single individual from controlling all major aspects of a transaction from start to finish.
   - Clearly defining and separating responsibilities and tasks for transactions among different employees, covering authorization, approval, processing, recording, payment or receipt of funds, review, audit, and the functions of asset custody and handling.
   - Conducting independent checks.
2. Pengendalian fisik aset di lingkungan Perusahaan, yang diarahkan untuk menjaga aset dari penggunaan yang salah, kecurangan atau menjaga kerugian/kehilangan aset.

   Physical control of assets within the Company, aimed at safeguarding assets from misuse, fraud, or loss.

3 Otorisasi oleh karyawan berwenang untuk setiap transaksi ekonomis Perusahaan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang valid dilaksanakan, telah diotorisasi serta dilakukan oleh karyawan yang bertindak sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan prosedur/*Work Instruction* atau ketentuan yang berlaku.

Authorization by authorized employees for every economic transaction of the Company. Controls are in place to ensure that only valid transactions are executed, have been authorized, and are carried out by employees acting within their capacity and responsibilities, in accordance with applicable procedures/Work Instructions or regulations

4 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan Keputusan.

Accurate and timely recording of transactions to ensure the availability of relevant and reliable information for decision-making.

5 Dokumentasi yang tepat dan benar atas pengendalian transaksi.

Proper and accurate documentation of transaction controls.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kriteria *Committee Of Sponsoring Organization* (COSO)

Alignment of the Internal Control System with the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Criteria

Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Perusahaan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yaitu *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Adapun komponen pengendalian internal menurut COSO sebagai berikut.

The Internal Control System implemented by the Company refers to an internationally recognized framework, namely the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The components of internal control according to COSO are as follows.



Seluruh insan Perusahaan wajib berpartisi aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan.

All employees of the Company are required to actively participate in the management and implementation of the Company's internal control system.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal
Implementation of the Internal Control System

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dimulai dari tahap pemahaman, pemetaan, perbaikan, implementasi, dan pemantauan. Di mana kesesuaian sistem pengendalian internal COSO yang telah diimplementasikan oleh Perusahaan ditunjukkan sebagai berikut.

The implementation of the Company's Internal Control System begins with the stages of understanding, mapping, improvement, implementation, and monitoring. The alignment of the COSO internal control system implemented by the Company is presented as follows.

Aktivitas Activity	**Implementasi** Implementation
Lingkungan Pengendalian Control Environment	
Penegakan integritas dan nilai etika Enforcement of Integrity and Ethical Values	**Menyusun dan menerapkan aturan perilaku yang berisi standar etika dan pedoman perilaku bagi karyawan di lingkungan Perusahaan.** Develop and implement behavioral rules containing ethical standards and behavioral guidelines for employees within the Company.
	Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku oleh setiap tingkat pimpinan di Perusahaan dalam bentuk tindakan dan ucapan. Set an example for the implementation of behavioral rules by every level of leadership in the Company through actions and speech.
	Menegakkan tindakan disiplin terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. Enforce disciplinary actions against policy and procedural deviations or violations of behavioral rules.
	Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian internal. Explain and take responsibility for any intervention or neglect of internal control
	Menghilangkan peluang/godaan untuk berperilaku tidak etis, dengan: Menetapkan target dan sasaran yang realistis/dapat dicapai dan tidak menuntut karyawan untuk mencapai sasaran yang tidak realistis. Memberikan penghargaan yang sepadan kepada karyawan atas prestasi kerjanya. Penghargaan diberikan dalam rangka penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika. Eliminate opportunities/temptations for unethical behavior by: Setting realistic/achievable targets and goals and not demanding employees to reach unrealistic goals. Providing fair rewards to employees for their performance. Rewards are given as part of enforcing integrity and compliance with ethical values.

Komitmen terhadap kompetensi (Departemen Human Capital Management & General Affair) Commitment to Competence (Human Capital Management & General Affairs Department)	**Mengidentifikasi dan mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan Perusahaan.** Identifying and defining activities required to complete tasks and functions for each position within the Company.
	Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan Perusahaan. Establishing competency standards for each task and function in the Company's environment.
	Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu karyawan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Conducting training and mentoring to help employees maintain and improve their job competencies
	Memilih pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam tugas dan fungsi kegiatan. Selecting officials with managerial skills and extensive technical experience in their roles and functions.
Kepemimpinan yang kondusif (Direksi) Conducive Leadership (Board of Directors)	**Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.** Considering risks in decision-making.
	Menerapkan manajemen berbasis kinerja. Implementing performance-based management.
	Mendorong setiap unit kerja menerapkan sistem pengendalian internal Perusahaan. Encouraging each work unit to implement the Company's internal control system.
	Melindungi aset dan informasi dari akses dana atau penggunaan yang tidak sah. Protecting assets and information from unauthorized access and misuse.
	Melakukan interaksi yang intensif dengan pejabat struktural. Engaging intensively with structural officials.
	Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, kegiatan atau program, dan saran dari pejabat struktural. Responding positively to reports related to finance, budgeting, activities, programs, and suggestions from structural officials.
	Menunjukkan sikap yang adil atau tidak memihak dalam memberi tugas kepada pejabat struktural. Demonstrating fairness and impartiality in assigning tasks to structural officials.
Pembentukan struktur organisasi Perusahaan yang sesuai kebutuhan Organizational Structure Development According to Company Needs	**Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Perusahaan.** Adjusting to the size and nature of the Company's activities.
	Memberikan kejelasan mengenai uraian pekerjaan pada semua karyawan. Providing clarity on job descriptions for all employees..
	Memberikan kejelasan hubungan jenjang pelaporan internal di lingkungan Perusahaan. Ensuring transparency in the hierarchy of internal control within the Company.
	Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian serta perbaikan terhadap struktur organisasi dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis. Conducting evaluations and periodic improvements to the organizational structure for strategic needs.
	Menetapkan jumlah karyawan yang sesuai untuk formasi manajerial dan non-manajerial. Determining the appropriate number of employees in both managerial and non-managerial roles.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Delegation of Authority and Responsibilities	**Wewenang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya melalui uraian pekerjaan dan ketentuan otoritas Perusahaan.** Authority is granted to structural officials, functional officials, and executors appropriately according to their level of responsibility, based on job descriptions and Company authority regulations.
	Pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan mempunyai keterkaitan dengan unit kerja lain di lingkungan Perusahaan. Structural officials, functional officials, and executors must understand that the authority and responsibilities given are interconnected with other work units within the Company.
	Pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana harus memahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya terkait dengan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan. Structural officials, functional officials, and executors must understand that carrying out their responsibilities and authorities is related to the implementation of the internal control system.
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM (Departemen Human Capital Management & General Affair) Formulation and implementation of sound policies on HR development (Human Capital Management & General Affair Department)	**Melakukan evaluasi atas ketaatan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan.** Evaluating compliance with the implementation of the Company's internal control system.
	Menelusuri latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Conduct background checks on prospective employees during the recruitment process.
	Supervisi periodik yang memadai terhadap karyawan. Provide adequate periodic supervision of employees.
Perwujudan peran Biro Internal Audit yang efektif Establishment of an Effective Internal Audit Bureau	**Melakukan evaluasi atas ketaatan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan.** Evaluate compliance of the implementation of the Company's internal control system.
	Memberikan penilaian atas kecukupan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan. Conduct background checks on prospective employees during the recruitment process.
	Memberikan saran perbaikan atas penerapan sistem pengendalian Perusahaan. Provide recommendations for improvements in the implementation of the Company's internal control system.
Penilaian Risiko Risk Assessment	
Penetapan tujuan Perusahaan Determining Company objectives	**Direksi dan Manajemen menetapkan misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Tujuan perusahaan yang telah ditetapkan kemudian dikomunikasikan pada seluruh karyawan. Selain itu, Manajemen menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis Perusahaan.** The Board of Directors and Management establish the mission, objectives, and goals outlined in the Company's Long-Term Work Plan, Company Budget Work Plan, and the Company's Articles of Association. The established company objectives are then communicated to all employees. Additionally, Management sets operational strategies consistent with the Company's strategic plan.
Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan Goal Setting at the Activity Level	**Telah disusun dalam bentuk target kinerja maupun program kerja masing-masing unit kantor pusat dan divisi yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, menunjang, dan tidak bertentangan.** The targets and work programs for each head office unit and division have been formulated and outlined in the Company's Work Plan and Budget. The objectives at the activity level are complementary, supportive, and not contradictory.
Identifikasi risiko dan analisa risiko Risk Identification and Analysis	**Perusahaan telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang disampaikan dalam Pedoman GCG.** The Company has established a risk management policy, which is outlined in the GCG Guidelines.

Aktivitas Pengendalian Control Activities	
Peninjauan ulang atas kinerja perusahaan (Biro Corporate Secretary) Performance Review of Company (Corporate Secretary Bureau)	**Meninjau ulang kinerja Perusahaan dilakukan setiap 2 (dua) bulan dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi serta membahas pencapaian kinerja Divisi dilakukan setiap bulan dalam management** *Review.* The Company's performance is reviewed every two (2) months in meetings with the Board of Commissioners and Directors. Divisional performance achievement is discussed monthly in management reviews.
Pembinaan SDM (Departemen Human Capital Management & General Affair) Human Resource Development (Human Capital Management & General Affairs Department)	**Terdapat komunikasi yang jelas kepada karyawan 2 (dua) level di bawah Direksi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta realisasi pencapaian targetnya.** Clear communication to employees at two (2) levels below the Board of Directors regarding the Company's Work Plan and Budget, as well as target achievement realization.
	Perusahaan telah menyusun program pembinaan sumber daya manusia selama 1 (satu) tahun yang terdiri dari inhouse *training* yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dan program *public training*. The Company has developed a one-year human resource development program consisting of in-house training conducted internally and externally and public training programs.
	Perusahaan telah memiliki prosedur dalam Peraturan Perusahaan mulai rekrutmen sampai dengan pemberhentian karyawan. The Company has established procedures in the Company Regulations, covering recruitment to employee termination.
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi Control Over Information System Management	**Menetapkan** *Master Plan* **sebagai pedoman dalam pengembangan TI.** Establishing a Master Plan as a guideline for IT development.
	Kebijakan tentang keamanan data tertuang dalam *Work Instruction*. Data security policies are outlined in the Work Instruction.
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	
Memiliki situs web (www.pt-presisi. co.id) yang merupakan media saluran komunikasi dengan pihak eksternal perusahaan Having a website (www.pt-presisi.co.id) which serves as a communication channel with external parties of the company.	**Dalam situs web telah dikomunikasikan, antara lain: berita terbaru Perusahaan saat ini, Visi, Misi dan tujuan perusahaan, Kode Etik, Pedoman GCG, dan laporan tahunan.** The website communicates, among others: the latest company news, Vision, Mission, and company objectives, Code of Ethics, GCG Guidelines, and annual reports.
Pemantauan Monitoring	
Pemantauan untuk pengendalian biaya pelaksanaan proyek (Divisi Operasional) Monitoring for cost control in project implementation (Operational Division)	**Perusahaan memiliki kebijakan terkait yang diatur dalam SOP, ERP (SIMAP, SAP), *Fleet Management* (Traxia), dan *Project Management*.** The company has related policies regulated in SOP, ERP (SIMAP, SAP), Fleet Management (Traxia), and Project Management.

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal
Effectiveness of Internal Control System Implementation

Dalam pelaksanaannya, evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara komprehensif dilakukan oleh Biro Internal Audit. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendukung asersi Direksi tentang efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan yang diterapkan.

Lebih jauh, evaluasi penerapan sistem pengendalian internal dilakukan dengan menilai 5 (lima) komponen Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada Pedoman Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern BUMN/BUMD/BUL yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun keterangan terkait penilaian sistem pengendalian internal untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

In its implementation, a comprehensive evaluation of the adequacy and effectiveness of the Internal Control System is carried out by the Internal Audit Bureau. This is done to support the Directors' assertion regarding the effectiveness of the company's internal control system.

Furthermore, the evaluation of the internal control system implementation is conducted by assessing the five (5) components of the company's Internal Control System, based on the Internal Control System Implementation Evaluation Guidelines for SOEs/ROEs/PSEs developed by the Financial and Development Supervisory Agency. The details regarding the internal control system assessment for 2024 are as follows:

Dasar Metodologi Methodology Basis	**Penyebaran Kuisioner menggunakan pertanyaan dan/atau pernyataan dengan dengan skor 1-5 (semakin rendah semakin tidak setuju, semakin tinggi semakin setuju) dan pengumpulan data melalui SIMAP.** Distribution of questionnaires using questions and/or statements with a score of 1-5 (the lower the score, the less agreeable; the higher the score, the more agreeable) and data collection through SIMAP.
Penilai Evaluator	Biro Internal Audit Internal Audit Bureau
Penugasan Assignment	Memo Direktur Utama No 001/M/DIR/PPRE/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penugasan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) Tahun 2024 Memo from the President Director No. 001/M/DIR/PPRE/2025 dated January 6, 2025, regarding the Assignment for the Evaluation of the Company's Internal Control System (SPIP) for the Year 2024.
Pelaksanaan Implementation	**Pekan 03 tahun 2025** Week 03 of the Year 2025.

Hasil penilaian sistem pengendalian internal tahun 2024 menjadi dasar bagi Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Human Capital Management dalam memberikan sertifikasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tahun buku 2024.

Berikut rincian capaian penerapan sistem pengendalian internal per komponen untuk tahun 2024.

The results of the 2024 internal control system evaluation serve as the basis for the President Director and the Director of Finance, Risk Management & Human Capital Management in providing certification for the Company's Annual Financial Report for the 2024 fiscal year.

Below are the details of the internal control system implementation achievements per component for 2024.

Komponen Penerapan Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Implementation Components	**Bobot** Weight	**Pencapaian Tahun 2024** 2024 Achievement	
		Skor Score	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
Lingkungan Pengendalian Control Environment	**25,00**	**21,42**	**85,68**
Penilaian Risiko Risk Assessment	**25,00**	**21,98**	**87,93**
Aktivitas Pengendalian Control Activities	**20,00**	**17,69**	**88,47**

Informasi dan Komunikasi Information and Communication	17,5	15,78	90,15
Pemantauan Monitoring	12,5	11,74	93,91
Total Total	100,00	88,61	89,22
Predikat Rating	**"EFEKTIF"** "EFFECTIVE"		

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Commissioners and Directors on the Adequacy of the Internal Control System

Hasil evaluasi yang telah disampaikan di atas memberikan gambaran tentang kecukupan Sistem Pengendalian Internal PPRD. Melalui hasil penilaian tersebut, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris berpendapat bahwa Sistem Pengendalian Internal PTPP telah mencukupi dan berjalan efektif.

The evaluation results presented above provide an overview of the adequacy of PPRD's Internal Control System. Based on these assessment results, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners, believe that PTPP's Internal Control System is adequate and operates effectively.



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Sistem manajemen risiko merupakan sebuah upaya Perusahaan untuk meminimalisir tingkat kemungkinan dan/atau dampak atas sebuah risiko melalui proses penentuan konteks & kriteria, penilaian risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi risiko), *recording & reporting*, *comunication & consultation*, serta *monitoring & review*.

Perusahaan juga memiliki mandat dan komitmen terkait manajemen risiko, sebagai berikut:

The risk management system is the Company's effort to minimize the likelihood and/or impact of a risk through the processes of context & criteria determination, risk assessment (identification, analysis, and evaluation), recording & reporting, communication & consultation, and monitoring & review.

The Company also has mandates and commitments related to risk management as follows:

1. Perusahaan mewajibkan seluruh unit menerapkan manajemen risiko dalam setiap proses bisnisnya.
   The Company requires all units to implement risk management in every business process.

2. Indikator kinerja utama manajemen risiko diselaraskan dengan indikator kinerja Perusahaan.
   Key risk management performance indicators are aligned with the Company's performance indicators.

3. Manajemen risiko terintegrasi ke dalam proses perencanaan strategis dan operasi perusahaan dalam mencapai sasaran Perusahaan.
   Risk management is integrated into the Company's strategic planning and operations to achieve corporate objectives.

4. Seluruh proses bisnis Perusahaan wajib patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku.
   All of the Company's business processes must comply with applicable laws and regulations.

5. Departemen Manajemen Risiko sebagai unit tertinggi pengelola risiko tingkat Perusahaan dibantu oleh masing-masing *Risk Owner/Fasilitator* Risiko di setiap unit bisnis Perusahaan.
   The Risk Management Department, as the highest risk management unit at the corporate level, is supported by respective Risk Owners/Risk Facilitators in each business unit.

6. Perusahaan menempatkan personel yang cakap dan memadai di Departemen Manajemen Risiko dan di Unit Pengelola Risiko masing-masing bisnis unit dalam menjalankan manajemen risiko.
   The Company assigns competent and adequate personnel to the Risk Management Department and Risk Management Units in each business unit to carry out risk management.

7. Perusahaan senantiasa melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam penerapan manajemen risiko.
   The Company continuously communicates and consults with stakeholders in the implementation of risk management.

8. Perusahaan secara berkala melakukan pengawasan dan meninjau ulang kerangka kerja manajemen risiko.
   The Company periodically supervises and reviews the risk management framework.

Roadmap Penerapan Manajemen Risiko 2021-2024

Risk Management Implementation Roadmap 2021-2024

Roadwmap Roadmap	**Membangun Infrastruktur** Building Infrastructure	**Membangun Kapasitas** Building Capacity	**Integrasi Manajemen Risiko** Risk Management Integration	**Membangun Budaya Sadar Risiko** Building a Risk-Aware Culture	
Kegiatan Activity	Kebijakan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. prosedur proses manajemen risiko. Fungsi Manajemen Risiko. Fasilitator Risiko di tiap Unit. Sarana dan prasarana, dan lain-lain. Risk management policy. Risk management guidelines. Risk management process procedures. Risk Management Function. Risk Facilitators in each Unit. Facilities and infrastructure, etc.	Membangun sistem manajemen risko. Sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko untuk Fasilitator Risiko. Evaluasi atas implementasi manajemen risiko yang telah dilaksanakan oleh masing-masing . Fasilitator Risiko. Building a risk management system. Socialization and training on risk management for Risk Facilitators. Evaluation of the implementation of risk management carried out by each Risk Facilitator.	Integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan bisnis dan anggaran. Integrasi manajemen risiko ke dalam internal audit. Integrasi manajemen risiko ke dalam manajemen proyek. Integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis lainnya (contoh: Aksi Korporasi dan Investasi). Integration of risk management into the business planning and budgeting process. Integration of risk management into internal audit. Integration of risk management into project management. Integration of risk management into other business processes (e.g., Corporate Actions and Investments).	Pengkajian budaya risiko. Pelatihan budaya risiko. Membangun budaya risiko yang terbuka. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian penilaian kinerja unit. Penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko perussahaan. Risk culture assessment. Risk culture training. Building an open risk culture. Implementing risk management as part of unit performance evaluation. Assessing the maturity level of corporate risk management implementation.	

Keluaran Outcome	Struktur tata kelola risiko. Kejelasan akuntabilitas penerapan manajemen risiko pada: » Lini kesatu. » Lini kedua. » Lini ketiga. Risk governance structure. Clear accountability in risk management implementation at: » First line. » Second line. » Third line.	**Manajer dan karyawan paham dan mampu mengelola risiko.** **Sistem informasi manajemen risiko berjalan dengan baik dan mendukung proses penerapan manajemen risiko.** Managers and employees understand and are capable of managing risks. The risk management information system functions well and supports the risk management implementation process.	**Anggaran berbasis risiko.** **Audit berbasis risiko.** **Pengambilan keputusan berbasis risiko.** **Perencanaan strategis berbasis risiko** Risk-based budgeting. Risk-based auditing. Risk-based decision-making. Risk-based strategic planning.	**Meningkatnya kesadaran terhadap risiko sebagai bagian dari pengelolaan bisnis.** **Perilaku sadar risiko mulai menjadi kebiasaan.** **Score maturitas penerapan manajemen risiko sesuai target.** Increased awareness of risk as part of business management. Risk-aware behavior is becoming a habit. Risk management maturity score meets the target.	Manajemen Risiko Menciptakan dan Melindungi Nilai
Hasil Results	**Kesiapan untuk menerapkan manajemen risiko.** Readiness to implement risk management.	**Manajemen risiko lebih berdasarkan manfaat daripada kepatuhan.** Risk management is more benefit-driven than compliance-driven.	**Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses bisnis.** Risk management is an integral part of business processes.	**Budaya sadar risiko menjadi bagian dari budaya organisasi.** Risk-aware culture becomes part of the organizational culture.	
	Evaluasi Evaluation	**Evaluasi** Evaluation	**Evaluasi** Evaluation	**Evaluasi** Evaluation	

Proses penerapan Manajemen Risiko yang Berkesinambungan
Continuous Risk Management Implementation Process

Prinsip Manajemen Risiko
Risk Management Principles

Dalam mengelola risiko, Perusahaan berpedoman pada ISO:31000:2018 yang memuat prinsip manajemen risiko dengan uraian sebagai berikut.

In managing risks, the Company adheres to ISO 31000:2018, which outlines risk management principles with the following descriptions.

Prinsip Manajemen Risiko Risk Management Principles	**Uraian** Description
Tujuan Manajemen Risiko Risk Management Objectives	
Penciptaan dan Perlindungan Nilai. Value Creation and Protection	**Pelaksanaan manajemen risiko perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mendorong timbulnya inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Dengan adanya manajemen risiko diharapkan Perusahaan mampu mengetahui risiko dan peluang yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga diharapkan akan muncul tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan maupun dampak kerugian atas terjadinya risiko, termasuk didalamnya melakukan inovasi atau tindakan bisnis lain yang dianggap perlu sebagai upaya memanfaatkan peluang yang ada.** The implementation of corporate risk management aims to improve performance, encourage innovation, and support goal achievement. With risk management, the company is expected to identify risks and opportunities that may arise in the future. This is expected to lead to preventive actions to minimize the likelihood or impact of losses due to risks, including innovation or other business actions deemed necessary to take advantage of available opportunities.
Prinsip Manajemen Risiko Risk Management Objectives	
Terintegrasi Integrated	**Manajemen risiko bukan merupakan kegiatan atau tanggung jawab satu unit saja (Departemen Risk Management) melainkan merupakan tanggung jawab keseluruhan unit pada sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan hasil identifikasi yang relevan atas risiko, tidak ada yang lebih mengetahui kondisi real suatu unit kecuali unit itu sendiri, sehingga pada setiap unit telah dilakukan penunjukan Fasilitator Risiko untuk mengakomodir implementasi manajemen risiko unit tersebut. Untuk kondisi yang memerlukan pembahasan lintas unit, Perusahaan telah mewadahi pembahasan risiko melalui Tim Manajemen Risiko Perusahaan yang beranggotakan keseluruhan unit di Perusahaan.** Risk management is not an activity or responsibility of a single unit (Risk Management Department) but rather the responsibility of all units within a company. This is because, to obtain relevant risk identification results, no one knows the real conditions of a unit better than the unit itself. Therefore, each unit has appointed a Risk Facilitator to accommodate the implementation of risk management within that unit. For conditions that require cross-unit discussions, the company has facilitated risk discussions through the Corporate Risk Management Team, which consists of all units within the company.

Terstruktur dan Komprehensif Structured and Comprehensive	**Implementasi manajemen risiko harus dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan komprehensif agar hasil implementasi tersebut terukur dan dapat dibandingkan. Sebagai upaya perwujudan manajemen risiko yang terstruktur dan komprehensif, Perusahaan menyusun kebijakan manajemen risiko, Prosedur dan WI manajemen risiko serta mengembangkan platform pengelolaan risiko secara online (eRisk). Dengan upaya tersebut diharapkan keselarasan pemahaman dan pola pikir dalam implementasi manajemen risiko dapat terwujud.** Risk management implementation must be carried out systematically, structured, and comprehensively to ensure measurable and comparable results. As part of the effort to establish structured and comprehensive risk management, the Company formulates risk management policies, procedures, and work instructions (WI) while also developing an online risk management platform (eRisk). These efforts aim to achieve alignment in understanding and mindset in the implementation of risk management.
Disesuaikan Customized	**Untuk memastikan implementasi manajemen risiko dapat mendukung ketercapaian sasaran, maka Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian atas kerangka kerja dan proses manajemen risiko Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran.** To ensure that risk management implementation supports the achievement of targets, the Company periodically evaluates and adjusts its risk management framework and processes while considering both external and internal factors that may influence target attainment.
Inklusif Inclusive	**Keterlibatan pemangku kepentingan sebagai contoh jajaran Direksi dan manajemen merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya perwujudan implementasi manajemen risiko yang baik dalam hal ini menumbuhkan budaya sadar risiko di lingkungan Perusahaan. Dalam hal peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi manajemen risiko, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya antara lain penyusunan komitmen berupa Risk Management Policy, pembentukan Tim Manajemen Risiko Perusahaan, penunjukan Fasilitator Risiko unit, penerapan three lines model, pelaporan hasil implementasi manajemen risiko kepada Direksi dan Komisaris setiap tiga bulan sekali dan lain-lain.** The involvement of stakeholders, such as the Board of Directors and management, is a crucial factor in the successful implementation of good risk management, particularly in fostering a risk-aware culture within the Company. In terms of enhancing stakeholder engagement in risk management implementation, the Company has undertaken several initiatives, including the development of a commitment through a Risk Management Policy, the establishment of a Corporate Risk Management Team, the appointment of unit Risk Facilitators, the application of the three lines model, and the reporting of risk management implementation results to the Board of Directors and Commissioners every three months, among other efforts.
Dinamis Dynamic	**Ketika kegiatan atau proses bisnis Perusahaan mengalami perubahan, maka hal ini dapat mempengaruhi perubahan ketentuan implementasi manajemen risiko Perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan review berkala atas kesesuaian metode dan kerangka kerja manajemen risiko sehingga tetap selaras dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Perusahaan. Untuk itu Perusahaan selalu melakukan review dan penyesuaian kebijakan hingga Prosedur atau WI manajemen risiko setiap dua tahun sekali atau sesuai kebutuhan.** When the Company's activities or business processes change, it may impact the provisions for risk management implementation. Therefore, regular monitoring and review of the suitability of risk management methods and frameworks are necessary to ensure alignment with the Company's objectives. The Company consistently conducts reviews and adjustments to risk management policies, procedures, and work instructions (WI) every two years or as needed.

Informasi Terbaik yang Tersedia Best Available Information	**Ketersediaan informasi yang memadai sangat diperlukan dalam proses implementasi manajemen risiko Perusahaan. Informasi yang jelas atas sebuah kegiatan memudahkan risk owner dalam menyusun risiko yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu untuk menentukan estimasi nilai kemungkinan dan dampak kerugian yang mungkin timbul, dapat digunakan data historis (data jumlah kejadian dan dampak atas risiko serupa) yang pernah terjadi dalam platform eRisk maupun expert judgement.** Adequate information availability is essential for implementing the Company's risk management process. Clear information about an activity enables risk owners to identify potential risks in carrying out that activity. Additionally, to estimate the likelihood and potential impact of losses, historical data (such as the number of incidents and their impact on similar risks) from the eRisk platform or expert judgment can be utilized.
Faktor Manusia dan Budaya Human and Cultural Factors	**Penerapan manajemen risiko Perusahaan telah mempertimbangkan faktor manusia dan budaya di dalamnya. Salah satu upaya penerapan manajemen risiko yang memperhatikan faktor manusia dan budaya adalah dengan membangun platform eRisk untuk menyediakan sarana implementasi manajemen risiko yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh risk owner mulai UKP hingga proyek-proyek remote area sehingga diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kualitas dan tingkat kesadaran (budaya) implementasi manajemen risiko di lingkungan Perusahaan** The Company's risk management implementation considers human and cultural factors. One initiative that takes these factors into account is the development of the eRisk platform, which facilitates risk management implementation and is easily accessible to all risk owners, from headquarters to remote project sites. This initiative aims to improve the quality and awareness (culture) of risk management implementation within the Company.
Peningkatan Berkelanjutan Continuous Improvement	**Dalam upaya peningkatan kualitas implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan, Perusahaan secara rutin melakukan asesmen maturitas manajemen risiko untuk mengetahui gambaran kondisi implementasi manajemen risiko yang sudah dilaksanakan dan aspek apa saja yang dapat ditingkatkan dalam upaya perbaikan implementasi manajemen risiko Perusahaan ke depan.** To enhance the quality of risk management implementation on an ongoing basis, the Company routinely conducts risk management maturity assessments. These assessments provide insights into the current state of risk management implementation and identify areas for improvement to strengthen the Company's risk management practices in the future.

Proses Manajemen Risiko
Risk Management Process

Dalam mengimplementasikan manajemen risiko, Perusahaan melaksanakan 8 (delapan) tahapan sebagai berikut:

In implementing risk management, the Company follows eight (8) stages as follows:

Penentuan Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria
Determination of Scope, Context, and Criteria

Penentuan lingkup, konteks dan kriteria dilakukan di awal kajian manajemen risiko untuk memberi batasan dalam proses identifikasi risiko yang mungkin muncul dan menggagalkan ketercapaian sasaran.

The determination of scope, context, and criteria is carried out at the beginning of the risk management assessment to establish boundaries in the process of identifying risks that may arise and hinder the achievement of objectives.

Identifikasi Risiko
Risk Identification

Dalam proses identifikasi risiko, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain:
- Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi sasaran/tujuan pencapaian yang ditargetkan.
- Identifikasi dalam manajemen risiko kuantitatif dilaksanakan pada proses bisnis dengan menggunakan prinsip pareto, sehingga jumlah risiko terbatas, hanya risiko utama dan berbahaya yang teridentifikasi.
- Identifikasi risiko dilakukan sesuai nomenklatur, apabila risiko yang teridentifikasi tidak terdaftar pada nomenklatur maka dapat dipilih opsi lain-lain dan menuliskan risiko baru

In the risk identification process, several key provisions must be considered, including:
- The identified risks are events that may impact the targeted objectives/goals.
- Risk identification in quantitative risk management is carried out in business processes using the Pareto principle, so the number of risks is limited to only major and critical risks.
- Risk identification must follow the established nomenclature; if an identified risk is not listed in the nomenclature, the "other" option can be selected, and a new risk can be documented.

Analisis Risiko
Risk Analysis

Analisis risiko menggunakan metode kuantitatif di mana penentuan nilai dampak menggunakan data histori, *expert judgement*, dan asumsi *risk owner*. Sedangkan penentuan nilai kemungkinan menggunakan rumus distribusi *poisson*.

Risk analysis uses a quantitative method where the impact value is determined based on historical data, expert judgment, and risk owner assumptions. Meanwhile, the probability value is determined using the Poisson distribution formula.

Evaluasi Risiko
Risk Evaluation

Setelah dilakukan analisis risiko dan ditetapkan nilai kemungkinan serta dampaknya, untuk selanjutnya risiko dipetakan dengan mengalikan nilai kemungkinan dan dampak. Penempatan risiko dalam peta risiko dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kuadran I (satu): Kemungkinan di bawah batas toleransi, dampak di bawah batas toleransi
2. Kuadran II (dua): Kemungkinan di atas batas toleransi, dampak di bawah batas toleransi
3. Kuadran III (tiga): Kemungkinan di bawah batas toleransi, dampak di atas batas toleransi
4. Kuadran IV (empat): Kemungkinan di atas batas toleransi, dampak di atas batas toleransi

After conducting risk analysis and determining the probability and impact values, risks are mapped by multiplying these values. Risk placement on the risk map follows these guidelines:
1. Quadrant I: Probability below the tolerance limit, impact below the tolerance limit.
2. Quadrant II: Probability above the tolerance limit, impact below the tolerance limit.
3. Quadrant III: Probability below the tolerance limit, impact above the tolerance limit.
4. Quadrant IV: Probability above the tolerance limit, impact above the tolerance limit.

Risk Treatment
Risk Treatment

Penentuan risk treatment didasarkan pada posisi risiko di dalam peta risiko. Masing-masing kuadran dalam peta risiko memiliki tingkat urgensi yang berbeda berurut dari kuadran I (satu) meningkat hingga batas maksimal di kuadran IV (empat).

1. Kuadran I (satu): Rendah: Terima
2. Kuadran II (dua): Mencegah : Cegah
3. Kuadran III (tiga): Tinggi: Mitigasi
4. Kuadran IV (empat): Ekstrim: Cegah & Mitigasi

Risk treatment is determined based on the risk's position on the risk map. Each quadrant has different levels of urgency, increasing from Quadrant I to the maximum in Quadrant IV.

1. Quadrant I (Low): Accept
2. Quadrant II (Medium): Prevent
3. Quadrant III (High): Mitigate
4. Quadrant IV (Extreme): Prevent & Mitigate

Monitoring dan *Review* Risiko
Risk Monitoring and Review

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan aplikasi eRisk (*platform* manajemen risiko *online*) setiap bulan sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) untuk manajemen risiko konstruksi dan untuk manajemen risiko nonkonstruksi dilakukan setiap triwulan.

Risk monitoring and review are carried out using the eRisk platform (online risk management system) every month before the 25th for construction risk management and every quarter for non-construction risk management.

Konsultasi dan Komunikasi Risiko
Risk Consultation and Communication

Konsultasi dan komunikasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan setiap saat ketika *risk owner* memerlukan *second opinion* dalam melakukan proses manajemen risiko.

Consultation and communication in risk management implementation are carried out at any time when the risk owner requires a second opinion in the risk management process.

Recording dan Reporting
Recording dan Reporting

Recording dan *reporting* pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan melalui platform manajemen risiko berbasis *online* (eRisk).

Recording and reporting of risk management implementation are carried out through the online-based risk management platform (eRisk).

Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

Selain membentuk Departemen *Risk Management* sebagaimana telah disampaikan di atas, Perusahaan membentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam mengelola risiko bisnis Perusahaan pada level menengah, tinggi dan ekstrim. Berikut susunan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 053/SK/DIR/PPRE/VIII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut.

In addition to establishing the Risk Management Department as previously mentioned, the Company has formed a Risk Management Committee to assist the Board of Directors in managing business risks at the medium, high, and extreme levels. The following is the composition of the Risk Management Committee based on the Board of Directors' Decree No. 053/SK/DIR/PPRE/VIII/2024 dated December 16, 2024, regarding the establishment of the Risk Management Committee.

Jabatan Position	**Pejabat yang Menjabat** Appointed Officer
Ketua Chairman	**Manager Risk Management** Chairman
Anggota Tetap Permanent Members	*1. Vice President Corporate Secretary* *2. Vice President Operation Control* *3. Vice President Supply Chain Management* *4. Vice President Finance & Accounting* *5. Vice President Business Development & Asset Management* *6. Manager Human Capital Management* *7. Manager Quality Control* *8. Manager Health, Safety & Environment* *9. Manager Legal*
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	*1. Vice President Operation 1* *2. Vice President Operation 2* *3. Vice President Equipment Operation;* *4. Vice President Equipment Maintenance* *5. Vice President Bidding & Engineering* *6. Vice President Internal Audit* *7. Manager Equipment Performance & Admin* *8. Marketing Manager* *9. Expert (Internal/Eksternal)*

Berikut disampaikan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko Perusahaan:

The duties and responsibilities of the Corporate Risk Management Team are as follows:

1. Melakukan pembahasan manajemen risiko atas kegiatan korporasi sesuai Prosedur dan Work Instruction yang berlaku sebelum dilakukan pembahasan dalam Rapat Direksi (Radir);
   Conduct risk management discussions on corporate activities in accordance with applicable Procedures and Work Instructions before being discussed in the Board of Directors Meeting (Radir);
2. Melakukan koordinasi antara anggota tetap, anggota tidak tetap dan unit pemilik risiko;
   Coordinate between permanent members, non-permanent members, and risk owners;
3. Melakukan penilaian risiko bersama pemilik risiko berupa identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko;
   Conduct risk assessments together with risk owners, including risk identification, risk analysis, and risk evaluation;

4 Melakukan pengelolaan terhadap potensi risiko yang ada;
Manage existing risk potentials;

5 Memaparkan dan mengajukan persetujuan atas hasil pengelolaan risiko kepada Direksi;
Present and seek approval for risk management results from the Board of Directors;

6 Melakukan *monitoring* dan *review* terhadap implementasi manajemen risiko sesuai prosedur dan *Work Instruction* yang berlaku.
Monitor and review the implementation of risk management in accordance with applicable Procedures and Work Instructions.

Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi Risiko
Types of Risks and Risk Mitigation Efforts

Berdasarkan kajian yang dilakukan selama tahun 2024, berikut disampaikan jenis-jenis risiko yang dihadapi Perusahaan serta upaya mitigasinya.

Based on the assessment conducted throughout 2024, the following are the types of risks faced by the Company and their corresponding mitigation efforts.

Risiko Pasar & Makroekonomi Market & Macroeconomic Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	**Berkurangnya perolehan proyek baru** Decrease in new project acquisition
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	**Optimalisasi & evaluasi kinerja operasional proyek secara berkala untuk meningkatkan peluang repeat order** **Pelaksanaan program periodic inspection dan peremajaan untuk meningkatkan performa alat dengan kondisi breakdown (PA MA alat rendah)** **Program kerjasama recruitmen dengan third party dan pengembangan kompetensi mekanik melalui program training dan assessment** **Monitoring dan update kesesuaian sasaran strategis Perusahaan terhadap arah kebijakan Pemerintah** Optimization & periodic evaluation of project operational performance to increase repeat order opportunities Implementation of periodic inspection and rejuvenation programs to improve equipment performance under breakdown conditions (low PA MA of equipment) Recruitment partnership program with third parties and development of mechanic competencies through training and assessment programs Monitoring and updating the company's strategic objectives in alignment with government policies

Risiko Operasional Market & Macroeconomic Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	**Target kinerja operasi tidak tercapai (penurunan nilai PA dan MA alat)** Decrease in new project acquisition
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	**Program pemenuhan jumlah dan kompetensi operator maupun mekanik melalui kerjasama recruitmen dengan third party serta program training dan assesment** **Percepatan pemenuhan kebutuhan sparepart melalui monitoring dan penyusunan forecasting kebutuhan pendatangan sparepart, kontrak kerjasama konsinyasi, preventive maintenance & full maintenance contract untuk alat baru maupun alat eksisting** Program to fulfill the required number and competencies of operators and mechanics through recruitment partnerships with third parties, as well as training and assessment programs Acceleration of spare part fulfillment needs through monitoring and forecasting of spare part procurement requirements, consignment cooperation contracts, preventive maintenance, & full maintenance contracts for both new and existing equipment

Risiko SDM Human Capital (HC) Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	**Penurunan tingkat HC Readiness** Decline in HC Readiness level
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	**Training and development program** **Coaching and mentoring program** **Talent management program** Training and development program Coaching and mentoring program Talent management program

Risiko Keuangan Financial Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	**Kenaikan beban biaya perusahaan** Increase in company cost burden
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	**Negosiasi dengan pihak kreditur terkait penetapan rate fasilitas yang tetap** **Pembebanan biaya yang timbul atas kenaikan rate fasilitas pada RAPK atau RAPT proyek pengguna fasilitas** **Melakukan evaluasi atas penggunaan fasilitas kredit eksisting dan menyusun kajian cost and benefit atas rencana perpanjangan maupun pembukaan fasilitas krediit baru** **Pembebanan biaya yang timbul atas perpanjangan maupun pembukaan fasilitas kredit baru pada RAPK atau RAPT proyek pengguna fasilitas** Negotiation with creditors regarding the determination of a fixed facility rate Allocation of costs arising from facility rate increases in RAPK or RAPT for projects using the facility Conducting evaluations on the use of existing credit facilities and preparing cost-benefit analysis for extension plans or new credit facility openings Allocation of costs arising from extensions or new credit facility openings in RAPK or RAPT for projects using the facility

Risiko Operasional Operational Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	**Target profitabilitas kegiatan investasi tidak tercapai** Investment activity profitability targets not achieved
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	**Menyusun long term market projection untuk proyek-proyek dengan kebutuhan alat tipikal** **Menyewakan alat kepada pihak eksternal untuk memastikan alat tetap beroprasi** **Melaksanakan program divestasi atas alat idle akibat proyek terminated/ketidaktersediaan proyek** **Pelaksanaan program periodic inspection konsidi alat untuk memastikan alat dalam kondisi optimal** Developing long-term market projections for projects with typical equipment needs Leasing equipment to external parties to ensure continuous operation Implementing divestment programs for idle equipment due to terminated/unavailable projects Conducting periodic equipment inspections to ensure equipment remains in optimal condition

Risiko Restrukturisasi & Reorganisasi Restructuring & Reorganization Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	**Kegagalan proses divestasi aset alat berat** Failure in the heavy equipment asset divestment process
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	**Pembuatan sistem asset registry sebagai upaya sentralisasi data kepemilikan aset, data lokasi aset, serta data-data lain yang dibutuhkan dalam proses divestasi** **Monitoring plotting equipment dan target divestasi aset secara periodik** **Pembuatan tanda pengenal aset yang akan di divestasi untuk menghindari pemindahan lokasi aset** **Penentuan periode dan beban penyusutan menyesuaikan data historikal umur aset** **Penggunaan skema project based depreciation** **Menetapkan term of payment kepada calon buyer sebelum proses divestasi dilakukan** Development of an asset registry system to centralize ownership data, asset location data, and other necessary information for the divestment process Periodic monitoring of equipment plotting and asset divestment targets Creation of identification tags for assets to be divested to prevent relocation Determination of depreciation periods and burdens based on historical asset lifespan data Implementation of a project-based depreciation scheme Establishment of payment terms for potential buyers before the divestment process begins

Evaluasi Efektivitas Implementasi Sistem Manajemen Risiko
Evaluation of Risk Management System Implementation Effectiveness

Pada tahun 2024 Perusahaan melakukan penilaian kepatuhan penerapan manajemen risiko konstruksi dan non-konstruksi. Berdasarkan evaluasi tersebut, tingkat kepatuhan penerapan manajemen risiko Perusahaan di tahun 2024 mencapai nilai 96,83% dari target 85,00%. Adapun komponen penerapan manajemen risiko Perusahaan adalah sebagai berikut.

In 2024, the Company conducted a compliance assessment of the implementation of risk management in both construction and non-construction activities. Based on this evaluation, the Company's risk management compliance level in 2024 reached 96.83%, exceeding the target of 85.00%. The components of the Company's risk management implementation are as follows:

Triwulan Quarter	Skor Score
Triwulan I tahun 2024 Quarter I year 2024	**96,29%**
Triwulan II tahun 2024 Quarter II year 2024	**97,82%**
Triwulan III tahun 2024 Quarter III year 2024	**95,67%**
Triwulan IV tahun 2024 Quarter IV year 2024	**97,63%**
Skor Rata-Rata Average Score	**96,83%**

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Statement of the Board of Commissioners and Directors on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris dan Direksi menilai implementasi sistem manajemen risiko secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik, namun pada beberapa bagian masih diperlukan perbaikan. Beberapa arahan terkait implementasi manajemen risiko perusahaan yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain:

Komite mengusulkan penyusunan Resume Corporate Risk yang lebih komprehensif dengan mengakomodir risiko terkait alat idle. Dewan Komisaris dan Direksi berharap kedepannya Manajemen Risiko tidak hanya menjadi syarat/formalitas saja tetapi harus menjadi prioritas.

Bahwa sesuai kebijakan Pemegang Saham Mayoritas pada tahun 2024 ditetapkan bahwa :

The Board of Commissioners and Directors assess that the overall implementation of the risk management system has been carried out well; however, some areas still require improvement. Several directives from the Board of Commissioners regarding the company's risk management implementation include:

The Committee proposes the development of a more comprehensive Corporate Risk Summary, incorporating risks related to idle equipment. The Board of Commissioners and Directors emphasize that, going forward, Risk Management should not be merely a formality or requirement but a priority.

In accordance with the Majority Shareholder Policy in 2024, the following decisions were established:

1. Fungsi Organ Pengelola Risiko (direktur yang membidangi pengelolaan risiko) dirangkap fungsinya oleh Direktur Keuangan dan HCM;
   The Risk Management Organ Function (Director overseeing risk management) is concurrently held by the Director of Finance and HCM.

2. Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite Audit.
   The Risk Monitoring Committee and the Integrated Governance Committee under the Board of Commissioners are carried out by the Audit Committee.

Untuk itu, dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Tim Manajemen Risiko pada pembahasan Triwulan II Tahun 2024 pada tanggal 23 Juli 2024, Dewan Komisaris memberikan arahan agar Perusahaan dapat meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, jika perlu bagi Direktur yang membidangi Manajemen Risiko dapat mengikuti seminar terkait Sistem Manajemen Risiko.

Pada tahun 2024, Perusahaan berupaya untuk menyempurnakan implementasi manajemen risiko melalui berbagai cara, antara lain: melalui peningkatan keterlibatan Departemen Manajemen Risiko dalam pembahasan risiko proyek/tender/aksi korporasi/program kerja/program khusus/SMAP, program refreshment manajemen risiko Perusahaan, penyusunan rencana penanaganan dengan lebih komprehensif dan detail, mengakomodir tambahan risiko terkait penambahan beban biaya atas alat-alat idle dan lain-lain.

s a result, during the Board of Commissioners Meeting with the Risk Management Team in the Q2 2024 Discussion on July 23, 2024, the Board of Commissioners directed the Company to enhance Risk Management implementation. If necessary, the Director overseeing Risk Management should participate in seminars related to the Risk Management System.

In 2024, the Company has been working to refine the implementation of risk management through various initiatives, including: Enhancing the involvement of the Risk Management Department in discussions on project/tender risks, corporate actions, work programs, special programs, and Anti-Bribery Management Systems (SMAP). Conducting refresher programs for the Company's risk management. Developing a more comprehensive and detailed risk mitigation plan. Accommodating additional risks, particularly those related to increased cost burdens due to idle equipment and other potential risks.

Rencana Sistem Manajemen Risiko ke Depan
Future Risk Management System Plan

Pengembangan sistem manajemen risiko Perusahaan tahun 2025 mengacu pada peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN antara lain

The development of the Company's Risk Management System for 2025 refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities in SOEs, including:

1. Melakukan evaluasi dan update roadmap manajemen risiko Perusahaan menyesuaikan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko sebelumnya;

   Evaluating and updating the Company's risk management roadmap based on the results of the previous risk management maturity level assessment.

2. Pemenuhan mandatory kuantitas dan kualifikasi organ pengelola risiko sesuai intensitas risiko Perusahaan;

   Fulfilling the mandatory quantity and qualifications of risk management personnel in accordance with the Company's risk intensity.

3. Penyesuaian KPI manajemen risiko Perusahaan;

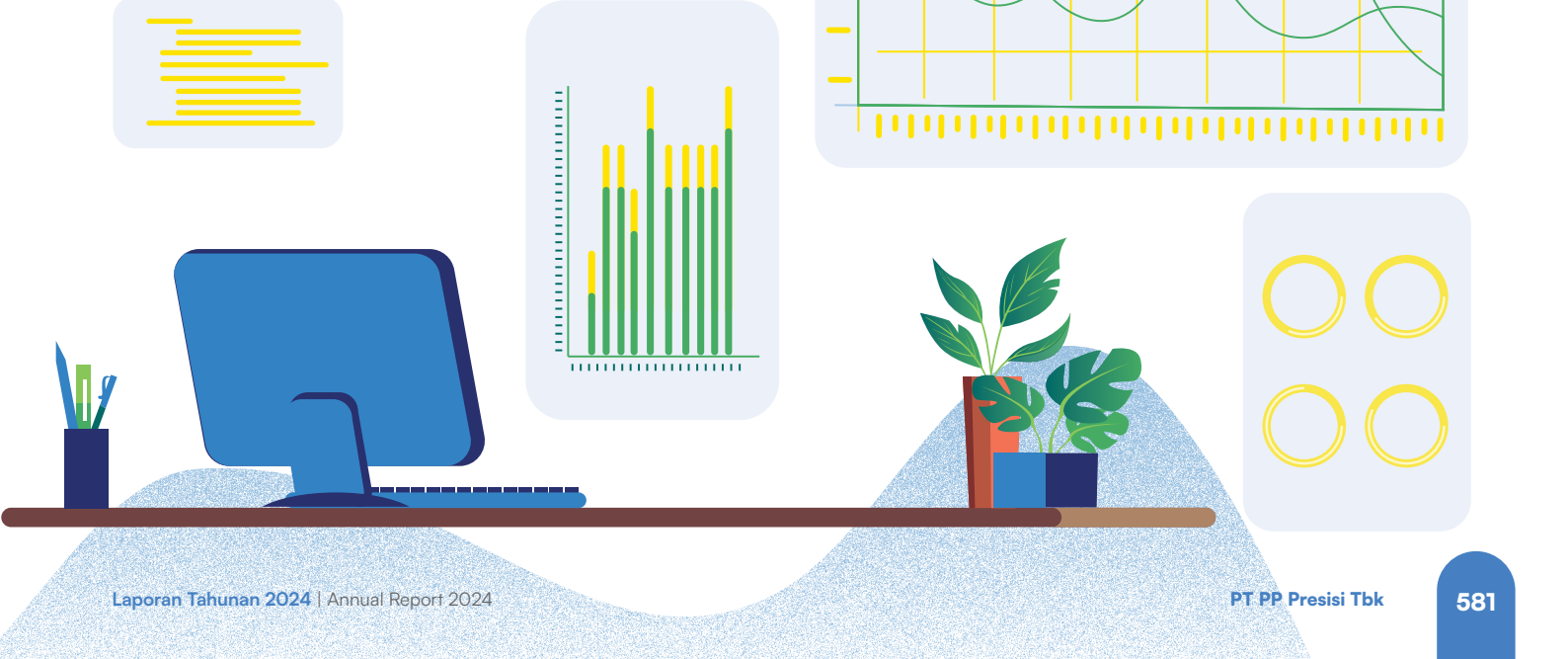
   Adjusting the Company's Risk Management KPI.

4. Proses manajemen risiko (penyusunan profil risiko, penilaian risiko, perlakuan risiko, evaluasi dan pelaporan manajemen risiko) menyesuaikan ketentuan BUMN;

   Aligning the risk management process (risk profile development, risk assessment, risk treatment, risk evaluation, and reporting) with SOE regulations.

5. Penyesuaian Kebijakan, WI dan Prosedur manajemen risiko sesuai ketentuan proses manajemen risiko BUMN.

   Adjusting Risk Management Policies, Work Instructions (WI), and Procedures to comply with SOE risk management processes.



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Pada era modern ini, hampir semua jenis dan bidang usaha memerlukan peran Teknologi Informasi (TI). Perusahaan menyadari bahwa optimalisasi penggunaan TI akan menunjang Perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan dan tantangan, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan bisnis.

Untuk itu, Perusahaan senantiasa merancang, mengembangkan, dan menerapkan Teknologi Informasi yang tepat dengan berdasarkan pada *IT Master Plan* dan *IT Work Instruction.*

In this modern era, almost all types and fields of business require the role of Information Technology (IT). Companies realize that optimizing the use of IT will support them in adapting to changes and challenges, thereby accelerating business growth.

Therefore, companies constantly design, develop, and implement the appropriate Information Technology based on the IT Master Plan and IT Work Instruction.

IT Master Plan

IT Master Plan merupakan sebuah *blueprint* yang dirancang sebagai pondasi awal pengembangan sistem informasi Perusahaan yang terintegrasi. Terbentuknya *IT Master Plan* merupakan informasi strategis terkait inisiatif TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis spesifik di unit bisnis penggunaan jasa TI serta strategi pendekatan pelaksanaannya. Dokumen ini memberikan gambaran tingkat tinggi terhadap prioritas pelaksanaan inisiatif TI serta bagaimana inisiatif TI dalam meningkatkan dukungan TI terhadap bisnis Perusahaan.

The IT Master Plan is a blueprint designed as the initial foundation for the development of an integrated information system for the Company. The formation of the IT Master Plan is strategic information related to IT initiatives to meet specific business needs in the business unit of the use of IT services and the strategy of its implementation approach. This document provides a high-level overview of the priorities for the implementation of IT initiatives as well as how IT initiatives are improving IT support for the Company's business.

IT Work Instruction

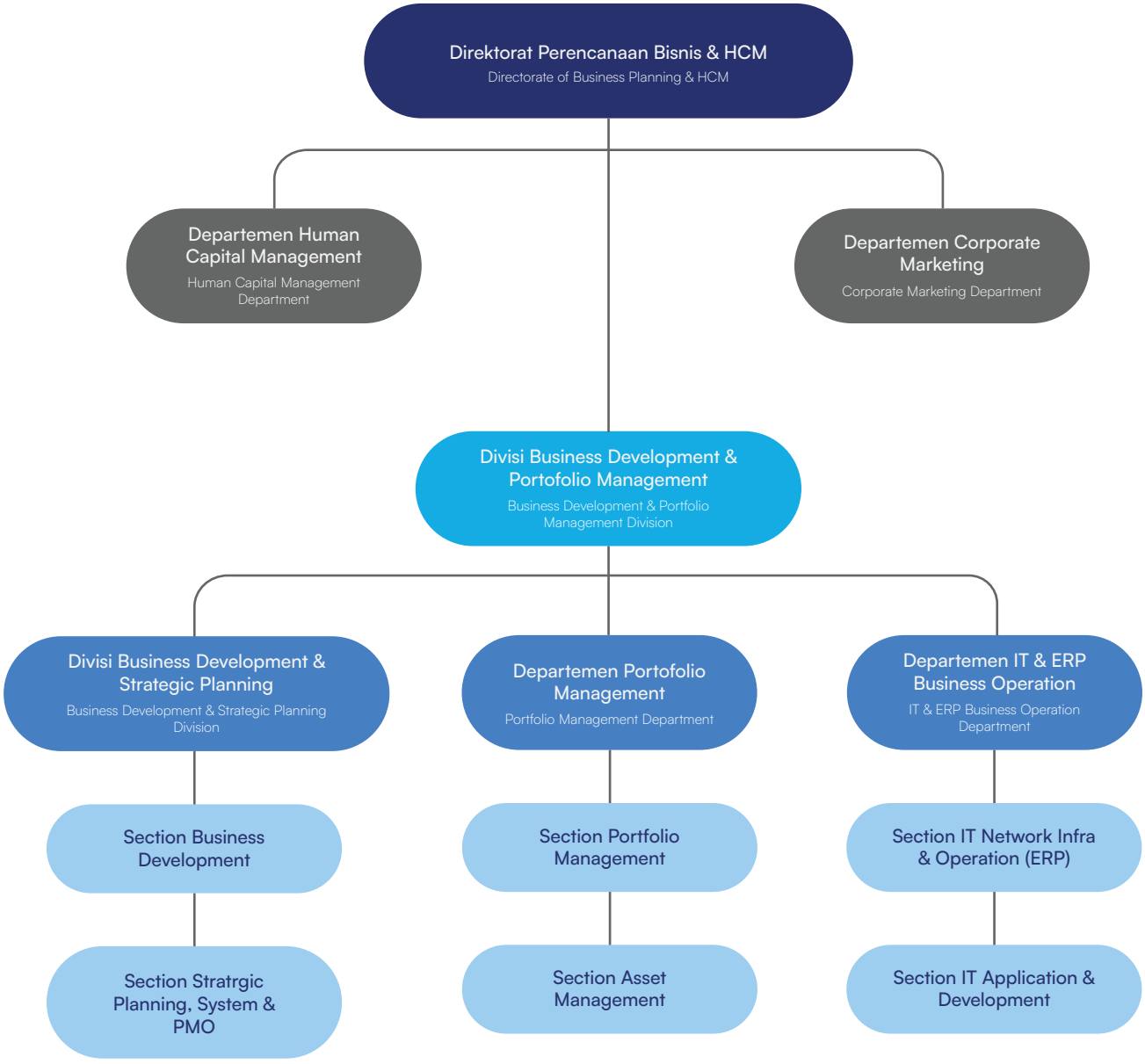
IT Work Instruction merupakan pedoman terstruktur yang berkaitan dengan proses kerja Departemen TI. Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam mendukung pengembangan TI adalah dengan membentuk Single System ERP melalui Surat Keputusan Direksi No. 045/SK/DIR/PPRE/2024 pada tanggal 19 November 2024 tentang Tim Pengembangan Enterprise Resources Planning ERP Tahun 2024

IT Work Instruction is a structured guideline related to the work process of the IT Department. One form of the Company's commitment to supporting IT development is to establish a Single System ERP through the Decree of the Board of Directors No. 045/SK/DIR/PPRE/2024 on November 19, 2024 concerning the Enterprise Resources Planning ERP Development Team for the Year 2024

Struktur Organisasi Teknologi Informasi PP Presisi
Organizational Structure of Information Technology PP Presisi

Pengelolaan TI Perusahaan berada di bawah Divisi *Business Development & Asset Management*, di mana Divisi ini akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan dan pengembangan TI Perusahaan. Adapun struktur organisasi TI Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

The Company's IT management falls under the Business Development & Asset Management Division, where this Division will be responsible for the entire process of managing and developing the Company's IT. The company's IT organizational structure can be seen below.



Adapun tugas dan tanggung jawab Departmen IT & ERP *Business Operation* adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of the IT & ERP Business Operation Department are as follows:

1. Melakukan analisa dalam menyusun kebutuhan pengembangan IT selaras dengan proses bisnis perusahaan maupun kebutuhan user;
   Conducting analysis in compiling IT development needs in line with the company's business processes and user needs;

2. Merancang, menyusun dan mengembangkan sistem/aplikasi di internal Perusahaan;
   Design, develop and develop systems/applications within the Company;

3. Melakukan *maintenance* sistem dari aplikasi yang berjalan di perusahaan dan melakukan troubleshooting terhadap sistem dan aplikasi;
   Perform system maintenance of applications running in the company and troubleshoot systems and applications;

4. Bekerja sama dengan vendor IT untuk merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem atau aplikasi jika diperlukan; dan
   Work closely with IT vendors to design, develop and implement systems or applications as needed; and

5. Bekerja sama dengan vendor IT untuk merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem atau aplikasi jika diperlukan.
   Work closely with IT vendors to design, develop and implement systems or applications as needed.

Sistem Informasi dan Aplikasi IT
Information System and IT Application

Sistem Informasi Manajemen Presisi (SIMAP)
Precision Management Information System (SIMAP)

Perusahaan telah menciptakan SIMAP atau disebut juga SIMAP *Online* (Sistem Informasi Manajemen Presisi) pada tahun 2018. SIMAP merupakan platform digital berbasis web original yang dapat diakses pada www.simap.pp-presisi.co.id, dengan tujuan untuk memudahkan dan memusatkan proses bisnis Perusahaan menjadi sentralisasi sistem serta untuk menyelesaikan berbagai masalah dan ketidakefisienan proses kerja yang timbul karena prosesnya yang belum terintegrasi secara *online*.

The company created SIMAP, also known as SIMAP Online (Precision Management Information System) in 2018. SIMAP is an original web-based digital platform that can be accessed at www.simap.pp-presisi.co.id. It aims to facilitate and centralize the company's business processes into a centralized system, addressing various problems and inefficiencies in work processes that arise due to processes that are not yet integrated online.

Dampak Positif SIMAP | Positive Impact of SIMAP

- Mutu Perusahaan naik 3x lipat, dengan cepatnya informasi yang didapat.
- Manajerial dapat mengambil keputusan lebih tepat dengan data akurat dan tepat waktu.
- Menjadi lebih terkendali dan menghemat biaya.
- 99% tidak ada berkas yang hilang.

- The company's quality improves threefold, with the rapid information obtained.
- Management can make more accurate decisions with precise and timely data.
- Becomes more controlled and cost-saving.
- 99% of documents are not lost.

SIMAP Online dapat digunakan oleh | SIMAP Online can be used by

- Personel Proyek dan Unit Kantor Pusat Perusahaan.

- Project personnel and Company Head Office units.

Sasaran Inovasi | Innovation Targets

- Memantau segala laporan keuangan dan kinerja di proyek, termasuk berkas perizinan dan legalitas menghindari hilang dan kedaluwarsa.
- Menghemat biaya dalam koordinasi laporan dengan proyek, dengan satu informasi yang sama, dan tidak membayar denda keterlambatan perizinan.
- Memastikan kualitas mutu dengan meningkatkan informasi yang akurat dan cepat dari pihak internal dan eksternal.
- Mendapatkan laporan yang *valid* agar cepat dalam membuat keputusan manajerial.
- Meningkatkan waktu dalam mendapatkan laporan yang berhubungan dengan laporan proyek dengan pemberian akses ke semua proyek untuk SIMAP.
- Mempermudah dan mempercepat proses pelaporan tanpa rapat *offline*, dengan sistem yang berbasis *web*, menyediakan *data center* yang dibutuhkan lintas divisi dan memiliki keterangan rinci.
- Meningkatkan standar QHSE perusahaan dengan mengkaji dan memonitoring laporan *Non-Comformance* QHSE secara tepat waktu.
- Meningkatkan *Go Green Campaign* dalam lingkungan perusahaan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- Memantau peralatan dan kinerja di proyek, termasuk perawatan peralatan yang sedang operasi dan perbaikan alat yang rusak.
- Mempermudah dan mempercepat proses pelaporan sistem pengendalian internal perusahaan.

- Monitor all financial reports and performance at the project, including licensing and legal documents to avoid loss and expiration.
- Save costs in report coordination with the project, with the same information, and avoid late license penalty fees.
- Ensure quality assurance by improving accurate and quick information from internal and external parties.
- Obtain valid reports to quickly make managerial decisions.
- Increase time efficiency in obtaining reports related to project reports by providing access to all projects for SIMAP.
- Simplify and accelerate the reporting process without offline meetings, with a web-based system, providing the necessary data center across divisions and having detailed explanations.
- Improve the company's QHSE standards by reviewing and monitoring Non-Conformance QHSE reports timely.
- Enhance the Go Green Campaign within the company environment by reducing paper usage.
- Monitor equipment and performance on the project, including maintenance of equipment in operation and repair of damaged tools.
- Simplify and accelerate the reporting process of the company's internal control system.

e-Procurement

e-Procurement

Perusahaan telah mengembangkan e-Procurement (E-PROC), yaitu *platform* untuk pendaftaran pemasok internal dan eksternal yang dapat diakses pada www.eproc.pp-presisi.co.iC. Melalui E-PROC, pemasok dapat melakukan pendaftaran secara daring serta sebagai *database* keseluruhan pemasok Perusahaan. Adapun fitur baru yang telah dikembangkan yaitu peta harga yang berfungsi sebagai database, acuan harga material dan fitur evaluasi vendor sampai dengan kontrak.

The company has developed e-Procurement (E-PROC), which is a platform for internal and external supplier registration which can be accessed at www.eproc.pp-presisi.co.iC. Through E-PROC, suppliers can register online as well as as as a database of the Company's overall suppliers. The new features that have been developed are price maps that function as a database, material price reference and vendor evaluation features up to contracts.

Sistem Informasi Karyawan Terpadu (START)

Integrated Employee Information System (START)

Perusahaan juga telah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang ditujukan untuk karyawan sebagai wadah informasi/data personal masingmasing karyawan yang disebut Sistem Informasi Karyawan Terpadu (START). Sistem ini memudahkan karyawan dalam melakukan pengecekan data antara lain biodata, absensi, cuti, dan fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional karyawan sehari-hari. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini membantu pekerjaan karyawan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih efisien dan hemat waktu. START dapat diakses untuk kebutuhan internal di www.start-qa.pp-presisi.co.id.

The company has also developed a web-based information system intended for employees as a forum for each employee's personal information/data called the Integrated Employee Information System (START). This system makes it easier for employees to check data, including biodata, attendance, leave, and other features that can be used for employees' daily operational needs. The features available on this application help employees work that was previously done manually become more efficient and time-saving. START is accessible for internal needs in www.start-qa.pp-presisi.co.id.

Sistem Absensi Karyawan

Employee Attendance System

Pada tahun 2024 perusahaan telah mengembangkan system informasi berbasis mobile yang ditujukan untuk monitoring absensi karyawan. Sistem absensi ini sudah dilengkapi dengan fitur absensi menggunakan foto wajah baik untuk absensi masuk dan pulang kantor. Selain itu system ini juga sudah dapat mencatat lokasi secara *real time* di mana karyawan tersebut melakukan absen masuk maupun keluar sehingga divisi HCM dapat *monitoring* karyawan baik dari waktu masuk dan pulang kantor beserta dengan lokasi absen, baik karyawan yang bekerja di lingkungan UKP maupun di lingkungan proyek. Aplikasi ini dapat diakses untuk kebutuhan internal di www.absensi.pp-presisi.co.id.

By 2024, the company has developed a mobile-based information system aimed at monitoring employee attendance. This attendance system is equipped with an attendance feature using a face photo both for attendance in and out of the office. In addition, this system can also record the location in real time where the employee is absent in and out so that the HCM division can monitor employees both from the time of entering and leaving the office along with the location of absence, both employees who work in the UKP environment and in the project environment. This application is accessible for internal needs in www.absensi.pp-presisi.co.id.



e-Risk

e-Risk

Perusahaan telah mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berbasis *web* (eRisk) yang dapat diakses melalui www.erisk.pp-presisi.co.id. Tujuan pengembangan platform eRisk yaitu mempermudah proses pelaksanaan manajemen risiko meliputi penentuan konteks & kriteria, penilaian risiko (identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko), *recording & reporting, communication & consultation* serta *monitoring & review risiko* secara *real time*. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan atas penggunaan eRisk antara lain:

The company has developed a web-based risk management information system (eRisk) that can be accessed through www.erisk.pp-presisi.co.id. The purpose of developing the eRisk platform is to simplify the process of implementing risk management including determining context & criteria, risk assessment (identification, analysis, and evaluation of risks), recording & reporting, communication & consultation and monitoring & review of risks in real time. Some of the benefits obtained by the Company for using eRisk include:

1. Risiko dapat diketahui dan dilaporkan secara *real time*.
   Risks can be known and reported in real time.

2. Fitur dampak terhadap risiko sebagai *early warning system*.
   The impact on risk feature as an early warning system.

3. Adanya sistem pemeringkatan risiko sehingga *user/risk owner* dapat mengetahui risiko mana yang perlu segera mendapatkan penanganan untuk mencegah terjadinya kerugian.
   There is a risk rating system so that the user/risk owner can find out which risks need immediate treatment to prevent losses.

4. Fitur segmentasi risiko dapat memberikan gambaran kepada user terkait risiko apa yang paling sering terjadi sehingga diharapkan user dapat melakukan upaya pencegahan atas terjadinya risiko serupa di masa yang akan datang.
   The risk segmentation feature can provide users with an overview of what risks occur most often so that users can make efforts to prevent similar risks in the future.

5. Informasi terkait risiko dapat diakses hingga *top management*.
   Information related to risk can be accessed up to top management.



PPRE LIB

PPRE LIB

Pada tahun 2024 Perusahaan telah mengembangkan sistem informasi PPRE Library yang merupakan wadah media pembelajaran untuk karyawan. Sistem informasi ini berisi materi-materi Metode Pekerjaan, Lesson & Learn, Claim, Inovasi dan Video yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui www.e-library.pp-presisi.co.id. Sistem Informasi ini terbagi menjadi tujuh menu utama yaitu Konstruksi, Mining, Non Konstruksi, QC, HSE, Peralatan dan KC *(Knowledge Center)*.

In 2024, the Company has developed the PPRE Library information system which is a learning media platform for employees. This information system contains Work Methods, Lesson & Learn, Claim, Innovation and Video materials that can be accessed by all employees through www.e-library.pp-presisi.co.id. This Information System is divided into seven main menus , namely Construction, Mining, Non-Construction, QC, HSE, Equipment and KC (Knowledge Center).

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP)

Company Internal Control System (SPIP)

Perusahaan telah mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan perseroan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya, menjaga dan mengamankan aset perseroan, mengurangi dampak keuangan atau kerugian, dan meningkatkan efektivitas organisasi serta budaya risiko secara menyeluruh. Dari seluruh kegiatan usaha perseroan tersebut, perlu dilakukan self assesment di akhir tahun yang berguna sebagai bentuk pertanggung jawaban perseroan atas penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan (SPIP).Sistem ini dapat diakses melalui www.surveyspi.pp-presisi.co.id.

The Company has developed a Company Internal Control System (SPIP) which aims to ensure that all of the Company's business activities are carried out in accordance with the applicable laws and regulations, provide true, complete, timely, and relevant reports necessary for the Company's decision-making, increase effectiveness and efficiency in using assets and other resources, maintain and secure the Company's assets, reduce financial impact or losses, and improve the effectiveness of the organization and the overall risk culture. Of all the company's business activities, it is necessary to carry out a self-assessment at the end of the year which is useful as a form of the company's responsibility for the implementation of the Company's internal control system (SPIP). The system can be accessed via www.surveyspi.pp-presisi.co.id.

WEBSITE LELANG

AUCTION WEBSITE

Perusahaan telah mengembangkan Website Lelang sebagai sistem informasi untuk transaksi dan penjualan aset tetap (divestasi) PT PP Presisi Tbk serta pemenuhan aspek transparansi dalam Program Divestasi guna mendukung peningkatan tata kelola Perusahaan. Website Lelang PT PP Presisi Tbk juga memberikan kemudahan akses bagi para Peminat Lelang serta menjadi media promosi aset tetap (katalog) yang telah masuk ke dalam rencana divestasi PT PP Presisi Tbk dengan jangkauan lebih luas. Website Lelang dapat diakses melalui www.lelang.pp-presisi.co.id.

The Company has developed the Auction Website as an information system for transactions and sales of fixed assets (divestment) of PT PP Presisi Tbk as well as the fulfillment of transparency aspects in the Divestment Program to support the improvement of the Company's governance. The PT PP Presisi Tbk Auction Website also provides easy access for Auction Enthusiasts and becomes a medium for promoting fixed assets (catalog) that has been included in the PT PP Presisi Tbk divestment plan with a wider reach. The Auction website can be accessed through www.lelang.pp-presisi.co.id.

Roadmap TI

Roadmap TI

Perusahaan telah menyusun *Roadmap* Pengembangan TI untuk tahun 2021-2024 dalam rangka memperkuat sistem TI Perusahaan. *Roadmap* tersebut disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola TI yang diselaraskan dengan arahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lebih jauh, *Roadmap* Pengembangan TI ini harus disesuaikan dengan strategi bisnis Perusahaan. Adapun *Roadmap* Pengembangan TI Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company has prepared an IT Development Roadmap for 2021-2024 in order to strengthen the Company's IT system. The roadmap was prepared as part of the implementation of IT governance that is aligned with the directives of the Financial Services Authority Regulation. Furthermore, this IT Development Roadmap must be adjusted to the Company's business strategy. The Corporate IT Development Roadmap is as follows:

Inisiatif Pengembangan Development Initiatives	2021				2022				2023				2024			
	Triwulan | Quarter				**Triwulan** | Quarter				**Triwulan** | Quarter				**Triwulan** | Quarter			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pemeliharaan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *System Application and Product* (SAP) Enterprise Resource Planning (ERP) and System Application and Product (SAP) Maintenance																
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi (SIMAP) Development of Administrative Management Information System (SIMAP)																
E-Procurement E-Procurement																
Data Center Consolidation Data Center Consolidation																
Disaster Recovery Center Disaster Recovery Center																
Pengoptimalan Jaringan dan Perangkat Network and Device Optimization																
Software License Software License																
Pemeliharaan Pedoman TI IT Guidelines Maintenance																
Pelatihan Training																

Pengembangan Sistem Informasi
Information System Development

Operasi dan Infrastruktur
Operations and Infrastructure

Tata Kelola TI
IT Governance

Realisasi Program Kerja TI Tahun 2024

Realization of the IT Work Program in 2024

Pada tahun 2024, Perusahaan telah melakukan berbagai program di bidang Teknologi Informasi. Adapun realisasi program kerja TI tahun 2024 yang dilakukan Departemen IT & ERP adalah sebagai berikut:

By 2024, the Company has carried out various programs in the field of Information Technology. The realization of the IT work program in 2024 carried out by the IT & ERP Department is as follows:

Pengembangan Sistem Informasi Development of Information System	**Jaringan dan Infrastruktur** Infrastructure and Network	**Tata Kelola TI** IT Governace
Single System ERP Single System ERP	**Pemeliharaan Jaringan** Network Maintenance	***Software License Renewal*** Software License Renewal
Pengembangan Website Lelang Auction Website Development	**Pemeliharaan Infrastruktur IT & Security Software License Renewal** IT & Security Infrastructure Maintenance	**Evaluasi Pedoman IT** Evaluation of IT Guidelines
Pengembangan —SIMAP - Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Development —SIMAP - Company Internal Control System		
Pengembangan SIMAP - Maintenance Management Peralatan — Development of SIMAP - Equipment Maintenance Management —		
Pengembangan E-procurement V2 Development of E-procurement V2		
Pengembangan SIMAP — Laporan Keuangan Proyek SIMAP Development — Project Financial Statements		
Pengembangan PPRE-LIB Development of PPRE-LIB		

Investasi TI

IT Investments

Investasi Teknologi Informasi Tahun 2024

Information Technology Investment in 2024

Jenis dan Peruntukan Types and Provisions	**Jumlah (Rp)** Total (Rp)
Software License Software License	**1,038,483,352**
Single System ERP IT Infrastructure Maintenance & Security	**259,010,000**
Maintenance Jaringan Network Maintenance	**103,595,250**
Jumlah Total	**1.401.088.602**

Realisasi investasi TI pada tabel di atas mengalami penurunan 13,97% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,63 miliar; atau membukukan pencapaian 41% terhadap target investasi TI tahun 2024 sebesar Rp1,401 miliar. Penurunan ini disebabkan karena Perusahaan telah melakukan pengembanganaplikasi SIMAP untuk menggantikan AMTISS terkait modul *Maintenance System*. Dengan adanya pengembangan ini Perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya pemeliharaan sistem.

Perbandingan jumlah investasi pada teknologi informasi dapat disampaikan sebagai berikut.

The realization of IT investment in the table above decreased by 13.97% compared to 2023 of IDR 1.63 billion; or posted an achievement of 41% against the IT investment target in 2024 of IDR 1.401 billion. This decrease is due to the fact that the Company has developed a SIMAP application to replace AMTISS related to the Maintenance System module. With this development, the Company has succeeded in making system maintenance cost efficient.

A comparison of the amount of investment in information technology can be conveyed as follows.

Perbandingan Investasi Teknologi Informasi
Comparison of Information Technology Investments

	Realisasi 2024 (Rp) Realization 2024 (Rp)	**Realisasi 2023 (Rp)** Realization 2023 (Rp)	**Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 (%)** Increase (Decrease) 2023-2024 (%)		**Anggaran 2024 (Rp)** Budget 2024 (Rp)	**Pencapaian Anggaran 2024 (%)** Budget Achievement 2024 (%)	
	(1)	**(2)**	**((1-2)/2)**		**(3)**	**(1/3)**	
Investasi Teknologi Informasi Information Technology Investment	**1.401.088.602**	**1.628.617.011**	**(13,97)**	⬇	**3,434,763,927**	**41,00**	⬆

Program Kerja TI Tahun 2025
IT Work Program for 2025

Perusahaan telah menyusun rencana strategi terkait pengembangan TI di tahun 2025 mendatang. Rencana pengembangan tersebut meliputi:

The company has prepared a strategic plan related to IT development in 2025. The development plan includes:

Pengembangan Sistem Informasi Development of Information System	**Jaringan dan Infrastruktur** Infrastructure and Network	**Tata Kelola TI** IT Governace
Single System ERP Single System ERP	**Pemeliharaan Jaringan** Network Maintenance	***Software License Renewal*** Software License Renewal
Pengembangan Website Lelang Auction Website Development	**Pemeliharaan Infrastruktur IT & *Security*** IT & Security Infrastructure Maintenance	**Evaluasi Pedoman IT** Evaluation of IT Guidelines
Pengembangan SIMAP - Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Development of SIMAP - Company Internal Control System		
Pengembangan SIMAP - *Maintenance Management* Peralatan Development of SIMAP - Equipment Maintenance Management		
Pengembangan *Eprocurement V2* Eprocurement V2 Development		
Pengembangan SIMAP - Laporan Keuangan Proyek Development of SIMAP - Project Financial Report		
Pengembangan PPRE-LIB Development of PPRE-LIB		

Perkara Penting

Important Points

Permasalahan Hukum
Legal Issues

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi maupun yang telah selesai yang melibatkan Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.

The problems and/or legal cases faced or resolved involving the Company and/or the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2023 and 2024 are as follows.

Permasalahan Hukum Legal Issues	**2024**		**2023**	
	Perdata Civil	**Pidana** Criminal	**Perdata** Civil	**Pidana** Criminal
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	1	-	**Nihil** None	
Dalam proses penyelesaian In the process of completion	-	-		
Jumlah Total	1	-	**Nihil** None	

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut,

The details of the legal problems faced by the Company in 2024 are as follows,

PERKARA #01: GUGATAN PERDATA SUFURKON GOFUR | ITEM #01: SUFURKON GOFUR CIVIL LAWSUIT

PIHAK YANG BERPERKARA:
Penggugat : Sufurkon Gofur
Tergugat : PT PP Urban
Turut Tergugat :
- PT NAWA PERDANA SEMBILAN, KSO
- PT PP Presisi Tbk
- PT Jamkrindo Syariah

POKOK PERKARA:
Wanprestasi

STATUS PERKARA:
Selesai/Putusan telah berkekuatan hukum tetap

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:
Rp370.021.161 *(tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh satu Rupiah)*

TINDAK LANJUT:
-

PARTIES:
Plaintiff : Sufurkon Gofur
Defendant : PT PP Urban
Also Defendant :
PT NAWA PERDANA SEMBILAN, KSO
PT PP Presisi Tbk
PT Jamkrindo Syariah

BOTTOM LINE:
Wanprestasi

CASE STATUS:
Selesai/Putusan telah berkekuatan hukum tetap

RISKS FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:
Rp370.021.161 (three hundred and seventy million twenty-one thousand one hundred and sixty-one Rupiah)

FOLLOW-UP:
-

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions

Tidak terdapat adanya sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, di sepanjang tahun 2024.

There were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors throughout 2024.

Pengungkapan Permasalahan Terkait Perpajakan
Disclosure of Taxation-Related Problems

Tidak terdapat adanya permasalahan perpajakan di tahun 2024.

There were no tax issues in 2024.

Pengungkapan Permasalahan Terkait Lingkungan Hidup
Disclosure of Environment-Related Problems

Perusahaan tidak menemukan adanya permasalahan terkait pengaduan atas pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2024.

The company did not find any issues related to complaints about environmental management in 2024.

Pengungkapan Permasalahan Terkait Hubungan Industrial/ Ketenagakerjaan
Disclosure of Problems Related to Industrial/Employment Relations

Di tahun 2024, Perusahaan tidak menemukan adanya persoalan terkait hubungan industrial/ketenagakerjaan.

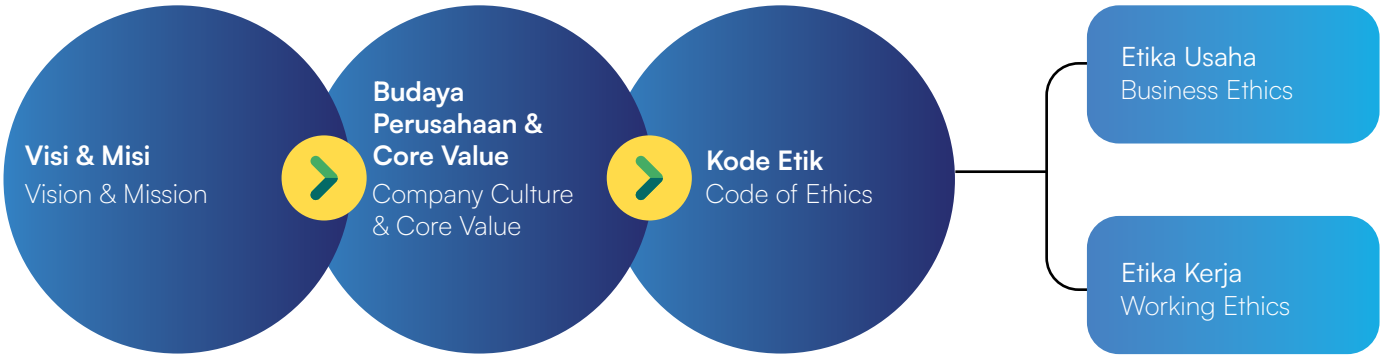
In 2024, the company did not encounter any issues related to industrial or employment relations.

Kode Etik

Code of Ethics

Perusahaan telah memiliki Kode Etik yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan kesesuaian perilaku Insan PPRE dengan apa yang diharapkan oleh Perusahaan. Kode Etik Perusahaan ini telah disusun sejak 17 September 2018 dan dimutakhirkan kembali tanggal 20 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Lebih jauh, Kode Etik juga memuat filsafat bisnis dan nilai-nilai yang ada dalam mengatur dan mengelola Perusahaan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Perusahaan.

The Company already has a Code of Ethics that is compiled to influence, shape, regulate, control and implement the conformity of the behavior of PPRE Personnel with what is expected by the Company. The Company's Code of Ethics has been prepared since September 17, 2018 and updated again on October 20, 2023 and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Furthermore, the Code of Ethics also contains the business philosophy and values that exist in organizing and managing the Company as a whole to achieve business objectives as stated in the Company's Vision and Mission.



Pokok-Pokok Kode Etik

Code of Ethics Principles

Etika Usaha | Business Ethics

Etika Usaha berkaitan dengan standar perilaku yang diterapkan oleh Perusahaan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan. Etika Usaha mengatur hal-hal tentang:

- Etika Perusahaan terhadap pegawai.
- Etika Perusahaan terhadap pelanggan.
- Etika Perusahaan terhadap penyedia barang dan jasa (pemasok).
- Etika Perusahaan terhadap kompetitor (pesaing).
- Etika Perusahaan terhadap regulator.
- Etika Perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
- Etika Perusahaan terhadap pemegang saham (shareholder)
- Etika Perusahaan terhadap kreditur.
- Etika Perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup.
- Etika Perusahaan terhadap media.
- Etika Perusahaan terhadap komunitas/organisasi seprofesi.
- Etika Perusahaan terhadap Anti KKN.

Business Ethics is related to the standards of behavior applied by the Company in interacting and relating to stakeholders. Business Ethics regulates matters about:

- Company Ethics towards employees.
- The Company's ethics towards customers.
- Company ethics towards suppliers of goods and services (suppliers).
- The Company's ethics towards competitors (competitors).
- The Company's ethics towards regulators.
- Company ethics towards the surrounding community.
- The Company's ethics towards shareholders
- The Company's ethics towards creditors.
- Company ethics related to occupational safety and health and the environment.
- The Company's ethics towards the media.
- Company ethics towards communities/organizations of the same profession.
- Company Ethics towards Anti-KKN.

Etika Kerja | Work Ethics

Etika Kerja berkaitan dengan standar perilaku insan Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam berinteraksi. Etika Kerja mengatur hal-hal tentang:

a. Ketaatan terhadap hukum dan kebijakan PPRD.
b. Hubungan sesama pegawai.
c. Hubungan atasan dan bawahan.
d. Hubungan eksternal:
   - » Hubungan dengan komunitas setempat.
   - » Transaksi dengan rekanan dan pemasok.
   - » Kontribusi dan aktivitas politik.
   - » Hadiah dari fasilitas lain yang merupakan bentuk gratifikasi.
   - » kebijakan perlindungan aset Perusahaan.
   - » Integritas dan akurasi pembukuan.
   - » Pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
   - » Pelaporan pengaduan atas pelanggaran
   - » Kerahasiaan data dan informasi.
   - » Pelanggaran terhadap kode etik.
   - » Pengawasan kode etik

Work Ethics is related to the standards of behavior of the Company's personnel in carrying out work and in interacting. The Work Ethics regulates matters about:

a. Compliance with PPRD laws and policies.
b. Relationships among employees.
c. Relationship between superiors and subordinates.
d. External Relations:
   - » Relationships with the local community.
   - » Transactions with associates and suppliers.
   - » Political contributions and activities.
   - » Gifts from other facilities are a form of gratuity.
   - » the Company's asset protection policy.
   - » Integrity and accuracy of bookkeeping.
   - » Implementation of gratuity control.
   - » Reporting of complaints for violations
   - » Confidentiality of data and information.
   - » Violation of the code of conduct.
   - » Code of conduct oversight

Komitmen Kode Etik
Code of Ethics Commitment

Agar seluruh insan PP Presisi memahami dan bersedia dengan penuh tanggung jawab melaksanakan Kode Etik, maka:

In order for all PP Presisi personnel to understand and be willing to take full responsibility to implement the Code of Ethics, then:

1. Seluruh insan PP Presisi wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan yang merupakan komitmen seluruh insan PP Presisi untuk melaksanakan Kode Etik. Surat Pernyataan Kepatuhan ini diperbarui setiap tahun.

   All PP Presisi personnel are required to sign a Compliance Statement which is a commitment of all PP Presisi personnel to implement the Code of Ethics. This Compliance Statement is updated annually.

2. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan bagi seluruh insan PP Presisi.

   The Board of Directors is responsible for the signing of the Compliance Statement for all PP Presisi personnel.

3. Setiap insan PP Presisi menerima 1 (satu) salinan Pernyataan Kepatuhan dan menandatangani formulir Pernyataan Kepatuhan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Kode Etik. Salinan Pernyataan Kepatuhan tersebut didokumentasikan oleh Biro Sekretaris Perusahaan.

   Each PP Presisi personnel receives 1 (one) copy of the Compliance Statement and signs a Statement of Compliance form that the person concerned has accepted, understood and agreed to comply with the Code of Ethics. A copy of the Statement of Compliance is documented by the Corporate Secretary's Bureau.

4. Seluruh Pejabat Perusahaan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik tersebut.

   All Company Officers are responsible and set an example for their subordinates in the implementation of the Code of Ethics.

Bentuk Sosialisasi dan Upaya Penyebarluasan Kode Etik
Forms of Socialization and Efforts to Disseminate the Code of Ethics

Dalam rangka mendorong pelaksanaan Kode Etik dengan baik, Perusahaan melakukan penyebarluasan dan pemahaman Kode Etik kepada seluruh insan Perusahaan. Di mana Perusahaan melakukan sosialisasi dengan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pemahaman GCG serta standar etika yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Adapun tujuan Perusahaan dalam melakukan sosialisasi Kode Etik di lingkup Perusahaan di antaranya untuk:

In order to encourage the proper implementation of the Code of Ethics, the Company disseminates and understands the Code of Ethics to all Company personnel. Where the Company conducts socialization by delivering materials related to the understanding of GCG and ethical standards that apply within the Company.

The Company's objectives in socializing the Code of Ethics within the Company's scope include to:

1. Mewujudkan pemahaman isi dari Kode Etik.
   Realizing an understanding of the content of the Code of Ethics.
2. Mewujudkan kesadaran dari seluruh karyawan untuk melaksanakan Kode Etik.
   Realizing awareness from all employees to implement the Code of Ethics.
3. Memberikan pengertian bahwa Kode Etik merupakan bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh karyawan Perusahaan.
   Providing the understanding that the Code of Ethics is an integral part of the company's business practices and performance assessment of all employees.

Di tahun 2024, Perusahaan menyelenggarakan sosialisasi atas keberadaan kode etik, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

In 2024, the Company will hold socialization of the existence of the code of ethics, through the following activities:

1. Rapat Perkenalan Direksi baru pada Juli 2024 yang dihadiri Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Kepatuhan, dan *Corporate Secretary*.
   The new Board of Directors Introduction Meeting will be held in July 2024 which will be attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Compliance Committee, and Corporate Secretary.
2. Rapat Internalisasi GCG pada November 2024 yang dihadiri Karyawan PPRE.
   GCG Internalization Meeting in November 2024 attended by PPRE Employees.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik
Compliance with the Code of Ethics

Sebagaimana yang telah disebutkan, seluruh Insan Perusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan penerapan Kode Etik di lingkup Perusahaan. Pengungkapan bahwa Kode Etik berlaku bagi seluruh level organisasi tertuang dalam bentuk Surat Pernyataan Kepatuhan yang ditandatangani oleh setiap karyawan. Dengan demikian, Kode Etik berarti berlaku bagi seluruh insan Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Dalam hal ini, Perusahaan berharap seluruh insan PP Presisi mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik dalam setiap aktivitasnya, sehingga akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen kepatuhan terhadap Kode Etik, Perusahaan telah membuat Surat Pernyataan Kepatuhan Pegawai Melaksanakan Kode Etik yang wajib ditandatangani oleh seluruh insan Perusahaan.

As mentioned, all Company Personnel are responsible for implementing the Code of Ethics within the Company. The disclosure that the Code of Ethics applies to all levels of the organization is contained in the form of a Compliance Statement signed by each employee. Thus, the Code of Ethics means that it applies to all members of the Company starting from the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees. In this case, the Company hopes that all PP Presisi personnel have the awareness to carry out good ethics in each of their activities, so that it will improve and strengthen the Company's reputation.

As a form of commitment to compliance with the Code of Ethics, the Company has made a Statement of Compliance for Employees to Implement the Code of Ethics which must be signed by all Company personnel.

Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Statement of Compliance with Code of Conduct



Kepatuhan Melaksanakan Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas Anti Penyuapan Tahun 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NRP :
Unit/Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan PT PP Presisi Tbk dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Telah membaca Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*)*, Pedoman Pelaksanaan GCG*, Buku Peraturan Perusahaan tentang Kepegawaian*, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan GCG;
2. Telah membaca dan memahami secara garis besar terhadap Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) beserta kebijakan-kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku untuk mendukung terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
3. Memahami bahwa kepatuhan dan ketaatan terhadap standar Kode Etik, nilai perusahaan dan kebijakan anti penyuapan merupakan hal penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi PT PP Presisi Tbk;
4. Setuju untuk patuh, taat dan berjanji berbuat/berperilaku/bertindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, memiliki sikap kerja sesuai nilai-nilai dan kode etik perusahaan, berintegritas, bersih & jujur, anti penyuapan serta menegang amanah, transparan, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Berjanji untuk berperan secara proaktif dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan memberantas penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme, perbuatan tercela, curang, dan melanggar hukum;
6. Berjanji akan menghindari konflik kepentingan serta berlaku secara adil dan setara dalam berinteraksi dengan rekan kerja, bawahan, atasan, termasuk pihak ketiga dan rekan bisnis;
7. Berjanji tidak akan menawarkan, menjanjikan, dan atau memberikan sesuatu yang tidak semestinya kepada penyelenggara negara dalam lingkup pekerjaan;
8. Berjanji tidak meminta atau menerima suatu pemberian yang tidak semestinya yang berkaitan dengan lingkup tugas pekerjaan;
9. Berjanji akan berhati-hati dan melaporkan setiap pemberian dan penerimaan hadiah, sponsor, santunan, kemurahan hati, keramahtamahan, kontribusi dana politik dan/atau keuntungan serupa dengan transparan dan akuntabel;
10. Berjanji akan mendukung pelaksanaan sistem pelaporan dan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui dengan tujuan mencegah terjadinya kecurangan, mempertahankan integritas diri dan korporasi, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan memahami sebagai insan PT PP Presisi Tbk mempunyai hak untuk melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran;
11. Menjaga amanah jabatan yang diberikan perusahaan kepada saya dengan menjunjung tinggi integritas, kode etik, kebijakan anti penyuapan dan loyalitas perusahaan;
12. Mengerti bahwa tindakan/teguran karena indisipliner dapat diambil oleh Divisi HCM dan Komite Kepatuhan jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan atau kebijakan anti penyuapan Perusahaan, dan apabila saya melanggar saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta diturut ganti rugi baik secara perdata dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ..... tanggal .....

Tanda Tangan: .....
Nama Lengkap: .....

*dapat diakses melalui intranet.pp-presisi.co.id

Upaya Penegakan Kode Etik
Code of Ethics Enforcement Efforts

Sebagai bentuk keseriusan Perusahaan dalam menegakkan Kode Etik, setiap pelanggaran Kode Etik yang terjadi akan segera ditindaklanjuti. Masing-masing Kepala Unit menjadi penanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan Kode Etik dan dipantau oleh Pengelola Sistem Pelanggaran. Di samping itu, Perusahaan juga senantiasa melakukan penyebarluasan Kode Etik dilakukan dengan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi terhadap Kode Etik.

Setiap insan PP Presisi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Kode Etik ke dalam setiap perilakunya. Tanggung jawab untuk memonitor hubungan pribadi dan profesional terletak pada masing-masing pribadi, di mana setiap insan PP Presisi wajib:

As a form of the Company's seriousness in enforcing the Code of Ethics, any violations of the Code of Ethics that occur will be followed up immediately. Each Head of Unit is responsible for supervising compliance with the Code of Ethics and is monitored by the Violation System Manager. In addition, the Company also always disseminates the Code of Ethics by socializing, implementing, and evaluating the Code of Ethics.

Every PP Presisi person is responsible for implementing the Code of Ethics into their every behavior. The responsibility for monitoring personal and professional relationships lies with each individual, where each PP Presisi person is obliged to:

1. Mematuhi dan menaati hukum dan peraturan yang berlaku di Perusahaan, termasuk Budaya Perusahaan.
   Comply with and comply with applicable laws and regulations in the Company, including the Company Culture.
2. Menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
   Avoid activities that may cause conflicts of interest.
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan.
   To maintain and maintain the confidentiality of the Company's business information and information related to parties who have business relations with the Company.
4. Melindungi harta kekayaan Perusahaan.
   Protecting the Company's assets.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
Mechanism for Reporting Code of Ethics Violations

Pelaporan atas pelanggaran Kode Etik dilakukan sebagai berikut:

Reporting of violations of the Code of Ethics is carried out as follows:

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka karyawan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui kotak WBS, kepada atasan langsung, dan Kepala Biro Internal Audit atau melalui surat langsung, *e-mail*, ataupun faksimili.
   If there is a violation or irregularity, the employee is required to report the violation through the WBS box, to the direct supervisor, and the Head of the Internal Audit Bureau or through direct mail, e-mail, or facsimile.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah.
   Disclosure must be made in good faith and not a personal complaint or based on bad will or slander.

3 Pelapor harus mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan juga harus merahasiakan identitas pelapor.
The whistleblower must clearly state his or her identity on the report made, accompanied by relevant supporting evidence. The recipient of the report must also keep the identity of the reporter confidential.

4 Setiap laporan yang diterima wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Every report received must be followed up according to applicable procedures and mechanisms.

Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik
Types of Sanctions for Code of Ethics Violations

Perusahaan akan menindaklanjuti pelanggaran terhadap Kode Etik sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang telah ditetapkan. Di mana pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh setiap Insan PP Presisi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

The Company will follow up on violations of the Code of Ethics in accordance with the Company Regulations that have been set. Where violations of the Code of Ethics committed by every PP Presisi personnel will be sanctioned in accordance with the applicable laws and regulations, namely:

Pihak yang Melanggar Infringing Parties	**Keputusan** Decisions
Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Sanksi diputuskan oleh Pemegang Saham.** Sanctions are decided by the Shareholders.
Direksi Directors	**Sanksi diputuskan oleh Dewan Komisaris.** Sanctions are decided by the Board of Commissioners.
Karyawan Employee	**Sanksi diputuskan oleh atasan langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan atasan langsung di lingkungan masing-masing.** Sanctions are decided by the direct supervisor or the Board of Directors according to the level of the violation after receiving a report of the violation committed by the employee concerned. The Board of Directors provides direction on coaching actions, disciplinary sanctions and/or other actions as well as prevention that must be carried out by direct superiors in their respective environments.
Mitra Kerja atau Pemangku Kepentingan lainnya Partners or other Stakeholders	**Sanksi ditentukan sesuai ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.** Sanctions are determined according to the provisions contained in the contract. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan
Number of Code of Ethics Violations and Sanctions Given

Berikut disampaikan jumlah pelanggaran kode etik, termasuk pelanggaran Peraturan Perusahaan, yang terjadi di lingkup Perusahaan.

The following are the number of violations of the code of ethics, including violations of Company Regulations, that occur within the scope of the Company.

Kategori Sanksi Sanctions Categories	2024	2023
Surat Peringatan I Warning Letter I	4	-
Surat Peringatan II Warning Letter II	-	-
Surat Peringatan III (Sanksi Administrasi) Warning Letter III (Administrative Sanctions)	-	-
Surat Peringatan III (Pengunduran Diri) Warning Letter III (Resignation)	-	-

Kebijakan Benturan Kepentingan
Conflict of Interest Policy

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan, setiap insan PP Presisi senantiasa:

In order to avoid conflicts of interest, every PP Presisi personnel always:

1. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
   Prioritizing the interests of the Company over the interests of personal or family and other parties in carrying out duties and obligations.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lainnya.
   Do not abuse your position for the benefit or benefit of personal, family, and other parties.
3. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pengambilan Keputusan.
   If there is a conflict of interest, the person concerned is not allowed to participate in the decision-making process.
4. Direksi membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan atas setiap keputusan yang dibuat olehnya.
   The Board of Directors makes a statement that it does not have a conflict of interest over any decision made by it.

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*

Insider Trading Prevention Policy

Perusahaan melarang insan PP Presisi yang memiliki akses informasi material untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya, baik dalam melakukan jual beli saham Perusahaan, maupun dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.

The Company prohibits PP Presisi personnel who have access to material information to abuse their positions and jobs, both in buying and selling the Company's shares, and in disclosing material information that may affect investors' information decisions. Material information is information that has not been widely published that could induce a person to buy, sell, or hold shares of the Company.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, Perusahaan senantiasa menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan khususnya korupsi. Dalam hal ini, Perusahaan juga selalu mengedepankan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan mengacu pada kebijakan tentang anti korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Perusahaan telah menetapkan kebijakan terhadap perilaku KKN yang tertulis dalam Kode Etik dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan menyampaikan materi Kode Etik serta penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan oleh setiap karyawan.

Adapun pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkup Perusahaan sesuai dengan Pedoman SMAP No. PPRE/BD/P/007 adalah sebagai berikut:

In order to create a healthy work environment, the Company always avoids actions, behaviors or deeds that can cause conflicts of interest, especially corruption. In this case, the Company also always prioritizes the interests of the Company over the interests of individuals, families, groups or groups. In its implementation, the Company refers to the policy on anti-corruption contained in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In addition, the Company has established a policy on KKN behavior written in the Code of Ethics and socialized to all employees by submitting Code of Ethics materials and signing a Statement of Compliance by each employee.

The implementation of the Anti-Bribery Management System within the Company in accordance with the SMAP Guidelines No. PPRE/BD/P/007 is as follows:

1. Menegakkan Nilai-Nilai dan Kode Etik Perusahaan serta tidak mentolerir penyuapan (zero tolerance) dalam menjalankan aktivitas dan operasional Perusahaan.
   Upholding the Company's Values and Code of Ethics and not tolerating bribery (zero tolerance) in carrying out the Company's activities and operations.

2. Mematuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan anti penyuapan.
   Comply with all provisions of anti-bribery regulations and legislation.

3 Memenuhi dan menjalankan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara efektif, konsisten, dan efisien dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.
Meet and implement the requirements of the Anti-Bribery Management System effectively, consistently, and efficiently with continuous improvement efforts.

4 Mendorong dan melatih insan Perusahaan untuk peduli dalam melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan dengan iktikad baik melaporkan setiap bentuk pelanggaran tanpa khawatir tindakan balasan.
Encourage and train the Company's personnel to care about implementing the Anti-Bribery Management System and in good faith report any form of violation without worrying about retaliation.

5 Membangun hubungan dan sinergi yang berlandaskan pada prinsip integritas dan nilai anti penyuapan pada setiap interaksi Perusahaan dengan semua pihak berkepentingan.
Building relationships and synergies based on the principles of integrity and anti-bribery values in every interaction of the Company with all interested parties.

6 Menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang independen dengan wewenang untuk pemenuhan persyaratan anti penyuapan Perusahaan.
Establish an independent Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) with the authority to fulfill the Company's anti-bribery requirements.

7 Mengambil sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran ketidakpatuhan dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Take strict sanctions against all forms of violations, non-compliance, and deviations from this anti-bribery policy in accordance with applicable provisions.

PPRE telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) pada tanggal 9 Juni 2011, dan dalam implementasinya PPRE telah melaksanakan beberapa program kerja salah satunya adalah pelaksanaan sosialisasi anti penyuapan.

Sepanjang tahun 2024, PPRE telah melaksanakan agenda sosialisasi SMAP yaitu sebagai berikut:

PPRE has obtained the ISO 37001:2016 SMAP (Anti-Bribery Management System) Certificate on June 9, 2011, and in its implementation PPRE has implemented several work programs, one of which is the implementation of anti-bribery socialization.

Throughout 2024, PPRE has implemented the SMAP socialization agenda, which is as follows:

No	**Jenis Kegiatan** Type of Activity	**Peserta** Participant	**Realisasi Jadwal Pelaksanaan** Realization Implementation Schedule
1	**Sosialisasi Internal dan Proyek TW I** Internal Socialization and TW Project I	**Karyawan UKP dan Proyek** UKP and Project Employees	**7 Maret 2024** March 7, 2024
2	**Sosialisasi Dirkom TW I** Socialization of Dirkom TW I	**Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Kepatuhan** Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, Compliance Committee	**26 Maret 2024** March 26, 2024
3	**Sosialisasi Internal dan Proyek TW II** Internal Socialization and TW II Projects	**Karyawan UKP dan proyek** UKP and project employees	**21 Oktober 2024** October 21, 2024

4	**Sosialisasi Dirkom TW II** Socialization of Dirkom TW II	**Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Kepatuhan** Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, Compliance Committee	**13 November 2024** November 13, 2024
5	**Sosialisasi Rekan Bisnis TW III** Socialization of TW III Business Partners	**Vendor perusahaan** Enterprise vendors	**08 November 2024** 08 November 2024

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Policy

Dalam rangka menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang efektif berlaku pada 23 Mei 2023. Di mana setiap insan PPRE, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan dan Entitas Anak dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban maupun tugasnya.

Berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, gratifikasi dikategorikan menjadi sebagai berikut.

In order to uphold the principles of good corporate governance, the Company has established the Gratuity Control Guidelines effective May 23, 2023. Where every PPRE person, namely the Board of Commissioners, the Board of Directors, all employees who directly work for and on behalf of the Company and its Subsidiaries are prohibited from receiving and/or giving gratuities related to their positions and contrary to their obligations and duties.

Based on the Gratification Control Guidelines, gratuities are categorized into the following.

Kategori Gratifikasi Gratuity Categories	**Uraian** Description
Gratifikasi yang wajib dilaporkan Gratuities that must be reported	*Marketing fee.* Marketing fee. **Uang pelicin, uang pulsa, dan uang lainnya.** Smoothing money, credit money, and other money. **Hadiah/cinderamata/bingkisan dari pihak lain untuk kepentingan insan PP Presisi.** Gifts/souvenirs/gifts from other parties for the benefit of PP Presisi personnel. **Parsel dan atau bingkisan hari-hari keagamaan.** Parcels and or gifts of religious days. **Uang transportasi, tiket, dan akomodasi perjalanan dinas dari pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak kerja.** Transportation money, tickets, and accommodation for official trips from other parties that are not stated in the employment contract. **Diskon/potongan harga/pemberian atau keuntungan lainnya dari pihak lain yang diberikan secara tidak wajar untuk kepentingan insan PP Presisi.** Discounts/discounts/gifts or other benefits from other parties that are given unreasonably for the benefit of PP Presisi personnel.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan terkait kedinasan Gratuities that must be reported and related to official	**Fasilitas transportasi, akomodasi, honorarium, uang saku, dan jamuan makan dari pihak lain, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban insan Perusahaan, tidak terdapat pembiayaan ganda, berdasarkan undangan resmi dari pihak lain, penunjukan atau penugasan resmi dari perusahaan dan/atau diatur dalam suatu ikatan kerja Bersama pihak lain. Cinderamata, plakat dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada undangan resmi dari pihak lain, penunjukkan atau penugasan resmi dari Perusahaan.** Transportation facilities, accommodation, honorarium, pocket money, and banquets from other parties, in activities related to the implementation of the Company's duties or obligations, there is no double financing, based on an official invitation from another party, an official appointment or assignment from the company and/or regulated in a joint employment bond with another party. Souvenirs, plaques from seminars, workshops, training committees from agencies or institutions whose participation is based on official invitations from other parties, official appointments or assignments from the Company. **Cinderamata, plakat dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada undangan resmi dari pihak lain, penunjukkan atau penugasan resmi dari PPRD.** Souvenirs, plaques from seminars, workshops, training committees from agencies or institutions whose participation is based on official invitations from other parties, official appointments or assignments from PPRD. **Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka mewakili Perusahaan.** Prizes at the time of contest or open competition activities represent the Company. **Honor mengajar terkait kedinasan.** Honorary teaches related to official duties. **Undangan olahraga bersama dari instansi lain sebagai wakil resmi perusahaan yang menunjang aktivitas Perusahaan.** Joint sports invitations from other agencies as official representatives of the company that support the Company's activities.
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan tidak terkait kedinasan Gratuities that are not mandatory to report and are not related to official	**Hadiah langsung/undian, souvenir, hibah, sumbangan, voucher, point reward, dan diskon/rabat yang berlaku umum dari individu atau institusi lainnya.** Direct prizes/sweepstakes, souvenirs, grants, donations, vouchers, reward points, and general discounts/rebates from other individuals or institutions. **Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.** Profits or interest from the placement of funds, investments or generally held private shares. **Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum.** Benefits of cooperatives, staffing organizations or similar organizations based on membership, which are generally applicable. **Penerimaan yang terkait dengan kegiatan upacara adat atau keagamaan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan, potong gigi, dan uang duka cita yang terkait dengan musibah atau bencana dengan batasan nilai paling tinggi Rp1.000.000,-.** Receipts related to traditional or religious ceremonial activities such as weddings, births, aqiqah, baptisms, circumcision, tooth cutting, and condolence money related to disasters or disasters with a maximum value limit of IDR 1,000,000,-. **Hadiah dari sesama insan perusahaan pada momen tertentu antara lain promosi, mutasi, pensiun, pisah sambut, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dll) yang tidak melebihi Rp500.000,- per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,- dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.** Gifts from fellow company personnel at certain moments include promotions, mutations, retirements, farewells, and birthdays that are not in the form of money (checks, bilyet, current accounts, shares, deposits, vouchers, credit, etc.) that do not exceed IDR 500,000 per gift per person with a maximum total gift of IDR 1,000,000 in 1 (one) year from the same giver. **Pemberian sesama insan Perusahaan yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang tidak melebihi Rp500.000,- per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,- dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.** Gifts to fellow members of the Company that are not in the form of money or not in the form of money equivalent that does not exceed IDR 500,000 per person with a maximum total of IDR 1,000,000 in 1 (one) year from the same giver. **Hidangan atau sajian yang berlaku umum.** A dish or meal that is generally accepted. **Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya.** The acceptance process is unknown. **Tidak diketahui identitas pemberi.** The identity of the giver is unknown.

Unit Pengelola Pelaporan Gratifikasi
Gratification Reporting Management Unit

Perusahaan telah menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi di tingkat pusat, dengan Direksi bertindak sebagai penanggung jawab. Adapun susunan pengurus Unit Pengendali Gratifikasi di tingkat pusat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 468/SK/ DIR/PPRE/XII/2023 tentang Perubahan Formasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PP Presisi Tbk tanggal 19 Desember 2023.

The company has established a Gratification Control Unit at the central level, with the Board of Directors acting as the person in charge. The management structure of the Gratification Control Unit at the central level is determined based on the Board of Directors Decree No. 468/SK/DIR/PPRE/XII/2023 regarding the Change in Formation of the Gratification Control Unit within the PT PP Presisi Tbk environment dated December 19, 2023.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
Gratuity Reporting Mechanism

Adapun mekanisme pelaporan gratifikasi di Perusahaan adalah sebagai berikut:

The gratuity reporting mechanism in the Company is as follows:

1. Setiap insan PP Presisi wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada Perusahaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

   Every PP Presisi employee is required to report every gratuity receipt to the Company no later than 20 (twenty) working days from the date the gratuity is received or through the Gratification Control Unit no later than 7 (seven) working days from the date the gratuity is received

2. Laporan gratifikasi dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui situs *web* atau *e-mail* Unit Pengendalian Gratifikasi (gratifikasi@pp-presisi.co.id) dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan

   Gratuity reports can be made with or without the submission of money and/or goods through the website or e-mail of the Gratification Control Unit (gratifikasi@pp-presisi.co.id) and/or in writing using the predetermined form

3. Laporan gratifikasi paling kurang memuat data berikut:

   The gratuity report shall contain at least the following data:

   - Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
   - Jabatan insan Perusahaan yang bersangkutan.
   - Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi.
   - Uraian jenis gratifikasi yang diterima.
   - Nilai gratifikasi yang diterima.
   - Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.

   - Full name and address of the recipient and the giver of the gratuity.
   - The position of the person of the Company concerned.
   - Place and time of receiving gratuities.
   - Description of the type of gratuity received.
   - The value of the gratuities received.
   - Chronology of gratuity receipt events.

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Socialization of Gratification Control Policy

Guna Pedoman Pengendalian Gratifikasi diketahui oleh seluruh Insan PP Presisi dan pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, maka perlu adanya beberapa tindakan berikut:

In order for the Gratification Control Guidelines to be known by all PP Presisi personnel and other parties related to the Company, it is necessary to take the following actions:

1. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap unit kerja di lingkungan Perusahaan, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa, dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak lain.

   Include provisions prohibiting the receipt of gratuities in each work unit within the Company, announcements in the process of procurement of goods and services, contracts for procurement of goods and services, and in letters submitted to other parties.

2. Memerintahkan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk secara berkala memberikan informasi kepada seluruh insan PP Presisi dan pihak lain terkait dengan adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

   Ordering the Gratification Control Unit to periodically provide information to all PP Presisi personnel and other parties related to the existence of Gratification Control Guidelines.

3. Menugaskan kepada seluruh unit kerja di Perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan pihak lain untuk menginformasikan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

   Assign all work units in the Company that have working relationships with other parties to inform the Gratification Control Guidelines.

4. Unit Pengendalian Gratifikasi memonitor pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi mengenai implementasinya.

   The Gratification Control Unit monitors the implementation of the Gratification Control Guidelines and provides periodic reports to the Board of Directors regarding its implementation.

Laporan Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Report

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan tidak menerima adanya laporan gratifikasi yang diterima atau diberikan oleh Insan PP Presisi.

As of December 31, 2024, the Company has not received any gratuity reports received or given by PP Presisi personnel.

Kebijakan tentang Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Suap/Donasi dan Lainnya

Policy on Giving and Receiving Gifts/Bribes/Donations and More

Seluruh Insan PP Presisi dilarang untuk menerima dan/atau memberi hadiah, cendera mata, jamuan bisnis ataupun fasilitas lainnya, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan melanggar ketentuan yang berlaku dengan ketentuan:

All PP Presisi personnel are prohibited from receiving and/or giving gifts, souvenirs, business banquets or other facilities, which may affect decision-making and violate the applicable provisions with the following conditions:

1. Hadiah yang diterima karena berkaitan dengan undian yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang ada hubungannya dengan Perusahaan serta diserahkan dan dicatat sebagai aset Perusahaan.

   Prizes received in connection with a lottery organized by a third party that is related to the Company and handed over and recorded as Company assets.

2. Mengadakan jamuan bisnis dengan mitra usaha dan/atau pemangku kepentingan selama ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam batas-batas yang wajar di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan.

   Holding business banquets with business partners and/or stakeholders as long as it is intended for the benefit of the Company, at a reasonable cost and within reasonable limits in a place that does not create a negative image against the Company.

3. Menyerahkan atau menerima hadiah dan/atau cendera mata dari pihak ketiga yang kegiatannya dibiayai oleh Perusahaan harus menjadi milik Perusahaan.

   Submitting or receiving gifts and/or souvenirs from third parties whose activities are financed by the Company must belong to the Company.

4. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, cendera mata dan jamuan bisnis harus mendapat otorisasi pejabat Perusahaan yang berwenang.

   All expenses related to the giving of gifts, souvenirs and business banquets must be authorized by the Company's authorized officers.

5. Dilarang untuk menerima/memberikan suap atau menjanjikan memberi/menerima suap.

   It is forbidden to accept/give bribes or promise to give/accept bribes.

6. Dilarang mengarahkan orang lain di luar Perusahaan untuk melakukan penyuapan dalam segala bentuknya, baik dalam melakukan aktivitas bisnis di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan.

   It is forbidden to direct other people outside the Company to commit bribery in any form, both in carrying out business activities within the Company and outside the Company.

7 Dilarang memberikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung suatu hadiah atau pembayaran lainnya yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis Perusahaan.

It is forbidden to give or offer directly or indirectly a gift or other unreasonable payment to another party outside the Company to obtain profit or preferential treatment in conducting business transactions of the Company.

8 Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar sepanjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan, batas kepatutan, untuk tujuan sosial, seperti donasi untuk bencana alam.

Donations are in principle given to outside parties as long as they are in accordance with the Company's policy, propriety limits, for social purposes, such as donations for natural disasters.

Selanjutnya, Perusahaan juga telah memiliki Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di mana kebijakan tersebut mengatur insan Perusahaan agar:

Furthermore, the Company also has an Anti-Bribery Management System Policy, where the policy regulates the Company's personnel to:

1 Menegakkan nilai-nilai Kode Etik Perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan Operasional Perusahaan

Upholding the values of the Company's Code of Ethics in carrying out the Company's activities and operations

2 Mematuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan anti penyuapan.

Comply with all provisions of anti-bribery regulations and legislation.

3 Memenuhi dan menjalankan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan secara efektif, konsisten, dan efisien dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.

Meet and implement the requirements of an anti-bribery management system effectively, consistently, and efficiently with continuous improvement efforts.

4 Mendorong dan melatih insan Perusahaan untuk peduli dan terlibat dengan iktikad baik dalam melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan tanpa kekhawatiran.

Encourage and train the Company's personnel to care and be involved in good faith in implementing an anti-bribery management system without worry.

5 Menentang segala bentuk penyuapan (*zero tolerance*) dalam setiap aktivitas penyelenggaraan Perusahaan.

Opposing all forms of bribery (zero tolerance) in every activity of the Company.

6 Disiplin dan patuh terhadap nilai-nilai, kode etik, ketentuan, peraturan, kebijakan, dan prosedur anti penyuapan.

Discipline and compliance with anti-bribery values, codes of conduct, provisions, regulations, policies, and procedures.

7 Membangun hubungan dan sinergi yang berlandaskan pada prinsip integritas dan nilai anti penyuapan pada setiap interaksi Perusahaan dengan semua pihak berkepentingan.

Building relationships and synergies based on the principles of integrity and anti-bribery values in every interaction of the Company with all interested parties.

8

Menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang independen dengan wewenang untuk pemenuhan persyaratan anti penyuapan Perusahaan.

Establish an independent Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) with the authority to fulfill the Company's anti-bribery requirements.

9

Mengambil sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan, dan penyimpangan dari Kebijakan Anti Penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Take strict sanctions against all forms of violations, non-compliance, and deviations from the Anti-Bribery Policy in accordance with applicable regulations.

10

Melakukan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 (*anti bribery management systems - requirements with guidance for use*) pada 9 Juni 2021 oleh Komite Akreditasi Nasional.

Conducted SNI ISO 37001:2016 certification (anti-bribery management systems - requirements with guidance for use) on June 9, 2021 by the National Accreditation Committee.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan tidak menerima laporan terkait pemberian dan penerimaan hadiah atau suap. Adapun pemberian donasi yang dilakukan juga telah sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan untuk tujuan sosial.

As of December 31, 2024, the Company has not received reports related to the giving and receipt of gifts or bribes. The donations made are also in accordance with the Company's policies and for social purposes.



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Administrator's Wealth Report (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Basic Principles of the State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, penyelenggara yang wajib melapor LHKPN adalah pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan pejabat yang memiliki fungsi strategis. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Perusahaan pun telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, di mana kebijakan ini mengatur tata cara penyampaian, unit pengelola, pejabat yang wajib menyampaikan laporan, serta sanksi bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, pemeriksaan LHKPN diharapkan mampu mewujudkan penyelenggara negara yang mematuhi asas-asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Based on Article 2 of Law No. 28 of 1999, officials required to report their State Official Wealth Report (LHKPN) are state officials, in accordance with the applicable legal provisions and those holding strategic functions. In relation to this policy, the Company has established the Board of Directors Decree No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 dated January 26, 2021, where this policy regulates the procedures for submission, the managing unit, officials who are required to submit reports, and sanctions for officials who fail to submit the LHKPN. Therefore, the examination of the LHKPN is expected to realize state officials who comply with the general principles of state administration free from corruption, collusion, nepotism, and other disgraceful acts.

Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Mandatory Report on the Wealth of State Officials

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 28 tahun 1999, penyelenggara yang wajib melapor LHKPN adalah pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan pejabat yang memiliki fungsi strategis. Sebagai bentuk aplikasi peraturan tersebut, Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 20 Desember 2024.

In accordance with Article 2 of Law No. 28 of 1999, officials required to report the State Official Wealth Report (LHKPN) are state officials in accordance with the applicable laws and regulations, and officials who have strategic functions. As a form of application of these regulations, the Company issued the Directors' Decree No. 057/SK/DIR/PPRE/2024 dated December 20, 2024.

Pejabat Perusahaan Wajib LHKPN

Mandatory Company Officials of LHKPN

- **Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**
  The company's Board of Commissioners and Board of Directors
- **Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak**
  Subsidiaries' Board of Commissioners and Board of Directors
- **Seluruh Pegawai Pada Level Jabatan Kepala Divisi/Kepala Biro**
  All Employees at Division Head/Bureau Head Level
- **Seluruh Pegawai Pada Level Kepala Departemen**
  All employees at Department Head Level
- **Seluruh Pegawai Pada Level Kepala Proyek (Kepala Produksi dan Project Leader)**
  All Employees at Project Head Level (Production Head and Project Leader)

Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Administrator's Wealth Report Manager

Unit pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkup Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/PPRE/2024 tanggal 20 Desember 2024.

The unit responsible for managing the implementation of LHKPN within the company was established based on the Board of Directors Decree No. 057/SK/DIR/PPRE/2024 dated December 20, 2024.

Uraian Description	**Jabatan** Position
Penanggung Jawab Responsible Person	**Direktur Utama** Chief Executive Officer
Pembina Supervisor	**Manager, HCM** Manager, HCM
Admin Unit Unit Admin	***Human Capital Operation*** Human Capital Operation

Transparansi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat Perusahaan Tahun 2024
Transparency of the Assets of State Administrators of Company Officials in 2024

Adapun rincian transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the transparency of the submission of LHKPN Company officials are required to report in 2024 as follows:

Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Mandatory Officials State Administrator's Wealth Report	**Jumlah Wajib Lapor (orang)** Number of Required Reports (person)	**Telah Melaporkan** Reported	
		Jumlah (orang) Total (person)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Dewan Komisaris Perusahaan The Board of Commissioners of the Company	3	3	100
Direksi Perusahaan Company Directors	4	4	100
Direksi Entitas Anak Directors of Subsidiaries	2	2	100
Pegawai pada Level Jabatan Kepala Divisi/Kepala Biro Employees at the Position Level of Head of Division/Head of Bureau	13	13	100
Pegawai pada Level Kepala Departemen Officers at the Head of Department Level	21	21	100
Pegawai pada Level Kepala Proyek (Kepala Produksi dan Project Leader) Employees at the Project Head Level (Head of Production and Project Leader)	3	3	100
Jumlah Total	45	45	100

Kebijakan Pemberian Dana untuk Aktivitas Politik

Policy on Providing Funds for Political Activities

Perusahaan melarang fasilitas, dana, atau sumber daya Perusahaan digunakan untuk kampanye politik, penggalangan dana politik, partisipasi politik, menyumbang kandidat partai dan non-partai politik dimanapun di seluruh dunia. Keputusan yang diambil oleh seorang insan PP Presisi untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya personalnya bagi kampanye atau aktivitas politik harus benar-benar merupakan pilihan insan Perusahaan itu sendiri.

The company prohibits company facilities, funds, or resources from being used for political campaigns, political fundraising, political participation, or donations to party and non-party political candidates anywhere in the world. Any decision made by a PP Presisi individual to contribute their time, money, or personal resources to political campaigns or activities must be entirely the individual's own choice.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Breach Reporting System

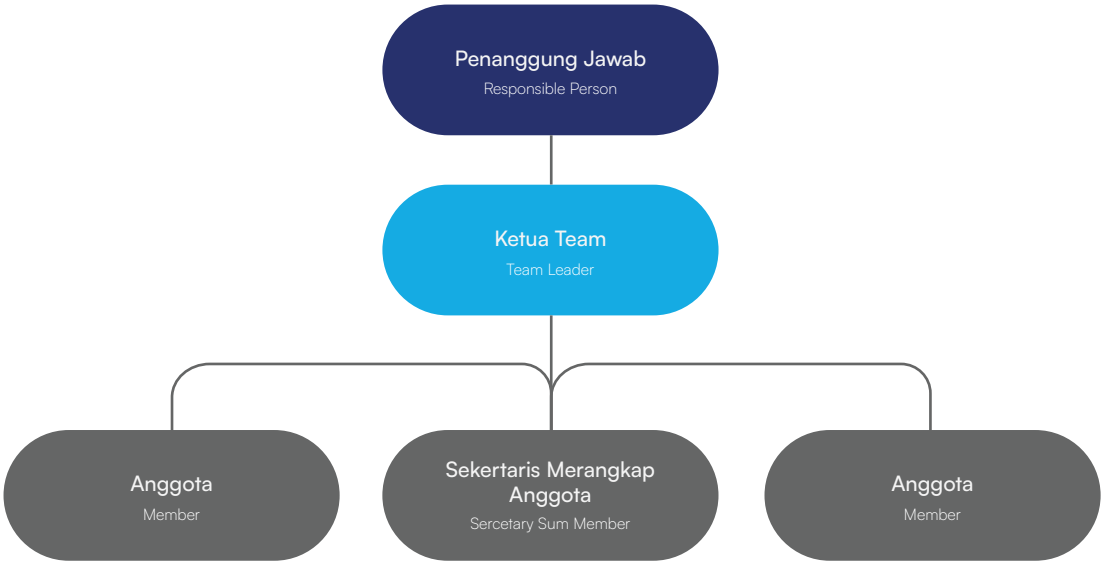
Perusahaan senantiasa menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*). Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dan penipuan yang terjadi di lingkup Perusahaan. Selain itu, mempraktikkan WBS guna mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bagi Perusahaan dalam menyusun evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. Di samping itu, WBS menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Sementara bagi pelapor pelanggaran, sistem ini memastikan perlindungan dan kerahasiaan identitasnya. Terkait dengan WBS, Komisaris Utama dan Direktur Utama telah menetapkan kebijakan terkait WBS di Perusahaan pada 9 November 2020.

The company consistently implements Good Corporate Governance. One of the efforts undertaken is the implementation of a whistleblowing system (WBS). This is aimed at preventing fraud and deception within the company. Moreover, practicing WBS helps develop a well-managed reporting system for violations, which can serve as a foundation for the company to compile necessary evaluations and follow-ups. Additionally, WBS serves as an early warning system to detect potential issues arising from violations. As for the whistleblower, this system ensures the protection and confidentiality of their identity. Regarding the WBS, the President Commissioner and President Director established a policy related to WBS in the Company on November 9, 2020.

Pihak Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System Management

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 472/SK/DIR/PPRE/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, Tim Pengelola WBS di Perusahaan adalah sebagai berikut.

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 472/SK/DIR/PPRE/XII/2023 dated December 20, 2023, the WBS Management Team in the Company is as follows.



Ruang Lingkup Laporan Pelanggaran
Scope of Violation Report

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh WBS adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi:

The scope of complaints that will be followed up by WBS are actions that may be detrimental to the Company, including:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku.
   Deviations from applicable regulations and legislation.
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan.
   Abuse of office for other interests outside the Company.
3. Benturan kepentingan.
   Conflict of interest.
4. Gratifikasi.
   Gratuities.

Mekanisme Penyampaian dan Prosedur Pengelolaan Laporan Pelanggaran

Mechanism for Submission and Procedure for Managing Violation Reports

Pelapor dapat menyampaikan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkup Perusahaan kepada Tim Pengelola WBS. Laporan dapat disampaikan secara tertulis, yaitu dengan menyampaikan surat resmi melalui e-mail atau pos ke Perusahaan ke alamat resmi berikut:

The reporter can report any indications of violations that occur within the Company to the WBS Management Team. Reports can be submitted in writing by sending an official letter via email or mail to the Company at the following official address:

Tim Pengelola WBS PT PP Presisi Tbk
Biro Internal Audit

Jl. Raya Narogong KM 15,
Pangkalan 6 Bekasi, Jawa Barat, 17153

Telephone
+6221 8248 3255

Email
pengaduan@pp-presisi.co.id

Lebih jauh, laporan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan. Perusahaan akan memberikan tanda terima atas pengaduan pelanggaran yang diajukan secara tertulis dengan disertai identitas pelapor. Perusahaan akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan. Perusahaan juga menerima laporan dari pelapor anonim. Namun, Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporan tersebut, sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Furthermore, written violation reports must be accompanied by a photocopy of the identity and supporting evidence such as documents related to the violation being reported. The company will issue a receipt for violation complaints submitted in writing along with the reporter's identity. The company will follow up on complaints related to events/incidents or evidence within a maximum period of 1 (one) year before the complaint report is submitted. The company also accepts reports from anonymous reporters. However, the company is not obliged to respond as there will be difficulties in communication and clarification of the report, thus there is a possibility that the report cannot be processed further.

Ketentuan terkait prosedur pengelolaan pelaporan adalah sebagai berikut:

The provisions regarding the reporting management procedures are as follows:

1. Pelapor menyampaikan surat resmi ke Tim Pengelola WBS Perusahaan. Laporan dalam bentuk *e-mail* atau secara tertulis disampaikan ke kontak Tim Pengelola WBS.

   The complainant submitted an official letter to the Company's WBS Management Team. The report in the form of e-mail or in writing is submitted to the WBS Management Team contact.

2 Tim Pengelola WBS menindaklanjuti laporan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor serta Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor. Sementara itu, laporan yang dapat ditindaklanjuti adalah laporan dengan pelapor yang menyertakan media komunikasi seperti *e-mail* atau nomor ponsel untuk berkomunikasi.

The WBS Management Team follows up on the report by maintaining the confidentiality of the identity of the complainant and the reported person and the Company guarantees the protection of the complainant. Meanwhile, an actionable report is a report with a whistleblower that includes a communication medium such as e-mail or a mobile phone number to communicate.

3 Pelaporan dengan iktikad baik dapat diberikan perlindungan hukum dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporting in good faith can be given legal protection and awards in accordance with applicable regulations.

4 Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

The reported party proven to have committed a violation will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

5 Perusahaan wajib melakukan rehabilitasi (pengembalian nama baik) terlapor apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

The company is obliged to conduct rehabilitation (restoration of good name) of the reported party if they are not proven to have committed an error.

Pengelolaan Laporan Pengaduan dan Mekanisme Tindak Lanjut
Complaint Report Management and Follow-up Mechanism

1 Pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Perusahaan (Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran) jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha di lingkungan PPRD.

The Complainant is required to report in writing to the Company (Violation Complaint Management Team) if there is a violation in the implementation of business activities within the PPRD.

2 Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menerima dan menyeleksi laporan Pengaduan Pelanggaran yang diterima sebagai tahap verifikasi awal, apakah terdapat indikasi atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran serta dapat ditindaklanjuti, meliputi:

The Violation Complaint Management Team receives and selects the Violation Complaint report received as an initial verification stage, whether there are indications or in accordance with the Violation Reporting System report criteria and can be followed up, including:

- Pihak Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/email dan fotokopi identitas diri;
- Bagi Pelapor anonim dapat diterima dengan syarat menyertakan bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ruang lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran;
- Terdapat permasalahan dugaan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, tempat dan tanggal peristiwa serta kerugian yang ditimbulkan.

- The Reporting Party provides information about personal identity, which at least contains name/address/telephone number/email and a copy of personal identity;
- For anonymous Whistleblowers, it can be accepted on the condition that they include sufficient evidence to be followed up in accordance with the scope of the Violation Reporting System;
- There are problems with alleged violations, who is involved, the place and date of the event and the losses caused.

Bila YA laporan Pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan poin 3, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.

3 Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan hasil verifikasi awal tersebut kepada:

- Dewan Komisaris dan Komite Audit (jika terlapor anggota Direksi);
- Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor (jika terlapor anggota Dewan Komisaris);
- Komisaris Utama (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris);
- Direksi (jika terlapor Pegawai);
- Dewan Komisaris dan Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).

4 Pelaksanaan penanganan lebih lanjut, sesuai materi yang dilaporkan menjadi tanggung jawab dan atas arahan:

- Dewan Komisaris dan Komite Audit (jika terlapor anggota Direksi);
- Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor (jika terlapor anggota Dewan Komisaris);
- Komisaris Utama (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris);
- Direksi (jika terlapor Pegawai);
- Dewan Komisaris dan Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).

Dari laporan tersebut di atas point 4, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris menetapkan rekomendasi langkah selanjutnya. Bila tidak terbukti, maka laporan Pengaduan akan ditutup. Apabila Pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

If YES, the Complaint Report is followed up in accordance with the provisions of point 3, if NOT the Violation Reporting System process is completed.

Members of the Violation Complaint Management Team report the results of the initial verification to:

- Board of Commissioners and Audit Committee (if reported by members of the Board of Directors);
- Members of the Board of Commissioners who are not reported (if reported to be members of the Board of Commissioners);
- President Commissioner (if reported to be a member of the supporting organ of the Board of Commissioners);
- Board of Directors (if reported by Employees);
- Board of Commissioners and Board of Directors (if reported as a Member of the Violation Complaint Management Team).

The implementation of further handling, according to the material reported is the responsibility and on the direction of:

- Board of Commissioners and Audit Committee (if reported by members of the Board of Directors);
- Members of the Board of Commissioners who are not reported (if reported to be members of the Board of Commissioners);
- President Commissioner (if reported to be a member of the supporting organ of the Board of Commissioners);
- Board of Directors (if reported by Employees);
- Board of Commissioners and Board of Directors (if reported as a Member of the Violation Complaint Management Team).

From the report above point 4, the Board of Directors and/or the Board of Commissioners determine recommendations for the next steps. If it is not proven, then the Complaint report will be closed. If the Complaint is proven or requires follow-up, it will be sanctioned in accordance with applicable regulations, or forwarded to the investigator for further processing in accordance with applicable provisions and regulations.

Perlindungan Terhadap Pelapor
Protection Against Whistleblowers

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor. Dalam hal ini, Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak mana pun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak mana pun. Perusahaan juga menyediakan perlindungan bagi pelapor dari perlakuan seperti:

As previously mentioned, the Company guarantees the confidentiality of the identity of the complainant and the reported person. In this case, the Company will provide a guarantee of protection for the complainant from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the complainant maintains the confidentiality of the violation complained of to any party. The Company also provides protection for whistleblowers from treatment such as:

1. Pemecatan yang tidak adil.
   Unfair dismissal.
2. Penurunan jabatan atau pangkat.
   Demotion of position or rank.
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
   Harassment or discrimination in all its forms.
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
   Adverse records in his personal data file (personal file record).

Sanksi dan Apresiasi
Sanctions and Appreciation

Perusahaan memberikan sanksi dan apresiasi terhadap pelapor dan terlapor terkait pengaduan yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

The Company sanctions and appreciation to the complainant and the reported party regarding the complaint received with the following conditions:

1. Perusahaan dapat menyediakan perlindungan hukum bagi pelapor yang beriktikad baik.
   The company can provide legal protection for whistleblowers in good faith.
2. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan perusahaan dapat diselamatkan. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan pelapor.
   The company can award the whistleblower for a proven violation so that the company's assets/finances can be saved. The award is given through the policy of the Board of Directors while still paying attention to the confidentiality or protection aspect of the whistleblower.
3. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
   The reported party proven to have committed a violation will be subject to sanctions according to the applicable regulations.
4. Perusahaan wajib mengembalikan nama baik atau rehabilitasi bagi terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
   The company is obliged to restore the good name or rehabilitation for the reported party who is not proven to have committed a violation.

Laporan Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting Report

Di tahun 2024, tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang diterima oleh WBS yang dimiliki Perusahaan.

In 2024, there will be no complaints of violations received by WBS owned by the Company.

Kebijakan Terhadap Kreditur

Policies Towards Creditors

Berkaitan dengan kebijakan terhadap kreditur, kebijakan tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kredit. Di mana kebijakan tersebut mengatur tentang pengelolaan kredit jangka panjang dan jangka pendek, hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban keuangan dan non-keuangan, kebijakan sebagai penjamin dan kebijakan penggunaan dana.

With regard to policies towards creditors, these policies have been regulated in the Credit Agreement. Where the policy regulates long-term and short-term credit management, the company's rights and obligations to creditors are outlined in the form of agreements that regulate financial and non-financial rights and obligations, policies as guarantors and policies for the use of funds.

Kebijakan Terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Policies Towards Creditors

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
Guidelines for the Procurement of Goods and Services

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari perencanaan strategis Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional pengguna barang maupun jasa. Pengadaan ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh aktivitas untuk memperoleh barang atau jasa secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme guna memastikan setiap tahapan dilakukan secara adil dan kompetitif.

Sebagai bentuk penerapan prinsip kesetaraan dan keterbukaan, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh vendor yang memenuhi persyaratan kualifikasi tanpa diskriminasi. Pemilihan pemasok atau subkontraktor dilakukan melalui mekanisme persaingan bebas, di mana setiap vendor memiliki hak untuk mengikuti proses kualifikasi yang diselenggarakan oleh Perusahaan. Vendor yang berhasil melewati tahap kualifikasi berhak

Procurement of goods and services is part of the Company's strategic planning to meet the operational needs of users of goods and services. This procurement encompasses the entire process from needs planning to the completion of all activities to obtain goods or services effectively and efficiently. In its implementation, the Company is committed to applying the principles of transparency, accountability, and professionalism to ensure that each stage is conducted fairly and competitively.

As a form of implementing the principles of equality and openness, the Company provides equal opportunities to all vendors who meet the qualification requirements without discrimination. The selection of suppliers or subcontractors is carried out through a free competition mechanism, where each vendor has the right to participate in the qualification process organized by the Company. Vendors who successfully pass the qualification stage are entitled to become official partners in the Company's procurement of goods and services.

menjadi mitra resmi dalam pengadaan barang dan jasa Perusahaan.

Seluruh kebijakan terkait proses pengadaan barang dan jasa telah tertuang dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No. PPRE/RP/W/005/DIVSCM/P/001 tanggal 16 November 2023, yang menjadi pedoman dalam menjaga kualitas, efisiensi, dan tata kelola yang baik di setiap tahapan pengadaan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Perusahaan mengutamakan keterbukaan dalam memberikan informasi pengadaan, menerapkan pengawasan ketat untuk mencegah benturan kepentingan, serta memastikan setiap keputusan didasarkan pada evaluasi objektif dan profesionalisme. Dengan demikian, proses pengadaan tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan stakeholder serta menjaga reputasi Perusahaan sebagai entitas yang menerapkan tata kelola yang baik.

All policies related to the procurement process of goods and services are outlined in the Procurement Procedure No. PPRE/RP/W/005/DIVSCM/P/001 dated November 16, 2023, which serves as a guideline for maintaining quality, efficiency, and good governance at every stage of procurement.

As part of the commitment to Good Corporate Governance (GCG), the Company ensures that all procurement processes of goods and services are conducted with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and equality. The Company prioritizes openness in providing procurement information, implements strict supervision to prevent conflicts of interest, and ensures that every decision is based on objective evaluation and professionalism. Thus, the procurement process not only supports operational efficiency but also strengthens stakeholder trust and maintains the Company's reputation as an entity that applies good governance.

Ketentuan Umum
General Terms

1 Kewenangan Pengelolaan Pengadaan

- Pengadaan material/jasa oleh Biro Operation Control & SCM;
- Pengadaan oleh proyek.

Procurement Management Authority

- Procurement of materials/services by the Bureau of Operation Control & SCM;
- Procurement by project.

2 Penentuan Item Pengadaan Z dan non Z dan Perencanaan Pembayaran

Determination of Z and non-Z Procurement Items and Payment Planning

3 Ketentuan proses pelaksanaan pengadaan

- Persyaratan Vendor;
- Ketentuan jumlah minimal Vendor;
- Ketentuan penandatanganan evaluasi seleksi dan negosiasi.

Provisions for the procurement implementation process

- Vendor Requirements;
- Provision of the minimum number of Vendors;
- Provisions for signing, evaluation, selection and negotiation.

4 Penyusunan Kontrak

- Tahapan Reviu Kontrak;
- Proses reviu dan tanda tangan;
- Reviu dokumen kontrak;
- Bentuk jenis perjanjian yang diterbitkan oleh Perusahaan;
- Kontrak OA maupun non OA;
- Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kontrak.

Contract Drafting

- Stages of Contract Review;
- Review and signing process;
- Contract document review;
- Types of agreements issued by the Company;
- OA and non-OA contracts;
- Parties involved in contract drafting.

5 Penyusunan MSCS (Material & Service Control Sheet)

Determination of Z and non-Z Procurement Items and Payment Planning

6 Penyusunan PO

- Tahapan pembuatan PO;
- Aturan penandatanganan PO;
- Penyusunan Kontrak OA maupun non OA

PO Preparation

- Steps for creating a PO
- Purchase Order signing rules;
- Preparation of OA and non-OA Contracts

Definisi

Definition

Istilah Term	**Pengertian** Definition
Material/Jasa Non Z Material/Service Non Z	**Pengadaan oleh Biro *Operation Control & SCM* yang bersifat Pareto/Strategis/Kritikal/High Risk/ Value Potensial/Rutin dan bersifat Stock/Non Stock** Procurement by the Bureau of Operation Control & SCM which is Pareto/Strategic/Critical/High Risk/ Potential Value/Routine and Stock/Non Stock
Material/Jasa Z Material/Service Z	**Non-Pareto/Strategis/Kritikal/High Risk/Value Potensial/Rutin dan bersifat Stock/Non Stock** Pengadaan oleh Proyek yang bersifat Non-Pareto/Strategis/Kritikal/High Risk/Value Potensial/Rutin dan bersifat Stock/Non Stock
Kontrak OA OA Contract	**Outline Agreement** **Kontrak payung yang dikeluarkan oleh SCM Pusat untuk seluruh proyek PPRE, merupakan kontrak pusat dan berlaku nasional** Outline Agreement Framework contract issued by the Central SCM for all PPRE projects, constitutes a central contract and is valid nationwide.
Kontrak Non-OA Non-OA Contract	**Non-Outline Agreement** **Kontrak khusus satu (1) proyek** Non-Outline Agreement Special Contract for One (1) Project
PR PR	**Purchase Requisition (Permintaan Pembelian)** **Dokumen permintaan pengadaan** Purchase Requisition Procurement request document
PO PO	**Purchase Order (Perintah Pembelian)** **Surat pesanan yang mengacu pada kontrak dan PR** Purchase Order An order letter that refers to the contract and PR.

MSCS MSCS	**Material and Service Control Sheet** **Dokumen control pengadaan barang dan jasa yang memonitor realisasi proses pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pengadaan sampai proyek selesai** MSCS: Material and Service Control Sheet A procurement control document that monitors the realization of the procurement process according to the needs and procurement schedule until the project is completed.
Vendor Vendor	**Badan Usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, badan hukum atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. Bentuk Vendor Perusahaan yaitu Subkontraktor (Pengadaan penyedia Barang dan Jasa), Supplier (Pengadaan penyedia Barang), Mandor (Pengadaan Penyedia Jasa), Transporter dan Penyewaan Alat** Business Entities include State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises, legal entities, or individuals/legal subjects whose business activities provide goods and services. The forms of Company Vendors include Subcontractors (Procurement of goods and service providers), Suppliers (Procurement of goods providers), Contractors (Procurement of service providers), Transporters, and Equipment Rental.

Selain itu, Perusahaan menerapkan sistem pengadaan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam setiap tahapannya. Penggunaan teknologi dalam proses procurement memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap setiap transaksi, mulai dari pengajuan permintaan hingga eksekusi kontrak. Dengan sistem ini, proses pengadaan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mempermudah pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas di seluruh rantai pasok.

Perusahaan juga memastikan bahwa proses seleksi vendor dilakukan melalui mekanisme evaluasi yang ketat dengan mempertimbangkan aspek kualitas, kapasitas, pengalaman, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Setiap vendor yang tergabung dalam sistem pengadaan Perusahaan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dalam hal legalitas, sertifikasi, maupun rekam jejak kinerja. Dengan demikian, Perusahaan dapat menjamin bahwa barang dan jasa yang diperoleh memiliki kualitas terbaik, sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan, serta mampu mendukung kelangsungan operasional secara optimal.

Sebagai bentuk mitigasi risiko dalam pengadaan, Perusahaan mengimplementasikan kebijakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja vendor. Mekanisme audit dan review dilakukan untuk memastikan vendor tetap memenuhi standar yang telah ditentukan, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan membuka jalur komunikasi yang transparan antara tim pengadaan dan mitra kerja guna mendorong kolaborasi yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, Perusahaan tidak hanya memperoleh barang dan jasa yang kompetitif, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas tinggi.

In addition, the Company implements a digital-based procurement system to enhance transparency and efficiency at every stage. The use of technology in the procurement process allows real-time monitoring of each transaction, from request submission to contract execution. With this system, the procurement process becomes faster, more accurate, and well-documented, facilitating oversight and increasing accountability throughout the supply chain.

The Company also ensures that the vendor selection process is conducted through a rigorous evaluation mechanism by considering aspects of quality, capacity, experience, and compliance with applicable regulations. Every vendor involved in the Company's procurement system must meet the established standards, both in terms of legality, certification, and performance track record. Thus, the Company can guarantee that the goods and services acquired are of the best quality, according to the required technical specifications, and capable of optimally supporting ongoing operations.

As a form of risk mitigation in procurement, the Company implements policies for regular monitoring and evaluation of vendor performance. Audit and review mechanisms are conducted to ensure vendors continue to meet the predetermined standards and provide opportunities for continuous improvement. Furthermore, the Company opens transparent communication channels between the procurement team and partners to foster better collaboration. With this approach, the Company not only acquires competitive goods and services but also builds a sustainable and highly integrated business ecosystem.

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Compliance of Corporate Governance Implementation with the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Untuk terus mempertahankan dan utamanya meningkatkan penerapan prinsip GCG, Perusahaan telah membuat referensi silang terhadap penilaian ACGS untuk mempermudah perolehan data, sebagai berikut:

To continue maintaining and primarily enhancing the implementation of GCG principles, the Company has created a cross-reference to the ACGS assessment to facilitate data acquisition, as follows:

Nomor Indeks Index Number			Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
Level 1					
A.	**Prinsip A. Hak Pemegang Saham** Rights of Shareholders				
	A.1	**Hak Dasar Pemegang Saham** Basic Shareholder Rights			
		A.1.1	**Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yang berarti seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen skrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.** Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	✗	**Perusahaan tidak melakukan pembayaran dividen untuk tahun buku 2023** The company did not pay dividends for the 2023 financial year.
	A.2	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dimana peraturannya telah diinformasikan terlebih dahulu, termasuk prosedur pemungutan suara yang mengatur rapat umum pemegang saham.** Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.			

		A.2.1	**Apakah pemegang saham mempunyai kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, benefit natura, dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direksi/komisaris non-eksekutif?** Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	✅	
		A.2.2	**Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non pengendali untuk mengusulkan calon direksi/komisaris?** Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/ commissioners?	❌	
		A.2.3	**Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih direksi/komisaris?** Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	✅	
		A.2.4	**Apakah perusahaan mengadakan pemungutan suara sebelum rapat dimulai?** Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	✅	
		A.2.5	**Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan apakah pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat?** Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	✅	
		A.2.6	**Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terkini?** Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	✅	
		A.2.7	**Apakah perusahaan menyediakan informasi mengenai daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir?** Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	✅	
		A.2.8	**Apakah perusahaan menyediakan informasi mengenai daftar dewan direksi dan CEO (jika dia bukan anggota dewan direksi) yang menghadiri RUPS terakhir?** Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	✅	

		A.2.9	**Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara in-absensia?** Does the company allow voting in absentia?	✅	
		A.2.10	**Apakah perusahaan memberikan suara melalui pemungutan suara (dan bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terkini?** Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	✅	
		A.2.11	**Apakah Perusahaan mengungkapkan pihak independen yang telah ditunjuk (pemeriksa) untuk menghitung dan/ atau memvalidasi suara dalam RUPST?** Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	✅	
		A.2.12	**Apakah perusahaan mengumumkan hasil pemungutan suara RUPS/RUPSLB terkini kepada publik pada hari kerja berikutnya untuk semua keputusan yang telah ditetapkan?** Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	✅	
		A.2.13	**Apakah Perusahaan memberikan pemberitahuan mengenai RUPS dan RUPSLB setidaknya 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat?** Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	✅	
		A.2.14	**Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam panggilan RUPS/surat edaran dan/atau dokumen tambahan mengenai agenda rapat?** Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	✅	
		A.2.15	**Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara atau topik pembicaraan pada rapat umum dengan persentase tertentu?** Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/ or to request for general meetings subject to a certain percentage?	✅	
	A.3	**Pasar untuk mengendalikan perusahaan harus berfungsi secara efisien dan transparan.** Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.			

		A.3.1	**Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen skrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.** Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	✅	
	A.4	**Pelaksanaan hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi.** The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.			
		A.4.1	**Apakah perusahaan menyampaikan kebijakan atau langkah-langkahnya untuk mendorong keterlibatan pemegang saham dalam aktivitas perusahaan di luar rapat umum?** Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	✅	
	A.5	**Saham dan hak suara** Shares and voting rights			
		A.5.1	**Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara pada masing-masing kelas saham tersebut (misalnya melalui situs web perusahaan/laporan/bursa/situs web regulator)?** Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (D.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	✅	
	A.6	**Pemanggilan RUPS** Notice of AGM			
		A.6.1	**Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, misalnya, tidak ada penggabungan beberapa agenda menjadi satu keputusan yang sama?** Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.D., there is no bundling of several items into the same resolution?	✅	
		A.6.2	**Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran terbaru perusahaan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?** Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	✅	

			Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut: Does the notice of AGM/circulars have the following details:		
		A.6.3	**Apakah profil direksi/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direksi di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan?** Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/reelection included?	✅	
		A.6.4	**Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali telah teridentifikasi secara jelas?** Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	✅	
		A.6.5	**Apakah dokumen proxy telah tersedia?** Were the proxy documents made easily available?	✅	
	A.7	**Insider trading untuk mendapatkan keuntungan pribadi harus dilarang.** Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.			
		A.7.1	**Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja?** Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	✅	
	A.8	**Transaksi pihak berelasi oleh direksi dan pejabat eksekutif utama.** Related party transactions by directors and key executives.			
		A.8.1	**Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari direksi/komisaris independen untuk meninjau materi transaksi pihak berelasi (TPB) untuk menentukan apakah TPB tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham?** Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		A.8.2	**Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak ikut serta dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu jika ada konflik?** Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted	✅	

		A.8.3	**Apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pinjaman kepada direksi dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan sesuai dengan market rates?** Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
	A.9	**Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang** Protecting minority shareholders from abusive actions.			
		A.9.1	**Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa TPB dilakukan untuk memastikan bahwa TPB tersebut adil dan wajar?** Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		A.9.2	**Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan?** In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** Sustainability and Resilience				
	B.1	**Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi penting yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan, dimana hal ini dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.** Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision			
			Informasi penting terkait keberlanjutan harus disertakan Material Sustainability-related information should be specified		
		B.1.1	**Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi?** Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	✅	
		B.1.2	**Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu?** Does the company identify climate change as an issue?	✅	

		B.1.3	**Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?** Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.D. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	✅	
			Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus menyediakan metrik yang jelas dan diungkapkan secara berkala dan mudah diakses. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form.		
		B.1.4	**Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?** Does the company disclose quantitative sustainability target?	✅	
		B.1.5	**Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?** Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	✅	
		B.1.6	**Apakah perusahaan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporannya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?** Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	✅	
	B.2	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan** Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters			
		B.2.1	**Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang berdampak bagi bisnis perusahaan?** Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	✅	
		B.2.2	**Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang berdampak bagi bisnis perusahaan?** Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	✅	

	B.3	**Salah satu fungsi dari tata kelola perusahaan adalah memastikan bahwa dewan mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang signifikan dalam menjalankan fungsi utama mereka, seperti meninjau, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim.** The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks.			
			Dewan harus menilai apakah struktur permodalan perusahaan sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan ketahanannya terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios.		
		B.3.1	**Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan melakukan peninjauan setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan risiko yang dapat ditoleransi?** Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	✅	
	B.4	**Kerangka tata kelola perusahaan harus mengatur hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan wealth, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.** The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.			
			Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address:		
		B.4.1	**Keberadaan dan upaya perusahaan dalam mengatasi kesejahteraan pelanggan?** The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	✅	
		B.4.2	**Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?** Supplier/contractor selection procedures?	✅	

		B.4.3	**Upaya perusahaan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten sehingga dapat mendorong pembangunan berkelanjutan?** The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	✅	
		B.4.4	**Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat dimana mereka beroperasi?** The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	✅	
		B.4.5	**Program dan prosedur antikorupsi perusahaan?** The company's anti-corruption programmes and procedures?	✅	
		B.4.6	**Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi?** How creditors' rights are safeguarded?	✅	
		B.4.7	**Apakah perusahaan mempunyai laporan/bagian terpisah yang membahas upaya dalam mengatasi masalah lingkungan/ekonomi dan sosial?** Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	✅	
	B.5	**Apabila kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh undang-undang, maka pemangku kepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka.** Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.			
		B.5.1	**Apakah perusahaan memberikan kontak yang dapat dihubungi melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?** Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (D.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	✅	
	B.6	**Metode dalam melibatkan partisipasi karyawan pada perusahaan harus terus berkembang.** Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.			
		B.6.1	**Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya?** Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	✅	

		B.6.2	**Apakah perusahaan secara jelas menerangkan mengenai kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya?** Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	✅	
		B.6.3	**Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek?** Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures??	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
	B.7	**Pemangku kepentingan termasuk karyawan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan kekhawatiran mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan karena pengaduan ini.** Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.			
		B.7.1	**Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak yang dapat dihubungi melalui website perusahaan atau laporan tahunan.** Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report.	✅	
		B.7.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkap dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	✅	
C.	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency				
	C.1	**Struktur kepemilikan yang transparan** Transparent ownership structure			
		C.1.1	**Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik yang memiliki 5% kepemilikan saham atau lebih?** Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	✅	

		C.1.2	**Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (yang dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial?** Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	✅	
		C.1.3	**Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) oleh direksi (komisaris)?** Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	✅	
		C.1.4	**Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham manajemen senior secara langsung dan tidak langsung (dianggap)?** Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	✅	
		C.1.5	**Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, joint venture, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/(SPV)?** Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/(SPVs)?	✅	
	C.2	**Kualitas Laporan Tahunan** Quality of Annual Report			
			Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: Does the company's annual report disclose the following items:		
		C.2.1	**Tujuan perusahaan** Corporate objective	✅	
		C.2.2	**Indikator kinerja keuangan** Financial performance indicators	✅	
		C.2.3	**Indikator kinerja non keuangan** Non-financial performance indicators	✅	
		C.2.4	**Kebijakan dividen** Dividend policy	✅	
		C.2.5	**Data diri secara rinci (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direksi di perusahaan emiten lain) dari seluruh direksi/komisaris** Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/ commissioners	✅	
			Pernyataan Mengenai Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement		

		C.2.6	**Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode etik tata kelola perusahaan dan jika terdapat ketidakpatuhan, kenali dan jelaskan alasan setiap permasalahan tersebut?** Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	✅	
	C.3	**Remunerasi Anggota Dewan dan Pejabat Eksekutif Utama** Remuneration of Members of the Board and Key Executives			
		C.3.1	**Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk non-eksekutif direksi/komisaris?** Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	✅	
		C.3.2	**Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi dari masing-masing direksi/komisaris non-eksekutif?** Does the company publicly disclose [i.D. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	✅	
		C.3.3	**Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan, dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif dan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk direksi eksekutif dan CEO?** Does the company disclose its remuneration (biaya, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/ practices (i.D. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	✅	
		C.3.4	**Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direksi eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]?** Does the company publicly disclose [i.D. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	✅	
	C.4	**Pengungkapan transaksi pihak berelasi** Disclosure of related party transactions (RPT)			
		C.4.1	**Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan transaksi pihak berelasi yang penting?** Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	✅	
		C.4.2	**Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap transaksi pihak berelasi yang penting?** Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	✅	

	C.5	**Direksi dan komisaris dalam memecahkan masalah saham perusahaan** Directors and commissioners dealings in shares of the company			
		C.5.1	**Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam?** Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	✅	
	C.6	**Auditor eksternal dan Laporan Auditor** External auditor and Auditor Report			
			Apakah perusahaan audit yang sama yang digunakan untuk jasa audit dan non-audit Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services		
		C.6.1	**Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?** Are the audit and non-audit fees disclosed?	✅	
		C.6.2	**Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?** Does the non-audit fee exceed the audit fees?	✅	
	C.7	**Media komunikasi** Medium of communications			
			Apakah perusahaan menggunakan cara komunikasi berikut? Does the company use the following modes of communication?		
		C.7.1	**Laporan triwulanan** Quarterly reporting	✅	
		C.7.2	**Situs Perusahaan** Company website	✅	
		C.7.3	**Pengarahan untuk para analis** Quarterly reporting	✅	
		C.7.4	**Pengarahan media/konferensi pers** Company website	✅	
	C.8	**Pengarsipan/penyelesaian laporan tahunan/keuangan dilakukan tepat waktu** Timely filing/release of annual/financial reports			
		C.8.1	**Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun buku?** Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	✅	
		C.8.2	**Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?** Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	✅	

		C.8.3	**Apakah laporan tahunan disusun secara benar dan wajar dan apakah telah dikukuhkan oleh direksi/ komisaris dan/atau pejabat perusahaan terkait?** Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	✅	
	C.9	**Situs perusahaan** Company website			
			Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:		
		C.9.1	**Laporan/laporan keuangan (triwulanan terbaru)** Financial statements/reports (latest quarterly)	✅	
		C.9.2	**Materi diberikan dalam bentuk *briefing* kepada analis dan media** Materials provided in briefings to analysts and media	✅	
		C.9.3	**Laporan tahunan dapat diunduh** Downloadable annual report	✅	
		C.9.4	**Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB** Notice of AGM and/or EGM	✅	
		C.9.5	**Risalah RUPS dan/atau RUPSLB** Minutes of AGM and/or EGM	✅	
		C.9.6	**Anggaran dasar perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman dan anggaran dasar)** Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	✅	
	C.10	**Hubungan Investor** Investor relations			
		C.10.1	**Apakah perusahaan memberikan rincian kontak yang dapat dihubungi (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor?** Does the company disclose the contact details (D.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?	✅	
D.	**Tanggung Jawab Dewan** Responsibilities of the Board				
	D.1	**Tugas dan Tanggung Jawab Dewan** Board Duties and Responsibilities			
			Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang jelas Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy		

		D.1.1	**Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan?** Does the company disclose its corporate governance policy/ board charter?	✅	
		D.1.2	**Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan?** Are the types of decisions requiring board of directors/ commissioners' approval disclosed?	✅	
		D.1.3	**Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas?** Are the roles and responsibilities of the board of directors/ commissioners clearly stated?	✅	
			Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission		
		D.1.4	**Apakah perusahaan memiliki visi dan misi yang diperbarui?** Does the company have an updated vision and mission statement?	✅	
		D.1.5	**Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun?** Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	✅	
		D.1.6	**Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi perusahaan?** Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	✅	
	D.2	**Struktur anggota dewan** Board structure			
			Pedoman Etika atau Perilaku Perusahaan Code of Ethics or Conduct		
		D.2.1	**Apakah rincian pedoman etika atau perilaku perusahaan diungkapkan?** Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	✅	
		D.2.2	**Apakah seluruh direksi/komisaris, manajemen senior, dan karyawan diharuskan mematuhi pedoman etika ini?** Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	✅	
		D.2.3	**Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap pedoman etika atau perilaku perusahaan?** Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	✅	
			Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure & Composition		

		D.2.4	**Apakah jumlah direksi/komisaris independen minimal 50% dari dewan direksi/komisaris?** Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	✅	
		D.2.5	**Apakah perusahaan mempunyai batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun1) untuk direktur independen/ komisaris independen?** Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years1) each for its independent directors/ commissioners? 1) Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 1) The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	✅	
		D.2.6	**Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima kursi dewan yang diperuntukkan bagi seorang direksi/komisaris independen/non-eksekutif dapat menjabat secara bersamaan?** Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously?	✅	
		D.2.7	**Apakah perusahaan mempunyai direksi eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan perusahaan emiten di luar grup?** Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	❌	
			Komite Nominasi Nominating Committee		
		D.2.8	**Apakah perusahaan mempunyai Komite Nominasi?** Does the company have a Nominating Committee?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.2.9	**Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direksi/ komisaris independen?** Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.2.10	**Apakah ketua Panitia Pencalonan adalah seorang direksi/komisaris Independent?** Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.

		D.2.11	**Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?** Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.2.12	**Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun?** Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
			Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee		
		D.2.13	**Apakah Perusahaan mempunyai Komite Remunerasi?** Does the company have a Remuneration Committee?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.2.14	**Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direksi/komisaris non-eksekutif dimana mayoritasnya adalah direksi/komisaris independen?** Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners ?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.2.15	**Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan direksi/ komisaris independen?** Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.2.16	**Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?** Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.2.17	**Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun?** Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
			Komite Audit Audit Committee		
		D.2.18	**Apakah Perusahaan mempunyai Komite Audit?** Does the company have an Audit Committee?	✅	

		D.2.19	**Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direksi/ komisaris non-eksekutif dimana mayoritasnya adalah direksi/komisaris independen?** Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	✅	
			Apakah ketua Komite Audit merupakan direksi/ komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	✅	
		D.2.21	**Apakah Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Audit?** Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Audit Committee?	✅	
		D.2.22	**Apakah setidaknya salah satu direksi/komisaris independen komite mempunyai keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?** Does at least one of the independent directors/ commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	✅	
		D.2.23	**Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan pertemuan setidaknya empat kali dalam setahun?** Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	✅	
		D.2.24	**Apakah Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?** Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	✅	
	D.3	**Proses Dewan** Investor relations			
			Rapat dan kehadiran Dewan Board meetings and attendance		
		D.3.1	**Apakah rapat Direksi dijadwalkan sebelum tahun buku dimulai?** Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	✅	
		D.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat setidaknya enam kali selama setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year	✅	
		D.3.3	**Apakah setiap direktur/komisaris telah menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?** Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	✅	

		D.3.4	**Apakah perusahaan membutuhkan quorum minimal sebanyak 2/3 dari keputusan dewan?** Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	✅	
		D.3.5	**Apakah Direktur/Komisaris noneksekutif Perusahaan menyelenggarakan pertemuan terpisah setidaknya sekali selama setahun tanpa kehadiran anggota eksekutif?** Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	✅	
			Akses informasi Access to information		
		D.3.6	**Apakah kertas kerja untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Dewan Komisaris setidaknya lima hari kerja sebelum rapat Dewan Komisaris?** Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	✅	
		D.3.7	**Apakah sekretaris perusahaan berperan penting dalam mendukung Dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya?** Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	✅	
		D.3.8	**Apakah sekretaris perusahaan mendapatkan pelatihan di bidang hukum, akuntansi atau praktik sekretariat perusahaan dan mengikuti perkembangan yang relevan?** Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	✅	
			Pengangkatan dan Pemilihan Ulang Dewan Board Appointments and Re-Election		
		D.3.9	**Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris?** Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	✅	
		D.3.10	**Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru?** Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	✅	

		D.3.11	**Apakah semua Direktur/Komisaris dapat kembali dipilih setiap 3 tahun; atau 5 tahun di perusahaan terbuka di beberapa negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun2) masing-masing?** Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years2) each? 2) Jangka waktu lima tahun harus disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum pengenalan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 2) The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	✅	
			Hal-hal terkait Remunerasi Remuneration Matters		
		D.3.12	**Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau pejabat eksekutif senior?** Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	✅	
		D.3.13	**Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja untuk direktur eksekutif dan pejabat eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?** Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	✅	
			Audit Internal Internal Audit		
		D.3.14	**Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal terpisah?** Does the company have a separate internal audit function?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.3.15	**Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan?** Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		D.3.15	**Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal membutuhkan persetujuan Komite Audit?** Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.

			Pemantauan Risiko Risk Oversight		
		D.3.17	**Apakah perusahaan mengembangkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka manajemen risiko, serta meninjau efektivitas kerangka tersebut secara berkala?** Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	✅	
		D.3.18	**Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah meninjau pemantauan material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, finansial dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?** Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	✅	
		D.3.19	**Apakah perusahaan mengungkapkan risiko kunci yang dialami perusahaan (seperti risiko finansial, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, dan ekonomi)?** Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.D. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	✅	
		D.3.20	**Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kelayakan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan?** Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	✅	
	D.4	**Anggota Dewan** People on the Board			
			Ketua Dewan Board Chairman		
		D.4.1	**Apakah posisi ketua dan CEO diduduki oleh individu yang berbeda?** Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	✅	
		D.4.2	**Apakah ketua dewan merupakan direktur/komisaris independent?** Is the chairman an independent director/commissioner?	✅	
		D.4.2	**pakah ada direktur yang merupakan mantan CEO Perusahaan dalam kurun 2 tahun terakhir?** Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	✅	
		D.4.4	**Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan?** Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	✅	

			Direktur Independen Utama Lead Independent Director		
		D.4.5	**Apabila Ketua bukan pihak independent, apakah Dewan menunjuk Direktur Independen Senior/Utama, dan menjelaskan perannya?** If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	✅	
			Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies		
		D.4.6	**Apakah setidaknya satu direktur/komisaris noneksekutif memiliki pengalaman kerja di bidang yang perusahaan jalankan?** Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	✅	
	D.5	**Kinerja Dewan** Board Performance			
			Pengembangan Direktur Directors Development		
		D.5.1	**Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru?** Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	✅	
		D.5.2	**Apakah perusahaan memiliki kebijakan, praktik, serta program yang dapat mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung?** Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	✅	
			Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance		
		D.5.3	**Apakah perusahaan mengungkapkan proses perencanaan Direksi/Dewan Komisaris untuk menunjuk CEO/Presiden Direktur/Direktur Utama dan manajemen penting lainnya?** Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	✅	
		D.5.4	**Apakah Direksi/Dewan Komisaris menggelar penilaian kinerja tahunan CEO/Presiden Direktur/Direktur Utama?** Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	✅	

			Penilaian Dewan Board Appraisal		
		D.5.5	**Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian?** Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	✅	
			Penilaian Direksi Director Appraisal		
		D.5.6	**Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian?** Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	✅	
			Penilaian Komite Committee Appraisal		
		D.5.7	**Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian?** Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	✅	
Level 2 Perihal Bonus | Bonus Items					
(B)A.	**Hak pemegang saham** Rights of Shareholders				
	(B) A.1	**Hak berpartisipasi secara efektif dan memilih dalam rapat umum pemegang saham dan hak mendapatkan informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara yang mengatur rapat umum pemegang saham.** Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.			
		(B) A.1.1	**Apakah perusahaan mempraktikan pemungutan suara elektronik yang aman dan langsung dan in absentia pada rapat umum pemegang saham?** Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	✅	
(B)A.	**Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham** Equitable Treatment of Shareholders				
	(B) A.2	**Pemberitahuan RUPS** Notice of AGM			

		(B) A.2.1	**Apakah perusahaan merilis pengumuman RUPS (dengan rincian agenda dan penjelasan sirkuler), sebagaimana yang disampaikan kepada Bursa, sekurang-kurangnya 28 hari sebelum rapat diselenggarakan?** Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	✅	
(B)B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** Susainability and Resilience				
	(B) B.1				
		(B) B.1.1	**Apakah perusahaan mengungkapkan cara yang dilakukan untuk mengelola risiko dan peluang yang berhubungan dengan iklim?** Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	✅	
		(B) B.1.2	**Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutan telah diverifikasi secara eksternal?** Does the company disclose that its Sustainability Report / Sustainability Reporting is externally assured?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		(B) B.1.3	**Apakah perusahaan mengungkapkan saluran komunikasi dengan kelompok pemegang saham dan bagaimana perusahaan menanggapi perhatian pemegang saham terhadap ESG?** Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		(B) B.1.4	**Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?** Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		(B) B.1.5	**Apakah perusahaan mengungkapkan pandangan Direksi/Dewan Komisaris terhadap risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan?** Does the company disclose board of directors/ commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	✅	
		(B) B.1.6	**Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior dan kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya?** Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	✅	

		(B) B.1.7	**Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen?** Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties / institutions?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
(B)C.	**Pengungkapan dan transparansi** Disclosure and transparency				
	(B) C.1	**Kualitas Laporan Tahunan** Quality of Annual Report			
		(B) C.1.1	**Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan?** Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	✅	
(B)D.	**Tanggung Jawab Dewan** Responsibilities of the Board				
	(B) D.1	**Kompetensi dan Keberagaman Dewan** Board Competencies and Diversity			
		(B) D.1.1	**Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/ komisaris independen perempuan?** Does the company have at least one female independent director/commissioner?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		(B) D.1.2	**Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keragaman anggota Dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?** Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	✅	
	(B) D.2	**Struktur Dewan** Board Structure			
		(B) D.2.1	**Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri atas direktur/komisaris independen?** Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		(B) D.2.2	**Apakah Komite Nominasi menjalani proses identifikasi kualifikasi Direktur yang sejalan dengan tujuan strategis perusahaan?** Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
	(B) D.3	**Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan** Board Appointments and Re-Election			

		(B) D.3.1	**Apakah perusahaan menggunakan perusahaan perekrutan profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris?** Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	✅	
	(B) D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure & Composition			
		(B) D.4.1	**Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen terdiri dari lebih dari 50% anggota direksi/komisaris di perusahaan yang memiliki komisaris utama independen?** Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/ commissioners for a company with independent chairman?	✅	
	(B) D.5	**Pemantauan Risiko** Risk Oversight			
		(B) D.5.1	**Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan telah mengidentifikasi risiko-risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan?** Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	✅	
	(B) D.6	**Kinerja Dewan** Board Performance			
		(B) D.6.1	**Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko dengan level yang setara dengan Dewan?** Does the company have a separate board level Risk Committee?	✅	
Level 2 Penalti| Penalty					
(P)A.	**Hak pemegang saham** Rights of shareholders				
	(P) A.1	**Hak dasar pemegang saham** Basic shareholder rights			
		(P) A.1.1	**Apakah perusahaan gagal atau mengabaikan upaya memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham dalam hal pembayaran saham?** Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	✅	

	(P) A.2	**Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, berhak untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-Prinsip, dengan tunduk pada pengecualian-pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.** Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.			
		(P) A.2.1	**Apakah ada bukti hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya?** Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	✅	
	(P) A.3	**Hak berpartisipasi secara efektif dan memilih dalam rapat umum pemegang saham dan hak mendapatkan informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara yang mengatur rapat umum pemegang saham.** Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.			
		(P) A.3.1	**Apakah perusahaan mencantumkan materi agenda tambahan atau agenda yang tidak diumumkan ke dalam pemberitahuan RUPS/RUPSLB?** Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	❌	**Mengumumkan sesuai dengan materi agenda** Announce in accordance with the agenda materials
		(P) A.3.2	**Apakah Ketua Dewan dan Ketua seluruh Komite Dewan serta CEO tidak hadir di hampir seluruh Rapat Umum?** Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	❌	**Komite dewan serta CEO hadir dalam rapat umum** The Chairman of the Board, the Chairmen of all Board Committees, and the CEO were present at the General Meeting.
	(P) A.4	**Struktur dan pengaturan modal yang membuat pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.** Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed			
			Apakah perusahaan tidak mampu mengungkapkan keberadaan: Did the company fail to disclose the existence of:		
		(P) A.4.1	**Persetujuan pemegang saham?** Shareholders agreement?	✅	
		(P) A.4.2	**Batas maksimal pemungutan suara?** Voting cap?	✅	
		(P) A.4.2	**Hak suara ganda?** Multiple voting rights?	✅	

	(P) A.5	**Struktur dan pengaturan modal yang membuat pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.** Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed			
		(P) A.5.1	**Apakah piramida struktur kepemilikan dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat?** Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	✅	
(P)A.	**Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham** Equitable treatment of shareholders				
	(P) A.6	**Perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan perdagangan pribadi dilarang.** Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.			
		(P) A.6.1	**Apakah perusahaan pernah mencatat kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/ komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?** Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	✅	
	(P) A.7	**Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan** Protecting minority shareholders from abusive action			
		(P) A.7.1	**Apakah terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir?** Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	✅	
		(P) A.7.2	**Apakah ada RPT yang dikategorikan sebagai bantuan keuangan (yaitu yang tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya?** Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	✅	
(P)B.	**Peran pemangku kepentingan** Role of stakeholders				
	(P) B.1	**Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.** The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.			
		(P) B.1.1	**Apakah ada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/ komersial/persaingan usaha atau masalah lingkungan?** Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/insolvency/ commercial/ competition or environmental issues?	✅	

	(P) B.2	**Ketika para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur.** Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.			
		(P) B.2.1	**Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang disyaratkan untuk peristiwa material?** Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	✅	
		(P) B.2.2	**Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan greenwashing?** Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	✅	
(P)C.	**Pengungkapan dan transparansi** Disclosure and transparency				
	(P) C.1	**Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan** Sanctions from regulator on financial reports			
		(P) C.1.1	**Apakah perusahaan menerima "opini wajar tanpa pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya?** Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	✅	
		(P) C.1.2	**Apakah perusahaan menerima "opini tidak wajar" dalam laporan audit eksternalnya?** Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	✅	
		(P) C.1.3	**Apakah perusahaan menerima "opini tidak memberikan pendapat" dalam laporan audit eksternalnya?** Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	✅	
		(P) C.1.4	**Apakah perusahaan dalam satu tahun terakhir telah merevisi laporan keuangan karena berbagai alasan selain perubahan kebijakan akuntansi?** Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	✅	
(P)D.	**Tanggung jawab Dewan** Responsibilities of the Board				
	(P) D.1	**Kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, dan hukum yang berlaku** Compliance with listing rules, regulations and applicable laws			
		(P) D.1.1	**Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan regulasi pencatatan selain peraturan pengungkapan selama satu tahun terakhir?** Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	✅	

		(P) D.1.2	**Apakah ada contoh di mana direktur/komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola?** Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	✅	
	(P) D.2	**Struktur Dewan** Board structure			
		(P) D.2.1	**Apakah Perusahaan memiliki direktur/komisaris independen yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua periode jabatan masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? Masa jabatan lima tahun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011.** Does the Company have any independent directors/ commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (which ever is higher) in the same capacity? The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	✅	
		(P) D.2.2	**Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar keterangan semua direktur mereka sebagai pihak independen, non-eksekutif, dan eksekutif?** Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	✅	
		(P) D.2.3	**Apakah perusahaan memiliki direktur/non-eksekutif/ komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima dewan direksi perusahaan publik?** Does the company have any independent directors/non-executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	✅	
	(P) D.3	**Audit Eksternal** External Audit			
		(P) D.3.1	**Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra dari auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)?** Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	✅	
	(P) D.4	**Struktur dan komposisi Dewan** Board structure and composition			
		(P) D.4.1	**Apakah ketua pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir?** Has the chairman been the company CEO in the last three years?	✅	

		(P) D.4.2	**Apakah direktur/komisaris non-eksekutif menerima opsi, saham kinerja, atau bonus?** Has the chairman been the company CEO in the last three years?	✅	
Lampiran Appendix					
Apakah pemegang saham berhak berpartisipasi dalam: Do shareholders have the right to participate					
A.2.1			**Perubahan konstitusi perusahaan?** Amendments to the company's constitution?	✅	
A.2.2			**Otorisasi saham tambahan?** The authorisation of additional shares?	✅	
A.2.3			**Pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang berakibat pada penjualan perusahaan?** The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?	✅	
B.1.1			**Apakah saham biasa atau saham biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham?** Does the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	✅	
B.3.1			**Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang direktur/komisaris dan karyawan untuk mengambil keuntungan dari informasi yang tidak tersedia secara umum di pasar?** Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	✅	
B.4.1			**Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan direktur/komisaris untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam transaksi dan benturan kepentingan?** Does the company have a policy requiring directors/commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	✅	
D.2.6			**Rincian kehadiran setiap direktur/komisaris dalam semua rapat direktur/komisaris yang diadakan sepanjang tahun.** Attendance details of each director/commissioner in all directors/commissioners meetings held during the year.	✅	

✅ = **terpenuhi** | ❌ = **tidak terpenuhi** | ➖ = **tidak sesuai/tidak dapat diterapkan**
✅ = comply | ❌ = not comply | ➖ = not applicable

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Implementation of the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI)

Berikut disampaikan Rekomendasi dan Panduan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 dan penerapannya oleh Perusahaan.

The following presents the Recommendations and Guidelines in the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) 2021 and its implementation by the Company.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommen-dation	**Panduan** Guideline	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Implementation
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners				
	1.1 **Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Roles and Responsibilities of the Board of Directors				
		1.1.1	**Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:** berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: competitive and focused on long-term performance; ethical and responsible in running a business; contribute positively to society and the environment; and the ability to survive and grow (corporate resilience)	✅	
			1.1.1.1 **Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas.** The Board of Directors realizes high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of ethics that gives birth to a corporate culture with integrity.	✅	
			1.1.1.2 **Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi.** The Board of Directors fosters a corporate culture that ensures that employees understand their responsibility to behave in accordance with corporate values and high standards of business ethics.	✅	

			1.1.1.3	**Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.** The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities. The Board of Directors has a clear strategic plan in carrying out corporate social and environmental responsibility.	✅	
			1.1.1.4	**Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional.** The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	✅	
		1.1.2	**Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.** The Board of Directors must ensure that the mission, vision, objectives, objectives, strategies, and annual and medium-term plans of the corporation are consistent with the long-term objectives, by making effective use of innovation and technology.		✅	
			1.1.2.1	**Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.** When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of cutting-edge technology to improve competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	✅	
			1.1.2.2	**Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi.** The Board of Directors prioritizes and prioritizes a corporate culture that includes innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operational oversight.	✅	
			1.1.2.3	**Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra.** The Board of Directors drives innovation that enhances long-term value creation for businesses in a changing environment. Such innovations can include designing innovative business models, products and services, promoting research, improving production and operations processes, and collaborating with partners.	✅	

		1.1.3	**Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.** The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the company's vision, mission, objectives, objectives, and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.		✅	
		1.1.4	**Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.** The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.		✅	
			1.1.4.1	**Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai.** The Board of Directors ensures that everyone involved in the preparation and disclosure of corporate information has the relevant knowledge, skills, and experience, as reflected among other things by relevant professional certifications issued by reputable institutions. In addition, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	✅	
			1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; Pendapat Komite Audit; Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving the disclosure of information (including for periodic disclosure of financial information), the Board of Directors considers all of the following factors: The results of the evaluation of the accuracy of the design and the effectiveness of the implementation of the internal control system; External auditors' opinions on financial statements, observations of internal control systems, and other observations through other sources; Audit Committee Opinion; Consistency with goals, strategies, and policies.	✅	
			1.1.4.3	**Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi.** The Board of Directors submits a report commenting on the Quarterly Financial Statements and is published in conjunction with the Quarterly Financial Statements so that it is beneficial for investors and analysts who will review the fundamental and financial performance of the corporation.	✅	

		1.1.5	**Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.** The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared as appropriate.		✅	
			1.1.5.1	**Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global.** Sustainability reports are prepared based on a reporting framework that is appropriate to the size and complexity of the corporation and meets national and/or global standards.	✅	
			1.1.5.2	**Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan.** Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	✅	
		1.1.6	**Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.** The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with the needs and priorities of the corporation's business, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.		✅	
			1.1.6.1	**Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal.** The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	✅	
			1.1.6.2	**Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI.** The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	✅	
			1.1.6.3	**Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data.** The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures, including protection against data security and confidentiality.	✅	
		1.1.7	**Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.** For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.		❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		1.1.8	**Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.** The Charter of the Board of Directors is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of the role of the Director individually, which can be regulated in the Charter of the Board of Directors or by decree of the Board of Directors.		✅	

		1.1.9		**Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.** The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and proven to have committed wrongdoing.	✅	
	1.2	**Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya** Performance Appraisal - Its Board of Directors and Members				
		1.2.1		**Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.** The Board of Commissioners conducts an objective and independent annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	✅	
			1.2.1.1	**Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris.** The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. The results of the assessment itself are submitted to the Board of Commissioners for evaluation and if necessary adjusted to the assessment of the Board of Commissioners.	✅	
			1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris.	✅	
			1.2.1.2	The self-assessment policy or other assessment policy is based on the specific, measurable, achievable, and relevant assessment benchmarks and in accordance with those determined by the Board of Commissioners based on the consideration of the Nomination and Remuneration Committee and as the basis for the assessment of the accountability of the Board of Directors regarding the level of success of the Corporation in achieving performance targets. The selected benchmark is included in the employment agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	✅	
			1.2.1.3	**Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.** The remuneration scheme in the form of shares given to Directors, Commissioners, and employees must be approved by shareholders.	✅	
			1.2.1.4	**Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.** he extension of the director's term of office is based on the results of a satisfactory performance evaluation of his contributions.	✅	

		1.2.2	**Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.** The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.		❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
			1.2.2.1	**Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan.** The Board of Commissioners ensures that the evaluation of the performance of the President Director is based on predetermined criteria that have been communicated to him in advance. Performance criteria or evaluations should incentivize the President Director to carry out his role in supporting the achievement of corporate objectives and sustainable value creation.	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
			1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama.	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.

			1.2.2.2	The Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee conducts an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results (including areas of development) of the performance evaluation to the President Director.	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
			1.2.2.3	**Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.** The Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee approves the performance evaluation criteria for other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on predetermined performance evaluation criteria.	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
	1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners				

		1.3.1	**Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.** The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of corporations. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors on the management of its implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are very important to the corporation, set out in the articles of association of the corporation.	✅	
		1.3.2	**Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan** The types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	✅	
		1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	✅	

		1.3.3	Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicities, religions, races, between groups and genders. The Board of Commissioners ensures that the process of nominating and electing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	✅	
		1.3.4	**Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.** The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviewing the reporting on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	✅	

		1.3.5	Dewan Komisaris: mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners: submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee that performs the remuneration function, the amount of remuneration of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in line with the sustainable development of the corporation and the long-term interests of the corporation and shareholders; periodically review the remuneration system of the Board of Directors and the Board of Commissioners.		✅	
		1.3.6	**Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.** The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.		✅	
			1.3.6.1	**Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen.** The Board of Commissioners ensures that periodic evaluations are carried out on the implementation of corporate governance policies either independently or using independent external consultants.	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
		1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.		✅	
		1.3.7	The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the company's objectives, objectives, and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.		✅	
			1.3.7.1	**Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (risk appetite) korporasi.** The Board of Commissioners understands the nature and scope of the corporation's key risks, and periodically reviews and approves the risk appetite of the corporation.	✅	

			1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (risk appetite) korporasi; **kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (early warning signals) atas risiko material;** **kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun.** The Board of Commissioners monitors and delivers input to ensure that: the establishment and implementation of risk management policies is consistent with the objectives, objectives, strategies, and risk appetite of the corporation; Risk management policies can provide early warning signals for material risks; Risk management policies are reviewed periodically, for example annually.	✅	
			1.3.7.3	**Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal.** The Board of Commissioners monitors and provides input so that key risks are identified through consideration of internal and external factors.	✅	
			1.3.7.4	**Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat.**The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risk has been assessed, and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	✅	
			1.3.7.5	**Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi.** The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of risk management, the internal control system of the corporation.	✅	
		1.3.8	**Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.** The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the accounting and corporate financial reporting system, as well as the independence of internal and external audit functions.		✅	

			1.3.8.1	**Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif.** Prior to approving the financial statements, the Board of Commissioners received a statement from the President Director and the Chief Financial Officer of the corporation, that in their opinion, the financial records of the entity have been properly managed and the financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards and present reasonably the financial position and performance of the corporation and that their opinion is based on a properly designed internal risk management and control system and implemented effectively.	✅	
		1.3.9	**Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.** The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures its integrity, as well as oversees the corporation's disclosure and communication processes..	✅	
		1.3.10	**Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.** The Charter of the Board of Commissioners is periodically reviewed.	✅	
		1.3.11	**Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.** The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and proven to have committed wrongdoing.	✅	
		1.3.12	**Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.** Independent Commissioners are expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	✅	

			1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, then the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or a senior Independent Commissioner (if the Independent Commissioner is more than one person) to carry out the role of the President Commissioner for the duties of the President Commissioner that has a potential conflict of interest with the affiliated parties. The criteria for appointing senior Independent Commissioners are: able to convey opinions/arguments constructively to the President Commissioner; compared to other commissioners, have more knowledge about the corporation, including its performance, markets, and stakeholders; able to provide a balanced view/thought on issues and concerns from the majority shareholders.	✅	
			1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengananggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In carrying out his role as a member of the Board of Commissioners, the Commissioner shall be independent to: Act in the best interests of the corporation; Monitor the conflict of interest between the corporation and the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or controlling shareholders; To pay independent attention to the views of minority shareholders and other stakeholders; and Encourage dialogue between management, shareholders, and other stakeholders.	✅	
			1.3.12.3	**Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir.** The corporation disclosed the reason for the termination of the duties of independent commissioners that occurred before the end of the term of office.	✅	

		1.3.13		**Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.** The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows for a wide range of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agendas. In addition, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	✅	
			1.3.13.1	**Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi.** The details of the Chief Commissioner's duties are disclosed in the annual report and the corporate website.	✅	
			1.3.13.2	**Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris.** The President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among the members of the Board of Commissioners, chairs meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in dealings with outside the Board of Commissioners.	✅	
			1.3.13.3	**Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan.** Former President Director and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioners. There needs to be a gap period of 2 (two) years to be reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that the former President Director/member of the Board of Directors needs to be the President Commissioner, then the Board of Commissioners shall provide reasons and explanations in the Annual Report.	✅	
	1.4	**Pembentukan Komite** Formation of the Committee				
		1.4.1		**Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.** The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Management Monitoring Committee.	✅	

			1.4.1.1	**Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.** For a Committee that is not required by law, if it does not have a Committee, the corporation discloses the facts and discloses the process used to ensure that the functions of the Committee are properly carried out by the Board of Commissioners.	✅	
		1.4.2	**Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.** The Board of Commissioners ensures that the members of the Audit Committee are fully independent and that other committees formed by the Board of Commissioners are a majority of independent parties, and that all committee members are competent, committed, and have adequate authority to carry out their roles effectively and independently.		✅	
			1.4.2.1	**Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semuas wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan.** The Committee has a charter that clearly defines its role and gives it all the necessary authority to carry out its role. These powers include, among other things, the right to obtain information, to meet with relevant parties in connection with the performance of their duties (with or without the presence of management), and to seek advice from independent external consultants/experts if the committee deems necessary.	✅	
		1.4.3	**Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.** To ensure that the monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner shall not be the chairman of the Audit Committee, except in exceptional circumstances that must be described in the annual report.		✅	
	1.5	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya** Performance Assessment - Board of Commissioners and Its Members				
		1.5.1	**Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.** The Board of Commissioners conducts an objective annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.		✅	

			1.5.1.1	**Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan.** The Board of Commissioners can have a self-assessment policy to assess the performance as a Board as a whole.	✅	
			1.5.1.2	**Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris.** The self-assessment policy or other assessment policy is based on specific, measurable, achievable, and relevant benchmarks or assessment criteria and in accordance with those set by the Board of Commissioners.	✅	
			1.5.1.3	**Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.** The extension of the term of office of the Commissioner is based on the results of a satisfactory performance evaluation of his contributions.	✅	
			1.5.1.4	**Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur.** The Board of Commissioners engages independent external consultants periodically at least once during the term of office, to facilitate an objective and honest evaluation of the performance of the Board of Commissioners.	✅	
	1.6	**Benturan Kepentingan** Conflict of Interest				
		1.6.1	**Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.** Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee exercising the nomination function, prior to accepting a new appointment as a director or commissioner of a public corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.		✅	
			1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris.	✅	
			1.6.1.1	The Board of Commissioners ensures clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who serve or wish to serve as directors or commissioners in other corporations. The policy shall establish the permitted appointments and the number of permitted corporations in which they are permitted to simultaneously serve as directors or commissioners.	✅	

		1.6.2	**Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.** The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest between management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. The Commissioner who has a conflict of interest does not participate in monitoring and decision-making on potential conflicts of interest involving the Commissioner or the Commissioner's affiliates concerned.		✅	
			1.6.2.1	**Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut.** The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest do not participate in decision-making related to (abstain) from the conflict of interest.	✅	
			1.6.2.2	**Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya.** Each member of the Board of Commissioners shall immediately inform the Board of Directors and the Board of Commissioners if there is a potential conflict of interest, including as a result of his or her position as a consultant or officer in the customer's company, suppliers, creditors, or other business partners.	✅	
			1.6.2.3	**Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan.** All members of the Board of Directors immediately disclose their potential conflict of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision-making in the event that they have a conflict of interest.	✅	
			1.6.2.4	**Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan.** In its report, the Board of Commissioners informed the GMS that there was a conflict of material interests that occurred along with its treatment. A conflict of material interests that is not just temporary can result in the termination of his position as a member of the council.	✅	
	1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** Improving the Competence of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners				

		1.7.1	**Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.** The Board of Commissioners ensures that the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards and other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.		✅	
			1.7.1.1	**Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka.** The Board of Directors ensures that the newly appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners receive a formal and adequate introductory program and all information relevant to their roles and responsibilities.	✅	
			1.7.1.2	**Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.** Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and ongoing training and knowledge development programs.	✅	
			1.7.1.3	**Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi** Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly receive accurate, timely and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations and standards, other applicable obligations, risk factors, and the business environment of the corporation	✅	
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners					
	2.1	**Komposisi Direksi** Composition of the Board of Directors				

		2.1.1		**Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunersi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.** In determining candidates for directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to determine qualified candidates.	✅	
		2.1.2		**Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.**The Board of Commissioners ensures that the criteria in selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities, and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	✅	
			2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: identitas calon dan alasan pengangkatan; kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; lama masa jabatan; kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan setiap kepemilikan saham dalam korporasi.	✅	

			2.1.2.1	Information about the candidates for the Board of Directors must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the date of the invitation of the GMS until the holding of the GMS and can be downloaded through the Public Company website and/or e-GMS, including: the identity of the candidate and the reason for appointment; core competencies, qualifications, and professional background; current positions in other corporations, as well as prominent roles in nonprofit/charitable organizations; factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; length of tenure; attendance at the meeting of the Board of Directors (except for new Directors); and any shareholding in the corporation.	✅	

			2.1.2.2	**Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi.** The composition of the Board of Directors is formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to properly fulfill the role of the Board of Directors.	✅	
			2.1.2.3	**Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.** The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the corporation and its effectiveness in decision-making.	✅	
			2.1.2.4	**Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi.** There is at least one director who has previous experience in the main sectors in which the corporation operates.	✅	
			2.1.2.5	**Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut.** Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting, as reflected, among others, by professional certifications issued by accounting professional associations recognized by the government and registered as members of the professional association.	✅	
		2.1.3	**Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.** The corporation's policy on diversity in the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.		✅	
			2.1.3.1	**Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris.** The Corporation reports in its current Annual Report on the diversity of its Board of Directors and Board of Commissioners, its measurable composition targets and the progress made in achieving those targets. The information should include references to how diversity is achieved through proper succession planning on the Board of Directors and Board of Commissioners.	✅	

		2.1.4	**Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.** The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to result in the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.		✅	
			2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: identitas calon dan alasan pengangkatan; kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; lama masa jabatan; kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan setiap kepemilikan saham dalam korporasi Information about the prospective Commissioners must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the date of the invitation of the GMS until the holding of the GMS and can be downloaded through the Public Company website and/or e-GMS, including: the identity of the candidate and the reason for appointment; core competencies, qualifications, and professional background; current positions in other corporations, as well as prominent roles in nonprofit/charitable organizations; factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; length of tenure; attendance at meetings of the Board of Commissioners and committees (except for new Commissioners); and	✅	
			2.1.4.2	**Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan.** If the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, relevant information about the independent external consultant shall be disclosed in the annual report, including information regarding independence and conflicts of interest.	✅	
		2.1.5	**Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.** The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix that has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate's profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.		✅	

		2.1.6	**Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.** The composition of the Board of Commissioners should be structured in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.		✅	
			2.1.6.1	**Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi** At least one Commissioner has prior experience in the main sector in which the corporation operates	✅	
			2.1.6.2	**Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi.** The determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the condition of the corporation.	✅	
		2.1.7	**Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.** In order to enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited term of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate point of view.		✅	
			2.1.7.1	**Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.** Former President Directors/members of the Board of Directors can enter the Board of Commissioners as Independent Commissioners only under exceptional conditions and there must be a gap period between these positions of at least 2 (two) years.	✅	
			2.1.7.2	**Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.** Former Independent Commissioners can be reappointed as Independent Commissioners only in exceptional circumstances and there must be a gap period between the positions of at least 2 (two) years.	✅	

			2.1.7.3	**Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris.** The term of office of the Independent Commissioner must not exceed the term of office of 9 (nine) years. For corporations with a term of office of 5 (five) years, it must not exceed the 10 (ten) year limit. After nine/ten years, an Independent Commissioner can continue to serve only as a Commissioner.	✅	
		2.1.8	**Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris** To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners		✅	
			2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya;	✅	

			Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut; secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris; menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	✅	
		2.1.8.1	The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not limited to Limited to: develop guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to corporations to carry out their responsibilities effectively. The guidelines include, among others: In appointing the president commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a description of the job specifications, including the requirements for time commitment that also takes into account the need for time commitment in times of crisis. The existence of other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be immediately reported to the Board of Commissioners and their impact described in the next annual report; In the appointment of commissioners, the Nomination and Remuneration Committee determines the terms and conditions for the appointment of commissioners. These terms and conditions are available for review. The expected time commitment is stated in the Letter of appointment of the members of the Commissioner and the members of the Commissioners must have sufficient time to meet the expected time commitment. The existence of any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment, along with an indication of the time commitment required and the Board of Commissioners must be notified if there is a change to such commitments;	✅	

			2.1.8.1	proactively lead and be responsible for the development, implementation, and ongoing review of the succession planning of the Board of Directors and Board of Commissioners; uphold the principle of independence in dealing with conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in the performance of the Committee's duties; Consider and be responsible for appointing nominated independent consultants, including selection and requirements in their assignment, as well as disclosing the identity and cost of consultancy services.	✅	
	2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners				
		2.2.1		**Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.** The remuneration policy of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The remuneration of the Board of Directors must be proposed, through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and performance of the corporation.	✅	
			2.2.1.1	**Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.** Remuneration policies are reasonable and fair, both in structure and quantity, and are determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourage competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	✅	
			2.2.1.2	**Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*).** The Corporation has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and in line with the achievement of the company's long-term interests, such as the following performance measures: stock ownership options, deferred bonuses, provision of partial or full return of bonuses/ incentives that have been paid (clawback).	✅	

			2.2.1.3	**Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi.** The Board of Directors does not receive any other facilities other than the facilities that have been provided based on the General Meeting of Shareholders of the corporation.	✅	
		2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy of the members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards the sustainable development of the corporation and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and performance of the corporation. In addition, his position as President Commissioner and chairman and his membership in committee-D must also be considered.		✅	
			2.2.2.1	**Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi.** The remuneration of the Board of Commissioners must be in the form of fixed remuneration. If the members of the Board of Commissioners are given performance-related remuneration, the basis for the award must be related to the long-term development of the corporation and different from the members of the Board of Directors.	✅	
			2.2.2.2	**Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus.** Independent Commissioners may not accept stock options, performance-linked shares, or bonuses.	✅	
		2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the merit, qualifications and competencies of the directors and commissioners with regard to the performance of the corporation's operations, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a fair and transparent procedure in place to establish the remuneration policies of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.			✅	

			2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan; mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	✅	
			2.2.3.1	In carrying out its role of the Nomination and Remuneration Committee: determine the appropriate and balanced proportion between the fixed and performance-related remuneration components, the direct or deferred remuneration components. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of the company's long-term performance. Remuneration incentives are ensured in accordance with corporate risk policies. In addition, there is a determination of the upper limit of remuneration and the upper limit is disclosed in the annual report; consider whether directors and commissioners are eligible to receive annual bonuses and/or allowances under long-term incentive schemes;	✅	

			2.2.3.1	consider whether directors and commissioners are eligible to receive annual bonuses and/or allowances under long-term incentive schemes; carefully consider the compensation obligations (including pension contributions and all other components) to which the Director/Commissioner is entitled if dismissed early. The goal is to avoid rewarding poor performance; consider the consequences of pension obligations and other long-term benefits for Directors and Commissioners for corporations, including the impact of such increases in remuneration and other changes, in particular for Directors and Commissioners who are nearing retirement; uphold the principle of independence in dealing with conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in the performance of the Committee's duties; Consider and be responsible for appointing remuneration independent consultants, including the selection and requirements in their assignment, as well as disclosing the identity and cost of consultancy services.	✅	
3	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners					
	3.1	**Sifat Hubungan Kerja** Nature of Working Relationshiprs				
		3.1.1		**Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.** There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	✅	
		3.1.2		Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	✅	
		3.1.3		Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	✅	

			3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/ anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/Komisaris/anggota komite; Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing.	✅	
			3.1.3.1	The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: Ensuring good information flow between the Board of Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; monitoring the development of corporate governance, including ensuring that the charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees are fully implemented, assisting and advising the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations; Managing all meeting needs of the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Directors with the Board of Commissioners, committees established by the Board of Commissioners, attending and recording minutes of all meetings and facilitating communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners meetings are accurately recorded in the minutes; Organize and facilitate orientation of new Directors/ Commissioners/committee members and professional development of Directors/Commissioners/committee members; Manage investor relations activities to maintain and improve communication between the corporation and shareholders/ investors, both local and foreign.	✅	

			3.1.3.2	**Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya.** Each Director and Commissioner can communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.	✅	
			3.1.3.3	**Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi.** The Board of Commissioners gives consideration to the Board of Directors in the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.	✅	
	3.2	**Akses informasi Dewan Komsaris** Access to Information on the Board of Commissioners				
		3.2.1		**Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.** The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	✅	
			3.2.1.1	**Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait.** The Board of Commissioners has a process that enables members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and relevant senior management.	✅	
			3.2.1.2	**Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut.** The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners of major events that are material and important regarding the condition and performance and management of the corporation. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss the event.	✅	
			3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.	✅	
			3.2.1.3	Between Board meetings, the Board of Commissioners liaises regularly with the Board of Directors to keep them informed of corporate developments that require the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can perform its duties more effectively.	✅	

	3.3	**Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation				
		3.3.1	**Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.** The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.		✅	
			3.3.1.1	**Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya.** The Board of Directors and Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and inter-shareholder relationships of the corporation, and consider their impact on control of the corporation, including written and unwritten family agreements as controlling shareholders, agreements between shareholders, or policies of the business group of which the corporation is a part.	✅	
			3.3.1.2	**Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi.** The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and inter-shareholder relationships of the corporation do not affect the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, (including in relation to the succession plan of the Board of Directors) in the best interest of the corporation.	✅	
			3.3.1.3	**Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi.** The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is properly disclosed when there are conditions that impact control over the corporation.	✅	
4	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and Responsible Behavior					
	4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku** Code of Ethics and Conduct				

		4.1.1	**Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:** Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	✅	
			This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: Act in the best interests of the corporation; Act honestly and with high standards of integrity; Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and care; Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines; Not be involved or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation; Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers; Not take advantage of his position or the opportunities resulting from his position for personal gain;	✅	
		4.1.1	Avoid the act of requesting or receiving from a third party payments, gratuities or other benefits for oneself or for another person which creates a conflict of interest/provides benefits to a third party in violation of statutory regulations; Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	✅	

		4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and anti-money laundering and terrorism financing terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with (antifraud), involvement in politics by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other relevant standards. other relevant standards.		✅	
			4.1.2.1	**Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.** The Board of Directors develops and establishes a system that can be used as an effort to prevent money laundering and terrorism financing, anti-corruption, offering or accepting bribes and other payments or inducements to perform acts that violate laws and regulations or are unethical.	✅	
			4.1.2.2	**Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan.** The Board of Directors communicates anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption policies by providing training to staff as well as working to extend anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption efforts to stakeholders.	✅	
			4.1.2.3	**Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris.** Any material violation of the anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption policies must be informed to the Board of Directors and the Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.	✅	
			4.1.2.4	**Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris.** The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political engagement, which includes lobbying and donations to political causes or candidates where permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored and regularly reviewed by the Board of Commissioners.	✅	
	4.2	**Nilai-nilai dan Budaya Organisasi** Organizational Values and Culture				

		4.2.1	**Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilainilai korporasi** Corporations articulate, grow and express corporate culture and values		✅	
			4.2.1.1	**Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku.** The Corporation fosters a corporate culture that ensures that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities to behave in accordance with the code of ethics and conduct.	✅	
			4.2.1.2	**Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi.** There is adequate training and socialization at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees of the above-mentioned corporations for all aspects related to corporate culture, values and ethics.	✅	
			4.2.1.3	**Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat.** There is an assessment and monitoring program in place so that all Directors, Board of Commissioners, and all employees of the corporation understand the relevant code of conduct and apply it effectively to avoid the corporation's involvement in inappropriate behavior.	✅	
	4.3	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya** Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values and Culture				
		4.3.1	**Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.** The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.		✅	
			4.3.1.1	**Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik.** Corporations have whistleblowing guidelines that can be used to encourage the reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical, which also includes a guideline on how the corporation protects good faith whistleblowers.	✅	

			4.3.1.2	**Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku.** The Corporation ensures that the Board of Commissioners and committees are promptly notified of any material breach of the code of ethics and conduct	✅	
			4.3.1.3	**Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran.** The Corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are promptly notified of any material incidents reported under the whistleblowing policy.	✅	
			4.3.1.4	**Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan. Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.** The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary action, including dismissal. If there is a violation, the Board of Directors must take preventive action so that the violation does not recur.	✅	
5	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control, and Compliance					
	5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Internal Control and Compliance				
		5.1.1		**Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.** The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	✅	

			5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya; Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Periodic reviews conducted by the Board of Directors specifically consider: Changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, the role of internal audit functions, and other assurance providers; The coverage and frequency of communication of monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) enabling them to comprehensively assess the condition of internal controls and their effectiveness in risk management; Occurrence of failures or deficiencies in internal controls found during the reviewed period and the extent of contingency impacts that have occurred, can occur, or may occur in the future, materially affecting the corporation's financial condition or performance; and The effectiveness of internal controls related to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.	✅	
			5.1.1.2	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi.	✅	
			5.1.1.2	The Board of Directors ensures that the corporation has a function responsible for continuously monitoring changes in various applicable laws and regulations related to its operations and regulations in general, and has a system to ensure the corporation's compliance with applicable laws and regulations and internal corporate regulations.	✅	

	5.2	**Manajemen Risiko** Risk Management				
		5.2.1	**Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.** Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.		✅	
			5.2.1.1	**Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif** The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and being a role model in terms of controlling and managing risks in business and operational activities to instill, strengthen, and develop a risk-aware culture based on compliance and effective internal controls.	✅	
			5.2.1.2	Direksi mengungkapkan: risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan **apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut** The Board of Directors discloses: the key risks faced by the corporation and their management; and whether there are material exposures to environmental or social risks, and if so, how these risks are managed or the intentions regarding managing the risks.	✅	
			5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksanaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.	✅	

			5.2.1.3	The Board of Directors ensures the alignment of the internal control system and risk management framework with the characteristics of the corporation's needs and business processes so that the processes of internal control and risk management for all types of risks faced by the corporation, including communication and reporting on risks, risk management, its examination, and effectiveness, can be effectively implemented in line with stakeholders' expectations.	✅	

			5.2.1.4	**Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan *cyber*, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.** The Board of Directors ensures that the risk governance process in Information Technology, including disruptions, cyber security, and disaster recovery, is in place to ensure that all key risks are identified, managed, and reported to the Board of Commissioners.	✅	
		5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.		✅	
			5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (fraud risk); mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa dating; menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan	❌	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut

			5.2.2.1	The role of the Risk Management Monitoring Committee includes: Monitoring corporate performance against the risk management framework, including ensuring that the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; Monitoring controls over key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; Reviewing any material events involving fraud or significant weaknesses in corporate risk controls, and extracting lessons learned to prevent recurrence in the future; Receiving reports from the internal auditor on the adequacy of the corporate risk management processes; Receiving reports from management on new and emerging risk sources and the risk controls and mitigation measures implemented by the Board of Directors to address those risks; Formulating recommendations to the Board of Commissioners regarding changes to the entity's risk management framework or the risk appetite approved by the Board of Commissioners; and Overseeing the corporate insurance program, taking into account corporate business and insurable risks.	❌	PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
			5.2.2.2	**Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif.** The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent. Among its members, there are individuals with the necessary technical expertise and adequate understanding of the industry in which the entity operates, enabling them to fulfill the committee's mandate effectively.	❌	**PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut** PP Presisi does not yet have a specific policy regulating that policy.
	5.3	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** Integration of Governance, Risk Management and Compliance				
		5.3.1	**Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.** The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.		✅	
			5.3.1.1	**Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.** The Board of Directos ensures coordination and enhancement of capabilities among the main GRC systems, which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management, and internal audit systems, to keep the corporation on track towards achieving its goals.	✅	

		5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.		✅	
	5.4	**Audit Internal** Internal Audit				
		5.4.1	**Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.** The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.		✅	
			5.4.1.1	**Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi.** Internal audits are conducted objectively and independently from corporate management and the functions they audit. Therefore, Internal Audit functionally reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and the Board of Commissioners, and can communicate and meet directly with the Audit Committee and the Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	✅	
			5.4.1.2	**Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif.** The Board of Commissioners through the audit committee ensures that the internal audit function has the authority, resources, and access to adequate information to perform its role effectively.	✅	
			5.4.1.3	**Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal.** The Board of Commissioners through the audit committee ensures that the internal audit function has the authority, resources, and access to adequate information to perform its role effectively.	✅	

			5.4.1.4	**Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal.** The Audit Committee reviews the effectiveness of the internal audit implementation and evaluates the performance of Internal Audit annually, presenting the results to the Board of Commissioners. Every three years, considering the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of Internal Audit.	✅	
			5.4.1.5	**Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.** The internal audit creates an audit plan, involving the President Director, the Board of Commissioners with the consideration of the Audit Committee. The internal audit plan is presented to the Board of Directors and the Board of Commissioners for approval.	✅	
			5.4.1.6	**Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi.** The Audit Committee ensures that the implementation of internal audits is conducted in accordance with applicable professional internal audit standards and upholds the profession's code of ethics as well as the organization's code of ethics.	✅	
6	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency					
	6.1	**Kebijakan Pengungkapan** Disclosure Policy				
		6.1.1		**Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi** The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	✅	
		6.1.2		Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasai harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner regarding relevant material information about the corporation must be fulfilled	✅	
			6.1.2.1	**Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.** The corporation has and discloses a written policy for carrying out continuous disclosure obligations based on applicable regulations.	✅	

	6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** Financial and Sustainability Reports				
		6.2.1	**Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.** The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.		✅	
			6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim; peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. Disclosure of the system and procedures should at least include: Internal controls over financial reporting, including interim financial statements; The roles of risk management/compliance/management oversight functions and internal audit function in ensuring the integrity of interim financial statements; The role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements to be published.	✅	
		6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.		✅	
			6.2.2.1	**Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya.** The process of selecting an external auditor through tender is conducted transparently, allowing shareholders to observe and monitor the process if they wish to do so.	✅	
			6.2.2.2	**Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan.** The Audit Committee ensures that there are no clauses in the contract with the auditor that could compromise the independence or competence of the auditor in conducting the audit of financial statements.	✅	

			6.2.2.3	**Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen;** The Audit Committee conducts adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors the interaction between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and overseeing management's responses.	✅	
			6.2.2.4	**Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit.** The Board of Commissioners, or the Audit Committee, ensures that the external auditor promptly informs them of all significant findings and issues identified by the external auditor during the audit process.	✅	
			6.2.2.5	**Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor.** The Audit Committee reviews every non-audit service provided by the external auditor and its affiliates, as well as related fees, to ensure that these services do not compromise the auditor's independence.	✅	
		6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability report must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.		✅	
			6.2.3.1	**Laporan keberlanjutan diberikan asurans oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten.** The sustainability report is assured by an independent and competent external party.	✅	
		6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation has published a Sustainability Report that is an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report has presented the company's sustainability performance covering economic, social, environmental, and governance aspects, presented in comparison over 3 years, aiming to assist shareholders and stakeholders in understanding the corporation's strategic objectives and progress in creating sustainable value.		✅	
	6.3	**Diseminasi Informasi** Information Dissemination				

		6.3.1	**Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.** Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.		✅	
			6.3.1.1	**Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan.** The corporation periodically holds meetings with financial analysts.	✅	
			6.3.1.2	**Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.** The corporation utilizes information technology effectively and extensively beyond its website as a means of information disclosure.	✅	
			6.3.1.3	**Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya.** The corporation ensures that disseminated information is safeguarded and securely protected.	✅	
		6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.		✅	
		6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus didiungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations registered on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.		✅	
7	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of Shareholder Rights					
	7.1	**Hak Pemegang Saham** Shareholder Rights				
		7.1.1	**Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.** The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation		✅	
			7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan.	✅	

			7.1.1.1	Shareholders, including institutional shareholders, are allowed to consult with each other regarding issues related to basic shareholder rights as outlined in these Principles, but this privilege should not be abused.	✅	
			7.1.1.2	**Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang.** The corporation encourages constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. The corporation responds to shareholder requests to engage in dialogue to support sustainable growth and enhance corporate value in the medium to long term.	✅	
			7.1.1.3	**Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen.** The corporation provides a platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	✅	
			7.1.1.4	**Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa.** The corporation promptly discloses to the public any new material facts available to financial analysts and similar parties.	✅	
			7.1.1.5	**Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan.** The corporation discloses its corporate communication policy with shareholders or investors on its website and reports.	✅	
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.		✅	

			7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. The framework and policies for corporate governance in subsidiary entities include written policies regarding: Authority to appoint commissioners and directors. Generally, for relatively large subsidiary entities, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing executives in subsidiary entities. For smaller subsidiary entities, the Board of Directors is authorized to carry out this task; Effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; and Timely and accurate disclosure of material information from subsidiary entities, including financial information, transactions with related parties, and other material information. If the corporation has or establishes legal entities other than limited liability companies, the corporation ensures that its corporate governance policies applicable to those entities are adjusted to the context of their legal entity type.	✅	
			7.1.2.2	**Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak.** For investments in significant but minority-owned subsidiary entities (such as ownership between 20 percent to 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there is a shareholders' agreement or other agreement that allows the corporation to monitor the performance of the corporation and participate in management, including for approval of transactions and significant decisions. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation has adequate, accurate, and timely information in the subsidiary entity.	✅	

		7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.		✅	
			7.1.3.1	**Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi.** The corporation clearly discloses these rules and procedures so that investors understand their rights and entitlements to compensation.	✅	
			7.1.3.1	**Taktik yang mencegah pengambil alihan (anti-take-over devices) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas.** Tactics that prevent takeovers (anti-takeover devices) should not be used to protect management and the Board of Commissioners from accountability.	✅	
	7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** Fair Treatment to Shareholders				
		7.2.1	**Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan:** semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure: all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.		✅	
			7.2.1.1	**Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham.** To ensure transparency regarding shareholders' rights to receive a portion of the profits, the corporation discloses a measurable dividend policy, such as target dividend payout ratios/dividends per share.	✅	
			7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif.	✅	
			7.2.1.2	Investors receive information about the rights inherent in all series or classes of shares before they purchase them. Any changes in the economic value of shares or voting rights require approval from the affected class of shares in a manner that avoids negative impact.	✅	

			7.2.1.3	**Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen).** To enable shareholders to know the ultimate beneficial owner of significant corporate ownership, the corporation discloses ultimate beneficial owners in share ownership through major shareholders and controllers, as well as ultimate beneficial owners in share ownership of at least 5% (five percent).	✅	
			7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: perjanjian antar pemegang saham; voting cap; multiple voting rights; perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation discloses: Shareholders' agreements; Voting caps; Multiple voting rights; other arrangements that allow certain shareholders to have voting rights exceeding their ownership in the corporation.	✅	
			7.2.1.5	**Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan.** The corporation provides mechanisms/procedures that allow shareholders to have the opportunity to seek effective redress for violations of their rights in accordance with applicable laws and regulations, at reasonable cost and without undue delay.	✅	
		7.2.2	**Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.** Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.		✅	
			7.2.2.1	**Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*).** The corporation has policies and standardized operating procedures ensuring that transactions with related parties are conducted in such a way to ensure they are fair and at arm's length.	✅	

			7.2.2.2	**Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan.** Material related-party transactions, including consultancy agreements and other services or work agreements between directors/commissioners and their affiliates with the corporation, must obtain approval in accordance with applicable laws. In addition to those already regulated by law, material related-party transactions require approval from the Board of Commissioners. Commissioners with conflicts of interest do not participate in granting approval.	✅	
			7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that transactions that are clearly detrimental to public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions include: Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at below-market interest rates; if loans are provided, they must be at fair interest rates and terms and receive approval from the Board of Commissioners; Financial assistance/subsidies to entities other than those fully owned by the corporation.	✅	
			7.2.2.4	**Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat.** The Board of Commissioners discloses the policy process for approving, reviewing, and monitoring related-party transactions and any inherent conflicts of interest.	✅	
			7.2.2.5	**Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi.** The Audit Committee's findings on significant related-party transactions/conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	✅	

		7.2.3		**Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.** Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/ not yet available on the market.	✅	
	7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham** General Meeting of Shareholders				
		7.3.1		**Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi** The corporation invitation for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website	✅	
			7.3.1.1	**Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (rationale) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS.** In the materials for the agenda of the GMS, the corporation provides relevant and complete information necessary for decision-making, including explanations and justifications for the proposed decisions to be approved at the GMS.	✅	
		7.3.2		**Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.** The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	✅	
			7.3.2.1	**Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS.** The Corporation provides infrastructure that enables the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	✅	
			7.3.2.2	**Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan.** All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attended the Annual GMS.	✅	

			7.3.2.3	**Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS.** The Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Management Risk Monitoring Committee, as well as other committees are ready to provide meaningful responses to questions directed to them in the GMS.	✅	
			7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to: Raise questions in the GMS, including questions related to the results of the annual external audit; Propose an item to be included in the GMS agenda; and Submit resolution proposals.	✅	
			7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; pemungutan secara tertutup (poll-voting) dan bukan dengan mengacungkan tangan (show of hands); memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. The corporation has methods or technical procedures for voting that prioritize independence and shareholder interests, namely: Easily accessible locations for GMS for the majority of shareholders; Conducting closed voting (poll-voting) rather than by a show of hands; Ensuring that there are no conditions or procedures in GMS that hinder shareholders from participating in decision-making.	✅	
			7.3.2.6	**Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara.** The corporation strives for electronic voting procedures and takes steps to build infrastructure that enables electronic voting or utilizes existing infrastructure within the ecosystem for voting.	✅	
			7.3.2.7	**Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (*bundling*).** Each vote in the GMS is only for one resolution, there is no bundling of multiple resolutions into the same resolution.	✅	

			7.3.2.8	**Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/ inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS.** The corporation appoints an independent party (supervisor/ inspector) to count and/or certify the votes in the GMS and disclose them in the minutes of the GMS.	✅	
			7.3.2.9	**Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali.** If resolutions approved by controlling shareholders contradict the majority of votes from non-controlling shareholders, post-GMS, the corporation discloses actions taken to understand and respond to concerns of non-controlling shareholders, which led to their voting differently from controlling shareholders.	✅	
		7.3.3	**Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.** Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.		✅	
			7.3.3.1	**Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi.** The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts a thorough examination of Director and Commissioner candidates and provides all relevant material information about the candidates to shareholders during the board member selection process. The disclosed information includes details about the candidates' positions as Directors or Commissioners in other corporations and whether they are considered independent from the corporate standpoint.	✅	
			7.3.3.2	Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali.	✅	
			7.3.3.2	Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose regulations require five years. It would be better if nominations were made annually.	✅	
			7.3.3.3	**Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris.** Shareholders conduct separate voting for each Director and Commissioner candidate.	✅	

		7.3.4	**Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.** The corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor at the General Meeting of Shareholders.		✅	
			7.3.4.1	**Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS.** In the GMS notice, the corporation identifies and informs shareholders of the candidate external auditor who will be appointed or reappointed during the GMS.	✅	
			7.3.4.2	**Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan.** The corporation ensures that the external auditor attends the GMS and is obligated to respond to shareholders' questions regarding the audit of financial statements.	✅	
		7.3.5	**Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.** Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.		✅	
			7.3.5.1	**Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.** The minutes of the GMS are communicated to shareholders no later than 30 business days after the GMS.	✅	
			7.3.5.2	**Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab.** The minutes of the GMS include questions posed by shareholders and the responses provided by the meeting chairperson or the answering party.	✅	
			7.3.5.3	**Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun.** The conduct of the GMS, along with all meeting materials, reports, and related documents including the annual report and voting results, including the agenda of the meeting concerned, are published on the corporation's official website or digital communication media and are available for at least 10 (ten) years.	✅	
8	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders					
	8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*)** Key Stakeholder Engagement (Stakeholder Engagement)				

		8.1.1		**Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.** The Corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	✅	
			8.1.1.1	**Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan.** The corporation discloses the process of identifying and selecting key stakeholders to be involved.	✅	
			8.1.1.2	**Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci.** The corporation discloses its approach and activities in managing the involvement of key stakeholders, including the frequency based on the type and group of key stakeholders.	✅	
			8.1.1.3	**Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka.** The corporation provides channels that key stakeholders (such as customers, suppliers, the general public, etc.) can use to express opinions and provide feedback, voice complaints, and/or lodge grievances regarding potential violations of their rights.	✅	
			8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: respon korporasi; dan kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. The corporation discloses significant views, inputs, and complaints conveyed by key stakeholders obtained from stakeholder engagement, including: Corporate responses; and Key stakeholder groups expressing views and inputs.	✅	
	8.2	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis** Integration of Sustainability in Business Models				

		8.2.1		**Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.** The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	✅	
			8.2.1.1	**Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.** The Board of Directors ensures that the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets, as well as performance against these targets, are communicated to stakeholders.	✅	
			8.2.1.2	**Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya.** The Board of Directors and Board of Commissioners continually monitor and understand sustainability issues relevant to the corporation and its business.	✅	
			8.2.1.3	**Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi.** The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes their performance in overseeing and addressing significant risks and opportunities related to corporate sustainability.	✅	
			8.2.1.4	**Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi.** The Board of Directors appoints an individual within management with a specific role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	✅	
	8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan** Protection of Stakeholders				
		8.3.1		**Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.** The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	✅	

			8.3.1.1	**Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/ masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi.** The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility to customers, including, among others, considering customer information security, ethics and sales behavior, after-sales service according to product/service lifespan, as well as following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations must promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.	✅	
			8.3.1.2	**Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan.** The corporation implements and discloses policies covering criteria in supplier selection, transparent procurement mechanisms, efforts to enhance supplier capabilities, and fulfillment of supplier-related rights. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff, and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable business policies and procedures based on sustainable values.	✅	
			8.3.1.3	**Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat.** The corporation implements and discloses its social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and generate concrete social responsibility activities that add value to society, including fostering community empowerment.	✅	

			8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: bahan baku; energi; penggunaan air; pemanfaatan sumber daya terbarukan; pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. The corporation implements and discloses environmental responsibility by preventing, reducing, and managing negative impacts on the environment from all aspects of corporate operations, including in the use of: Raw materials; Energy; Water usage; Utilization of renewable resources; Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management, and reduction of greenhouse gas emissions and carbon emissions.	✅	
			8.3.1.5	**Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar.** The corporation implements and discloses a policy on fair competition by prioritizing ethical business behavior and refraining from engaging in anti-competitive practices to gain or protect market positions.	✅	
			8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors. The Board of Commissioners oversees, and the Board of Directors monitors the liquidity and financial solvency of the corporation. The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are promptly identified, managed, mitigated, and reported. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.	✅	
		8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.		✅	
			8.3.2.1	**Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.** The corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages the creation of sustainable value.	✅	

			8.3.2.2	**Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted return*), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan.** Performance-based remuneration for employees should take into account risk elements, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are given for unwanted risk-taking.	✅	
			8.3.2.3	**Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun.** The Board of Directors manages potential conflicts of interest that may arise between employees as beneficiaries of the pension fund and the corporation as the manager of the pension fund.	✅	
			8.3.2.4	**Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman.** The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resources development and management program to ensure that the corporation has an adequate number of knowledgeable, skilled, and experienced employees.	✅	
			8.3.2.5	**Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan jender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur.** When filling managerial positions within the corporation, the Board of Directors considers diversity, non-discrimination, and provides equal opportunities to all candidates regardless of ethnicity, religion, race, social status, and gender. This diversity policy is accompanied by measurable objectives.	✅	



Rujukan *Keberlanjutan*

Sustainability Reference



Rujukan Keberlanjutan

Sustainability Reference

"Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, PP Presisi terus mendorong penerapan keberlanjutan dalam seluruh aspek operasi dan bisnisnya; mulai dari aktivitas proyek yang mematuhi seluruh peraturan termasuk K3 dan mengindahkan dampak lingkungan, kegiatan perkantoran yang efisien terhadap penggunaan energi, output produk dan layanan yang berstandar serta berkualitas tinggi, hingga keberadaan PP Presisi dan kontribusinya bagi lingkungan hidup dan masyarakat."

"As a company engaged in the construction sector, PP Presisi continues to promote the implementation of sustainability across all aspects of its operations and business activities; starting from project activities that comply with all regulations, including occupational health and safety (OHS) and paying attention to environmental impacts, office activities that emphasize energy efficiency, the delivery of products and services with standardized and high-quality outputs, to the presence of PP Presisi and its contributions to the environment and society."

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PP Presisi

Precision PP Sustainable Development Goals Priority



"Lebih lanjut tentang upaya PP Presisi dalam mewujudkan keberlanjutan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan tahun 2024 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini."

"Further details on PP Presisi's efforts in achieving sustainability can be found in the 2024 Sustainability Report, which forms an integral part of this Annual Report."

Laporan Keuangan

Teraudit

Audited Financial Statements



PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk AND ITS SUBSIDIARY

Consolidated Financial Statements
For the Year Ended
December 31, 2024 and 2023

Daftar Isi

Halaman/
Page

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2024 and 2023***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

PLAZA PP, Lantai 7
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
T. +62 218414119

WORKSHOP
Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 17153
T. +62 21 8248325/240
F. +62 218230353

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
PT PP PRESISI TBK DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023
PT PP PRESISI TBK AND SUBSIDIARY

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : *I, the undersigned :*

Nama	:	Arzan	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Letjend. TB Simatupang No.57, Jakarta Timur	:	*Office Address*
Alamat Domisili	:	Perumahan Sarua Barokah Blok D 15	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	(021)-82483255	:	*Phone number*
Jabatan	:	Direktur Utama / *President Director*	:	*Position*
Nama	:	Mohammad Arif Iswahyudi	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Letjend. TB Simatupang No.57, Jakarta Timur	:	*Office Address*
Alamat Domisili	:	Jl. Wiguna III No. 6, Gunung Anyar, Surabaya	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	(021)-82483255	:	*Phone number*
Jabatan	:	Direktur Keuangan, Manajemen Resiko & Legal / *Finance, Risk Management and Legal Director*	:	*Position*

Menyatakan bahwa : *Stated that :*

1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PP Presisi Tbk dan Entitas Anak;
2 Laporan keuangan konsolidasian PT PP Presisi Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah diungkapkan secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT PP Presisi Tbk dan Entitas Anak.

1 *We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Presisi Tbk and Subsidiary;*
2 *The consolidated financial statements of PT PP Presisi Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3 *a. All information in the conolidated financial statements have been disclosed completely and correctly.*
b. The consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor does it omit information or material fact.
4 *We are responsible for PT PP Presisi Tbk and Subsidiary' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 5 Maret 2025/ *March 5, 2025*

Arzan	**Mohammad Arif Iswahyudi**
Direktur Utama	Direktur Keuangan, Manajemen Resiko & Legal
President Director	*Finance, Risk Management and Legal Director*

Mgr Acct	VP FINACC

pp-presisi.co.id

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00113/2.1030/AU.1/03/1153-1/1/III/2025

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT PP Presisi Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PP Presisi Tbk dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PP Presisi Tbk and its subsidiary ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No. 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Ketepatan pengakuan pendapatan

Grup memiliki pendapatan utama berasal dari jasa konstruksi. Pada tahun 2024, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi sebesar Rp3.506.814 juta, yang mencakup 92,50% dari total pendapatan Grup.

Grup mengakui pendapatan tersebut sepanjang waktu berdasarkan penyelesaian atas kewajiban pelaksanaan dari masing-masing kontrak dengan pemberi kerja. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan ditetapkan berdasarkan metode input, yaitu berdasarkan biaya yang terjadi secara relatif terhadap total biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan suatu kontrak, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek yang telah disepakati dengan pemberi kerja.

Karena signifikansi nilai pendapatan jasa konstruksi, maka porsi signifikan audit kami mengarah kepada audit atas pendapatan yang dapat mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain:

- Kami memeroleh pemahaman dan mengevaluasi desain dan implementasi atas pengendalian kunci yang relevan terhadap pengakuan pendapatan dari konstruksi berdasarkan estimasi persentase penyelesaian;
- Kami memeroleh rincian pendapatan dari jasa konstruksi, dasar penentuan estimasi persentase penyelesaian dan mencocokkan jumlahnya dengan pendapatan dan biaya kontrak yang telah tercatat pada laporan keuangan konsolidasian;
- Berdasarkan uji petik, kami membaca dan memahami persyaratan utama pada kontrak konstruksi yang berlaku selama tahun berjalan, termasuk modifikasi yang ada untuk mengevaluasi ketepatan perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi tersebut;

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Appropriateness of revenue recognition

The Group's main revenues are derived from construction services. In 2024, the Group recognized revenue from construction services amounting to Rp3,506,814 million, which represents 92.50% of the Group's total revenue.

The Group recognizes such revenues over time based on the completion of the performance obligations of each contract with the project's owner. The completion of the performance obligations is determined using the input method, which is based on the costs incurred relative to the total costs expected to fulfill the performance obligations of a contract, as outlined in the Project Achievement Report that has been agreed with the project's owner.

Due to the significance amount of revenues from construction, resulting in significant portion of our audits directed towards the audit of revenue which may have material impact on the consolidated financial statements.

Our audit procedures include, among others:

- *We obtained understanding and evaluated the design and implementation of key controls relevant to the revenue recognition from construction based on estimated percentage of completion;*
- *We obtained the details of revenue from construction services, the basis for determining the estimated percentage of completion based on the input method, and compared the amount with the contract revenue and cost recorded in the consolidated financial statements;*
- *On a sample basis, we read and understood the key terms and conditions of construction contracts outstanding during the year, including any modifications, to assess the appropriateness of the accounting treatment for these construction contracts;*

- Berdasarkan uji petik, kami mengunjungi proyek, dengan melibatkan pakar auditor di bidang konstruksi, untuk memastikan keberadaan proyek dan progresnya; dan
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa pengakuan pendapatan yang telah tercatat pada laporan keuangan konsolidasian untuk memastikan bahwa pendapatan yang telah diakui didukung oleh bukti yang tepat.

Pengungkapan Grup mengenai ketepatan pengakuan pendapatan konstruksi berdasarkan persentase penyelesaian diungkapkan pada Catatan 2.u, 3 dan 30 atas laporan keuangan konsolidasian.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2024, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan Tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan Tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

- *On a sample basis, we examined revenue recorded in the consolidated financial statements to assess that the revenue recognized is supported by appropriate evidence, and*
- *On a sample basis, we examined revenue recorded in the consolidated financial statements to assess that the revenue recognized is supported by appropriate evidence.*

The Group's disclosure regarding appropriateness of revenue recognition from construction revenue based on percentage of completion disclosed in Notes 2.u, 3 and 30 to the consolidated financial statements.

Other Matter

The financial statements of the Company as of December 31, 2022 and for the year then ended, were audited by another independent auditor whose report No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024 dated March 1, 2024, which expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2024 Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2024 Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the 2024 Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan Akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi Akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine the matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and is therefore the key audit matter. We describe this matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1153/
Public Accountant License Number: AP.1153

Jakarta, 5 Maret 2025/*March 5, 2025*

00113

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp	2023*) Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4, 33, 40	268.063.079.610	158.012.909.569	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	5	112.752.609.952	107.756.526.527	*Short term investments*
Piutang usaha	6, 33, 40			*Trade receivables*
Pihak berelasi		410.684.384.593	698.869.891.730	*Related parties*
Pihak ketiga		959.825.978.453	807.760.190.595	*Third parties*
Piutang retensi	7, 33, 40			*Retention receivables*
Pihak berelasi		38.916.189.334	157.071.742.704	*Related parties*
Pihak ketiga		68.652.497.563	38.715.613.885	*Third parties*
Tagihan bruto pemberi kerja	8, 33, 40			*Gross amount due from customers*
Pihak berelasi		468.462.331.666	628.759.605.595	*Related parties*
Pihak ketiga		2.781.302.756.455	1.846.264.329.005	*Third parties*
Piutang sewa pembiayaan	10	--	7.017.508.580	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	9			*Other receivables*
Pihak berelasi		5.950.575.752	6.692.418.042	*Related parties*
Pihak ketiga		12.851.458.750	23.330.100.055	*Third parties*
Persediaan	11	152.619.787.600	167.652.474.661	*Inventories*
Uang muka	12	55.604.030.587	36.744.610.111	*Advances*
Pajak dibayar di muka	13a	2.510.037.688	237.010.309.534	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	14	33.605.093.963	40.182.109.402	*Prepaid expenses*
Aset keuangan lainnya		480.198.044	3.734.276.034	*Other finance asset*
Jumlah Aset Lancar		**5.372.281.010.010**	**4.965.574.616.029**	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang sewa pembiayaan		--	5.040.358.482	*Finance lease receivables*
Investasi pada ventura bersama	15	7.811.011.854	11.670.104.737	*Investment in joint venture*
Aset hak guna	16	784.924.110.126	431.888.829.214	*Right-of-use assets*
Aset tetap	17	1.230.438.096.398	1.500.698.001.491	*Fixed assets*
Goodwill	18	246.863.514.371	246.863.514.371	*Goodwill*
Aset tak berwujud	19	6.530.832.409	3.254.733.747	*Intangible assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**2.276.567.565.158**	2.199.415.542.042	*Total Non-Current Assets*
JUMLAH ASET		**7.648.848.575.168**	**7.164.990.158.071**	***TOTAL ASSETS***

*)Direklasifikasi (Catatan 44)

*)*Reclassified (Note 44)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	20			*Bank Loans and Other Financial Institutions*
Pihak berelasi		336.418.880.000	660.933.660.618	*Related parties*
Pihak ketiga		230.348.145.467	356.581.349.556	*Third parties*
Utang usaha	21			*Trade payables*
Pihak berelasi		18.926.316.011	42.839.394.933	*Related parties*
Pihak ketiga		1.676.107.992.739	1.069.464.993.244	*Third parties*
Uang muka pemberi kerja	22			*Advances from project owner*
Pihak berelasi		1.571.291.366	1.571.291.366	*Related parties*
Pihak ketiga		375.659.878.214	40.202.684.154	*Third parties*
Utang lain-lain	23			*Other payables*
Pihak berelasi		85.444.902.233	100.266.844.238	*Related parties*
Pihak ketiga		16.024.646.669	2.545.274.114	*Third parties*
Utang pembelian aset tetap	24	--	78.117.117.117	*Property and equipment purchase payables*
Utang pajak	13b	46.539.656.824	327.204.497.450	*Taxes payable*
Utang bank - jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	27			*Current maturity of long term - bank loans*
Pihak berelasi		109.813.473.052	55.819.713.909	*Related party*
Pihak ketiga		58.386.542.254	131.308.485.664	*Third parties*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturity of long term - liabilities*
Utang lain-lain - pihak berelasi	23	11.301.291.770	168.067.998.063	*Other payables - related party*
Liabilitas sewa	25	66.057.260.803	188.085.341.586	*Lease liabilities*
Utang obligasi	28	101.661.350.000	--	*Bonds payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**3.134.261.627.402**	**3.223.008.646.012**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Imbalan Kerja	26	19.868.364.414	17.207.560.832	*Employee Benefits*
Utang bank - jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	27			*Long term - bank loans - net of current maturity*
Pihak berelasi		31.362.997.536	--	*Related party*
Pihak ketiga		12.325.562.435	117.195.576.372	*Third parties*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				*Long term liabilities - net of current maturity*
Utang lain-lain - pihak berelasi	23	135.796.932.933	126.997.715.567	*Other payables - related party*
Liabilitas sewa	25	719.751.177.432	163.238.002.852	*Lease liabilities*
Utang obligasi	28	100.914.260.000	202.250.214.000	*Bonds payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.020.019.294.750**	**626.889.069.623**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**4.154.280.922.152**	**3.849.897.715.635**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham Modal dasar - 24.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 10.224.271.000 saham	29a	1.022.427.100.000	1.022.427.100.000	*Share capital - par value Rp100 per share Authorized capital - 24,000,000,000 shares Subscribed and paid-up capital - 10,224,271,000 shares*
Tambahan modal disetor	29b	749.560.161.538	749.560.161.538	*Additional paid-in capital*
Saham treasuri	29d	(18.629.958.023)	(18.629.958.023)	*Treasury shares*
Penghasilan komprehensif lain		51.218.378.496	46.093.169.345	*Other comprehensive income*
Sado laba:				*Retained earnings:*
Ditentukan penggunaannya		101.195.136.232	97.184.358.276	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		618.988.823.409	532.660.053.128	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.524.759.641.652	2.429.294.884.264	*Equity attributable to owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		969.808.011.364	885.797.558.172	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		**3.494.567.653.016**	**3.315.092.442.436**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**7.648.848.575.168**	**7.164.990.158.071**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
PENDAPATAN	**30**	**3.790.809.211.559**	**3.400.865.237.272**	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**31**	**(3.012.589.727.376)**	**(2.807.300.057.531)**	***COST OF REVENUE***
LABA KOTOR		**778.219.484.183**	**593.565.179.741**	***GROSS PROFIT***
Beban usaha	32	(103.022.327.839)	(90.225.360.939)	*Operating expenses*
Kerugian penurunan nilai	33	(56.901.553.173)	(18.681.806.977)	*Impairment losses*
Bagian laba ventura bersama	34	--	14.706.201.031	*Share in profit of joint venture*
Pendapatan keuangan	35	800.421.546	1.402.256.029	*Finance income*
Beban keuangan	36	(331.705.352.502)	(230.514.614.678)	*Finance costs*
Pendapatan lainnya	37	62.893.475.024	54.428.074.549	*Other incomes*
Beban lainnya	38	(51.690.496.515)	(46.509.021.753)	*Other expenses*
Beban pajak final	12c	(94.961.284.021)	(96.382.840.152)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**203.632.366.703**	**181.788.066.851**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	12d	(9.534.755.388)	(9.006.796.782)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**194.097.611.315**	**172.781.270.069**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	17	3.806.787.627	8.387.970.012	*Surplus of property and equipment revaluation*
Pengukuran kembali imbalan kerja	26	83.953.827	(221.521.382)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		3.890.741.454	8.166.448.630	*Total Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**197.988.352.769**	**180.947.718.699**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				*Total Profit for the Year Attributable to:*
Pemilik entitas induk		90.339.548.237	80.215.559.126	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		103.758.063.078	92.565.710.943	*Non-controlling interest*
		194.097.611.315	**172.781.270.069**	
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Comprehensive Income Attributable to:***
Pemilik entitas induk		95.464.757.389	85.751.201.217	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		102.523.595.380	95.196.517.482	*Non-controlling interest*
		197.988.352.769	**180.947.718.699**	
LABA DASAR PER SAHAM	**39**	**8,84**	**7,85**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement integral part of these consolidated financial statements as a whole

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributable to owners of the parent entity*										
					Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*							
		Modal ditempatkan dan disetor/ *Subscribed and paid-up capital* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Saham treasuri/ *Treasury shares* Rp	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ *Remeasurement of Post-employment benefits liabilities* Rp	Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap/ Surplus of *property and equipments revaluation* Rp	Saldo laba/ *Retained earning* Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
Saldo per 1 Desember 2023		**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(18.629.958.023)**	**485.133.111**	**40.072.394.143**	**92.146.775.549**	**457.482.076.729**	**2.343.543.683.047**	**806.783.032.907**	**3.150.326.715.954**	***Balance as at December 1, 2023***
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	--	--	80.215.559.126	80.215.559.126	92.565.710.943	172.781.270.069	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain		--	--	--	(212.077.494)	5.747.719.585	--	--	5.535.642.091	2.630.806.539	8.166.448.630	*Other comprehensive income*
Cadangan umum		--	--	--	--	--	5.037.582.727	(5.037.582.727)	--	--	--	*General reserve*
Pembayaran deviden entitas anak		--	--	--	--	--	--	--	--	(16.181.992.217)	(16.181.992.217)	*Cash dividend of subsidiary*
Saldo per 31 Desember 2023		**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(18.629.958.023)**	**273.055.617**	**45.820.113.728**	**97.184.358.276**	**532.660.053.128**	**2.429.294.884.264**	**885.797.558.172**	**3.315.092.442.436**	***Balance as at December 31, 2023***
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	--	--	90.339.548.237	90.339.548.237	103.758.063.078	194.097.611.315	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain		--	--	--	96.363.524	5.028.845.627	--	--	5.125.209.151	(1.234.467.697)	3.890.741.454	*Other comprehensive income*
Cadangan umum		--	--	--	--	--	4.010.777.956	(4.010.777.956)	--	--	--	*General reserve*
Pembayaran deviden entitas anak	**29c**	--	--	--	--	--	--	--	--	(18.513.142.189)	(18.513.142.189)	*Cash dividend of subsidiary*
Saldo per 31 Desember 2024		**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(18.629.958.023)**	**369.419.141**	**50.848.959.355**	**101.195.136.232**	**618.988.823.409**	**2.524.759.641.652**	**969.808.011.364**	**3.494.567.653.016**	***Balance as at December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement are an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				*CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*
Penerimaan kas dari pelanggan		4.539.692.127.429	2.980.307.005.296	*Cash Receipts from Customers*
Pembayaran kas kepada :				*Payments to :*
Pemasok dan subkontraktor		(3.140.096.356.430)	(2.186.961.034.639)	*Supplier and Subcontractors*
Direksi dan karyawan		(123.071.523.001)	(415.333.597.280)	*Directors and Employees*
Restitusi Pajak		--	84.383.834.231	*Required from Tax Restitution*
Pembayaran pajak-pajak		(189.507.060.524)	(169.976.360.176)	*Taxes payment*
Pembayaran bunga		(320.598.552.750)	(228.786.962.649)	*Payments of interest expense*
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi		766.418.634.724	63.632.884.783	***Net Cash provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				*CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*
Penerimaan penjualan aset tetap	17	56.682.263.861	39.824.177.184	*Proceed from sale of fixed asset*
Penerimaan Piutang Lain-Lain		11.220.483.596	110.188.349.350	*Receipt of other receivables*
Penerimaan Bunga		4.303.285.768	7.011.402.541	*Receipt of Clearing Account Interest*
Penerimaan investasi ventura bersama	15	3.859.092.883	86.875.975.000	*Joint venture investment income*
Deposito dijaminkan		--	1.715.583.529	*Collateralized deposit*
Penerimaan bank yang dibatasi penggunaannya		--	29.500.000.000	*Received from restricted bank*
Pembelian aset takberwujud	19	(5.150.940.000)	(1.891.778.870)	*Acquisition of intangible asset*
Perolehan aset tetap	17	(293.612.338.353)	(63.905.251.400)	*Acquisition of fixed assets*
Kas Bersih (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Investasi		(222.698.152.245)	209.318.457.334	***Net Cash (used in) provide by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				*CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangan lainnya	20	2.473.323.376.114	2.982.705.625.293	*Receipt of bank loans and other financial institution*
Penerimaan pinjaman pihak berelasi		--	180.459.089.857	*Proceed loan from related party*
Pembayaran dividen		(18.513.142.189)	(54.255.811.971)	*Payment of Dividend*
Pembayaran liabilitas sewa	25	(73.625.608.600)	--	*Lease liabilities payment*
Pembayaran pinjaman pihak berelasi		(147.967.488.927)	(12.203.449.968)	*Payment of loan from related party*
Penerimaan utang non bank		--	(173.667.296.453)	*Receipt of non bank loans*
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya	20	(2.666.887.448.836)	(3.343.591.477.842)	*Payment of bank loans and other financial institution*
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(433.670.312.438)	(420.553.321.084)	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		110.050.170.041	(147.601.978.967)	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		158.012.909.569	305.614.888.536	***CASH AND CASH EQUIVALENTS BEGINNING***
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR		268.063.079.610	158.012.909.569	*CASH AND CASH EQUIVALENTS ENDING*
Informasi tambahan arus kas disajikan di catatan 45				*Additional cash flow information is presented in note 45.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement integral part of these consolidated financial statements as a whole

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ("Perusahaan") semula bernama PT Prima Jasa Aldodua dan terakhir berubah nama menjadi PT Pembangunan Perumahan presisi (PP Presisi) pada tanggal 5 Mei 2017, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 6 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 Tambahan No. 20149.

Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan yang sesuai Akta No. 40 tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042779.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Juni 2022. Para pemegang saham menyetujui Perubahan Anggaran Dasar tentang penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Mei 2004.

b. Maksud dan tujuan

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah berusaha bergerak dalam bidang jasa konstruksi, *engineering procurement and construction* (EPC), jasa mekanikal elektrikal, pengangkutan dan pergudangan, jasa penyewaan, perdagangan, pertambangan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, industri pengolahan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, dan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ("the Company") originally named PT Prima Jasa Aldodua and lastly change become PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) dated May 5, 2017, a legal entity in the form of a Limited Liability Company which was established based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company No. 02 dated May 6, 2004, made before Muhammad Chotib, S.H., Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. C-16498HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012 Supplement No. 20149.

The Articles of Association have been amended several times, most recently based on the Resolution of the Annual Meeting of Shareholders in accordance with Deed No. 40 dated April 27, 2022 by Notary Fathiah Helmi, S.H., and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decree No. AHU-0042779.AH.01.02.TAHUN 2022 dated June 23, 2022. Shareholders approved the Amendment to the Articles of Association, regarding the adjustment to Article 3 concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to conform with the Standard Classification of Indonesian Business Fields for 2020 (KBLI 2020) while still in line to the provisions of the applicable laws and regulations and do not change the purposes and objectives and business activities of the Company as referred to in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, thus not subject to POJK 17/2020.

The Company commenced its commercial operations in May 2004.

b. Purposes and objectives

Based on the Articles of Association, the purposes and objectives of the Company is to engage in the field of construction services, engineering procurement and construction (EPC), mechanical and electrical services, transportation and warehousing, rental services, trading, mining, architectural and engineering activities as well as technical consulting, processing industry, capacity building services in construction, engineering and planning services, and development and optimization of the Company's resource utilization.

Kegiatan usaha utama Perusahaan meliputi jasa konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan struktur, pabrik produksi dan persewaan alat berat.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo - Jakarta Timur.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

The Company's main business activities include construction services, mining services, structural works, production plants and heavy equipment rental.

The Company is domiciled in Jakarta, with its head office located at Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo - Jakarta Timur.

The Company's immediate and the ultimate parent Company is PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, incorporated and domiciled in Indonesia.

c. Penawaran umum saham

Saham Perusahaan ditawarkan perdana kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 November 2017 sejumlah 2.351.221.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-442/D.04/2017 tanggal 16 November 2017 seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sejumlah 10.224.271.000 saham.

c. Public offering of shares

The Company's shares of stock were initially offered to the public and listed on the Indonesia Stock Exchange on November 20, 2017 amounted to 2,351,221,000 shares with a par value of Rp100 per share. In accordance with the approval of the Financial Services Authority (OJK) No. S-442/D.04/2017 dated November 16, 2017, all issued and fully paid shares of the Company amounted to 10,224,271,000 shares.

d. Penawaran umum obligasi

Perusahaan telah melakukan Penawaran Obligasi Berkelanjutan I tahap I tahun 2022 kepada masyarakat sejumlah Rp202.980.000.000 yang terdiri dari Seri A dengan nilai Rp102.275.000.000 berjangka waktu 3 tahun dan Seri B dengan nilai Rp100.705.000.000 berjangka waktu 5 tahun. Penerbitan obligasi telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

d. Public offering of bonds

The Company has made an Offering of Sustainable Bonds I phase I in 2022 to the public in the amount of Rp202,980,000,000 consisting of Series A with a value of Rp102,275,000,000 for a 3 years period and Series B with a value of Rp100,705,000,000 for a period of 5 years. The issuance of bonds has been listed on the Indonesia Stock Exchange.

No.	Obligasi/ *Bonds*	Jumlah/ *Amount* Rp	Tingkat Bunga/ *Interest Rate*	Pemeringkat/ *Rating Agency*	Peringkat/ *Rating*	Tenor/ *Tenor (Tahun/ Years)*	Tanggal Penerbitan/ *Issued Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Due Date*	Status/ *Status*
1	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022/ *Sustainable Bond I PP Presisi Tbk Presisi Phase I Year 2022* Seri / *Serie* A	102.750.000.000	9.5%	PEFINDO	id BBB+	3	23 Juni 2022/ *June 23, 2022*	30 Juni 2025/ *June 30, 2025*	Belum Lunas/ *Outstanding*
2	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022/ *Sustainable Bond I PP Presisi Tbk Presisi Phase I Year 2022* Seri / *Serie* B	100.705.000.000	10.5%	PEFINDO	id BBB+	5	23 Juni 2022/ *June 23, 2022*	30 Juni 2027/ *June 30, 2027*	Belum Lunas/ *Outstanding*

e. Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 Juni 2024 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta yang telah disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-02122488 Tanggal 11 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

e. Management of the Company

Based on Deed No. 17 dated Juny 7, 2024 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta that have been submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.09-02122488 dated June 11 2024 the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Nur Rochmad	Nur Rochmad	*President Commissioner*
Komisaris	Albert Simangunsong	Albert Simangunsong	*Commissioner*
Komisaris	Muhammad Zahid	Muhammad Zahid	*Commissioner*
Komisaris Independen	Nur Rochmad	Indra Jaya Rajagukguk	*Independent Commissioner*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Arzan	I Gede Upeksa Negara	*President Director*
Direktur	Mohammad Arif Iswahyudi	Mohammad Arif Iswahyudi	*Director*
Direktur	Rebimun	Rebimun	*Director*
Direktur	--	Yudi Setiawan	*Director*

Jumlah karyawan Grup pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebanyak 252 dan 285 karyawan (tidak diaudit).

The number of Group's employees as at December 31, 2024 and December 31, 2023 of 252 and 285 employees, respectively (unaudited).

f. Komite audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit PT PP Presisi Tbk, susunan Komite Audit per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

f. Audit committee

Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners No.009/SK/DEKOM/PPRE/2024 dated June 21, 2024 regarding the Dismissal of the Member of the Audit Committee of PT PP Presisi Tbk, the composition of the Audit Committee as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Ketua	Nur Rochmad	Nur Rochmad	*Chairman*
Wakil Ketua	-	Albert Simangunsong	*Vice Chairman*
Anggota	Tri Saripalupi Andayani	Tri Saripalupi Andayani	*Members*
Anggota	Mubari	Mubari	*Members*
Anggota	Muhammad Zahid	Muhammad Zahid	*Members*

g. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 021/SK/DIR/PPRE/2024 tentang Pengangkatan Kepala Biro Sekretariat Perusahaan tanggal 29 Juli 2024, menetapkan Mei Elsa Kembaren sebagai Kepala Biro Sekretariat, berlaku efektif sejak tanggal 29 Juli 2024.

g. Corporate secretary

Based on the Decree of the Company's Board of Directors No. 021/SK/DIR/PPRE/2024 concerning the Appointment of the Head of the Corporate Secretariat Bureau dated July 29, 2024, appointed Mei Elsa Kembaren as the Head of the Secretariat Bureau, effective as at July 29, 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tentang Pengangkatan Kepala Biro Sekretariat Perusahaan tanggal 21 Agustus 2023, menetapkan Dyah Novian Tri Hadini sebagai Kepala Biro Sekretariat, berlaku efektif sejak tanggal 21 Agustus 2023.

Based on the Decree of the Company's Board of Directors No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2024 concerning the Appointment of the Head of the Corporate Secretariat Bureau dated August 29, 2023, appointed Dyah Novian Tri Hadini as the Head of the Secretariat Bureau, effective as at August 21, 2023.

h. Audit internal

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal, Perusahaan telah membebaskan Syamsir Alamsyah dan mengangkat Wismo Sugewo sebagai Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal Perusahaan.

h. Internal audit

Based on Company's Directors Decree No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 dated May 22, 2023 regarding the Appointment of the Head of the Internal Supervision Unit Bureau, the Company has discharged Syamsir Alamsyah and appointed Wismo Sugewo as Head of the Company's Internal Supervision Unit Bureau.

i. Entitas anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas Entitas Anak pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

i. Subsidiary

The Company has control on subsidiaries as at December 31, 2024 and 2023 as follows (in thousand rupiah):

Entitas anak/ *Subsidiary*	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Domisili/ *Domicile*	Tahun operasi/ *Start of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Sebelum eliminasi/ *Before elimination*			
						Jumlah aset/ *Total assets*		Jumlah pendapatan/ *Total revenues*	
				2024	2023	2024 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2023 Rp
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*									
PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)	Jasa konstruksi/ *Construction services*	Jakarta	1997	51%	51%	2.934.234.589	2.367.181.386	1.372.427.487	1.201.053.366

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 07 tanggal 22 Juni 2017 dari Irfansah, S.H., M.Kn., notaris di Karawang, Perusahaan telah mengakuisisi saham LMA sejumlah 331.500 lembar saham dari pihak ketiga, mewakili 51% kepemilikan saham dengan harga Rp798.000.000.000.

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares No. 07 dated June 22, 2017, of Irfansah, S.H., M.Kn., a notary in Karawang, the Company acquired 331,500 shares of stock of LMA from a third party, representing 51% share ownership at price of Rp798,000,000,000.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of compliance

The Group's consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations VIII.G.7 regarding Guidelines for the Presentation of Financial Statements.

b. **Dasar pengukuran dan penyajian laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. **Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif pada tahun berjalan**

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI").

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Kewajiban Diklasifikasikan Sebagai Lancar atau Tidak Lancar;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa–Balik;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

b. ***Basis of measurement and preparation of consolidated financial statements***

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. ***Amendments of Financial Accounting Standards ("PSAK") that effective in the current year***

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The following amendment to standards which are relevant to the Company, effected from January 1, 2024, as follows:

- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Noncurrent;*
- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;*
- *Amendments PSAK 116: Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback;*
- *Amendment to PSAK 207: Statement of Cash Flows and amendment to PSAK 107: Financial Instruments Disclosure related to Supplier Financing Arrangements; and*
- *Revision of PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah and Revision of PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.*

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards had no material on the amounts reported for the current year or prior financial year.

d. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada (Catatan 1.i.)

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial di mana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal di mana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements consist of the financial statements of the Group as described in (Note 1.i.)

A subsidiary is an entity controlled by the Company, ie the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Company has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The Group's financial statements consist of the operating results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their

kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group losses control, the Group:

a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

e. Instrument keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

e. Financial instrument

Initial recognition and measurement

The Group recognizes a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
(1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
(2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - "SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak material jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada *Fair Value Through Other Comprehensive Income* ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
(1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

Subsequent measurement of financial assets
The Group' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs
Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:
(1) the financial asset is held within a business model whose objective to hold the financial asset to collect contractual cash flow (held to collect); and
(2) the contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be immaterial in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:
(1) the financial asset is held within a business model whose objective is archived by both collective contractual cash flows and selling financial assets; and

(2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest - "SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

(2) the contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.

b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
   (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

d) Imbalan Kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan Kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch"*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau

b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.

b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.

c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher than:
   (i) The amount of the loss allowance; and
   (ii) The amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of PSAK 115.

d) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognized in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

a) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liablitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities
The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to received the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset or a liability any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group derecognizes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Impairment of Financial Assets
The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak di mana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. Nilai waktu uang; dan
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Time value of money; and
iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi
Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai hasil

Reclassification
The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group

dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability
A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan di mana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya

Pada laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cerukan.

g. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas di mana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

(a) Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 103 dan PSAK 110;

(b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan

(c) Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current accounts) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less, and bank overdrafts.

g. Investments in associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

(a) If the investment becomes a subsidiary, the Group account for its investment in accordance with PSAK 103 and PSAK 110;

(b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidaries measure the retained interest at fair value; and

(c) When the Company and its subsidaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

h. Pengaturan bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:
Ventura Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai ventura bersama.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

h. Joint arrangement

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

The Group classified joint arrangement as:

Joint Venture
Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venture.

A joint venture recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

i. Tagihan dan utang bruto pemberi kerja

Jumlah tagihan dan utang bruto pemberi kerja berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan kepada pihak pemberi kerja yang masih dalam pelaksanaan. Nilai dari tagihan dan utang bruto merupakan selisih antara pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian dan termin yang ditagih.

Jumlah tagihan bruto pemberi kerja diperoleh apabila pendapatan diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian melebihi termin yang ditagih. Jumlah utang bruto pemberi kerja terjadi apabila termin yang ditagih melebihi pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

i. Gross amount due from and to customers

Gross amount due from and to customers resulting from construction contract services which are still in progress. The value of due from and to customers represents the difference between the revenue recognized based on percentage of completion method and the progress billings.

Gross amount due from customers are obtained when the revenue recognized based on percentage of completion method exceeds the progress billings. Gross amounts due to customers are obtained when the progress billing exceeds the revenue recognized based on the percentage of completion method.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode pertama-masuk, pertama keluar ("MPKP"). Biaya perolehan barang jadi dan pekerjaan dalam proses terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya overhead produksi (berdasarkan kapasitas normal operasi). Persediaan tidak mencakup biaya pinjaman.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi beban penjualan bervariasi.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the first in, first-out ("FIFO") method. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labor, other direct costs and related production overheads (based on normal operating capacity). It excludes borrowing costs.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

Persediaan beton pracetak diakui berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan (menggunakan metode rata-rata tertimbang) dan nilai realisasi bersih.

Inventories of precast concrete are recognized at the lower of cost (using the weighted average method) and net realizable value.

k. Biaya dibayar diMuka

Biaya dibayar dimuka terdiri dari biaya usaha, biaya produksi, biaya pengadaan, biaya pengelolaan, biaya distribusi, dan asuransi.

Untuk biaya usaha, biaya produksi, biaya pengadaan, biaya distribusi, akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui pada setiap periode.

Untuk biaya-biaya dibayar dimuka asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Prepaid expenses

Prepaid expenses consist of operating expenses, production costs, procurement costs, management fees, distribution fees, and insurance.

For operational costs, production costs, procurement costs, distribution costs, will be charged in proportion to the revenue recognized in each period.

For the costs of prepaid insurance are amortized over the useful life of each costs using the straight-line method.

l. Investasi jangka pendek

Deposito berjangka yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebagai nilai perolehan.

l. Short-term investment

Time deposits with maturities of 3 (three) months but pledged and deposits with maturities of more than 3 (three) months are presented as short-term investments and stated as acquisition value.

m. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi

m. Fixed asset

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised.

All other repairs and maintenance are changed to the profit or loss during the financial period in which they are incured.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition costs of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or

penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, bangunan dan apartemen dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, building and apartments are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Penyusutan dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Depreciation is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, using the straight-line method over their estimated useful lives, as follows:

	Tahun/ *Years*	
- Bangunan	20	*Building* -
- Alat Ringan	3	*Light Weight equipment* -
- *Scaffolding*	5	*Scaffolding* -
- Peralatan kantor	3	*Office equipment* -
- Keet and *standard*	3	*Keet and standard* -
- Kendaraan	5	*Vehicle* -
- *Bekisting*	8	*Bekisting* -
- Peralatan Berat	8	*Heavy equipment* -
- PCH *formwork*	8	*PCH formwork* -

Aset dalam penyelesaian disajikan sebagai bagian dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Aset in construction are presented as part of fixed asset and stated at cost. All costs, including borrowing costs, incurred in connection with the construction of assets are capitalized as part of the cost of fixed asset in progress. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the asset is completed or ready for use and depreciated since the operation.

Pada akhir tahun buku pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of reporting year, the Group periodically reviews the useful life of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical conditions.

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk tanah, bangunan dan apartemen yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

The Group choose to use revaluation model for an item of land, bulding and apartments whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated impairment losses.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Revaluations is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

n. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

n. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijara Muntahiyah Bittamlik is an ijarah with the transfer of ownership of assets that are ijara deed at a certain time.

Grup sebagai penyewa

Utang sewa ijarah diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Beban sewa ijarah diakui salama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima.

The Group as lessor

Ijara lease payable is measured at the amount to be paid for the benefits that have been received. Ijarah lease expense is recognized over the term of the contract when the benefits of the asset have been received.

Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

The cost of maintaining the object of ijara as agreed in the contract is borne by the lessee is recognized as an expense when incurred.

Objek Ijarah Muntahiyah Bittamlik akan dihibahkan kepada Grup setelah berakhirnya jangka waktu sewa.

The object of Ijara Muntahiyah Bittamlik will be granted to the Group after the end of the lease term.

Jual dan Ijarah

Transaksi jual dan ijarah merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung dengan harga jual pada nilai wajarnya.

Sale and Ijara

The sale and ijara transactions are separate and independent transactions with the selling price at fair value.

Jika entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan menyewanya kembali, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya dalam laba rugi dan menerapkan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah, tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

If an entity sells the object of ijara to another party and leases it back, the entity shall recognize the gain or loss in the period in which it occurred in profit or loss and apply the accounting of the lessee. Gains or losses arising from sale and ijara transactions cannot be recognized as a reduction or increase in ijara expenses.

o. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai", jika ada.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terkini dijadikan sebagai acuan, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Kerugian penurunan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah terbalik. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

o. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting year, the Group assesses whether there are indications of an asset declining in value. If there is such indication, the Group shall make a formal estimate of the recovered amount of the asset.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its Cash-Generating Unit's (CGU's) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. If the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses", if any.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are considered, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset.

Impairment losses, if any, are recognized in profit or loss and under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each annual reporting year as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have reversed. If such an indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

Apabila terdapat pembalikan penurunan nilai, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah disesuaikan, penyusutan bersih, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill*. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode-periode berikutnya.

p. **Sewa**

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

If there is reversal of impairment, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. However, the reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGU) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill can not be reversed in future periods

p. ***Leases***

The Group as lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau

- *The Group has the right to operate the asset; or*
- *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liabilities.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or

kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

q. Aset takberwujud

Biaya atas pembelian *software* akuntansi diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama periode atas pengakuan *software* akuntansi sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah pada aset tetap dan/atau properti investasi.

Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama periode hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

q. Intangible assets

The cost of purchase of accounting software is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

The legal cost of land rights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land under property and equipment and/or investment property.

The cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

r. Uang muka pemberi kerja

Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

r. Advances from project owners

Advances from project owners (construction services) represent advances received from the project owners on construction works when the employment contract is signed and proportionally will be calculated by the payment of terminology based on the physical progress that achieved.

s. Imbalan kerja

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 sebagai Undang-Undang. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

s. Employee benefit

The Group recognized unfunded employee The Group recognizes unfunded employee benefits obligations in accordance with Government Regulation No. 35 of 2021 (PP 35/2021), which refers to Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulation as Law. Pension expenses under the Group's defined benefit pension plan are determined through periodic actuarial calculations using the projected unit credit method and by applying assumptions on the discount rate, return on plan assets, and annual increases in defined benefit pension entitlements.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:
- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- Beban atau pendapatan bunga neto;
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya, seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan. Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan manfaat biaya diakui dalam laba rugi.

t. Saham treasuri

Saham treasuri diukur sebesar imbalan yang dibayarkan, termasuk biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung (dikurangi pajak), dan dikurangkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:
1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:
- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);*
- *Net interest expense or income;*
- *Remeasurement.*

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Other long-term employee benefits
The Group also provides other long term employee benefits such as long service leaves and awards. The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method with the benefit cost recognized in profit and loss.

t. Treasury shares

Treasury shares is measured at consideration paid, including any significant directly attributable transaction costs (net of taxes), and is deducted from equity attributable to the owners of the Group.

u. Recognition of revenue and expense

Revenue from contracts with customers
Revenue recognition have to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:
1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*

imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 (dua) cara, yakni:

1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan melebihi saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang Usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan Tangguhan".

Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan (metode *output*).

If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

The implementation of obligation can be fulfilled in 2 (two) ways, it is:

1. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
2. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by the customer exceeds the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade Receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred Revenue".

Construction

Revenues related to construction contracts are accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works (output method).

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Dalam menentukan harga transaksi, Grup menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak (baik secara eksplisit atau implisit) memberikan pelanggan atau Grup manfaat signifikan berupa pendanaan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Tujuan ketika menyesuaikan komponen pendanaan signifikan dalam jumlah imbalan yang dijanjikan adalah agar Grup mengakui pendapatan pada jumlah yang mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pelanggan atas barang atau jasa yang dijanjikan jika pelanggan telah membayar secara kas barang atau jasa tersebut ketika entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan (yaitu harga jual kas). Grup menyajikan dampak pendanaan (pendapatan bunga atau beban bunga) secara terpisah dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam laporan penghasilan komprehensif.

In determining the transaction price, the Group adjust the promised amount of consideration for the effects of the time value of money if the timing of payments agreed to by the parties to the contract (either explicitly or implicitly) provides the customer or the Group with a significant benefit of financing the transfer of goods or services to the customer. The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for the Group to recognize revenue at an amount that reflects the price that a customer would have paid for the promised goods or services if the customer had paid cash for those goods or services when (or as) they transfer to the customer (ie the cash selling price). The Group present the effects of financing (interest revenue or interest expense) separately from revenue from contracts with customers in the statement of comprehensive income.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Grup mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aset kontrak disajikan sebagai piutang retensi dan jumlah tagihan bruto pemberi kerja. Liabilitas kontrak disajikan sebagai jumlah utang bruto pemberi kerja dan pendapatan diterima dimuka.

The Group has recognized contract assets and contract liabilities related with revenue from contract with customers. Contract assets are presented as retention receivables and gross amount due from customers. Contract liabilities are presented as gross amount due to customers and unearned revenues.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non-proyek (beban usaha).

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as non-project expenses (operating expenses).

Pengakuan beban
Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Expense recognition
Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

v. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

v. Provision

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

w. Laba (rugi) per saham dasar dan dilusian

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Grup.

w. Basic and diluted earning (loss) per share

The amount of basic earning (loss) per share is computed by dividing earning (loss) for the year attributable to owners of the parent by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings (loss) per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Group.

x. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (sebagai entitas pelapor) yang meliputi:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

x. Transactions with Related Parties

Related party is a person or an entity related to the Group (as reporting entity) which consist of:

a. A person or a close family member of that person's is related to a reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control of the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity;

b. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifkasi dalam huruf (a);
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

y. Pajak penghasilan dan pajak final

Beban pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a group of which the other entity is a member);
iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
iv. An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to reporting entity;
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel;
viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entities related to the government are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. The government in this case refers to the Minister of Finance who is the shareholder of the entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclose in the relevant Notes.

y. Income tax and final tax

Income tax expense is the combined amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset.

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a. pengakuan awal *goodwill*; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan
c. pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. the initial recognition of goodwill; or
b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and
c. at the time of the transactions, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a. The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes applied by the same taxation authority on either:

i. entitas kena pajak yang sama; atau
ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:
a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah 2,65% final dari jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dipotong oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

Koreksi tehadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak penghasilan atas sewa dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 dan KMK-120/KMK.03/2002 tentang pajak penghasilan final atas penyewaan tanah dan/ atau bangunan.

z. Segmen operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
a. yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang

i. the same taxable entity; or
ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

a. has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and

b. intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Final tax

Based on the Indonesian Government Regulation No. 9 Year 2022 regarding Income Tax for Income from Construction Services is 2,65% of the total payment excluding Value Added Tax and is deducted by the user in the event that the user is the tax withholder.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filing an objection and appeal, when the decision of the objection and appeal is determined.

The income tax on rental revenues is calculated based on Government Regulation (GR) No. 5 year 2002 dated March 23, 2002 and KMK-120/KMK.0312002 regarding final income tax on rental of land and/or building.

z. Operating segment

The Group presented operating segment based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.
An operating segment is a component of the entity:
a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
b. whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be

dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

allocated to the segment and assesses its performance; and
c. for which separate financial information is available.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan konsolidasian. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada masa mendatang.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan
Grup menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam liabilitas keuangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2.

Pajak penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 13.

Sumber utama ketidakpastian estimasi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

3. *CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY*

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure to the consolidated financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require a material adjustment to the carrying amounts of the assets or liabilities in future periods.

Critical judgments in applying accounting policies
In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities
The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition financial liabilities based on PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2.

Income tax
Significant considerations are made in determining corporate income tax liability. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the normal course of business. The Group recognizes the income tax liability based on estimates of whether there will be an additional income tax. Details of the nature and amount of recorded income tax are disclosed in Note 13.

Key sources of estimation uncertainty
The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting year that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Rugi penurunan nilai pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Nilai tercatat aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7 dan 8.

Impairment loss on financial asset measured at amortized cost

The Group assess their financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. The carrying amount of financial assets classified as amortized cost are disclosed in Notes 5, 6, 7 and 8.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap investasi Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each item of the Group's fixed asset, and investment property are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 17.

A change in the estimated useful life of any item of fixed asset would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets. The carrying values of property and equipment are disclosed in Note 17.

Penurunan nilai *goodwill*

Menentukan apakah suatu *goodwill* turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana *goodwill* dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul. Nilai tercatat *goodwill* diungkapkan dalam Catatan 18.

Impairment of goodwill

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash-generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise. The carrying values of goodwill are disclosed in Note 18.

Manfaat karyawan
Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 27.

Employee benefits
The determination of post-employment benefits liabilities is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's post-employment benefit liabilities. The carrying amounts of post-employment benefits liabilities are disclosed in Note 27.

Pengakuan pendapatan dan beban konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Grup mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Grup mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Grup melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Grup untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses. Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif, walaupun Grup berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

Revenue and expense recognition of construction contract
The policy of revenue and expense recognition of construction contract of the Group requires use of estimates which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. The Group recognizes revenues and expenses related to construction contracts based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method).

The Group carry out projects with a duration of more than one accounting period and are recorded as construction contracts. The Group's accounting policy for projects requires revenues and expenses to be allocated in the accounting period and subsequent recognition at the end of the period of contract assets or liabilities for projects in progress. The implementation of this policy requires management to exercise judgment in estimating the total expected revenues and total costs for each project. These estimates are revised as the project progresses to reflect the status of the project and the latest information available to management, changes to those estimates are applied prospectively. Project management conducts regular reviews to ensure the most recent estimates are appropriate. Changes to estimates will be accounted for prospectively, although the Group believes that the estimates made are reasonable and appropriate, significant differences in the actual stage of completion could materially affect the revenue and cost of revenue from construction.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas	36.115.078	6.383.242	***Cash***
Bank			***Bank***
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57.453.922.026	36.523.842.370	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	53.641.273.138	14.293.626.038	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	32.334.736.015	7.165.034.660	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	29.547.079.885	5.961.192.900	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	479.343.720	472.579.951	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**173.456.354.784**	**64.416.275.919**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	13.048.835.635	2.399.361.675	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank DKI	11.602.616.307	51.305.671.021	*PT Bank DKI*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	10.141.187.313	31.384.160.802	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Permata Tbk	78.520.532	2.749.761.909	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Danamon Tbk	71.746.400	115.513.569	*PT Bank Danamon Tbk*
PT Bank BCA Syariah	1.364.641	1.539.532	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank Central Asia Tbk	–	3.436.040.161	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT United Overseas Bank Tbk	–	1.659.455.080	*PT United Overseas Bank Tbk*
MUFG Bank Ltd	–	1.107.661.829	*MUFG Bank Ltd*
PT Bank Index Selindo	–	138.701	*PT Bank Index Selindo*
Sub Jumlah	**34.944.270.828**	**94.159.304.279**	***Sub Total***
Jumlah bank	**208.400.625.612**	**158.575.580.198**	***Total bank***
Deposito (Catatan 40)			***Deposits (Note 40)***
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30.000.000.000	–	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.000.000.000	–	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**60.000.000.000**	**–**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000.000	100.000.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Jumlah deposito	**60.100.000.000**	**100.000.000**	***Total deposits***
Jumlah	**268.536.740.690**	**158.681.963.440**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(473.661.080)	(669.053.871)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**268.063.079.610**	**158.012.909.569**	***Total - net***
Tingkat Suku Bunga Deposito per Tahun	2,1% - 2,5%	2% - 2,5%	*Deposit Interest Rate per Year*
Jangka waktu	1 Bulan/ Months	1 Bulan/ Months	*Time period*

Mutasi atas cadangan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The movements for the allowance for impairment of cash and cash equivalents are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	669.053.871	1.241.597.202	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 33)	137.596.922	–	*Addition (Note 33)*
Pemulihan (Catatan 37)	(332.989.713)	(572.543.331)	*Recovery (Note 37)*
Saldo Akhir	**473.661.080**	**669.053.871**	***Ending Balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas kas dan setara kas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi dikemudian hari.

The management believes that allowance for impairment losses of cash and cash equivalent is sufficient to cover possible losses in the future.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK / *5. SHORT TERM INVESTMENTS*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related party (Notes 40)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.000.000.000	90.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**90.000.000.000**	**90.000.000.000**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Thrid party***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22.841.000.000	17.841.000.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub Jumlah	**22.841.000.000**	**17.841.000.000**	***Sub Total***
Jumlah	**112.841.000.000**	**107.841.000.000**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(88.390.048)	(84.473.473)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**112.752.609.952**	**107.756.526.527**	***Total - net***
Tingkat Suku Bunga	2,5% - 3%	2,5% - 3%	*Interest Rate*
Jangka waktu	1 - 3 Bulan/ Months	1 - 3 Bulan/ Months	*Time period*

Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka yang dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima Grup dari bank-bank tersebut (Catatan 27)

Short term investments represents time deposits used as collateral for loans received by the Group from respective banks. (Note 27)

Mutasi atas cadangan kerugian penurunan nilai investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

The movements for the allowance for impairment of short term investments are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	84.473.473	85.818.369	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 33)	3.916.575	--	*Addition (Note 33)*
Pemulihan (Catatan 37)	--	(1.344.896)	*Recovery (Note 37)*
Saldo Akhir	**88.390.048**	**84.473.473**	***Ending Balances***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi jangka pendek adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi dikemudian hari.

The management believes that allowance for impairment losses of short term investments is sufficient to cover possible losses in the future.

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)	444.758.459.080	737.444.709.210	*Related parties (Note 40)*
Pihak ketiga	1.088.858.576.563	905.977.758.212	*Third parties*
Jumlah	**1.533.617.035.643**	**1.643.422.467.422**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(163.106.672.597)	(136.792.385.097)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.370.510.363.046**	**1.506.630.082.325**	***Total - net***

Berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut: / *Based on business segment are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
Konstruksi	356.893.474.671	618.307.599.515	*Construction*
Sewa	82.997.533.851	98.000.975.472	*Rental*
Ready mix	4.867.450.558	21.136.134.223	*Ready mix*
Jumlah pihak berelasi	**444.758.459.080**	**737.444.709.210**	***Total related parties***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.074.074.487)	(38.574.817.480)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak berelasi - bersih	**410.684.384.593**	**698.869.891.730**	***Total related parties - net***
Pihak ketiga			***Third parties***
Konstruksi	812.064.139.119	668.127.514.141	*Construction*
Sewa	245.219.506.025	213.031.483.552	*Rental*
Ready mix	26.680.807.553	24.818.760.519	*Ready mix*
Mining	4.894.123.866	--	*Mining*
Jumlah pihak ketiga	**1.088.858.576.563**	**905.977.758.212**	***Total third parties***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.032.598.110)	(98.217.567.617)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	**959.825.978.453**	**807.760.190.595**	***Total third parties - net***
Jumlah	**1.370.510.363.046**	**1.506.630.082.325**	***Total***

Berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut: / *Based on aging of receivables are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
> 1 bulan - 12 bulan	1.369.460.059.303	1.514.417.627.506	*> 1 month - 12 months*
> 12 bulan - 15 bulan	15.787.865.214	16.831.494.355	*> 12 months - 15 months*
> 15 bulan - 18 bulan	64.386.651.342	9.762.584.800	*> 15 months - 18 months*
> 18 bulan - 21 bulan	11.459.548.585	4.622.163.534	*> 18 months - 21 months*
> 21 bulan - 24 bulan	11.488.681.532	51.058.194.388	*> 21 months - 24 months*
> 24 bulan - 27 bulan	8.713.225.188	10.894.325.472	*> 24 months - 27 months*
> 27 bulan - 30 bulan	2.029.033.401	743.706.306	*> 27 months - 30 months*
> 30 bulan - 33 bulan	1.123.904.226	248.863.978	*> 30 months - 33 months*
> 33 bulan - 36 bulan	1.393.733.808	124.050.000	*> 33 months - 36 months*
> 36 bulan	47.774.333.044	34.719.457.083	*> 36 months*
Jumlah	**1.533.617.035.643**	**1.643.422.467.422**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(163.106.672.597)	(136.792.385.097)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.370.510.363.046**	**1.506.630.082.325**	***Total - net***

Berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Based on customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT PP (Persero) Tbk	366.227.425.043	398.999.044.725	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Hutama Karya Infrastruktur	21.329.626.581	2.019.640.688	*PT Hutama Karya Infrastruktur*
PT PPRO Sampurna Jaya	18.311.477.733	18.311.477.733	*PT PPRO Sampurna Jaya*
PT Limasland Realty Cilegon	12.588.482.738	12.588.482.738	*PT Limasland Realty Cilegon*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	6.987.102.693	--	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	5.077.293.570	5.077.293.570	*PT Wijaya Karya Bangunan*
PT Brantas Abipraya (Persero)	4.630.904.149	16.091.598.267	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1.688.223.868	5.044.996.293	*PT Pelabuhan Indonesia II(Persero)*
PT PP Properti Tbk	2.379.705.789	2.275.585.789	*PT PP Properti Tbk*
PT PP Properti Suramadu	1.539.595.159	1.539.595.159	*PP Properti Suramadu*
PT PP Infrastruktur	1.305.915.000	1.117.365.000	*PT PP Infrastruktur*
LMA Konsorsium	--	272.399.628.087	*LMA Konsorsium*
Lain-lain (dibawah Rp1 Miliar)	2.692.706.757	1.980.001.161	*Others (below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**444.758.459.080**	**737.444.709.210**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.074.074.487)	(38.574.817.480)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**410.684.384.593**	**698.869.891.730**	***Sub Total - net***
Pihak ketiga	**1.088.858.576.563**	**905.977.758.212**	***Third parties***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.032.598.110)	(98.217.567.617)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**959.825.978.453**	**807.760.190.595**	***Sub Total - net***
Jumlah - bersih	**1.370.510.363.046**	**1.506.630.082.325**	***Total - net***

Mutasi atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements allowances for the impairment of trade receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	136.792.385.097	127.822.117.196	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 33)	26.314.287.500	10.365.235.119	*Addition (Note 33)*
Pemulihan (Catatan 37)	--	(1.394.967.218)	*Recovery (Note 37)*
Saldo Akhir	**163.106.672.597**	**136.792.385.097**	***Ending Balances***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

The management believes that allowance for impairment losses of trade receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible trade receivables in the future.

7 PIUTANG RETENSI / *7. RETENTION RECEIVABLES*

Piutang retensi merupakan pendapatan Grup yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan, dengan rincian sebagai berikut:

Retention receivables represents the Group's earnings which are retained by the customers as guarantee during the maintenance period, with details are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT PP (Persero) Tbk	60.717.673.666	119.350.213.323	*PT PP (Persero) Tbk*
PT PPRO Sampurna Jaya	2.454.945.296	2.454.945.296	*PT PPRO Sampurna Jaya*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.177.805.882	2.513.129.105	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1.027.666.045	1.027.666.045	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Brantas Abipraya (Persero)	322.501.409	3.156.113.825	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
LMA Konsorsium	--	64.203.992.671	*LMA Konsorsium*
Lain-lain (dibawah Rp1 Miliar)	1.409.564.546	1.409.564.547	*Others (below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**68.110.156.844**	**194.115.624.812**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.193.967.510)	(37.043.882.108)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**38.916.189.334**	**157.071.742.704**	***Sub Total - net***
Pihak ketiga	**104.650.952.261**	**51.229.432.796**	***Third parties***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.998.454.698)	(12.513.818.911)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**68.652.497.563**	**38.715.613.885**	***Sub Total - net***
Jumlah - bersih	**107.568.686.897**	**195.787.356.589**	***Total - net***

Mutasi atas penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements for the impairment of retention receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	49.557.701.019	48.608.349.982	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 33)	15.634.721.189	2.930.659.267	*Addition (Note 33)*
Pemulihan (Catatan 37)	--	(1.981.308.230)	*Recovery (Note 37)*
Saldo Akhir	**65.192.422.208**	**49.557.701.019**	***Ending Balances***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi dikemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses on retention receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible retention receivables in the future.

8. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA / *8. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)	662.679.124.955	816.742.954.396	*Related parties (Note 40)*
Pihak ketiga	2.816.174.554.879	1.872.558.540.930	*Third parties*
Jumlah	**3.478.853.679.834**	**2.689.301.495.326**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(229.088.591.713)	(214.277.560.726)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.249.765.088.121**	**2.475.023.934.600**	***Total - net***

Berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Based on customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT PP (Persero) Tbk	619.816.118.870	639.258.297.493	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Hutama Karya Insfrastruktur	20.280.364.771	18.349.185.329	*PT Hutama Karya Insfrastruktur*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	10.062.565.088	6.159.892.034	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	5.687.870.874	5.687.870.874	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Angkasa Pura II (Persero)	2.950.214.378	2.950.214.378	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Grahaprima Realtindo	1.623.870.330	1.623.870.330	*PT Grahaprima Realtindo*
PT PPRO Sampurna Jaya	1.449.477.336	1.449.477.338	*PT PPRO Sampurna Jaya*
LMA Konsorsium	--	138.569.740.627	*LMA Konsorsium*
PT Brantas Abipraya (Persero)	--	1.424.005.759	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
Lain-lain (dibawah Rp1 Miliar)	808.643.308	1.270.400.234	*Others (below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**662.679.124.955**	**816.742.954.396**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(194.216.793.289)	(187.983.348.801)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**468.462.331.666**	**628.759.605.595**	***Sub Total - net***
Pihak ketiga	**2.816.174.554.879**	**1.872.558.540.930**	***Third parties***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.871.798.424)	(26.294.211.925)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**2.781.302.756.455**	**1.846.264.329.005**	***Sub Total - net***
Jumlah - bersih	**3.249.765.088.121**	**2.475.023.934.600**	***Total - net***

Mutasi atas penurunan nilai tagihan bruto pemberi kerja adalah sebagai berikut:

The movements for the impairment of gross amount due from customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	214.277.560.726	208.891.648.135	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 33)	14.811.030.987	5.385.912.591	*Addition (Note 33)*
Saldo Akhir	**229.088.591.713**	**214.277.560.726**	***Ending Balances***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto pemberi kerja cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto pemberi kerja dikemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses on gross amount due from customers is sufficient to cover possible losses from uncollectible of gross amount due from customers in the future.

9. PIUTANG LAIN-LAIN / *9. OTHER RECEIVABLES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Jangka pendek			***Short term***
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PPRE - RPJ KSO	1.913.030.000	3.644.397.446	*PPRE - RPJ KSO*
PP Presisi - Sarana KSO	1.875.000.000	1.875.000.000	*PP Presisi - Sarana KSO*
PP Presisi - Yalapersada KSO	1.163.541.268	573.383.182	*PP Presisi - Yalapersada KSO*
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	515.000.000	--	*PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO*
Piutang pegawai	484.004.484	599.637.414	*Employee receivables*
Sub Jumlah	**5.950.575.752**	**6.692.418.042**	***Sub Total***
Pihak ketiga	**12.851.458.750**	**23.330.100.055**	***Third parties***
Jumlah	**18.802.034.502**	**30.022.518.097**	***Total***

Piutang dari KSO merupakan biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup dan akan ditagihkan kepada KSO.

Receivables from JO represents expenses paid in advance by the Group and will be billed to JO.

Piutang lain-lain kepada PT Selama Indah Dua merupakan pinjaman yang diberikan oleh LMA, entitas anak, untuk membiayai operasional PT Selama Indah Dua. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 9,75% per tahun dan telah diperpanjang dengan addendum No. 003/ADD-III/PPM/LMA-SI/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 26 Mei 2025.

Other Receivables to PT Selama Indah Dua represents loan provided by LMA, subsidiary, third parties to finance the operations of PT Selamat Indah Dua. The loan bears interest at 9.75% per year and has been extended with addendum No. 003/ADD-III/PPM/LMA-SI/II/2024 dated February 2, 2024 until May 26, 2025.

Piutang pegawai merupakan kebijakan pemberian kredit karyawan LMA mengacu pada surat edaran LMA No. 663/LMA/HRD/EM/XI/2020 perihal pinjaman kredit karyawan dengan masa pinjaman satu tahun.

Employee receivables are LMA employee credit policies referring to LMA circular letter No. 663/LMA/HRD/EM/XI/2020 regarding employee credit loans with a one-year loan period.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak diperlukan karena manajemen berpendapat seluruh piutang dapat ditagih seluruhnya.

Management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is not necessary since all such receivables are fully collectible.

10 PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / *10. FINANCE LEASE RECEIVABLES*

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai pesewa untuk alat berat pada proyek hauling milik PT Weda Bay Nickel. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 4 tahun.

The Company entered into a finance lease agreement as a lessor for heavy equipment in the hauling project owned by PT Weda Bay Nickel. The term of the finance lease is 4 years.

	2024 Rp	2023 Rp	
Jumlah piutang sewa pembiayaan			*Amounts finance leases receivables*
Tahun 1	--	7.817.930.126	*Year 1*
Tahun 2	--	5.211.953.418	*Year 2*
Tahun 3	--	--	*Year 3*
Tahun 4	--	--	*Year 4*
Pembayaran sewa tidak didiskontokan	--	13.029.883.544	*Undiscount lease payment*
Nilai sisa tidak dijamin	--	--	*Unguaranteed residual values*
Investasi bruto di sewa	--	13.029.883.544	*Gross investment in the lease*
Dikurangi:			***Less:***
Pendapatan bunga yang belum diterima	--	972.016.482	*Unearned interest income*
Nilai sekarang dari piutang sewa	--	12.057.867.062	*Present value of lease receivable*
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	*Allowance for impairment losses*
Investasi bersih dalam sewa	**--**	**12.057.867.062**	***Net investment in the lease***
Pembayaran sewa tidak didiskontokan dianalisis sebagai:			*Undiscounted lease payments analyzed as:*
Dapat dipulihkan dalam 12 bulan	--	7.817.930.126	*Recoverable within 12 months*
Dapat dipulihkan setelah 12 bulan		5.211.953.418	*Recoverable after 12 months*
Jumlah	**--**	**13.029.883.544**	***Total***

	2024 Rp	2023 Rp	
Investasi neto dianalisis sebagai:			*Net investment in the lease analyzed as:*
Dapat dipulihkan dalam 12 bulan	--	7.017.508.580	*Recoverable within 12 months*
Dapat dipulihkan setelah 12 bulan	--	5.040.358.482	*Recoverable after 12 months*
Jumlah	**--**	**12.057.867.062**	***Total***
Rincian berdasarkan penyewa:			*By lessee:*
PT Weda Bay Nickel	--	12.057.867.062	*PT Weda Bay Nickel*
Jumlah	**--**	**12.057.867.062**	***Total***

11 PERSEDIAAN / *11. INVENTORIES*

Merupakan persediaan bahan untuk pembuatan *bekisting* kolom, *bekisting* dinding dan bahan *batching plant* serta suku cadang, sebagai berikut:

Represent inventories of raw material for building of bekisting wall and column, raw material for batching plant and sparepart, are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Suku cadang	77.145.116.425	81.190.370.224	*Spare part*
Bahan baku konstruksi	26.093.201.588	43.693.904.205	*Construction raw material*
Solar dan oli	7.042.192.342	14.255.964.724	*Oil and gasoline*
Undercariege	18.735.358.482	12.013.803.260	*Undercariege*
Engine	12.495.072.692	6.404.395.464	*Engine*
Fastener	8.918.846.071	7.904.036.784	*Fastener*
Wirgent	2.190.000.000	2.190.000.000	*Wirgent*
Jumlah	**152.619.787.600**	**167.652.474.661**	***Total***

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

Based on the review of the condition of the inventories, management Group believes that no provision for impairment of inventories is necessary.

12. UANG MUKA / *12. ADVANCES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Uang muka pemasok	45.381.984.931	29.701.372.409	*Supplier advances*
Uang muka beban tak langsung	9.587.458.250	6.408.650.294	*Indirect expense advances*
Uang muka dinas	634.587.406	634.587.408	*Business travel advances*
Jumlah	**55.604.030.587**	**36.744.610.111**	***Total***

Uang muka pemasok merupakan pembayaran di muka atas pembelian material.

Supplier advances represent advance payments for material purchases.

Uang muka beban tak langsung merupakan pembayaran dimuka kepada supplier atas pembelian alat berat dan material untuk proyek pekerjaan sipil yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas saldo utang pemasok tersebut.

Represents advances payment to the supplier for the purchase of heavy equipment and materials for a civil engineering project, which will be accounted for as a bill on the supplier's outstanding balance.

Uang muka dinas merupakan pembayaran di muka untuk persiapan proyek.

Service advance is an advance payment for project preparation.

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Pajak dibayar di Muka / *a. Prepaid taxes*

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 4 (2)	920.037.688	237.010.309.534	*Article 4 (2)*
Pasal 28	1.590.000.000	–	*Article 22*
Jumlah	**2.510.037.688**	**237.010.309.534**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Utang cadangan PPh final	13.536.081.258	281.091.078.553	*PPh final reserve payable*
PPN Keluaran	11.459.568.431	4.245.338.910	*VAT Out*
PPN Pasal 16 D	87.465.598	87.465.598	*VAT Article 16D*
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 4 (2)	27.791.175	238.705.137	*Article 4 (2)*
Pasal 21	13.441.890	--	*Article 21*
Pasal 23	--	170.858.832	*Article 23*
Pasal 29	--	12.349.999	*Article 29*
Sub jumlah	**25.124.348.352**	**285.845.797.029**	***Sub total***
Entitas Anak			***Subsidiary***
Utang cadangan PPh final	15.453.040.008	17.801.241.410	*PPh final reserve payable*
PPN Keluaran	5.585.264.284	22.521.122.269	*VAT Out*
PPN Pasal 16 D	1.391.836	--	*VAT Article 16 D*
Pajak penghasilan:			*Income tax :*
Pasal 4 (2)	9.635.456	227.104.870	*Article 4 (2)*
Pasal 21	88.232.207	465.408.494	*Article 21*
Pasal 23	81.666.846	130.092.283	*Article 23*
Pasal 25	172.905.090	182.781.793	*Article 25*
Pasal 29	23.172.745	30.949.302	*Article 29*
Sub jumlah	21.415.308.472	41.358.700.421	***Sub total***
Jumlah	**46.539.656.824**	**327.204.497.450**	***Total***

c. Pajak final / *c. Tax expenses*

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan	60.203.936.481	60.931.274.304	*The Company*
Entitas anak	34.757.347.540	35.451.565.848	*Subsidiary*
Jumlah	**94.961.284.021**	**96.382.840.152**	***Total***

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak penghasilan final Perusahaan dengan jumlah yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak efektif terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Reconciliation between the amount of the Company final income tax expense with the amount calculated by applying an effective tax rate to profit before tax according to the income statement is as follow:

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Jasa Konstruksi			*Construction*
Pendapatan Jasa Konstruksi	**2.195.216.749.177**	**2.031.042.476.992**	***Construction Income***
Ditambah (Dikurangi):			***Added (Less):***
Pengenaan Pajak	76.629.910.483	268.250.892.970	*Difference of Tax*
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena pajak	2.271.846.659.660	2.299.293.369.962	*Construction Taxable Income*
Beban Pajak Final Konstruksi (Tarif 2,65%)	**60.203.936.481**	**60.931.274.304**	***Constructions Final Tax Expenses (Rate 2.65%)***

Pemerintah telah melakukan perubahan pemajakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, yang berlaku efektif sejak 21 Februari 2022.

The government has made changes to the taxation of income from the construction services business as stipulated in Government Regulation Number 9 of 2022 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 51 of 2008 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business, which has been ffecttive since February 21, 2022.

Tarif baru 2,65% berlaku untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, artinya gabungan antara pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.

The new rate of 2.65% applies to integrated construction work, meaning a combination of construction work and construction consulting, which is carried out by service providers who have business entity certificates.

d. Pajak Penghasilan Badan / *Income Tax*

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban Pajak Penghasilan			***Income Tax Expense***
Perusahaan	5.784.468.370	5.794.863.870	*The Company*
Entitas Anak	3.750.295.018	3.211.932.912	*Subsidiary*
Sub jumlah	9.534.763.388	9.006.796.782	***Sub total***
Pajak Dibayar Dimuka			***Prepaid taxes***
Perusahaan	7.374.468.370	5.782.513.871	*The Company*
Entitas Anak	3.727.121.973	3.180.983.610	*Subsidiary*
Sub jumlah	11.101.590.343	8.963.497.481	***Sub total***
(Lebih bayar) Kurang Bayar Pajak Penghasilan			***(Overpayment) Underpayment Income Tax Payable***
Perusahaan	(1.590.000.000)	12.349.999	*The Company*
Entitas Anak	23.173.045	30.949.302	*Subsidiary*
Jumlah	**(1.566.826.955)**	**43.299.301**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dengan laba kena pajak menjadi dasar dalam pengisian SPT PPh Badan.

A reconciliation between the consolidated profit before income tax as reported in the consolidated statements of profit or loss with taxable income are the basis for filling in the corporate income tax return.

	2024 Rp	2023 Rp	
Laba Sebelum Pajak Final - Laporan Laba Rugi Konsolidasian	203.632.366.703	181.788.066.851	*Profit Before Final Tax- Consolidated statements of profit or loss*
Beban Pajak Final	(351.346.144.407)	(305.707.387.516)	*Final Tax Expenses*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Entitas Anak	(217.020.897.694)	(192.121.547.081)	*Profit Before Tax - Subsidiary Entities*
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final	391.027.713.443	342.381.158.064	*Portion of Profit Subject to Final Income Tax*
Taksiran Laba Penghasilan Non Final - Entitas Induk	26.293.038.045	26.340.290.318	***Estimated Profit Before Tax - Parent Entity***
Beban Pajak Penghasilan	**5.784.468.370**	**5.794.863.870**	***Income Tax Expenses***
Dikurangi:			***Less:***
Kredit Pajak PPh 22	898.912.631	1.022.785.848	*Prepaid Tax Art 22*
Kredit Pajak PPh 23	2.055.577.031	438.907.110	*Prepaid Tax Art 23*
Kredit Pajak PPh 25	4.419.978.708	4.320.820.913	*Prepaid Tax Art 25*
Jumlah Kredit Pajak	**7.374.468.370**	**5.782.513.871**	***Total Prepaid Tax***
(Lebih Bayar) Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**(1.590.000.000)**	**12.349.999**	***(Overpayment) Under Payment Income Tax***

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah sesuai dengan SPT yang dilaporkan ke kantor pajak.

The Corporate Income Tax calculations for the years ending December 31, 2023 are in accordance with the Annual Tax Returns (SPT) reported to the tax office.

e. Administrasi perpajakan

Surat ketetapan pajak
Pada tanggal 27 Juni 2023 Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengkonfimasi kelebihan pembayaran sebesar Rp28.586.682.325 dan pada tanggal 3 Oktober 2023 Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran sebesar Rp55.897.130.195.

e. Tax administration

Tax assessment letters
On June 27, 2023, the Company received a Tax Overpayment Assessment Notice (SKPLB) for Value Added Tax (VAT) confirming an overpayment of Rp28,586,682,325, and on October 3, 2023, the Company received a Overpayment Refund Determination Letter (SKPKPP) for Income Tax (PPh) confirming an overpayment of Rp55,897,130,195.

14. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Merupakan biaya asuransi di bayar dimuka, sebagai berikut:

14. PREPAID EXPENSES

Represents prepaid of insurance expenses, are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Alat berat	28.509.152.821	38.212.736.899	*Heavy equipment*
Kesehatan	4.938.094.930	1.969.372.503	*Medical*
Kendaraan	157.846.212	–	*Vehicle*
Jumlah	**33.605.093.963**	**40.182.109.402**	***Total***

Aset tetap berupa alat berat, PCH, *scaffolding, bekisting*, dan kendaraan telah diasuransikan. Beban asuransi tersebut dibebankan sesuai masa berlakunya.

Property and equipments includes heavy equipment, PCH, scaffolding, formwork, and vehicles are insured. The insurance expenses are charged on validity period.

15. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA / *15. INVESTMENT IN JOINT VENTURE*

Nama Ventura Bersama / *Name of Joint Venture*	Nama Proyek / *Project Name*	Persentase / *Percentage*	2024 Rp	2023 Rp	Masa Kontrak / *Contract Period* Mulai / *Start*	Masa Kontrak / *Contract Period* Akhir / *Ending*
PPRE - RPJ KSO	Pembangunan Sistem Pengambilan dan Treatment Sampah Badan Air Melalui Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung Segmen TB Simatupang	55%	717.297.142	1.817.297.142	22 April / *April 22, 2022*	22 Oktober / *October 22, 2023*
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	Pembangunan Jalur KA Lintas Medan - Binjai	60%	2.862.988.025	2.862.988.025	9 Mei / *May 9, 2022*	24 Oktober / *October 24, 2024*
PP Presisi - Sarana KSO	Pembangunan Jembatan GORR Segmen I STA 7700 dan STA 8500	70%	2.980.726.687	5.739.819.570	26 Agustus / *August 26, 2022*	26 April / *April 26, 2024*
PP Presisi - Yalapersada KSO	Pembangunan Prasarana dan Sarana PP Ukurlaran SKPT Saumlaki	51%	1.250.000.000	1.250.000.000	27 Oktober / *October 27, 2022*	20 October / *October 20, 2024*
Jumlah / *Total*			**7.811.011.854**	**11.670.104.737**		

Ringkasan informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dari entitas Ventura Bersama Grup sebagai berikut:

Summarized financial information for the year ended December 31, 2024 and 2023 in respect of the Joint Ventures are below:

2024					
Nama Ventura Bersama / *Joint Venture Name*	Nama Proyek / *Project Name*	Total Aset / *Total Assets* Rp	Total Liabilitas / *Total Liabilities* Rp	Pendapatan *Construction* Rp	Laba (Rugi) Bersih / *Net Profit (Loss)* Rp
PPRE - RPJ KSO	Pembangunan Sistem Pengambilan dan Treatment Sampah Badan Air Melalui Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung Segmen TB Simatupang	9.134.503.505	2.630.327.142	10.335.789.120	–
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	Pembangunan Jalur KA Lintas Medan - Binjai	15.348.676.379	15.348.676.379	120.173.366.677	–
PP Presisi - Sarana KSO	Pembangunan Jembatan GORR Segmen I STA 7700 dan STA 8500	5.074.867.784	5.074.867.784	34.292.776.999	–
PP Presisi - Yalapersada KSO	Pembangunan Prasarana dan Sarana PP Ukurlaran SKPT Saumlaki	9.089.806.946	9.089.806.946	59.872.890.354	–

2023					
Nama Ventura Bersama / *Joint Venture Name*	Nama Proyek / *Project Name*	Total Aset / *Total Assets* Rp	Total Liabilitas / *Total Liabilities* Rp	Pendapatan *Construction* Rp	Laba (Rugi) Bersih / *Net Profit (Loss)* Rp
PPRE - RPJ KSO	Pembangunan Sistem Pengambilan dan Treatment Sampah Badan Air Melalui Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung Segmen TB Simatupang	66.216.026.063	59.711.849.700	60.879.953.996	–
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	Pembangunan Jalur KA Lintas Medan - Binjai	41.250.880.103	36.479.233.392	77.111.306.545	3.750.000.000
PP Presisi - Sarana KSO	Pembangunan Jembatan GORR Segmen I STA 7700 dan STA 8500	20.110.178.788	10.410.436.198	50.914.565.308	714.285.714
PP Presisi - Yalapersada KSO	Pembangunan Prasarana dan Sarana PP Ukurlaran SKPT Saumlaki	19.636.793.653	16.846.317.203	58.369.373.721	2.450.980.392

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements of investment in joint venture are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai tercatat awal tahun	11.670.104.737	162.639.111.302	*Carrying amount at beginning of the year*
Mutasi investasi - bersih	(3.859.092.883)	(165.675.207.596)	*Investment movements - net*
Bagian laba ventura bersama	–	14.706.201.031	*Share in profit of joint ventures*
Saldo Akhir	**7.811.011.854**	**11.670.104.737**	***Ending Balances***

16. ASET HAK GUNA / *16. RIGHT-OF-USE ASSETS*

Grup menyewa beberapa aset termasuk kendaraan, alat berat dan *tower crane*. Masa sewa rata-rata adalah 3 tahun.

The Group leases several assets including vehicles, heavy equipment, and tower crane. The average lease term is 3 years.

Grup memiliki opsi untuk membeli peralatan manufaktur tertentu dengan jumlah nominal pada akhir masa sewa. Kewajiban Perusahaan dijamin dengan hak milik pesewa atas aset yang disewa untuk sewa tersebut.

The Group has options to purchase certain manufacturing equipment for a nominal amount at the end of the lease term. The Company's liabilities are secured by the lessors title to the leased assets for such leases.

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Mesin dan Peralatan	644.665.974.548	417.283.514.660	15.392.778.688	165.713.387.378	1.212.270.097.898	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	111.503.636.815	19.986.645.072	22.363.281.287	(2.357.418.960)	106.769.581.640	*Vehicles*
Jumlah Harga Perolehan	756.169.611.363	437.270.159.732	37.756.059.975	163.355.968.418	1.319.039.679.538	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Mesin dan Peralatan	240.308.497.031	240.202.823.858	15.392.778.688	(3.173.221.753)	461.945.320.448	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	83.972.285.118	10.196.582.290	21.597.688.018	(400.930.426)	72.170.248.964	*Vehicles*
Jumlah	324.280.782.149	250.399.406.148	36.990.466.706	(3.574.152.179)	534.115.569.412	***Total***
Nilai Tercatat	**431.888.829.214**				**784.924.110.126**	***Carrying Amount***

	2023					
	Saldo Awal/ *Beginning* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Mesin dan Peralatan	553.530.565.959	130.728.374.089	-	(39.592.965.500)	644.665.974.548	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	120.389.118.873	5.829.463.442	11.085.007.500	(3.629.938.000)	111.503.636.815	*Vehicles*
Jumlah Harga Perolehan	673.919.684.832	136.557.837.531	11.085.007.500	(43.222.903.500)	756.169.611.363	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Mesin dan Peralatan	156.382.671.150	97.630.619.516	-	(13.704.793.635)	240.308.497.031	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	80.685.805.593	14.895.736.880	10.860.693.334	(748.564.021)	83.972.285.118	*Vehicles*
Jumlah	237.068.476.743	112.526.356.396	10.860.693.334	(14.453.357.656)	324.280.782.149	***Total***
Nilai Tercatat	**436.851.208.089**				**431.888.829.214**	***Carrying Amount***

Alokasi penyusutan aset hak guna ke harga pokok pendapatan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp250.339.406.148 dan Rp112.526.356.396 (Catatan 31).

The allocation of depreciation of right of use assets to cost of revenue in 2024 and 2023 is Rp250,339,406,148 and Rp112,526,356,396, respectively (Note 31).

17. ASET TETAP / *17. PROPERTY AND EQUIPMENT*

	2024						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Revaluasi/ *Revaluation* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan							***Acquisition Cost***
Tanah	287.924.088.250	--	--	--	(4.600.369.250)	283.323.719.000	*Land*
Bangunan	42.619.049.678	--	1.132.032.692	--	7.811.212.027	49.298.229.013	*Buildings*
Apartemen	10.351.162.000	--	519.227.850	--	595.944.850	10.427.879.000	*Apartment*
Mesin dan Peralatan	3.959.673.767.296	293.167.564.353	379.843.973.456	(163.355.968.418)	--	3.709.641.389.775	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	37.274.557.864	444.774.000	555.568.575	--	--	37.163.763.289	*Vehicles*
Inventaris Kantor	14.101.956.025	--	--	--	--	14.101.956.025	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**4.351.944.581.113**	**293.612.338.353**	**382.050.802.573**	**(163.355.968.418)**	**3.806.787.627**	**4.103.956.936.102**	***Sub Total***
Aset dalam Penyelesaian							***Assets in Construction***
Bangunan	6.718.000.000	--	--	--	--	6.718.000.000	*Buildings*
Sub Jumlah	**6.718.000.000**	--	--	--	--	**6.718.000.000**	***Sub Total***
Jumlah Harga Perolehan	**4.358.662.581.113**	**293.612.338.353**	**382.050.802.573**	**(163.355.968.418)**	**3.806.787.627**	**4.110.674.936.102**	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciation***
Bangunan	--	1.776.356.270	1.132.032.722	--	--	644.323.548	*Buildings*
Apartemen	--	519.227.850	519.227.850	--	--	--	*Apartment*
Mesin dan Peralatan	2.813.638.796.257	340.744.131.880	324.628.610.894	3.173.221.753	--	2.832.927.538.996	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	30.248.834.180	2.468.815.094	555.568.570	400.930.426	--	32.563.011.130	*Vehicles*
Inventaris Kantor	14.076.939.185	25.026.845	--	--	--	14.101.966.030	*Office Equipments*
Jumlah	**2.857.964.569.622**	**345.533.557.939**	**326.835.440.036**	**3.574.152.179**	--	**2.880.236.839.704**	***Total***
Nilai Tercatat	**1.500.698.011.491**					**1.230.438.096.398**	***Carrying Amount***

	2023						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Revaluasi/ *Revaluation* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan							***Acquisition Cost***
Tanah	281.601.230.250	--	--	3.978.178.000	2.344.680.000	287.924.088.250	*Land*
Bangunan	42.821.552.388	--	1.738.207.472	880.680.928	655.023.834	42.619.049.678	*Buildings*
Apartemen	9.365.005.000	--	468.250.250	1.454.407.250	–	10.351.162.000	*Apartment*
Mesin dan Peralatan	3.893.145.269.834	141.042.368.517	114.106.836.555	39.592.955.500	–	3.959.673.757.296	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	36.302.544.324	980.000.000	3.637.924.460	3.629.938.000	–	37.274.557.864	*Vehicles*
Inventaris Kantor	14.101.956.025	--	--	–	–	14.101.956.025	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**4.277.337.557.821**	**142.022.368.517**	**119.951.218.737**	**49.536.159.678**	**2.999.703.834**	**4.351.944.571.113**	***Sub Total***
Aset dalam Penyelesaian							***Assets in Construction***
Bangunan	7.782.674.500	--	139.674.500	(925.000.000)	–	6.718.000.000	*Buildings*
Sub Jumlah	**7.782.674.500**	--	**139.674.500**	**(925.000.000)**	–	**6.718.000.000**	***Sub Total***
Jumlah Harga Perolehan	**4.285.120.232.321**	**142.022.368.517**	**120.090.893.237**	**48.611.159.678**	**2.999.703.834**	**4.358.662.571.113**	***Total Acquisition Cost***

	2023						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Revaluasi/ *Revaluation* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciation***
Bangunan	--	1.738.207.472	1.738.207.472	--	--	--	*Buildings*
Apartemen	--	468.250.250	468.250.250	--	--	--	*Apartment*
Mesin dan Peralatan	2.528.853.844.389	383.077.822.913	111.997.664.680	13.704.793.635	--	2.813.638.796.257	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	30.250.346.531	2.653.440.580	3.403.516.952	748.564.021	--	30.248.834.180	*Vehicles*
Inventaris Kantor	13.935.540.275	141.398.910	--	--	--	14.076.939.185	*Office Equipments*
Jumlah	**2.573.039.731.195**	**388.079.120.125**	**117.607.639.354**	**14.453.357.656**	--	**2.857.964.569.622**	***Total***
Nilai Tercatat	**4.285.120.232.321**					**1.500.698.001.491**	***Carrying Amount***

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation was allocated are as follows:

	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 31)	339.793.371.615	382.857.230.640	*Cost of revenue (Note 31)*
Beban usaha (Catatan 32)	5.740.176.324	5.221.899.486	*Operating expenses (Note 32)*
Jumlah	**345.533.547.939**	**388.079.130.126**	***Total***

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period.

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Property and equipment, except land, are insured with various insurance companies against fire, theft and other possible risk, as follows:

	Jumlah pertanggungan/ *Sum insured*		
Perusahaan asuransi	**2024 Rp**	**2023 Rp**	***Insurance company***
PT Asuransi Chubb Syariah	1.100.158.498.454	861.458.252.152	*PT Asuransi Chubb Syariah*
PT Sompo Insurance Indonesia	216.357.548.100	83.832.000.150	*PT Sompo Insurance Indonesia*
PT Asuransi Raksa	122.835.574.350	--	*PT Asuransi Raksa*
PT MNC Asuransi Indonesia	103.228.326.200	37.767.750.000	*PT MNC Asuransi Indonesia*
PT Asuransi Ramayana	76.371.379.000	4.218.400.000	*PT Asuransi Ramayana*
PT Asuransi Umum BCA	37.400.000.000	--	*PT Asuransi Umum BCA*
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	33.583.882.500	51.281.377.500	*PT Asuransi Dayin Mitra Tbk*
PT Asuransi Astra Buana	30.222.500.000	--	*PT Asuransi Astra Buana*
PT Asuransi Tri Pakarta	24.232.099.516	89.353.392.328	*PT Asuransi Tri Pakarta*
PT Sunday Insurance Indonesia	20.835.000.000	--	*PT Sunday Insurance Indonesia*
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	47.680.680	47.680.680	*PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk*
PT Asuransi Askrida Syariah	--	185.630.526.335	*PT Asuransi Askrida Syariah*
PT Asuransi Central Asia	--	38.428.650.000	*PT Asuransi Central Asia*
PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	--	13.853.000.000	*PT Asuransi Bhakti Bhayangkara*
PT KSK Insurance Indonesia	--	9.761.900.000	*PT KSK Insurance Indonesia*
PT Asuransi Sahabat Insurance	--	1.814.000.000	*PT Asuransi Sahabat Insurance*
PT Asuransi Total Bersama	--	1.750.000.000	*PT Asuransi Total Bersama*
Jumlah	**1.765.272.488.800**	**1.379.196.929.145**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses from the insured risk.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap. Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Based on the management's review, there are no events or changes in circumstances indicating a decline in the value of fixed assets. Management has not established an allowance for impairment of fixed assets as of December 31, 2024, and 2023.

Tidak terdapat aset yang tidak digunakan untuk sementara, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada 31 Desember 2024 dan 2023.

There are no temporarily unused assets, property and equipments that have been discontinued from active use and not classified as available-for-sale as at December 31, 2024 and 2023.

Jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.302.636.496.886 dan Rp1.293.477.195.269

The total cost of property and equipment that have been fully depreciated and still in use as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,302,636,496,886 and Rp1,293,477,195,269 respectively.

Penilaian kembali aset tetap
Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No. 00008/2.0041-12/PI/06/0142/1/I/2025 dalam laporannya tertanggal 22 Januari 2025 untuk tahun 2024 dan No. 00020/2.0041-14/PI/03/0605/1/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 untuk tahun 2023. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan pendekatan biaya.

Revaluation of property and equipment
An assessment of the fair value of property and equipments in the form of land and buildings is carried out by an independent appraiser who has registered at OJK, KJPP Dasa'at, Yudistira and Partners No. 00008/2.0041-12/PI/06/0142/1/I/2025 in its report dated January 22, 2025 for 2024 and No. 00020/2.0041-14/PI/03/0605/1/I/2024 dated January 18, 2024 for 2023. Appraisal method were based on the market value approach and cost approach.

	Jumlah tercatat/ *Net carrying value*		Nilai pasar/ *Market Value*		Keuntungan (kerugian) revaluasi/ *Gain (loss) on revaluation*		
	2024 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2023 Rp	
Tanah							***Land***
Perusahaan	84.557.940.000	82.213.260.000	85.452.330.000	84.557.940.000	894.390.000	2.344.680.000	*Company*
LMA	203.366.148.250	199.387.970.250	197.871.389.000	203.366.148.250	(5.494.759.250)	3.978.178.000	*LMA*
Sub Jumlah	**287.924.088.250**	**281.601.230.250**	**283.323.719.000**	**287.924.088.250**	**(4.600.369.250)**	**6.322.858.000**	***Sub Total***
Bangunan							***Buliding***
Perusahaan	12.100.276.452	12.089.576.166	17.506.670.000	12.744.600.000	5.406.393.548	655.023.834	*Company*
LMA	31.579.276.014	30.978.912.862	34.580.039.343	32.389.001.040	3.000.763.329	1.410.088.178	*LMA*
Sub Jumlah	**43.679.552.466**	**43.068.489.028**	**52.086.709.343**	**45.133.601.040**	**8.407.156.877**	**2.065.112.012**	***Sub Total***
Jumlah	**331.603.640.716**	**324.669.719.278**	**335.410.428.343**	**333.057.689.290**	**3.806.787.627**	**8.387.970.012**	***Total***

Keuntungan atas penjualan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The gain on sales on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Harga jual	56.682.263.861	35.042.675.883	*Selling Price*
Nilai tercatat	55.215.362.568	2.343.579.383	*Net book value*
Keuntungan atas penjualan (Catatan 37)	**1.466.901.293**	**32.699.096.500**	***Gain on sale (Note 37)***

Aset dalam penyelesaian
Merupakan bangunan dalam bentuk 1 unit mess karyawan, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian adalah 95% dari nilai kontrak.

Manajemen tidak melihat peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian.

Assets under construction
Represents a building in the form of 1 unit employee mess, as at December 31, 2024 and 2023, the percentage level of completion of assets under construction is 95% of the contract value.

Management does not foresee any events that may occur that would prevent completion of such construction in progress.

18. GOODWILL / *18. GOODWILL*

Merupakan *goodwill* atas transaksi kombinasi bisnis LMA pada 2017, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 saldo *goodwill* sebesar Rp246.863.514.371.

Pada bulan Juni 2017, Perusahaan mengakuisisi 51% saham LMA melalui pembelian 331.500 lembar saham milik Tuan Afandi dengan biaya perolehan sebesar Rp798.000.000.000. Perusahaan mencatat aset dan liabilitas LMA dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2017.

Berdasarkan penilaian kembali oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan dalam laporan No. 00030/2.0041-00/BS/03/0384/1/II/2025 tertanggal 5 Februari 2025 dan No. 00168/2.0041-03/PI/07/0379/0/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 nilai pasar 51% ekuitas LMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.557.000.000.000 dan Rp1.225.781.813.000.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas *goodwill* tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang mengharuskan Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai atas *goodwill*, selain dari pengujian tahunan yang diungkapan pada Catatan ini.

Uji penurunan nilai terhadap *goodwill*
Dalam menguji apakah penurunan nilai *goodwill* diperlukan, nilai tercatat *goodwill* dialokasikan ke aset atau unit penghasil kas yang relevan untuk mendapatkan nilai tercatat kombinasian. Nilai tercatat kombinasian tersebut dibandingkan dengan nilai terpulihkan unit penghasil kas. Perusahaan menguji penurunan nilai *goodwill* setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

Represents goodwill for the LMA business combination transaction in 2017, as at December 31, 2024 and December 31, 2023 goodwill balance amounted to Rp246,863,514,371.

On June 2017, the Company, acquired 51% ownership of PT Lancarjaya Mandiri Abadi through the purchase of 331,500 shares from Mr. Afandi with acquisition cost of Rp798,000,000,000. The Company recognized the assets and liabilities of LMA at fair values as at June 30, 2017.

Based on revaluation by KJPP Dasa'at, Yudistira and Partners in their report No. 00030/2.0041-00/BS/03/0384/1/II/2025 dated February 5, 2025 and No. 00168/2.0041-03/PI/07/0379/0/II/2024 dated February 19, 2024 market value of 51% of LMA equity as at December 31, 2024 amounting to Rp1.557.000.000.000 and Rp1,225,781,813,000, respectively.

Management believes that there were no indicators of impairment that existed on the goodwill for the years ended December 31, 2024 and 2023 that require the Company to perform impairment tests on goodwill, other than the current annual test disclosed in this Note.

Impairment test on goodwill
In assessing whether impairment on goodwill is required, the carrying value of goodwill is allocated to the relevant assets or cash-generating unit to obtain combined carrying value. The combined carrying value is compared with cash-generating unit's recoverable amount. The Company performs testing of goodwill impairment annually (on December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan *goodwill* yang dialokasikan ditentukan berdasarkan "nilai pakai" (*value-in-use*) dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan.

For impairment testing purposes, the recoverable amounts of the goodwill allocated are determined based on "value-in-use" using discounted cash flows method.

Asumsi yang digunakan
Jumlah terpulihkan *goodwill* ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pasar wajar LMA menggunakan arus kas yang didiskontokan dari rencana bisnis masa depan.

Key assumptions used
The recoverable amount of goodwill has been determined based on the fair market value of LMA using discounted cash flow projections from the business future plan.

Tingkat diskonto: tingkat diskonto sebelum pajak yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 9,07% dan 8,99% diperoleh dari biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak (WACC).

Discount rate: the pre-tax discount rate used as at December 31, 2024 and 2023 was 9,07% and 8,99%, respectively derived from the post-tax weighted average cost of capital (WACC).

Harga sewa: Harga sewa didasarkan pada estimasi manajemen dan data pasar yang tersedia.

Rental prices: Forecasted rental prices are based on management's estimates and available market data.

Beban operasi dan modal: Asumsi ini didasarkan pada perencanaan beban operasi dan modal perusahaan. Manajemen memiliki kontrol penuh atas biaya, dan yakin bahwa asumsi akan tercapai.

Operating and capital expenses: These assumptions are based on the Company's operating and capital expenses plan. The management has full control over the costs, and believes that assumptions will be achievable.

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat *goodwill* yang dialokasikan pada unit penghasil kas menjadi lebih tinggi dari nilai yang terpulihkan secara material.

Changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable amount, in particular the discount rate, can have significant impact on the result of the impairment assessment. Management believes that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to the cash-generating unit to materially exceed its recoverable amount.

Goodwill tersebut tidak diharapkan dapat dikurangkan untuk tujuan pelaporan pajak.

Goodwill is not expected to be deductible for tax purposes.

Estimasi nilai wajar ditetapkan dengan metode nilai pasar dan pendapatan.

The fair value was estimated by applying a market approach and income approach.

Tidak terdapat aset atau liabilitas kontinjensi.

There are no contingent assets or liabilities.

19. ASET TAK BERWUJUD / *19. INTANGIBLE ASSETS*

	2024				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* **Rp**	**Penambahan/** *Additions* **Rp**	**Pengurangan/** *Deductions* **Rp**	**Saldo Akhir/** *Ending Balance* **Rp**	
Biaya Perolehan					*Acquisition Cost*
Perangkat Lunak	12.212.940.607	5.150.940.000	–	17.363.880.607	*Software*
Akumulasi amortisasi					*Accumulated depreciation*
Perangkat Lunak	(8.958.206.860)	(1.309.287.338)	–	(10.833.048.198)	*Software*
Jumlah tercatat	**3.254.733.747**	**3.841.652.662**	–	**6.530.832.409**	*Net carrying value*

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Biaya Perolehan					***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak	10.321.161.737	1.891.778.870	--	12.212.940.607	*Software*
Akumulasi amortisasi					***Accumulated depreciation***
Perangkat Lunak	(7.361.871.039)	(1.596.335.821)	--	(8.958.206.860)	*Software*
Jumlah tercatat	**2.959.290.698**	**295.443.049**	**--**	**3.254.733.747**	***Net carrying value***

Software merupakan kepemilikan lisensi resmi dari SAP, *Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant*, *Autocad*, dan *Visio*. Beban amortisasi aset tak berwujud pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.309.287.338 dan Rp1.596.335.821 diakui di beban usaha (Catatan 32)

Software represents official licensed ownership of SAP, Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant, Autocad, and Visio. Amortization expense of intangible assets in 2024 and 2023 amounted to Rp1,309,287,338 and Rp1,596,335,821, respectively recognized in operation expenses (Note 32).

20. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA / *20. BANK LOANS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.000.000.000	56.931.340.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk - Unit Syariah	16.418.880.000	160.004.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	148.280.320.618	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk*
Sub Jumlah	**36.418.880.000**	**365.215.660.618**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	105.410.266.257	160.365.000.000	*PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank DKI	81.937.879.210	96.391.749.556	*PT Bank DKI*
PT Bank Central Asia Tbk	43.000.000.000	99.824.600.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub Jumlah	**230.348.145.467**	**356.581.349.556**	***Sub Total***
Utang Lembaga Keuangan Lain Perusahaan (Catatan 40)			***Loan from Other Financial Institutions The Company (Note 40)***
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	300.000.000.000	295.718.000.000	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Jumlah	**566.767.025.467**	**1.017.515.010.174**	***Total***

Kreditur/ *Creditor*	Nama Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ *Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	Pencairan/ *Drawdown* Rp	Pelunasan/ *Acquittance* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp	31 Desember/ *December 31, 2023* Rp
Perusahaan/ *The Company*								
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE)	300.000.000.000	18 Februari/ *February 18*, 2025	9,00%	1.056.883.062.713	702.981.950.061	300.000.000.000	295.718.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Fasilitas Modal Kerja Transaksional	400.000.000.000	25 Maret/ *March 25, 2025*	9,00%	143.428.340.000	287.013.460.000	16.418.880.000	160.004.000.000
PT Bank DKI	KMK Jasa Konstruksi	200.000.000.000	30 Juni/ *June 30, 2025*	9,25%	29.000.000.000	43.453.870.346	81.937.879.210	96.391.749.556
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	KMK Jasa Konstruksi	300.000.000.000	Januari 3/ *January 3, 2025*	9,15%	39.970.809.875	94.925.543.618	105.410.266.257	160.365.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	KMK Jasa Konstruksi	400.000.000.000	Januari 8/ *January 8, 2027*	10,00%	780.086.717.414	928.367.038.032	--	148.280.320.618
Entitas Anak/ *Subsidiary*								
PT Bank Central Asia Tbk	Term loan Revolving 1	80.000.000.000	12 Agustus/ *August 12, 2025*	8,00%	168.954.446.112	225.779.046.112	43.000.000.000	99.824.600.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital redit*	82.500.000.000	25 April/ *April 25, 2025*	8,50%	20.000.000.000	56.931.340.000	20.000.000.000	56.931.340.000
Jumlah/ *Total*					**2.238.323.376.114**	**2.339.452.248.169**	**566.767.025.467**	**1.017.515.010.174**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perusahaan
Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor sesuai dengan Akta No. 53 tanggal 18 Februari 2022. Pada tahun 2023, Perusahaan mendapatkan addendum fasilitas kredit melalui perjanjian kredit No. 014/A/LCC/II/2023, terkait dengan modal kerja. Pada tahun 2024, terdapat beberapa kali perubahan perjanjian kredit, terakhir melalui No. 125/A/LCC/IX//2024, mengenai perpanjangan kredit modal kerja ekspor.

Pinjaman ini dijamin dengan Fidusia atas seluruh piutang usaha pada proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman baik yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan Rp375.000.000.000 yang diikat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Piutang No. 54 tanggal 18 Februari 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Perusahaan
Perusahaan memperoleh Fasilitas Musyarakah Modal Kerja sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 29 September 2021 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 6 Februari 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan Fidusia atas seluruh piutang usaha pada proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman baik yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan Rp400.000.000.000 yang diikat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Piutang No. 03 tanggal 6 Februari 2023 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

The Company
The Company obtained an Export Working Capital Credit Facility in accordance with Deed No. 53 dated February 18, 2022. In 2023, the Company obtained an addendum to the credit facility through credit agreement No. 014/A/LCC/II/2023, related to working capital. In 2024, there were several changes to the credit agreement, most recently through No. 125/A/LCC/IX//2024, regarding regarding the extension of export working capital credit.

This loan is guaranteed by Fiduciary for all trade receivables on projects financed by existing and future loan facilities with a guarantee value of Rp375,000,000,000 which is bound by the Deed of Fiduciary Guarantee Agreement No. 54 dated February 18, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:
- *Interest Bearing Debt to Equity Ratio maximum of 3 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*
- *Current Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

The Company
The Company obtained a Musyarakah Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 27 dated September 29, 2021 with most recently amendment based on the Deed of Addendum to the Credit Agreement No. 03 dated February 6, 2023.

This loan is guaranteed by Fiduciary for all trade receivables on projects financed by existing and future loan facilities with a guarantee value of Rp400,000,000,000 which is bound by the Deed of Fiduciary Guarantee Agreement No. 03 dated February 6, 2023 by Notary Fathiah Helmi, S.H.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:
- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 3 times*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum 1 time.*

PT Bank DKI

Perusahaan
Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 22 Februari 2021. Pada tahun 2023, Perusahaan mendapatkan addendum fasilitas kredit melalui perjanjian kredit No. 11, terkait dengan modal kerja. Pada tahun 2024, terdapat perubahan perjanjian kredit melalui No. 17, mengenai perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi/Kontraktor.

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang Usaha dari Proyek Pemerintah Republik Indonesia yang dibiayai melalui APBN, Proyek BUMN, Proyek APBD DKI Jakarta, Proyek BUMD DKI Jakarta yang tidak sedang atau tidak akan diagunkan kepada pihak manapun selain Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Minimum sebesar 125% dari limit fasilitas kredit atau senilai Rp250.000.000.000.
   b. Umur piutang usaha maksimum 6 bulan.

   Atas piutang tersebut telah dilakukan pengikatan secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 13 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00499008.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 6 September 2021 dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00529734.AH.05.02 tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023.

2. Surat Pernyataan Jaminan dari Perusahaan sesuai Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 12 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat dihadapan Notaris Irfansyah, S.H.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 4,5 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimum 1 kali.

PT Bank DKI

The Company
The Company obtained a Working Capital Credit Facility in accordance with Deed No. 24 dated 22 February 2021. In 2023, the Company obtained an addendum to the credit facility through credit agreement No. 11, related to working capital. In 2024, there was a change in the credit agreement through No. 17, regarding the extension of the Construction/Contractor Services Working Capital Credit facility.

The loan is guaranteed by:

1. *Trade Receivables from Projects of the Government of the Republic of Indonesia financed through the APBN, BUMN Projects, DKI Jakarta APBD Projects, DKI Jakarta BUMD Projects which are not being or will not be pledged as collateral to any party other than Bank DKI with the following conditions:*
   a. *Minimum of 125% of the credit facility limit or Rp250,000,000,000.*
   b. *The maximum aging of trade receivables is 6 months.*

   Fiduciary binding has been carried out on these receivables based on the Deed of Fiduciary Guarantee No. 13 dated August 24, 2021 and has been registered with the Fiduciary Registration Office as evidenced by Fiduciary Guarantee Certificate No. W10.00499008.AH.05.01 tahun 2021 dated September 6, 2021 and Certificate of Change of Fiduciary Guarantee No. W10.00529734.AH.05.02 tahun 2023 dated October 18, 2023.

2. *Letter of Undertaking from the Company according to Deed of Statement and Commitment No. 12 dated August 24, 2021 made before Notary Irfansyah, S.H.*

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 4.5 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

LMA
Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Transaksional sesuai dengan Akta No. 100 tanggal 26 Oktober 2021. Pada tahun 2022, Perusahaan mendapatkan addendum fasilitas kredit melalui perjanjian kredit No. WCO.KP/0467/KMK/2021. Pada tahun 2024, terdapat perubahan perjanjian kredit melalui No. WCO.KP/0467/KMK/2021, mengenai perpanjangan fasilitas Fasilitas Kredit Modal Transaksional.

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Agunan *Non Fixed Asset*

   Piutang usaha atas seluruh *project* yang dibiayai oleh Bank, baik yang ada saat ini maupun tagihan yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp82.500.000.000 yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 102 tanggal 16 Oktober 2022 oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H.

2. Agunan *Fixed Aset*

   a. Tanah total seluas 7.876 m^2 beserta bangunan ruko, gudang dan *mess* serta sarana perlengkapan di atasnya yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa:

      - SHGB No. 02695 atas nama LMA.
      - SHGB No. 02696 atas nama LMA.
      - SHGB No. 02697 atas nama LMA.
      - SHGB No. 02698 atas nama LMA.
      - SHM No. 02889 atas nama Budi Antony.
      - SHM No. 146 atas nama Justian Styawan.
      - SHM No. 01400 atas nama Budi Antony.

      Atas SHGB tersebut telah diikat hak tanggungan peringkat pertama No. 02480/2021 dengan nilai sebesar Rp8.734.000.000.

   b. Tanah total seluas 3.165 m^2 yang terletak di Jalan Babakan Bogor RT 003 RW 006, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

LMA
The Company obtained a Transactional Capital Credit Facility in accordance with Deed No. 100 dated October 26, 2021. In 2022, the Company obtained an addendum to the credit facility through a credit agreement No. WCO.KP/0467/KMK/2021. In 2024, there was a change in the credit agreement through No. WCO.KP/0467/KMK/2021, regarding the extension of the Transactional Capital Credit Facility.

This loan is guaranteed with:

1. *Non-Fixed Asset Collateral*

   Trade receivable for all projects financed by the Bank, both current and future bills with a guaranteed value of Rp82,500,000,000 which has been tied with Fiduciary Guarantee Deed No. 102 dated October 16, 2022 by Notary Sri Ismiyati, S.H.

2. *Fixed Asset Collateral*

   a. The total land area of 7,876 sqm, along with the commercial building, warehouse, mess, and related facilities located in Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat with proof of ownership in the form of:

      - *SHGB No. 02695 on behalf of LMA.*
      - *SHGB No. 02696 on behalf of LMA.*
      - *SHGB No. 02697 on behalf of LMA.*
      - *SHGB No. 02698 on behalf of LMA.*
      - *SHM No. 02889 on behalf of Budi Antony.*
      - *SHM No. 146 on behalf of Justian Styawan.*
      - *SHM No. 01400 on behalf of Budi Antony.*

      The SHGB mentioned above is secured by a first-ranking mortgage No. 02480/2021 with a value of Rp8,734,000,000.

   b. The land area of 3,165 sqm located on Jalan Babakan Bogor RT 003 RW 006, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat with proof of ownership in the form of:

- SHM No. 00949 atas nama Justian Styawan.
- SHM No. 00943 atas nama Budi Antony.

c. Tanah seluas 8.666 m^2 terletak di Jalan Desa Dawuan Timur, RT 003 RW 008, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan yang saat ini masih berupa SHM 01415 atas nama Budi Antony.

Atas agunan tersebut akan dilakukan perubahan menjadi SHGB atas nama LMA untuk kemudian diikat Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp3.466.000.000.

3. Agunan lainnya berupa:

Jaminan Pribadi dari Afandi Tjandra yang telah diikat dengan Akta Jaminan Pribadi No. 103 tanggal 16 Oktober 2022 oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, LMA diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 2 kali.
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.

PT Bank Central Asia Tbk

LMA
Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Weliana Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:
   - SHM No. 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 atas nama Tjong Arafat Tjandra dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.
   - SHM No. 3518 dan 3288 atas nama Afandi dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.
   - SHM No. 3519 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.

- *SHM No. 00949 on behalf of Justian Styawan.*
- *SHM No. 00943 on behalf of Budi Antony.*

c. *The land area of 8,666 sqm located on Jalan Desa Dawuan Timur RT 003 RW 008, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat with proof of ownership which is currently still in the form of SHM 01415 on behalf of Budi Antony.*

The collateral will be changed to SHGB on behalf of LMA and then tied with Mortgage with a total value of Rp3,466,000,000.

3. *Other collateral in the form of:*

Personal Guarantee from Afandi Tjandra which has been bound by the Personal Guarantee Deed No. 103 dated October 16, 2022 by Notary Sri Ismiyati, S.H.

In connection with the loan, LMA is required to maintain the following financial covenants:

- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 2 times.*
- *Current Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank Central Asia Tbk

LMA
Based on the Deed of Credit Agreement Amendment No. 23 dated 24 February 2023 made before Weliana Salim, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This loan is secured by:

1. *A land area including buildings and everything that has been and or will be erected, planted and placed on the land with the following information and proof of ownership:*
   - *SHM No. 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 on behalf of Tjong Arafat Tjandra with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.*
   - *SHM No. 3518 and 3288 on behalf of Afandi with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.*
   - *SHM No. 3519 on behalf of Neni Junaedi with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.*

- SHGB No. 5989 dan 5990 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Jalan Casablanca I Blok BC Kaveling No. 2A dan 2B, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat.
- SHM No. 356, 357 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.
- SHM No. 363, 364, 370, 371, 377, 378, 384, 385, 391, 392 atas nama Afandi dengan lokasi tanah di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.
- SHM No. 398, 399, 411, 412, 417, 418, 422, 423 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.
- SHGB No. 4378 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Jalan Lingkar Luar Barat Komplek Perumahan Puri Mansion Blok B Nomor 15 Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
- SHGB No. 5261 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Blok/Nomor Kaveling AR.1-43, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasetia.
- SHGB No. 1001 dan 1002 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Jalan Pegangsaan Dua/Logistik Nomor 72, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan.
- SHGB No. 4062 dan 3987 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Komplek Perumahan Puri Mansion Jalan Buckingham 1 Nomor 6 dan 8, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
- SHGB No. 6977 atas nama PT Solusi Mandiri Propertindo dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Jakasampurna.

- *SHGB No. 5989 and 5990 on behalf of LMA with land location in Jalan Casablanca I Blok BC Kaveling No. 2A and 2B, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kepala Gading Barat.*
- *SHM No. 356, 357 on behalf of Neni Junaedi with land location in Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.*
- *SHM No. 363, 364, 370, 371, 377, 378, 384, 385, 391, 392 on behalf of Afandi with land location in Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.*
- *SHM No. 398, 399, 411, 412, 417, 418, 422, 423 on behalf of Neni Junaedi with land location in Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.*
- *SHGB No. 4378 on behalf of LMA with land location in Jalan Lingkar Luar Barat Komplek Perumahan Puri Mansion Blok B Nomor 15 Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.*
- *SHGB No. 5261 on behalf of Neni Junaedi with land location in Blok/Nomor Kaveling AR. 1-43, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasetia.*
- *SHGB No. 1001 and 1002 on behalf of LMA with land location in Jalan Pegangsaan Dua/Logistik Nomor 72, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan.*
- *SHGB No. 4062 and 3987 on behalf of LMA with land location in the Komplek Perumahan Puri Mansion Jalan Buckingham 1 Nomor 6 dan 8, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.*
- *SHGB No. 6977 on behalf of PT Solusi Mandiri Propertindo with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Keluarahan Jakasampurna.*

2. 13 unit Vibrating Sakai berikut peralatannya yang terletak di Jalan Raya Narogong 12,5 Nomor 18 Bekasi dan/atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Daftar Alat Berat *Vibrator Roller* tanggal 24 Desember 2014.

3. 44 unit Dump Truck Merk Hino Tipe FM 260 JD Tahun 2011 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kendaraan tanggal 24 Desember 2014.
4. Hak atas piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak Pemberi Agunan terhadap pihak manapun dengan nilai piutang sebesar Rp20.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang tanggal 15 Desember 2014 Nomor 325/LMA/DP/XII/2014 berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.
5. Jaminan Pribadi oleh Afandi Tjandra sebesar *unlimited*.
6. 3 bidang tanah dan bangunan girik berdasarkan akta jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah Nomor 06, 07 dan 08 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta.
7. 105 unit Dump Truck merk Hino tipe FM 260 JD yang akan dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 1.
8. 8 unit Dump Truck merk Hino tipe FM 260 JD yang akan dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2.
9. 26 unit Dump Truck merk Hino tipe FM 260 JD Tahun 2018 sebagaimana dijabarkan dalam Surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 yang merupakan pembaharuan dari Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2019 yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, LMA diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- Rasio EBITDA minimal sebesar 1 kali.
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* minimal sebesar 1,5 kali.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan
Perusahaan memperoleh Fasilitas *Non Cash Loan* sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 26 Desember 2022 dan tingkat diskonto sebesar 10% per tahun juga bersifat *reviewable*.

Perusahaan melakukan perpanjangan Fasilitas *Non Cash Loan* Akta No. 03 tanggal 8 Januari 2024 dengan jangka waktu sampai dengan 8 Januari 2027.

2. *13 units of Vibrating Sakai and their equipment located at Jalan Raya Narogong 12.5 Nomor 18 Bekasi and/or in the future are stored anywhere, as it turns out from the Vibrator Roller Heavy Equipment List dated December 24, 2014.*

3. *44 units of Hino Brand Dump Truck FM 260 JD Year 2011 as described in the Vehicle Register dated December 24, 2014.*
4. *The right of receivables that is now or in the future are the rights of the Collateral Giver to any party with a receivable value of Rp20,000,000,000 as stated in the Receivables List dated December 15, 2014 Number 325/LMA/DP/XII/2014 along with all amendments and updated from time to time.*

5. *Personal Guarantee by Afandi Tjandra of unlimited amount.*
6. *3 plots of land and girik buildings based on the deed of sale and purchase of buildings and relinquishment of land rights Numbers 06, 07 and 08 dated October 13, 2011 drawn up before Achmad Kiki Said, S.H., Notary in Jakarta.*
7. *105 units of Hino brand Dump Truck type FM 260 JD which will be financed by Investment Credit facility 1.*
8. *8 units of Hino brand Dump Truck type FM 260 JD which will be financed by Investment Credit facility 2.*
9. *26 units of Dump Truck Hino brand FM 260 JD Year 2018 as described in the Statement Letter dated April 13, 2021 which is a renewal of the Statement Letter dated May 13, 2019 which is financed by Investment Credit facility 2.*

In connection with the loan above, LMA is required to maintain the following financial covenants:

- *EBITDA Ratio minimum of 1 time.*
- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio minimum of 1.5 times.*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company
The Company obtained a Non Cash Loan Facility in accordance with the Deed of Addendum Credit Agreement No. 27 dated Desember 26, 2022, with discount rate 10.00% per annum and reviewable.

The Company extended the Non Cash Loan Facility Deed No. 03 dated January 8, 2024 with a term until January 8, 2027.

Pinjaman ini dijamin dengan:
1. Fidusia Piutang Usaha, yang akan diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp600.000.000.000.
2. Fidusia barang capital expenditure (capex) yang akan diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp375.000.000.000.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- Menjaga ekuitas selalu positif.
- Menjaga kolektabilitas fasilitas kredit tetap dalam keadaan baik.

Pinjaman ini dijamin dengan:
1. Piutang usaha telah dilakukan pengikatan secara fidusia atas nama PT Lancarjaya Mandiri Abadi dengan nilai jaminan sebesar Rp600.000.000.000, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01018244.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan akan dilakukan perubahan fidusia dengan nilai jaminan sebesar Rp630.000.000.000.
2. Piutang usaha telah dilakukan pengikatan secara fidusia atas nama PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dengan nilai jaminan sebesar Rp90.000.000.000.

Dari total fasilitas diatas, Grup telah menggunakan sebesar Rp148.280.320.618.

Perusahaan
Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 08 Januari 2024 dengan jangka waktu jatuh tempo 08 Januari 2025, dan tingkat bunga sebesar 10% per tahun juga bersifat *reviewable*.

Perusahaan juga memperoleh Fasilitas Transaksi Khusus sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 08 Januari 2024 dengan jangka waktu jatuh tempo 08 Januari 2025, dan tingkat bunga sebesar 10% per tahun juga bersifat *reviewable*.

Pinjaman ini dijamin dengan:
1. Fidusia Piutang Usaha, yang akan diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp600.000.000.000.
2. Fidusia barang capital expenditure (capex), yang akan diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp375.000.000.000.

The loan is guaranteed by:
1. *Fiduciary Accounts Receivable, which will be bound with a guarantee value of Rp600,000,000,000.*
2. *Fiduciary capital expenditure (capex) goods that will be bound with a guarantee value of Rp375,000,000,000.*

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:
- *Keep equity always positive.*
- *Maintain collectability of credit facilities in good condition.*

The loan is guaranteed by:
1. *Trade receivables have been fiduciary binding on behalf of PT Lancarjaya Mandiri Abadi with a collateral value of Rp600,000,000,000, as proven by Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01018244.AH.05.01 TAHUN 2022 dated August 2, 2022 and there will be a change in fiduciary with a collateral value of Rp630,000,000,000.*
2. *Fiduciary binding has been carried out on these trade receivables based on behalf of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk with loan Rp90,000,000,000.*

From the total facilitiy above, the Group has used Rp148,280,320,618.

The Company
The Company obtained a Working Capital Credit Facility (KMK) in accordance with Deed of Credit Agreement No. 02 dated January 08, 2024 with a maturity date of January 08, 2025, and a interest rate of 10% per annum and is also reviewable.

The Company also obtained a Special Transaction Facility in accordance with Deed of Credit Agreement No. 03 dated January 08, 2024 with a maturity date of January 08, 2025, and an interest rate of 10% per annum and is also reviewable.

The loan is guaranteed by:
1. *Fiduciary of Accounts Receivable, which will be bound with a pledge value of Rp600,000,000,000.*
2. *Fiduciary of capital expenditure (capex) goods, which will be bound with a guarantee value of Rp375,000,000,000.*

LMA
Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi memperoleh Fasilitas Non Cash Loan sesuai dengan Akta Perubahan terakhir Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 07 Januari 2025 dengan jangka waktu jatuh tempo dari 09 Januari 2025 hingga 09 Januari 2026, dan tingkat diskonto sebesar 8% per tahun juga bersifat *reviewable*.

Pinjaman ini dijamin dengan:
1. Agunan Pokok Piutang usaha yang telah diikat secara fidusia atas nama PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI dengan nilai penjaminan sebesar Rp600.000.000.000.

2. Agunan Tambahan berupa: Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Babakan Madang, seluas 1.706 M² , yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang. Desa Babakan Madang.

Pada tahun berjalan, Perusahaan telah melunasi fasilitas diatas sebesar Rp148.280.320.618.

Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka pendek tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

LMA
Subsidiary PT Lancarjaya Mandiri Abadi obtained a Non Cash Loan Facility in accordance with the latest Deed of Amendment to Credit Agreement No. 05 dated January 07, 2025 with a maturity period from January 09, 2025 to January 09, 2026, and a discount rate of 8% per annum and is also reviewable.

The loan is guaranteed by:
1. *Principal Collateral Trade receivables that have been fiduciarily bound under the name of PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI with pledge value of Rp600,000,000,000.*

2. *Additional Collateral in the form of: A plot of land with Building Rights Title Certificate Number 141/Babakan Madang, covering an area of 1,706 sqm, located in West Java Province, Bogor Regency, Babakan Madang District. Babakan Madang Village.*

In the current year, the Company has fully paid off the facility amounting to Rp148,280,320,618.

Compliance with loan covenants

As at December 31, 2024 and 2023 the Group has complied with all of the covenants of the above mentioned short term loans as stipulated in the respective loan agreements.

21. UTANG USAHA / *21. TRADE PAYABLES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	11.107.927.484	31.857.903.326	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	3.217.925.712	4.708.607.832	*PT Wijaya Karya Beton Tbk*
PT Bhirawa Steel	1.433.603.184	3.356.616.663	*PT Bhirawa Steel*
Lain-lain (di bawah Rp3 Miliar)	3.166.859.631	2.916.267.112	*Others (below Rp3 Billion)*
Sub Jumlah	**18.926.316.011**	**42.839.394.933**	***Sub Total***
Pihak ketiga	1.676.107.992.739	1.069.464.993.244	***Third parties***
Jumlah	**1.695.034.308.750**	**1.112.304.388.177**	***Total***

Utang pihak ketiga merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan proyek dan alat berat.

Thierd parties payable represents payables to suppliers of material procurement related to project activities and heavy equipment.

22. UANG MUKA PEMBERI KERJA / *22. ADVANCES FROM PROJECT OWNER*

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja yang secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

Advances from project owners represents advances received from customers and will be proportionately compensanted to billings in accordance with physical progress of the projects.

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT PPRO Sampurna Jaya	1.339.757.122	1.339.757.122	*PT PPRO Sampurna Jaya*
Lain-lain (di bawah Rp1 Miliar)	231.534.244	231.534.244	*Others (below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**1.571.291.366**	**1.571.291.366**	***Sub Total***
Pihak ketiga	**375.659.878.214**	**40.202.684.154**	***Third parties***
Jumlah	**377.231.169.580**	**41.773.975.520**	***Total***

23. UTANG LAIN-LAIN / *23. OTHER PAYABLES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Jangka pendek			***Short-term***
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
Utang dividen	85.156.343.401	85.156.343.401	*Dividend payable*
KSO PPRE - Yala Persada	–	15.000.000.000	*KSO PPRE - Yala Persada*
Lain-lain (di bawah Rp1 Miliar)	288.558.832	110.500.837	*Others (below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**85.444.902.233**	**100.266.844.238**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
Jaminan Lelang	14.012.959.260	–	*Auction Guarantee*
Koperasi saham	1.903.342.560	1.609.470.696	*Shares union*
Asuransi	108.344.849	935.803.418	*Insurance*
Sub Jumlah	**16.024.646.669**	**2.545.274.114**	***Sub Total***
Jumlah	**101.469.548.902**	**102.812.118.352**	***Total***
Jangka panjang			***Long term***
Pihak berelasi			***Related party***
PT PP (Persero) Tbk	147.098.224.703	295.065.713.630	*PT PP (Persero) Tbk*
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(11.301.291.770)	(168.067.998.063)	*Current maturity*
Jumlah - bersih	**135.796.932.933**	**126.997.715.567**	***Total - net***

Utang dividen merupakan dividen bagian PT PP (Persero) Tbk dan YKKPP yang belum dibayarkan oleh Perusahaan atas laba tahun 2018 sampai dengan 2020.

Dividend payable is a share of dividends PT PP (Persero) Tbk and YKKPP which have not been paid by the Company for profits from 2018 to 2020.

Utang kepada PT PP (Persero) Tbk merupakan pinjaman dana untuk keperluan modal kerja Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 5667/EXT/PP/DFH/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan telah diperpanjang dengan Pakta Integritas No. 080/SK/DIR/PPRE/X/2021 dengan jangka waktu pinjaman hingga 15 Oktober 2023 dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, perpanjangan perjanjian pinjaman tersebut masih dalam proses.

Payables to PT PP (Persero) Tbk represents loan funds for the Company's working capital purposes in accordance with the Borrowing and Loan Agreement No. 5667/EXT/PP/DFH/2018 dated December 14, 2018 and has been extended by Integrity Pact No. 080/SK/DIR/PPRE/X/2021 with a loan term until October 15, 2023 and bears interest at 8% per year. Until the issuance of the financial report, the renewal of loan agreement still on process.

24. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

Merupakan utang atas pembelian aset tetap berupa *dump truck* kepada PT Lancarjaya Nusantara Enjiniring pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Nihil dan Rp78.117.117.117

24. PROPERTY AND EQUIPMENT PURCHASE PAYABLES

Represents a payables for property and equipment purchases in form of dump trucks to PT Lancarjaya Nusantara Enjiniring as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Nil and Rp78,117,117,117 respectively.

25. LIABILITAS SEWA / *25. LEASE LIABILITIES*

	2024 Rp	2023 Rp	
PT Mandiri Tunas Finance	361.237.838.924	36.572.624.306	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	97.733.896.506	85.200.734.289	*PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia*
PT Surya Artha Nusantara Finance	55.548.008.571	26.514.545.652	*PT Surya Artha Nusantara Finance*
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	53.222.810.287	16.657.271.330	*PT Mitsui Leasing Capital Indonesia*
PT Komatsu Astra Finance	48.490.439.165	42.793.213.450	*PT Komatsu Astra Finance*
PT Bumiputera BOT Finance	45.559.109.993	19.445.617.663	*PT Bumiputera BOT Finance*
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	38.566.864.289	63.578.798.532	*PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
PT ORIX Indonesia Finance	36.776.559.666	18.925.024.757	*PT ORIX Indonesia Finance*
PT SMFL Leasing Indonesia	18.482.566.748	35.895.192.892	*PT SMFL Leasing Indonesia*
PT Takari Kokoh Sejahtera	15.760.092.905	13.468.409	*PT Takari Kokoh Sejahtera*
PT Maybank Indonesia Finance	3.780.531.636	554.597.398	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT Chandra Shakti Utama Leasing	3.182.158.815	1.000.682.868	*PT Chandra Shakti Utama Leasing*
PT Dipo Star Finance	2.462.912.272	--	*PT Dipo Star Finance*
PT BFI Finance Indonesia	2.342.572.500	--	*PT BFI Finance Indonesia*
PT Astra Credit Company	1.439.322.106	4.171.572.892	*PT Astra Credit Company*
PT Toyota Astra Finance	1.027.619.442	--	*PT Toyota Astra Finance*
PT BCA Finance	195.134.410	--	*PT BCA Finance*
Jumlah	**785.808.438.235**	**351.323.344.438**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(66.057.260.803)	(188.085.341.586)	*Current maturity*
Jumlah - bersih	**719.751.177.432**	**163.238.002.852**	***Total - net***

Nilai dari liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The amounts of lease liabilities are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	351.323.344.438	388.432.803.360	*Beginning Balance*
Penambahan Tahun Berjalan	437.270.159.732	136.557.837.531	*Addition for The Period*
Bunga atas Liabilitas Sewa (Catatan 36)	70.840.442.665	33.925.571.339	*Interest on Lease Liabilities (Note 36)*
Pembayaran Liabilitas Sewa	(73.625.508.600)	(207.592.867.792)	*Repayment of Lease Liabilities*
Saldo Akhir	**785.808.438.235**	**351.323.344.438**	***Ending Balance***
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(66.057.260.803)	(188.085.341.586)	*Part Matures within One Year*
Bagian Jangka Panjang	**719.751.177.432**	**163.238.002.852**	***Long-term Portion***

Grup menandatangani perjanjian pembiayaan untuk kendaraan dan alat berat dengan tingkat suku bunga tetap.

The Group signed financing agreements for vehicles and heavy equipment with fixed interest rates.

Kendaraan, alat berat tersebut dipakai sebagai jaminan untuk liabilitas sewa pembiayaan yang bersangkutan. Grup tidak memiliki batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

These vehicles and heavy equipments are pledged as collateral for the underlying finance lease liabilities. The Group have no covenants under these loan facility agreements.

26. IMBALAN KERJA / *EMPLOYEE BENEFITS*

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 609 dan 494 karyawan.

The total number of employees eligible for the benefits until December 31, 2024 and 2023 amounted to 609 and 494 employees, respectively.

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Enny Diah Awal pada tahun 2024 dan 2023 dengan Laporan No. 24069A/PPPS/AP/01/2025 tetanggal 24 Januari 2025 dan No. 23018A/PPPK/AP/01/2024 tanggal 9 Januari 2024. Asumsi utama yang digunakan dalam penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The calculation of post-employment benefits was calculated by independent actuary KKA Enny Diah Awal in 2024 and 2023 with Report No. 24069A/PPPS/AP/01/2025 dated January 24, 2025 and No. 23018A/PPPK/AP/01/2024 dated January 9, 2024. The main assumptions used in the actuarial assessment are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Program Pesangon Pensiun	19.311.277.033	17.207.560.832	*Retirement Severance Program*
Program Cuti Besar Berimbalan	557.087.381	--	*Paid Long Leave Program*
Jumlah	**19.868.364.414**	**17.207.560.832**	***Total***

Program Pesangon Pensiun / *Retirement Severance Program*

	2024 Rp	2023 Rp	
Tingkat diskonto	7,10%	6,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	9,0%	9,0%	*Salary increment rate*
Tingkat mortalitas	TMI IV	TMI IV	*Mortality rate*

Beban imbalan pasti yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in consolidated profit or loss and comprehensive income in respect of the defined benefit plans are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya jasa:			*Service cost:*
Biaya jasa kini	2.421.324.888	2.325.174.378	*Current service cost*
Biaya jasa lalu dan (keuntungan) kerugian atas penyelesaian	25.325.909	(478.977.398)	*Past service cost and (gain) loss from settlements*
Biaya bunga	1.132.706.373	1.062.737.788	*Interest cost*
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	**3.579.357.170**	**2.908.934.768**	*Components of defined benefit costs recognized in profit or loss*

	2024 Rp	2023 Rp	
Perubahan asumsi keuangan	(70.559.526)	196.911.880	*Changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	(13.394.301)	24.609.502	*Experience adjustment*
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**(83.953.827)**	**221.521.382**	*Component of defined benefit costs recognized in other comprehensive income*
Jumlah	**3.495.403.343**	**3.130.456.150**	***Total***

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of the defined benefits liabilities are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Kewajiban imbalan pasti - awal	17.207.560.832	14.755.488.637	*Defined benefit liabilities - beginning*
Biaya jasa kini	2.421.324.888	2.325.174.378	*Current service costs*
Biaya bunga	1.132.706.373	1.062.737.788	*Interest costs*
Perubahan asumsi keuangan	(70.559.526)	196.911.880	*Changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	(13.394.301)	24.609.502	*Experience adjustment*
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	–	(478.977.398)	*Past service cost, including losses (gain) on curtailments*
Pembayaran manfaat	(1.366.361.233)	(678.383.955)	*Benefits paid*
Kewajiban imbalan pasti - akhir	**19.311.277.033**	**17.207.560.832**	***Defined benefits liabilities - ending***

Program imbalan pascakerja memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Post-employment benefits program expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Program Cuti Besar Berimbalan

Paid Long Leave Program

	2024 Rp	2023 Rp	
Tingkat diskonto	7,10%	6,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	9,0%	9,0%	*Salary increment rate*
Tingkat mortalitas	TMI IV	TMI IV	*Mortality rate*

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of the defined benefits liabilities are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Kewajiban imbalan pasti - awal	–	–	*Defined benefit liabilities - beginning*
Biaya jasa kini	700.921.764	–	*Current service costs*
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	–	–	*Past service cost, including losses (gain) on curtailments*
Pembayaran manfaat	(143.834.383)	–	*Benefits paid*
Kewajiban imbalan pasti - akhir	**557.087.381**	**–**	***Defined benefits liabilities - ending***

Risiko investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan real estat. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estate untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; Namun, sebagian akan di*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko harapan hidup
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan tingkat upah yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and salary rate. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	2024 Rp	2023 Rp
Perubahan Tingkat Diskonto/		
Changes in Discount Rate		
Tingkat Diskonto/ *Discount Rate +1%*	25.009.931.923	16.160.496.397
Tingkat Diskonto/ *Discount Rate -1%*	26.121.214.551	18.073.668.734
Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/		
Changes in Salary Increase Rate		
Tingkat Upah/ *Salary Rate +1%*	26.114.521.082	18.204.036.083
Tingkat Upah/ *Salary Rate -1%*	25.010.483.577	16.043.088.589

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the post-employment benefits liabilities as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the post-employment benefits liabilities has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

27. UTANG BANK - JANGKA PANJANG / *27. LONG TERM - BANK LOANS*

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk - Unit Syariah	109.813.473.052	55.819.713.909	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk - Sharia Unit*
Sub Jumlah	**109.813.473.052**	**55.819.713.909**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25.036.059.734	25.267.748.112	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank DKI	24.549.805.249	–	*PT Bank DKI*
PT Bank Permata Tbk	8.800.677.271	18.064.661.800	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	--	87.976.075.752	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub Jumlah	**58.386.542.254**	**131.308.485.664**	***Sub Total***
Jumlah	**168.200.015.306**	**187.128.199.573**	***Jumlah***
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	168.200.015.307	187.128.199.573	*Current maturity*
Bagian jangka panjang			***Long-term portion***
Pihak berelasi	31.362.997.536	–	*Related party*
Pihak ketiga	12.325.562.435	117.195.576.372	*Third parties*
Jumlah	**43.688.559.971**	**117.195.576.372**	***Total***

Kreditur/ *Creditor*	Nama Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ *Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	Pencairan/ *Drawdown* 2024 Rp	Pelunasan/ *Acquittance* 2024 Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp	31 Desember/ *December 31, 2023* Rp
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Fasilitas Modal Kerja Transaksional	400.000.000.000	25 Maret/ *25 March*, 2025	9,00%	160.000.000.000	74.643.243.321	141.176.470.588	55.819.713.909
PT Bank CIMBNiaga Tbk	Pembiayaan Investasi iB - Ijarah Muntahiya Bit Tamlik	150.000.000.000	27 April/ *April 27*, 2025	8,75%	--	25.267.748.115	37.361.622.169	62.629.370.284
PT Bank DKI	KMK Jasa Konstruksi	200.000.000.000	30 Juni/ *June 30*, 2025	9,35%	75.000.000.000	120.450.194.750	24.549.805.250	70.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	Term Financing - Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)	350.000.000.000	31 Oktober/ *October 31*, 2025	9,00%	--	19.097.938.729	8.800.677.271	27.898.616.000
PT Bank Central Asia Tbk	Term loan Revolving 2	88.000.000.000	24 Juni/ *June 24*, 2024	8,75%	--	87.976.075.752	-	87.976.075.752
Jumlah/ *Total*					**235.000.000.000**	**327.435.200.667**	**211.888.575.278**	**304.323.775.945**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk / *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

Perusahaan / *The Company*

Perusahaan memperoleh *Line Facility* sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 26 Juni 2019 dan telah diperpanjang dengan Akta Addendum III Perjanjian Line Facility berdasarkan prinsip musyarakah, wakalah dan kafalah No. 27 tanggal 29 September 2021.

The Company obtained a Line Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 07 dated June 26, 2019 and has been extended by Deed Addendum III to the Line Facility Agreement based on the principles of musyarakah, wakalah and kafalah No. 27 dated September 29, 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha yang ada maupun yang akan ada atas proyek yang dibiayai, diikat fidusia sebesar Rp500.000.000.000 sesuai dengan Addendum I Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 29 September 2021 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00589993.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

This loan is secured by existing and future trade receivables for the project being financed, tied with a fiduciary amount of Rp500,000,000,000 in accordance with Addendum I of the Fiduciary Guarantee Deed No. 28 dated September 29, 2021 by Notary Fathiah Helmi, S.H., and Certificate of Change of Fiduciary Guarantee No. W10.00589993.AH.05.02 TAHUN 2021 dated October 27, 2021.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.

In connection with the loan mentioned, the Company is required to maintain the following financial covenants:
- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 3 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank Permata Tbk

PT Bank Permata Tbk

Perusahaan
Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai Akta Perjanjian pemberian fasilitas perbankan (ketentuan khusus) No. 145 tanggal 31 Oktober 2019, dengan nilai fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2025.

The Company
The Company obtained a Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed Of Banking Facility Agreement (special provisions) No. 145 dated October 31, 2019 with a loan facility maximum of Rp350,000,000,000 with term loan up to June 30, 2025.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas tagihan/piutang yang berasal dari proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank, baik yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada, dengan nilai minimum sebesar 125% dengan nilai penjaminan yang akan ditentukan kemudian berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.

This loan is collateralized by fiduciary on claims/receivables originating from projects financed by the Bank, both existing and future ones, with a minimum value of 125% with the value of the guarantee to be determined later based on the Fiduciary Guarantee Deed.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

In connection with the loan, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Ratio Interest Bearing Debt* terhadap jumlah ekuitas maksimum sebesar 2 kali.

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio to total equity maximum of 2 times.*

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perusahaan
Berdasarkan perubahan terakhir atas Perjanjian Kredit No. 119/CB/JKT/2017 tanggal 29 September 2017 dengan surat No. 303/AMD/CB/JKT/2023 tanggal 30 November 2023, Perusahaan menerima Fasilitas Pembiayaan Investasi (PI) untuk membiayai belanja modal peralatan berat dengan plafond sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 5 Mei 2026. Fee administrasi sebesar 0,75% dari plafon pada saat penandatanganan dan selanjutnya sebesar 0,50% flat dari limit plafon.

The Company
Based on the latest amendment to Credit Agreement No. 119/CB/JKT/2017 dated September 29, 2017 with letter No. 303/AMD/CB/JKT/2023 dated November 30, 2023, the Company received an Investment Financing Facility (PI) to finance heavy equipment capital expenditure with a limit of Rp150,000,000,000 with term loan up to May 5, 2026. The administration fee is 0.75% of the plafond at the time of signing and then a flat 0.50% of the plafond limit.

Pinjaman ini dijamin dengan gadai agunan tunai (*cash collateral*) deposito dengan nilai penjaminan setara 15% dari plafond Fasilitas PI dengan ketentuan gadai agunan tunai ini dapat diikat dengan gadai agunan tunai per transaksi atau sebelum dari setiap penarikan dengan nilai penjaminan per penarikan setara 15% dari nilai penarikan Fasilitas PI.

This loan is guaranteed by a cash collateral guaranteed by (cash collateral) deposit with a guarantee value equivalent to 15% of the PI Facility limit with the provisions that this cash collateral guarantee can be tied to a cash collateral guarantee per transaction or before each withdrawal with a guarantee value per withdrawal equal to 15% of PI Facility withdrawal value.

Dalam hal Perusahaan tidak melakukan pembayaran utang, maka Bank akan menarik atau mengambil kepemilikan 100% atas peralatan berat yang menjadi objek pembiayaan untuk dilakukan penjualan.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- *Debt to Ebitda Ratio* maksimum sebesar 4 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* lebih besar atau sama dengan 1,1 kali.

PT Bank DKI

Perusahaan
Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Desember 2021 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 15 November 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan:
a. Tagihan dan/atau potensi tagihan proyek yang dijaminkan kepada PT Bank DKI akan dilakukan pengikatan nilai penjaminan sebesar 125% dari limit fasilitas kredit yang digunakan atau sebesar Rp87.500.000.000.
b. Tagihan dan potensi tagihan proyek yang dijaminkan kepada PT Bank DKI akan dilakukan review secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 4,5 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimum sebesar 100%.

PT Bank Central Asia Tbk

Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi memperoleh perpanjangan fasilitas kredit berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00022, tanggal 6 Januari 2025, dan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025. Adapun beberapa fasilitas kredit yang diperoleh adalah :
1. Fasilitas Kredit Lokal dengan plafon Rp 20.000.000.000
2. Fasilitas Kredit Multi time loan revolving, bank garansi dan SKBDN dengan plafon Rp 101.500.000.000
3. Fasilitas Multi time loan revolving 2 dan bank garansi dengan plafon Rp 88.000.000.000
4. Fasilitas Bank Garansi dengan plafon Rp 75.000.000.000

In the event that the Company does not make loan payments, the Bank will withdraw or take over 100% ownership of the heavy equipment that is the object of financing for sale.

In connection with the loan, the Company is required to maintain the following financial covenants:
- *Debt to Ebitda Ratio maximum of 4 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio is greater than or equal to 1.1 times.*

PT Bank DKI

The Company
The Company obtained a Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 24 dated December 22, 2021 with the latest amendment based on the Deed of Addendum to the Credit Agreement No. 11 dated November 15, 2023.

The loan is guaranteed by:
a. Invoice and potential project invoice loaned to PT Bank DKI will be loaned binding with loan of 125% of the credit facility limit or Rp87,500,000,000.
b. Invoice and potential project invoice guaranteed to PT Bank DKI will be reviewed perodic every 3 (three) months.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:
- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum 4.5 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 100%.*

PT Bank Central Asia Tbk

Subsidiary PT Lancarjaya Mandiri Abadi obtained an extension of credit facilities based on the Notice of Extension of Term (SPPJ) No. 00022, dated January 6, 2025. Some of the credit facilities obtained are:

1. *Local Credit Facility with a ceiling of IDR 20,000,000,000*
2. *Multi time loan revolving credit facility, bank guarantee and SKBDN with a ceiling of Rp 101,500,000,000*
3. *Multi time loan revolving facility 2 and bank guarantee with a ceiling of Rp 88,000,000,000*
4. *Bank guarantee facility with a ceiling of Rp 75,000,000,000*

5. Fasilitas Multi 3 Standby L/C case by case dan Kredit Investasi dengan plafon Rp 130.000.000.000 dengan sublimit kredit investasi sebesar Rp 104.000.000.000

LMA telah melunasi pinjaman bank sebesar Rp87.976.075.752 pada 20 Desember 2024.

5. *Multi 3 Standby L/C case by case and Investment Credit facility with a ceiling of Rp 130,000,000,000 with a sublimit of Rp 104,000,000,000.*

LMA has paid off the bank loan of Rp87.976.075.752 on December 20, 2024.

28. UTANG OBLIGASI / *BONDS PAYABLE*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 rincian obligasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024 and 2023, the bond details of the Company are as follows:

	Suku bunga/ *Interest rate*	Jangka Waktu/ *Term*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	2024 Rp	2023 Rp
Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022 - Serie A	9,5%	3 tahun/ *3 years*	30 Juni/ *June 30 2025*	102.275.000.000	102.275.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022 - Serie B	10,5%	5 tahun/ *5 years*	30 Juni/ *June 30 2027*	100.705.000.000	100.705.000.000
Jumlah				**202.980.000.000**	**202.980.000.000**
Biaya Emisi Obligasi yang belum diamortisasi *Unamortized cost*				(404.390.000)	(729.786.000)
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun *Current maturity*				101.661.350.000	--
Utang obligasi jangka panjang/ *Long term bonds payable*				**100.914.260.000**	**202.250.214.000**

Pada tanggal 15 Maret 2024, PT Pefindo telah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan Perusahaan dengan hasil peringkat BBB+.

On March 15, 2024, PT Pefindo conducted a rating of the Company's Sustainable Bond with a result of BBB+.

Wali amanat atas Obligasi Perusahaan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The trustee of the Company's Bonds is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan rasio keuangan sebagai berikut:
- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Interest bearing debt to equity ratio* maksimum 3 kali.
- Perbandingan EBITDA dengan beban bunga pinjaman minimum 1,5 kali.

The Company is bound by some financial ratio restrictions as follows:
- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Interest-bearing debt to equity ratio maximum of 3 times.*
- *The ratio of EBITDA to interest bearing debt minimum of 1.5 times.*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi semua persyaratan tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian terkait.

As at December 31, 2024 and 2023, the Grup has complied with all of the covenants of the above mentioned as stipulated in the agreement.

29. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

a. Modal ditempatkan dan disetor / *Subscribed and paid-up capital*

Berdasarkan Akta Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 11 tanggal 17 Juli 2017 oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp2.400.000.000.000 yang terbagi atas 2.400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

Based on the Deed of Shareholders Circular Decree No. 11 dated July 17, 2017 by Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., notary in Jakarta, the Company's authorized capital amounted to Rp2,400,000,000,000 divided into 2,400,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share.

Berdasarkan Akta Notaris No. 27 tertanggal 14 Agustus 2017 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per saham atas saham Perusahaan dari nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 menjadi nilai nominal per saham sebesar Rp100 dan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 4.239.330.000 lembar saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Perdana Saham Perusahaan (*Initial Public Offering*) dengan nilai nominal Rp100.

Based on the Notarial Deed No. 27 dated August 14, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the shareholders approved the change in the par value per share of the Company's shares from par value per share of Rp1,000,000 to par value per share of Rp100 and issued shares in deposits of 4,239,330,000 new shares which will be offered to the public through Initial Public Offering with par value of Rp100.

Saham Perusahaan ditawarkan perdana kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 November 2017 sejumlah 2.351.221.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-442/D.04/2017 tanggal 16 November 2017 seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sejumlah 10.224.271.000 saham.

The Company's shares of stock were initially offered to the public and listed on the Indonesia Stock Exchange on November 20, 2017 of 2,351,221,000 shares with a par value of Rp100 per share. In accordance with the approval of the Financial Services Authority (OJK) No. S-442/D.04/2017 dated November 16, 2017, over all subscribed and fully paid shares of the Company amounted to 10,224,271,000 shares.

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares subscribed and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount* Rp	*Shareholders*
PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	76,99%	787.148.000.000	*PT PP (Persero) Tbk*
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	1.570.000	0,01%	157.000.000	*Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan*
Masyarakat	2.243.162.300	23,00%	224.316.230.000	*Public*
Sub Jumlah	**10.116.212.300**	100,00%	**1.011.621.230.000**	*Sub Total*
Saham Treasury	108.058.700		10.805.870.000	*Treasury Shares*
Jumlah	**10.224.271.000**		**1.022.427.100.000**	***Total***

b. Tambahan modal disetor

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham yang diterbitkan dalam rangka IPO pada 24 November 2017 dengan hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan saham sebagai berikut:

b. Additional paid-in capital

This account represents the difference between the total par value of new shares issued in connection with the IPO conducted in November 24, 2017 and the related proceeds, after netting off the share issuance costs are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Agio saham	775.902.930.000	775.902.930.000	*Agio stock*
Beban emisi saham	(26.342.768.462)	(26.342.768.462)	*Share issuance costs*
Jumlah	**749.560.161.538**	**749.560.161.538**	***Total***

c. Dividen

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 5 Juni 2024 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp80.215.559.126, sebagai berikut:

- Sebesar Rp4.010.777.956 atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib.
- Sisa sebesar Rp76.204.781.170 atau 95% dibukukan sebagai saldo Laba Ditahan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40 tanggal 24 Mei 2023 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp100.751.654.542, sebagai berikut:

- Sebesar Rp5.037.582.727 atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib.
- Sisa sebesar Rp95.714.071.815 atau 95% dibukukan sebagai saldo Laba Ditahan.

c. Dividend

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in Deed No. 14 dated June 5, 2024 by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, shareholders agree the use of net profit for the 2023 financial year attributable to the owner of the parent entity in the amount of Rp80,215,559,126 are as follows:

- *An amount of Rp4,010,777,956 or more or less 5% is used as Mandatory Reserve.*
- *The remaining Rp76,204,781,170 or 95% is recorded as Retained Earnings balance.*

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in Deed No. 40 dated May 24, 2023 by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, shareholders agree the use of net profit for the 2022 financial year attributable to the owner of the parent entity in the amount of Rp100,751,654,542, are as follows:

- *An amount of Rp5,037,582,727 or more or less 5% is used as Mandatory Reserve.*
- *The remaining Rp95,714,071,815 or 95% is recorded as Retained Earnings balance.*

d. Saham treasuri

Pada tahun 2020, Perusahaan membeli kembali saham melalui Bursa Efek Indonesia sebesar 108.058.700 lembar saham dengan total nilai perolehan sebesar Rp18.629.958.023 yang dicatat sebagai saham treasuri yang merupakan pengurang ekuitas.

Hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan belum melepaskan kembali saham treasuri sehingga tidak terdapat selisih harga perolehan dan harga pelepasan saham treasuri.

d. Treasury shares

In 2020, the Company bought back shares through the Indonesia Stock Exchange amounting to 108,058,700 shares with a total acquisition value of Rp18,629,958,023 which was recorded as treasury shares and reduced equity.

Until the year ended December 31, 2024, the Company has not relinquished its treasury shares, so there is no difference between the acquisition price and the disposal price of the treasury shares.

30. PENDAPATAN / *30. REVENUE*

Rincian pendapatan berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut: / *Details of revenue by business sectors are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Konstruksi	3.506.814.769.569	3.212.761.338.603	*Construction*
Sewa	146.446.914.391	107.486.287.112	*Rental*
Ready mix	61.619.260.395	80.617.611.557	*Ready mix*
Mining	75.928.267.204	–	*Mining*
Jumlah	**3.790.809.211.559**	**3.400.865.237.272**	***Total***

Rincian pelanggan dengan pendapatan melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut: / *Details of revenue more than 10% from the total revenue are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
PT Weda Bay Nickel	1.828.158.167.731	978.515.654.820	*PT Weda Bay Nickel*
PT PP (Persero) Tbk	403.999.661.030	768.958.948.215	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Translingkar Kita Jaya	–	278.919.088.703	*PT Translingkar Kita Jaya*
Jumlah	**2.232.157.828.761**	**2.026.393.691.738**	***Total***

Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: / *Details of revenue based on customers are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
PT PP (Persero) Tbk	403.999.661.030	768.958.948.215	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Hutama Karya Infrastruktur	47.176.456.220	1.338.127.800	PT Hutama Karya Infrastruktur
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	13.139.523.057	--	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
LMA Konsorsium	–	53.527.657.922	*LMA Konsorsium*
PT Brantas Abipraya (Persero)	–	43.323.669.595	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
Lain-lain (di bawah Rp3 Miliar)	2.116.938.653	3.380.731.979	*Others (below Rp3 Billion)*
Sub Jumlah	**466.432.578.960**	**870.529.135.511**	***Sub Total***
Pihak ketiga	**3.324.376.632.599**	**2.530.336.101.761**	***Third parties***
Jumlah	**3.790.809.211.559**	**3.400.865.237.272**	***Total***

31. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *31. COST OF REVENUE*

	2024 Rp	2023 Rp	
Konstruksi			***Construction***
Upah	350.407.924.851	458.533.420.668	*Wages*
Bahan	854.180.349.424	946.930.402.686	*Material*
Overhead	676.661.405.104	571.650.335.152	*Overhead*
Penyusutan	533.972.186.169	488.191.924.827	*Depreciation*
Alat	388.034.938.641	196.287.819.153	*Equipment*
Sub Jumlah	**2.803.256.804.189**	**2.661.593.902.486**	***Sub Total***
Sewa			***Rental***
Upah	9.375.393.077	1.767.492.701	*Wages*
Bahan	32.362.192.542	5.542.136.879	*Material*
Overhead	14.080.039.835	34.043.150.058	*Overhead*
Penyusutan	11.519.483.539	2.776.571.351	*Depreciation*
Alat	28.596.337.478	21.544.224.382	*Equipment*
Sub Jumlah	**95.933.446.471**	**65.673.575.371**	***Sub Total***

	2024 Rp	2023 Rp	
Ready Mix			***Ready Mix***
Upah	3.390.252.996	460.650.490	*Wages*
Bahan	32.072.707.823	62.306.626.676	*Material*
Overhead	8.406.645.221	9.875.655.595	*Overhead*
Penyusutan	2.587.185.801	4.415.090.857	*Depreciation*
Alat	5.223.969.063	2.974.556.056	*Equipment*
Sub Jumlah	**51.680.760.904**	**80.032.579.674**	***Sub Total***
Mining			***Mining***
Upah	6.182.931.875	--	*Wages*
Bahan	5.744.238.241	--	*Material*
Overhead	18.360.480.152	--	*Overhead*
Penyusutan	24.257.118.345	--	*Depreciation*
Alat	7.173.947.199	--	*Equipment*
Sub Jumlah	**61.718.715.812**	**--**	***Sub Total***
Jumlah	**3.012.589.727.376**	**2.807.300.057.531**	***Total***

32. BEBAN USAHA / *32. OPERATING EXPENSES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya pegawai	73.952.120.286	65.858.942.005	*Employees expenses*
Biaya umum	22.020.743.891	17.548.183.627	*Other expenses*
Biaya penyusutan gedung (Catatan 17)	5.740.176.324	5.221.899.486	*Depreciation building (Note 17)*
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 19)	1.309.287.338	1.596.335.821	*Amortization of intangible assets (Note 19)*
Jumlah	**103.022.327.839**	**90.225.360.939**	***Total***

33. KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *33. IMPAIRMENT LOSSES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Piutang Usaha (Catatan 6)	26.314.287.500	10.365.235.119	*Trade receivables (Note 6)*
Piutang Retensi (Catatan 7)	15.634.721.189	2.930.659.267	*Retention receivables (Note 7)*
Tagihan bruto pemberi kerja (Catatan 8)	14.811.030.987	5.385.912.591	*Gross amount due from customers (Note 8)*
Investasi Jangka Pendek (Catatan 5)	3.916.575	--	*Short Term Investments (Note 5)*
Bank dan deposito (Catatan 4)	137.596.922	--	*Banks and deposits (Note 4)*
Jumlah	**56.901.553.173**	**18.681.806.977**	***Total***

34 BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA / *34. SHARE IN PROFIT OF JOINT VENTURE*

Pembagian laba berasal dari ventura bersama sebagai berikut:

Profit sharing comes from the following joint ventures:

	2024	2023	
LMA Konsorsium	--	10.706.201.031	*LMA Konsorsium*
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	--	2.250.000.000	*PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO*
PP Presisi - Yalapersada KSO	--	1.250.000.000	*PP Presisi - Yalapersada KSO*
PP Presisi - Sarana KSO	--	500.000.000	*PP Presisi - Sarana KSO*
Jumlah	**--**	**14.706.201.031**	***Total***

35. PENDAPATAN KEUANGAN / *35. FINANCE INCOME*

	2024	2023	
Pendapatan keuangan dari sewa	800.421.546	1.402.256.029	*Finance income from lease*
Jumlah	**800.421.546**	**1.402.256.029**	***Total***

36. BEBAN KEUANGAN / *36. FINANCE COSTS*

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban bunga dari utang			*Interest expense on*
Bank	260.864.909.837	196.589.043.339	*Bank loans*
Bunga beban liabilitas sewa	70.840.442.665	33.925.571.339	*Interest expenses of lease liabilities*
Jumlah	**331.705.352.502**	**230.514.614.678**	***Total***

37. PENDAPATAN LAINNYA / *37. OTHER INCOMES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan diluar usaha	55.210.832.526	44.868.764.364	*Non operating income*
Pendapatan jasa giro - net	4.832.832.785	4.559.672.411	*Current account income - net*
Pemulihan kerugian penurunan nilai (Catatan 4, 5, 6, 7 dan 8)	332.989.713	3.950.163.675	*Recovery of impairment losses (Notes 4, 5, 6, 7 and 8)*
Bagi hasil murabahah	–	634.018.176	*Murabahah profit sharing*
Pendapatan bunga deposito - net	2.516.820.000	415.455.923	*Deposito interest income - net*
Jumlah	**62.893.475.024**	**54.428.074.549**	***Total***

38. BEBAN LAINNYA / *38. OTHER EXPENSES*

	2024 Rp	2023 Rp	
Administrasi bank	34.064.534.358	28.629.434.663	*Bank administration*
Beban di luar usaha	17.300.566.157	17.554.191.090	*Non operating expense*
Amortisasi emisi obligasi	325.396.000	325.396.000	*Amortization of bond issuance*
Jumlah	**51.690.496.515**	**46.509.021.753**	***Total***

39. LABA DASAR PER SAHAM / *39. BASIC EARNINGS PER SHARE*

Laba dasar per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham rata-rata tertimbang biasa yang beredar sepanjang tahun.

Basic earning per share is calculated by dividing the profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2024 Rp	2023 Rp	
Laba bersih kepada pemilik entitas induk	90.339.548.237	80.215.559.126	*Net profit attributable to owners of the parent entity*
Jumlah rata-rata saham biasa yang beredar	10.224.271.000	10.224.271.000	*The average number of ordinary shares outstanding*
Laba dasar per saham	**8,84**	**7,85**	***Basic earning per share***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at December 31, 2024 and 2023, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earning per share is equivalent to basic earning per share.

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Grup melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Group has engaged in trade and other transactions with related parties. Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of relationship and transaction

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT PP (Persero) Tbk	Pemegang saham pengendali langsung Perusahaan pemberi kerja/ *Direct controlling shareholder of the Company project owner*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner* Utang lain-lain/ *Other payables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
YKKPP (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan)	Pemegang saham/ *Shareholder*	Utang lain-lain/ *Other payables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Properti Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Urban	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Utang usaha/ *Trade payables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Infrastruktur	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Energi	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pendapatan usaha/ *Revenue*
Dewan Komisaris dan Direksi/ *Board of Commisisoners and Directors*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*
Karyawan Kunci/ Key employees	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*
PT Grahaprima Realtindo	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
PT PPRO Sampurna Jaya	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ Retention receivables Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*
PT PP Properti Suramadu	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT PP Properti Suramadu	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*
PT Limasland Realty Cilegon	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*
PT Odira Energy Karang Agung	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pendapatan usaha/ Revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ *Bank loans*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ *Bank loans*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Investasi jangka pendek/ *Short term invesments*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ *Bank loans*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ Bank loans
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
PT Angkasa Pura I (Persero)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Pendapatan usaha/ Revenue
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ Trade payables
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT Dahana (Persero)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Hutama Karya Infrastruktur	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables*
PP Presisi - Sarana KSO	Ventura bersama/ *Joint venture*	Piutang lain-lain/ *Other receivables* Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	Ventura bersama/ *Joint venture*	Piutang lain-lain/ Other receivables Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
KSO PPRE - RPJ	Ventura bersama/ *Joint venture*	Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*

Related parties	*Nature of relationship*	*Nature of transaction*
KSO PPRE - Yala Persada Indonesia	Ventura bersama/ *Joint venture*	Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
LMA Konsorsium	Ventura bersama/ Joint venture	Piutang usaha/ Trade receivables Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Piutang lain-lain/ *Other receivables* Utang usaha/ *Trade payables* Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner* Pendapatan usaha/ *Revenue* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang retensi/ Retention receivables Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Varia Usaha Beton	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ Retention receivables Tagihan bruto pemberi kerja/ Gross amount due from customers
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ Trade receivables Piutang retensi/ Retention receivables Tagihan bruto pemberi kerja/ Gross amount due from customers
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ Trade receivables Pendapatan usaha/ Revenue
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Utang usaha/ *Trade payables*

Harga jual dan harga pembelian ditentukan berdasarkan perjanjian dan memiliki syarat dan kondisi yang sama pada pihak berelasi dan ketiga.

The selling price and purchase price are determined based on the agreement and have the same terms and conditions on the related and third parties.

b. Saldo / ***b. Balances***

	2024		2023		
	% dari Total Aset/ *% from Total Assets*	Nilai/ *Amount* Rp	% dari Total Aset/ *% from Total Assets*	Nilai/ *Amount* Rp	
Kas dan setara kas	2,93%	233.936.552.828	0,95%	68.150.551.953	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	1,13%	90.000.000.000	1,26%	90.000.000.000	*Short term investments*
Piutang usaha	5,14%	410.684.384.593	9,75%	698.869.891.730	*Trade receivables*
Piutang retensi	0,49%	38.916.189.334	2,19%	157.071.742.704	*Retention receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	5,86%	468.462.331.666	8,78%	628.759.605.595	*Gross amount due from customers*
Piutang lain-lain	0,07%	5.950.575.752	0,09%	6.692.418.042	*Other receivables*

	2024		2023		
	% dari Total Liabilitas/ *% from Total Liabilities*	Nilai/ *Amount* Rp	% dari Total Liabilitas/ *% from Total Liabilities*	Nilai/ *Amount* Rp	
Utang usaha	0,42%	18.926.316.009	1,11%	42.839.394.933	*Trade payables*
Utang lain-lain	5,12%	232.543.126.940	10,27%	395.332.557.868	*Other payables*
Uang muka pemberi kerja	0,03%	1.571.291.366	0,04%	1.571.291.366	*Advances from project owner*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	8,67%	393.628.280.000	17,17%	660.933.660.618	*Bank loans and other financial institution*
Utang bank - jangka panjang	3,11%	141.176.470.588	1,45%	55.819.713.909	*Long term - bank loans*
Pendapatan	1,23%	466.432.578.960	25,60%	870.529.135.511	*Revenue*

Biaya remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan kunci untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The remuneration costs for the Board of Commissioners, Directors and Key Employees for the year ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Komisaris	2.332.566.822	2.456.899.367	*Commissioner*
Direksi	9.466.353.803	7.951.162.969	*Directors*
Jumlah	**11.798.920.625**	**10.408.062.336**	***Total***

41. SEGMEN OPERASI

Manajemen memonitor hasil operasi segmen bisnis untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

a. Segmen primer

Segmen primer Grup dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha atau produk adalah sebagai berikut:

41. OPERATING SEGMENT

Management monitors the operating results of its business segments for the purpose of decision making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with the operating profit or loss in the consolidated financial statements.

a. Primary segment

The Group's primary segments are grouped based on the type of business or products produced. Segment information by type of business or product are as follows:

	2024					
Uraian	Konstruksi/ *Construction* Rp	*Ready Mix* Rp	Sewa/ *Rent* Rp	*Mining* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	*Description*
Jumlah aset	6.916.468.803.023	97.682.053.994	495.036.980.885	139.660.737.265	7.648.848.575.168	*Total assets*
Jumlah liabilitas	3.756.507.154.598	53.053.566.084	268.866.962.817	75.853.238.653	4.154.280.922.152	*Total liabilities*
Pendapatan	3.506.814.769.569	61.619.260.395	146.446.914.391	75.928.267.204	3.790.809.211.559	*Revenue*
Harga pokok pendapatan	(2.803.110.057.499)	(51.680.760.904)	(96.080.193.161)	(61.718.715.812)	(3.012.589.727.376)	*Cost of revenue*
Beban usaha	(93.157.905.992)	(1.315.679.411)	(6.667.652.214)	(1.881.090.222)	(103.022.327.839)	*Operating expenses*
Pendapatan keuangan	800.421.546	--	--	--	800.421.546	*Finance income*
Pendapatan lainnya	56.871.404.060	803.201.131	4.070.494.492	1.148.375.341	62.893.475.024	*Other incomes*
Beban lainnya	(46.741.114.436)	(660.129.930)	(3.345.432.595)	(943.819.554)	(51.690.496.515)	*Other expenses*
Bagian laba ventura bersama	--	--	--	--	--	*Share in profit of joint venture*
Kerugian penurunan nilai	(51.453.210.702)	(726.679.386)	(3.682.694.567)	(1.038.968.518)	(56.901.553.173)	*Impairment losses*
Beban keuangan	(299.944.455.669)	(4.236.148.727)	(21.468.122.245)	(6.056.625.861)	(331.705.352.502)	*Finance costs*
Pajak:					--	*Taxes:*
Final	(92.444.809.994)	-	-	(2.516.474.027)	(94.961.284.021)	*Final*
Non final	--	--	(9.534.755.388)	--	(9.534.755.388)	*Non Final*
Jumlah	**177.635.040.882**	**3.803.063.168**	**203.803.325**	**2.920.948.552**	**194.097.611.315**	***Total***

Uraian	2023 Konstruksi/ *Construction* Rp	*Ready Mix* Rp	Sewa/ *Rent* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	*Description*
Jumlah aset	6.771.367.161.238	168.699.033.264	224.923.963.569	7.164.990.158.071	*Total assets*
Jumlah liabilitas	3.639.851.679.244	90.021.577.919	120.024.458.472	3.849.897.715.635	*Total liabilities*
Pendapatan	3.212.761.338.603	80.617.611.557	107.486.287.112	3.400.865.237.272	*Revenue*
Harga pokok pendapatan	(2.661.593.902.486)	(80.032.579.674)	(65.673.575.371)	(2.807.300.057.531)	*Cost of revenue*
Beban usaha	(82.529.001.883)	(120.583.499)	(7.575.775.557)	(90.225.360.939)	*Operating expenses*
Pendapatan keuangan	1.402.256.029	–	–	1.402.256.029	*Finance income*
Pendapatan lainnya	49.485.533.977	77.782.808	4.864.757.764	54.428.074.549	*Other incomes*
Beban lainnya	(41.630.913.329)	(78.256.177)	(4.799.852.247)	(46.509.021.753)	*Other expenses*
Bagian laba ventura bersama	14.599.139.021	–	107.062.010	14.706.201.031	*Share in profit of joint venture*
Kerugian penurunan nilai	(17.225.884.833)	(23.099.141)	(1.432.823.003)	(18.681.806.977)	*Impairment losses*
Beban keuangan	(209.502.657.550)	(331.728.400)	(20.680.228.728)	(230.514.614.678)	*Finance costs*
Pajak:					*Taxes:*
Final	(96.382.840.152)	–	–	(96.382.840.152)	*Final*
Non final	--	–	(9.006.796.783)	(9.006.796.783)	*Non final*
Jumlah	**169.383.067.397**	**109.147.473**	**3.289.055.199**	**172.781.270.069**	***Total***

b. Segmen sekunder

Grup beroperasi dan terdaftar di Indonesia. Seluruh kegiatan konstruksi dan penjualan barang dilakukan di Indonesia dengan pelanggan dalam negeri.

b. Secondary segment

The Group are operating and registered in Indonesia. All construction and sales activities are carried out in Indonesia with domestic customers.

42. PERJANJIAN DAN KOMITMEN

42. AGREEMENTS AND COMMITMENTS

1. Grup mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *The Group has commitments to carry out the following construction work:*

Nama proyek/ *Name of project*	Nilai Kontrak/ *Value of contract* Rp	Pemberi kerja/ *Owner project*	Mulai/ *Start*	Selesai/ *End*
Secondary Hauling Service Weda Bay	2.735.957.951.000	PT WEDABAY NICKEL	06/09/2021	06/09/2025
Mining Development Operation Weda Bay	1.432.372.052.451	PT WEDABAY NICKEL	30/11/2021	30/11/2027
Pekerjaan Quarry Development Mines of Bahadopi Block 2 & 3	338.135.569.399	PT. PP (PERSERO) TBK	31/01/2023	21/04/2025
Pekerjaan Above Ground And Infrastructure Mines of Bahadopi 2 & 3	357.814.121.252	PT. PP (PERSERO) TBK	31/01/2023	30/06/2025
Mining Operation Tofu	2.847.402.657.560	PT WEDABAY NICKEL	16/07/2023	15/04/2027
Proyek Penghamparan & Pemadatan Aspal Bandara VVIP IKN	105.278.434.486	PP - BAP - RE, KSO	14/12/2023	30/11/2024
Proyek Penghamparan & Pemadatan Agregat dan Aspal Jalan Kebangsaan Sumbu Barat IKN	33.357.939.331	PP - MARKINAH, KSO	01/02/2024	30/09/2024
PEK. Upah & Mixing & Pengiriman Beton IKN	22.800.000.000	PT KARYA LOGISTIK NUSANTARA	09/10/2024	03/02/2025
Batching Plant Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	69.554.000.000	WIKA - PP - KMK - HKI, KSO	13/11/2023	28/02/2025
Hauling Road Tofu to Position Weda Bay	205.890.852.733	PT WEDABAY NICKEL	15/09/2024	28/02/2025
Haul Road Construction (STA 0+000 to 87+200)	4.222.627.139.694	PT Sembada Sarana Transportasi	10/09/2024	10/03/2026
Jasa Pemborongan Pembangunan jalan tol kediri-tulungagung ruas akses tol bandara dhoho kediri seksi 2	1.100.000.000.000	PT Surya Sapta Agung Tol	31/05/2014	31/05/2025
Pemenuhan sebagian kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan udara) Paket Kontruksi fisik	400.279.482.298	PP-BAP-RE KSO	13/12/2023	15/11/2024
Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3	230.412.177.458	PP - WASKITA - WIKA - KSO	10/07/2023	28/02/2025
Pembangunan Bendungan Wayapu Paket 1	101.680.990.500	PP-ADHI KSO	15/07/2024	29/03/2025
Pekerjaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B :Rencana Outer Ring Road - S	45.999.170.520	Abipraya-Bumi Karsa-CPA, KSO	30/08/2023	25/02/2025
Proyek Lot 3 Pantai Serang - Sumbersih	41.724.251.802	Abipraya Naviri JO	24/05/2024	17/01/2025
Precinct Core IKN	4.012.964.004	Nindya - Jaya Konstruksi - SWS, KSO	30/09/2024	01/04/2025
Pembangunan Hunian Vertikal 4 tower TNI di ibu Kota Negara	3.815.212.080	PP-BAP-NK, KSO	28/11/2024	30/01/2025

2. Perjanjian kerjasama operasi

PP Presisi - Sarana KSO
Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/ppre-sarana/KSO/GORR/IV/2022, Perusahaan bersama dengan PT Sarana MultiKarya Indonesia membentuk kerjasama operasi untuk pengerjaan proyek pembangunan jembatan GORR segmen 1 STA 7700 dan STA 8500 di Gorontalo.

PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO
Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/PPRE-DPIKSO/JLKAMB4/I/2022, Perusahaan bersama dengan PT Duta Pratama Indah membentuk kerjasama operasi untuk pengerjaan proyek pembangunan jalur KA Lintas Medan - Binjai km 2+850 s/d km 3+290.

PP Presisi - Yalapersada KSO
Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Operasi No. 022/PPPRESISI-YALAPERSADAKSO/SMLK/X/2022, Perusahaan bersama dengan PT Permata Anugerah Yalapersada membentuk kerjasama operasi untuk pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana PP Ukurlaran SKPT Saumlaki.

PPRE - RPJ KSO
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No. 017/PPRE-RPJ/KSO/DKI/V/2022, Perusahaan bersama dengan PT Runggu Prima Jaya membentuk kerjasama operasi untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengambilan dan Treatment Sampah Badan Air Melalui Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung Segmen TB Simatupang.

2. Agreement of joint operation

PP Presisi - Sarana KSO
Based on the Joint Operation Agreement letter No. 001/ppre-sarana/KSO/GORR/IV/2022, the Company and PT Sarana MultiKarya Indonesia formed a joint operation for the construction project of GORR bridge segment 1 STA 7700 and STA 8500 in Gorontalo.

PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO
Based on the Joint Operation Agreement No. 01/PPRE-DPIKSO/JLKAMB4/I/2022, the Company and PT Duta Pratama Indah formed a joint operation for the construction project of the railway of Medan - Binjai km 2+850 to km 3+290.

PP Presisi - Yalapersada KSO
Based on the Joint Operation Agreement No. 022/PPPRESISI-YALAPERSADAKSO/SMLK/X/2022, the Company and PT Permata Anugerah Yalapersada formed a joint operation for the construction of infrastructure and facilities for Ukurlaran SKPT Saumlaki.

PPRE - RPJ KSO
Based on the Joint Operation Agreement No. 017/PPRE-RPJ/KSO/DKI/V/2022, the Company and PT Runggu Prima Jaya formed a joint operation for the construction of a waste collection and treatment system from water bodies through river engineering in the Kali Ciliwung segment TB Simatupang.

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko harga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi melakukan identifikasi, evaluasi, dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai mata uang, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including, interest rate risk, and price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group's overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board of Directors identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as currency risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non derivative financial instruments and the investment of excess liquidity.

a) Faktor-faktor risiko keuangan

1) Risiko pasar

Kebijakan manajemen risiko Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Grup tidak terdampak terhadap risiko tingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan liabilitas tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga.

2) Risiko tingkat suku bunga

Risiko arus kas tingkat bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel.

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga. Risiko tingkat suku bunga dari kas, piutang non-usaha, piutang retensi, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, dan proyek dalam pelaksanaan tidak signifikan.

Profil pinjaman Grup adalah sebagai berikut:

a) Financial risk factors

1) Market risk

The Group's risk management policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and to minimize potential adverse effects on the Group's financial risk.

The Group has no impact on interest rate risk arising from the impact of changes in interest rates on certain assets and liabilities that contain an interest rate component.

2) Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that changes in market interest rates will impact cash flows arising from variable rate financial instruments.

The Group's interest rate risk primarily arises from its loans. Loans issued at floating rates expose the Group to cash flow interest rate risk. Loans issued at fixed rates expose the Group to fair value interest rate risk. The interest rate risk from cash, non-trade trade receivables, retention receivables, gross contractual amount due from customers and project under construction is not significant.

The Group's loans profile are as follows:

	2024		2023		
	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ *Weighted average interest rate*	Saldo/ *Balance* (Dalam juta)/ *(In Millions)*	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ *Weighted average interest rate*	Saldo/ *Balance* (Dalam juta)/ *(In Millions)*	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	8,92%	594.846.770	8	1.017.515	*Bank loans and other financial institution*
Utang bank - jangka panjang	9,31%	597.995.395	9	304.324	*Long term - bank loans*
Liabilitas sewa	324,02%	661.292.359	8	351.323	*Lease liabilities*
Utang obligasi	10,00%	202.576	10	202.250	*Bonds payable*
Eksposure neto atas risiko arus kas tingkat suku bunga		1.854.337.100		1.875.412	***Net exposure to cash flow interest rate risk***

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang lebih tinggi/ rendah 100 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/ tinggi sebesar Rp13.685 Juta (Desember 2023: Rp18.754 Juta).

As at December 31, 2024, if interest rates on floating rate loans had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit after tax for the year would have been lower/ higher by Rp13,685 Million (December 2023: Rp18,754 Million).

3) Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha dan lain-lain. Grup menempatkan saldo bank dan deposito berjangka pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.

Grup memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit. Karena itu, Grup memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

4) Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga kecukupan kas, serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Grup mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang bruto yang dimiliki Grup dalam jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Selain itu, dilakukan proyeksi arus kas jangka panjang untuk membantu Grup dalam merencanakan kebutuhan pendanaan dalam jangka panjang.

Grup memonitor pergerakan perkiraan kebutuhan likuiditas untuk memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional serta untuk senantiasa memelihara kelonggaran likuiditas Grup terhadap fasilitas pinjaman yang belum digunakan, sehingga Grup tidak melampaui batas pinjaman atau batasan-batasan untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

3) Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

The credit risk of the Group is primarily attributed to its cash in banks, time deposits, trade and other receivables. The Group places their bank balances and time deposits to the credit trusted financial institutions.

The Group has established policies to obtain sustainable revenue growth by minimizing losses due to credit risk exposure. Accordingly, the Group have established a policy to ensure that transactions are made with customers who has good credit reputation. Management conducts ongoing supervision to reduce credit risk exposure at reporting date.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

4) Liquidity risk

Purdent liquidity risk management includes managing the profile of loan maturities and funding sources, maintaining sufficient cash, and ensuring the availability of funding from an adequate amount of committed credit facilities and the ability to close out market positions. The Group's ability to fund its loan requirements is managed by maintaining diversified funding sources with adequate committed funding lines from high quality lenders and by monitoring rolling short term forecasts of the Group's cash and gross debt on the basis of expected cash flows. In addition, long term cash flows are projected to assist with the Group's long term debt financing plans.

The Group monitors rolling forecasts of the liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its unused committed loan facilities at all times so that the Group does not breach loan limits or covenants on any of its loan facilities.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan non-derivatif Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The table below analyze the Group's non-derivative financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity dates. The amounts disclosed in the table are the contract undiscounted cash flows.

	2024					
	Jatuh Tempo/ ≤1 tahun/ *Maturity Date/ ≤1 year/* Rp	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 year Rp	Lebih dari 2 tahun *More than 2 year* Rp	Jumlah *Total*	Biaya Emisi/ *Cost of Issuance* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Amounts* Rp
Utang usaha/ *Account payable*	1.695.034.308.750	–	--	1.695.034.308.750	--	1.695.034.308.750
Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*	377.231.169.580	–	--	377.231.169.580	--	377.231.169.580
Liabilitas sewa/ *Lease Liabilities*	660.572.608.029.413	351.079.416.595	368.671.760.837	661.292.359.206.845	--	661.292.359.206.845
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Bank loans and other financial institution*	336.649.228.145.894	594.846.769.848.565	3.148.625.316.027	934.644.623.310.486	--	934.644.623.310.486
Utang Lainnya/ *Other Liabilities*	112.770.840.673	50.640.589.532	85.156.343.401	248.567.773.606	--	248.567.773.606
Utang obligasi/ *Bonds payable*	102.275.000.000	–	100.705.000.000	202.980.000.000	(404.390.000)	202.575.610.000
Jumlah liabilitas keuangan	**999.509.147.494.310**	**595.248.489.854.692**	**3.703.158.420.265**	**1.598.460.795.769.270**	**(404.390.000)**	**1.598.460.391.379.270**

	2023					
	Jatuh Tempo/ ≤1 tahun/ *Maturity Date/ ≤1 year/* Rp	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 year Rp	Lebih dari 2 tahun *More than 2 year* Rp	Jumlah *Total*	Biaya Emisi/ *Cost of Issuance* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Amounts* Rp
Utang usaha/ *Account payable*	1.112.304.388.177	–	--	1.112.304.388.177	--	1.112.304.388.177
Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*	41.773.975.520	–	--	41.773.975.520	--	41.773.975.520
Utang pembelian aset tetap/ *Property and equipment purchase payable*	78.117.117.117	–	--	78.117.117.117	--	78.117.117.117
Liabilitas sewa/ *Lease Liabilities*	188.085.341.586	660.669.788.771.462		660.857.874.113.048	--	660.857.874.113.048
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Bank loans and other financial institution*	1.017.515.010.174	187.128.199.573	117.195.576.372	1.321.838.786.119	--	1.321.838.786.119
Utang Lainnya/ *Other Liabilities*	270.880.116.415	41.841.372.166	85.156.343.401	397.877.831.982	--	397.877.831.982
Utang obligasi/ *Bonds payable*	--	102.275.000.000	100.705.000.000	202.980.000.000	(729.786.000)	202.250.214.000
Jumlah liabilitas keuangan	**2.708.675.948.989**	**661.001.033.343.201**	**303.056.919.773**	**664.012.766.211.963**	**(729.786.000)**	**664.012.036.425.963**

b) Manajemen permodalan

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang termasuk utang bank, utang obligasi dan liabilitas sewa pembiayaan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, kas dan setara kas dan modal tersedia bagi para pemegang saham dari Grup, modal saham dan laba ditahan.

b) Capital management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance.

The Group's capital structure consists of debt including bank debt, bond debt and finance lease liabilities in the consolidated financial statement notes, cash and cash equivalents, and available equity for the Group's shareholders, share capital and retained earnings.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan review struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Group's Board of Directors regularly reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

Rasio pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The ratios as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
*) Dalam juta			*) In million
Jumlah pinjaman	1.767.039	1.875.412	Total loans
Dikurangi:			Less:
Kas dan setara kas	(268.063)	(161.747)	Cash and cashequivalents
Liabilitas - bersih	**1.498.976**	**1.713.665**	Liabilities - net
Jumlah ekuitas	3.494.568	3.315.092	Total equity
Rasio utang terhadap modal	**42,9%**	**51,7%**	***Net payable to equity rasio***

c) Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan amortisasi.

Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena memiliki jatuh tempo yang singkat sedangkan liabilitas keuangan tidak lancar memiliki tingkat bunga pasar.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada:

1) Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana entitas dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
2) Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
3) Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

c) Fair value of financial instruments

Fair value of financial instruments carried at amortized cost.

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities measured at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values because of short term maturities while the noncurrent financial liabilities carry market rate of interest.

Fair value measurements are recognized in the consolidated statement of financial position.

Measurement of fair value based on:

1) Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
2) Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
3) Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

44. REKLASIFIKASI / *RECLASSIFICATION*

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Some accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2023, have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2024, as follows:

	2023			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification* Rp	*Reklasifikasi/ Reclassification* Rp	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification* Rp	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				***CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara Kas	3.734.276.034	(3.734.276.034)	158.012.909.569	*Cash and cash equivalents*
Aset lainnya	--	3.734.276.034	3.734.276.034	*Other asset*

45. TRANSAKSI NON KAS / *NON CASH TRANSACTIONS*

a) Selama tahun berjalan, Grup melakukan aktivitas investasi dan pendanaan non kas yang tidak tercermin dalam laporan arus kas konsolidasian yaitu:

a) *During the current year, the Group entered into the following non-cash investing and financing activites which are not reflected in consolidated statements of cash flows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Penambahan aset tetap melalui:			***Acquisition of assets through:***
Utang usaha	--	78.117.117.117	*Trade payables*
Pembebanan biaya amortisasi emisi obligasi	325.396.000	325.396.000	*Amortization expense for bond issuance*
Saling hapus penerimaan dari ventura bersama dengan utang usaha	--	78.799.232.596	*Net-off proceed from joint venture with trade payables*

b) Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

b) *The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2024 and 2023, are as follows:*

	2024 Rp	Arus kas/ *Cash flows* Rp	Non kas/ *Non cash* Rp	2024 Rp
Liabilitas sewa/ *Lease Liabilities*	351.323.344.438	(73.625.608.600)	508.110.702.397	785.808.438.235
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Bank loan and other financial institution*	972.219.673.466	(193.564.072.722)	--	778.655.600.744
Utang Lainnya/ *Other Liabilities*	295.065.713.630	(147.967.488.927)	--	147.098.224.703
Utang obligasi/ *Bonds payable*	202.250.214.000	--	325.396.000	202.575.610.000
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**1.820.858.945.534**	**(415.157.170.249)**	**508.436.098.397**	**1.914.137.873.682**

	2023 Rp	Arus kas/ *Cash flows* Rp	Non kas/ *Non cash* Rp	2023 Rp
Utang Non bank/ *Non-Bank Debt*	388.432.803.360	(173.667.296.453)	136.557.837.531	351.323.344.438
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Bank loan and other financial institution*	1.333.105.526.015	(360.885.852.549)	–	972.219.673.466
Utang Lainnya/ *Other Liabilities*	126.810.073.741	168.255.639.889	–	295.065.713.630
Utang obligasi/ *Bonds payable*	201.924.818.000	–	325.396.000	202.250.214.000
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**2.050.273.221.116**	**(366.297.509.113)**	**136.883.233.531**	**1.820.858.945.534**

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 15 Februari 2025, Perusahaan melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terkait jangka waktu pinjaman dan perubahan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE)/AR *Financing*, serta beberapa perubahan lainnya. Perubahan tersebut disepakati melalui kesepakatan Perubahan Keempat Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 015/A/LCC/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

46. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On February 15, 2025, the Company extended the loan facility at Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia related to the loan period and changes to the Export Working Capital Credit Facility (KMKE)/AR Financing, as well as several other changes. The changes were agreed through the agreement of the Fourth Amendment to the Export Working Capital Credit Agreement No. 015/A/LCC/II/2025 dated February 26, 2025.

47. STANDAR BARU DAN AMENDEMEN ATAS STANDAR YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;
- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai
- untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan:
- Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;

47. NEW ACCOUNTING STANDARD AND AMENDMENT TO STANDARDS WHICH HAS BEEN ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;*
- *PSAK 117: Insurance Contract; and*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 Comparative Information.*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 103: Business Combinations;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale*
- *and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments;*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers;*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 216: Fixed Assets;*
- *PSAK 219: Employee Benefits;*

- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 236: Impairment of Assets;*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities*
- *and Contingent Assets;*
- *PSAK 238: Intangible Assets; and*
- *PSAK 240: Investment Property.*

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation those new standard and amendments to standards.

48. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh direktur untuk diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2025.

48. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements and the supplementary information were the responsibilities of management and were approved by the director and authorized for issued on March 5, 2025.

*****

PRESISI

2024

Laporan Tahunan
Annual Report

PT PP Presisi Tbk

Plaza PP, Plaza PP Lt. 7
Jl. TB Simatupang No. 57. Pasar rebo, Jakarta Timur
13760
Phone : (021) 8414119
(021) 824 83255
(021) 824 83240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id
divisi.peralatan@pp-presisi.co.id

